PEMERINTAH
KABUPATEN
DELI SERDANG

DELI SERDANG SEHAT



dr. H. ASRI LUDIN TAMBUNAN, M.Ked(PD)., Sp.PD

Bupati Deli Serdang



LOM LOM SUWONDO, SS

Wakil Bupati Deli Serdang

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

2025







SALINAN

BUPATI DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 Nomor 160);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
dan
BUPATI DELI SERDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025–2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Deli Serdang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang

melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan pada Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Tujuan adalah penjabaran atau implementasi pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.
17. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

18. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
19. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
20. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB II
SISTEMATIKA

Pasal 2

(1) RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   a. pendahuluan;
   b. gambaran umum kondisi Daerah;
   c. gambaran keuangan Daerah;
   d. permasalahan dan isu strategis Daerah;
   e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
   f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
   g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
   h. kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah; dan
   i. penutup.

(2) Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat ((1)) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 3

(1) Pemerintahan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan Daerah.

BAB IV
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 4

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
   c. terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

(2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 5

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

(1) Semua ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ((1)) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.

(3) Ketetapan Perangkat Daerah penanggung jawab setiap urusan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2025– 2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.

(4) Kerangka pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 19 Agustus 2025
BUPATI DELI SERDANG,

Ttd

ASRI LUDIN TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd

DEDI MASWARDY

BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG, PROVINSI SUMATERA UTARA, NOMOR 3-60/2025

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

MUHAMMAD MUSLIH SIREGAR, SH
NIP. 19840820 201001 1 017

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Ranperda Kabupaten Deli Serdang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dapat tersusun sebagai perwujudan dari amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dokumen ini merupakan bagian dalam proses perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun mendatang, yang didasarkan pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Ranperda RPJMD ini memuat gambaran umum, arah kebijakan, strategi dan program prioritas pembangunan Kabupaten Deli Serdang untuk tahun 2025 hingga 2029. Penyusunannya telah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk analisis kondisi umum daerah, potensi dan tantangan yang dihadapi, serta penjaringan aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan.

Ranperda RPJMD ini telah melalui tahapan pembahasan lebih lanjut dengan berbagai pihak terkait. Penyusunannya juga dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, *top-down*, *bottom-up* serta partisipasi aktif dari seluruh perangkat daerah, akademisi, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, serta masyarakat luas sangat kami harapkan dalam memberikan masukan dan saran yang konstruktif untuk penyempurnaan Ranperda ini.

Ranperda RPJMD ini mengidentifikasi beberapa isu strategis dan prioritas pembangunan yang akan menjadi landasan dalam penyusunan RPJMD yang lebih komprehensif. Fokus utama dalam Ranperda RPJMD ini meliputi upaya pencapaian Visi “Terwujudnya Deli Serdang Sehat, Cerdas, Sejahtera, Religius dan Berkelanjutan” dengan Misi “Sehat Pelayanan Publiknya, Sehat Masyarakatnya, Sehat Ekonominya dan Sehat lingkungannya”.

Kami berharap Ranperda Kabupaten Deli Serdang tantang RPJMD Tahun 2025-2029 ini dapat menjadi kerangka acuan yang jelas dan terarah dalam menyusun rencana pembangunan yang lebih detail dan implementatif. Kami juga berharap proses penetapan Ranperda RPJMD ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas serta mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Deli Serdang.

Lubuk Pakam, Agustus 2025

Pemerintah Kabupaten
Deli Serdang

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR xiii
BAB. I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-4
1.3 Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya I-6
1.4 Maksud dan Tujuan I-9
1.5 Sistematika Penulisan I-10

BAB. II GAMBARAN UMUM DAERAH II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah II-1
2.1.2. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup II-19
2.1.3. Berketahanan Air, Energi, dan Kemandirian Pangan II-55
2.1.4. Lingkungan Hidup Berkualitas II-58
2.1.5. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim II-62
2.1.6. Aspek Demografi II-68
2.1.7. Potensi Sumber Daya Alam II-75
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-87
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi II-87
2.2.2. Kesehatan untuk Semua II-95
2.2.3. Pendidikan yang Berkualitas dan Merata .. II-98
2.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif II-102
2.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju II-103
2.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif II-104
2.3. Aspek Daya Saing Daerah II-108
2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia II-108
2.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi. II-110
2.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru II-116

2.3.4. Transformasi Digital II-119
2.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global II-120
2.3.6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi II-121
2.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro II-124
2.4. Aspek Pelayanan Umum II-127
2.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif..... II-128
2.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial lII-129
2.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan II-132
2.4.4. Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar ... II-134
2.4.5. Layanan Urusan Wajib Non Dasar..... II-158
2.4.6. Urusan Pilihan II-178
2.4.7. Penunjang Urusan Pemerintahan II-192
2.5. Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2024 ..... II-198
2.6. Gambaran Umum Keuangan Daerah II-226
2.6.1. Kinerja APBD Kabupaten Deli Serdang..... II-229
2.6.2. Proyeksi Keuangan Daerah..... II-279
2.7. Permasalahan Dan Isu Strategis II-296
2.7.1. Isu Strategis Global II-303
2.7.2. Isu Strategis Nasional..... II-306
2.7.3. Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara..... II-308
2.7.4. Isu Strategis Kabupaten Deli Serdang II-312

BAB. III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III-1
3.1 Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran III-1
3.1.1. Penyelarasan RPJMD dengan RPJPN, RPJPD Provinsi dan RPJPD Kabupaten Deli Serdang..... III-15
3.2 Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Prioritas . III-21

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV-1
4.1. Program Perangkat Daerah IV-1
4.2. Program Prioritas dan Dukungan Program Daerah Terhadap Program Prioritas Nasional dan Provinsi

Sumatera Utara IV-44
4.2.1. Program Prioritas Nasional IV-44
4.2.2. Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara IV-46
4.2.3. Dukungan Program Daerah terhadap Program Prioritas Nasional IV-48
4.2.4. Dukungan Daerah terhadap Provinsi Sumatera Utara IV-60
4.3. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah..... IV-139

BAB. V PENUTUP V-1
5.1. Kaidah Pelaksanaan V-1
5.1.1. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan .. V-7
5.1.2. Kerangka Pengendalian V-11
5.1.3. Sistem Insentif V-22
5.1.4. Mekanisme Perubahan V-23
5.1.5. Komunikasi Publik V-24
5.2. Pembiayaan Pembangunan V-25
5.3. Kesimpulan..... V-26

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Ketinggian Kabupaten Deli Serdang.....	II-4
Tabel 2. 2	Kemiringan Lereng Kabupaten Deli Serdang.....	II-5
Tabel 2. 3	Pengembangan Wilayah Berdasarkan Sistem Perkotaan	II-13
Tabel 2. 4	Pengembangan Wilayah Berdasarkan Arahan Pola Ruang	II-15
Tabel 2. 5	Kandungan Kalori dan Konversi Berat Komoditi Pangan Pada Tahun 2022.....	II-19
Tabel 2. 6	Produksi Kalori Pangan Nabati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022	II-21
Tabel 2. 7	Produksi Pangan Hewani Deli Serdang (2022).....	II-23
Tabel 2. 8	Produksi Kalori Pangan Hewani Deli Serdang (2022)	II-25
Tabel 2. 9	Produksi Kalori Pangan Hewani Deli Serdang (2022)	II-28
Tabel 2. 10	Kalori Pangan Deli Serdang (2022).....	II-30
Tabel 2. 11	Kebutuhan Kalori Pangan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022	II-32
Tabel 2. 12	Daya Dukung Pangan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022	II-33
Tabel 2. 13	Proyeksi Daya Dukung Pangan Tutupan Lahan Wilayah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029	II-35
Tabel 2. 14	Proyeksi Perubahan Tutupan Lahan Wilayah Kabupaten Deli Serdang Pada Tahun 2025-2029...	II-38
Tabel 2. 15	Koefisien Limpasan Air Permukaan	II-40
Tabel 2. 16	Ketersediaan Limpasan Air Permukaan	II-41
Tabel 2. 17	Standar Kebutuhan Air Domestik dan Non Domestik	II-42
Tabel 2. 18	Daya Dukung Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Deli Serdang pada Tahun 2022.....	II-43
Tabel 2. 19	Proyeksi Daya Dukung Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Deli Serdang Pada Tahun 2025-2029	II-45
Tabel 2. 20	Proyeksi Timbulan Sampah di Kabupaten	

	Deli Serdang 2025-2029	II-46
Tabel 2. 21	Proyeksi Timbulan Lumpur Tinja Kabupaten Deli Serdang 2025-2029	II-48
Tabel 2. 22	Air Limbah Domestik Kabupaten Deli Serdang 2025-2029	II-49
Tabel 2. 23	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021-2024	II-50
Tabel 2. 24	Perubahan Tutupan Lahan di Wilayah Kabupaten Deli Serdang (2017-2022)	II-54
Tabel 2. 25	Capaian Indikator Pengelolaan Sampah.....	II-61
Tabel 2. 26	Jumlah Bencana di Kabupaten Deli Serdang.....	II-62
Tabel 2. 27	Data Kejadian Bencana di Kabupaten Deli Serdang	II-67
Tabel 2. 28	Penduduk menurut Kelompok Usia	II-69
Tabel 2. 29	Data Distribusi Penduduk menurut Kecamatan	II-69
Tabel 2. 30	Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kecamatan (%).....	II-71
Tabel 2. 31	Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan (Jiwa/Km2).....	II-72
Tabel 2. 32	Proyeksi Demografi Tahun 2025-2029	II-73
Tabel 2. 33	Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Deli Serdang	II-74
Tabel 2. 34	Proyeksi Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin, Sex Ratio, Usia Produktif & Non Produktif, dan Angka Ketergantungan	II-75
Tabel 2. 35	Daerah Aliran Sungai (DAS) yang melalui wilayah Kabupaten Deli Serdang	II-81
Tabel 2. 36	Objek dan Daya Tarik Wisata Potensial Kabupaten Deli Serdang	II-85
Tabel 2. 37	Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan Usaha (%)	II-88
Tabel 2. 38	PDRB Per Kapita Kabupaten Deli Serdang (Rp Ribu)	II-92

Tabel 2. 39 Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Deli Serdang (%) II-97
Tabel 2. 40 Capaian Indeks Pelayanan SPM Kesehatan Tahun 2020-2024 ..... II-97
Tabel 2. 41 Prevalensi Stunting Kabupaten Deli Serdang (%) II-98
Tabel 2. 42 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Deli Serdang (Poin) II-101
Tabel 2. 43 Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Deli Serdang (Poin) II-104
Tabel 2. 44 Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Deli Serdang (Poin) II-104
Tabel 2. 45 Indeks Pemenuhan Hak Anak Kabupaten Deli Serdang (Poin) II-105
Tabel 2. 46 Realisasi Investasi Tahun 2020-2024 ..... II-126
Tabel 2. 47 Indeks Akses Keuangan Daerah Tahun 2020-2024. II-127
Tabel 2. 48 Capaian Indikator Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif II-128
Tabel 2. 49 Capaian Indikator Indeks Rasa Aman (Poin) II-130
Tabel 2. 50 Capaian Indikator Indeks Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Poin) II-130
Tabel 2. 51 Capaian Indikator Persentase Penegakan Perda (%) II-131
Tabel 2. 52 Capaian Indikator Persentase Aksi HAM (%) II-132
Tabel 2. 53 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Deli Serdang II-133
Tabel 2. 54 Angka Putus Sekolah di Kabupaten Deli Serdang (%) II-137
Tabel 2. 55 Rasio Rata-rata Guru Terhadap Murid SD dan SMP II-139
Tabel 2. 56 Jumlah Lembaga PAUD/TK di Kabupaten Deli Serdang II-139
Tabel 2. 57 Pendidikan Kesetaraan II-140

Tabel 2. 58 Capaian Kinerja Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2020-2024 ..... II-141
Tabel 2. 59 Indikator Derajat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Deli Serdang II-143
Tabel 2. 60 Fasilitas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang II-145
Tabel 2. 61 Capaian Kinerja Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2020-2024 ..... II-145
Tabel 2. 62 Capaian Kinerja Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024 ..... II-148
Tabel 2. 63 Persentase Rumah Layak Huni Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024 ..... II-151
Tabel 2. 64 Capaian Kinerja Bidang Urusan Perumahan dan Permukiman Tahun 2020-2024 ..... II-152
Tabel 2. 65 Capaian Kinerja Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ... Tahun 2020-2024 ..... II-154
Tabel 2. 66 Capaian Bidang Urusan Urusan Sosial Tahun 2020-2024 ..... II-157
Tabel 2. 67 Capaian Kinerja Bidang Urusan Tenaga Kerja Tahun 2020-2024 ..... II-158
Tabel 2. 68 Capaian Kinerja Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 ..... II-161
Tabel 2. 69 Capaian Kinerja Bidang Urusan Pangan Tahun 2020-2024 ..... II-162
Tabel 2. 70 Capaian Kinerja Bidang Urusan Pertanahan Tahun 2020-2024 ..... II-163
Tabel 2. 71 Capaian Kinerja Bidang Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024 ..... II-164
Tabel 2. 72 Capaian Kinerja Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2020-2024 ..... II-166

Tabel 2. 73 Capaian Kinerja Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020-2024 ..... II-167
Tabel 2. 74 Capaian Kinerja Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024 ..... II-168
Tabel 2. 75 Capaian Kinerja Bidang Urusan Perhubungan Tahun 2020-2024 ..... II-169
Tabel 2. 76 Capaian Kinerja Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 ..... II-170
Tabel 2. 77 Capaian Kinerja Bidang Urusan Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2020-2024 ..... II-171
Tabel 2. 78 Capaian Kinerja Bidang Urusan Penanaman Modal Tahun 2020-2024 ..... II-172
Tabel 2. 79 Capaian Kinerja Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020-2024 ..... II-173
Tabel 2. 80 Capaian Kinerja Bidang Urusan Statistik Tahun 2020-2024 ..... II-174
Tabel 2. 81 Capaian Kinerja Bidang Urusan Kebudayaan Tahun 2020-2024 ..... II-175
Tabel 2. 82 Capaian Kinerja Bidang Urusan Perpustakaan Tahun 2020-2024 ..... II-176
Tabel 2. 83 Capaian Kinerja Bidang Urusan Kearsipan Tahun 2020-2024 ..... II-177
Tabel 2. 84 Potensi dan Perkembangan Perikanan di Kabupaten Deli Serdang II-179
Tabel 2. 85 Capaian Kinerja Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 ..... II-180
Tabel 2. 86 Capaian Kinerja Bidang Urusan Pariwisata Tahun 2020-2024 ..... II-181
Tabel 2. 87 Data Kunjungan Wisata Tahun 2020-2024 di Kabupaten Deli Serdang II-183
Tabel 2. 88 Data Usaha Kepariwisataan di Kabupaten

Deli Serdang Tahun 2020-2024 ..... II-185
Tabel 2. 89 Capaian Kinerja Bidang Urusan Pertanian Tahun 2020-2024 ..... II-185
Tabel 2. 90 Luas Panen dan Hasil Panen Palawija Kabupaten Deli Serdang II-187
Tabel 2. 91 Jumlah Populasi Ternak (ekor) di Kabupaten Deli Serdang II-188
Tabel 2. 92 Capaian Kinerja Bidang Urusan Perdagangan Tahun 2020-2024 ..... II-188
Tabel 2. 93 Capaian Kinerja Bidang Urusan Perindustrian Tahun 2020-2024 ..... II-190
Tabel 2. 94 Capaian Kinerja Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2020-2024..... II-192
Tabel 2. 95 Capaian Kinerja Bidang Urusan Keuangan Tahun 2020-2024 ..... II-193
Tabel 2. 96 Kinerja Bidang Urusan Kepegawaian, serta Pendidikan dan Pelatihan II-194
Tabel 2. 97 Capaian Kinerja Bidang Urusan Manajemen Keuangan Tahun 2020-2024 ..... II-195
Tabel 2. 98 Kinerja Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020-2024 ..... II-196
Tabel 2. 99 Kinerja Bidang Urusan Pengawasan Tahun 2020-2024 ..... II-197
Tabel 2. 100 Kinerja Bidang Urusan Sekretariat Daerah II-198
Tabel 2. 101 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2024 ..... II-200
Tabel 2. 102 Realisasi APBD Kabupaten Deli Serdang 2020-2024 ..... II-230
Tabel 2. 103 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang II-233
Tabel 2. 104 Surplus (Defisit) Riil Realisasi APBD dan SiLPA Kabupaten Deli Serdang (Rp miliar) II-267
Tabel 2. 105 Neraca Daerah Tahun 2020-2024 ..... II-277

Tabel 2. 106 Proyeksi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang 2025 – 2030 (Rp) II-285
Tabel 2. 107 Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang 2025 – 2030 (Rp) II-292
Tabel 2. 108 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2025-2029 ..... II-294
Tabel 2. 109 Rumusan Masalah Pokok, Permasalahan, dan Akar Masalah II-297
Tabel 2. 110 Penyimpulan Isu Strategis Daerah II-313
Tabel 3. 1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2030 ..... III-8
Tabel 3. 2 Tema Pembangunan Tahunan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029 ..... III-23
Tabel 3. 3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029 ..... III-26
Tabel 3. 4 Program Prioritas RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029 ..... III-31
Tabel 4. 1 Program Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2026-2030 ..... IV-2
Tabel 4. 2 Dukungan Program Daerah terhadap Program Prioritas Nasional IV-51
Tabel 4. 3 Dukungan Program Daerah terhadap Proyek Strategis Nasional IV-54
Tabel 4. 4 Dukungan Program Daerah terhadap Provinsi Sumatera Utara IV-61
Tabel 4. 5 Dukungan Program Daerah terhadap Proyek Hasil Tercepat Baik (PHTC) IV-64
Tabel 4. 6 Dukungan Program Daerah terhadap Program Prioritas/Proyek Strategis Daerah (PSD) IV-77
Tabel 4. 7 Penyelarasan Indikator Makro Sasaran Pembangunan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029 ..... IV-140
Tabel 4. 8 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Deli Serdang

Tahun 2025-2030 ..... IV-141
Tabel 4. 9 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2025-2030 ..... IV-145

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Deli Serdang dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya I-7

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Deli Serdang..... II-2

Gambar 2. 2 Rencana Peta Elevasi..... II-5

Gambar 2. 3 Peta Kemiringan Lereng..... II-6

Gambar 2. 4 Rencana Pola Ruang Kabupaten Deli Serdang II-18

Gambar 2. 5 Peta Konversi Lahan Badan Air, Hutan dan Sawah Di Wilayah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017-2022..... II-51

Gambar 2. 6 Peta Perubahan Tutupan Oleh Tutupan Lahan Terbangun dan Kebun/Perkebunan di Wilayah Kabupaten Deli Serdang (2017-2022) II-53

Gambar 2. 7 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Deli Serdang..... II-55

Gambar 2. 8 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%) II-56

Gambar 2. 9 Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Layak (%)..... II-57

Gambar 2. 10 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin) II-59

Gambar 2. 11 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak (%) II-60

Gambar 2. 12 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Deli Serdang. II-66

Gambar 2. 13 Peta Risiko Multi bencana Kabupaten Deli Serdang II-68

Gambar 2. 14 Produksi Komoditi Tanaman Pangan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2024 ..... II-77

Gambar 2. 15 Produksi Komoditi Hortikultura Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2024 ..... II-78

Gambar 2. 16 Produksi Komoditi Perkebunan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2024 ..... II-79

Gambar 2. 17 Produksi Komoditi Peternakan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2024 ..... II-80

Gambar 2. 18 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) yang melalui Kabupaten Deli Serdang II-82
Gambar 2. 19 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional..... II-88
Gambar 2. 20 Indeks Gini Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional..... II-90
Gambar 2. 21 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara,dan Nasional..... II-91
Gambar 2. 22 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (%) II-93
Gambar 2. 23 IPM Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional..... II-94
Gambar 2. 24 Umur Harapan Hidup Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (Tahun) . II-96
Gambar 2. 25 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (Tahun ..) II-99
Gambar 2. 26 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (Tahun) . II-100
Gambar 2. 27 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)..... II-102
Gambar 2. 28 Indeks Pembangunan Keluarga..... II-105
Gambar 2. 29 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Deli Serdang (Poin)..... II-106
Gambar 2. 30 Indeks Pendidikan Kabupaten Deli Serdang (Poin)..... II-109
Gambar 2. 31 Angka Ketergantungan II-110
Gambar 2. 32 Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) II-111
Gambar 2. 33 Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum (%) .. II-112
Gambar 2. 34 Rasio Kewirausahaan (%)..... II-113

Gambar 2. 35 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) II-114
Gambar 2. 36 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten
Deli Serdang (Poin)..... II-115
Gambar 2. 37 Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan
dan Perikanan (%)..... II-118
Gambar 2. 38 Rasio PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan (%) II-119
Gambar 2. 39 Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto
terhadap PDRB (%) II-120
Gambar 2. 40 Persentase Rumah Layak Huni (%) II-122
Gambar 2. 41 Persentase Desa Mandiri (%)..... II-123
Gambar 2. 42 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)..... II-125
Gambar 2. 43 Inflasi Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024..... II-126
Gambar 2. 44 Angka Partisipasi Kasar Kabupaten
Deli Serdang II-135
Gambar 2. 45 Angka Partisipasi Murni Kabupaten
Deli Serdang II-136
Gambar 2. 46 Pergerakan Pendapatan Daerah Kabupaten
Deli Serdang II-234
Gambar 2. 47 Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten
Deli Serdang II-236
Gambar 2. 48 Derajat Kemandirian dan Rasio Ketergantungan
Daerah Kabupaten Deli Serdang..... II-239
Gambar 2. 49 Pergerakan Kinerja Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Deli Serdang II-240
Gambar 2. 50 Struktur PAD Kabupaten Deli Serdang..... II-242
Gambar 2. 51 Realisasi dan Kontribusi Pajak Daerah
Kabupaten Deli Serdang II-243
Gambar 2. 52 Realisasi dan Kontribusi Retribusi Daerah
Kabupaten Deli Serdang II-244
Gambar 2. 53 Realisasi dan Kontribusi Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kabupaten
Deli Serdang II-245

Gambar 2. 54 Realisasi dan Pertumbuhan Lain-Lain PAD yang Sah Kabupaten Deli Serdang II-246
Gambar 2. 55 Pergerakan Target, Realisasi dan Kinerja Pendapatan Transfer Kabupaten Deli Serdang II-247
Gambar 2. 56 Realisasi dan Struktur Pendapatan Transfer Kabupaten Deli Serdang II-249
Gambar 2. 57 Realisasi dan Pertumbuhan Dana Perimbangan Kabupaten Deli Serdang II-251
Gambar 2. 58 Pergerakan Target, Realisasi dan Kinerja Pendapatan Lain-Lain yang Sah Kabupaten Deli Serdang II-252
Gambar 2. 59 Pergerakan Target, Realisasi dan Kinerja Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang II-255
Gambar 2. 60 Struktur Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang II-257
Gambar 2. 61 Pergerakan Struktur Belanja Operasi Kabupaten Deli Serdang II-260
Gambar 2. 62 Pergerakan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Deli Serdang II-263
Gambar 2. 63 Pergerakan Realisasi SiLPA Kabupaten Deli Serdang II-269
Gambar 2. 64 Isu Strategis Global Jangka Menengah II-303
Gambar 3. 1 Gambar Misi RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029 ..... III-3
Gambar 5. 1 Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan..... V-9
Gambar 5. 2 Kerangka Kerja MRPN..... V-12
Gambar 5. 3 Tahapan Manajemen Risiko untuk Mencapai Target RPJMD V-13

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) menyusun perencanaan pembangunan daerah, di mana perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini penting dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien serta sejalan dengan pembangunan nasional. Salah satu indikasi perencanaan yang baik adalah mengacu atau berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan kepada pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi; dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 tahun.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD ini merupakan

penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Ketentuan mengenai penyusunan RPJMD tersebut, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Mengingat dokumen RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029 sebagai perwujudan dokumen perencanaan komprehensif 5 (lima) tahunan dan selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk lima tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Substansi yang termuat dalam dokumen RPJMD kemudian akan dijabarkan dalam dokumen rencana tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya.

Dalam penyusunan dokumen perencanaan, daerah perlu mempertimbangkan isu strategis, dinamika geostrategis dan analisis atas berbagai tantangan utama yang akan dihadapi dalam pembangunan 5 (lima) tahun ke depan serta berbagai capaian kinerja dan prestasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang selama kurun waktu tahun 2019-2024 sehingga tetap terjaga kesinambungan pembangunan yang sudah ada serta memperhatikan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup. Beberapa hal yang sudah tercapai di Kabupaten Deli Serdang selama kurun waktu 2019-2024 (Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024) yakni : capaian indikator makro Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2019-2024, sebagai berikut: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 77,56 poin, Laju

Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,36 persen, Persentase Penduduk Miskin sebesar 3,44 persen dan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) sebesar 3,74, Inflasi sebesar 1,80 persen, TPT sebesar 8,02 persen, dan Rasio Gini sebesar 0,262 poin. Selain itu, dalam penyusunan RPJMD juga menggunakan pendekatan pembangunan berkelanjutan. Konsep ini bukan sekadar *tren*, tetapi sebuah kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa pembangunan saat ini tidak mengorbankan hak-hak generasi mendatang.

Capaian pembangunan yang telah baik akan terus ditingkatkan melalui penyusunan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029 yang akan menjadi pedoman/panduan bagi seluruh pihak terkait (stakeholder) dalam menjalankan pembangunan di Kabupaten Deli Serdang untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Selama lima tahun ke depan, pembangunan Kabupaten Deli Serdang diarahkan untuk mewujudkan sehat pelayanan publiknya, sehat masyarakatnya, sehat ekonominya dan sehat lingkungannya guna terwujudnya Deli Serdang Sehat, Cerdas, Sejahtera, Religius, dan Berkelanjutan.

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu kabupaten yang pelantikan Bupati dan Wakil Bupatinya dilakukan serentak bersama 959 kepala dan wakil kepala daerah lainnya yang dipimpin langsung Presiden. Bupati, dr. H. Asri Ludin Tambunan, M.Ked (PD).,Sp. PD dan Wakil Bupati, Lom Lom Suwondo, SS, dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 untuk masa periode 2025-2030. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berkewajiban menyusun dan menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik.

Berpedoman pada RPJPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2045, bahwa RPJMD Tahun 2025-2029 akan difokuskan pada penguatan fundamental sebagai akar dari transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola. Pada tahap ini, pembangunan akan diarahkan pada bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial, tumbuhnya perekonomian yang didukung infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan serta tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam upaya mewujudkan transformasi, pemerintah akan

melibatkan masyarakat serta para pemangku kepentingan untuk turut serta dalam program pemerintah untuk meningkatkan fundamental pembangunan. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan beserta pemenuhan kebutuhan dan keterampilan dari tenaga kesehatan dan pendidikan. Demikian pula dengan perlindungan sosial, pemerintah akan memperkuat regulasi dan peran serta masyarakat. Pembangunan pada tahap ini akan memerlukan biaya yang besar sehingga pada pelaksanaannya pemerintah akan menggunakan anggaran secara efektif dan efisien. Sebagai awal penerapan transformasi, pemerintah juga akan membenahi regulasi yang mendukung tumbuhnya perekonomian dan peningkatan produktivitas serta membenahi regulasi penyelenggaraan pemerintahannya untuk memperkuat manajemen ASN guna membangun karakter pemerintahan yang profesional serta infrastruktur sistem pelayanan kepada publik dengan harapan akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang adaptif, bersih, transparan, dan akuntabel.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029 berpedoman pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan yuridis dan praktis. Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021-2041;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2045.

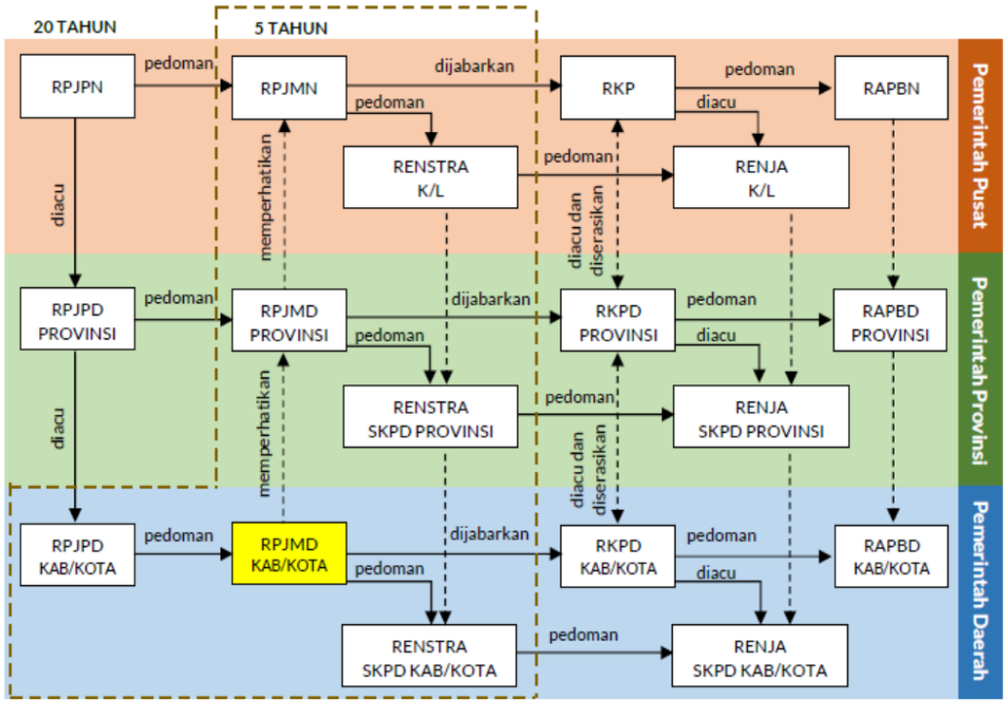
1.3. Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya

Dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025–2029 disusun dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, RPJPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2045 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021-2041, serta hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019–2024.

Selain dokumen-dokumen perencanaan di atas, perlu juga memperhatikan dokumen rencana pembangunan yang relevan, antara lain: agenda pembangunan Sustainable Development Goals (SDGs) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Selanjutnya RPJMD ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Adapun keterkaitan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar I-1

Hubungan RPJMD Kabupaten Deli Serdang dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya



Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Penyusunan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap I Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029 dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka Panjang daerah. Selanjutnya RPJMD nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang menjabarkan RPJMD menjadi kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka menangani isu strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Kemudian, pelaksanaan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029 ini nantinya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja PD. Dalam pelaksanaan tahunannya, RPJMD melalui RKPD menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD setiap tahun selama 5 (lima)

tahun.

1. **Hubungan RPJMD Kabupaten Deli Serdang dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)**

   Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dinyatakan bahwa RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sebagai satu kesatuan yang utuh dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dalam penyusunannya memperhatikan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 melalui penyelarasan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

2. **Hubungan RPJMD Kabupaten Deli Serdang dengan RPJPD, RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD**

   Penyusunan RPJMD Kabupaten Deli Serdang berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap I Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2045 dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka Panjang daerah. Selanjutnya RPJMD nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang menjabarkan RPJMD menjadi kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka menangani isu strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Kemudian, pelaksanaan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029 ini nantinya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen

perencanaan tahunan Kabupaten Deli Serdang yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja PD. Dalam pelaksanaan tahunannya, RPJMD melalui RKPD menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

3. **Hubungan RPJMD Kabupaten Deli Serdang dengan RTRW Kabupaten Deli Serdang**

   Penyusunan RPJMD Kabupaten Deli Serdang juga berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021-2041 yang ditetapkan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021-2041, melalui penyelarasan sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka Panjang maupun jangka menengah Daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah.

4. **Hubungan RPJMD Kabupaten Deli Serdang dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Deli Serdang**

   Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) salah satu dokumen yang ditelaah dalam penyusunan RPJMD. KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029 memiliki maksud untuk memberikan arah pembangunan dan menjaga kesinambungan dalam rangka terwujudnya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang. RPJMD Kabupaten Deli Serdang juga memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program

kewilayahan dalam rangka menjamin keberlanjutan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2045.

Adapun tujuan dari disusunnya dokumen RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029, antara lain:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah (Renstra-PD) dalam rentang waktu 5 (lima) tahun ke depan.
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Deli Serdang setiap tahunnya dalam 5 (lima) tahun ke depan;
3. Sebagai tolok ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029.
4. Sebagai parameter penilaian keberhasilan maupun ketidakberhasilan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada periode 2025-2029 melalui Indikator Kinerja yang telah ditetapkan;
5. Sebagai parameter penilaian kinerja SKPD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam rangka pelaksanaan urusan.
6. Menjadi instrumen bagi DPRD Kabupaten Deli Serdang dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan pemerintah daerah guna mendukung aspirasi masyarakat serta pencapaian target kinerja program prioritas pembangunan daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029 yang sekaligus memuat keterkaitan antar bab sepenuhnya mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang terdiri atas 5 (lima) BAB, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika

penulisan penyusunan RPJMD Kabupaten Deli Serdang.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kabupaten Deli Serdang secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas di antaranya adalah: (1) Aspek geografi dan demografi, (2) Aspek kesejahteraan masyarakat, (3) Aspek daya saing daerah, serta (4) Aspek pelayanan umum. Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut: (1) kinerja keuangan masa lalu, (2) kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, serta (3) kerangka pendanaan. Bab ini juga memuat berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarannya. Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Deli Serdang untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu juga diuraikan mengenai program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Deli Serdang dalam jangka menengah.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menjelaskan mengenai program perangkat daerah dalam pencapaian kinerja pembangunan daerah yang dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Dalam bab ini menguraikan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penentuan target penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, konsistensi perencanaan dan pendanaan, pengendalian, sistem insentif, mekanisme perubahan, komunikasi publik dan pembiayaan.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

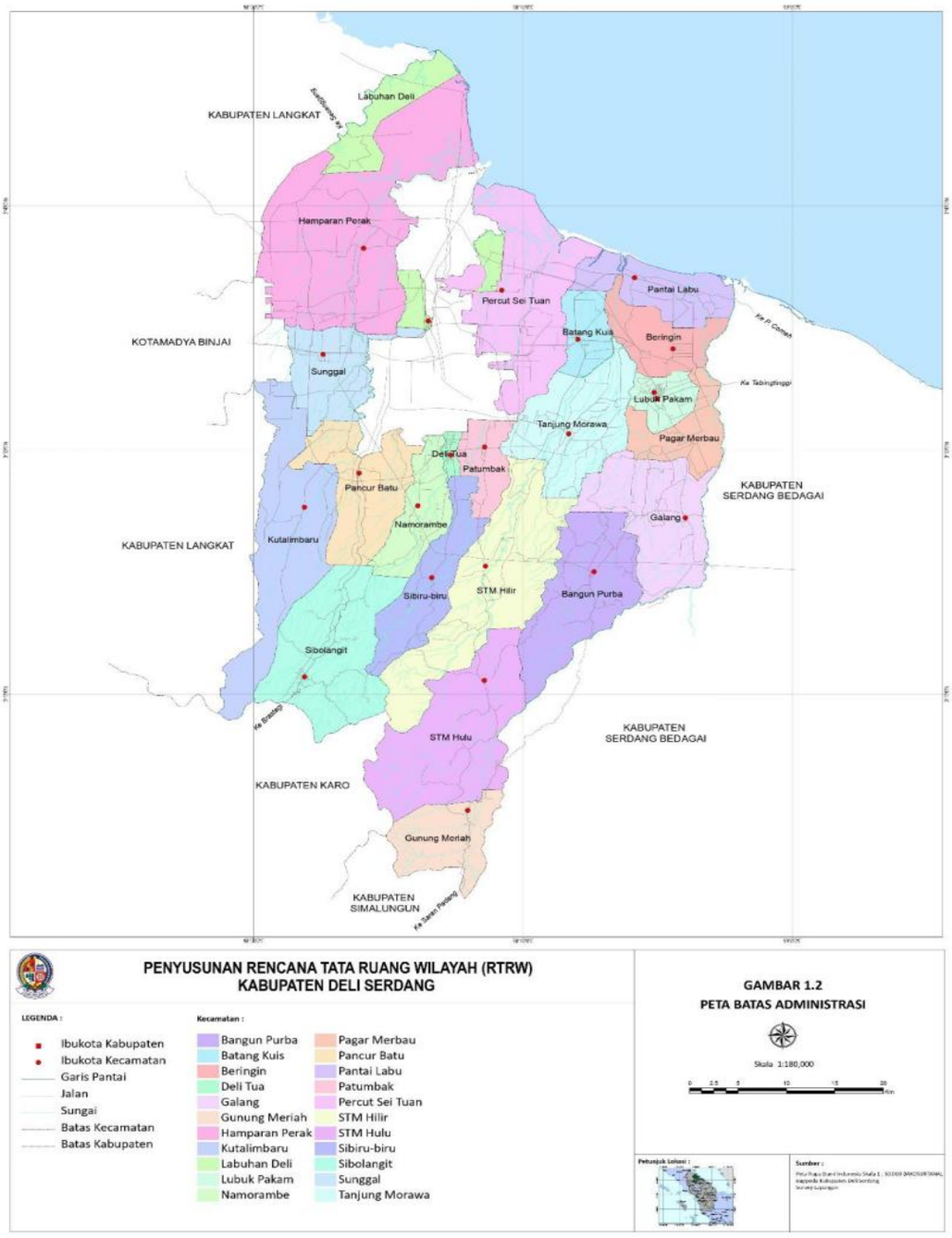
Pada aspek geografi dan demografi Kabupaten Deli Serdang mencakup karakteristik lokasi wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana dan aspek demografi.

2.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Aspek geografi mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan kondisi wilayah, baik yang bersifat fisik maupun yang melibatkan interaksi manusia dengan lingkungan.

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu dari 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Deli Serdang berada pada Kawasan Pantai Timur Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Secara geografis Kabupaten Deli Serdang berada pada koordinat 3°15' sampai dengan 3°40' Lintang Utara, dan 98°30' sampai dengan 98°58' Bujur Timur (Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021-2041).

Gambar 2. 1
Peta Administrasi Kabupaten Deli Serdang



Kondisi Topografi dan Ketinggian Lereng

Pada umumnya Kabupaten Deli Serdang berada pada ketinggian 0 – 500 meter diatas permukaan laut. Namun pada kawasan bagian Selatan terdapat wilayah dengan ketinggian diatas 500 M diatas permukaan laut. Sedangkan berdasarkan kemiringan lerengnya, pada dasarnya Kabupaten Deli Serdang memiliki wilayah yang relatif datar hingga bergelombang dengan kemiringan berkisar antara 0 - 15 %. Namun pada daerah tertentu, terdapat kemiringan yang relatif

bergelombang hingga terjal dengan kemiringan lereng berkisar antara 15 - 40 %. Secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Ketinggian Lereng

   Keadaan ketinggian lereng Kabupaten Deli Serdang secara umum berada pada ketinggian 0-1000 meter, dapat diuraikan sebagai berikut :

   - Ketinggian 0 – 50 Meter diatas permukaan laut, terdapat seluas ±122.394 ha (47 %), merupakan kawasan dataran hingga tepi pantai meliputi 12 kecamatan, mulai dari Kec. Sunggal, Kec. Deli Tua, Kec. Tanjung Morawa, Kec. Galang, Kec. Lubuk Pakam hingga Kec. Pagar Merbau, Kec. Percut Sei Tuan, Kec. Batang Kuis, Kec. Labuhan Deli, Kec. Hamparan Perak, Kec. Percut Sei Tuan, Kec. Pantai Labu;
   - Ketinggian 50 - 500 Meter diatas permukaan laut, terdapat seluas ±100.202 Ha (39 %), yang terdapat pada 4 kecamatan pada kawasan tengah, Kecamatan Gunung Meriah Patumbak, Kec, Deli Tua, Kec. Pancur Batu dan Kec. Galang;
   - Ketinggian 500 – 1.000 Meter diatas permukaan laut, terdapat terdapat seluas ±22.413 Ha (9 %) pada mulai kawasan perbukitan/pegunungan yang meliputi empat kecamatan, yaitu : Kec. Kutalimbaru, Kec. STM Hilir, Kec. STM Hulu dan Kec. Sibolangit
   - Ketinggian 1.000-2.000 Meter diatas permukaan laut, terdapat seluas ±12.877 Ha (5%), juga meliputi empat kecamatan yang sama di Kecamatan Gunung Meriah, STM Hulu, Sibolangit, dan Kecamatan Kutalimbaru
   - Ketinggian di atas 2.000 Meter diatas permukaan laut merupakan kawasan pegunungan, terdapat hanya seluas ±76 ha (0,03 %), meliputi dua kecamatan di Kecamatan Sibolangit dan Kecamatan Kutalimbaru.

2. Kemiringan Lereng

   Keadaan kemiringan lereng Kabupaten Deli Serdang secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

   - Kemiringan lereng antara 0 – 8 % (datar/landai), terdapat seluas ±22.778 Ha (88%), yang meliputi seluruh kecamatan;

- Kemiringan lereng antara 8 – 25 % (agak/miring), terdapat seluas ±31.564 Ha (12 %), yang terdapat di seluruh kecamatan juga ;
- Kemiringan lereng antara 25 – 45 % (agak curam), terdapat seluas ±531 Ha (0,2 %), yang meliputi Kec. Bangun Purba, Kec. Biru-Biru, Kec. Gunung Meriah, Kec. Kutalimbaru, Kec. Namorambe, Kec. STM Hilir, Kec. STM Hulu dan Kec. Sibolangit;
- Kemiringan lereng antara > 45 % (curam), terdapat seluas ±6 Ha (0,002 %), yang meliputi empat kecamatan, yaitu Kec. Biru-Biru, Kec. Kutalimbaru, Kec. STM Hilir dan Kec. Sibolangit

Berdasarkan kondisi topografi dan kemiringan tersebut, secara umum Kabupaten Deli Serdang terbagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:

1. Kawasan Pantai, terdiri dari 4 kecamatan, yaitu: Kecamatan Hamparan Perak, Labuhan Deli, Percut Sei Tuan dan Kecamatan Pantai Labu, dengan panjang garis pantai sekitar 65 Km;
2. Kawasan Dataran Rendah, yang terdiri dari 7 kecamatan, yaitu: Kecamatan Sunggal, Deli Tua, Batang Kuis, Tanjung Morawa, Lubuk Pakam, Beringin, Pagar Merbau
3. Kawasan Dataran Tengah, yang terdiri dari 6 kecamatan, yaitu : Kecamatan Pancur Batu, Namorambe, Kutalimbaru, STM Hilir, Bangun Purba, Biru-Biru,
4. Kawasan Dataran Tinggi, yang terdiri dari 3 kecamatan, yaitu: Kecamatan STM Hulu, Gunung Meriah, Sibolangit.

Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi topografi wilayah administrasi Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada Tabel 3.2 dan Tabel 3.3 serta Gambar 3.3 dan Gambar 3.4 berikut.

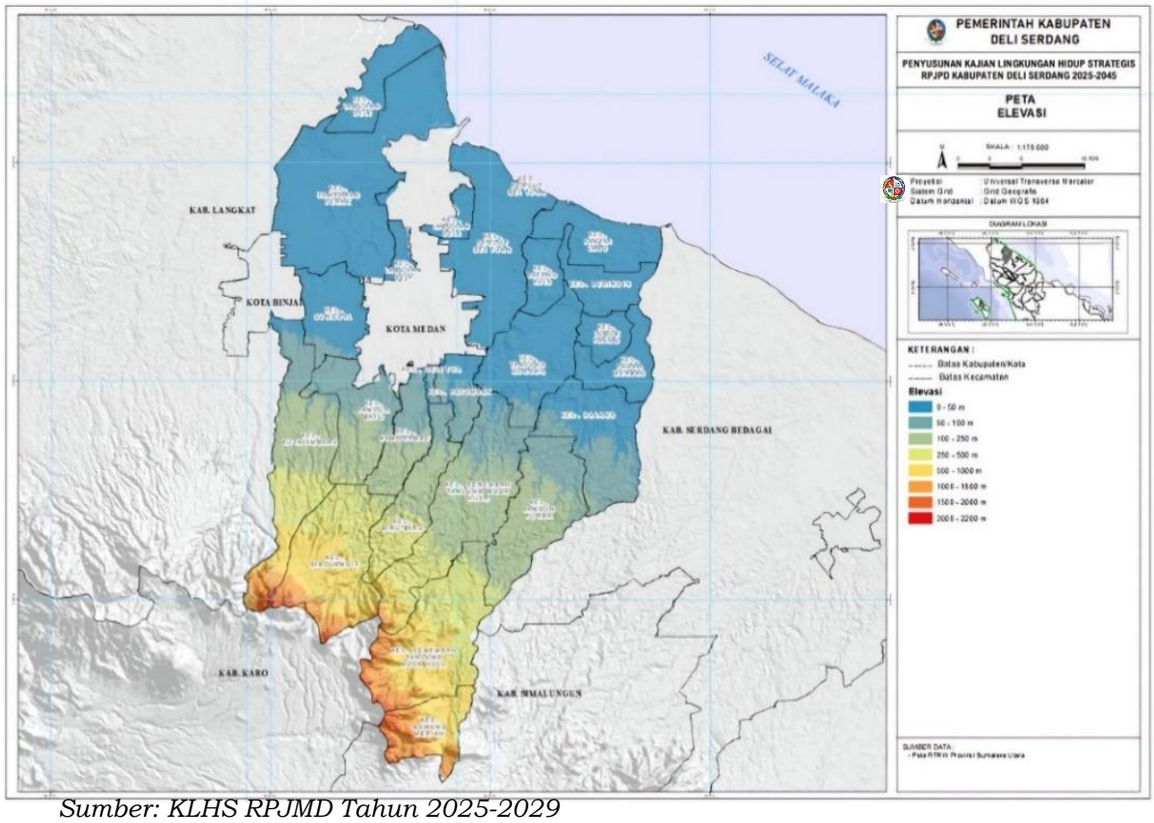
Tabel 2. 1
Ketinggian Kabupaten Deli Serdang

Ketinggian	Luas (Ha)	Persentase
0-50 m	130.778,75	47,45%
51-100 m	27.550,4	10,00%
101-250 m	41.358,1	15,00%
251-500 m	38.157,96	13,84%
501-1.000 m	23.948,43	8,69%
1.001-1.500 m	12.742,05	4,61%
1.501-2.000 m	1.017,10	0,37%
> 2.000 m	81,21	0,03%

Ketinggian	Luas (Ha)	Persentase
Total	275.634,00	100%

Sumber : Kabupaten Deli Serdang Dalam Angka 2023

Gambar 2. 2
Rencana Peta Elevasi

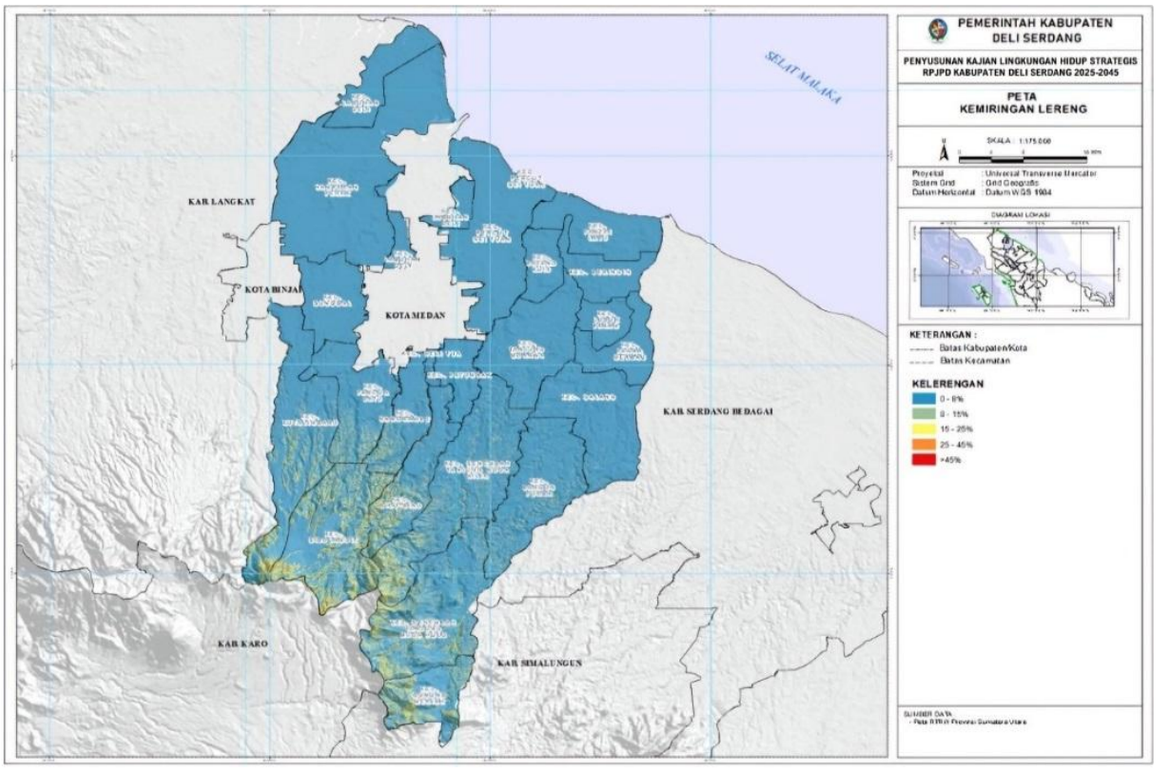


Sumber: KLHS RPJMD Tahun 2025-2029

Tabel 2. 2
Kemiringan Lereng Kabupaten Deli Serdang

Kemiringan	Luas (ha)	Luas (ha)
0 – 8 %	236.857	85,93%
8 – 15 %	26.055	9,45%
15 – 25 %	7.144	2,59%
25 – 45 %	5.572	2,02%
>45%	6	0%
Total	275.634	100%

Gambar 2. 3
Peta Kemiringan Lereng



Sumber: KLHS RPJMD Tahun 2025-2029

Kemiringan Lereng

Keadaan kemiringan lereng Kabupaten Deli Serdang secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kemiringan lereng antara 0 – 15 persen, terdapat seluas ± 172.242 Ha (68,96 persen), yang meliputi seluruh kecamatan.
2. Kemiringan lereng antara 15 – 40 persen, terdapat seluas ± 51.285 Ha (20,53 persen), yang meliputi sepuluh kecamatan, yaitu: Kecamatan Gunung Meriah, STM Hulu, Sibolangit, Kutalimbaru, Pancur Batu, Namorambe, Biru-biru, STM Hilir, Bangun Purba, dan Patumbak.
3. Kemiringan lereng di atas 40 persen, terdapat seluas ± 26.245 Ha (10,51 persen), yang terdapat di Kecamatan Gunung Meriah, STM Hulu, Sibolangit, Kutalimbaru, Biru-biru, STM Hilir dan Bangun Purba.

Ketiga aspek kondisi di atas (topografi, kemiringan dan ketinggian lereng) perlu menjadi perhatian yang serius dalam merumuskan kebijakan pembangunan pada pola ruang dan struktur ruang yang telah direncanakan dalam tata ruang Kabupaten Deli

Serdang.

Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah merupakan salah satu hal yang penting dan harus ada dalam tujuan perencanaan daerah. Pengembangan wilayah didasarkan pada potensi fisik, sosial dan budaya yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Pengembangan wilayah adalah seluruh tindakan yang dilakukan dalam rangka memanfaatkan potensi-potensi wilayah yang ada untuk mendapatkan kondisi-kondisi dan tatanan kehidupan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di daerah tersebut dan dalam interaksinya pada skala Kabupaten Deli Serdang maupun Provinsi Sumatera Utara.

Pengembangan wilayah Kabupaten Deli Serdang bertujuan untuk:

1. Mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Deli Serdang yang aman, nyaman, produktif dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung pertumbuhan perekonomian sesuai dengan kebijakan pengelolaan Tata Ruang;
3. Meningkatkan kemandirian pangan melalui optimalisasi dan revitalisasi pertanian, perikanan dan kelautan;
4. Mewujudkan keterpaduan penataan ruang wilayah Kabupaten Deli Serdang dalam mendukung Kawasan Perkotaan Mebidangro dan wilayah sekitarnya.
5. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan di atas, maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut:
    a. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mengembalikan keseimbangan ekosistem;
    b. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
    c. Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung, dan melestarikan keunikan bentang alam;
    d. Pemerataan bidang sarana prasarana (Infrastruktur Pelayanan

Dasar) guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi;

e. Memfokuskan Pembangunan Infrastruktur Pertanian dan Perikanan.
f. Penegakan Peraturan tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Kawasan Industri

Kemajuan pembangunan ekonomi suatu daerah akan terlihat dari keberhasilan membangun industri. Melalui pembangunan industri akan tercipta perluasan lapangan kerja dan perluasan lapangan usaha yang diharapkan akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejateraan masyarakat. Pembangunan industri memiliki nilai tambah terhadap produk dan barang jasa yang dihasilkan seperti yang tergambar pada PDRB juga akan meningkat. Industrialisasi juga dapat merubah struktur perekonomian suatu daerah. Ini berarti kontribusi sektor pertanian akan menurun dan sebaliknya kontribusi sektor industri akan meningkat.

Kabupaten Deli Serdang memiliki potensi besar di sektor industri khususnya industri pengolahan. Daerah ini memiliki basis pertanian yang kuat, terutama perkebunan kelapa sawit, karet, kakao, dan kopi. Selain itu, Deli Serdang juga dikenal dengan sektor perdagangan yang berkembang pesat, termasuk perdagangan besar dan eceran, serta sektor lain seperti peternakan, restoran, dan perhotelan. Industri pengolahan memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Deli Serdang.

Beberapa kecamatan di Kabupaten Deli Serdang yang memiliki potensi dan kegiatan industri pengolahan, yakni :

- Kecamatan Tanjung Morawa: dikenal sebagai pusat industri, terutama industri manufaktur dan makanan.
- Kecamatan Lubuk Pakam: Ibu kota kabupaten, memiliki berbagai jenis industri termasuk pengolahan.
- Kecamatan Sunggal: Dekat dengan Medan, memiliki potensi untuk industri yang terkait dengan kebutuhan perkotaan.
- Kecamatan Batang Kuis: Memiliki potensi industri pengolahan terutama yang terkait dengan hasil pertanian.

- Kecamatan Patumbak: Dekat dengan Medan dan memiliki beberapa industri pengolahan.
- Kecamatan Deli Tua: Memiliki potensi industri pengolahan terutama yang terkait dengan hasil pertanian

Sektor industri pengolahan memiliki peran penting dalam percepatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Deli Serdang dan memiliki kontribusi yang besar terhadap PDRB. Sesuai data BPS, kontribusi sektor perindustrian pengolahan terhadap perekonomian di Kabupaten Deli Serdang cukup baik, hal ini dapat dilihat dari persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Deli Serdang cenderung mengalami peningkatan yakni tahun 2019 sebesar 30,93%, tahun 2020 sebesar 31,05%, tahun 2021 sebesar 31,41%, tahun 2022 sebesar 30,59, tahun 2023 sebesar 29,03% dan kemudian sebesar 28,95% pada tahun 2024.

Industri pengolahan memiliki peranan penting di Kabupaten Deli Serdang, karena:

- Penciptaan Nilai Tambah: Industri pengolahan mengubah bahan baku yang nilai ekonominya mungkin rendah menjadi produk dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi.
- Peningkatan Kesejahteraan: Pertumbuhan industri pengolahan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
- Pengembangan Sektor Lain: Industri pengolahan dapat menjadi penggerak bagi sektor lain, seperti pertanian (menyediakan bahan baku) dan jasa (seperti lembaga keuangan dan pemasaran.

Salah satu upaya agar industri memberikan hasil yang optimal adalah melalui penataan kawasan industri di Deli Serdang yang menjadi salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan lokasi yang strategis dan potensi yang melimpah, Deli Serdang dapat menjadi magnet investasi dan pusat manufaktur di Sumatera Utara melalui pengembangan kawasan industri.

Deli Serdang memiliki beberapa keunggulan yang menjadikannya lokasi ideal untuk pengembangan industri:

- **Lokasi Strategis:** Berada di jantung koridor ekonomi **MEBIDANGRO (Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo)**, Deli Serdang memiliki akses mudah ke pasar domestik dan internasional. Kedekatannya dengan Bandara Internasional Kualanamu dan Pelabuhan Belawan sangat mendukung logistik dan distribusi.
- **Infrastruktur yang Memadai:** Kabupaten ini didukung oleh jaringan jalan tol, listrik yang stabil, serta pasokan air. Ini adalah daya tarik besar bagi investor yang mencari efisiensi operasional.
- **Sumber Daya Manusia:** Ketersediaan tenaga kerja yang cukup dari wilayah sekitar, termasuk lulusan pendidikan menengah dan kejuruan, menjadi modal penting bagi industri.
- **Dukungan Pemerintah Daerah:** Adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk menarik investasi dan memfasilitasi perizinan sangat penting dalam mempercepat pengembangan kawasan industri.
- **Sektor Pendukung yang Kuat:** Deli Serdang juga memiliki sektor pertanian dan perkebunan yang kuat, yang bisa menjadi sumber bahan baku bagi industri pengolahan, menciptakan rantai nilai yang terintegrasi.

Untuk memaksimalkan potensi ini, penataan kawasan industri dilakukan melalui.

- **Perencanaan Tata Ruang yang Terintegrasi:** Ini adalah fondasi. Penataan harus memastikan alokasi lahan yang jelas untuk industri, pemukiman, ruang hijau, dan infrastruktur pendukung. Hindari tumpang tindih penggunaan lahan yang bisa memicu konflik atau menghambat pengembangan.
- **Pengembangan Klaster Industri:** Mengelompokkan industri sejenis atau yang saling melengkapi (misalnya, klaster pengolahan sawit, klaster makanan dan minuman) dapat menciptakan ekosistem yang efisien. Ini memfasilitasi berbagi sumber daya, limbah, dan inovasi, sekaligus menarik investasi yang lebih besar.
- **Penyediaan Infrastruktur Terpadu:** Kawasan industri harus dilengkapi dengan fasilitas lengkap seperti jalan akses yang baik, pasokan energi yang andal, sistem pengolahan air bersih dan

limbah, serta konektivitas digital yang kuat. Ini mengurangi biaya operasional bagi perusahaan dan meningkatkan daya saing.

- **Insentif Investasi yang Menarik:** Pemerintah daerah dapat menawarkan insentif seperti kemudahan perizinan, keringanan pajak daerah, atau penyediaan lahan dengan harga kompetitif untuk menarik investor. Namun, insentif ini harus diimbangi dengan regulasi yang jelas dan transparan.
- **Promosi dan Pemasaran:** Secara aktif mempromosikan potensi kawasan industri Deli Serdang kepada investor potensial, baik domestik maupun internasional, melalui berbagai platform dan pameran.

Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari kawasan industri harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penataan yang baik dapat memastikan hal ini:

- **Pengembangan Keterampilan Tenaga Kerja Lokal:** Pemerintah daerah dan industri harus berinvestasi dalam pelatihan dan pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri. Ini memastikan masyarakat Deli Serdang memiliki keterampilan yang dibutuhkan dan menjadi prioritas dalam pengisian lowongan kerja.
- **Pemberdayaan UMKM Lokal:** Mendorong UMKM di sekitar kawasan industri untuk menjadi pemasok bahan baku, penyedia jasa, atau bagian dari rantai pasok industri besar. Ini akan menciptakan efek domino ekonomi yang menyebar ke seluruh lapisan masyarakat.
- **Pengelolaan Dampak Lingkungan yang Ketat:** Industri harus mematuhi standar lingkungan yang tinggi. Penataan kawasan harus mencakup sistem pengolahan limbah yang efektif dan pemantauan rutin untuk meminimalkan polusi udara, air, dan tanah, demi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.
- **Kemitraan Industri dan Masyarakat:** Membangun komunikasi yang baik dan berkelanjutan antara perusahaan dan masyarakat sekitar. Program Corporate Social Responsibility (CSR) dapat diarahkan untuk mendukung pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur komunitas.

- **Perlindungan Lahan Pertanian dan Pemukiman:** Dalam penataan, penting untuk meminimalkan konversi lahan pertanian produktif dan menghindari penggusuran masyarakat. Jika relokasi tidak dapat dihindari, harus dilakukan dengan proses yang adil, transparan, dan kompensasi yang layak.

Dengan penataan yang komprehensif dan berkelanjutan, kawasan industri Deli Serdang tidak hanya akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pilar peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya.

Rencana Sistem Perkotaan Wilayah Kabupaten

Rencana sistem perkotaan wilayah yang terdapat di Kabupaten Deli Serdang meliputi: PKN (Pusat Kegiatan Nasional), PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) dan PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan).

Tabel 2. 3
Pengembangan Wilayah Berdasarkan Sistem Perkotaan

No	Hirarki	Kota	Fungsi Yang Dikembangkan
1	Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	Seluruh wilayah administrasi Kabupaten Deli Serdang	• Simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional; • Pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi; • Simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi.
2	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Lubuk Pakam	• Pusat pemerintahan; • Perdagangan dan jasa regional; • Kota transit; • Pusat pelayanan fasilitas sosial dan umum; • Perumahan dan Permukiman; • Pusat Olah Raga dan Sosial Budaya.
		Pancur Batu	• Perdagangan dan jasa regional (pasar induk dan terminal sayur); • *TOD (Transit Oriented Development);* • Pusat Pendidikan dan Olah raga; • Pariwisata; • Perumahan dan permukiman.
		Tanjung Morawa	• Perdagangan dan jasa; • Industri; • Perumahan dan permukiman; • Pertanian.
		Hamparan Perak	• Perdagangan dan jasa; • Industri; • Kawasan Kehutanan (Kawasan Suaka Alam, Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas); • Pariwisata, • Kegiatan Militer, • Perumahan dan permukiman, • Pertanian.
		Percut Sei Tuan	• Perumahan dan permukiman; • Perdagangan dan jasa regional; • Pertanian dan perikanan; • Industri; • Pusat pendidikan dan olah raga, • Pariwisata. • Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas
		Sunggal	• Perdagangan dan jasa lokal; • Industri; • Perumahan dan permukiman. • Pertanian;

No	Hirarki	Kota	Fungsi Yang Dikembangkan
		Deli Tua	• Perdagangan dan jasa regional (pasar induk sayuran); • *TOD (Transit Oriented Development);* • Pelayanan sosial • Perumahan dan permukiman.
		Galang	• Perdagangan dan jasa lokal; • Pertanian dan perkebunan; • *TOD (Transit Oriented Development);* • Militer • Perumahan dan permukiman.
		Patumbak	• Perdagangan dan jasa • Perumahan dan permukiman; • Industri; • Pertanian dan perkebunan.
		Labuhan Deli	• Perdagangan dan jasa. • Industri • Perumahan dan permukiman; • Pengolahan pertanian, perkebunan dan perikanan.
		Pantai Labu	• Pengolahan pertanian, perikanan, dan peternakan; • Pengembangan Transportasi dan Aerotropolis; • Perdagangan dan jasa; • Industri, Pergudangan/Ekspedisi; • Perumahan dan permukiman; • Pariwisata; • Kawasan Suaka Alam; • Hutan Lindung.
		Beringin	• Transportasi dan Aerotropolis; • Pergudangan/Ekspedisi; • Perdagangan dan jasa; • Perumahan dan permukiman; • Hutan Lindung.
		Batang Kuis	• Pusat Perdagangan dan jasa regional; • Pertanian dan perkebunan; • *TOD (Transit Oriented Development);* • Perumahan dan permukiman;
		Sibolangit	• Perdagangan dan jasa lokal; • Pariwisata; • Agropolitan; • Kawasan Kehutanan (Kawasan Suaka Alam, dan Hutan Produksi Terbatas); • Perumahan dan permukiman; • Pertanian.
3	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	Gunung Meriah	• Pertanian dan perkebunan; • Perumahan dan permukiman; • Kawasan Kehutanan (Kawasan Suaka Alam, dan Hutan Lindung).
		STM Hulu	• Pertanian, Perkebunan dan Peternakan; • Perumahan dan permukiman; • Kawasan Kehutanan (Kawasan Suaka Alam, Hutan Lindung dan Hutan Produksi Tetap); • Pariwisata.

No	Hirarki	Kota	Fungsi Yang Dikembangkan
		Kutalimbaru	• Pertanian dan perkebunan; • Perumahan dan permukiman; • Kawasan Kehutanan (Kawasan Suaka Alam, dan Hutan Produksi Tetap) • Pariwisata
		Namorambe	• Perdagangan dan jasa lokal; • Perumahan dan permukiman; • Pertanian; • Pariwisata
		Biru-biru	• Pengolahan pertanian, Perkebunan, dan Peternakan; • Perumahan dan permukiman; • Pariwisata • Hutan Produksi Tetap
		STM Hilir	• Pertanian, Perkebunan dan Peternakan; • Perumahan dan permukiman; • Kawasan Kehutanan (Kawasan Suaka Alam, dan Hutan Produksi Tetap).
		Bangun Purba	• Pertanian dan perkebunan; • Perumahan dan permukiman; • Hutan Produksi Tetap
		Pagar Merbau	• Perdagangan dan jasa lokal; • Pengolahan pertanian dan perkebunan; • Perumahan dan permukiman. • Pertanian.

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021-2041

Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Deli Serdang meliputi Kawasan Peruntukan Lindung dan Kawasan Peruntukan Budidaya. Adapun pengembangan wilayah didasarkan arahan pola ruang di Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut.

Tabel 2. 4
Pengembangan Wilayah Berdasarkan Arahan Pola Ruang

No	Kawasan	Kecamatan
Kawasan Peruntukan Lindung		
1	Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	
1.1	Kawasan Hutan Lindung	STM Hulu, Gunung Meriah, Hamparan Perak, Percut Sei Tuan dan Pantai Labu.
2	Kawasan Perlindungan Setempat	
2.1	Sempadan Sungai	Tersebar di seluruh kecamatan
2.2	Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	Sibiru-biru, STM Hulu, Sunggal dan Pancur Batu
3	Kawasan Konservasi	
3.1	Kawasan Suaka Alam (KSA)	Hamparan Perak, Labuhan Deli dan Sibolangit
3.2	Kawasan Pelestarian Alam (KPA)	Sibiru-biru, Gunung Meriah, Kutalimbaru, STM Hilir, STM Hulu dan Sibolangit
4	Kawasan Lindung Geologi	Sibolangit

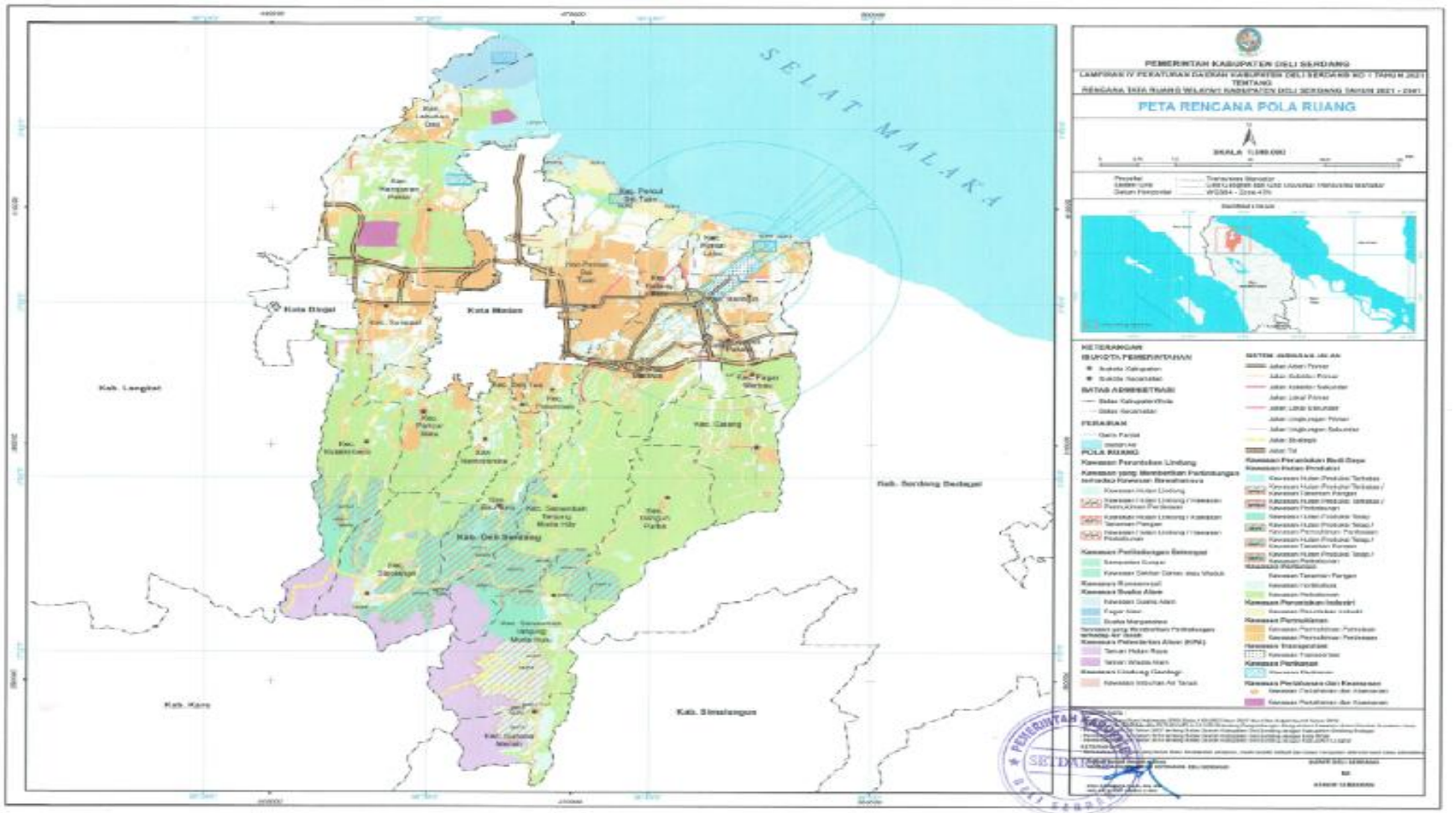
No	Kawasan	Kecamatan
Peruntukan Budi Daya		
1.	Kawasan Hutan Produksi	
1.1	Kawasan Hutan Produksi Tetap	STM Hulu, Sibolangit, Kutalimbaru, Sibiru-biru, STM Hilir dan Bangun Purba
1.2	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	Hamparan Perak, Percut Sei Tuan dan Kutalimbaru
2.	Kawasan Pertanian	
2.1	Kawasan Tanaman Pangan	Pancur Batu, Namorambe, Kutalimbaru, Patumbak, Sibiru-biru, STM Hilir, STM Hulu, Sibolangit, Galang, Gunung Meriah, Bangun Purba, Lubuk Pakam, Sunggal, Tanjung Morawa, Hamparan Perak, Labuhan Deli, Deli Tua, Batang Kuis, Beringin, Pantai Labu, Pagar Merbau dan Percut Sei Tuan
2.2	Kawasan Hortikultura	Pancur Batu, Namorambe, Kutalimbaru, Patumbak, Sibiru-biru, STM Hilir, STM Hulu Sibolangit, Galang, Gunung Meriah, Bangun Purba, Lubuk Pakam, Sunggal, Tanjung Morawa, Hamparan Perak, Labuhan Deli, Deli Tua, Batang Kuis, Beringin, Pantai Labu, Pagar Merbau dan Percut Sei Tuan
2.3	Kawasan Perkebunan	Pancur Batu, Namorambe, Kutalimbaru, Patumbak, Sibiru-biru, STM Hilir, STM Hulu, Sibolangit, Galang, Gunung Meriah, Bangun Purba, Lubuk Pakam, Sunggal, Tanjung Morawa, Hamparan Perak, Labuhan Deli, Deli Tua, Batang Kuis, Beringin, Pantai Labu, Pagar Merbau dan Percut Sei Tuan
2.4	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)-(bagian dari kawasan tanaman pangan dan kawasan hortikultura)	Pancur Batu, Namorambe, Kutalimbaru, Patumbak, Sibiru-biru, STM Hilir, STM Hulu, Sibolangit, Galang, Gunung Meriah, Bangun Purba, Lubuk Pakam, Sunggal, Tanjung Morawa, Hamparan Perak, Labuhan Deli, Deli Tua, Batang Kuis, Beringin, Pantai Labu, Pagar Merbau dan Percut Sei Tuan
3.	Kawasan Perikanan	Labuhan Deli, Percut Sei Tuan, Hamparan Perak, Pantai Labu
4.	Kawasan Industri	Percut Sei Tuan, Labuhan Deli, Tanjung Morawa, Hamparan Perak, Pantai Labu, Patumbak dan Sunggal
5.	Kawasan Permukiman	
5.1	Kawasan Permukiman Perkotaan	Lubuk Pakam, Pancur Batu, Tanjung Morawa, Hamparan Perak, Percut Sei Tuan, Sunggal, Deli Tua, Galang, Patumbak, Labuhan Deli, Pantai Labu, Beringin, Batang Kuis, Sibolangit, Namorambe, Pagar Merbau, Kutalimbaru dan Sibiru-biru
5.2	Kawasan Permukiman Perdesaan	Pancur Batu, Namorambe, Kutalimbaru, Patumbak, Sibiru-biru, STM Hilir, STM Hulu, Sibolangit, Galang, Gunung Meriah, Bangun

No	Kawasan	Kecamatan
		Purba, Sunggal, Tanjung Morawa, Hamparan Perak, Labuhan Deli, Deli Tua ,Beringin dan Pagar Merbau
6.	Kawasan Pertahanan	Pangkalan/kantor TNI dan Polisi yang tersebar di Kabupaten Deli Serdang
7.	Kawasan Transportasi	Pantai Labu dan Beringin
8.	Badan Air	Tersebar di seluruh kecamatan

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021-2041

Adapun rencana pola ruang Kabupaten Deli Serdang dalam peta adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 4
Rencana Pola Ruang Kabupaten Deli Serdang



2.1.2. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup penting dalam pengelolaan lingkungan yang mengacu pada kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan dan aktivitas manusia tanpa mengalami kerusakan atau penurunan kualitas. Dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, pembangunan dapat dilakukan secara lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan, sehingga keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup manusia dapat terjaga untuk generasi mendatang.

Ketersediaan Kalori Pangan

Ketersediaan pangan di Kabupaten Deli Serdang berdasarkan kalori beberap komoditi pangan yang diproduksi di Kabupaten Deli Serdang dalam satu tahun (2022). Komoditi pangan tersebut mencakip pangan nabati (beras, jagung, ubi kayu), pangan hewani (ternak dan unggas potong, serta telur), dan ikan hasil perikanan darat.

Tabel 2. 5
Kandungan Kalori dan Konversi Berat Komoditi Pangan Pada Tahun 2022

Komoditi Pangan			KKalori per 100 gr	satuan	konversi kg
Pangan Nabati	-	Beras	150	ton	1 ton/1000 kg
		Jagug	355	ton	1 ton/1000 kg
		Ubi kayu	160	ton	1 ton/1000 kg
Pangan Hewani	Ternak Potong	Sapi	250	kg	1 kg
		Kambing	154	kg	1 kg
		Domba	154	kg	1 kg
	Unggas Potong	Ayam	237	kg	1 kg
		Petelo	237	kg	1 kg
		Ayam pedagin	237	kg	1 kg
		Itik	337	kg	1 kg

Komoditi Pangan			KKalori per 100 gr	satuan	konversi kg
	Telur	kampung	143,2	butir	17 butir/kg
		Ras	143,2	butir	17 butir/kg
		Itik	146	butir	10 butir/kg
	Ikan Darat	Ikan darat	204	ton	1 ton/1000 kg

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029

Berikut disajikan nilai produksi masing-masing komoditi pangan penghasil kalori dan ketersediaan pangan nabati, hewani dan ikan di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2022.

Tabel 2. 6
Produksi Kalori Pangan Nabati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022

Kecamatan	Produksi (ton)			Sediaan Kalori Pangan (Kkal)			Total Kalori Pangan Nabati (Kkal/tahun)
	Beras	Jagung	Ubi kayu	Jagung	Beras	Ubi kayu	
Kandungan /100 gr				***150***	***355***	***160***	
Gunung Meriah	3614,11	192,29	0	5.421.165.000,00	682.629.500,00	-	6.103.794.500,00
S.T.M. Hulu	3231,85	3301,12	0	4.847.775.000,00	11.718.976.000,00	-	16.566.751.000,00
Sibolangit	1887,56	1705,12	0	2.831.340.000,00	6.053.176.000,00	-	8.884.516.000,00
Kutalimbaru	3357,81	8875,66	1.885,10	5.036.715.000,00	31.508.593.000,00	3.016.160.000,00	39.561.468.000,00
Pancur Batu	2269,82	3238,1	6.767,77	3.404.730.000,00	11.495.255.000,00	10.828.432.000,00	25.728.417.000,00
Namo Rambe	6257,06	8319,36	2.986,83	9.385.590.000,00	29.533.728.000,00	4.778.928.000,00	43.698.246.000,00
Biru-Biru	4922,99	4535,91	3.988,41	7.384.485.000,00	16.102.480.500,00	6.381.456.000,00	29.868.421.500,00
S.T.M. Hilir	3396,51	5883,88	13.263,69	5.094.765.000,00	20.887.774.000,00	21.221.904.000,00	47.204.443.000,00
Bangun Purba	667,04	1402	0	1.000.560.000,00	4.977.100.000,00	-	5.977.660.000,00
Galang	5025,22	105,47	18.765,19	7.537.830.000,00	374.418.500,00	30.024.304.000,00	37.936.552.500,00
Tanjung Morawa	20320,66	8040,25	12.508,93	30.480.990.000,00	28.542.887.500,00	20.014.288.000,00	79.038.165.500,00
Patumbak	1842,29	2645,14	17.942,47	2.763.435.000,00	9.390.247.000,00	28.707.952.000,00	40.861.634.000,00

Kecamatan	Produksi (ton)			Sediaan Kalori Pangan (Kkal)			Total Kalori Pangan Nabati (Kkal/tahun)
	Beras	Jagung	Ubi kayu	Jagung	Beras	Ubi kayu	
Kandungan /100 gr				***150***	***355***	***160***	
Deli Tua	147,86	49,52	307,63	221.790.000,00	175.796.000,00	492.208.000,00	889.794.000,00
Sunggal	13190,65	9772,81	794,1	19.785.975.000,00	34.693.475.500,00	1.270.560.000,00	55.750.010.500,00
Hamparan Perak	48174,39	3609,17	1.133,92	72.261.585.000,00	12.812.553.500,00	1.814.272.000,00	86.888.410.500,00
Labuhan Deli	24611,66	900,51	5.912,86	36.917.490.000,00	3.196.810.500,00	9.460.576.000,00	49.574.876.500,00
Percut Sei Tuan	33110,06	26207,03	6.463,72	49.665.090.000,00	93.034.956.500,00	10.341.952.000,00	153.041.998.500,00
Batang Kuis	8505,34	3955,81	4.228,07	12.758.010.000,00	14.043.125.500,00	6.764.912.000,00	33.566.047.500,00
Pantai Labu	29910,7	445,04	343,4	44.866.050.000,00	1.579.892.000,00	549.440.000,00	46.995.382.000,00
Beringin	22260,79	852,13	622,41	33.391.185.000,00	3.025.061.500,00	995.856.000,00	37.412.102.500,00
Lubuk Pakam	10589,68	178,79	554,44	15.884.520.000,00	634.704.500,00	887.104.000,00	17.406.328.500,00
Pagar Merbau	16092,08	75,24	3.605,66	24.138.120.000,00	267.102.000,00	5.769.056.000,00	30.174.278.000,00
Deli Serdang	263386,1	94290,35	102074,6	395.079.195.000,00	334.730.742.500,00	163.319.360.000,00	893.129.297.500,00

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029

Tabel 2. 7
Produksi Pangan Hewani Deli Serdang (2022)

Kecamatan	PRODUKSI PANGAN									
	Ternak Potong (kg)			Unggas Potong (kg)				Telur (kg)		
	Sapi	Kambing	Domba	Ayam	Petelor	Ayam Pedaging	Itik	Kampung	Ras	Itik
Kandugan per 100 gr				*237,00*	*237,00*	*237,00*	*337,00*	*143,20*	*143,20*	*146,00*
Gunung Meriah	131,00	-	-	-	-	-		6.770,00	-	-
S.T.M. Hulu	928,00	-	1.757,00	-	-	232.718,00		12.445,00	-	-
Sibolangit	1.192,00	-	1.359,00	-	-	-		85.361,00	-	-
Kutalimbaru	1.705,00	4.795,00	4.165,00	-	-	1.469.368,00		133.309,00	-	-
Pancur Batu	30.008,00	4.341,00	3.825,00	73.693,00	-	774.419,00		130.158,00	1.100.214,00	-
Namo Rambe	22.730,00	2.736,00	3.786,00	-	-	518.682,00		93.970,00	-	-
Biru-Biru	6.097,00	-	-	-	-	247.363,00		36.444,00	-	-
S.T.M. Hilir	56.287,00	1.394,00	3.673,00	38.629,00	49.210,00	921.158,00		85.648,00	2.093.010,00	-
Bangun Purba	9.727,00	4.686,00	5.368,00	40.051,00	-	889.048,00		162.399,00	-	194.940,00

Kecamatan	PRODUKSI PANGAN									
	Ternak Potong (kg)			Unggas Potong (kg)				Telur (kg)		
	Sapi	Kambing	Domba	Ayam	Petelor	Ayam Pedaging	Itik	Kampung	Ras	Itik
Galang	130.221,00	2.668,00	16.773,00	49.512,00	-	776.747,00		140.358,00	-	-
Tanjung Morawa	330.565,00	7.993,00	77.412,00	93.713,00	30.663,00	876.506,00	11.496,00	79.110,00	1.201.214,00	281.266,00
Patumbak	63.911,00	5.587,00	14.865,00	2.379,00	-	547.279,00		11.913,00	-	-
Deli Tua	178.366,00	3.898,00	21.200,00	101.968,00	-	29.411,00		5.162,00	-	-
Sunggal	545.728,00	8.117,00	67.504,00	120.629,00	7.956,00	1.328.042,00		94.116,00	15.638.940,00	272.200,00
Hamparan Perak	33.225,00	7.280,00	15.200,00	104.562,00	45.684,00	1.103.325,00	8.973,00	137.907,00	35.707.315,00	551.339,00
Labuhan Deli	5.781,00	6.177,00	11.805,00	114.495,00	-	184.031,00	18.569,00	10.975,00	-	712.370,00
Percut Sei Tuan	26.498,00	2.900,00	13.503,00	90.014,00	7.056,00	919.233,00	21.774,00	111.553,00	-	1.173.005,00
Batang Kuis	43.603,00	4.749,00	12.731,00	88.987,00	-	688.703,00	2.872,00	7.300,00	-	171.599,00
Pantai Labu	4.638,00	2.397,00	7.685,00	100.107,00	75.253,00	308.232,00	15.917,00	128.848,00	176.536.420,00	1.222.917,00
Beringin	7.542,00	3.346,00	3.668,00	85.063,00	30.474,00	28.620,00	4.086,00	10.696,00	13.558.638,00	386.464,00
Lubuk Pakam	551.289,00	5.005,00	15.665,00	124.380,00	-			6.162,00	-	-

Kecamatan	PRODUKSI PANGAN									
	Ternak Potong (kg)			Unggas Potong (kg)				Telur (kg)		
	Sapi	Kambing	Domba	Ayam	Petelor	Ayam Pedaging	Itik	Kampung	Ras	Itik
Pagar Merbau	-	-	-	-	-	403.785,00		9.500,00	-	-
Deli Serdang	**2.050.172,00**	**78.069,00**	**301.944,00**	**1.228.182,00**	**246.296,00**	**12.246.670,00**	**83.687,00**	**1.500.104,00**	**245.835.751,00**	**4.966.100,00**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029

Tabel 2. 8
Produksi Kalori Pangan Hewani Deli Serdang (2022)

Kecamatan	PRODUKSI KALORI PANGAN										Total Kalori Pangan Hewani (Kkal/tahun)
	Ternak Potong (kg)			Unggas Potong (kg)				Telur			
	Sapi	Kambing	Domba	Ayam	Petelor (kg)	Ayam Pedaging (kg)	Itik (kg)	Kampung	Ras	Itik	
Kandungan per 100 gr	*250*	*154*	*154*	*237*	*237*	*237*	*337*	*237*	*237*	*337*	
Gunung Meriah	327.500,00	-	-	-	-	-	-	943.817,65	-	-	1.271.317,65
S.T.M. Hulu	2.320.000,00	-	2.705.780,00	-	-	551.541.660,00	-	1.734.979,41	-	-	558.302.419,41
Sibolangit	2.980.000,00	-	2.092.860,00	-	-	-	-	11.900.327,65	-	-	16.973.187,65
Kutalimbaru	4.262.500,00	7.384.300,00	6.414.100,00	-	-	3.482.402.160,00	-	18.584.842,94	-	-	3.519.047.902,94

Kecamatan	PRODUKSI KALORI PANGAN										Total Kalori Pangan Hewani (Kkal/tahun)
	Ternak Potong (kg)			Unggas Potong (kg)				Telur			
	Sapi	Kambing	Domba	Ayam	Petelor (kg)	Ayam Pedaging (kg)	Itik (kg)	Kampung	Ras	Itik	
Pancur Batu	75.020.000,00	6.685.140,00	5.890.500,00	174.652.410,00	-	1.835.373.030,00	-	18.145.556,47	4.432.762.206,00	-	6.548.528.842,47
Namo Rambe	56.825.000,00	4.213.440,00	5.830.440,00	-	-	1.229.276.340,00	-	13.100.523,53	-	-	1.309.245.743,53
Biru-Biru	15.242.500,00	-	-	-	-	586.250.310,00	-	5.080.722,35	-	-	606.573.532,35
S.T.M. Hilir	140.717.500,00	2.146.760,00	5.656.420,00	91.550.730,00	116.627.700,00	2.183.144.460,00	-	11.940.338,82	8.432.737.290,00	-	10.984.521.198,82
Bangun Purba	24.317.500,00	7.216.440,00	8.266.720,00	94.920.870,00	-	2.107.043.760,00	-	22.640.331,18	-	65.694.780,00	2.330.100.401,18
Galang	325.552.500,00	4.108.720,00	25.830.420,00	117.343.440,00	-	1.840.890.390,00	-	19.567.556,47	-	-	2.333.293.026,47
Tanjung Morawa	826.412.500,00	12.309.220,00	119.214.480,00	222.099.810,00	72.671.310,00	2.077.319.220,00	38.741.520,00	11.028.864,71	4.839.691.206,00	94.786.642,00	8.314.274.772,71
Patumbak	159.777.500,00	8.603.980,00	22.892.100,00	5.638.230,00	-	1.297.051.230,00	-	1.660.812,35	-	-	1.495.623.852,35
Deli Tua	445.915.000,00	6.002.920,00	32.648.000,00	241.664.160,00	-	69.704.070,00	-	719.643,53	-	-	796.653.793,53
Sunggal	1.364.320.000,00	12.500.180,00	103.956.160,00	285.890.730,00	18.855.720,00	3.147.459.540,00	-	13.120.877,65	63.009.289.260,00	91.731.400,00	68.047.123.867,65
Hamparan Perak	83.062.500,00	11.211.200,00	23.408.000,00	247.811.940,00	108.271.080,00	2.614.880.250,00	30.239.010,00	19.225.858,24	143.864.772.135,00	185.801.243,00	147.188.683.216,24
Labuhan Deli	14.452.500,00	9.512.580,00	18.179.700,00	271.353.150,00	-	436.153.470,00	62.577.530,00	1.530.044,12	-	240.068.690,00	1.053.827.664,12
Percut Sei Tuan	66.245.000,00	4.466.000,00	20.794.620,00	213.333.180,00	16.722.720,00	2.178.582.210,00	73.378.380,00	15.551.800,59	-	395.302.685,00	2.984.376.595,59
Batang Kuis	109.007.500,00	7.313.460,00	19.605.740,00	210.899.190,00	-	1.632.226.110,00	9.678.640,00	1.017.705,88	-	57.828.863,00	2.047.577.208,88
Pantai Labu	11.595.000,00	3.691.380,00	11.834.900,00	237.253.590,00	178.349.610,00	730.509.840,00	53.640.290,00	17.962.927,06	711.265.236.180,00	412.123.029,00	712.922.196.746,06
Beringin	18.855.000,00	5.152.840,00	5.648.720,00	201.599.310,00	72.223.380,00	67.829.400,00	13.769.820,00	1.491.148,24	54.627.752.502,00	130.238.368,00	55.144.560.488,24

Kecamatan	PRODUKSI KALORI PANGAN										Total Kalori Pangan Hewani (Kkal/tahun)
	Ternak Potong (kg)			Unggas Potong (kg)				Telur			
	Sapi	Kambing	Domba	Ayam	Petelor (kg)	Ayam Pedaging (kg)	Itik (kg)	Kampung	Ras	Itik	
Lubuk Pakam	1.378.222.500,00	7.707.700,00	24.124.100,00	294.780.600,00	-	-	-	859.055,29	-	-	1.705.693.955,29
Pagar Merbau	-	-	-	-	-	956.970.450,00	-	1.324.411,76	-	-	958.294.861,76
Deli Serdang	**5.125.430.000,00**	**120.226.260,00**	**464.993.760,00**	**2.910.791.340,00**	**583.721.520,00**	**29.024.607.900,00**	**282.025.190,00**	**209.132.145,88**	**990.472.240.779,00**	**1.673.575.700,00**	**1.030.866.744.594,88**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029

Tabel 2. 9
Produksi Kalori Pangan Hewani Deli Serdang (2022)

Wilayah	Ikan darat	Total Kalori Pangan Ikan (Kka/tahun)
Kandungan per 100 gr		204,00
Gunung Meriah	37,62	76.744.800,00
S.T.M. Hulu	24,47	49.918.800,00
Sibolangit	12,11	24.704.400,00
Kutalimbaru	10,31	21.032.400,00
Pancur Batu	12,84	26.193.600,00
Namo Rambe	17,86	36.434.400,00
Biru-Biru	48,53	99.001.200,00
S.T.M. Hilir	12,17	24.826.800,00
Bangun Purba	23,7	48.348.000,00
Galang	18,66	38.066.400,00
Tanjung Morawa	28,07	57.262.800,00
Patumbak	34,61	70.604.400,00
Delitua	9,72	19.828.800,00
Sunggal	17,43	35.557.200,00
Hamparan Perak	3834,64	7.822.665.600,00
Labuhan Deli	2500,93	5.101.897.200,00

Wilayah	Ikan darat	Total Kalori Pangan Ikan (Kka/tahun)
Percut Sei Tuan	311,49	635.439.600,00
Batang Kuis	29,65	60.486.000,00
Pantai Labu	221,88	452.635.200,00
Beringin	97,45	198.798.000,00
Lubuk Pakam	18,93	38.617.200,00
Pagar Merbau	12,42	25.336.800,00
	7335,49	**14.964.399.600,00**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029

Tabel 2. 10
Kalori Pangan Deli Serdang (2022)

Wilayah	Kalori Pangan (Kkal/tahun)			
	Nabati	Hewani	Ikan	Total
Gunung Meriah	6.103.794.500,00	1.271.317,65	76.744.800,00	6.181.810.617,65
S.T.M. Hulu	16.566.751.000,00	558.302.419,41	49.918.800,00	17.174.972.219,41
Sibolangit	8.884.516.000,00	16.973.187,65	24.704.400,00	8.926.193.587,65
Kutalimbaru	39.561.468.000,00	3.519.047.902,94	21.032.400,00	43.101.548.302,94
Pancur Batu	25.728.417.000,00	6.548.528.842,47	26.193.600,00	32.303.139.442,47
Namo Rambe	43.698.246.000,00	1.309.245.743,53	36.434.400,00	45.043.926.143,53
Biru-Biru	29.868.421.500,00	606.573.532,35	99.001.200,00	30.573.996.232,35
S.T.M. Hilir	47.204.443.000,00	10.984.521.198,82	24.826.800,00	58.213.790.998,82
Bangun Purba	5.977.660.000,00	2.330.100.401,18	48.348.000,00	8.356.108.401,18
Galang	37.936.552.500,00	2.333.293.026,47	38.066.400,00	40.307.911.926,47
Tanjung Morawa	79.038.165.500,00	8.314.274.772,71	57.262.800,00	87.409.703.072,71
Patumbak	40.861.634.000,00	1.495.623.852,35	70.604.400,00	42.427.862.252,35
Delitua	889.794.000,00	796.653.793,53	19.828.800,00	1.706.276.593,53
Sunggal	55.750.010.500,00	68.047.123.867,65	35.557.200,00	123.832.691.567,65
Hamparan Perak	86.888.410.500,00	147.188.683.216,24	7.822.665.600,00	241.899.759.316,24

Wilayah	Kalori Pangan (Kkal/tahun)			
	Nabati	Hewani	Ikan	Total
Labuhan Deli	49.574.876.500,00	1.053.827.664,12	5.101.897.200,00	55.730.601.364,12
Percut Sei Tuan	153.041.998.500,00	2.984.376.595,59	635.439.600,00	156.661.814.695,59
Batang Kuis	33.566.047.500,00	2.047.577.208,88	60.486.000,00	35.674.110.708,88
Pantai Labu	46.995.382.000,00	712.922.196.746,06	452.635.200,00	760.370.213.946,06
Beringin	37.412.102.500,00	55.144.560.488,24	198.798.000,00	92.755.460.988,24
Lubuk Pakam	17.406.328.500,00	1.705.693.955,29	38.617.200,00	19.150.639.655,29
Pagar Merbau	30.174.278.000,00	958.294.861,76	25.336.800,00	31.157.909.661,76
Kab. Deli Serdang	**893.129.297.500,00**	**1.030.866.744.594,88**	**14.964.399.600,00**	**1.938.960.441.694,88**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029

Secara keseluruhan daya dukung pangan di Kabupaten Deli Serdang pada tahun eksisting (2022), sebesar **1,94 Miliar Kkal per tahun, terdiri dari** :

- Kalori pangan nabati: 893,13 miliar Kkal per tahun
- kalori pangan hewani 1.030 miliar Kkal per tahun, dan
- kalori pangan ikan : 14,96. Miliar Kkal per tahun.

Ketersediaan pangan terbesar terdapat di Kecamatan Hamparan Perak, dan paling sedikit terdapat di Kecamatan STM Hulu.

Kebutuhan Kalori Pangan

Kebutuhan kalori pangan adalah kebutuhan setiap penduduk untuk memenuhi 2.100 kkal per hari.

Tabel 2. 11
Kebutuhan Kalori Pangan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022

No	Kecamatan	2022	Kebutuhan Kalori (Kkal/tahun)
1	Gunung Meriah	3.254	2.494.191.000,00
2	STM Hulu	13.652	10.464.258.000,00
3	Sibolangit	20.053	15.370.624.500,00
4	Kutalimbaru	36.450	27.938.925.000,00
5	Pancur Batu	94.172	72.182.838.000,00
6	Namo Rambe	39.871	30.561.121.500,00
7	Biru Biru	39.546	30.312.009.000,00
8	STM Hilir	33.315	25.535.947.500,00
9	Bangun Purba	24.688	18.923.352.000,00
10	Galang	71.147	54.534.175.500,00
11	Tanjung Morawa	227.396	174.299.034.000,00
12	Patumbak	98.744	75.687.276.000,00
13	Deli Tua	59.923	45.930.979.500,00
14	Sunggal	243.785	186.861.202.500,00
15	Hamparan Perak	164.430	126.035.595.000,00
16	Labuhan Deli	67.806	51.973.299.000,00
17	Percut Sei Tuan	408.770	313.322.205.000,00
18	Batang Kuis	66.194	50.737.701.000,00
19	Pantai Labu	49.872	38.226.888.000,00
20	Beringin	61.773	47.349.004.500,00

No	Kecamatan	2022	Kebutuhan Kalori (Kkal/tahun)
21	Lubuk Pakam	89.161	68.341.906.500,00
22	Pagar Merbau	39.984	30.647.736.000,00
Total		**1.953.986**	**1.497.730.269.000,00**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029

Kebutuhan kalori pangan di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2022, sebesar 1.497 Milyar Kkal per tahun. Terbesar kebutuhan panahan di Kecamatan Percut Sei Tuan, paling sedikit Kecamatan Gunung Meriah.

Daya Dukung Penyediaan Pangan

Daya dukung penyediaan pangan menggambarkan surplus-defisit penyediaan pangan untuk kebutuhan pangan oleh di Kabupaten Deli Serdang bagi seluruh penduduk Kabupaten Deli Serdang.

Tabel 2. 12
Daya Dukung Pangan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022

Kecamatan	Ketersediaan	Kebutuhan	Surplus/Defisit	Daya Dukung
Gunung Meriah	6.181.810.617,65	2.494.191.000,00	3.687.619.617,65	Belum Terlampaui
S.T.M. Hulu	17.174.972.219,41	10.464.258.000,00	6.710.714.219,41	Belum Terlampaui
Sibolangit	8.926.193.587,65	15.370.624.500,00	-6.444.430.912,35	Terlampaui
Kutalimbaru	43.101.548.302,94	27.938.925.000,00	15.162.623.302,94	Belum Terlampaui
Pancur Batu	32.303.139.442,47	72.182.838.000,00	-39.879.698.557,53	Terlampaui
Namo Rambe	45.043.926.143,53	30.561.121.500,00	14.482.804.643,53	Belum Terlampaui
Biru-Biru	30.573.996.232,35	30.312.009.000,00	261.987.232,35	Belum Terlampaui
S.T.M. Hilir	58.213.790.998,82	25.535.947.500,00	32.677.843.498,82	Belum Terlampaui
Bangun Purba	8.356.108.401,18	18.923.352.000,00	-10.567.243.598,82	Terlampaui
Galang	40.307.911.926,47	54.534.175.500,00	-14.226.263.573,53	Terlampaui
Tanjung Morawa	87.409.703.072,71	174.299.034.000,00	-86.889.330.927,29	Terlampaui

Kecamatan	Ketersediaan	Kebutuhan	Surplus/Defisit	Daya Dukung
Patumbak	42.427.862.252,35	75.687.276.000,00	-33.259.413.747,65	Terlampaui
Delitua	1.706.276.593,53	45.930.979.500,00	-44.224.702.906,47	Terlampaui
Sunggal	123.832.691.567,65	186.861.202.500,00	-63.028.510.932,35	Terlampaui
Hamparan Perak	241.899.759.316,24	126.035.595.000,00	115.864.164.316,24	Belum Terlampaui
Labuhan Deli	55.730.601.364,12	51.973.299.000,00	3.757.302.364,12	Belum Terlampaui
Percut Sei Tuan	156.661.814.695,59	313.322.205.000,00	-156.660.390.304,41	Terlampaui
Batang Kuis	35.674.110.708,88	50.737.701.000,00	-15.063.590.291,12	Terlampaui
Pantai Labu	760.370.213.946,06	38.226.888.000,00	722.143.325.946,06	Belum Terlampaui
Beringin	92.755.460.988,24	47.349.004.500,00	45.406.456.488,24	Belum Terlampaui
Lubuk Pakam	19.150.639.655,29	68.341.906.500,00	-49.191.266.844,71	Terlampaui
Pagar Merbau	31.157.909.661,76	30.647.736.000,00	510.173.661,76	Belum Terlampaui
Kab. Deli Serdang	**1.938.960.441.694,88**	**1.497.730.269.000,00**	**441.230.172.694,88**	**Belum Terlampaui**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029

Pada tahun 2022, daya dukung penyediaan pangan keseluruhan di Kabupaten Deli Serdang Belum Terlampaui, dengan surplus 441,23 milyar Kkal per tahun. Akan tetapi terdapat beberapa kecamatan yang memiliki daya dukung pangan terlampaui atau defisit, yaitu : Kecamatn Sibolangit, Pancur Batu, Bangun Purba, Galang, Tanjung Morawa, Patumbak, Delitua, Sunggal, Percut Sei Tuan, Batang Kuis, dan Lubuk Pakam.

Proyeksi Daya Dukung Penyediaan Pangan

Dengan pendekatan, menghitung produktivitas kalori pangan dari **kawasan pertanian pangan** di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2022 dan dianggap tetap hingga akhir tahun rencana, sehingga kalori pangan pun dapat diproyeksi hingga pada tahun 2029. Dengan demikian, didapatkan daya dukung pangan Kabupaten Deli Serdang Belum Terlampaui pada tahun 2029, dan akan terlampaui dari tahun 2025 hingga tahun 2029, dengan jumlah surplus yang menurun.

Tabel 2. 13
Proyeksi Daya Dukung Pangan Tutupan Lahan Wilayah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029

Jenis Tutupan Lahan	**2022**	**2029**	**Perubahan** /tahun	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Sawah	22.810,15	26.947,78	591	24.583,78	25.174,78	25.765,78	26.356,78	26.947,78
Ladang	35.148,57	28.023,03	-1.018	32.095,03	31.077,03	30.059,03	29.041,03	28.023,03
Tambak	6.661,60	-	-290	5.792,70	5.502,70	5.212,70	4.922,70	4.632,70
Produksi Kalori Pangan (kkal/thn)								
Sawah	334.730.742.500,00			360.758.074.138,34	369.430.785.243,62	378.103.496.348,90	386.776.207.454,18	395.448.918.559,46
Ladang	1.589.265.299.594,88			1.451.197.630.060,54	1.405.168.098.777,92	1.359.138.567.495,30	1.313.109.036.212,68	1.267.079.504.930,06
Tambak	14.964.399.600,00			13.012.526.008,08	12.361.079.783,98	11.709.633.559,88	11.058.187.335,78	10.406.741.111,68
Produktivitas (kkal/ha/tahun) Produksi Kalori/Luas Lahan								
Sawah	14.674.638,08			14.674.638,08	14.674.638,08	14.674.638,08	14.674.638,08	14.674.638,08
Lading	45.215.649,59			45.215.649,59	45.215.649,59	45.215.649,59	45.215.649,59	45.215.649,59
Tambak	2.246.366,29			2.246.366,29	2.246.366,29	2.246.366,29	2.246.366,29	2.246.366,29

Jenis Tutupan Lahan	2022	2029	Perubahan /tahun	2025	2026	2027	2028	2029
Proyeksi Produksi Kalori Produtivitas * Luas								
Sawah				360.758.121.222,02	369.430.785.243,62	378.103.496.348,90	386.776.207.454,18	395.448.918.559,46
Lading				1.451.197.499.683,37	1.405.168.098.777,92	1.359.138.567.495,30	1.313.109.036.212,68	1.267.079.504.930,06
Tambak				13.012.521.391,30	12.361.079.783,98	11.709.633.559,88	11.058.187.335,78	10.406.741.111,68
Total Ketersediaan Kalori Pangan (kkal/tahun)				1.824.968.142.296,69	1.786.959.963.805,52	1.748.951.697.404,08	1.710.943.431.002,64	1.672.935.164.601,20
Proyeksi Jumlah Penduduk (jiwa)				2.027.809	2.053.006	2.078.595	2.104.475	2.130.679
Proyeksi Kebutuhan Kalori Pangan (kkal/tahun)				1.555.380.198.225,00	1.574.706.927.150,00	1.594.334.329.875,00	1.614.184.936.875,00	1.634.284.059.975,00
Surplus/Defisit				269.587.944.071,69	212.253.036.655,52	154.617.367.529,08	96.758.494.127,64	38.651.104.626,20
Daya Dukung Pangan				Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029

Proyeksi daya dukung air hingga tahun 2029 akan bergantung pada proyeksi penduduk dan proyeksi tutupan lahan. Proyeksi penduduk Kabupaten Deli Serdang hingga tahun 2029 telah ditampilkan pada pembahasan Kondisi Kependudukan sebelumnya. Proyeksi tutupan lahan Kabupaten Deli Serdang hingga tahun 2029 akan memanfaatkan rencana pola ruang berdasarkan RTRW Kabupaten Deli Serdang. Pada tabel berikut ditampilkan perubahan tutupan lahan, dimana tutupan lahan awal memanfaatkan peta tutupan lahan/penggunaan lahan dari overlap penggunaan lahan RTRW dengan peta BPKHTL tahun 2022, serta tutupan lahan RTRW tahun 2029 akan memanfaatkan peta rencana pola ruang, dimana klasifikasi tutupan lahan akan saling disesuaikan dari kedua sumber peta tersebut.

Tabel 2. 14
Proyeksi Perubahan Tutupan Lahan Wilayah Kabupaten Deli Serdang Pada Tahun 2025-2029

Jenis tutupan lahan	Guna lahan 2022	RT/RW	Perubahan per tahun	2025	2026	2027	2028	2029
Badan air	926,46	1.893,76	42,06	1.052,63	1.094,69	1.136,75	1.178,81	1.220,87
Industri	2.033,00	7.443,10	235,22	2.738,67	2.973,89	3.209,11	3.444,33	3.679,55
Vegetasi lain	6.241,17	4.831,20	- 61,30	6.057,26	5.995,96	5.934,66	5.873,36	5.812,06
Hutan	24.752,47	62.907,79	1.658,93	29.729,25	31.388,18	33.047,11	34.706,04	36.364,97
Perkebunan	150.249,09	100947.81	- 2.143,53	143.818,49	141.674,96	139.531,43	137.387,90	135.244,37
Pemukiman	25.319,64	46.290,62	911,78	28.054,98	28.966,76	29.878,54	30.790,32	31.702,10
Hortikultura	35.148,57	11.738,09	- 1.017,85	32.095,03	31.077,18	30.059,33	29.041,48	28.023,63
Sawah	22.810,15	-	591,21	24.583,78	25.174,99	25.766,20	26.357,41	26.948,62
Tambak	6.661,60	-	- 289,63	5.792,70	5.503,07	5.213,44	4.923,81	4.634,18
Bangunan non pemukiman	1.484,90	3.166,69	73,12	1.704,87	1.777,99	1.851,11	1.924,23	1.997,35
Bandara	6,95	6,95	-	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95
Jumlah	**275.634,00**	**275.634,00**		**275.634,00**	**275.634,00**	**275.634,00**	**275.634,00**	**275.634,00**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029

Sumber daya air yang tersedia di suatu wilayah dapat berupa sumber air tanah dan air permukaan. Ketersediaan air tanah yang dimiliki suatu wilayah adalah air tanah pada aquifer bebas dengan jumlah sebesar kemampuan lahan pada wilayah tersebut menyerap air hujan. Untuk menjaga kelestarian sumberdaya air, air tanah dalam yang merupakan air pada aquifer tertekan tidak diperhitungkan dalam penghitungan ketersediaan air, karena air tanah dalam dikategorikan sebagai non-renewable resources (sumberdaya tidak terbarukan). Sementara sumber air permukaan dapat bersumber dari air sungai, air danau, situ, bendungan yang ada di wilayah tersebut dan atau dipasok/dialirkan dari luar wilayah.

Daya dukung air ditinjau dari ketersediaan air (supply air) dan kebutuhan air (demand air) terdapat dihitung melalui ketersediaan air dengan pendekatan limpasan air dan potensi mata air yang dibandingkan dengan kebutuhan air dari total kebutuhan air domestik dan non domestik. Melalui perhitungan berikut:

DDA = SA-DA,

dimana : DDA adalah Daya Dukung Air, SA Ketersediaan Air, dan DA adalah Kebutuhan Air.

Ketersediaan Air

Potensi jasa penyediaan air bersih bagi Kabupaten Deli Serdang dapat terbagi atas: air permukaan maupun air tanah. Karena tidak diperoleh data air tanah, daya dukung penyediaan air permukaan di wilayah Kabupaten Deli Serdang dihitung dari limpasan air hujan.

Penghitungan debit air limpasan akan menggunakan Metoda Rasional. Penghitungan limpasan air hujan menggunakan metoda rasional. Debit limpasan yang dimaksud adalah debit limpasan air hujan dan debit limpasan domestik. Debit limpasan air hujan mempertimbangkan beberapa parameter, yaitu : koefisien limpasan, intensitas hujan, dan luas area tangkap. Koefisien limpasan merupakan penjumlahan pembobotan dari parameter permukaan.

Perhitungan debit rencana menggunakan rumus berikut:

SA = 10x C x I x A

dimana :

SA = ketersediaan air (m^3/tahun)
C = koefisien pengaliran/limpasan air tertimbang
I = intensitas curah hujan (mm/tahun)
A = luas daerah tangkapan hujan (Ha)

Koefisien limpasan air tertimbang (C) merupakan koefisien laju run off surface yang dipengaruhi oleh jenis tutupan lahan. Perhitungan koefisien limpasan air tertimbang (I) menggunakan rumus berikut :

$$C = \frac{\sum(Ci\ x\ Ai)}{\sum Ai}$$

Tabel 2. 15
Koefisien Limpasan Air Permukaan

No	Deskripsi Permukaan	C_i
1.	Hutan Lahan Kering Sekunder	0,03
2.	Belukar	0,07
3.	Hutan Primer	0,02
4.	Hutan Tanaman Industri	0,05
5.	Hutan Rawa Sekunder	0,15
6.	Perkebunan	0,4
7.	Pertanian Lahan Kering	0,1
8.	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	0,1
9.	Permukiman	0,6
10.	Sawah	0,15
11.	Tambak	0,05
12.	Lahan Terbuka	0,2
13.	Perairan	0,05

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029

Berikut hasil pertimbangan ketersediaan air bersih (limpasan air) di Kabupaten Deli Serdang, koefisien limpasan air hujan yang berbeda untuk setiap tipe tutupan lahan. Ketersediaan air (limpasan air permukaan) per tahun di wilayah Kabupaten Deli Serdang, sebesar 3.009.172.161.59 m3/tahun, yang besar pada Kecamatan Hamparan

Perak sebesar 396,47 juta m3/tahun, dan paling sedikit pada Kecamatan Deli Tua. Perhitungan ini dilakukan dengan curah hujan Kabupaten Deli Serdang sebesar 3.495 mm/tahun.

Tabel 2. 16
Ketersediaan Limpasan Air Permukaan

Kecamatan	Ketersediaan Air Limpasan
Bangun Purba	215.856.040,28
Batang Kuis	60.411.860,36
Beringin	61.454.601,11
Biru-Biru	133.812.150,64
Deli Tua	12.236.913,01
Galang	192.217.763,34
Gunung Meriah	39.199.742,63
Hamparan Perak	396.470.971,99
Kutalimbaru	213.075.510,63
Labuhan Deli	94.990.402,93
Lubuk Pakam	41.484.504,36
Namorambe	94.451.683,66
Pagar Merbau	65.678.319,11
Pancur Batu	145.780.041,44
Pantai Labu	53.747.345,01
Patumbak	71.329.273,70
Percut Sei Tuan	238.700.008,02
Senembah Tanjung Muda Hilir	277.350.136,03
Senembah Tanjung Muda Hulu	181.664.842,71
Sibolangit	130.029.993,32
Sunggal	104.065.358,58
Tanjung Morawa	185.164.698,72
Total	**3.009.172.161,59**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029

Kebutuhan Air

Berdasarkan Buku Pedoman Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah (Kemen LHK, Direktorat

Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor PDLKWS, 2019), menjelaskan bahwa standar kebutuhan air hidup layak bagi rumah tangga (domestik) dan non domestik disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 17
Standar Kebutuhan Air Domestik dan Non Domestik

No	Jenis Kebutuhan Air	Debit
1	Rumah Tangga	43,2 m3/kapita/tahun
2	Sawah Irigasi	10.368 m3/ha/tahun
3	Sawah Tadah Hujan	5.184 m3/ha/tahun
4	Sawad Pasang Surut	5.184 m3/ha/tahun
5	Ladang	7.776 m3/ha/tahun
6	Perkebunan	11.664 m3/ha/tahun
7	Kebun Campuran	7.776 m3/ha/tahun
8	Tanaman Campuran	7.776 m3/ha/tahun
9	Lahan terbangun	5 m3/ha/hari 30 % kebutuhan domestik
10	Bangunan Industri	0,4 liter/ha/detik
12	Bandar Udara	10 liter/ha/detik
13	Pelabuhan Laut	50 liter/ha/detik

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029

Kebutuhan air dengan penjumlahan kebutuhan domestik dan kebutuhan non domestik,

DA = DAd + DAnd

Keterangan : DAd : kebutuhan air domestik (m^3 /tahun)

DAnd : kebutuhan air non domestik (m^3/tahun)

Daya Dukung Air Bersih

Besarnya daya dukung air dihitung dengan perbandingan antara potensi sumber air permukaan dengan kebutuhannya, sebagai berikut.

DDA = SA - DA

SA : Ketersediaan Air Bersih

DA : Kebutuhan Air Bersih

Hingga tahun 2022, daya dukung air bersih Kabupaten Deli Serdang **belum terlampaui** sebesar **432,21 juta m^3/tahun**, terdiri dari **ketersediaan air** sebesar **3,01 Milyar m^3/tahun**, sedangkan kebutuhan air bersih total

sebesar **2,58 Milyar m³/tahun.** Tetapi, 2 (dua) kecamatan telah mengalami **daya dukung air bersih yang telah melampaui**, yaitu : **Kecamatan Pagar Merbau dan Pantai Labu**. Sebagian besar kecamatan-kecamatan ini memang termasuk wilayah dengan jumlah penduduk yang besar dan terus berkembang.

Tabel 2. 18
Daya Dukung Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Deli Serdang pada Tahun 2022

Kecamatan	Ketersediaan Air Limpasan	Kebutuhan	Defisit/Surplus	Daya Dukung
Bangun Purba	215.856.040,28	182.747.292,10	33.108.748,18	Belum Terlampaui
Batang Kuis	60.411.860,36	42.345.344,30	18.066.516,06	Belum Terlampaui
Beringin	61.454.601,11	43.142.136,93	18.312.464,18	Belum Terlampaui
Biru-Biru	133.812.150,64	112.973.995,37	20.838.155,27	Belum Terlampaui
Deli Tua	12.236.913,01	8.186.964,53	4.049.948,48	Belum Terlampaui
Galang	192.217.763,34	171.166.813,80	21.050.949,54	Belum Terlampaui
Gunung Meriah	39.199.742,63	32.628.683,78	6.571.058,85	Belum Terlampaui
Hamparan Perak	396.470.971,99	337.427.861,14	59.043.110,85	Belum Terlampaui
Kutalimbaru	213.075.510,63	186.818.231,91	26.257.278,72	Belum Terlampaui
Labuhan Deli	94.990.402,93	85.601.951,22	9.388.451,71	Belum Terlampaui
Lubuk Pakam	41.484.504,36	34.061.391,44	7.423.112,92	Belum Terlampaui
Namorambe	94.451.683,66	77.941.558,00	16.510.125,65	Belum Terlampaui
Pagar Merbau	65.678.319,11	66.861.216,51	-1.182.897,39	Terlampaui
Pancur Batu	145.780.041,44	122.615.414,68	23.164.626,76	Belum Terlampaui
Pantai Labu	53.747.345,01	83.753.812,84	-30.006.467,83	Terlampaui
Patumbak	71.329.273,70	53.903.891,04	17.425.382,66	Belum Terlampaui
Percut Sei Tuan	238.700.008,02	193.408.243,77	45.291.764,25	Belum Terlampaui
Senembah Tanjung Muda Hilir	277.350.136,03	238.409.885,67	38.940.250,36	Belum Terlampaui
Senembah Tanjung Muda Hulu	181.664.842,71	164.412.579,33	17.252.263,37	Belum Terlampaui
Sibolangit	130.029.993,32	120.287.440,65	9.742.552,67	Belum Terlampaui
Sunggal	104.065.358,58	77.358.594,08	26.706.764,50	Belum Terlampaui
Tanjung Morawa	185.164.698,72	140.909.482,02	44.255.216,71	Belum Terlampaui
Total	**3.009.172.161,59**	**2.576.962.785,12**	**432.209.376,48**	**Belum Terlampaui**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029

Dengan menjumlahkan debit Sungai Belawan, Sungai Ular, dan Sungai Belumai dengan total debit 122,4 m3/detik. Air baku sungai adalah 20% dari total debit sungai. Maka, total ketersediaan air baku sungai per tahun sebesar 772.001.280 m3/tahun. Daya dukung air di Kabupaten Deli Serdang sebesar 1.204.210.656,48 m3/tahun.

Proyeksi daya dukung air bersih hingga tahun 2029 dengan menggunakan pertumbuhan penduduk hingga tahun 2029 dengan laju pertumbuhan yang sudah disajikan sebelumnya dan perubahan tutupan dengan menggunakan rencana pola ruang yang diatur pada RTRW Kabupaten Deli Serdang sebagai kondisi tutupan lahan di akhir tahun 2029. Diasumsikan debit sungai konstan hingga tahun 2029.

Tabel 2. 19
Proyeksi Daya Dukung Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Deli Serdang Pada Tahun 2025-2029

Jenis Tutupan lahan	C	D	2025		2026		2027		2028		2029	
			Ketersediaan	Kebutuhan	Ketersediaan	Kebutuhan	Ketersediaan	Kebutuhan	Ketersediaan	Kebutuhan	Ketersediaan	Kebutuhan
Badan Air	0,05	-	52,63	-	54,73		56,84		58,94		61,05	
Industri	0,6	12.614	1.643,20	34.546.645,50	1.784,33	37.513.823,91	1.925,46	40.481.002,32	2.066,59	43.448.180,73	2.207,72	46.415.359,14
Vegetasi Lain	0,07	-	424,01	-	419,72	-	415,43		411,14		406,85	
Hutan	0,03	-	891,88	-	941,65	-	991,42		1.041,19		1.090,96	
Perkebunan	0,4	11.664	57.527,39	1.677.498.810,02	56.669,98	1.652.496.633,85	55.812,57	1.627.494.457,68	54.955,16	1.602.492.281,51	54.097,75	1.577.490.105,34
Permukiman	0,6	1.825	16.832,99	51.200.347,14	17.380,06	52.864.348,99	17.927,13	54.528.350,84	18.474,20	56.192.352,69	19.021,27	57.856.354,54
Holtikultura	0,1	7.776	3.209,50	249.570.930,85	3.107,72	241.656.154,87	3.005,94	233.741.378,89	2.904,16	225.826.602,91	2.802,38	217.911.826,93
Sawah	0,15	10.368	3.687,57	254.884.664,39	3.776,25	261.014.329,76	3.864,93	267.143.995,13	3.953,61	273.273.660,50	4.042,29	279.403.325,87
Tambak	0,05	10.368	289,63	60.058.692,25	217,23	57.055.757,64	144,83	54.052.823,03	72,43	51.049.888,42	0,03	48.046.953,81
Bangunan Non Pemukiman	0,6	1.825	1.022,56	3.110.275,25	1.066,43	3.243.721,63	1.110,30	3.377.168,01	1.154,17	3.510.614,39	1.198,04	3.644.060,77
Bandara	0,6	315.360	0,60	315.360,00	0,60	315.360,00	0,60	315.360,00	0,60	315.360,00	0,60	315.360,00
Total			85.581,96	2.331.185.725,40	85.418,70	2.306.160.130,65	85.255,45	2.281.134.535,90	85.092,19	2.256.108.941,15	84.928,94	2.231.083.346,40
Koef. Tertimbang			0,31									
Sedia Air limpasan Limpasan (10*c*A*i)			2.991.068.672,66		2.987.386.895,12		2.983.705.117,58		2.980.023.340,04		2.976.341.562,50	
i = 3495 mm/tahun												
Air Baku Sungai			772.001.280,00		772.001.280,00		772.001.280,00		772.001.280,00		772.001.280,00	
(20% Debit)												
Ketersediaan Air			3.763.069.952,66		3.763.069.952,66		3.763.069.952,66		3.763.069.952,66		3.763.069.952,66	
Total												
Jumlah Penduduk				2.027.809		2.053.006		2.078.595		2.104.475		2.130.679
Kebutuhan Domestik				175.202.697,60		177.379.718,40		179.590.608,00		181.826.640,00		184.090.665,60
(86,4 m3/kapita)												
Kebutuhan GL				2.330.870.365,42		2.305.844.770,67		2.280.819.175,92		2.255.793.581,17		2.230.767.986,42
Kebutuhan Air Total				2.506.073.063,02		2.483.224.489,07		2.460.409.783,92		2.437.620.221,17		2.414.858.652,02
Surplus-Defisit				**1.256.996.889,64**		**1.279.845.463,59**		**1.302.660.168,74**		**1.325.449.731,49**		**1.348.211.300,64**
Daya Dukung				**Belum Terlampaui**		**Belum Terlampaui**		**Belum Terlampaui**		**Belum Terlampaui**		**Belum Terlampaui**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029

Pada tahun 2025, diproyeksi daya dukung air bersih seluruh Kabupaten Deli Serdang belum terlampaui, dan diperkirakan hingga akhir tahun 2029 tetap akan belum terlampaui, diperkirakan akan meningkat (surplus meningkat). Kondisi surplus meningkat karena kebutuhan air yang menurun disebabkan oleh berkurangnya lahan perkebunan.

Dalam kondisi riil, kondisi daya dukung penyediaan air dapat semakin menurun karena dapat dipengaruhi yang mengurangi ketersediaan air bersih oleh kondisi-kondisi saat ini terjadi dan tingkat layanan pengelolaan tutupan lahan dahulu, sanitasi dan limbah di wilayah Kabupaten Deli Serdang yang masih rendah, seperti : erosi dan sedimentasi yang terbawa dari hulu, kapasitas penanganan sanitasi, limbah dan sampah yang belum terolah sehingga limbah dan sampah memasuki badan air sungai sehingga kualitas air sungai menurun dan selanjutnya mengurangi kuantitas air sungai.

Risiko dan Dampak Lingkungan Hidup

Analisis risiko dan dampak lingkungan hidup akan melihat kondisi beban pencemaran atau kualitas lingkungan hidup, berupa beban pencemaran yang berdampak terhadap kondisi kualitas air, kualitas udara dan kualitas tanah oleh perkembangan yang terjadi, serta melihat risiko kebencanaan di wilayah Kabupaten Deli Serdang.

A. Timbulan Limbah dan Sampah

Timbulan sampah oleh domestik akan membebani daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Tabel 2. 20
Proyeksi Timbulan Sampah di Kabupaten Deli Serdang 2025-2029

No	Kecamatan	2025	2026	2027	2028	2029
1	Gunung Meriah	1,71	1,73	1,77	1,80	1,83
2	S.T.M Hulu	7,07	7,15	7,23	7,31	7,40
3	Sibolangit	10,38	10,50	10,63	10,75	10,88
4	Kutalimbaru	18,86	19,07	19,29	19,51	19,73
5	Pancurbatu	48,73	49,29	49,85	50,43	51,01
6	Namorambe	20,56	20,77	20,99	21,20	21,42
7	Biru-biru	20,54	20,81	21,07	21,34	21,62

No	Kecamatan	2025	2026	2027	2028	2029
8	S.T.M Hilir	17,30	17,52	17,74	17,96	18,19
9	Bangun Purba	12,84	13,01	13,18	13,36	13,53
10	Galang	37,05	37,55	38,06	38,58	39,11
11	Tanjung Morawa	118,42	120,04	121,69	123,36	125,05
12	Patumbak	51,00	51,56	52,12	52,69	53,26
13	Deli Tua	31,05	31,42	31,80	32,18	32,56
14	Sunggal	126,24	127,72	129,22	130,73	132,27
15	Hamparan Perak	84,95	85,88	86,82	87,77	88,73
16	Labuhan Deli	35,13	35,55	35,97	36,40	36,84
17	Percut Sei Tuan	212,66	215,49	218,36	221,27	224,22
18	Batang Kuis	34,48	34,95	35,43	35,91	36,40
19	Pantai Labu	25,93	26,27	26,62	26,97	27,33
20	Beringin	32,22	32,67	33,13	33,60	34,08
21	Lubuk pakam	46,16	46,70	47,24	47,80	48,35
22	Pagar Merbau	20,64	20,86	21,08	21,31	21,54
Kab. Deli Serdang		**1.013,90**	**1.026,50**	**1.039,30**	**1.052,24**	**1.065,34**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029

Berdasarkan SNI 19-3983-1995 tentang Spesifikasi Timbulan Sampah Kota Sedang dan Kota Kecil, timbulan sampah per kapita sebanyak 0,5 kg per hari, sehingga timbulan sampah di Kabupaten Deli Serdang sebesar 1.013,90 ton per hari pada tahun 2025 dan akan terus meningkat menjadi 1.065,34 per hari pada tahun 2029, hal ini sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduknya. Timbulan sampah terbanyak di Kecamatan Percut Sei Tuan.

Timbulan Lumpur Tinja

Berdasarkan Petunjuk Teknis Tata Cara Perencanaan IPLT No. CT/AL/Re-TC/001/98, 0,5 lter per kapita per hari atau 0,182 m3 per kapita pertahun, timbulan lumpur tinja di Kabupaten Deli Serdang sebesar 370.057 m3/tahun pada tahun 2025 menjadi 388.849 m3/tahun, hal ini sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduknya. Timbulan lumpur tinja terbanyak di Kecamatan Percut Sei Tuan.

Tabel 2. 21
Proyeksi Timbulan Lumpur Tinja Kabupaten Deli Serdang 2025-2029

No	Kecamatan	2025	2026	2027	2028	2029
1	Gunung Meriah	625	630	646	657	668
2	S.T.M Hulu	2.579	2.608	2.638	2.669	2.699
3	Sibolangit	3.789	3.833	3.878	3.924	3.970
4	Kutalimbaru	6.883	6.961	7.041	7.122	7.203
5	Pancurbatu	17.787	17.989	18.196	18.405	18.617
6	Namorambe	7.504	7.582	7.660	7.739	7.819
7	Biru-biru	7.498	7.594	7.692	7.791	7.890
8	S.T.M Hilir	6.313	6.393	6.474	6.555	6.638
9	Bangun Purba	4.687	4.749	4.812	4.875	4.940
10	Galang	13.522	13.706	13.893	14.082	14.274
11	Tanjung Morawa	43.223	43.816	44.417	45.027	45.645
12	Patumbak	18.616	18.819	19.024	19.231	19.441
13	Deli Tua	11.333	11.469	11.606	11.745	11.886
14	Sunggal	46.076	46.617	47.164	47.718	48.278
15	Hamparan Perak	31.006	31.346	31.689	32.037	32.388
16	Labuhan Deli	12.823	12.976	13.131	13.287	13.446
17	Percut Sei Tuan	77.621	78.655	79.703	80.765	81.841
18	Batang Kuis	12.583	12.756	12.930	13.107	13.287
19	Pantai Labu	9.466	9.590	9.716	9.844	9.974
20	Beringin	11.759	11.925	12.094	12.265	12.438
21	Lubuk pakam	16.848	17.045	17.244	17.445	17.649
22	Pagar Merbau	7.533	7.614	7.695	7.777	7.860
Kab. Deli Serdang		**370.075**	**374.673**	**379.344**	**384.067**	**388.849**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029

Air Limbah Domestik

Bahan pencemar pada air limbah domestik yang berasal dari berbagai kegiatan industri, pertanian, rumah tangga di daratan akhirnya dapat menimbulkan dampak negatif bukan saja pada perairan sungai, tetapi juga perairan pesisir dan lautan. Sumber pencemaran perairan pesisir dan sungai di Kabupaten Deli Serdang berasal dari kegiatan industri, kegiatan domestik, dan pertanian/perkebunan.

Dengan standar volume air limbah domestik standar dari Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001 dihasilkan dari air bersih (50 liter/kapita/hari), air limbah domestik 80 % dari kebutuhan air bersih, yaitu 40 liter/kapita/hari pada kawasan perumahan, maka volume air limbah domestik di Kabupaten Deli Serdang sebesar 29,61 juta m3/tahun pada tahun 2025 menjadi 31,17 juta m3/tahun pada tahun 2029.

Tabel 2. 22
Air Limbah Domestik Kabupaten Deli Serdang 2025-2029

No	Kecamatan	2025	2026	2027	2028	2029
1	Gunung Meriah	49.961	50.370	51.655	52.531	53.421
2	S.T.M Hulu	206.298	208.663	211.072	213.496	215.949
3	Sibolangit	303.140	306.673	310.265	313.900	317.565
4	Kutalimbaru	550.624	556.917	563.283	569.736	576.247
5	Pancur Batu	1.422.974	1.439.122	1.455.664	1.472.410	1.489.346
6	Namorambe	600.337	606.542	612.806	619.128	625.537
7	Biru-biru	599.856	607.550	615.346	623.245	631.231
8	S.T.M Hilir	505.058	511.438	517.891	524.417	531.046
9	Bangun Purba	374.943	379.907	384.929	390.024	395.178
10	Galang	1.081.758	1.096.489	1.111.425	1.126.551	1.141.895
11	Tanjung Morawa	3.457.864	3.505.299	3.553.392	3.602.156	3.651.591
12	Patumbak	1.489.288	1.505.523	1.521.933	1.538.519	1.555.280
13	Deli Tua	906.660	917.508	928.502	939.612	950.854
14	Sunggal	3.686.077	3.729.351	3.773.136	3.817.433	3.862.226
15	Hamparan Perak	2.480.482	2.507.667	2.535.159	2.562.942	2.591.033
16	Labuhan Deli	1.025.825	1.038.060	1.050.455	1.062.982	1.075.670
17	Percut Sei Tuan	6.209.716	6.292.425	6.376.243	6.461.172	6.547.253
18	Batang Kuis	1.006.670	1.020.452	1.034.425	1.048.587	1.062.938
19	Pantai Labu	757.244	767.215	777.304	787.539	797.890
20	Beringin	940.693	953.993	967.484	981.164	995.034
21	Lubuk pakam	1.347.872	1.363.596	1.379.510	1.395.614	1.411.908
22	Pagar Merbau	602.673	609.112	615.609	622.194	628.837

No	Kecamatan	2025	2026	2027	2028	2029
Kab. Deli Serdang		**29.606.011**	**29.973.873**	**30.347.487**	**30.725.350**	**31.107.928**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029

Kualitas Lingkungan Hidup

Kondisi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021-2024 secara umum mengalami peningkatan, tetapi pada pada komponen IKA dan IKTL mengalami cenderung berfluktuasi.

Tabel 2. 23
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021-2024

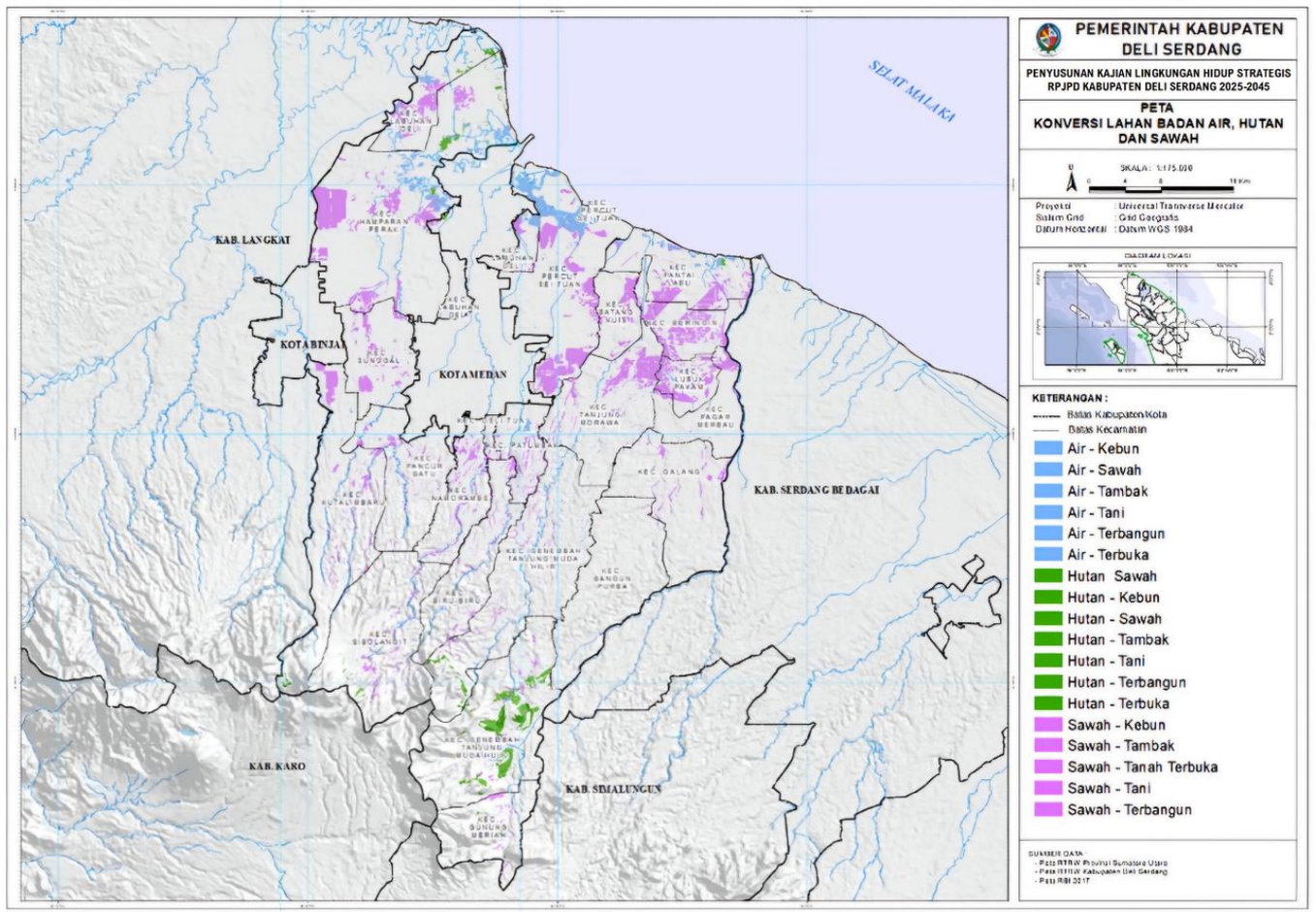
Komponen	2021	2022	2023	2024
IKA	-	59,23	66,19	56,36
IKU	73,34	69,68	72,67	87,03
IKTL	31,42	31,42	31,31	32,01
IKLH	36,58	57,37	61,18	63,45
KATEGORI	Kurang	Sedang	Sedang	Sedang

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029

Perubahan Tutupan Lahan

Perubahan tutupan lahan di wilayah Kabupaten Deli Serdang memperlihatkan dinamika perubahan tutupan lahan dalam periode tahun 2017 hingga 2022. Selama periode 5 tahun, telah terjadi konversi lahan-lahan yang bernilai lingkungan hidup yang tinggi, yaitu : badan air, hutan lahan kering, hutan mangrove dan hutan rawa, dan sawah menjadi guna lahan lainnya, terutama lahan budidaya.

Gambar 2. 5
Peta Konversi Lahan Badan Air, Hutan dan Sawah Di Wilayah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017-2022

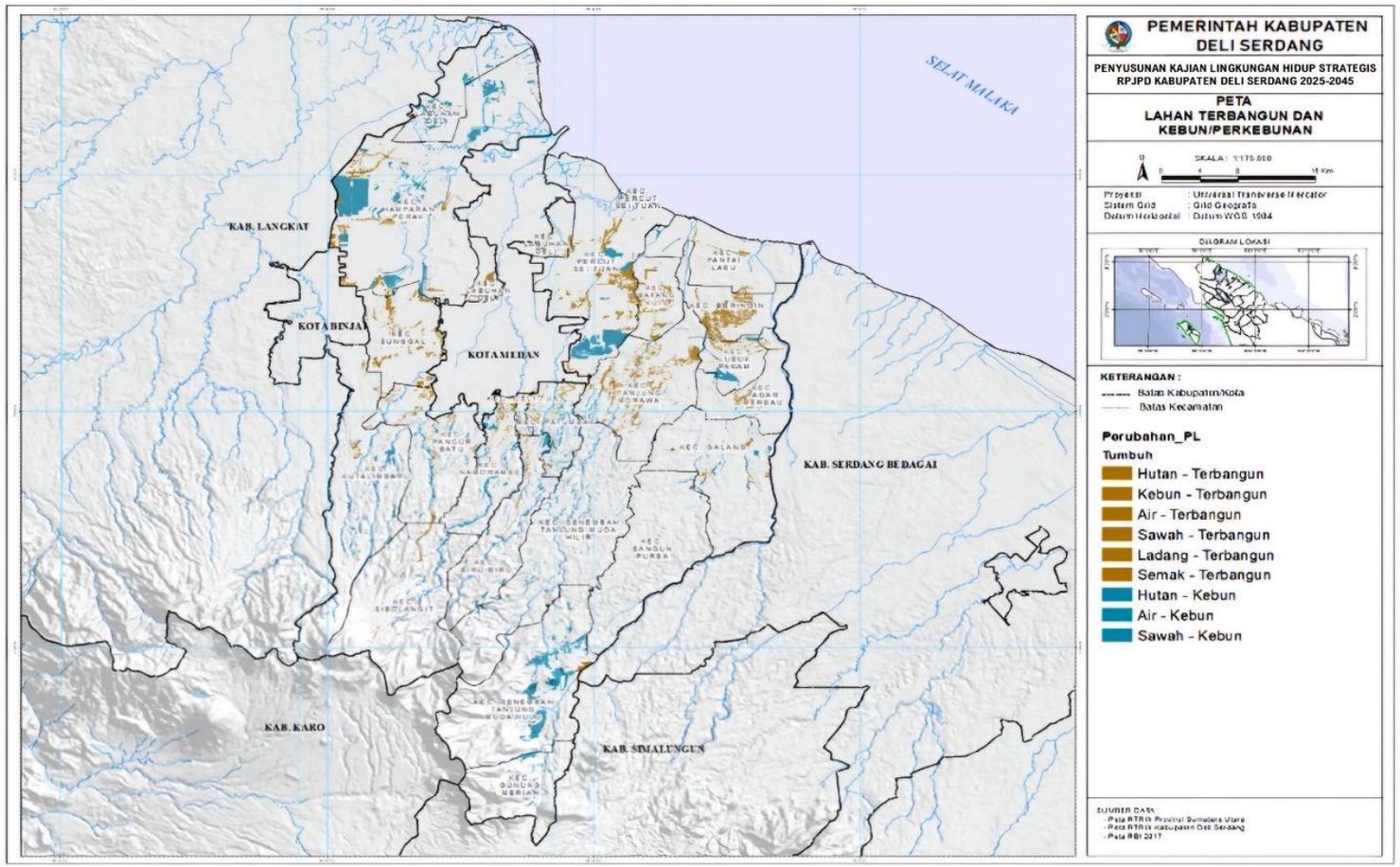


Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029

Perkembangan kegiatan budidaya (lahan terbangun) merupakan konsekuensi perkembangan wilayah, berupa meluasnya perkembangan lahan terbangun, yaitu : berupa lahan permukiman, industri, perkantoran dan bangunan sarana dan prasarana mengkonversi lahan-lahan di antaranya yang bernilai lingkungan tinggi, seperti hutan, persawahan, badan air dan lahan pertanian/kebun secara keseluruhan mencakup 1.436 ha lahan terbangun baru. `

- **Konversi lahan pertanian (227.591 ha)**, terkonversi lahan terbangun dan lahan terbuka seluas 27.062 ha (11,9 %) memiliki dampak ekologis berdampak serius pada lingkungan, kehilangan keanekaragaman hayati, peningkatan erosi tanah, penurunan kualitas air, penurunan produktivitas pangan dan perubahan iklim lokal mengurangi kemampuan ekosistem untuk mendukung kehidupan dan menjaga keseimbangan lingkungan di daerah perkotaan yang berkembang pesat.
- **Konversi area hutan (24.540 ha),** terkonversi 4.3150 (17,5 %) di daerah pantai Kecamatan Hamparan Perak (Kecamatan Hamparan Perak dan di kawasan dataran tinggi dan pegunungan di Kecamatan Sibolangit, Kec. Gunung Meriah, Kec. STM Hulu dan Kec. STM Hilir, berdampak menjadi terjadinya degradasi ekosistem yang luas, termasuk hilangnya keanekaragaman hayati fragmentasi habitat, peningkatan erosi tanah, dan gangguan siklus hidrologi. berkontribusi terhadap perubahan iklim dan menjaga keseimbangan lingkungan di daerah perkotaan yang berkembang pesat.

Gambar 2. 6
Peta Perubahan Tutupan Oleh Tutupan Lahan Terbangun dan Kebun/Perkebunan di Wilayah Kabupaten Deli Serdang (2017-2022)



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029

Tabel 2. 24
Perubahan Tutupan Lahan di Wilayah Kabupaten Deli Serdang (2017-2022)

Guna Lahan 2017	**Guna Lahan 2022**													
	Badan Air	Hutan Lahan Kering Primer	Hutan Lahan Kering Sekunder	Hutan Mangrove Sekunder	Hutan Rawa Sekunder	Pertanian Lahan Kering	Lahan Terbangun	Tanah Terbuka	Perkebunan	Rumput Semak	Sawah	Belukar Rawa	Tambak	**TOTAL**
Badan Air	715		1	186		245	161	6	567	15	211	188	3.144	**5.462**
Hutan Lahan Kering Primer		279	31			282	11		1.179	22	37			**1.841**
Hutan Lahan Kering Sekunder		13.645	1.295			458	1	15	72	709	4			**16.199**
Hutan Mangrove Sekunder	92			3.810	0,21	107	34	80	282		28	742	1.248	**6.423**
Hutan Rawa Sekunder	3			72									1	**77**
Ladang	9	6	171	6		3.523	2.195	25	4.816	96	1.111	95	157	**12.210**
Lahan Terbangun	3	0	1	1		2.899	17.577	11	5.533	1.096	1.222	25	19	**28.389**
Lahan Terbuka	1	19	2	9		128	132	4	503	110	85	2		**996**
Perkebunan	19	177	2.509	41		14.636	2.720	230	117.484	1.379	3.209	462	991	**143.861**
Rumput dan Semak	0	100	680	34		2.079	290	20	1.177	333	160	70	127	**5.072**
Sawah Irigasi	24	18	36	0		8.487	3.834	24	8.783	23	15.247	49	538	**37.063**
TOTAL	**866**	**14.245**	**4.725**	**4.159**	**0,21**	**32.844**	**26.953**	**417**	**140.398**	**3.782**	**21.315**	**1.633**	**6.225**	**257.638**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029

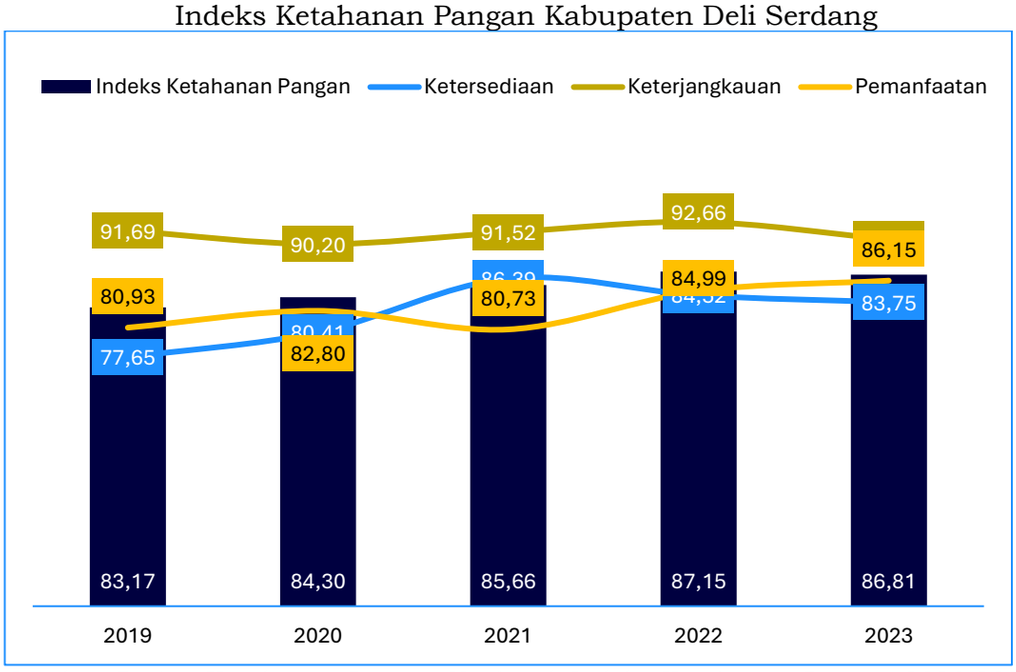
2.1.3. Berketahanan Air, Energi, dan Kemandirian Pangan

Berketahanan Air, Energi, dan Kemandirian Pangan penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga sektor ini saling terkait dan menjadi fondasi bagi stabilitas ekonomi, sosial, dan lingkungan. pertanian membutuhkan air dan energi untuk produksi pangan, sementara pengelolaan air dan energi memerlukan pendekatan yang ramah lingkungan untuk mendukung ketahanan pangan. Oleh karena itu, pendekatan terintegrasi dan kebijakan yang holistik diperlukan untuk mencapai ketahanan.

Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Deli Serdang melalui beberapa aspek, meliputi 1) Ketersediaan, 2) Keterjangkauan, dan 3) Pemanfaatan pangan. Cakupan perkembangan indeks ketahanan pangan di Kabupaten Deli Serdang tahun 2020 - 2023 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. 7
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Deli Serdang



Sumber: Badan Ketahanan Pangan Nasional, Indeks Ketahanan Pangan 2020-2030

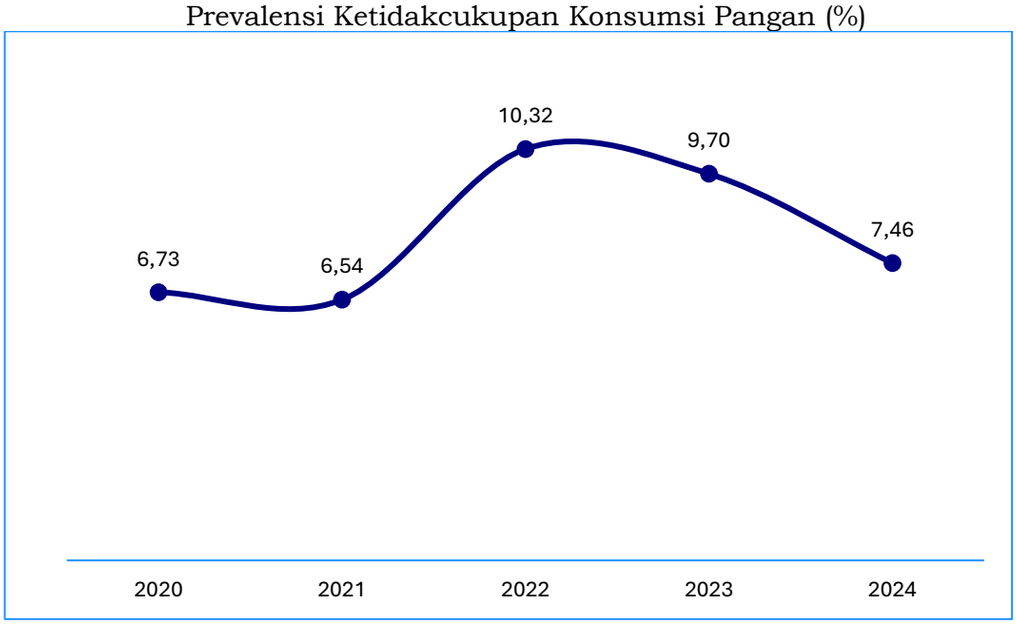
Peningkatan Indeks ketahanan Pangan menunjukkan adanya peningkatan baik dari ketersediaan, aksesibilitas, dan keberlanjutan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Ketersediaan beras di Kabupaten Deli Serdang selalu mencukupi kebutuhan masyarakat selama tahun 2020 hingga tahun 2023.

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan adalah indikator yang mengukur persentase populasi dalam suatu wilayah atau negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsi pangan minimum untuk menjalani hidup yang sehat dan aktif. Indikator ini mencerminkan tingkat kerawanan pangan dan ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses pangan yang cukup, bergizi, dan terjangkau.

Gambar 2. 8
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)



Sumber: website www.bps.go.id diakses tahun 2025

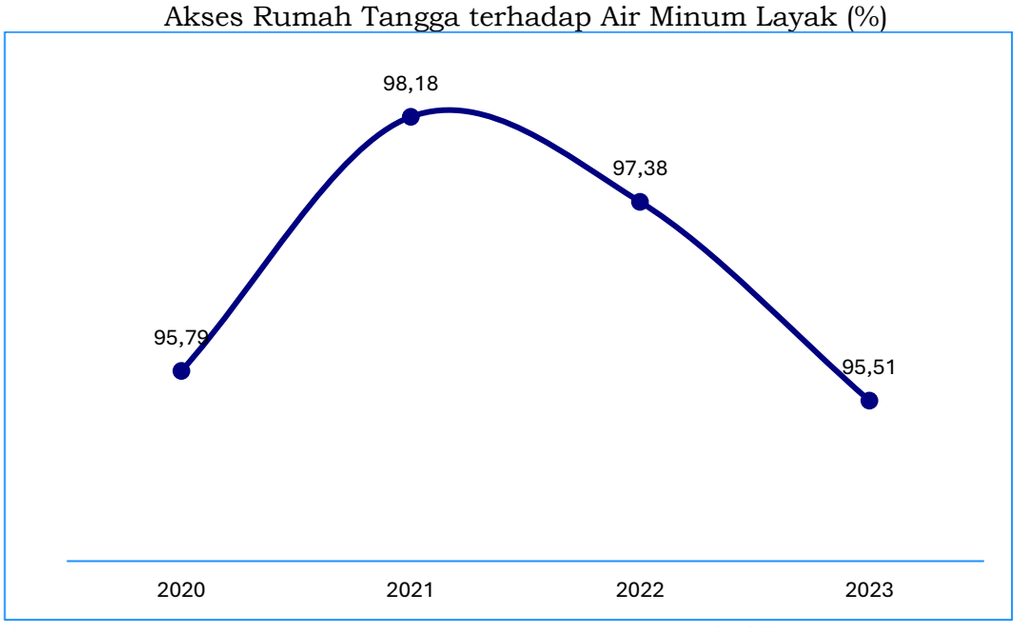
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Kabupaten Deli Serdang cenderung meningkat dari 6,73 persen pada tahun 2020 menjadi 7,46 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya persentase penduduk yang tidak memiliki akses cukup terhadap makanan yang bergizi dan layak. Angka ini menunjukkan bahwa pada tahun 2024 sekitar 7,46% penduduk di Kabupaten Deli Serdang mengalami kekurangan konsumsi pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum mereka. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 9,70%, terjadi penurunan sebesar 2,24%. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang harus mengupayakan kecukupan pangan masyarakat melalui peningkatan

ketersediaan dan distribusi yang merata kepada seluruh masyarakat sehingga konsumsi pangan masyarakat dapat terpenuhi.

Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Layak

Akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum merupakan salah satu hal yang penting dalam menentukan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Ketersediaan air bersih yang aman untuk dikonsumsi sangat bergantung pada infrastruktur penyediaan air, kondisi lingkungan, serta kemampuan ekonomi rumah tangga dalam memperoleh sumber air yang layak.

Gambar 2. 9
Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Layak (%)



Sumber: website https://siperindu.online, diakses tahun 2025

Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Layak di Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan dari 95,79 persen pada tahun 2020 menjadi 98,18 persen pada tahun 2021, namun kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 95,51 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum memperoleh akses terhadap air minum layak. Penurunan ini antara lain disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding dengan pengembangan infrastruktur penyediaan air bersih, serta meningkatnya timbulan limbah dan sampah yang berdampak pada kualitas sumber air baku. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang akan terus berupaya mendorong penyediaan air minum yang layak dan terjangkau sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan masyarakat serta upaya mitigasi risiko penyakit yang

ditimbulkan oleh konsumsi air yang terkontaminasi.

Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan

Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halam rumah (*on premises*); 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023. Pengukuran indikator ini memungkinkan pemerintah untuk menilai kemajuan dalam memenuhi target pembangunan berkelanjutan dan merancang kebijakan yang efektif.

Kapasitas Air Baku

Kapasitas air baku merupakan debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air lainnya. Mengukur kapasitas air baku membantu pemerintah dan lembaga terkait untuk mengetahui ketersediaan air di suatu wilayah.

2.1.4. Lingkungan Hidup Berkualitas

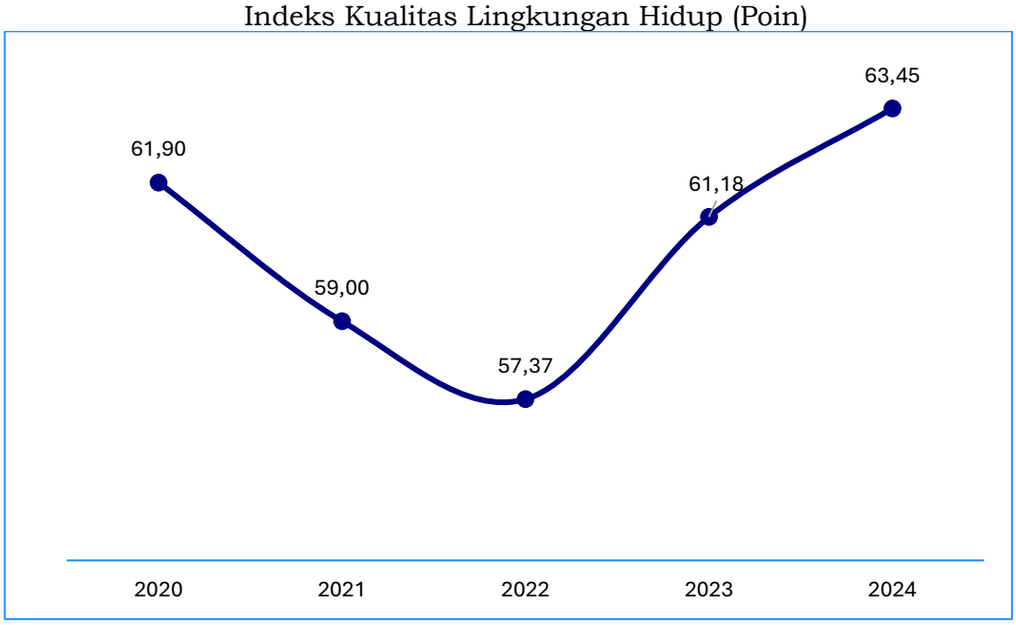
Lingkungan hidup berkualitas merupakan aspek penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem. Kualitas lingkungan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebersihan udara dan air, ketersediaan ruang hijau, serta pengelolaan limbah yang efektif. Peningkatan aktivitas industri dan urbanisasi yang tidak terkendali menyebabkan degradasi lingkungan, seperti pencemaran dan deforestasi yang berdampak negatif terhadap kesehatan manusia dan keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menerapkan kebijakan yang berorientasi pada perlindungan lingkungan, seperti pengurangan emisi karbon,

pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, serta konservasi sumber daya alam. Dengan menjaga kualitas lingkungan hidup, tidak hanya kesehatan manusia yang terjaga, tetapi juga keberlanjutan pembangunan dapat terus berlangsung untuk generasi mendatang.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kondisi lingkungan di suatu wilayah berdasarkan berbagai parameter lingkungan, seperti kualitas udara, kualitas air, dan tutupan lahan. Indeks ini memberikan gambaran tentang sejauh mana lingkungan dapat mendukung kehidupan manusia serta keberlanjutan ekosistem.

Gambar 2. 10
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)

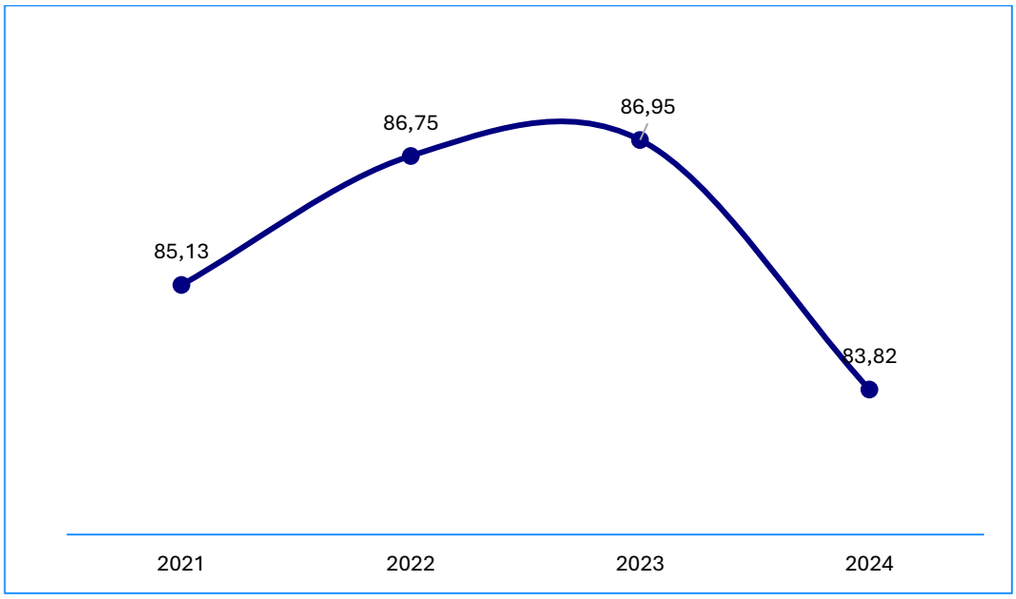


Sumber: Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang mengalami penurunan dari 61,90 poin pada tahun 2020 menjadi 57,37 poin pada tahun 2022 dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 63,45 persen. Pemantauan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup penting dalam perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan, di mana pemerintah dan masyarakat perlu berperan aktif dalam menjaga kualitas lingkungan melalui regulasi yang ketat, inovasi teknologi ramah lingkungan, serta edukasi berkelanjutan tentang pentingnya menjaga lingkungan.

Rumah tangga dengan akses sanitasi aman merupakan salah satu indikator utama dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Akses sanitasi yang layak mencakup sistem pembuangan limbah domestik yang higienis, penggunaan jamban sehat, serta pengelolaan air limbah yang tidak mencemari sumber air bersih. Melalui sanitasi yang aman penyebaran penyakit menular, seperti diare dan infeksi saluran pernapasan yang berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan dapat diminimalisir.

Gambar 2. 11
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak (%)



Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak cenderung meningkat dari 85,13 persen pada tahun 2021 menjadi 86,95 persen pada tahun 2023, kemudian menurun menjadi 83,82 pada tahun 2024. Penurunan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak diimbangi pembangunan sanitasi serta kerusakan infrastruktur akibat bencana alam seperti banjir dan longsor. Ketersediaan akses terhadap sanitasi layak penting agar masyarakat terhindar dari risiko penyakit menular, maka dari itu pemerintah perlu mengidentifikasi rumah tangga yang belum memperoleh akses sanitasi.

Permasalahan lingkungan hidup salah satunya adalah masalah persampahan. Sampah yang belum terkelola dengan baik dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup, dan memiliki risiko penyebaran penyakit kepada masyarakat. Untuk itu sangat dibutuhkan pengelolaan sampah yang terorganisir dengan baik sehingga pencemaran lingkungan dapat diminimalisir.

Tabel 2. 25
Capaian Indikator Pengelolaan Sampah

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah	Persen	54,00	54,85	62,72	60,33	61,38
Timbulan Sampah Tahunan	Ton/ Tahun	400.716	408.129	411.211	411.211	448.617
Pengurangan Sampah Tahunan	Ton/ Tahun	43.023	45.121	89.943	84.595	92.998
Pengurangan Sampah Tahunan	Persen	10,74	11,06	21,87	20,57	20,73
Penanganan Sampah Tahunan	Ton/ Tahun	148.591	152.774	167.962	163.484	182.362
Penanganan Sampah	Persen	37,08	37,43	40,85	39,76	40,65
Sampah Terkelola Tahunan	Ton/ Tahun	191.615	197.896	257.905	248.079	275.360

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah mengalami peningkatan dari 54,00 persen pada tahun 2020 menjadi 61,38 persen pada tahun 2024. Timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah mengalami peningkatan dari 54,00 persen pada tahun 2020 menjadi 61,38 persen pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan perbaikan dalam sistem pengelolaan sampah, khususnya dalam hal peningkatan kapasitas pengolahan melalui fasilitas seperti bank sampah, unit daur ulang, instalasi kompos, serta teknologi RDF atau pengolahan energi dari sampah. Sampah terkelola tahunan menjadi indikator kinerja pengelolaan limbah yang mencakup dua aspek utama, yaitu pengurangan dan penanganan. Pada tahun 2024, misalnya, proporsi sampah yang

berhasil dikurangi dan ditangani masing-masing mencapai 20,73 persen dan 40,65 persen. Keberadaan fasilitas pengolahan sampah yang memadai tidak hanya membantu mengurangi volume sampah yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), tetapi juga mengoptimalkan pemanfaatan kembali material yang bernilai ekonomis, sekaligus memperpanjang umur operasional TPA. Meski demikian, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya partisipasi masyarakat dalam memilah sampah, serta belum terintegrasinya kebijakan pengelolaan lintas sektor masih menjadi hambatan yang perlu diatasi secara sistematis dan berkelanjutan.

2.1.5. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Melihat kondisi geologis dan geografis berbagai wilayah di Kabupaten Deli Serdang, upaya penanggulangan bencana yang dilakukan perlu diawali dengan pemahaman risiko bencana yang ada. Usaha untuk memahami risiko ini dilakukan melalui kajian risiko bencana. Kemudian dari hasil kajian ini dapat dirumuskan berbagai upaya penanggulangan bencana. Penentuan tingkat risiko bencana sudah dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sejak periode awal berdiri, yaitu pada tahun 2008. Pada tahun 2009, BNPB menerbitkan status kebencanaan melalui Indeks Kerawanan Bencana Indonesia yang diperbaharui dengan Indeks Rawan Bencana Indonesia pada tahun 2011, dan untuk Kabupaten Deli Serdang telah dilakukan perhitungan Indeks Risiko Bencananya sejak tahun 2015.

Tabel 2. 26
Jumlah Bencana di Kabupaten Deli Serdang

Kecamatan	Jenis Bencana	Jumlah Bencana		
		2022	2023	2024
Gunung Meriah	Kebakaran	-	-	-
	Puting Beliung	1	-	-
	Tanah Longsor	-	2	3
	Banjir	-	-	-
	Gempa Bumi	-	-	-
	Jalan Amblas	-	-	1
STM Hulu	Kebakaran	-	2	1
	Puting Beliung	-	1	1
	Tanah Longsor	1	-	7
	Banjir	-	-	-
	Gempa Bumi	-	-	-
Sibolangit	Kebakaran	-	2	2
	Puting Beliung	-	-	-

Kecamatan	Jenis Bencana	Jumlah Bencana		
		2022	2023	2024
	Tanah Longsor	3	9	6
	Banjir	-	1	2
	Gempa Bumi	-	-	-
Kutalimbaru	Kebakaran	-	2	3
	Puting Beliung	-	2	2
	Tanah Longsor	1	-	2
	Banjir	-	-	1
	Gempa Bumi	-	-	-
Pancur Batu	Kebakaran	-	1	4
	Puting Beliung	2	1	3
	Tanah Longsor	1	2	2
	Banjir	1	1	1
	Gempa Bumi	-	-	-
Namorambe	Kebakaran	-	2	1
	Puting Beliung	3	1	-
	Tanah Longsor	1	2	2
	Banjir	3	-	3
	Gempa Bumi	-	-	-
	Jembatan Putus/Tanggul Jebol	1	-	1
Biru-Biru	Kebakaran	-	1	3
	Puting Beliung	3	2	2
	Tanah Longsor	4	-	2
	Banjir	2	-	1
	Gempa Bumi	-	-	-
	Tanggul Jebol	2		
STM Hilir	Kebakaran	1	1	-
	Puting Beliung	2	1	1
	Tanah Longsor	7	4	3
	Banjir	1	-	1
	Gempa Bumi	-	-	-
Bangun Purba	Kebakaran	-	1	2
	Puting Beliung	-	1	6
	Tanah Longsor	-	-	3
	Banjir	4	-	4
	Gempa Bumi	-	-	-
	Jalan Amblas	-	-	1
Galang	Kebakaran	3	2	1
	Puting Beliung	1	4	7
	Tanah Longsor	-	-	1
	Banjir	3	-	-
	Gempa Bumi	-	-	-
Tanjung Morawa	Kebakaran	5	9	10
	Puting Beliung	5	1	6
	Tanah Longsor	1	-	-
	Banjir	7	11	13
	Gempa Bumi	-	-	-
Patumbak	Kebakaran	3	4	4
	Puting Beliung	8	1	8

Kecamatan	Jenis Bencana	Jumlah Bencana		
		2022	2023	2024
	Tanah Longsor	1	-	1
	Banjir	5	2	5
	Gempa Bumi	-	-	-
Deli Tua	Kebakaran	1	-	1
	Puting Beliung	3	3	2
	Tanah Longsor	-	-	1
	Banjir	2	-	7
	Gempa Bumi	-	-	-
Sunggal	Kebakaran	4	8	8
	Puting Beliung	3	12	11
	Tanah Longsor	1	-	-
	Banjir	11	4	7
	Gempa Bumi	-	-	-
Hamparan Perak	Kebakaran	-	3	3
	Puting Beliung	10	3	10
	Tanah Longsor	-	1	1
	Banjir	12	11	8
	Gempa Bumi	-	-	-
Labuhan Deli	Kebakaran	2	2	1
	Puting Beliung	4	2	-
	Tanah Longsor	-	-	-
	Banjir	1	-	2
	Gempa Bumi	-	-	-
Percut Sei Tuan	Kebakaran	3	14	15
	Puting Beliung	5	8	4
	Tanah Longsor	-	1	-
	Banjir	2	3	7
	Gempa Bumi	-	-	-
Batang Kuis	Kebakaran	-	2	1
	Puting Beliung	6	1	8
	Tanah Longsor	-	1	-
	Banjir	14	14	4
	Gempa Bumi	-	-	-
Pantai Labu	Kebakaran	1	1	3
	Puting Beliung	5	-	17
	Tanah Longsor	-	-	-
	Banjir	3	1	-
	Gempa Bumi	-	-	-
	Cuaca Ekstrim	-	-	1
Beringin	Kebakaran	-	2	2
	Puting Beliung	8	-	5
	Tanah Longsor	-	-	-
	Banjir	-	-	-
	Gempa Bumi	-	-	-
Lubuk Pakam	Kebakaran	-	3	5
	Puting Beliung	-	1	4
	Tanah Longsor	-	-	-
	Banjir	15	4	2
	Gempa Bumi	-	-	-
Pagar Merbau	Kebakaran	-	2	1

Kecamatan	Jenis Bencana	Jumlah Bencana		
		2022	2023	2024
	Puting Beliung	-	2	5
	Tanah Longsor	-	-	1
	Banjir	1	-	-
	Gempa Bumi	-	-	-
Total		**203**	**185**	**280**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara 2025

Secara substansi, perubahan terminologi dari “rawan” menjadi “risiko” menunjukkan tonggak capaian penting, perubahan terdapat pada penilaian dampak bencana (korban jiwa, kerusakan, atau kerugian) menjadi penilaian potensi kehilangan atau kerugian (risiko). Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, keterpaparan, dan kapasitas pemerintah serta komunitas dalam menghadapi bencana. Penilaian ini memberikan gambaran yang lebih menyeluruh dan proaktif dalam melihat kemungkinan dampak suatu bencana sebelum terjadi.

Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana. Penilaian secara berkelanjutan terhadap indeks risiko ini dapat menjadi perangkat pantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu.

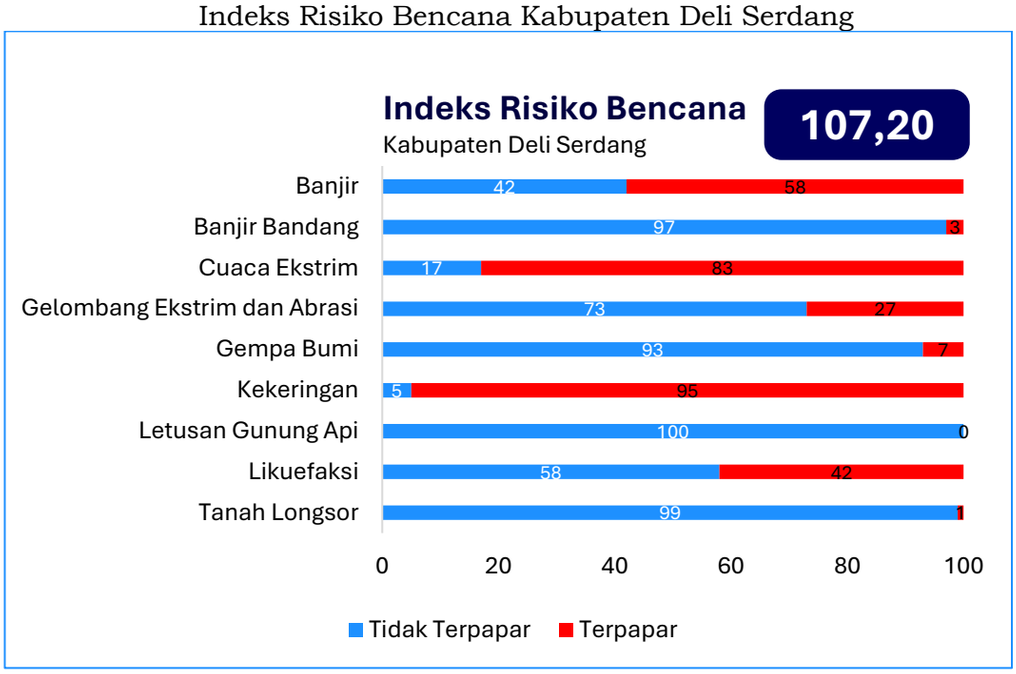
Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel mengenai jumlah bencana alam di Kabupaten Deli Serdang, dapat dianalisis bahwa tren jumlah kejadian bencana mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, baik secara keseluruhan maupun pada masing-masing kecamatan. Beberapa kecamatan menunjukkan tingkat kejadian yang relatif konsisten, sementara yang lain mengalami peningkatan atau penurunan yang signifikan pada tahun-tahun tertentu. Misalnya, bencana banjir di Kecamatan Tanjung Morawa terus meningkat dari tahun 2022 hingga 2024 yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan meluapnya air sungai pada tahun tersebut. Secara umum, bencana alam menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam tiga

tahun terakhir, dengan total kejadian mencapai 203 kasus pada tahun 2022, sedikit menurun menjadi 185 kasus pada 2023, namun kembali melonjak tajam menjadi 280 kasus pada 2024. Kenaikan jumlah bencana pada 2024 ini mencerminkan memburuknya kondisi lingkungan, serta adanya tantangan serius dalam mitigasi risiko, termasuk pengelolaan drainase, peningkatan curah hujan ekstrem, dan dampak perubahan iklim yang memperparah intensitas serta frekuensi kejadian bencana.

Indeks Risiko Bencana

Berdasarkan kajian INARISK BNPB dalam laman situsnya (http://inarisk.bnpb.go.id/irbi/kabupaten), diperoleh grafik tren indeks risiko bencana Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut.

Gambar 2. 12
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Deli Serdang



Sumber: website BNPB diakses tahun 2025

Dari grafik di atas, IRB Kabupaten Deli Serdang sebesar 107,20 atau tergolong dalam risiko bencana sedang. Data kejadian bencana Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel dan peta multi risiko bencana Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel 2. 27
Data Kejadian Bencana di Kabupaten Deli Serdang

Jenis Bencana	2020	2021	2022	2023	2024
Kebakaran	16	25	23	5	71
Puting Beliung	42	128	70	32	102
Tanah Longsor	10	0	0	18	34
Banjir	10	0	94	23	68
Gempa Bumi	0	0	0	0	0

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Mengingat Kabupaten Deli Serdang memiliki wilayah meliputi pegunungan dataran rendah dan pantai. Hal ini memungkinkan terjadinya bencana alam yang dapat mengganggu kondisi perekonomian masyarakat. Kecamatan–kecamatan yang berpotensi bencana alam tanah longsor meliputi: Kecamatan Bangun Purba, Biru-Biru, Galang, Gunung Meriah, Kutalimbaru, Namorambe, Pancur Batu, Sibolangit, STM Hilir dan STM Hulu. Potensi banjir kelas tinggi meliputi: Kecamatan Galang, Hamparan Perak, Labuhan Deli, Pantai Labu, Percut Sei Tuan, Sunggal dan Tanjung Morawa.

Gambar 2. 13
Peta Risiko Multi bencana Kabupaten Deli Serdang



Sumber: BPBD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

2.1.6. Aspek Demografi

Aspek demografi memberikan gambaran umum terkait kependudukan di suatu daerah yang biasanya dilihat dari usia, kepadatan, laju pertumbuhan, distribusi, dan analisis demografi lainnya. Kabupaten Deli Serdang memiliki wilayah administrasi yang luas dimana Kabupaten Deli Serdang mengelilingi wilayah Kota Medan dan beberapa kabupaten lainnya. Populasi penduduk di Kabupaten Deli Serdang terdiri dari berbagai jenis etnis dan suku bangsa yang tersebar di 22 Kecamatan. Adapun etnis mayoritas di Kabupaten Deli Serdang yaitu Melayu Deli, Melayu Serdang, Batak Karo, Batak Toba,

Batak Simalungun dan etnis batak lainnya ditambah beberapa suku pendatang yang dominan seperti dari Jawa, Minangkabau, Nias, Tionghoa, India, dan lain-lain.

Penduduk menurut Kelompok Usia

Data penduduk Kabupaten Deli Serdang menurut kelompok usia sebagai berikut.

Tabel 2. 28
Penduduk menurut Kelompok Usia

Kelompok Umur	2020	2021	2022	2023	2024
0-4	181.374	180.141	179.242	176.361	174.998
5-9	180.077	179.247	178.609	184.836	185.709
10-14	169.837	169.224	168.914	176.699	178.546
15-19	158.999	157.682	156.917	164.191	167.463
20-24	169.571	167.242	165.050	162.326	160.266
25-29	165.320	164.892	164.548	170.355	170.934
30-34	153.722	154.141	154.684	161.215	164.008
35-39	146.915	147.807	148.911	150.851	152.532
40-44	138.107	139.431	140.763	143.388	145.190
45-49	125.830	127.925	130.204	132.553	134.689
50-54	108.241	110.426	112.736	118.099	121.079
55-59	86.237	88.571	91.006	97.634	101.523
60-64	64.660	66.895	69.232	74.547	78.092
65-69	44.241	46.532	48.710	53.041	55.889
70-74	21.959	23.900	25.998	31.480	34.713
75+	16.351	17.318	18.462	20.588	22.849
Total	**1.931.441**	**1.941.374**	**1.953.986**	**2.018.164**	**2.048.480**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Penduduk Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2020 mengalami penurunan dari 2.195.709 jiwa pada tahun sebelumnya menjadi 1.931.441 jiwa. Jumlah penduduk ini kemudian meningkat hingga tahun 2024 mencapai 2.048.480 jiwa.

Penduduk menurut Kecamatan

Data distribusi penduduk menurut Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 29
Data Distribusi Penduduk menurut Kecamatan

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024	Distribusi 2024 (%)
Gunung Meriah	3.193	3.221	3.254	3.373	3.436	0,17
STM Hulu	13.554	13.594	13.652	14.069	14.248	0,70

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024	Distribusi 2024 (%)
Sibolangit	19.980	20.003	20.053	20.630	20.856	1,02
Kutalimbaru	36.238	36.320	36.450	37.539	37.992	1,85
Pancur Batu	93.470	93.757	94.172	97.064	98.318	4,80
Namo Rambe	39.697	39.757	39.871	41.031	41.496	2,03
Biru-biru	39.083	39.288	39.546	40.848	41.465	2,02
STM Hilir	33.159	33.215	33.315	34.920	34.685	1,69
Bangun Purba	24.375	24.514	24.688	25.513	25.911	1,26
Galang	70.136	70.593	71.147	73.583	74.789	3,65
Tanjung Morawa	223.450	225.264	227.396	235.558	239.800	11,71
Patumbak	97.994	98.303	98.744	101.784	103.107	5,03
Deli Tua	59.292	59.567	59.923	61.860	62.756	3,06
Sunggal	241.359	242.406	243.785	251.588	255.159	12,46
Hamparan Perak	163.521	163.865	164.430	169.316	171.337	8,36
Labuhan Deli	67.129	67.421	67.806	69.977	70.971	3,46
Percut Sei Tuan	402.468	405.334	408.770	423.020	430.214	21,00
Batang Kuis	65.075	65.588	66.194	68.554	69.772	3,41
Pantai Labu	49.167	49.485	49.872	51.578	52.421	2,56
Beringin	60.711	61.199	61.773	63.985	65.133	3,18
Lubuk Pakam	88.576	88.808	89.161	91.858	93.003	4,54
Pagar Merbau	39.814	39.872	39.984	41.146	41.611	2,03
Total	**1.931.441**	**1.941.374**	**1.953.986**	**2.018.794**	**2.048.480**	**100,00**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang

Penduduk Kabupaten Deli Serdang paling banyak berada pada Kecamatan Percut Sei Tuan, di mana pada tahun 2024 terdapat sebanyak 430.214 jiwa atau terdistribusi penduduk sebesar 21,00 persen, kemudian Kecamatan Sunggal sebanyak 255.159 jiwa atau terdistribusi penduduk sebesar 12,46 persen, dan Kecamatan Tanjung Morawa sebanyak 239.800 jiwa atau terdistribusi penduduk sebesar 11,71 persen, sementara penduduk paling sedikit berada pada Kecamatan Gunung Meriah sebanyak 3.436 jiwa atau terdistribusi penduduk sebesar 0,17 persen, kemudian Kecamatan S.T.M. Hulu sebanyak 14.248 jiwa atau terdistribusi penduduk sebesar 0,70 persen, dan Kecamatan Sibolangit sebanyak 20.856 jiwa atau terdistribusi penduduk sebesar 1,02 persen. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang perlu mempertimbangkan perencanaan pembangunan sesuai jumlah populasi serta segala aspek yang menjadi syarat guna mendukung pemenuhan kebutuhan hidup dari segi fasilitas dan utilitas yang perlu dipersiapkan.

Data laju pertumbuhan penduduk selama tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 30
Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kecamatan (%)

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Gunung Meriah	0,47	0,88	1,02	3,66	1,87
STM Hulu	-10,83	0,30	0,43	3,05	1,27
Sibolangit	-18,63	0,12	0,25	2,88	1,10
Kutalimbaru	-17,90	0,23	0,36	2,99	1,21
Pancur Batu	-10,39	0,31	0,44	3,07	1,29
Namo Rambe	-11,38	0,15	0,29	2,91	1,13
Biru-biru	-6,80	0,52	0,66	3,29	1,51
STM Hilir	-12,21	0,17	0,30	4,82	-0,67
Bangun Purba	-8,58	0,57	0,71	3,34	1,56
Galang	-7,72	0,65	0,78	3,42	1,64
Tanjung Morawa	-5,13	0,81	0,95	3,59	1,80
Patumbak	-9,46	0,32	0,45	3,08	1,30
Deli Tua	-20,08	0,46	0,60	3,23	1,45
Sunggal	-19,09	0,43	0,57	3,20	1,42
Hamparan Perak	-11,18	0,21	0,34	2,97	1,19
Labuhan Deli	-8,99	0,43	0,57	3,20	1,42
Percut Sei Tuan	-14,64	0,71	0,85	3,49	1,70
Batang Kuis	-5,59	0,79	0,92	3,57	1,78
Pantai Labu	-7,10	0,65	0,78	3,42	1,63
Beringin	-5,97	0,80	0,94	3,58	1,79
Lubuk Pakam	-11,36	0,26	0,40	3,02	1,25
Pagar Merbau	-11,89	0,15	0,28	2,91	1,13
Total	**-12,04**	**0,51**	**0,65**	**3,32**	**1,47**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Deli Serdang mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 12,04 persen, kemudian meningkat pada tahun berikutnya hingga tahun 2023 mencapai 3,32 persen, namun pada tahun 2024 melambat menjadi 1,47 persen. Kecamatan dengan laju pertumbuhan tertinggi berasal dari Kecamatan Gunung Meriah sebesar 1,87 persen, kemudian Kecamatan Tanjung Morawa sebesar 1,80 persen, dan Kecamatan Beringin sebesar 1,79 persen.

Kepadatan Penduduk

Data kepadatan penduduk menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 31
Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan (Jiwa/Km^2)

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Gunung Meriah	41,66	42,02	42,45	44,01	44,83
STM Hulu	60,68	60,86	61,12	62,98	63,78
Sibolangit	111,02	111,15	111,43	114,64	115,89
Kutalimbaru	207,17	207,64	208,38	214,61	217,20
Pancur Batu	762,83	765,18	768,56	792,17	802,40
Namo Rambe	637,19	638,15	639,98	658,60	666,07
Biru-biru	435,76	438,04	440,92	455,44	462,31
STM Hilir	174,06	174,36	174,88	183,31	182,07
Bangun Purba	187,57	188,64	189,98	196,33	199,39
Galang	466,67	469,71	473,40	489,61	497,63
Tanjung Morawa	1.696,02	1.709,78	1.725,97	1.787,92	1.820,11
Patumbak	2.094,34	2.100,94	2.110,37	2.175,34	2.203,61
Deli Tua	6.334,62	6.364,00	6.402,03	6.608,97	6.704,70
Sunggal	2.608,72	2.620,04	2.634,94	2.719,28	2.757,88
Hamparan Perak	710,50	711,99	714,45	735,68	744,46
Labuhan Deli	527,62	529,91	532,94	550,00	557,82
Percut Sei Tuan	2.109,48	2.124,50	2.142,51	2.217,20	2.254,91
Batang Kuis	1.613,16	1.625,88	1.640,90	1.699,41	1.729,60
Pantai Labu	600,70	604,58	609,31	630,15	640,45
Beringin	1.152,23	1.161,49	1.172,39	1.214,37	1.236,15
Lubuk Pakam	2.839,88	2.847,32	2.858,64	2.945,11	2.981,82
Pagar Merbau	633,07	634,00	635,78	654,25	661,65
Total	**773,28**	**777,26**	**782,31**	**808,25**	**820,14**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang

Kepadatan penduduk meningkat dari 773,28 jiwa/km^2 pada tahun 2020 menjadi 820,14 jiwa/km^2 pada tahun 2024. Kecamatan dengan penduduk terpadat berada pada Kecamatan Deli Tua sebanyak 6.704,70 jiwa/km^2, kemudian Kecamatan Lubuk Pakam sebanyak 2.981,82 jiwa/km^2, dan Kecamatan Sunggal sebanyak 2.757,88 jiwa/km^2. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang penting untuk memperhatikan kecukupan ruang untuk kebutuhan tempat tinggal masyarakat dari masing-masing kecamatan.

Proyeksi Demografi Kabupaten Deli Serdang

Proyeksi demografi Kabupaten Deli Serdang dilakukan dengan mempertimbangkan data historis jumlah penduduk, Total Fertility Rate (TFR), Age Specific Fertility Rate (ASFR), dan usia harapan hidup.

Hasil proyeksi demografi Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 32
Proyeksi Demografi Tahun 2025-2029

Kecamatan	2025	2026	2027	2028	2029
Gunung Meriah	3.472	3.516	3.561	3.607	3.653
STM Hulu	14.482	14.667	14.854	15.044	15.237
Sibolangit	21.235	21.507	21.782	22.060	22.342
Kutalimbaru	38.641	39.135	39.635	40.141	40.654
Pancur Batu	99.913	101.190	102.483	103.793	105.119
Namo Rambe	42.235	42.775	43.322	43.875	44.436
Biru-biru	42.047	42.584	43.128	43.680	44.238
STM Hilir	35.945	36.404	36.870	37.341	37.818
Bangun Purba	26.262	26.597	26.937	27.282	27.630
Galang	75.743	76.711	77.691	78.684	79.689
Tanjung Morawa	242.472	245.570	248.709	251.887	255.106
Patumbak	104.771	106.110	107.466	108.840	110.231
Deli Tua	63.676	64.489	65.314	66.148	66.994
Sunggal	258.972	262.282	265.634	269.028	272.466
Hamparan Perak	174.285	176.513	178.769	181.053	183.367
Labuhan Deli	72.031	72.951	73.884	74.828	75.784
Percut Sei Tuan	435.436	441.000	446.636	452.344	458.125
Batang Kuis	70.566	71.468	72.381	73.306	74.243
Pantai Labu	53.092	53.770	54.457	55.153	55.858
Beringin	65.863	66.705	67.557	68.421	69.295
Lubuk Pakam	94.554	95.762	96.986	98.226	99.481
Pagar Merbau	42.354	42.895	43.443	43.998	44.561
Total	**2.078.046**	**2.104.601**	**2.131.499**	**2.158.739**	**2.186.327**

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah, 2025)

Hasil proyeksi menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang diproyeksikan meningkat dari 2.078.046 jiwa pada tahun 2025 menjadi 2.186.327 jiwa pada tahun 2029. Pada tahun 2029 penduduk paling banyak berada pada Kecamatan Percut Sei Tuan sebanyak 458.125 jiwa, kemudian Kecamatan Sunggal sebanyak 272.466 jiwa, dan Kecamatan Tanjung Morawa sebanyak 255.106 jiwa. Sementara, penduduk paling sedikit berada pada Kecamatan Gunung Meriah sebanyak 3.653 jiwa, STM Hulu sebanyak 15.237 jiwa, dan Sibolangit sebanyak 22.342 jiwa.

Kepadatan penduduk diproyeksi berdasarkan hasil proyeksi penduduk dan luas wilayah masing-masing kecamatan. Hasil proyeksi kepadatan penduduk Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut:

Tabel 2. 33
Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Deli Serdang

Kecamatan	2025	2026	2027	2028	2029
Gunung Meriah	45,30	45,87	46,46	47,06	47,66
STM Hulu	64,83	65,66	66,50	67,35	68,21
Sibolangit	118,00	119,51	121,04	122,58	124,15
Kutalimbaru	220,91	223,73	226,59	229,48	232,41
Pancur Batu	815,42	825,84	836,39	847,08	857,90
Namo Rambe	677,93	686,60	695,38	704,25	713,26
Biru-biru	468,80	474,79	480,86	487,01	493,23
STM Hilir	188,69	191,10	193,54	196,02	198,52
Bangun Purba	202,09	204,67	207,29	209,94	212,62
Galang	503,98	510,42	516,94	523,55	530,23
Tanjung Morawa	1.840,39	1.863,91	1.887,73	1.911,86	1.936,29
Patumbak	2.239,18	2.267,79	2.296,77	2.326,14	2.355,87
Deli Tua	6.802,95	6.889,85	6.977,99	7.067,09	7.157,48
Sunggal	2.799,09	2.834,87	2.871,10	2.907,78	2.944,94
Hamparan Perak	757,27	766,95	776,75	786,67	796,73
Labuhan Deli	566,15	573,38	580,71	588,13	595,65
Percut Sei Tuan	2.282,28	2.311,44	2.340,98	2.370,90	2.401,20
Batang Kuis	1.749,28	1.771,64	1.794,27	1.817,20	1.840,43
Pantai Labu	648,65	656,93	665,33	673,83	682,44
Beringin	1.250,01	1.265,99	1.282,16	1.298,56	1.315,15
Lubuk Pakam	3.031,55	3.070,28	3.109,52	3.149,28	3.189,52
Pagar Merbau	673,46	682,06	690,78	699,60	708,55
Total	**831,98**	**842,61**	**853,38**	**864,28**	**875,33**

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah, 2025)

Kepadatan penduduk diproyeksikan meningkat dari 831,98 jiwa/km^2 menjadi 875,33 jiwa/km^2. Penduduk terpadat berada pada Kecamatan Deli Tua, yaitu sebanyak 7.157,48 jiwa/km^2, kemudian Kecamatan Lubuk Pakam sebanyak 3.189,52 jiwa/km^2, dan Kecamatan Sunggal sebanyak 2.944,94 jiwa/km^2. Sementara, kecamatan dengan kepadatan terkecil pada Kecamatan Gunung Meriah sebanyak 47,66 jiwa/km^2, Kecamatan STM Hulu sebanyak 68,21 jiwa/km^2, dan Kecamatan Sibolangit sebanyak 124,15 jiwa/km^2.

Tabel 2. 34
Proyeksi Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin, Sex Ratio, Usia Produktif & Non Produktif, dan Angka Ketergantungan

Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
Laki-Laki	1.044.401	1.057.500	1.070.758	1.084.180	1.097.772
Perempuan	1.033.645	1.047.103	1.060.741	1.074.559	1.088.555
Sex Ratio	**101,04**	**100,99**	**100,94**	**100,90**	**100,85**
0-14 tahun	540.485	541.366	542.314	543.355	544.526
15-64 tahun	1.417.798	1.435.625	1.453.662	1.471.831	1.490.012
> 65 tahun	119.763	127.612	135.523	143.553	151.791
Angka Ketergantungan	**46,57**	**46,60**	**46,63**	**46,67**	**46,73**

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah, 2025)

Hasil proyeksi menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki meningkat sebanyak 53.371 jiwa dalam waktu 5 tahun, sementara penduduk perempuan meningkat lebih besar, yaitu sebanyak 54.910 jiwa. Namun, secara total pada tahun 2029 jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.097.772 jiwa lebih besar dibandingkan penduduk perempuan sebanyak 1.088.555 jiwa. Berdasarkan kondisi tersebut, maka sex ratio diproyeksikan menurun dari 101,04 per 100 penduduk menjadi 100,85 per 100 penduduk. Artinya jumlah penduduk laki-laki dan perempuan semakin seimbang.

Angka ketergantungan adalah rasio yang menunjukkan jumlah individu dalam kelompok usia non-produktif (biasanya dianggap sebagai anak-anak dan lansia) dibandingkan dengan jumlah individu dalam kelompok usia produktif (dewasa yang bekerja). Angka ini digunakan untuk mengukur beban ekonomi yang ditanggung oleh populasi usia kerja dalam mendukung populasi yang tidak bekerja. Angkat ketergantungan diproyeksikan meningkat dari 46,57 per 100 orang penduduk pada tahun 2025 menjadi 46,73 per 100 orang penduduk. Angka ini relatif stabil selama 5 tahun, di mana hal ini menunjukkan bahwa hingga tahun 2029 terdapat kurang lebih sebanyak 47 orang penduduk non produktif yang ditanggung oleh 100 orang penduduk usia produktif.

2.1.7. Potensi Sumber Daya Alam

Sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Deli Serdang antara lain Sumber Daya kelautan dan perikanan, pertanian, perkebunan, air permukaan (sungai), hutan, pertambangan dan pariwisata.

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Deli Serdang memiliki potensi perikanan yang cukup besar mengingat wilayahnya sebagian merupakan kawasan pantai dengan panjang pantai 65 km yang dapat dikembangkan untuk berbagai komoditi perikanan laut, pertambakan, budidaya laut dan budidaya air tawar.

Berdasarkan Deli Serdang Dalam Angka Tahun 2025, Produksi ikan laut di Deli Serdang pada tahun 2024 sebesar 34.086,73 ton sedangkan produksi ikan perairan umum sebesar 5.321,73 ton. Produksi ikan laut terbesar dihasilkan oleh Kecamatan Pantai Labu yaitu sebesar 24.616,52 ton disusul Percut Sei Tuan dengan produksi sebesar 5.637,96 ton dan Hamparan Perak diurutan ketiga dengan produksi ikan sebesar 1.647,63 ton.

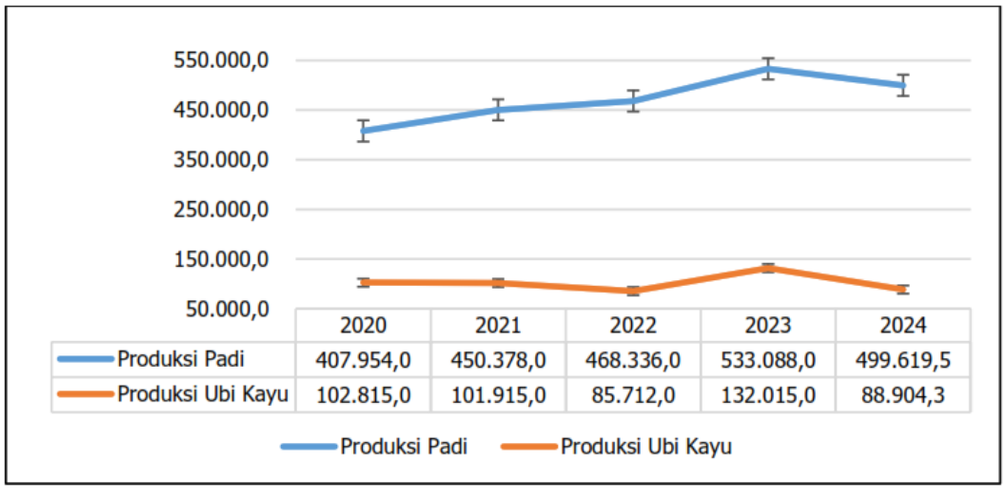
Sumber Daya Pertanian

Sektor pertanian yang meliputi sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kehewanan, perikanan dan kelautan serta kehutanan memberikan kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian daerah Kabupaten Deli Serdang.

1. Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan

Deli Serdang merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam produksi tanaman pangan. Kondisi alam yang subur sangat mendukung sebagai tempat yang ideal untuk budidaya berbagai jenis tanaman pangan, hal ini dapat dilihat pada tingkat produksi tanaman pangan dari berbagai komoditi pada sektor pertanian sebagai berikut.

Gambar 2. 14
Produksi Komoditi Tanaman Pangan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Berdasarkan data yang disajikan, produksi padi dan ubi kayu di Kabupaten Deli Serdang menunjukkan tren yang cukup bervariasi sepanjang tahun 2020–2024. Produksi padi cenderung terus mengalami peningkatan, yaitu dari 407.954 ton pada tahun 2020, naik menjadi 450.378 ton di tahun 2021, kemudian mencapai 468.336 ton di tahun 2022, dan puncaknya terjadi pada tahun 2023 yaitu mencapai 533.088 ton. Meskipun demikian, terjadi sedikit penurunan pada tahun 2024, yaitu turun menjadi 499.921,5 ton. Sementara itu, produksi ubi kayu tampak lebih fluktuatif. Pada tahun 2020, produksinya mencapai 102.815 ton, kemudian turun tipis menjadi 101.915 ton di tahun 2021, dan lebih menurun lagi di tahun 2022 yaitu 85.712 ton. Produksi kemudian melonjak naik pada tahun 2023 mencapai 132.015 ton, sebelum kembali turun di tahun 2024 menjadi 88.904,3 ton.

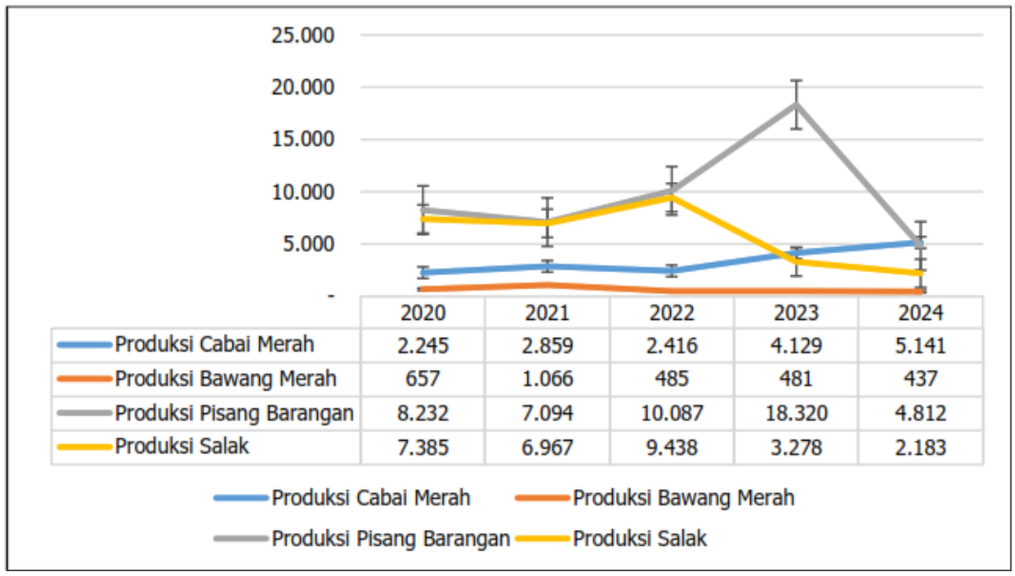
Fluktuasi tersebut memberikan gambaran mengenai tantangan dan peluang yang tengah dihadapi Dinas Pertanian, sehingga dapat dijadikan acuan penting untuk merancang kegiatan dan intervensi yang lebih matang demi menjaga kestabilan dan meningkatkan mutu dan jumlah hasil pertanian padi dan ubi kayu di masa mendatang.

2. Sub Sektor Pertanian Hortikultura

Dengan potensi alam yang dimiliki, Kabupaten Deli Serdang memiliki peluang peluang besar untuk meningkatkan produksi cabai

dan bawang. Pengembangan teknologi budidaya, peningkatan kualitas benih dan perluasan area tanam dapat membantu menigkatkan produksi dan kualitas cabai dan bawang. Data produksi dapat dilihat pada gamabr di bawah ini.

Gambar 2. 15
Produksi Komoditi Hortikultura Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi Cabai Merah	2.245	2.859	2.416	4.129	5.141
Produksi Bawang Merah	657	1.066	485	481	437
Produksi Pisang Barangan	8.232	7.094	10.087	18.320	4.812
Produksi Salak	7.385	6.967	9.438	3.278	2.183

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Berdasarkan data yang disajikan, produksi cabai merah terus meningkat dari 2.245 ton pada tahun 2020 menjadi 5.141 ton pada tahun 2024, menandakan perbaikan teknologi budidaya dan penerapan praktik pertanian yang lebih intensif. Sementara itu, produksi bawang merah tampak fluktuatif, mencapai puncak 1.066 ton pada tahun 2021 sebelum turun menjadi 437 ton pada tahun 2024.

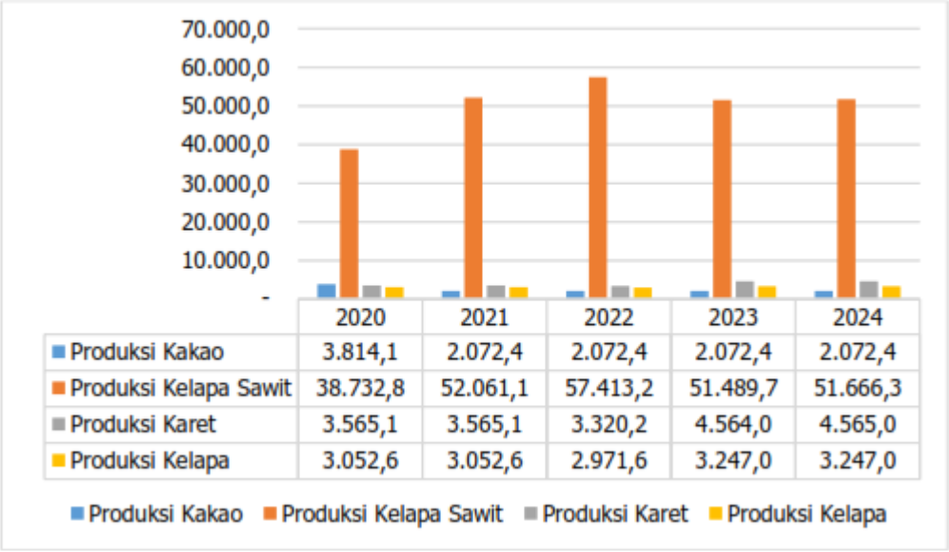
Selain cabai dan bawang merah, produksi pisang barangan juga cukup dinamis, naik dari 8.232 ton pada tahun 2020, kemudian mencapai puncak 18.320 ton pada tahun 2023, dan turun kembali menjadi 4.812 ton di tahun 2024. Di sisi lain, produksi salak terus menurun dari 7.385 ton pada tahun 2020 menjadi 2.183 ton pada tahun 2024.

3. Sub Sektor Perkebunan

Sektor perkebunan merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Deli Serdang yang menopang perekonomian masyarakat. Berbagai komoditas tanaman perkebunan yang berkembang seperti

karet, kelapa sawit, kakao dan kelapa. Hal ini dapat dilihat data produksi komoditi perkebunan sebagai berikut.

Gambar 2. 16
Produksi Komoditi Perkebunan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi Kakao	3.814,1	2.072,4	2.072,4	2.072,4	2.072,4
Produksi Kelapa Sawit	38.732,8	52.061,1	57.413,2	51.489,7	51.666,3
Produksi Karet	3.565,1	3.565,1	3.320,2	4.564,0	4.565,0
Produksi Kelapa	3.052,6	3.052,6	2.971,6	3.247,0	3.247,0

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Berdasarkan data yang disajikan, dapat dilihat bahwa kelapa sawit merupakan komoditas unggulan dan memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian pertanian di Kabupaten Deli Serdang. Produksinya mencapai puncak 57.413,2 ton pada tahun 2022, kemudian terjadi penurunan menjadi sekitar 51.490 ton pada tahun 2023, dan 51.667 ton pada tahun 2024. Penurunan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti umur tanaman, serangan penyakit, penerapan teknologi budidaya, fluktuasi harga, dan kondisi cuaca yang kurang mendukung. Meskipun terjadi penurunan, kelapa sawit tetap menjadi komoditas yang paling penting dan membutuhkan pengelolaan yang lebih matang, khususnya dari aspek peremajaan kebun, perawatan, pengendalian penyakit, dan penerapan teknologi yang lebih presisi.

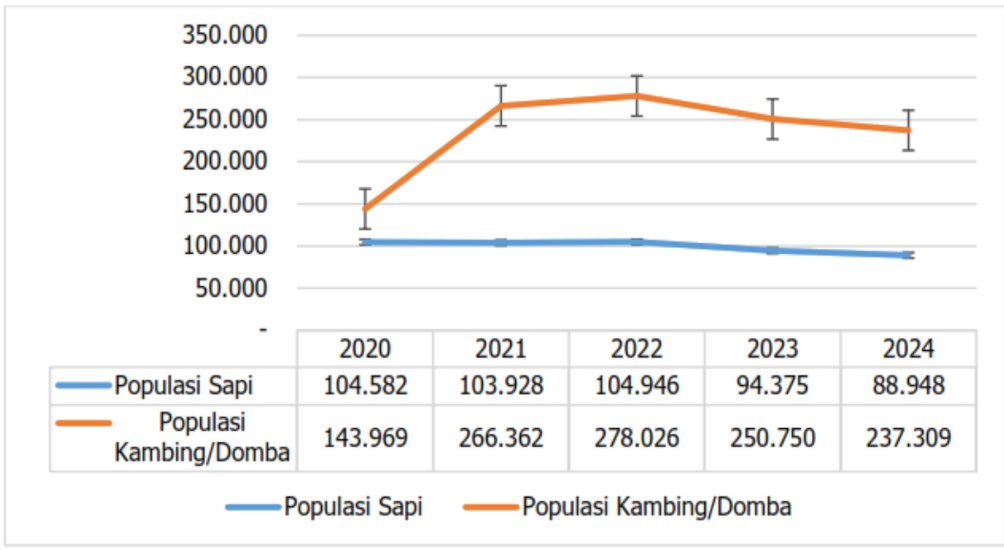
Sementara itu, produksi kakao tampak cukup stagnan, yaitu bertahan di sekitar 2.072 ton sejak tahun 2021, lebih rendah jika dibanding tahun 2020 yang mencapai 3.814 ton. Penurunan dan stagnasi tersebut terjadi berkurangnya lahan pertanaman akibat alih fungsi lahan dari proses pembangunan bendungan Lau Simeme di Kecamatan Biru – Biru. Selain itu, produksi karet juga tampak cukup

stabil, yaitu di kisaran 3.500 ton per tahun, dengan puncak terjadi pada tahun 2024 (4.565 ton). Karet memang merupakan komoditas perkebunan yang penting dan memberikan pendapatan yang cukup signifikan bagi masyarakat, sehingga perawatan dan peremajaan kebun juga penting demi menjaga mutu dan proses produksinya. Sementara itu, produksi kelapa lebih stabil dan cenderung naik perlahan, yaitu dari 3.053 ton pada tahun 2020, kemudian mencapai puncak 3.247 ton pada tahun 2023 dan 2024.

4. Sub Sektor Peternakan

Deli Serdang memiliki potensi besar dalam sektor peternakan, Peternakan di daerah ini tidak hanya menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat, tetapi juga sebagai penyedia kebutuhan pangan dan bahan baku industri. Adapun data produksi pada komoditi peternakan adalah sebagai berikut.

Gambar 2. 17
Produksi Komoditi Peternakan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Populasi Sapi	104.582	103.928	104.946	94.375	88.948
Populasi Kambing/Domba	143.969	266.362	278.026	250.750	237.309

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Berdasarkan data yang disajikan, dapat diamati bahwa populasi sapi menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan sepanjang periode 2020–2024. Populasi sapi yang semula mencapai 104.946 ekor pada tahun 2022, terus menyusut menjadi 94.375 ekor pada tahun 2023, dan turun lebih jauh hingga 88.948 ekor pada tahun 2024. Penurunan tersebut disinyalir merupakan dampak dari beberapa

permasalahan, diantaranya keterbatasan pakan hijauan hingga peningkatan serangan penyakit hewan. Keadaan tersebut juga turut dipengaruhi oleh proses mutasi kepemilikan ternak, dimana sebagian ternak dijual dan tidak diberdayakan lagi, sehingga terjadi penyusutan populasi yang cukup signifikan.

Sementara itu, populasi kambing dan domba juga tampak lebih fluktuatif dan lebih dinamis. Setelah terjadi lonjakan yang cukup tajam dari 143.969 ekor pada tahun 2020 menjadi puncak 278.026 ekor pada tahun 2022 populasi tersebut kemudian mulai menurun, mencapai 250.750 ekor pada tahun 2023, dan lebih turun lagi menjadi 237.309 ekor pada tahun 2024. Penurunan tersebut juga dapat terkait dengan masalah penyakit, biaya pakan yang terus naik, dan pergeseran kepemilikan ternak.

Sumber Daya Air Permukaan (sungai)

Berdasarkan Permen PU No.11A Tahun 2006, Sumatera Utara memiliki 10 (sepuluh) Wilayah Sungai (WS) yaitu WS Alas-Singkil, WS Toba-Asahan, WS Bahbolon, WS Barumun-Kualuh, WS Batang Angkola-Batang Gadis, WS Batang Natal-Batang Batahan, WS Sibundong-Batang Toru, WS Belawan - Ular - Padang, WS Nias dan WS Wampu Besitang. Dari Kesepuluh WS tersebut 4 (empat) WS dikelola Pemerintah Pusat yang tanggung jawab pelaksanaan pengelolaannya berada pada Balai Wilayah Sungai Sumatera. Dari ke empat WS tersebut satu diantaranya berada di Kabupaten Deli Serdang yaitu WS Belawan - Ular - Padang. WS Belawan - Ular - Padang meliputi DAS Deli yang melintasi kota Medan, ibukota propinsi Sumatera Utara yang berpotensi rawan banjir, DAS Ular yang merupakan sumber air bagi areal persawahan Irigasi Sungai Ular seluas 19.000 Ha serta DAS Padang yang melintasi Kota Tebing Tinggi, kota berpenduduk padat dan rawan banjir.

Tabel 2. 35

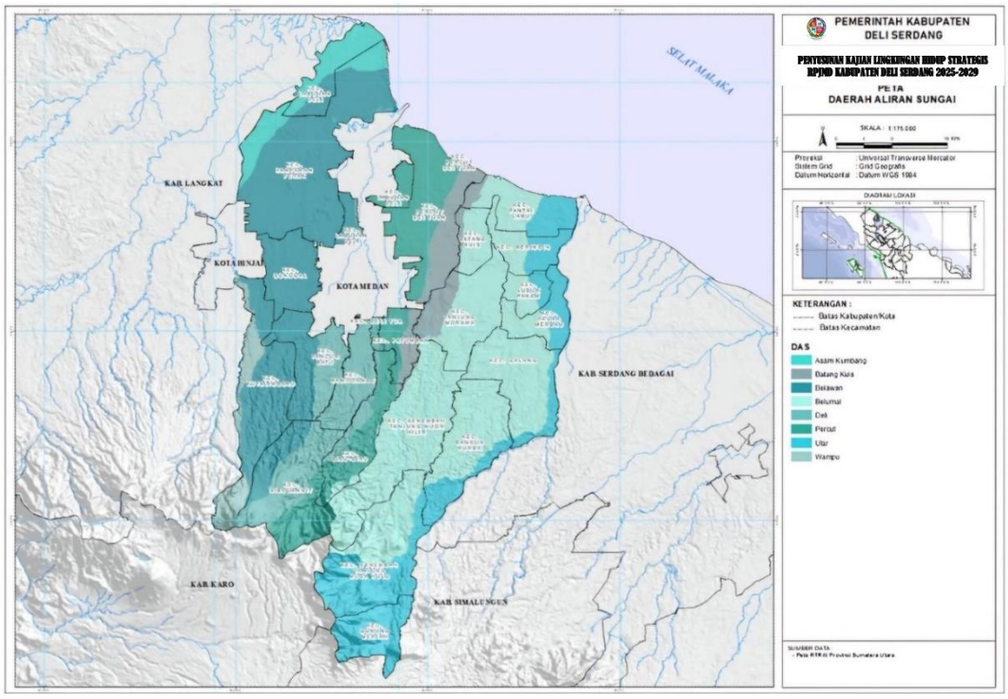
Daerah Aliran Sungai (DAS) yang melalui wilayah Kabupaten Deli Serdang

No	DAS	Sub DAS	Keterangan
1	DAS Belawan	Sub DAS Belawan Hulu	Luas 76.003 ha, sebagian melewati Kota
		Sub DAS Belawan Hilir	

No	DAS	Sub DAS	Keterangan
		Sub DAS Karang Gadling	Medan dan Kabupaten Langkat
2	DAS Deli	Sub DAS Lau Petani	Luas 48.162 ha
		Sub DAS Sei Deli	
		Sub DAS Babura	
		Sub DAS Bekala	
		Sub DAS Sei Kambing	
		Sub DAS Sei Paluh Besar	
3	DAS Percut	Sub DAS Percut Hulu	Luas 51.420 ha
		Sub DAS Percut Hilir	
4	DAS Belumai	Sub DAS Belumai	Luas 75.460 ha
		Sub DAS Sungai Serdang	
5	DAS Ular	Sub DAS Bah Karai	Luas 127.796 ha
		Sub DAS Sei Buaya	
		Sub DAS Sei Ular	
		Sub DAS Karang	
		Sub DAS Seu Perbaungan	

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029

Gambar 2. 18
Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) yang melalui Kabupaten Deli Serdang



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029

Kabupaten Deli Serdang di Sumatera Utara diberkahi dengan kekayaan alam yang luar biasa, termasuk kawasan hutan yang beragam. Dari hutan tropis yang masih alami hingga hutan kota yang asri, Deli Serdang menawarkan berbagai destinasi wisata hutan yang menarik untuk dijelajahi.

1. Hutan Tropis
    - Cagar Alam Sibolangit

      Terletak di kaki Gunung Sinabung yang menjulang tinggi, Cagar Alam Sibolangit adalah surga bagi para pecinta alam. Pengunjung dapat menjelajahi jalur trekking yang menantang, menapaki jejak gajah Sumatera yang ikonik, dan menikmati kesegaran air terjun yang menawan. Keindahan panorama alam yang masih alami akan membuat Anda terpesona.
    - Taman Nasional Gunung Leuser

      Taman Nasional Gunung Leuser, yang juga menjangkau wilayah Deli Serdang, merupakan rumah bagi keanekaragaman hayati yang luar biasa. Di sini, Anda dapat menemukan orangutan Sumatera yang terancam punah, gajah Sumatera yang gagah, dan berbagai spesies flora dan fauna unik lainnya. Jelajahi hutan lebat, ikuti tur arung jeram yang seru, atau rasakan petualangan yang menantang dengan menjelajahi gua-gua yang misterius.
2. Hutan Kota
    - Hutan Kota Lubuk Pakam

      Di tengah keramaian kota Lubuk Pakam, Hutan Kota Lubuk Pakam hadir sebagai oase yang menyegarkan. Pengunjung dapat berjalan kaki atau bersepeda di jalur yang teduh, berolahraga di taman bermain yang luas, atau bersantai di bawah rindangnya pepohonan yang menenangkan jiwa. Hutan kota ini menjadi tempat yang ideal untuk melepas penat dan menikmati udara segar di tengah hiruk pikuk kehidupan kota.
    - Hutan Universitas Medan Area

Hutan kota ini menawarkan suasana asri dan sejuk yang jauh dari keramaian. Pengunjung dapat mengamati berbagai jenis burung yang bernyanyi merdu, belajar tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan, dan menikmati ketenangan yang menyejukkan jiwa.

Hutan Lainnya yang Menarik:

- Hutan Tanaman Industri (HTI) Deli Serdang memiliki beberapa HTI yang dikelola secara berkelanjutan. Selain menghasilkan kayu sebagai bahan baku industri, HTI ini juga berfungsi sebagai habitat bagi berbagai flora dan fauna. Pengunjung dapat mengikuti wisata edukasi untuk mempelajari bagaimana hutan dikelola dengan cara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- Hutan Kemasyarakatan: Hutan Kemasyarakatan di Deli Serdang dikelola oleh masyarakat setempat untuk berbagai keperluan, seperti sumber kayu bakar, hasil hutan non-kayu, dan tempat wisata. Pengunjung dapat belajar tentang budaya dan tradisi masyarakat setempat, berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian hutan, dan merasakan keramahan penduduk lokal.

Sumber Daya Pertambangan

Berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029, potensi pertambangan yang ada di Kabupaten Deli Serdang pada umumnya terdiri dari pertambangan mineral dan pertambangan batuan. Jenis potensi pertambangan mineral yang ada di Kabupaten Deli Serdang antara lain :

- Emas, terdapat di Desa Gunung Meriah, Kecamatan Gunung Meriah;
- Merkuri, terdapat di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan

Sedangkan potensi pertambangan batuan (bahan galian Golongan C) tersebar di beberapa kecamatan anata lain:

- Batu Kapur, tersebar di Kecamatan STM Hulu, STM Hilir, dan Kecamatan Biru Biru;
- Sirtu, tersebar di Kecamatan STM Hilir, Biru-Biru, Namorambe, Bangun Purba, Galang, Pancur Batu dan sebagian Kutalimbaru;

- Tanah Timbun, tersebar di semua Kecamatan.
- Pasir (darat, sungai, laut), tersebar di Kecamatan Patumbak, Bangun Purba, Namorambe, Galang, Pantai Labu, Kutalimbaru, dan Kecamatan Biru-Biru.

Sumber Daya Pariwisata

Kabupaten Deli Serdang memiliki objek wisata yang terkenal, baik wisata alam maupun wisata buatan. Beberapa diantaranya seperti pemandangan alam, mata air panas, wisata alam dengan kondisi yang masih alami. Objek wisata yang telah dikembangkan dan telah mempunyai izin antara lain Taman Rekreasi Sinar Bulan Purnama Ancol, Pantai Sari Laba Biru Indah, Pantai Kasanova, Pantai Ginbers, Pemandian Alam Loknya, Taman Rekreasi Dewi, Taman Rekreasi Hairos Indah, dan Hill Park Sibolangit.

Selain obyek wisata yang sudah dikembangkan, juga terdapat objek wisata yang potensial untuk dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata (DTW) baru di Kabupaten Deli Serdang, 11 diantaranya telah dikelola sesuai dengan Perda No. 23 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, dan 13 obyek wisata lainnya masih merupakan potensi yang belum dikelola. Objek wisata yang ada, sebenarnya memiliki potensi cukup menjanjikan untuk dikembangkan yang terdiri dari wisata alam, pemandian alam, panorama, air panas, cagar alam dan wisata pantai. Lebih jelasnya lihat tabel berikut.

Tabel 2. 36

Objek dan Daya Tarik Wisata Potensial Kabupaten Deli Serdang

NO	NAMA OBYEK WISATA	LOKASI
1	Bendungan Namo Rambe	Kecamatan Namorambe, 18 Km dari Medan dan 45 Km dari Lubuk Pakam
2	Pantai Sarilaba (Sibiru-biru)	Kecamatan Biru-biru, 25 Km dari Kota Medan dan 1 Km dari Kota Kecamatan Biru-biru
3	Tuntungan	Kecamatan Pancur Batu, 35 Km dari Lubuk Pakam dan 15 Km dari Medan

NO	NAMA OBYEK WISATA	LOKASI
4	Pantai Cassanova	25 Km dari Lubuk Pakam, 15 Km dari Medan dan 9 Km dari ibukota Kecamatan Patumbak
5	Pagar Manik	Kecamatan Bangun Purba, 25 Km dari Lubuk Pakam dan 40 Km dari Medan
6	Taman Rekreasi Dewi	Kecamatan Sibolangit, 66 Km dari Lubuk Pakam dan 66 Km dari Kota Medan
7	Lapangan Golf Martabe	24 Km dari Medan, 54 Km dari Lubuk Pakam dan berada di lokasi Kecamatan Pancur Batu
8	Lapangan Golf Tuntungan	Di Kecamatan Pancur Batu, 20 Km dari Medan dan 50 Km dari Lubuk Pakam
9	Lapangan Golf Tamora	Di Kecamatan Tanjung Morawa, 16 Km dari Medan dan 14 Km dari Lubuk Pakam
10	Pantai Loknya	Di Kecamatan STM Hulu, 67 Km dari Lubuk Pakam dan 47 Km dari Medan
11	Lau Sigembur	Kecamatan STM Hilir, 31 Km dari Lubuk Pakam dan 28 Km dari Kota Medan serta 7 Km dari Kota Kecamatan STM Hulu
12	PTPN II (Tembakau Deli)	-
13	Danau Linting	Kecamatan STM Hulu
14	Taman Hutan Wisata Sibolangit	Kecamatan Sibolangit, 37 Km dari Medan dan 67 Km dari Lubuk Pakam
15	Pantai Ancol	Pantai Labu
16	Hill Park	Sibolangit
17	Siba Island	Kecamatan Hamparan Perak
18	Taman Rekreasi Hairos	Kecamatan Pancur Batu
19	Ginbers	Kecamatan Namorambe
20	Air Panas Gunung Manumpa	Kecamatan STM Hilir
21	Air Panas Penen	Kecamatan Sibiru-biru
22	Lau Sitellu	Kecamatan Namorambe

NO	NAMA OBYEK WISATA	LOKASI
23	Pemandian Alam Sembahe	Kecamatan Sibolangit
24	Desa Wisata Bunga	Kecamatan Tanjung Morawa
25	Taman Pramuka	Kecamatan Sibolangit
26	Retreat Center	Kecamatan Sibolangit
27	Pantai Rosari	Kecamatan Namorambe
28	Pantai Adil	Kecamatan Namorambe
29	Sampuran Putih	Kecamatan Sibolangit
30	Air Terjun Dua Warna	Kecamatan Sibolangit
31	Sungai Dua rasa	Kecamatan Sibolangit
32	Uruk Perkentangen	Kecamatan Sibolangit
33	Pantai Serambi Deli	Kecamatan Pantai Labu
34	Pantai Indah Alam Sari	Kecamatan Kutalimbaru
35	Pantai Salju	Kecamatan Bangun Purba

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi aspek ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan budaya yang secara kolektif mempengaruhi kehidupan individu dalam masyarakat.

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

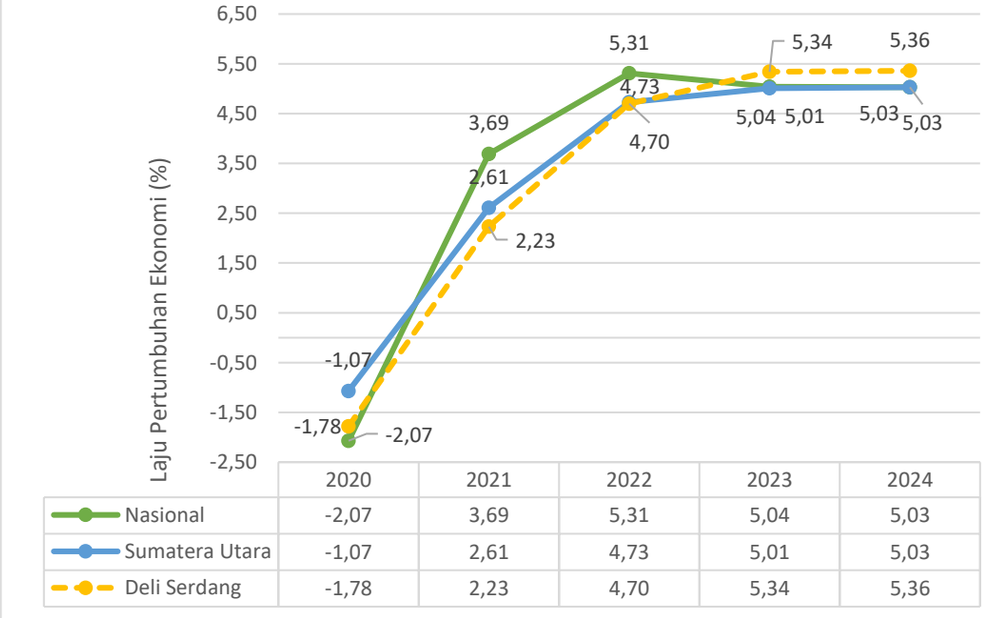
Aspek kesejahteraan ekonomi daerah mencakup sejumlah faktor yang mempengaruhi kondisi ekonomi suatu wilayah atau daearah. Aspek ini memberikan gambaran terkait kondisi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang.

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi adalah ukuran yang menunjukkan persentase peningkatan nilai total barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara atau daerah dalam periode tertentu. Indikator ini mengukur kesehatan dan kemajuan ekonomi suatu wilayah.

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. 19
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional



	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	-2,07	3,69	5,31	5,04	5,03
Sumatera Utara	-1,07	2,61	4,73	5,01	5,03
Deli Serdang	-1,78	2,23	4,70	5,34	5,36

Sumber: website www.bps.go.id diakses tahun 2025

Berdasarkan data BPS, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar -1,78 persen menjadi sebesar 5,36 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan yang baik dimana berhasil melebihi laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Secara detail, laju pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha di Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 37
Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan Usaha (%)

Sektor Perekonomian	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,74	2,84	5,10	2,29	4,19
Pertambangan dan Penggalian	-0,57	4,11	4,79	3,42	5,00
Industri Pengolahan	-1,92	2,82	1,01	2,00	3,75
Pengadaan Listrik dan Gas	5,03	3,73	4,63	2,21	1,69
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,66	7,23	0,94	1,49	1,85
Konstruksi	-0,74	2,94	2,61	5,92	7,51
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-1,06	4,15	7,63	4,80	6,21

Sektor Perekonomian	2020	2021	2022	2023	2024
Transportasi dan Pergudangan	-12,10	-5,96	17,13	24,11	3,45
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-8,46	-0,79	9,18	9,16	15,06
Informasi dan Komunikasi	8,83	7,96	8,73	6,69	7,90
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,13	4,76	4,80	4,78	3,47
Real Estat	1,57	-1,33	3,50	2,55	2,12
Jasa Perusahaan	-1,69	-0,05	7,12	5,72	5,77
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,09	-0,20	-0,26	1,50	11,95
Jasa Pendidikan	1,52	3,65	3,59	6,44	5,50
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-1,32	-1,17	5,92	6,46	7,62
Jasa lainnya	-3,74	1,84	6,76	6,94	7,53
Laju Pertumbuhan	**-1,78**	**2,23**	**4,70**	**5,34**	**5,36**

Sumber: website www.bps.go.id diakses tahun 2025

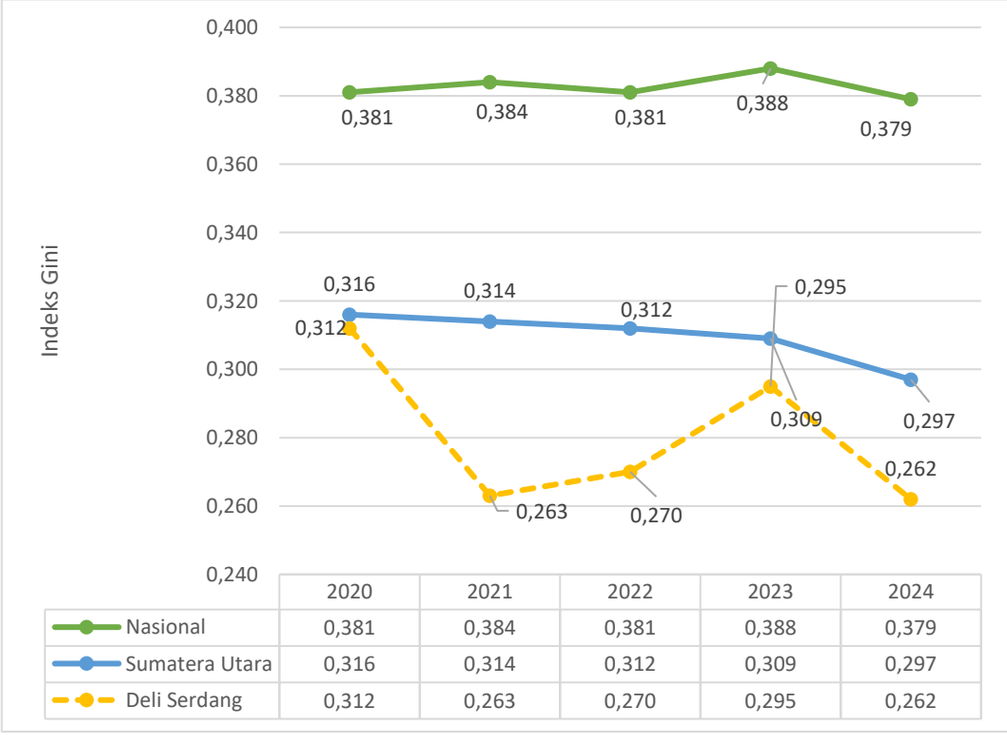
Pada tahun 2024, laju pertumbuhan ekonomi terbesar pada Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 15,06 persen, kemudian Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 11,95 persen, dan Sektor Infromasi dan Komunikasi sebesar 7,90 persen. Sementara, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang rendah adalah Sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 1,69 persen, Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 1,85 persen, kemudian Sektor Real Estat sebesar 2,12 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. namun terhadap sektor yang mengalami pertumbuhan yang rendah akan tetap menjadi tantangan dan prioritas dalam memaksimalkan tingkat pertumbuhannya yang akan ditempuh melalui pertimbangan dan pengambilan kebijakan sesuai kebutuhan.

Indeks Gini

Indeks Gini ataupun indeks ketimpangan merupakan indikator yang menggambarkan pemerataan dan ketimpangan secara keseluruhan. mulai dari tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk berpenghasilan tinggi dan penduduk berpenghasilan rendah. Cakupan perkembangan indeks gini di Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada

gambar berikut:

Gambar 2. 20
Indeks Gini Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional



	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	0,381	0,384	0,381	0,388	0,379
Sumatera Utara	0,316	0,314	0,312	0,309	0,297
Deli Serdang	0,312	0,263	0,270	0,295	0,262

Sumber: website www.bps.go.id diakses tahun 2025

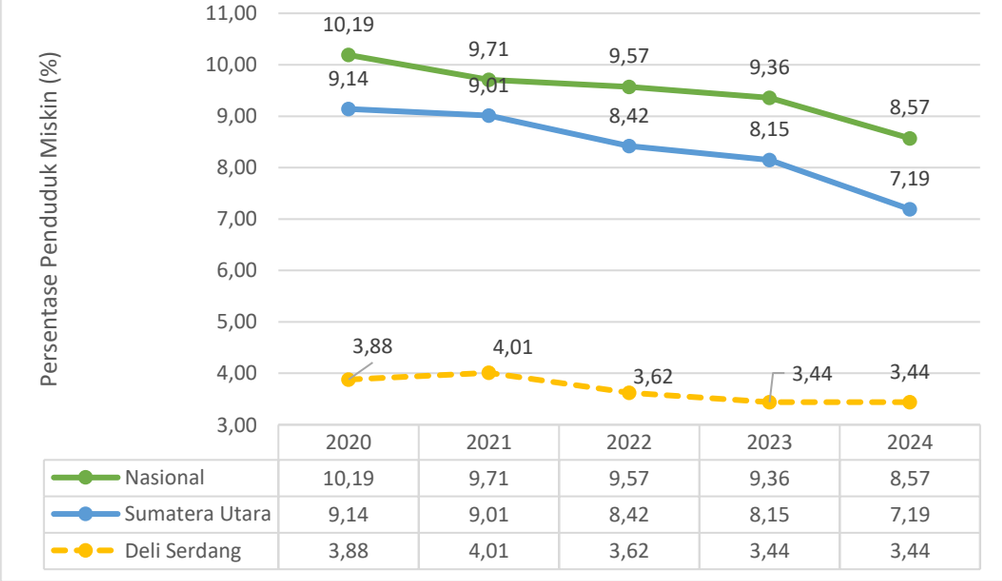
Berdasarkan data dari BPS, indeks gini di Kabupaten Deli Serdang cenderung meningkat dari 0,312 pada tahun 2020 menjadi sebesar 0,262 pada tahun 2024. Indeks gini di Kabupaten Deli Serdang masih menunjukkan pemerataan yang relatif baik, dimana berhasil melebihi Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang perlu melakukan berbagai upaya strategis untuk memastikan aktifitas ekonomi di tengah masyarakat dapat berjalan secara baik, adil, merata, inklusif dan berkelanjutan. Beberapa langkah yang perlu dilakukan, misalnya memperluas lapangan pekerjaan serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja agar mengurangi ketimpangan pendapatan antar masyarakat.

Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi di mana individu atau kelompok tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya ekonomi atau kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, pakaian, pendidikan, dan layanan kesehatan yang cukup untuk menjalani kehidupan yang layak. Tingkat kemiskinan mengacu pada persentase

atau jumlah populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan, yaitu tingkat penghasilan atau konsumsi yang dianggap tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan perumahan yang layak.

Gambar 2. 21
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional



	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	10,19	9,71	9,57	9,36	8,57
Sumatera Utara	9,14	9,01	8,42	8,15	7,19
Deli Serdang	3,88	4,01	3,62	3,44	3,44

Sumber: website www.bps.go.id diakses tahun 2025

Berdasarkan data dari BPS, penduduk miskin di Kabupaten Deli Serdang cenderung mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 3,88 persen menjadi 3,44 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sudah cukup kecil, namun masih ada penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi. Pencapaian ini menunjukkan bahwa program Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam menanggulangi kemiskinan sudah baik. Meskipun demikian, upaya penurunan persentase penduduk miskin untuk kedepannya masih perlu meningkatkan kinerja melalui berbagai program lainnya dalam rangka menekan angka kemiskinan daerah. Maka dari itu, perlu dilakukan evaluasi dan identifikasi terhadap kesesuaian program penanggulangan kemiskinan yang sudah berjalan dan menyusun kembali rencana program yang tepat sesuai sasaran untuk penyelesaian permasalahan kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang.

PDRB Per Kapita

PDRB per kapita adalah ukuran yang menunjukkan rata-rata nilai produk domestik regional bruto yang dihasilkan per penduduk di suatu daerah dalam periode tertentu, secara umum dalam kurun waktu satu tahun. PDRB per kapita memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk di wilayah tersebut.

Tabel 2. 38
PDRB Per Kapita Kabupaten Deli Serdang (Rp Ribu)

PDRB	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHB	57.027,49	59.394,18	65.275,06	68.922,90	73.933,55
PDRB ADHK	36.551,38	37.176,57	38.674,11	39.443,61	40.941,75

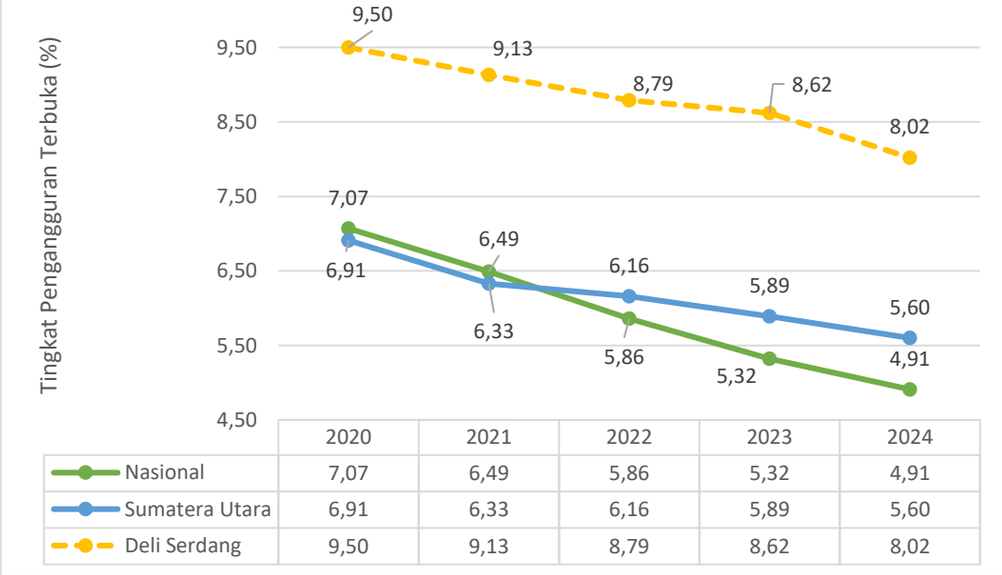
Sumber: Kabupaten Deli Serdang Dalam Angka Tahun 2021-2025 (data diolah, 2025)

PDRB ADHB per kapita Kabupaten Deli Serdang meningkat dari Rp 57.027,49 ribu pada tahun 2020 menjadi Rp 73.933,55 ribu pada tahun 2024. Sementara, PDRB ADHK per kapita meningkat dari Rp 36.551,38 ribu pada tahun 2020 menjadi Rp 40.941,75 ribu pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dan kenaikan ini juga merupakan suatu indikasi dari potensi ekonomi yang kuat, peluang dalam perolehan investasi baru, peluang terciptanya lapangan kerja dan menjadi modal dalam meningkatkan daya saing daerah.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan tenaga kerja yang ada. Tingkat Pengangguran Terbuka yang tinggi merupakan tingkat pengangguran yang dapat berdampak buruk karna menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Cakupan kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2. 22
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (%)



	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	7,07	6,49	5,86	5,32	4,91
Sumatera Utara	6,91	6,33	6,16	5,89	5,60
Deli Serdang	9,50	9,13	8,79	8,62	8,02

Sumber: website www.bps.go.id diakses tahun 2025

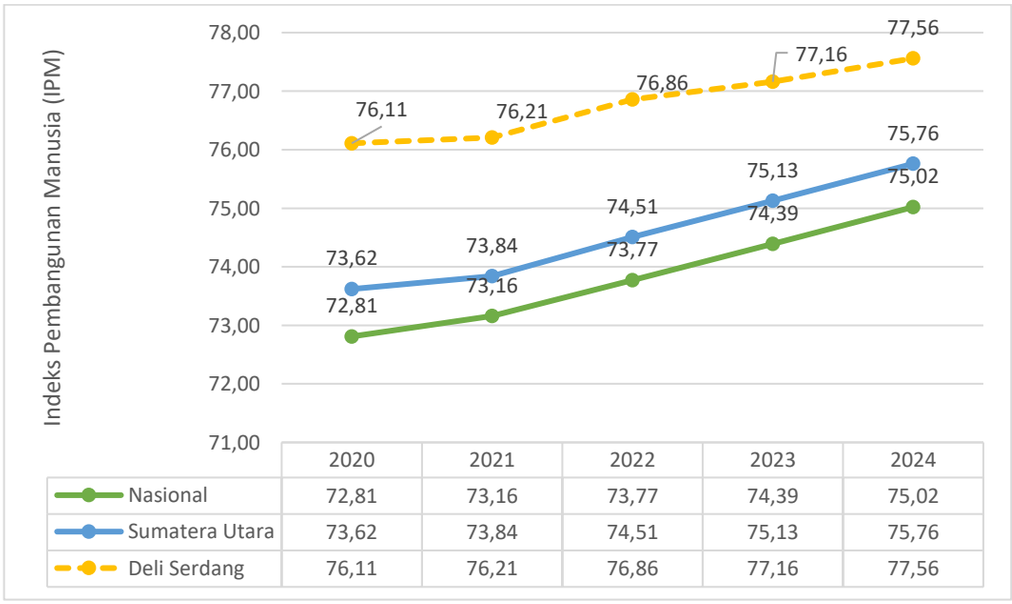
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Deli Serdang relatif mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 9,50 persen menjadi sebesar 8,02 persen pada tahun 2024. Meskipun angka TPT Kabupaten Deli Serdang mengalami penurunan, namun TPT Kabupaten Deli Serdang lebih tinggi dari Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Dalam upaya menekan angka TPT, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang perlu meningkatkan keterampilan tenaga kerjanya sesuai dengan kebutuhan industri dan memperluas lapangan pekerjaan di daerahnya sehingga diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lokal.

Indeks Pembangunan Manusia

Kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi merupakan cerminan dari kemajuan pembangunan manusia secara umum yang ditunjukkan dari perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator yang menggambarkan kualitas pembangunan manusia suatu wilayah pada satu kurun waktu tertentu. Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah. IPM mencakup tiga dimensi pembangunan manusia, yakni kesehatan yang diwakili umur harapan hidup, pendidikan yang diwakili harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta kemampuan daya beli

diperoleh dari rata-rata pengeluaran riil per kapita.

Gambar 2. 23
IPM Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional



	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	72,81	73,16	73,77	74,39	75,02
Sumatera Utara	73,62	73,84	74,51	75,13	75,76
Deli Serdang	76,11	76,21	76,86	77,16	77,56

Sumber: website www.bps.go.id diakses tahun 2025

Dapat dilihat pada gambar, selama 5 (lima) tahun terakhir, IPM Kabupaten Deli Serdang termasuk dalam kategori tinggi dan terus mengalami peningkatan serta selalu di atas rata-rata Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Pada tahun 2024 IPM di Kabupaten Deli Serdang menunjukkan angka 77,56 poin lebih baik dari IPM Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Hal ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan menunjukkan kemajuan dalam kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan dan peningkatan standar hidup serta kebijakan pemerintah daerah untuk tetap terus berkomitmen dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya secara merata.

Pada tahun 2020, Kabupaten Deli Serdang mengalami kontraksi ekonomi dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar -1,78 persen, yang disertai meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 9,5 persen dan tingkat kemiskinan sebesar 3,88 persen. PDRB per kapita tercatat sebesar 57.027,49, dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 76,11 dan indeks Gini 0,312 yang mencerminkan ketimpangan distribusi pendapatan. Tahun 2021 menunjukkan awal pemulihan dengan LPE naik menjadi 2,23 persen

dan PDRB per kapita meningkat menjadi 59.394,18, meskipun kemiskinan sedikit naik ke 4,01 persen. Namun, penurunan TPT menjadi 9,13 persen, penurunan indeks Gini ke 0,263, serta kenaikan IPM ke 76,21 menunjukkan perbaikan kesejahteraan secara umum.

Pada 2022, LPE meningkat signifikan menjadi 4,70 persen, disertai dengan kenaikan PDRB per kapita menjadi 65.275,06, penurunan kemiskinan menjadi 3,62 persen, dan TPT turun ke 8,79 persen. IPM naik menjadi 76,86, meskipun indeks Gini sedikit meningkat ke 0,270. Tahun 2023 mencatat LPE 5,34 persen, PDRB per kapita sebesar 68.922,90, kemiskinan menurun ke 3,44 persen, TPT turun menjadi 8,62 persen, dan IPM naik ke 77,16, meskipun indeks Gini meningkat ke 0,295, menandakan adanya ketimpangan yang masih perlu diwaspadai.

Pada 2024, indikator ekonomi dan sosial menunjukkan tren membaik secara konsisten, dengan LPE 5,36 persen, PDRB per kapita 73.933,55, IPM meningkat ke 77,56, TPT menurun ke 8,02 persen, kemiskinan stabil di 3,44 persen, dan indeks Gini menurun signifikan menjadi 0,262, menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi mulai berjalan lebih merata dan inklusif. Hubungan yang selaras antar indikator tersebut mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan telah turut mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat secara merata di Kabupaten Deli Serdang.

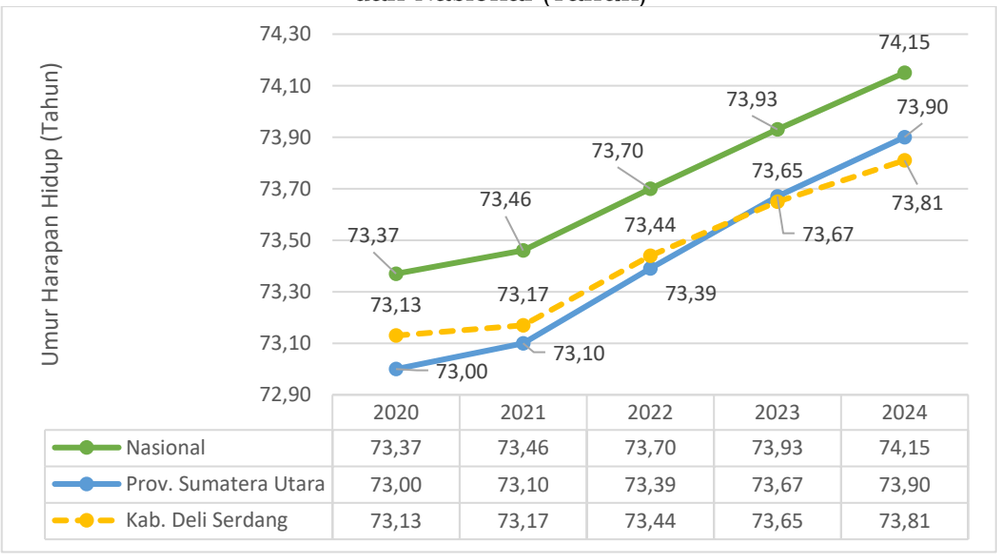
2.2.2. Kesehatan untuk Semua

Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia di Kabupaten Deli Serdang, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan merata.

Umur Harapan Hidup

Indikator kesehatan Kabupaten Deli Serdang dijelaskan melalui umur harapan hidup. Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan ukuran terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan derajat kesehatan pada khususnya. Perbandingan Umur Harapan Hidup Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. 24
Umur Harapan Hidup Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (Tahun)



	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	73,37	73,46	73,70	73,93	74,15
Prov. Sumatera Utara	73,00	73,10	73,39	73,67	73,90
Kab. Deli Serdang	73,13	73,17	73,44	73,65	73,81

Sumber: website www.bps.go.id diakses tahun 2025

Umur Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan dari 73,13 tahun pada tahun 2020 menjadi 73,81 tahun pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional, Umur Harapan Hidup Kabupaten Deli Serdang selalu lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dari aspek kesehatan di Kabupaten Deli Serdang. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang perlu merencanakan program-program terkait peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta pemerataan ke berbagai wilayah sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan layanan kesehatan di Kabupaten Deli Serdang.

Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan suatu keluarga berdasarkan 12 indikator kesehatan yang dikembangkan dalam Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). IKS memberikan gambaran tentang seberapa sehat suatu keluarga secara keseluruhan, dengan nilai IKS berkisar antara 0 hingga 1. IKS Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 39
Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Deli Serdang (%)

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Keluarga Sehat (Poin)	0,25	0,33	0,41	0,44	0,47

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Deli Serdang meningkat dari 0,25 persen pada tahun 2020 menjadi 0,47 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam status kesehatan keluarga. Namun, karena nilai IKS masih di bawah 0,50, status kesehatan keluarga secara umum masih tergolong tidak sehat, dan upaya yang lebih signifikan dan terfokus masih diperlukan untuk mencapai kategori pra-sehat atau sehat.

Indeks Pencapaian SPM Kesehatan

Indeks Pencapaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah telah berhasil memenuhi standar pelayanan kesehatan dasar yang ditetapkan secara nasional. Indeks ini memberikan gambaran kuantitatif mengenai pencapaian mutu pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Capaian indeks pencapaian SPM kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 40
Capaian Indeks Pelayanan SPM Kesehatan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pelayanan SPM Kesehatan (Indeks)	n/a	n/a	n/a	93,32	93,35

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Capaian Indeks Pelayanan SPM Kesehatan pada tahun 2023 sebesar 93,32 persen dan meningkat menjadi 93,35 persen pada tahun 2024. Indeks ini diharapkan dapat tercapai 100 persen pada setiap tahunnya.

Prevalensi Stunting

Stunting adalah keadaan di mana tinggi badan anak lebih rendah dari rata-rata untuk usianya karena kekurangan nutrisi yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang.

Tabel 2. 41
Prevalensi Stunting Kabupaten Deli Serdang (%)

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pravelensi Stunting (%)	3,07	1,52	0,90	0,36	0,16

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Prevalensi stunting Kabupaten Deli Serdang menurun dari 3,07 persen pada tahun 2020 menjadi 0,16 persen pada tahun 2024. Walaupun pada tahun 2024 angka pravelensi stunting sudah lebih rendah dari tahun sebelumnya, namun hal ini menunjukkan bahwa masih ada anak yang mengalami gizi buruk di Kabupaten Deli Serdang. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang harus memperhatikan hal ini secara serius mengingat lonjakan yang cukup besar dari prevalensi stunting pada tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang akan meningkatkan ketersediaan pangan yang bergizi baik dan mendistribusikannya kepada masyarakat agar kebutuhan gizi anak dapat terpenuhi sehingga diharapkan angkat stunting mengalami penurunan.

2.2.3. Pendidikan yang Berkualitas dan Merata

Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dimana keberhasilan pembangunan suatu wilayah dapat ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan. Untuk mengetahui banyaknya penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Indikator pendidikan di Kabupaten Deli Serdang dijelaskan melaui rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan rata-rata Harapan Lama Sekolah (HLS).

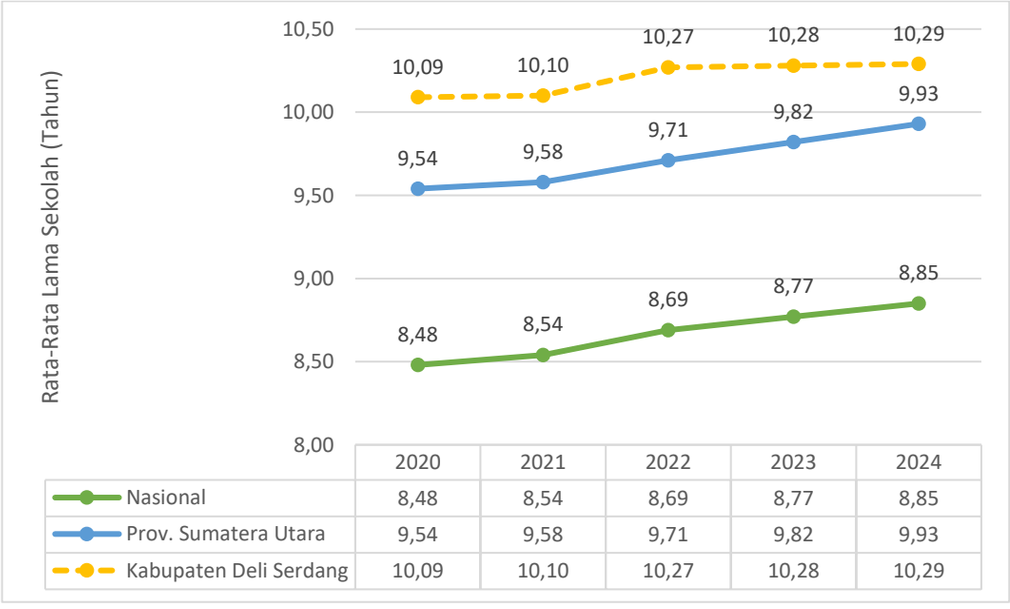
Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk untuk menjalani pendidikan formal. RLS dihitung berdasarkan penduduk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Deli Serdang tahun 2022 adalah 10,27 tahun, ini berarti rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas telah

menempuh pendidikan selama 10,27 tahun atau lebih lama 0,17 tahun dari tahun 2021. Ini berarti kualitas pendidikan di Kabupaten Deli Serdang mengalami perbaikan. Kabupaten Deli Serdang dalam 5 (lima) tahun terakhir berada di atas RLS Provinsi Sumatera Utara.

Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Deli Serdang dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. 25
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (Tahun)



	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	8,48	8,54	8,69	8,77	8,85
Prov. Sumatera Utara	9,54	9,58	9,71	9,82	9,93
Kabupaten Deli Serdang	10,09	10,10	10,27	10,28	10,29

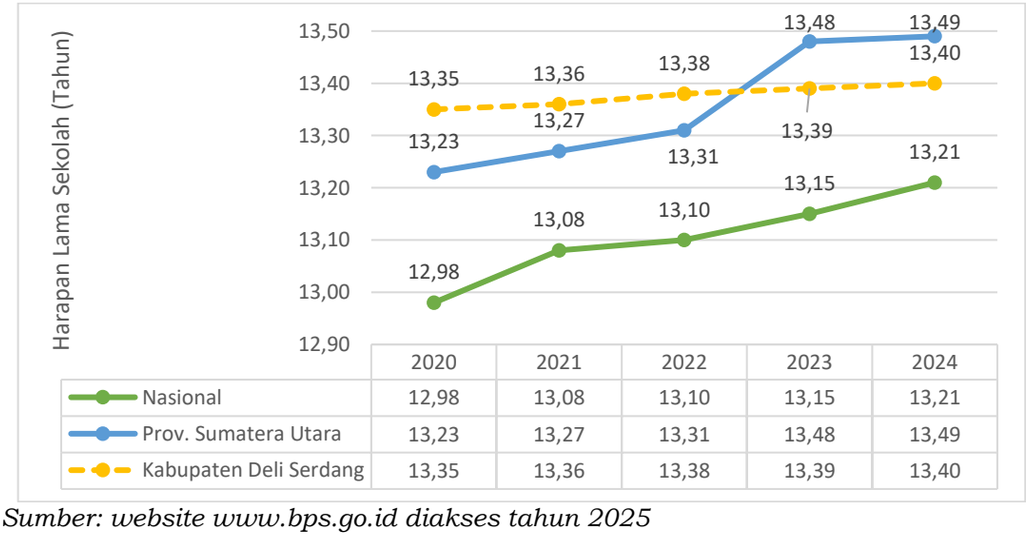
Sumber: website www.bps.go.id diakses tahun 2025

Berdasarkan gambar tersebut, Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Deli Serdang meningkat setiap tahunnya dari 10,09 tahun pada tahun 2020 dan mencapai 10,29 tahun pada tahun 2024. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Sumatera utara dan Nasional, Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Deli Serdang selalu lebih tinggi. Hal ini menggambarkan bahwa secara umum jenjang pendidikan masyarakat Kabupaten Deli Serdang semakin tinggi. Rata-Rata Lama Sekolah pada tahun 2024 mencapai 10,29 tahun yang berarti penduduk Kabupaten Deli Serdang secara umum telah menempuh pendidikan SMA kelas 1. Hal ini juga menunjukkan bahwa kualifikasi pendidikan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang melebihi rata-rata regional dan nasional.

Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai

jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Seiring dengan Angka Rata-Rata Lama Sekolah, HLS Kabupaten Deli Serdang berada di atas HLS Provinsi Sumatera Utara dalam 5 (lima) tahun terakhir. Selengkapnya disajikan dalam gambar berikut. Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. 26
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional (Tahun)



	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	12,98	13,08	13,10	13,15	13,21
Prov. Sumatera Utara	13,23	13,27	13,31	13,48	13,49
Kabupaten Deli Serdang	13,35	13,36	13,38	13,39	13,40

Sumber: website www.bps.go.id diakses tahun 2025

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Deli Serdang lebih terus meningkat dari 13,35 tahun pada tahun 2020 menjadi 13,40 tahun pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum masyarakat Kabupaten Deli Serdang ingin menempuh pendidikan sampai dengan tingkat universitas. Dari Apabila dibandingkan dengan Nasional, HLS Kabupaten Deli Serdang selalu lebih unggul. Hal ini mengindikasikan bahwa minat masyarakat Kabupaten Deli Serdang untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi melebihi tingkat nasional. Namun, dari tahun 2023 hingga tahun 2024 HLS Kabupaten Deli Serdang masih di bawah HLS Provinsi Sumatera Utara.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat literasi atau kemampuan membaca dan menulis di kalangan masyarakat suatu wilayah atau negara. IPLM membantu dalam memahami sejauh mana masyarakat memiliki akses terhadap pendidikan dasar dan

kemampuan literasi dasar, yang merupakan fondasi penting untuk pembangunan sosial dan ekonomi.

Tabel 2. 42
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Deli Serdang (Poin)

UPLM	Keterangan	2022	2023	2024
UPLM 1	Pemerataan Layanan Perpustakaan	0,0006	0,1593	0,1685
UPLM 2	Pemerataan Koleksi Perpustakaan	0,2114	0,2137	0,7241
UPLM 3	Pemerataan Tenaga Perpustakaan	0,0001	0,1151	0,1561
UPLM 4	Tingkat Kunjungan Pustaka	0,1803	0,0516	0,3865
UPLM 5	Perpustakaan Ber-SNP	1,5194	1,0000	0,7856
UPLM 6	Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan	0,1854	1,0000	1,0000
UPLM 7	Jumlah Pemustaka	0,3351	1,0000	1,0000
IPLM		**34,75**	**50,57**	**60,30**

Sumber: Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2022-2024

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Deli Serdang meningkat dari 34,75 poin pada tahun 2022 menjadi 60,30 poin pada tahun 2024. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan pada beberapa unsur penyusunnya, yaitu UPLM 6 (Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan) yang meningkat dari 0,1854 poin menjadi 1 poin. Hal ini menandakan bahwa semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi untuk menghimbau masyarakat lainnya untuk meningkatkan literasinya melalui perpustakaan. Selanjutnya adalah UPLM 7 (Jumlah Pemustaka) yang meningkat dari 0,3351 poin menjadi 1 poin. Peningkatan ini menandakan bahwa semakin banyak masyarakat yang mendaftarkan dirinya untuk menjadi anggota perpustakaan aktif di Kabupaten Deli Serdang.

Di samping itu, terdapat unsur penyusun yang mengalami penurunan, yaitu UPLM 5 (Perpustakaan Ber-SNP) yang menurun dari 1,5194 poin menjadi 0,7856 poin. Penurunan ini menandakan bahwa berkurangnya jumlah perpustakaan yang memenuhi standar nasional. Hal ini dapat disebabkan penurunan Kualitas Layanan dan Pengelolaan.

Angka Literasi dan Numerasi Masyarakat

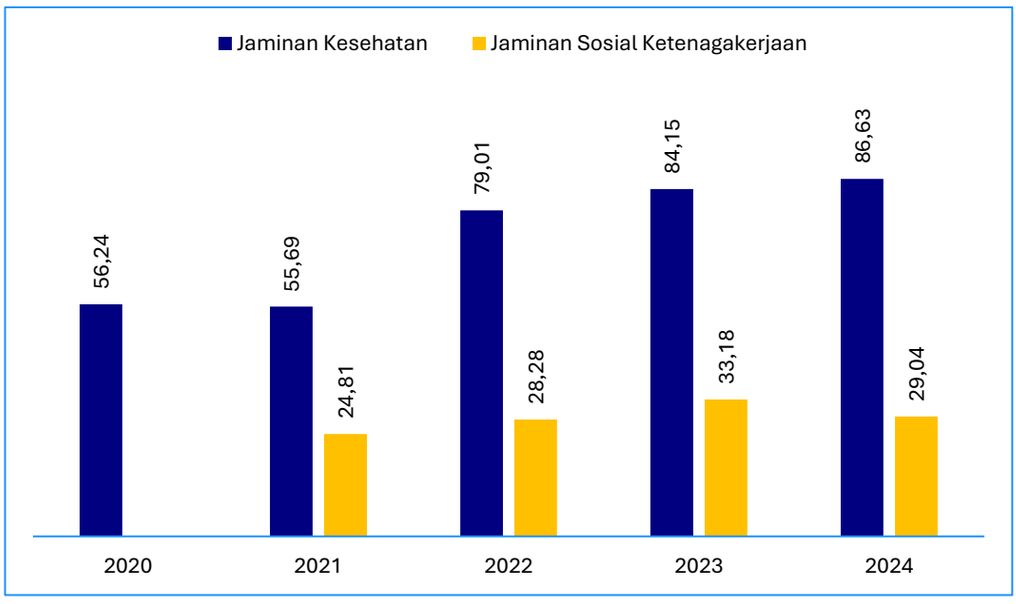
Angka literasi dan numerasi merupakan indikator penting dalam mengukur kemampuan dasar masyarakat dalam membaca,

menulis, dan berhitung yang menjadi fondasi utama pengembangan literasi secara menyeluruh. Dalam konteks Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), indikator ini mencerminkan tingkat kecakapan fungsional warga dalam mengakses, memahami, dan mengolah informasi, baik dalam bentuk teks maupun angka, untuk kehidupan sehari-hari. Rendahnya angka literasi dan numerasi dapat menjadi penghambat peningkatan literasi lanjutan, termasuk literasi digital, finansial, dan sains. Oleh karena itu, penguatan indikator ini sangat krusial agar IPLM tidak hanya menggambarkan ketersediaan sarana literasi, tetapi juga kualitas kemampuan literasi masyarakat secara riil.

2.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial merupakan kunci bagi pembangunan masyarakat. Adanya perlindungan sosial akan menjangkau masyarakat yang kurang mampu mengakses pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah sehingga masyarakat dapat merasakannya secara inklusif.

Gambar 2. 27
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)



Sumber: Dinas Kesehatan dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Cakupan Kepesertaan jaminan kesehatan Kabupaten Deli Serdang meningkat dari 56,24 persen pada tahun 2020 menjadi 86,63

persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan sudah meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam program jaminan kesehatan nasional, namun masih banyak masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang belum berpartisipasi sebesar 13,37 persen sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam program jaminan kesehatan. Sementara, untuk jaminan sosial ketenagakerjaan mengalami peningkatan dari 24,82 persen pada tahun 2021 menjadi 33,18 persen pada tahun 2023, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 29,04 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak tenaga kerja yang belum didaftarkan dalam program penjaminan ketenagakerjaan sebesar 70,96 persen.

2.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Pembangunan yang dilakukan bukan hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan lainnya, namun juga membangun masyarakat yang lebih berkarakter. Penguatan agama dan budaya menjadi penting dalam membentuk masyarakat yang berkarakter dan berkualitas.

Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat harmoni, toleransi, dan kerukunan antar umat beragama dalam suatu masyarakat atau wilayah. Indeks Kerukunan Umat Beragama penting karena mencerminkan tingkat kedamaian dan stabilitas sosial suatu masyarakat. Masyarakat dengan indeks kerukunan yang tinggi cenderung lebih harmonis, produktif, dan mampu menghadapi tantangan bersama tanpa terpecah oleh perbedaan agama.

Tabel 2. 43

Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Deli Serdang (Poin)

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kerukunan Umat Beragama (Poin)	n/a	n/a	n/a	75,27	80,04

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

IKUB Kabupaten Deli Serdang meningkat dari 75,27 poin pada tahun 2023 menjadi 80,04 poin pada tahun 2024. Peningkatan IKUB ini mencerminkan perkembangan positif dalam kehidupan sosial dan keagamaan di Kabupaten Deli Serdang. Namun, penting untuk terus menjaga dan meningkatkan capaian ini melalui upaya berkelanjutan.

2.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Penguatan keluarga penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Keluarga adalah pondasi dari terciptanya manusia yang berkualitas.

Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah adalah indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan perlindungan anak di suatu daerah atau wilayah. IPA berfungsi sebagai tolok ukur bagi pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas program dan kebijakan perlindungan anak.

Tabel 2. 44

Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Deli Serdang (Poin)

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Perlindungan Anak (Poin)	-	-	61,55	61,14	-

Sumber: Dinas P3AP2KB Deli Serdang Tahun 2025

Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Deli Serdang menurun dari 61,55 poin pada tahun 2022 menjadi 61,14 poin pada tahun 2023. Penurunan indeks ini adalah peringatan dini yang memerlukan perhatian serius dan perlu dilakukan langkah-langkah korektif yang efektif dan terukur untuk membalikkan tren negatif ini serta meningkatkan kembali upaya perlindungan anak di Kabupaten Deli Serdang.

Indeks Pemenuhan Hak Anak

Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) adalah indikator yang menunjukkan tingkat realisasi pemenuhan hak anak. Indeks Pemenuhan Hak Anak Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2023 dengan angka 57,51, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 58,37 di tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi pemenuhan hak anak yang masih perlu banyak ditingkatkan. Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Deli Serdang perlu meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar anak dan sistem perlindungan anak.

Tabel 2. 45
Indeks Pemenuhan Hak Anak Kabupaten Deli Serdang (Poin)

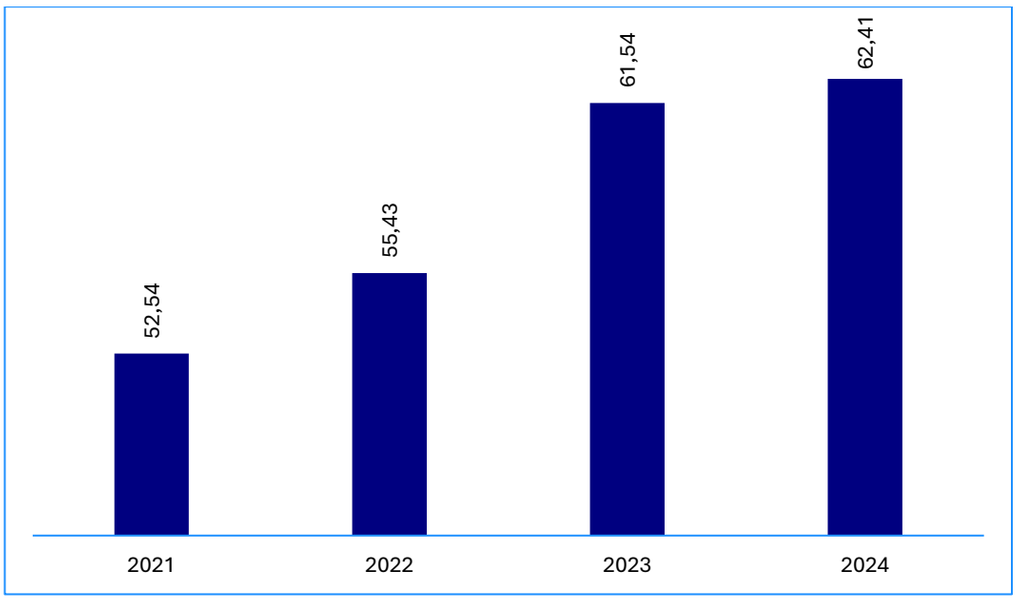
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pemenuhan Hak Anak (Poin)	-	58,41	58,37	57,51	-

Sumber: Dinas P3AP2KB Deli Serdang Tahun 2025

Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga yang dibentuk dari 17 variabel serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga.

Gambar 2. 28
Indeks Pembangunan Keluarga



Sumber: website siga.kemenpppa diakses tahun 2025

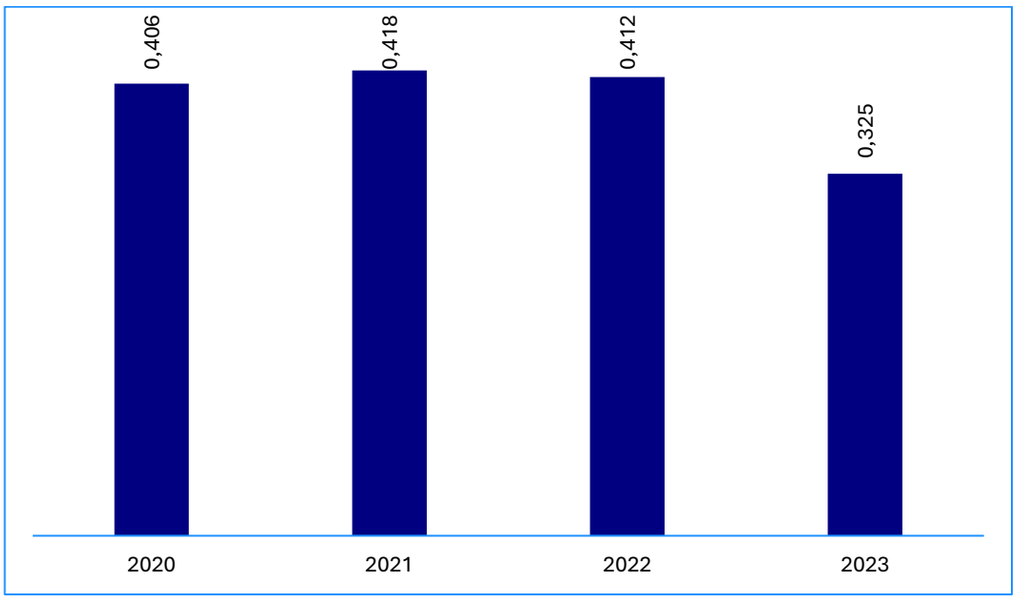
Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Deli Serdang

meningkat setiap tahunnya dari 52,54 poin pada tahun 2021 menjadi 62,41 poin pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kualitas keluarga di Kabupaten Deli Serdang.

Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender merupakan indikator untuk mengukur seberapa jauh ketidakoptimalan pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan gender dilihat dari tiga aspek pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan partisipasi ekonomi serta menggambarkan keadaan dimana adanya perlakuan atau tindakan yang tidak adil pada jenis kelamin perempuan. Indeks ini penting karena memberikan gambaran menyeluruh tentang ketidaksetaraan yang dihadapi oleh perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Cakupan perkembangan indeks ketimpangan gender di Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. 29
Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Deli Serdang (Poin)



Sumber: website www.bps.go.id diakses tahun 2025

Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Deli Serdang cenderung mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 0,448 poin menjadi sebesar 0,325 poin pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa semakin menurunnya kesenjangan antara penduduk perempuan dan penduduk laki-laki yang diukur dari aspek kesehatan, pemberdayaan dan partisipasi ekonomi.

Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda merupakan indikator strategis yang digunakan untuk mengukur tingkat aksesibilitas pemuda terhadap peluang dan kondisi yang mendukung pengembangan kapasitas diri dalam berbagai sektor, meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, partisipasi politik, serta kehidupan sosial. Indeks ini merefleksikan tingkat kualitas hidup dan pemberdayaan pemuda di suatu wilayah, serta menggambarkan sejauh mana keberpihakan kebijakan dan ketersediaan sumber daya dalam mendorong optimalisasi potensi generasi muda. Berdasarkan hasil perhitungan Kemenpora, capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) tahun 2024 berada pada angka 56,33 persen, dengan rincian capaian domain pendidikan 70,00 persen, domain kesehatan dan kesejahteraan 65,00 persen, domain gender dan diskriminasi 53,33 persen. Sementara domain lapangan dan kesempatan kerja sebesar 45,00 persen, dan domain partisipasi serta kepemimpinan sebesar 43,33 persen. Saat ini Kemenpora sedang menyusun peraturan menteri untuk perhitungan indeks tersebut.

Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar (status pekerjaan 3) dan buruh/karyawan/pegawai (status pekerjaan 4). Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah proporsi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (status pekerjaan 3 dan 4) terhadap total penyandang disabilitas pada angkatan kerja. Penyandang disabilitas yang dihitung dalam indikator ini adalah penyandang disabilitas kategori sedang dan berat. Mengukur

persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal sangat penting karena hal ini mencerminkan **tingkat inklusi sosial dan ekonomi** suatu daerah. Data ini memberikan gambaran nyata tentang seberapa efektif kebijakan pemerintah dalam menciptakan kesempatan kerja yang setara bagi semua warga negara.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah merupakan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional.

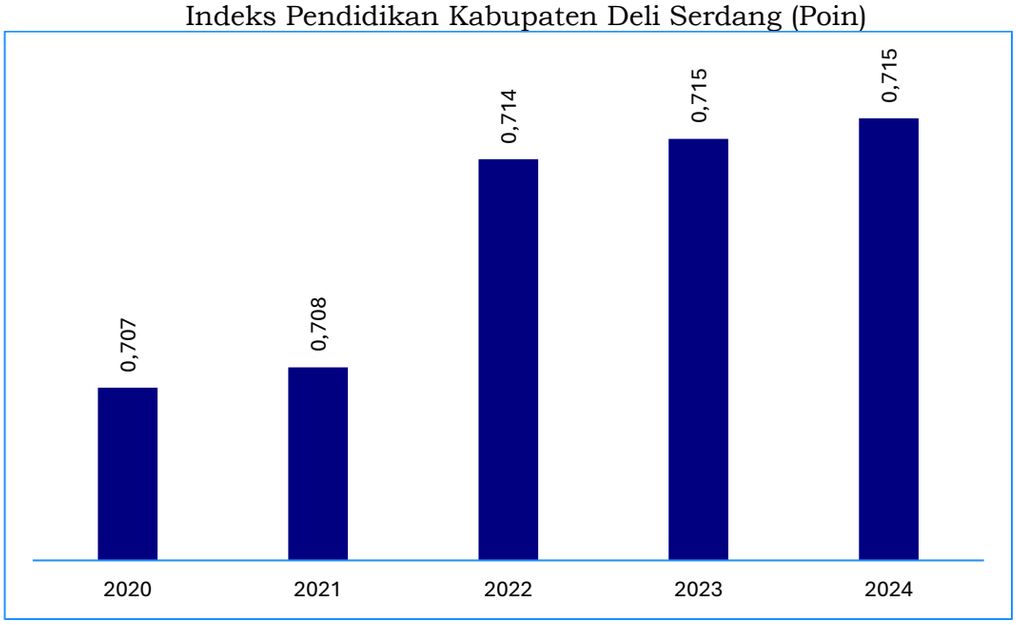
Daya saing daerah adalah kemampuan suatu wilayah untuk menarik dan mempertahankan investasi dan sumber daya lainnya, serta untuk menghasilkan produk dan jasa yang dapat bersaing di pasar global. Aspek daya saing daerah mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi kemampuan suatu wilayah untuk berkembang secara ekonomi dan sosial. Aspek daya saing daerah dilihat dari segi ekonomi, Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur, dan investasi.

2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan adalah ukuran yang digunakan untuk menilai dan membandingkan tingkat perkembangan pendidikan di berbagai wilayah. Indeks ini memberikan gambaran tentang akses, kualitas, dan hasil pendidikan yang dicapai oleh penduduk.

Gambar 2. 30
Indeks Pendidikan Kabupaten Deli Serdang (Poin)



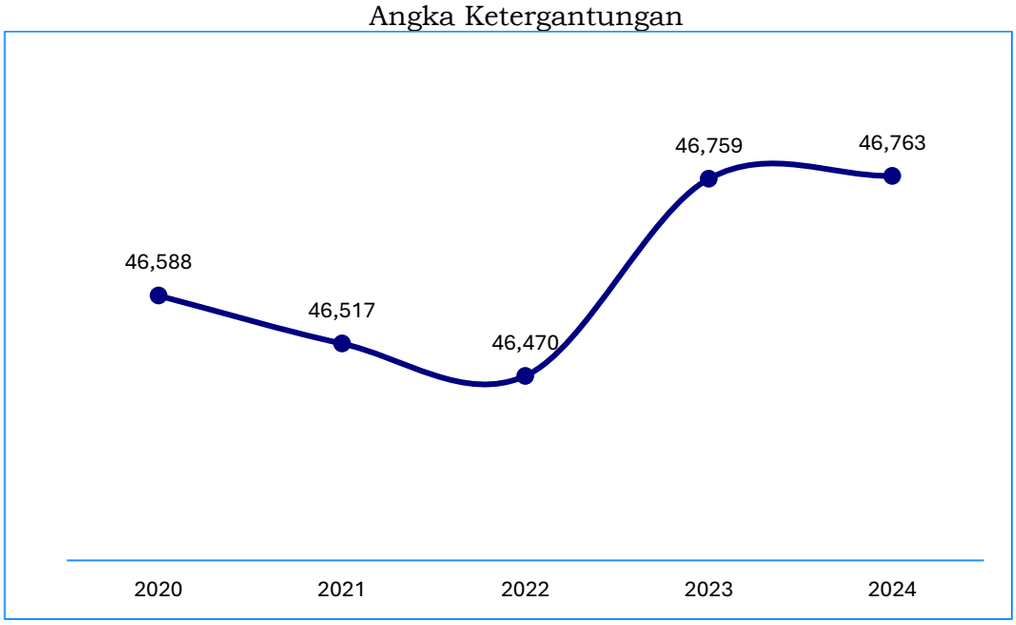
Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah, 2025)

Indeks pendidikan Kabupaten Deli Serdang meningkat dari 0,707 poin menjadi 0,715 poin selama tahun 2020-2024. Peningkatan ini menandakan bahwa terjadi peningkatan kualitas dan akses pendidikan, serta semakin meratanya pendidikan di Kabupaten Deli Serdang.

Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan mengacu pada rasio antara jumlah penduduk yang tidak bekerja (biasanya dalam kelompok usia yang tidak aktif secara ekonomi, seperti anak-anak dan pensiunan) dibandingkan dengan jumlah individu yang bekerja atau aktif secara ekonomi (biasanya dalam kelompok usia produktif). Angka ini memberikan gambaran tentang beban yang ditanggung oleh individu yang bekerja dalam mendukung individu yang tidak bekerja dalam suatu populasi.

Gambar 2. 31
Angka Ketergantungan



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah, 2025)

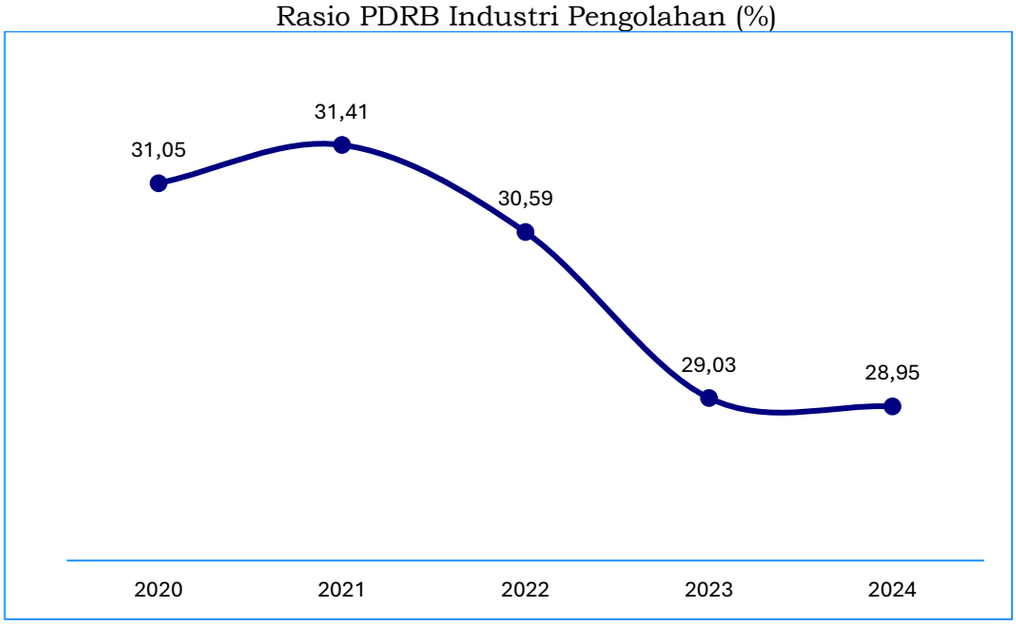
Angka Ketergantungan mengalami penurunan dari 46,588 per 100 penduduk menjadi 46,763 per 100 penduduk selama tahun 2020-2024. Hal ini menandakan bahwa pada tahun 2024 terdapat kurang lebih sebanyak 47 orang penduduk usia non produktif yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Penurunan ini menandakan bahwa semakin berkurangnya beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif di Kabupaten Deli Serdang.

2.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), inovasi, dan produktivitas ekonomi merupakan tiga hal penting yang saling terkait dalam mendorong pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Iptek berperan sebagai fondasi dalam pengembangan pengetahuan dan teknologi baru, yang kemudian menjadi dasar untuk menciptakan inovasi. Inovasi, baik dalam bentuk produk, proses, atau model bisnis, memungkinkan efisiensi yang lebih tinggi, peningkatan kualitas, dan penciptaan nilai tambah dalam berbagai sektor ekonomi. Sementara itu, produktivitas ekonomi mengukur seberapa efektif sumber daya (tenaga kerja, modal, dan teknologi) digunakan untuk menghasilkan output. Peningkatan produktivitas seringkali dipicu oleh adopsi teknologi dan inovasi yang mampu mengoptimalkan proses produksi dan distribusi.

Rasio PDRB Industri Pengolahan adalah indikator yang mengukur kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah. Industri pengolahan meliputi kegiatan mengubah bahan baku atau bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi, seperti industri makanan, tekstil, kimia, elektronik, dan lainnya. Rasio ini dihitung dengan membandingkan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan terhadap total PDRB wilayah tersebut, biasanya dinyatakan dalam persentase.

Gambar 2. 32
Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)

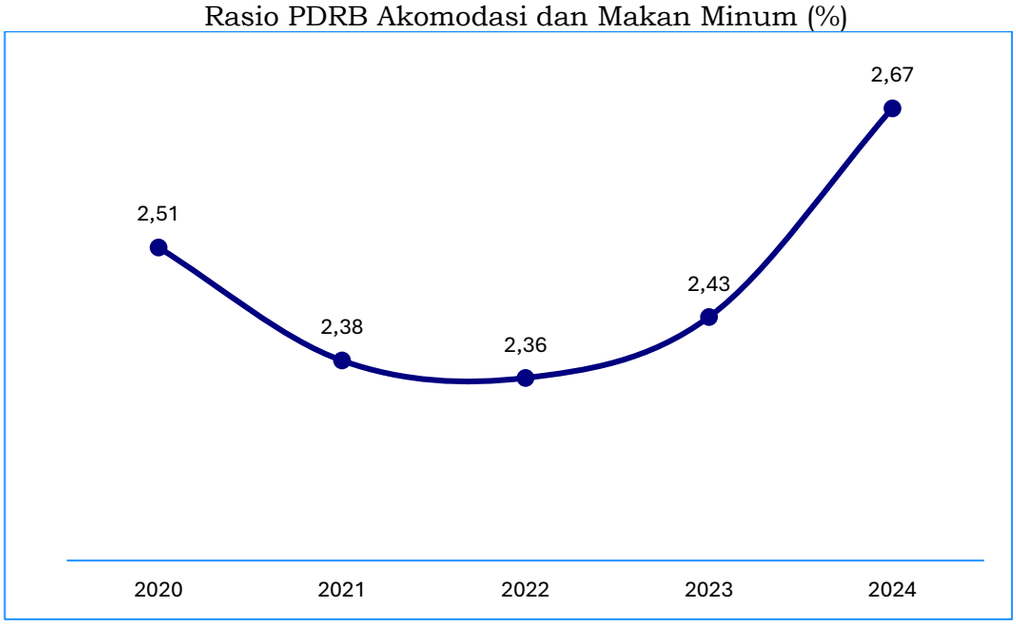


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Rasio PDRB industri pengolahan Kabupaten Deli Serdang mengalami penurunan dari 31,05 persen pada tahun 2020 menjadi 28,95 persen pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya pergeseran kegiatan ekonomi dari berbasis industri menuju sektor lainnya. Penurunan ini dapat disebabkan oleh menurunnya produksi dari sektor industri pengolahan. Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Deli Serdang, serta hilirisasi produk berbasis sumber daya unggulan perlu ditingkatkan agar meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian Kabupaten Deli Serdang.

Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum adalah indikator yang mengukur kontribusi sektor akomodasi (hotel, penginapan, dan sejenisnya) serta sektor makan dan minum (seperti restoran, kafe, dan warung makan) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah. Rasio ini dihitung dengan membandingkan nilai tambah yang dihasilkan oleh kedua sektor tersebut terhadap total PDRB, biasanya dinyatakan dalam persentase. Sektor akomodasi dan makan minum merupakan bagian dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang menjadi penopang bagi perekonomian daerah, terutama di wilayah-wilayah dengan potensi pariwisata yang tinggi.

Gambar 2. 33
Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum (%)

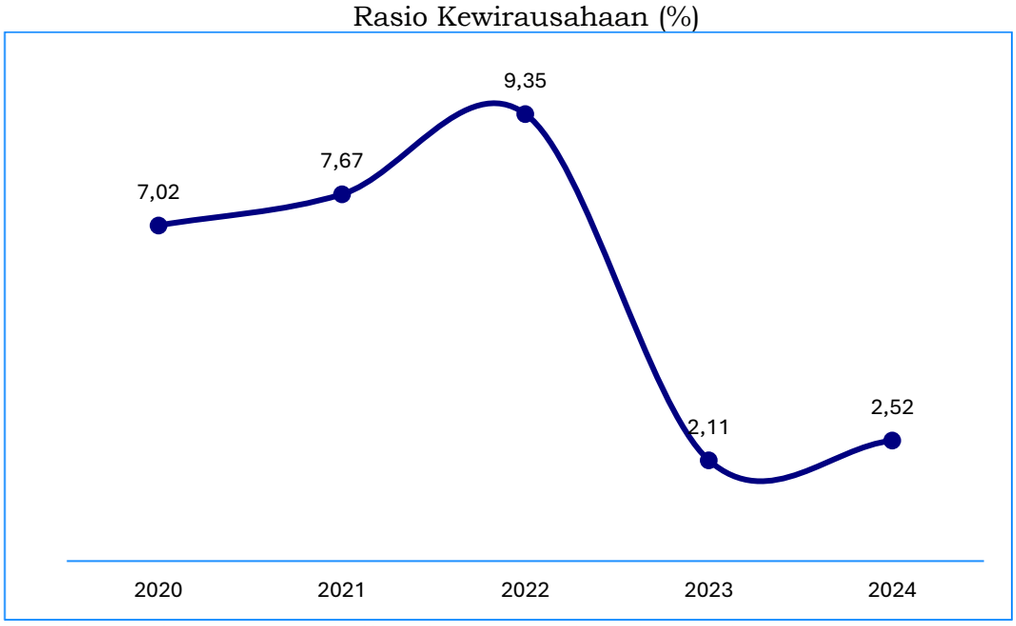


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Rasio PDRB akomodasi dan makan minum meningkat dari 2,51 persen pada tahun 2020 menjadi 2,67 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kontribusi sektor pariwisata yang diproksikan oleh sektor akomodasi dan makan minum di Kabupaten Deli Serdang. Peningkatan rasio ini mencerminkan peran penting sektor akomodasi dan makan minum dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, untuk mempertahankan dan meningkatkan kontribusi sektor ini, diperlukan upaya berkelanjutan dalam pengembangan pariwisata, peningkatan kualitas layanan, dan inovasi dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Rasio kewirausahaan adalah ukuran yang digunakan untuk menentukan proporsi jumlah wirausahawan atau usaha baru dalam suatu populasi atau ekonomi tertentu. Rasio ini memberikan gambaran tentang tingkat aktivitas kewirausahaan di suatu wilayah dan digunakan sebagai indikator kesehatan ekonomi dan potensi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan wirausaha dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Rasio kewirausahaan dihitung dari proporsi penduduk berusaha sendiri dan memiliki paling sedikit 1 orang karyawan dibandingkan seluruh angkatan kerja di wilayah tersebut.

Gambar 2. 34
Rasio Kewirausahaan (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

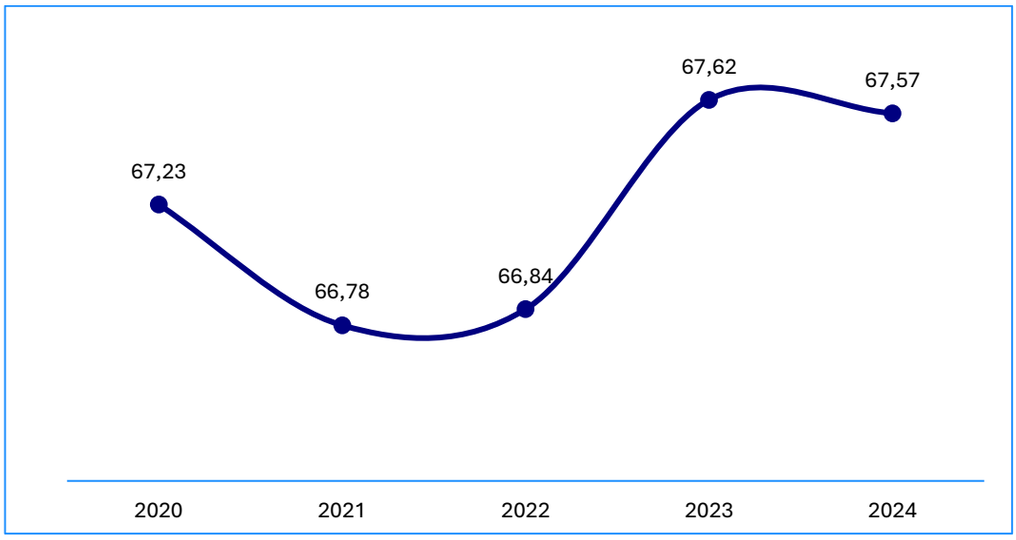
Rasio Kewirausahaan Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan dari 7,02 persen pada tahun 2020 menjadi 9,35 persen pada tahun 2022 dan mengalami penurunan menjadi 2,11 persen pada tahun 2023 kemudian meningkat menjadi 2,52 persen pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa belum banyaknya minat masyarakat untuk berwirausaha sekaligus menandakan bahwa semakin rendahnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Kabupaten Deli Serdang. Peningkatan rasio kewirausahaan perlu didorong karena wirausaha merupakan salah satu faktor penggerak bagi perekonomian daerah. Meningkatnya wirausaha akan meningkatkan aktivitas perekonomian daerah dan membuka lapangan pekerjaan bagi

masyarakat setempat.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja mengacu pada proporsi populasi usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan. Indikator ini merupakan metrik dalam analisis ekonomi untuk memahami seberapa besar tenaga kerja suatu wilayah terlibat dalam kegiatan ekonomi. Tingkat partisipasi angkatan kerja dihitung dengan membagi jumlah orang yang bekerja atau mencari pekerjaan dengan total populasi usia kerja, kemudian dikalikan dengan 100 untuk mendapatkan persentase. Indikator ini memberikan gambaran tentang seberapa besar sebagian populasi berpotensi aktif secara ekonomi, yang penting untuk kebijakan ekonomi dan evaluasi pasar tenaga kerja.

Gambar 2. 35
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)



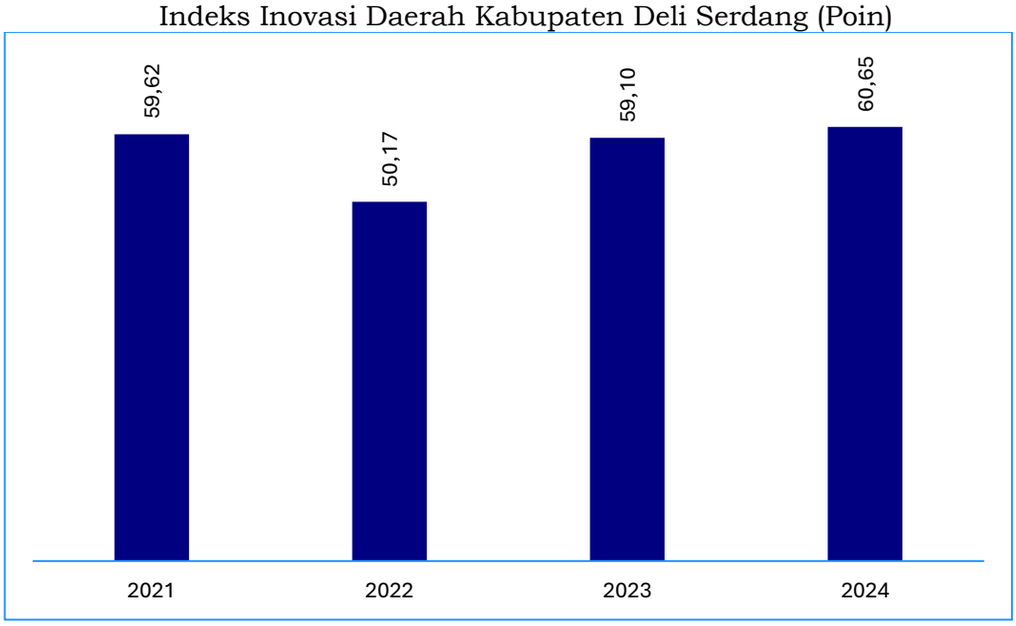
Sumber: website www.bps.go.id diakses tahun 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Deli Serdang menurun dari 67,62 persen pada tahun 2023 menjadi 67,57 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya perubahan dalam jumlah penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi dalam kurun waktu tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa proporsi populasi usia kerja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi (baik bekerja atau mencari pekerjaan) mengalami penurunan relatif terhadap jumlah total populasi usia kerja.

Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. bentuk kebaruan didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya.

Gambar 2. 36
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Deli Serdang (Poin)



Sumber: Kepmendagri Nomor 002.6-5848 Tahun 2021, Kepmendagri Nomor 400.10.11-6301.A Tahun 2022; Kepmendagri Nomor 400.10.11-6287 Tahun 2023 Kepmendagri Nomor 400.10.11-4898 Tahun 2024

Indeks Inovasi Daerah meningkat dari 50,17 poin pada tahun 2022 menjadi 60,65 poin pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya inovasi yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dalam sistem pemerintahannya. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang akan terus berupaya untuk menciptakan program-program yang inovatif dalam mendorong pertumbuhan daerah.

Tingkat Penghunian Kamar

Indikator tingkat penghunian kamar adalah persentase kamar hotel yang terisi tamu dibandingkan dengan total kamar yang tersedia dalam periode tertentu. Dengan pengukuran indikator ini, diharapkan dapat mengukur perkembangan sektor pariwisata di daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengambil keputusan yang tepat dan strategis dalam upaya memajukan sektor pariwisata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian

Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah non pertanian terhadap seluruh unit usaha non pertanian pada tahun yang sama. Usaha kecil dan menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari UMKM yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi UKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi usaha mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB

Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB. masing-masing daerah Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut.

2.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru merupakan dua pendekatan pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk memadukan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan.

Ekonomi Hijau berfokus pada pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan melalui penggunaan sumber daya yang efisien, rendah karbon, dan ramah lingkungan. Contoh penerapannya meliputi pengembangan energi terbarukan (seperti tenaga surya, angin, dan hidro), praktik pertanian berkelanjutan, pengelolaan limbah yang efektif, serta pembangunan infrastruktur hijau. Ekonomi hijau juga mendorong transisi dari ekonomi berbasis bahan bakar fosil

menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Sementara itu, Ekonomi Biru berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut dan perairan secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Contoh penerapannya meliputi pengelolaan perikanan berkelanjutan, budidaya laut (*aquaculture*), pariwisata bahari, serta pengembangan energi laut (seperti energi gelombang dan pasang surut). Ekonomi biru juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan ekosistem laut dan pesisir untuk mendukung ketahanan pangan dan mata pencaharian masyarakat.

Penurunan Emisi GRK

Emisi GRK (Gas Rumah Kaca) adalah pelepasan gas-gas seperti karbon dioksida (CO_2), metana (CH_4), nitrous oksida (N_2O), dan gas lainnya ke atmosfer yang berkontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Gas-gas ini memerangkap panas di atmosfer, menyebabkan efek rumah kaca yang meningkatkan suhu bumi. Hal ini menjadi isu pada tingkat global sehingga setiap daerah diharapkan melakukan upaya untuk mengurangi Emisi GRK.

Program-program penanganan perubahan iklim di Indonesia sebagian besar berfokus pada upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Namun, Indonesia menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks—tidak hanya terkait degradasi lingkungan, tetapi juga mencakup kebutuhan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan ketahanan terhadap risiko iklim.

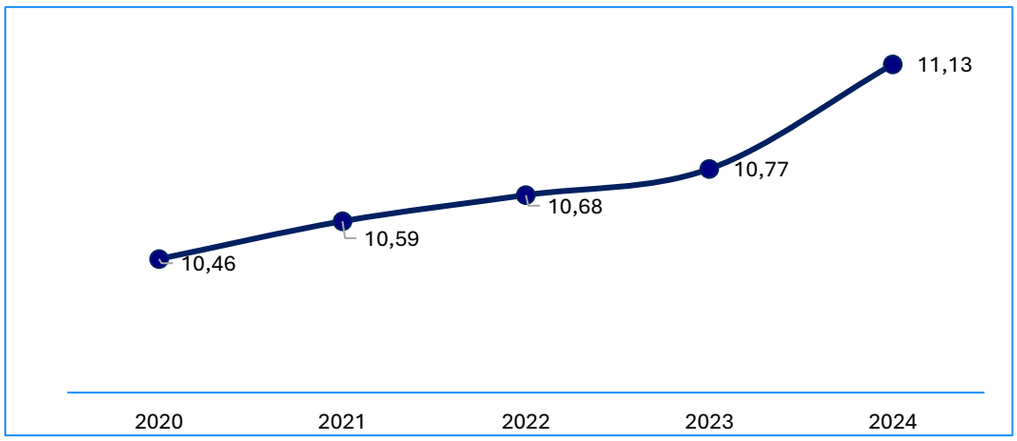
Dalam menjawab tantangan tersebut, Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dan Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) dikembangkan sebagai pendekatan terpadu yang mengintegrasikan agenda lingkungan dengan agenda pembangunan sosial dan ekonomi. PRK dan PBI mendorong transformasi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan dengan menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, pengurangan emisi, pengentasan kemiskinan, dan penguatan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim.

Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian, kehutanan dan perikanan adalah indikator yang mengukur kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB suatu

wilayah. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencakup berbagai aktivitas yang terkait dengan penanaman tanaman, pemeliharaan hewan, penebangan kayu, serta pemanenan ikan dan hewan lain di lahan pertanian, peternakan, atau habitat alami mereka. Rasio ini dihitung dengan membandingkan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap total PDRB.

Gambar 2. 37
Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)



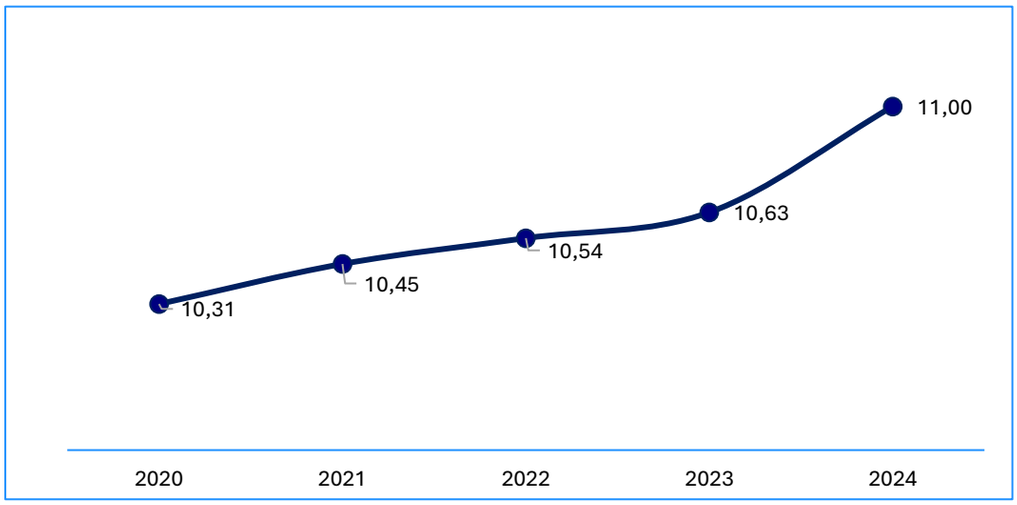
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Kabupaten Deli Serdang meningkat dari 10,46 persen pada tahun 2020 menjadi 11,13 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya peran penting sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rasio PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan

Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian dan perikanan adalah indikator yang mengukur kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB suatu wilayah. Sektor pertanian dan perikanan mencakup berbagai aktivitas yang terkait dengan penanaman tanaman, pemeliharaan hewan serta pemanenan ikan dan hewan lain di lahan pertanian, peternakan, atau habitat alami mereka. Rasio ini dihitung dengan membandingkan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor pertanian dan perikanan terhadap total PDRB.

Gambar 2. 38
Rasio PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

PDRB sektor pertanian dan perikanan Kabupaten Deli Serdang meningkat dari 10,31 persen pada tahun 2020 menjadi 11,00 persen pada tahun 2024. Indikator ini digunakan sebagai penyesuaian kewenangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang hanya pada sub sektor pertanian dan perikanan.

2.3.4. Transformasi Digital

Transformasi Digital adalah proses integrasi teknologi digital ke dalam semua aspek bisnis, pemerintahan, dan kehidupan masyarakat, yang mengubah cara organisasi beroperasi dan memberikan nilai kepada pelanggan atau masyarakat. Transformasi ini tidak hanya sekadar mengadopsi teknologi baru, tetapi juga melibatkan perubahan budaya, proses, dan model bisnis untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan daya saing.

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

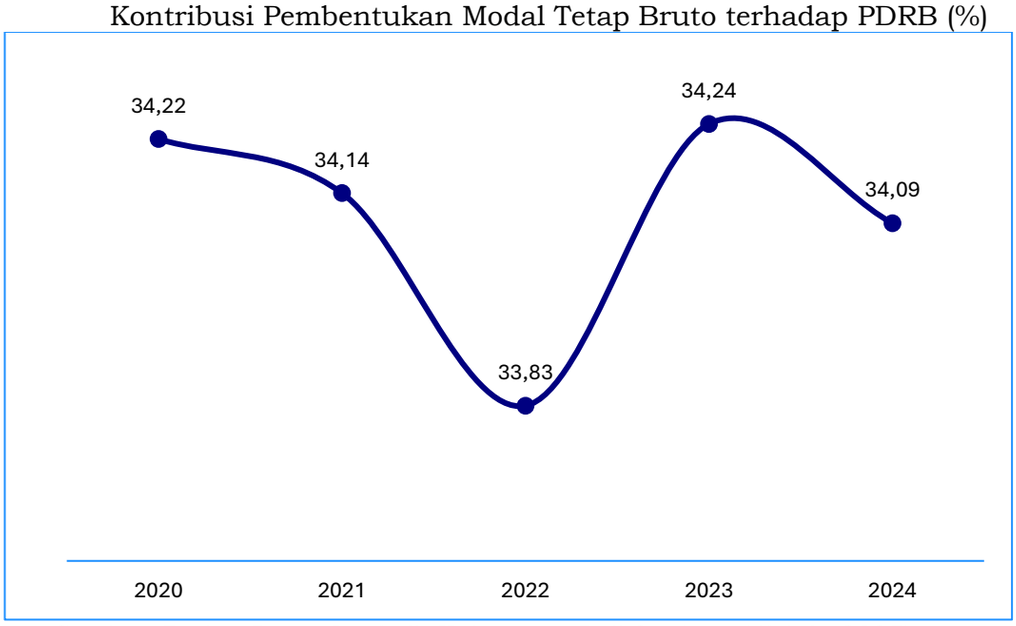
Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) merupakan suatu indikator untuk mengukur perkembangan TIK suatu wilayah. IP-TIK juga dapat menunjukkan kesenjangan digital dan potensi pembangunan TIK. Dengan IP-TIK diharapkan dapat menggambarkan transformasi digital di Kabupaten Deli Serdang.

2.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan indikator ekonomi yang mengukur nilai total investasi dalam aset tetap yang digunakan dalam proses produksi selama periode tertentu. Aset tetap ini mencakup infrastruktur fisik seperti bangunan, mesin, peralatan, jalan, jembatan, dan teknologi yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi suatu negara atau perusahaan. PMTB mencerminkan upaya suatu ekonomi untuk memperluas dan memperbarui basis modalnya, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Gambar 2. 39
Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang (diolah, 2025)

Kontribusi PMTB terhadap PDRB Kabupaten Deli Serdang berfluktuasi dari 34,22 persen pada tahun 2020 menjadi 34,09 persen pada tahun 2024. Hal ini berarti peran investasi dalam mendukung perekonomian Kabupaten Deli Serdang relatif menurun. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya investasi dalam aset tetap, seperti infrastruktur, mesin, atau peralatan di tingkat regional, ketidakpastian ekonomi, penurunan minat investor, keterbatasan anggaran pemerintah, atau kondisi politik yang kurang mendukung.

Ekspor didefiniskan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan *nonresiden*. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun.

Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basis akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanan, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan.

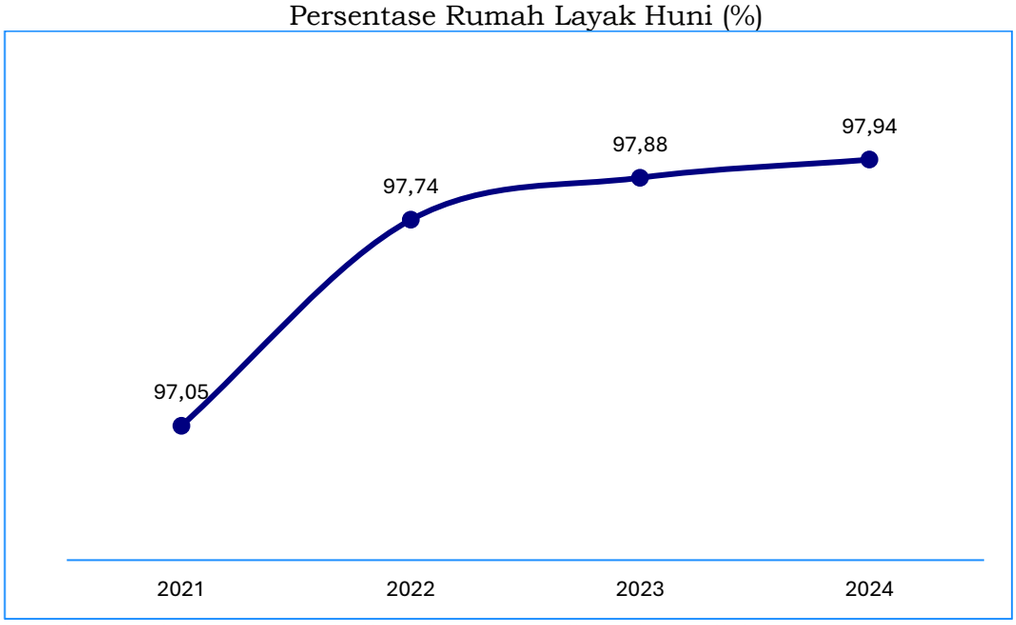
2.3.6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Perkotaan dan perdesaan memainkan peran penting sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, masing-masing dengan karakteristik dan kontribusi yang unik. Di perkotaan, pertumbuhan ekonomi biasanya didorong oleh sektor industri, jasa, perdagangan, dan teknologi, yang menciptakan lapangan kerja skala besar serta menarik investasi asing dan domestik. Sementara itu, perdesaan memiliki peran krusial dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta menyediakan bahan baku untuk industri. Pembangunan di perdesaan juga semakin penting dengan adanya potensi pengembangan ekonomi kreatif, pariwisata berbasis alam, dan energi terbarukan

Indeks Infrastruktur merupakan ukuran komposit yang mengukur keberhasilan pembangunan infrastruktur daerah. Infrastruktur yang memadai mendukung aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi.

Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau dan berkelanjutan. Rumah layak huni, terjangkau dan berkelanjutan memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, kesehatan penghuninya, mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah serta tersedianya prasarana, saranan dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan.

Gambar 2. 40
Persentase Rumah Layak Huni (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang (diolah, 2025)

Persentase rumah layak huni di Kabupaten Deli Serdang meningkat dari 97,05 persen pada tahun 2021 menjadi 97,94 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah berhasil dalam meningkatkan rumah layak huni bagi masyarakat Kabupaten Deli Serdang. Meskipun belum mencakup seluruh masyarakat, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang akan terus meningkatkan akses masyarakat bagi layak huni secara inklusif.

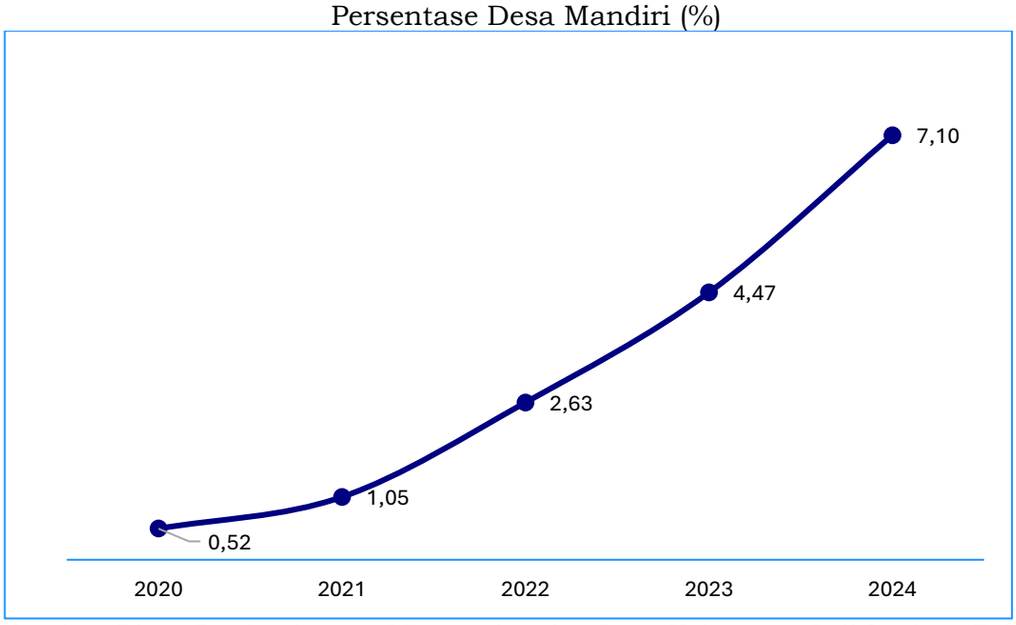
Kedepannya Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menggunakan indikator rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan. Indikator tersebut merupakan rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau dan berkelanjutan dengan

mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Persentase Desa Mandiri

Persentase desa mandiri merupakan indikator yang mengukur sejauh mana desa-desa di suatu wilayah mampu mengelola sumber daya dan pembangunannya secara mandiri, tanpa bergantung secara signifikan pada bantuan eksternal. Desa mandiri biasanya ditandai dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya, seperti pangan, energi, dan pelayanan publik, serta memiliki ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan.

Gambar 2. 41
Persentase Desa Mandiri (%)



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Persentase desa mandiri di Kabupaten Deli Serdang meningkat dari 0,52 persen pada tahun 2020 menjadi 7,10 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan yang nyata dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Deli Serdang. Namun, penting untuk terus memantau dan mengevaluasi perkembangan desa-desa mandiri ini serta memberikan pendampingan kepada desa-desa lainnya agar dapat menyusul dan mencapai status yang sama.

Kontribusi PDRB Kabupaten

Kontribusi PDRB Kabupaten adalah share PDRB Kabupaten terhadap PDRB Provinsi. Indikator ini merupakan sebagai upaya

mengukur seberapa besar peran ekonomi kabupaten dalam perekonomian provinsi. Capaian kontribusi PDRB kabupaten Deli Serdang terhadap Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 sebesar 13,20 persen.

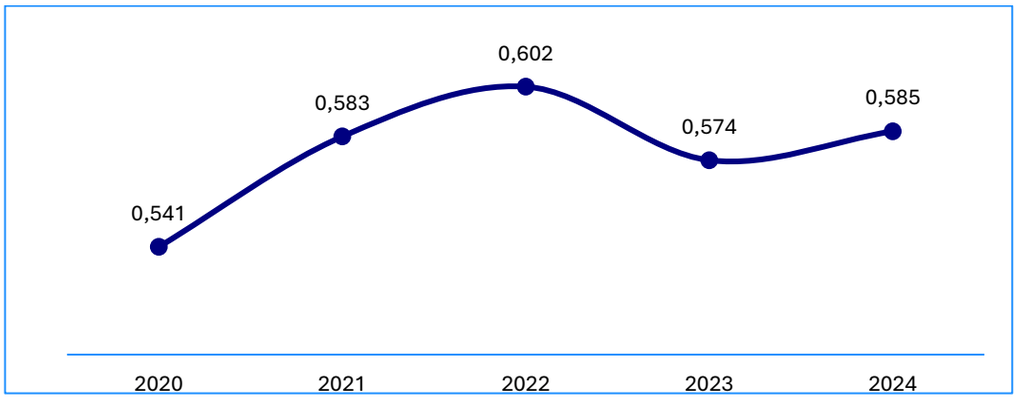
2.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro mengacu pada kondisi di mana perekonomian suatu negara berfungsi secara seimbang dan terkendali, tanpa mengalami fluktuasi ekstrem yang dapat mengganggu pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Indikator utama stabilitas ekonomi makro meliputi tingkat inflasi yang terkendali, pertumbuhan ekonomi yang stabil, tingkat pengangguran yang rendah, neraca perdagangan yang seimbang, serta nilai tukar mata uang yang stabil. Pencapaian stabilitas ekonomi makro sangat penting karena menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, produksi, dan konsumsi, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator yang mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap total perekonomian suatu wilayah. Rasio ini dihitung dengan membandingkan total pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah (seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak bumi dan bangunan) dengan nilai PDRB. Rasio ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi sumber daya lokal untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Gambar 2. 42
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)



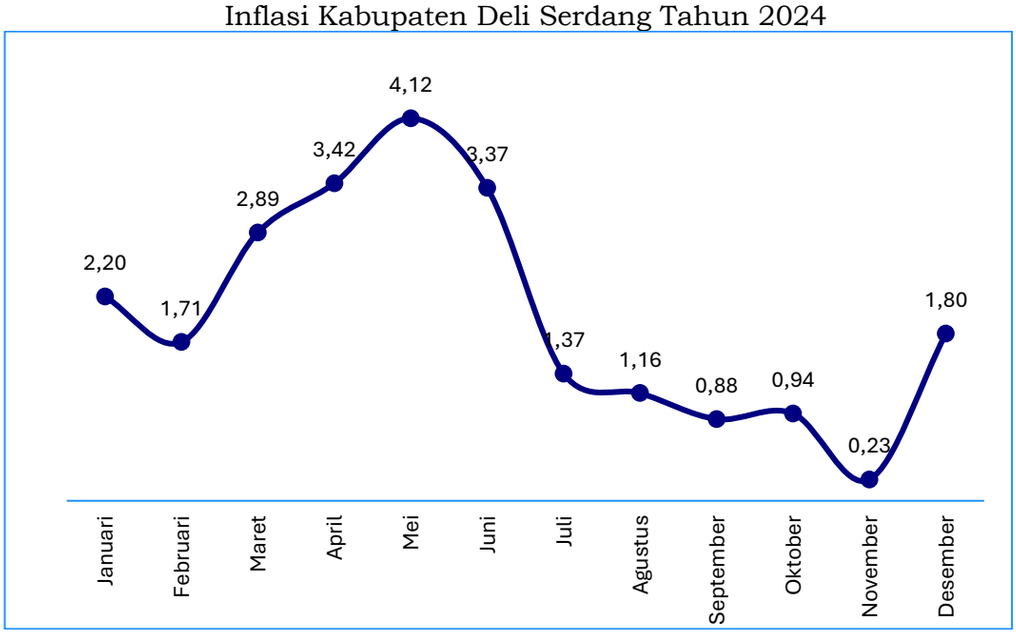
Sumber: Badan Pendapatan Daerah & BPS Kabupaten Deli Serdang (diolah, 2025)

Rasio Pajak terhadap PDRB relatif meningkat dari 0,541 persen pada tahun 2020 menjadi 0,585 persen pada tahun 2024. Kontribusi Pajak terhadap PDRB masih sangat kecil bahkan belum mencapai 1 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pajak yang diperoleh belum mampu secara optimal dalam meningkatkan perekonomian daerah. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang ke depannya akan mengoptimalkan pengelolaan pajak daerah sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan Kabupaten Deli Serdang.

Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga-harga barang dan jasa pada suatu wilayah. Semakin tinggi angka inflasi menunjukkan bahwa kenaikan harga barang dan jasa semakin meningkat sehingga pemerintah perlu berupaya untuk menekan angka inflasi agar tidak meningkat secara cepat. Kabupaten Deli Serdang telah melakukan perhitungan inflasi untuk daerahnya sendiri. Berdasarkan data BPS, inflasi Kabupaten Deli Serdang setiap bulannya pada tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. 43
Inflasi Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Inflasi Kabupaten Deli Serdang cenderung meningkat pada awal tahun 2024 hingga mencapai titik tertingginya pada Bulan Mei, yaitu sebesar 4,12 persen, namun pada bulan berikutnya cenderung melambat hingga bulan November mencapai 0,23 persen dan pada bulan Desember menjadi 1,8 persen. Pola ini mengindikasikan bahwa meskipun terjadi tekanan inflasi di awal tahun, upaya pengendalian dan penyesuaian kebijakan berhasil menstabilkan harga pada paruh kedua tahun tersebut. Pemantauan dan respons kebijakan yang tepat dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan otoritas terkait menjadi kunci dalam mengelola inflasi agar tetap terkendali dan tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Realisasi Investasi

Nilai Realisasi Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Realisasi Investasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 46
Realisasi Investasi Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi	3.329.179.630.000	3.581.400.010.000	3.910.567.940.000	4.413.615.800.000	6.888.541.470.000

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Investasi (Rp.)					

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Capaian realisasi investasi pada tahun 2020 sebesar Rp.3.329.179.630.000 dan meningkat menjadi Rp. 6.888.541.470.000 pada tahun 2024.

Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)

Indeks yang menggambarkan tingkat akses keuangan di Kabupaten/Kota, yang dihitung dari data supply dan demand yang terdiri dari 14 indikator yang terbagi dalam 3 dimensi yaitu Penggunaan, Ketersediaan dan Kedalaman. Nilai indeks berkisar antara 1-10. Semakin tinggi nilai indeks menggambarkan tingkat akses keuangan yang semakin baik. Nilai indeks juga menunjukkan adanya tantangan dalam inklusi keuangan, seperti keterbatasan infrastruktur keuangan, rendahnya literasi keuangan, kepemilikan produk/layanan keuangan yang belum terjangkau, atau kedalaman/kualitas penggunaan produk/layanan keuangan. Capaian IKAD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 47
Indeks Akses Keuangan Daerah Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Akses Keuangan Daerah	n/a	n/a	3,34	3,07	2,79

Sumber: Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

Indeks IKAD tahun 2022 sebesar 3,34 dan menurun menjadi 2,79 pada tahun 2,79. Hal ini memerlukan perhatian dari pemerintah daerah dan OJK untuk mengidentifikasi penyebab penurunan dan mengambil langkah-langkah perbaikan, seperti meningkatkan program edukasi keuangan, memperluas jangkauan layanan perbankan dan non-perbankan, serta mendorong inovasi produk keuangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah provinsi

dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Aspek Pelayanan Umum adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

2.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif merupakan sistem pengaturan dan pengelolaan kebijakan yang transparan, akuntabel, serta mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan yang muncul. Konsep ini menekankan pentingnya integritas dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan, serta fleksibilitas untuk merespons dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi.

Tabel 2. 48
Capaian Indikator Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	50,97 (CC)	52,08 (CC)	58,52 (CC)	67,11 (B)	76,36 (BB)
Indeks SPBE (Poin)	2,63	2,39	3,32	3,47	3,57
Indeks Pelayanan Publik (Poin)	3,92	3,97	4,03	3,48	4,53
Indeks Integritas Nasional (Poin)	n/a	69,23	66,76	68,51	64,70

Sumber: KemenPAN-RB, website 1data.menpan.go.id (diakses tahun 2025)

Indeks Reformasi Birokrasi adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kemajuan dan efektivitas upaya reformasi birokrasi di suatu negara atau instansi pemerintah. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Indeks ini meningkat dari 50,97 poin pada tahun 2020 menjadi 76,36 poin pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemerintah Kabupaten Deli Serdang semakin transparan dan akuntabel. Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kematangan dan efektivitas implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik di suatu instansi atau daerah. SPBE merupakan pendekatan modern

dalam tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Indeks SPBE Kabupaten Deli Serdang meningkat dari 2,39 poin pada tahun 2021 menjadi 3,57 poin pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baiknya aplikasi-aplikasi dan situs pemerintah dalam memberikan pelayanan publik serta meningkatkan sinergi antara pemerintahan di Kabupaten Deli Serdang.

Indeks Pelayanan Publik adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas dan kinerja layanan publik yang diberikan oleh pemerintah atau instansi publik kepada masyarakat. Indeks ini mencerminkan sejauh mana pelayanan publik memenuhi standar efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kepuasan masyarakat. Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Deli Serdang meningkat dari 3,48 poin pada tahun 2023 menjadi 4,53 poin pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas dan kinerja layanan dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk publik. Indeks Integritas Nasional adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat integritas suatu negara dalam hal tata kelola pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penegakan prinsip-prinsip etika serta akuntabilitas. Indeks ini mencerminkan sejauh mana nilai-nilai integritas, seperti kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab, telah diinternalisasi dan diterapkan dalam praktik pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Indeks Integritas Nasional Kabupaten Deli Serdang menurun dari 69,23 poin pada tahun 2021 menjadi 64,70 poin pada tahun 2024.

2.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Hukum berkeadilan menjadi dasar untuk menjamin keamanan nasional dan demokrasi, sementara keamanan nasional yang tangguh memastikan bahwa hukum dan demokrasi dapat berfungsi dengan baik. Demokrasi substansial, pada gilirannya, memastikan bahwa hukum dan keamanan nasional dikelola secara transparan dan akuntabel, dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, ketiganya menjadi fondasi bagi pembangunan negara yang

berkelanjutan dan inklusif.

Indeks Rasa Aman

Indeks rasa aman merupakan ukuran untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas rasa aman dari gangguan baik dari dalam maupun dari luar. Semakin tinggi poin indeks, semakin tinggi pula tingkat rasa aman yang dirasakan oleh masyarakat.

Tabel 2. 49
Capaian Indikator Indeks Rasa Aman (Poin)

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Rasa Aman (Poin)	n/a	n/a	n/a	81,72	83,15

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Indeks rasa aman Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan dari 81,72 poin pada tahun 2023 menjadi 83,15 pada tahun 2024. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat di wilayah tersebut secara umum merasakan peningkatan tingkat keamanan.

Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Indeks Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat merupakan suatu ukuran atau indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam suatu wilayah atau daerah tertentu.

Tabel 2. 50
Capaian Indikator Indeks Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Poin)

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Poin)	74	71	70	80	80

Sumber: Satpol PP Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Indeks Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Kabupaten Deli Serdang tahun 2023 dan 2024 adalah sebesar 80 poin. Hal tersebut mengindikasikan adanya perkembangan positif dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Perhitungan indeks Trantibumlinmas yang telah dilakukan selama ini akan disesuaikan dengan metode perhitungan

sebagaimana diatur dalam Kepmendagri Nomor 100.4.3 669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Persentase Penegakan Perda

Persentase penegakan Peraturan Daerah (Perda) digunakan untuk mengukur seberapa banyak Perda dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang ditegakkan secara efektif dan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap Perda/Perkada dan efektivitas penegakan hukum lokal. Penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Deli Serdang telah dilaksanakan dengan baik tahun 2024 dengan capaian 100 persen dibandingkan tahun 2023 hanya sebesar 60 persen. Hal ini menunjukkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang ditegakkan secara efektif dan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.

Tabel 2. 51
Capaian Indikator Persentase Penegakan Perda (%)

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penegakan Perda (%)	30	60	60	60	100

Sumber: Satpol PP Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Persentase Capaian Aksi HAM

Persentase Capaian Aksi HAM digunakan untuk menunjukkan seberapa besar aksi-aksi yang telah dilakukan untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia (HAM) telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Persentase capaian indikator tersebut membantu dalam mengevaluasi seberapa efektif program dan kegiatan HAM yang telah dilakukan. Capaian aksi HAM tahun 2023 sebesar 86 persen, meningkat menjadi 92 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan HAM telah dilakukan secara baik.

Tabel 2. 52
Capaian Indikator Persentase Aksi HAM (%)

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Aksi HAM (%)	n/a	23	63	86	92

Sumber: Kementerian HAM RI Tahun 2025

Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks demokrasi indonesia adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Indikator ini didapatkan melalui kompilasi berbagai fenomena terkait demokrasi yang terjadi di suatu daerah. Dengan indeks demokrasi Indonesia diharapkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dapat mengevaluasi pelaksanaan demokrasi dan melakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi.

2.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan adalah konsep strategis yang menggabungkan kekuatan diplomasi dan pertahanan untuk menciptakan stabilitas dan keamanan di tingkat regional. Konsep ini bertujuan untuk mencegah konflik, mengurangi ancaman, dan mempertahankan kedaulatan negara melalui pendekatan yang seimbang antara *soft power* (diplomasi) dan *hard power* (pertahanan).

Indeks Daya Saing Daerah

Indeks daya saing daerah adalah alat untuk mengukur tingkat daya saing suatu daerah dalam konteks ekonomi, sosial, infrastruktur, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemampuan daerah tersebut untuk menarik investasi, mempertahankan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Indeks ini membantu dalam membandingkan kemampuan berbagai daerah atau wilayah dalam mempromosikan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Tabel 2. 53
Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Deli Serdang

Aspek	Pilar	2023	2024
Lingkungan Pendukung	Institusi	4,20	4,64
	Infrastruktur	3,54	4,79
	Adopsi TIK	4,54	4,65
	Stabilitas Ekonomi Makro	3,08	3,79
SDM	Kesehatan	4,01	3,95
	Keterampilan	3,91	3,72
	Pasar Produk	2,83	3,56
	Pasar Tenaga Kerja	2,97	3,39
Pasar	Sistem Keuangan	2,35	1,98
	Ukuran Pasar	5,00	5,00
Ekosistem Inovasi	Dinamisme Bisnis	2,49	2,99
	Kapabilitas Inovasi	3,33	2,38
Indeks Daya Saing Daerah		**3,52**	**3,74**

Sumber: BRIN, website brin.go.id indeks daya saing daerah, diakses tahun 2025

Pada tahun 2024, Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Deli Serdang mencapai 3,74 atau naik jika dibandingkan tahun 2023 sebesar 3,52 poin. Pada tahun 2024, pilar pembangunan dengan skor tertinggi adalah Ukuran Pasar sebesar 5 poin. Ukuran pasar mencerminkan besarnya skala ekonomi di suatu wilayah. Tingginya capaian ini menandakan bahwa sangat aktifnya aktivitas perekonomian di Kabupaten Deli Serdang sehingga menjadi peluang bagi pelaku bisnis untuk memanfaatkan skala ekonomi tersebut. Kemudian, Pilar Infrastruktur sebesar 4,79 poin yang menunjukkan infrastruktur di Kabupaten Deli Serdang telah baik. Adopsi TIK sebesar 4,65 poin. Pilar ini mengukur tingkat pemanfaatan TIK di suatu daerah. Capaian ini menandakan bahwa pemanfaatan TIK di Kabupaten Deli Serdang sudah sangat baik sehingga akan mampu mendorong aktivitas perekonomian yang lebih produktif. Pilar selanjutnya adalah Institusi sebesar 4,64 poin. Hal ini menandakan bahwa tingginya dukungan institusi dalam hal ini pemerintah dalam mewujudkan iklim bisnis yang kondusif melalui pemberlakuan kebijakan yang memengaruhi pelaku ekonomi dalam membuat keputusan yang optimal.

Di samping itu, terdapat Pilar Pembangun yang masih bernilai rendah, yaitu Sistem Keuangan sebesar 1,98 poin. Sistem Keuangan mencerminkan ketersediaan institusi keuangan serta

pemanfaatannya sebagai penyalur dana bagi usaha untuk meningkatkan kapasitasnya. Selanjutnya Pilar Kapabilitas Inovasi sebesar 2,38 poin. Kapabilitas Inovasi mencerminkan kemampuan untuk mencari terobosan dan inovasi.

2.4.4. Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Layanan urusan wajib pelayanan dasar merupakan kewajiban pemerintah dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan dengan hak-hak dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, sosial, dan ketertiban umum. Pelayanan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata dan berkeadilan.

Pendidikan

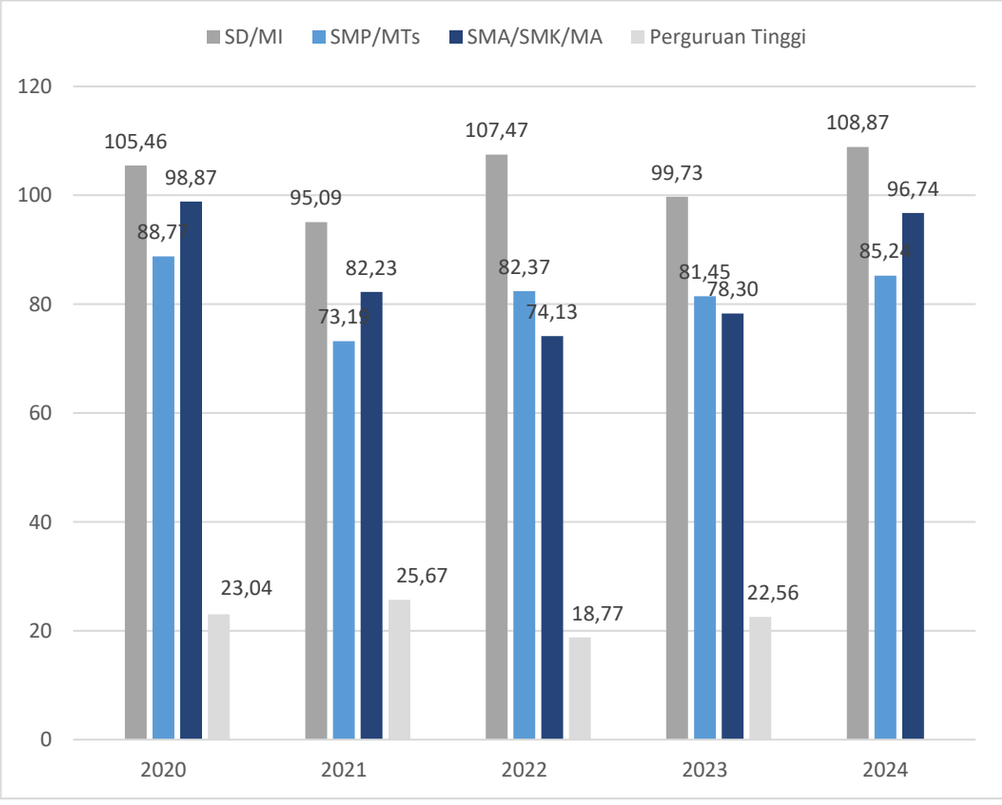
Pendidikan merupakan indikator penentu terhadap kualitas suatu bangsa, tingginya kualitas pendidikan harus didukung melalui upaya yang terfokus pada sektor pendidikan. Kegagalan pendidikan berimplikasi terhadap suatu bangsa di dalam meraih tingkat kesejahteraan dan berdampak terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sebaliknya keberhasilan pendidikan secara otomatis akan membawa pengaruh besar terhadap kemajuan di segala sektor guna mendukung pelaksanaan pembangunan yang ideal. Pada dunia pendidikan, terdapat beberapa unsur pendidikan yang harus menjadi perhatian di antaranya, peserta didik, pendidik *software*, manajemen, sarana dan prasarana dan juga para stakeholder. Dalam dunia pendidikan diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapat menjadi aset yang berguna dalam mendukung pembangunan, dimana aset dimaksud dapat berupa siswa, masyarakat, maupun dari pendidik.

Pelaksanaan kegiatan pendidikan mempunyai fungsi, antara lain: inisiasi, inovasi dan konservasi. Inisiasi merupakan fungsi pendidikan untuk memulai suatu perubahan. Inovasi merupakan wahana untuk mencapai perubahan. Konservasi berfungsi untuk menjaga nilai-nilai dasar. Oleh sebab itu untuk memperbaiki kehidupan suatu bangsa, khususnya pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Deli Serdang harus dimulai penataan dari

segala aspek.

Peningkatan kualitas pendidikan harus diimbangi dengan ketersediaan tenaga guru pengajar yang terampil dan profesional serta tingkat partisipasi sekolah, dalam hal ini pemerintah telah mencanangkan program melalui sertifikasi guru pengajar baik tingkat TK, SD, hingga SLTP. Selain itu juga harus diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang optimal dan memadai. Untuk melihat tingkat perkembangan capaian di bidang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Gambar 2. 44
Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Deli Serdang

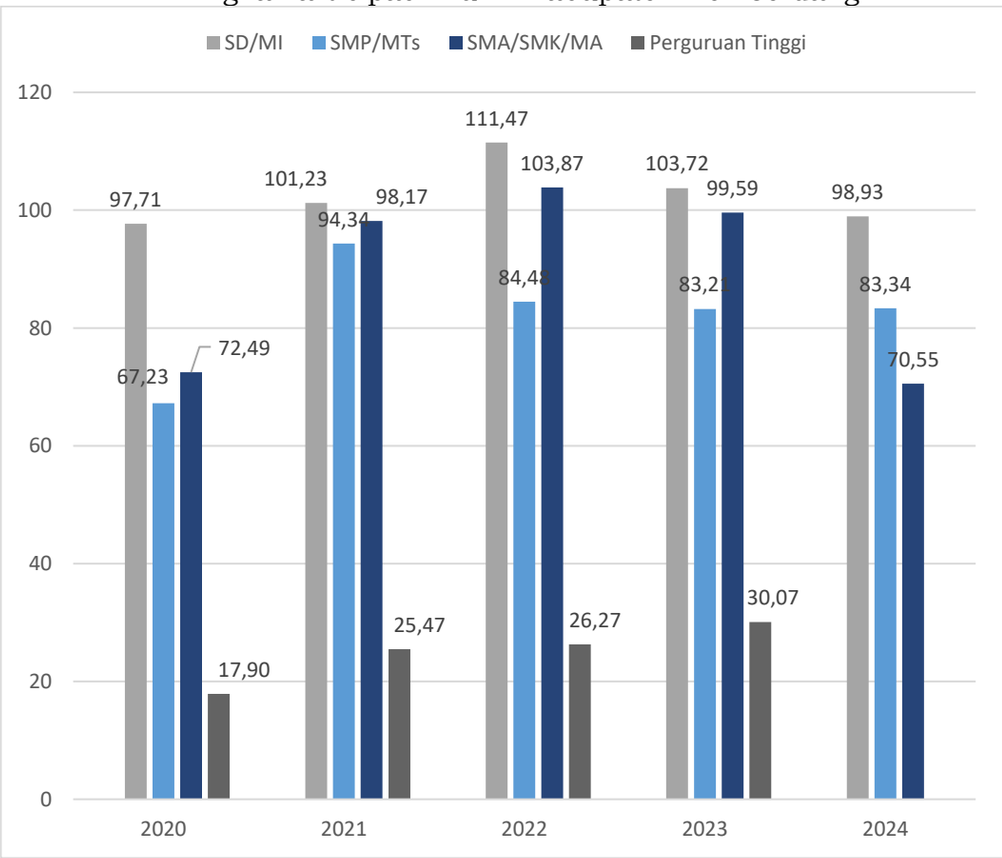


Sumber: www. deliserdangkab.bps.go.id, diakses 2025

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan rasio jumlah siswa yang sedang sekolah ditingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Tahun 2020 APK SD/MI sebesar 105,46 persen meningkat menjadi 108,87 persen pada tahun 2024. APK SMP sebesar 88.77 persen pada tahun 2020 menurun menjadi 85,24 persen pada tahun 2024. APK SMA menurun dari 98,87 persen pada tahun 2020 menjadi 96,74 persen pada tahun 2024. Terakhir, APK Perguruan Tinggi

meningkat dari 23,04 persen pada tahun 2020 menjadi 22,56 persen pada tahun 2023.

Gambar 2. 45
Angka Partisipasi Murni Kabupaten Deli Serdang



Sumber: www. deliserdangkab.bps.go.id, diakses 2025

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM SD tahun 2020 sebesar 97,71 persen mengalami peningkatan di tahun 2024 menjadi sebesar 98,93 persen. Untuk jenjang pendidikan SMP mengalami peningkatan dari 67,23 persen di tahun 2020 menjadi 83,34 persen di tahun 2024. Untuk jenjang pendidikan SMA mengalami penurunan dari 72,49 persen pada tahun 2020 menjadi 70,55 persen pada tahun 2024. Terakhir, untuk jenjang pendidikan Perguruan Tinggi mengalami peningkatan dari 17,90 persen pada tahun 2020 menjadi 30,07 persen pada tahun 2023.

Tabel 2. 54
Angka Putus Sekolah di Kabupaten Deli Serdang (%)

Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI (%)	0,081	0,083	0,082	0,086	0,683
SMP/MTs (%)	0,134	0,140	0,137	0,166	1,482

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Persentase Angka Putus Sekolah di Kabupaten Deli Serdang dari tahun ajaran 2020/2021 sampai dengan tahun ajaran 2022/2023 berada di bawah angka 1 persen, baik untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sedangkan pada tahun 2024 angka putus sekolah Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah bersungguh-sungguh dan berupaya melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan, hal ini ditunjukkan melalui penekanan angka untuk jumlah siswa yang putus sekolah untuk berbagai tingkat pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga tingkat lanjutan tingkat pertama sehingga pencapaian peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Deli Serdang dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan dan tercipta angkatan kerja yang memenuhi standar dasar tingkat pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memiliki komitmen yang serius untuk memajukan sektor pendidikan. Hal ini terbukti dengan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan dan akan terus dilanjutkan melalui program Percepatan Rehabilitasi dan Apresiasi terhadap Sekolah (CERDAS) dan menciptakan inovasi-inovasi baru seperti Operasi Pungut Sampah Setiap Hari Bang Sampah Pembinaan Berjenjang (OPUNG SARI BASAH BANG) dan Mewujudkan Sekolah Ramah Anak Bersama Masyarakat, Orang Tua dan Sekolah (MeSRABertuah). Program tersebut telah menjadi slogan bagi pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan telah menggaung hingga tingkat nasional. Pendekatan jangkauan atau akses masyarakat khususnya daerah perdesaan terhadap fasilitas pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang juga telah menyediakan Taman Literasi Mesra Bertuah yang diresmikan pada tanggal 30 Maret 2019 yang diisi dengan berbagai kegiatan agar siswa dapat berkreasi, kreatif dan menambah ilmu pengetahuan tentang buku, bentuk penulisan

dan juru warta.

Komitmen yang serius ini secara nyata berdampak positif bukan saja dirasakan dengan data-data kinerja pendidikan, namun juga mampu meraih penghargaan. Pada Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Inovasi Program Cerdas, Opung Sari Basah Bang, MeSRA BerTUAH Mewujudkan DESA SATU (Deli Serdang Sekolah Bermutu), kembali mendapat penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD Tahun 2020 melalui Surat Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB nomor B/153/PP.00.05/2020 tanggal 18 Juni 2020.

Kemudian Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kembali memperoleh penghargaan dari Pemerintah pusat, dengan diraihnya penghargaan TOP 45 inovasi pelayanan publik dari kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, (Menpan RB) yakni Inovasi DESA SATU (Deli Serdang Sekolah Bermutu), Rabu 25 November Tahun 2020 di Gedung Tribrata Jakarta. Demi Sepeda Bagus (Layanan Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus) kembali mendapat penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD Tahun 2023.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa baik itu melalui media pendidikan formal maupun informal merupakan landasan dan fundamental untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam upaya pencapaian SDM yang berkualitas tersebut peranan dan ketersediaan guru merupakan salah satu komponen penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, tuntutan kompetensi untuk menjadi tenaga pendidik juga mengalami penyesuaian. Berdasarkan Permendiknas RI No. 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru menyatakan bahwa seorang guru SD/MI, SMP/MTs, harus memiliki kualifikasi S-1/D4.

Tabel 2. 55
Rasio Rata-rata Guru Terhadap Murid SD dan SMP

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Guru dan Murid SD Negeri	1: 17	1: 17	1: 16	1: 15	1: 17
Rasio Guru dan Murid SD Swasta	1: 21	1: 21	1: 21	1: 18	1: 22
Rasio Guru dan Murid SMP Negeri	1: 15	1: 16	1: 15	1: 15	1: 16
Rasio Guru dan Murid SMP Swasta	1: 18	1: 19	1: 18	1: 16	1: 21

Sumber: BPS Kabupaten Deli Serdang (diolah, 2025)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru pada Pasal 17 ayat (1) disebutkan bahwa rasio minimal guru terhadap murid SD atau yang sederajat adalah 1:12. Bila dilihat pada tabel di atas, maka rata-rata rasio guru terhadap murid SD Negeri dan Swasta di Kabupaten Deli Serdang tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sudah dapat dikatakan ideal. Rata-rata rasio guru terhadap murid SMP Negeri dan Swasta di Kabupaten Deli Serdang tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 belum dapat dikatakan ideal. Rasio minimal jumlah guru terhadap peserta didiknya untuk tingkat SMP adalah 1:20.

Dukungan dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada tingkat satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) diberikan melalui pembangunan baik unit sekolah baru maupun rehab perbaikan sekolah. Pembenahan melalui penambahan unit sekolah juga telah dilengkapi dengan pendukung lainnya, salah satunya yaitu ketersediaan guru yang secara terus menerus menyesuaikan dengan jumlah rombongan belajar dan jumlah siswa pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam meningkatkan mutu kualitas terus berupaya di dalam pemenuhan kebutuhan akan sarana maupun prasarana di bidang pendidikan, di mana salah satu bentuk tindakan yang dilaksanakan yaitu kegiatan pembangunan fisik di bidang pendidikan melalui kegiatan rehab dan pengadaan unit sekolah baru, hal ini secara terus menerus diupayakan hingga saat ini.

Tabel 2. 56
Jumlah Lembaga PAUD/TK di Kabupaten Deli Serdang

Satuan Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
TK	590	591	603	569	590
KB	375	377	344	293	288

Satuan Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
TPA	5	5	3	1	1
SPS	12	12	7	7	6
Total	**982**	**985**	**957**	**870**	**885**

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

PAUD/TK sebagai salah satu tempat untuk membina anak usia dini merupakan salah satu jenjang pendidikan. Dari tabel di atas, jumlah TK/PAUD dan sejenisnya di Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020 hingga tahun 2024 terjadi penurunan dari 982 unit menjadi 885 unit.

Tabel 2. 57
Pendidikan Kesetaraan

Satuan Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
Paket A	30	103	85	101	102
Paket B	40	103	71	101	102
Paket C	44	103	34	101	102

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Pendidikan kesetaraan merupakan pendidikan non formal yang mencakup program Paket A, B dan C dengan penekanan pada penugasan pengetahuan, keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian peserta didik. Jumlah peserta didik Paket A pada tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami fluktuatif. Dari tahun 2020 hingga tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah peserta didik dari 30 orang menjadi 103 orang dan pada tahun 2021 dan mengalami penurunan terhadap tahun sebelumnya menjadi 85 orang pada tahun 2022. Pada Tahun 2023 jumlah peserta didik meningkat menjadi 101 orang dan tahun 2024 meningkat lagi menjadi 102 orang. Pada program paket B juga mengalami fluktuatif, di mana dari tahun 2020 terjadi peningkatan dari 40 orang menjadi 103 orang pada tahun 2021 dan menurun pada tahun 2022 menjadi 71 orang. Pada Tahun 2023 naik lagi menjadi 101 orang dan tahun 2024 menjadi 102 orang. Pada program paket C juga mengalami fluktuatif, di mana pada tahun 2019 sebanyak 44 orang menjadi 103 orang pada tahun 2021 dan terjadi penurunan di tahun 2022 menjadi 34 orang. Pada tahun 2023 naik lagi menjadi 101 orang dan tahun 2024 menjadi 102 orang.

Tabel 2. 58
Capaian Kinerja Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional					
-Literasi SD	n/a	n/a	59,40	50,74	72,42
-Literasi SMP	n/a	n/a	58,85	52,28	62,50
-Numerasi SD	n/a	n/a	45,07	45,07	66,20
-Numerasi SMP	n/a	n/a	35,49	58,55	59,71
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	12,13	13,04	11,41	12,29	13,92
Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	n/a	53,39	60,44	64,55	68,17
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	n/a	99,21	98,13	98,02	98,93
Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	n/a	99,21	98,13	98,02	96,95
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	n/a	13,25	15,82	20,27	24.15

Sumber: Badan Pusat Statistik & Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi di Kabupaten Deli Serdang mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat dari tahun 2020 sebesar 12,13 persen menjadi 13,92 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin membaik. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi bekerja di bidang keahlian menengah tinggi merupakan indikator yang membagi jumlah penduduk 15 tahun keatas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi dengan jumlah penduduk 15 tahun keatas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi dan sedang bekerja pada bidang keahlian rendah atau menengah atau tinggi. Literasi SD dan

SMP dari tahun 2022-2024 mengalami fluktuasi. Numerasi SD tahun 2023 sebesar 45,07 meningkat menjadi 66,20 pada tahun 2024. Numerasi SMP tahun 2022-2024 terus mengalami peningkatan yakni tahun 2022 sebesar 35,49 menjadi 59,71 pada tahun 2024.

Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam PAUD menunjukkan peningkatan konsisten dari 53,39 persen pada tahun 2021 menjadi 64,55 persen pada tahun 2023, dan mencapai 68,17 persen pada 2024. Peningkatan ini dikarenakan adanya peningkatan kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan anak usia dini dan adanya sosialisasi PAUD melalui Gebyar PAUD. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar sangat tinggi dan stabil di atas 98 persen dari 2021 hingga tahun 2024. Faktor pendorong peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama mengalami penurunan dari 99,21 persen pada tahun 2021 menjadi 96,95 persen pada tahun 2024. Penurunan tersebut dikarenakan masih terdapat anak usia sekolah 13-15 tahun yang bersekolah di luar Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya, tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan menunjukkan peningkatan bertahap dari 13,25 persen pada tahun 2021 menjadi 20,27 persen pada tahun 2023, dan mencapai 24,15 persen pada 2024. Salah satu faktor pendorong peningkatan tersebut yaitu dengan adanya inovasi Kas Anak Kasir dan Demi Sepeda Bagus bagi anak-anak marjinal (anak kawasan pesisir dan anak berkebutuhan khusus) untuk mendapatkan akses dan layanan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan.

Kesehatan

Kesehatan merupakan bagian penting dari kesejahteraan masyarakat. Kesehatan juga merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia di samping sandang, pangan dan papan. Kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup dan meningkatkan kesehatan melalui pengorganisasian

masyarakat untuk perbaikan sanitasi lingkungan, pemberantasan penyakit menular, pendidikan kesehatan dan sebagainya.

Kesehatan merupakan salah satu unsur pembentuk kualitas sumber daya manusia. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, dapat diukur dari usia harapan hidup yang menjadi komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan berdasarkan data capaian kinerja menunjukkan bahwa Umur Harapan Hidup penduduk Kabupaten Deli Serdang mencapai usia 73,65 tahun pada tahun 2023. Umur Harapan Hidup dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, sehingga akses terhadap kualitas pelayanan kesehatan dapat dinikmati oleh masyarakat. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan sebagai pendukung bagian dari komponen IPM tersebut.

Tabel 2. 59
Indikator Derajat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Deli Serdang

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kematian Ibu	12	23	16	27	20
Angka Kematian Bayi (Per 1.000 KH)	0,90	0,55	0,73	2,93	2,22
Insidensi Tuberkulosis (TBC) (Per 100.000 Penduduk)	121	117	151	206	302,27
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*) (%)	37,97	39,83	35,97	41,13	61,95
Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*) (%)	93,61	90,39	92,50	94,01	93,77
Angka Kesakitan (%)	12,98	8,41	9,76	10,78	
Kepesertaan BPJS Kesehatan (%)	56,24	55,69	79,01	84,15	85,55
Rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk (min. 1:1.000)	0,9998	0,9998	0,9995	1,46	1,50

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Angka Kematian Ibu (*Maternal Mortality Rate*) adalah Jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan pasca persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. Angka pengukuran risiko kematian wanita yang berkaitan dengan peristiwa kehamilan. Angka Kematian Ibu (AKI) atau *Maternal Mortality Rate*

(MMR) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas.

Beberapa determinan penting yang mempengaruhi AKI secara langsung antara lain status gizi, anemia pada kehamilan. Faktor mendasar penyebab kematian ibu maternal adalah tingkat pendidikan ibu, kesehatan lingkungan fisik maupun budaya, ekonomi keluarga, pola kerja rumah tangga. Kematian ibu adalah kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan dalam masa 42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab apa pun yang berkaitan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan akibat kecelakaan.

Jumlah kematian ibu di Kabupaten Deli Serdang mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat dari tahun 2020 sebesar 12 orang kemudian menjadi 20 orang pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya kematian ibu di Kabupaten Deli Serdang disebabkan masih perlu perbaikan fasilitas dan pelayanan kesehatan di Kabupaten Deli

Infant Mortality *Rate*/Angka kematian Bayi (AKB) merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat. Angka kematian bayi (AKB) adalah jumlah bayi yang meninggal pada fase antara kelahiran bayi belum mencapai umur 1 tahun/1000 kelahiran hidup. Pada tahun 2022 angka kematian bayi sebesar 0,73 per 1.000 KH dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi sebesar 2,93 per 1.000 KH, namun menurun menjadi 2,22 per 1.000 KH pada tahun 2024.

Tuberkulosis (TBC) adalah penyakit infeksius yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium Tuberculosis*. Insidensi TBC merujuk pada jumlah kasus baru penyakit TBC yang muncul dalam populasi tertentu selama periode waktu tertentu. Insidensi TBC di Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan dari sebesar 121 per 100.000 penduduk meningkat menjadi 302,27 per 100.000 penduduk dalam kurun waktu 2020-2024. Akses kesehatan juga belum sepenuhnya diterima masyarakat. Cakupan kepesertaan BPJS pada tahun 2024

sebesar 86,63 persen. Artinya, terdapat sebesar 13,37 persen masyarakat yang belum mendaftarkan dirinya dalam kepesertaan BPJS.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang untuk menurunkan jumlah kematian ibu antara lain adalah dengan meningkatkan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, dan pelayanan keluarga berencana termasuk KB pasca persalinan.

Mulai tahun 2021, Kabupaten Deli Serdang menjalin Kerjasama dengan USAID MOMENTUM. USAID MOMENTUM merupakan program Kerjasama Kementerian Kesehatan dan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir di Indonesia. Salah satunya adalah adanya sistem dan regulasi yang mendukung untuk memastikan sektor swasta memenuhi dan mematuhi mutu standart pelayanan kesehatan.

Tabel 2. 60
Fasilitas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang

Fasilitas Kesehatan	2020	2021	2022	2023	2024
RS Pemerintah	3	3	4	4	4
RS Swasta	19	19	18	20	21
Puskesmas Rawat JaIan	7	7	7	16	16
Puskesmas Rawat Inap	27	27	27	18	18
Puskesmas Pembantu	110	110	110	109	109
Pos Kesehatan Desa	159	159	159	159	159

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Capaian kinerja urusan kesehatan terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 61
Capaian Kinerja Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk (per 1.000 penduduk)	0,13	0,10	0,13	0,14	1,50

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	65,22	77,27	86,36	87,50	96,00
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	90,92	94,31	94,89	98,18	95,76
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	93,41	92,75	97,39	98,53	94,03
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	95,00	95,56	94,77	93,17	96,62
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	86,38	89,55	89,3	92,32	98,46
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	84,43	91,39	96,07	97,00	97,00
Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	83,36	86,65	86,25	88,24	87,31
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	95,86	97,11	97,55	97,76	99,65
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	86,69	88,34	90,97	95,00	91,65
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	92,43	87,55	92,65	92,304	86,69
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	77,62	77,12	77,64	96,865	75,24
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	33,83	37,9	126,2	111,36	103,40
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	38,81	36,31	49,13	85,155	107,9

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Rasio daya tampung RS pada tahun 2020 hingga tahun 2023 stabil di angka 0,1-0,14 namun melonjak ke 1,5 pada tahun 2024. Faktor Penghambat rasio tersebut adalah belum optimalnya Inovasi dan motivasi dalam mencapai SPM dan Pelayanan Paripurna Puskesmas dan Rumah Sakit. Persentase RS Rujukan Terakreditasi menunjukkan peningkatan konsisten dari 65,22 persen pada tahun 2020 menjadi 87,50 persen pada tahun 2023, dan sebesar 96,00 persen pada tahun 2024.

Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak secara umum sangat tinggi dan stabil di atas 90 persen, dengan ibu hamil mendapatkan pelayanan kehamilan mencapai 96,16 persen pada tahun 2023 dan 95,76 persen pada tahun 2024. Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan pada tahun 2020 hingga tahun 2023 di atas 92 persen dan mencapai 94,03 persen pada tahun 2024. Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan juga sangat tinggi atau di atas 93 persen. Cakupan pelayanan kesehatan balita meningkat konsisten dari 86,38 persen pada tahun 2020 menjadi 92,32 persen pada tahun 2023 dan 98,46 persen pada tahun 2024. Anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan juga meningkat dari 84,43 persen pada tahun 2020 menjadi 97,00 pada tahun 2024.

Skrining kesehatan usia produktif (15-59 tahun) dan warga negara usia 60 tahun ke atas menunjukkan capaian tinggi di atas 83 persen dan 93 persen masing-masing, dengan tren positif. Pelayanan penderita hipertensi meningkat dari 86,63 persen pada tahun 2020 menjadi 95,00 persen pada tahun 2023, dan 91,65 persen pada tahun 2024. Pelayanan penderita DM mengalami penurunan dari 92,43 persen pada tahun 2020 menjadi 86,69 persen pada tahun 2024. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan jiwa mengalami peningkatan dari 77,62 persen pada tahun 2020 menjadi 96,86 persen pada tahun 2023, namun mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi sebesar 75,24 persen.

Pelayanan terduga TBC dan orang dengan risiko terinfeksi HIV menunjukkan lonjakan signifikan pada tahun-tahun terakhir. Penanganan terduga TBC dari 33,83 persen pada tahun 2020 melonjak hingga 126,19 persen pada tahun 2022, lalu 111.36 persen pada tahun 2023, dan 103,40 persen pada tahun 2024, mengindikasikan deteksi dan penanganan melebihi populasi target atau ada duplikasi. Deteksi dini HIV juga melonjak dari 38,81 persen pada tahun 2020 menjadi 85,16 persen pada tahun 2023 dan 107,86 persen pada tahun 2024, hal ini menunjukkan upaya masif dalam deteksi tersebut.

Dalam mendukung laju pertumbuhan ekonomi daerah perlu dilakukan langkah tepat dengan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, langkah ini merupakan salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta tingkat daya saing suatu daerah. Untuk memenuhi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana yang dimaksud. Kinerja pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Deli Serdang cukup konsisten dalam melaksanakan misinya. Namun demikian hal ini masih perlu terus dilakukan sehingga kualitas kondisi jalan yang terbangun menjadi lebih baik lagi. Untuk lebih jelasnya terkait data kondisi jalan dan irigasi di Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 62
Capaian Kinerja Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jalan dalam kondisi baik / Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	72,14	73,19	74,24	75,31	76,34
Saluran irigasi dalam kondisi baik (%)	75,80	76,65	78,04	79,02	80,04
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	0,758	0,767	0,780	0,790	0,800
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)	n/a	76,17	77,29	77,50	78,24
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	n/a	85,13	86,75	86,95	83,82
Rasio kepatuhan IMB kab/ kota (%)	n/a	100	100	100	100
Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat	0,196	0,487	0,032	0,050	0,019

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
kompetensi					
Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	-	-	0,896	0,947	1,000

Sumber: Dinas SDA BMBK Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Jika dilihat dari tabel, dari indikator panjang jalan kondisi baik di Kabupaten Deli Serdang meningkat dari 72,14 persen pada tahun 2020 menjadi 76,34 persen pada tahun 2024. Begitu pula dengan indikator saluran irigasi kondisi baik di Kabupaten Deli Serdang yang meningkat dari 75,80 persen pada tahun 2020 menjadi 80,04 persen pada tahun 2024.

Selanjutnya kondisi Daerah Irigasi (DI) tahun 2023 di Kabupaten Deli Serdang berdasarkan panjang dan jenis saluran irigasi terdiri dari saluran primer ± 257,09 Km, saluran sekunder ± 123,77 Km, saluran tersier ± 112,25 Km. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang kriteria dan penetapan status daerah irigasi, dimana telah diatur mengenai pengelolaan serta kewenangan dan tanggung jawabnya antara lain pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dan dalam hal ini Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Kabupaten Deli Serdang ada sebanyak 108 (DI) dengan luas areal ± 23.067 Ha dan seluruhnya adalah irigasi semi teknis. Jumlah bangunan irigasi terdiri dari bendung, waduk, intake sebanyak 115 unit, bangunan bagi/bangunan pelengkap lainnya sebanyak 1.101 unit. Dengan luasan Daerah Irigasi tersebut masih terdapat kondisi sarana dan prasarana irigasi yang masih memprihatinkan.

Pada indikator Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, rasio tercatat sebesar 0,758, kemudian meningkat menjadi 0,767 pada tahun 2021, 0,780 pada tahun 2022, 0,790 pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 adalah sebesar 0,800, hal ini menunjukkan adanya komitmen terhadap peningkatan pelayanan jaringan irigasi.

Data persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan peningkatan yang stabil. Pada tahun 2021, capaiannya adalah 76,17 persen, meningkat menjadi 77,29 persen pada tahun 2022, dan 77,50 persen pada tahun 2023, selanjutnya tahun 2024 adalah 78,24 persen, hal ini menandakan adanya upaya berkelanjutan untuk memperluas akses air minum yang aman.

Indikator persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik menunjukkan data untuk tahun 2020 tidak tersedia. Dimulai dari 85,13 persen pada tahun 2021, persentase ini terus meningkat menjadi 86.75 persen pada tahun 2022 dan 86.95 persen pada tahun 2023. Namun, ada sedikit penurunan untuk tahun 2024 menjadi 83.82 persen, yang mungkin memerlukan perhatian lebih lanjut untuk mempertahankan momentum peningkatan.

Rasio kepatuhan IMB kab/kota, indikator ini menunjukkan konsistensi yang sangat baik dengan capaian 100 persen dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Angka 100 persen ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang optimal dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di tingkat kabupaten/kota.

Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi pada tahun 2020 sebesar 0,196, kemudian melonjak tajam menjadi 0,487 pada tahun 2021. Namun, terjadi penurunan drastis pada tahun 2022 menjadi 0,032, dan sedikit meningkat menjadi 0,050 pada tahun 2023. Selanjutnya pada tahun 2024 sebesar 0,019, yang menandakan perlunya evaluasi mendalam dan strategi untuk meningkatkan jumlah tenaga profesional bersertifikat.

Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi, pada tahun 2020 dan 2021, rasio ini tercatat 0, yang berarti tidak ada proyek yang diawasi tanpa kecelakaan konstruksi. Namun, terjadi peningkatan drastis menjadi 0,896 pada tahun 2022, dan meningkat lagi menjadi 0,947 pada tahun 2024. Pada tahun 2024 adalah sebesar 1,000, yang menunjukkan telah mencapai nol kecelakaan konstruksi pada proyek yang berada di bawah

pengawasan.

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Salah satu indikator bidang urusan pelayanan umum adalah persentase rumah layak huni. Persentase rumah layak huni tahun 2024 di Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 63
Persentase Rumah Layak Huni Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024

Kecamatan	Rumah	Rumah Layak Huni	Persentase
Gunung Meriah	770	681	88,44
Sinembah Tanjung Muda Hulu	3.466	3.376	97,40
Sibolangit	5.404	5.304	98,15
Kutalimbaru	10.074	9.856	97,84
Pancur Batu	28.347	27.758	97,92
Namo Rambe	11.670	11.446	98,08
Biru-Biru	10.020	9.798	97,78
Sinembah Tanjung Muda Hilir	8.478	8.389	98,95
Bangun Purba	5.884	5.763	97,94
Galang	18.554	18.134	97,74
Tanjung Morawa	55.837	54.791	98,13
Patumbak	25.691	25.149	97,89
Deli Tua	14.386	14.051	97,67
Sunggal	63.855	62.685	98,17
Hamparan Perak	45.469	45.261	99,54
Labuhan Deli	15.691	15.532	98,99
Percut Sei Tuan	95.006	92.869	97,75
Batang Kuis	16.431	16.046	97,66
Pantai Labu	11.567	11.344	98,07
Beringin	15.774	15.449	97,94
Lubuk Pakam	21.893	21.452	97,99
Pagar Merbau	9.802	8.755	89,32
Deli Serdang	**494.069**	**483.889**	**97,94**

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase rumah layak huni di Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 adalah sebesar 97,94 persen, di mana jumlah rumah sebesar 494.069 dan jumlah rumah layak huni sebesar 463.889. Persentase jumlah rumah layak huni di

masing-masing kecamatan sudah mencapai di atas 95 persen kecuali di Kecamatan Gunung Meriah sebesar 88,44 persen dan Kecamatan Pagar Merbau sebesar 89,32 persen.

Target Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals/SDGs pada tahun 2030, salah satu sasarannya secara universal akses dalam sektor air minum dan sanitasi. Kabupaten Deli Serdang menggunakan cakupan pelayanan air minum sebagai salah satu indikator pelayanan umum. Cakupan pelayanan air minum di Kabupaten Deli Serdang disajikan pada tabel di bawah berikut.

Tabel 2. 64
Capaian Kinerja Bidang Urusan Perumahan dan Permukiman Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	-	13.414	10.523	10.275	10.180
Jumlah Luasan Kawasan Pemukiman Kumuh (Ha)	432,41	533,50	394,33	347,17	313,61
Cakupan Pelayanan Air Minum (%)	75,12	76,17	77,29	77,50	78,24
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (%)	84,73	85,13	86,75	86,95	83,82
Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman (%)	-	11,3	18,8	21,8	22,5
Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	n/a	21,00	100,00	48,80	100,00
Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani (%)	n/a	0,12	11,77	21,42	2,10
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	n/a	2,95	2,71	2,12	2,06
Persentase peningkatan rumah layak huni dan terjangkau (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	1.60
Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	n/a	n/a	9,76	7,73	5,06

Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2021 hingga tahun 2024 mengalami penurunan. Pada tahun 2024 sebanyak 10.180 unit atau lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 10.275

unit. Jumlah luasan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2020 hingga tahun 2024 menjadi berkurang. Pada tahun 2024 seluas 313,61 Ha atau lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu seluas 347,17 Ha. Cakupan pelayanan air minum di Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 cakupannya sebesar 78,24 persen atau lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 77,50 persen. Hal ini sudah melebihi target tahun 2023 yaitu sebesar 76,50 persen. Rumah tinggal bersanitasi salah satu kriterianya adalah mempunyai WC dan akses sanitasi yang layak. Target capaian untuk rumah tangga bersanitasi nasional adalah 100 persen. Dari Tabel tersebut, persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2024 sebesar 83,82 persen atau menurun dari tahun sebelumnya sebesar 3,13 persen. Selanjutnya, Asumsi yang dipakai sebagai sumber air minum aman adalah sumber air yang berasal dari jaringan perpipaan air minum (termasuk jaringan PDAM dan SPAM berbasis masyarakat). Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman terus meningkat dari tahun 2021-2024. Pada tahun 2021 sebesar 11,3 persen meningkat menjadi 22,5 persen pada tahun 2024.

Indikator penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana pada tahun 2021, capaiannya adalah sebesar 21,00 persen, kemudian melonjak drastis menjadi 100,00 persen pada tahun 2022, hal menandakan keberhasilan penuh dalam penyediaan/rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana pada tahun tersebut. Namun, angka ini menurun tajam menjadi 48.80 persen pada tahun 2023. Selanjutnya, pada tahun 2024 kembali menjadi sebesar 100,00 persen. Hal menunjukkan semua korban bencana mendapatkan rumah layak huni.

Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota sebesar 0,12 persen pada tahun 2021, persentase ini meningkat signifikan menjadi 11,77 persen pada tahun 2022 dan terus naik menjadi 21,42 persen pada tahun 2023. Namun, untuk tahun 2024 menunjukkan penurunan drastis menjadi 2,10 persen. Ini bisa mengindikasikan adanya pergeseran fokus, perubahan metodologi, atau target yang lebih konservatif dalam penanganan

kawasan kumuh di bawah 10 ha.

Berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menunjukkan tren penurunan yang positif, artinya jumlah rumah tidak layak huni semakin berkurang. Dari sebesar 2.95 persen pada tahun 2021, menurun menjadi 2,71 persen pada tahun 2022, dan kembali menurun menjadi 2,12 persen pada tahun 2023. Selanjutnya pada tahun 2024 menjadi sebesar 2,06 persen. Hal ini menunjukkan upaya berkelanjutan dalam mengurangi jumlah RTLH.

Persentase peningkatan rumah layak huni dan terjangkau mencapai sebesar 1,60 persen pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa meskipun data historis tidak tercatat, ada target yang ditetapkan untuk peningkatan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau di masa mendatang.

Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pada tahun 2022, capaiannya adalah sebesar 9,76 persen, kemudian sedikit menurun menjadi 7,73 persen pada tahun 2023. Selanjutnya capaian pada tahun 2024 menunjukkan penurunan menjadi sebesar 5,06 persen. Penurunan ini mungkin mengindikasikan tantangan dalam penyediaan PSU atau pergeseran prioritas dalam pengembangan perumahan.

Secara keseluruhan, sektor Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman menunjukkan beragam tren. Ada keberhasilan yang menonjol dalam penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana pada tahun 2022 dan proyeksi 2024, serta tren positif dalam pengurangan RTLH. Namun, ada juga tantangan dalam penanganan kawasan kumuh dan penyediaan PSU yang ditunjukkan oleh penurunan pada tahun 2024, yang memerlukan analisis dan strategi lebih lanjut.

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan penyelamatan, BPBD dan Bakesbangpol terus berupaya menjaga keamanan dan kesejahteraan suatu masyarakat. Capaian kinerja Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 65
Capaian Kinerja Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan

Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Waktu Tanggap (*Respons Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	78,98	79,67	74,62	81,00	51,35
Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada (Kasus)	211	322	96	1160	1980
Jumlah Aksi Unjuk Rasa Masyarakat (Aksi)	24	25	23	21	26
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota (%)	23,64	29,80	29,80	29,81	29,81
Jumlah Bencana yang Ditangani (Kejadian)	78	153	190	208	675
Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	74	71	70	80	80
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	30	60	60	60	60
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	0	0	0	63,07	100
Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (menit)	0	0	0	8,56	10,23
Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Non Kebakaran (kegiatan)	0	0	264	293	230
Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran (kelompok)	0	0	0	7	9

Sumber: Satpol PP, BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Tingkat Waktu Tanggap (*Respons Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) mengalami peningkatan dari 78,98 persen pada tahun 2020 menjadi 81,00 persen pada tahun 2023. Namun pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 51,35 persen. Untuk indikator jumlah aksi unjuk rasa masyarakat mengalami peningkatan dari 24 aksi pada tahun 2020 menjadi 26 aksi pada tahun 2024. Selanjutnya, cakupan pelayanan bencana kebakaran mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 23,64 persen menjadi 29,81 persen pada tahun 2024. Sedangkan, untuk jumlah bencana yang ditangani mengalami

peningkatan dari 78 kejadian pada tahun 2020 menjadi 675 kejadian pada tahun 2024.

Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan sebesar 74,00 persen pada tahun 2020, menurun menjadi 71,00 persen pada tahun 2021, dan kembali menurun menjadi 70,00 persen pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023, terjadi peningkatan signifikan menjadi 80,00 persen dan selanjutnya pada tahun 2024 tetap sebesar 80,00 persen. Hal ini mengindikasikan peningkatan efektivitas dalam penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

Pada Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan terdapat peningkatan yang substansial pada indikator ini. Dari 30 persen pada tahun 2020, persentase penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah melonjak menjadi 60 persen pada tahun 2021. Angka ini kemudian dipertahankan sebesar 60 persen pada tahun 2022, 2023, dan tahun 2024. Ini menunjukkan komitmen yang lebih kuat dalam penegakan regulasi.

Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan mulai tahun 2023. Dari tahun 2020 hingga 2022, capaiannya sebesar 0 persen, mengindikasikan belum adanya atau belum tercatatnya pelayanan ini. Namun, pada tahun 2023, persentase ini melonjak drastis menjadi 63,07 persen. Untuk tahun 2024 mencapai 100 persen. Hal menunjukkan semua pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dapat terpenuhi.

Capaian indikator waktu tanggap penanganan kebakaran pada tahun 2023 yaitu 8,56 menit. Untuk tahun 2024 sedikit meningkat menjadi 10,23 menit. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk memastikan efisiensi penanganan kebakaran tetap optimal.

Indikator Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Non Kebakaran menunjukkan adanya peningkatan mulai tahun 2022, yaitu sebanyak 264 kegiatan menjadi 293 kegiatan pada tahun 2023. Selanjutnya pada tahun 2024 adalah sebanyak 230 kegiatan.

Upaya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran mengalami peningkatan dari 7 kelompok pada tahun 2023 menjadi 9 kelompok pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan

peningkatan fokus pada pelibatan masyarakat dalam upaya pencegahan.

Aspek pelayanan umum lainnya adalah di bidang sosial. Kinerja pelayanan bidang sosial di Kabupaten Deli Serdang adalah Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan PMKS yang memperoleh bantuan sosial. Capaian kinerja urusan sosial dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 66
Capaian Bidang Urusan Urusan Sosial Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase PMKS yang Mendapatkan Bantuan Sosial (%)	81	96	80	3,70	94,62
Persentase Penanganan PMKS (%)	35	93	54	85	100
Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	100	100	100	100	100
Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) (%)	72,37	100	86,50	100	100
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Persentase PMKS yang Mendapatkan Bantuan Sosial mengalami peningkatan dari 81 persen pada tahun 2020 menjadi 94,62 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meratanya masyarakat yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial. Sedangkan Persentase Penanganan PMKS pada tahun 2024 meningkat menjadi 100 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 85 persen pada tahun 2023. Untuk capaian persentase penyandang cacat baik fisik dan mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial setiap tahunnya sebesar 100 persen.

Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti pada pada tahun 2020 sebesar 72,37 persen. Kemudian, terjadi peningkatan signifikan menjadi 100

persen pada tahun 2021, yang berarti semua kebutuhan dasar kelompok rentan tersebut di luar panti terpenuhi. Namun, pada tahun 2022, capaian ini menurun menjadi 86,50 persen. Selanjutnya pada tahun 2023 dan tahun 2024 mencapai 100 persen. Hal ini menunjukkan tantangan dalam mempertahankan cakupan penuh setiap tahun, namun target capaian penuh tetap menjadi prioritas.

Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah menunjukkan kinerja yang sangat konsisten dan optimal. Dari tahun 2020 hingga tahun 2024, persentase ini secara konsisten mencapai 100 persen. Ini menunjukkan efektivitas dan kesigapan yang sangat tinggi dalam memenuhi kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial baik selama maupun setelah masa tanggap darurat bencana di daerah. Capaian sempurna ini menegaskan komitmen kuat dalam perlindungan sosial saat terjadi krisis.

2.4.5. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

Tenaga Kerja

Urusan tenaga kerja mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan, kebijakan, dan regulasi terkait tenaga kerja di suatu negara atau daerah. Capaian kinerja urusan tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 67
Capaian Kinerja Bidang Urusan Tenaga Kerja Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (Kasus)	91	69	59	51	68
Terciptanya Tenaga kerja Terampil dan Mandiri (Jiwa)	448	416	496	350	304
Jumlah Perusahaan yang Dibina (Perusahaan)	311	116	292	305	300
Pencari Kerja yang Dilatih dan Ditempatkan (Orang)	9.568	29	2.460	1.711	889
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	n/a	31,97	55,44	80,26	89,50
Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	-	-	-	100	100
Persentase Tenaga Kerja (%)	n/a	31,97	55,44	80,26	89,50
Tingkat Produktivitas	69,28	69,24	70,39	86,76	89,22

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Tenaga Kerja (%)(Juta rupiah/tenaga kerja)					
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	91,00	1,70	85,88	88,17	72,03
Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota (%)	9,56	29,00	2,46	1,71	61,70

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Jumlah Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama mengalami penurunan dari 91 kasus pada tahun 2020 menjadi 51 kasus pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 meningkat menjadi 68 kasus. Selanjutnya, untuk Indikator Terciptanya Tenaga Kerja yang Terampil dan Mandiri mengalami penurunan dari 496 orang pada tahun 2022 menjadi 304 orang pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa semakin rendahnya tenaga kerja yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan usahanya. Selanjutnya, Pencari Kerja yang Dilatih dan Ditempatkan mengalami penurunan dari 9.568 orang pada tahun 2020 menjadi 889 orang pada tahun 2024. Persentase Tenaga kerja Bersertifikat Kompetensi mengalami peningkatan dari 31,97 persen pada tahun 2021 menjadi 89,50 persen pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan bahwa masih banyak tenaga kerja atau sebesar 10,5 persen di Kabupaten Deli Serdang yang belum memiliki keahlian yang mumpuni untuk memenuhi kebutuhan industri.

Pada indikator persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja tahun 2023 dan tahun 2024 capaiannya sebesar 100 persen. Ini mengindikasikan bahwa semua kegiatan yang direncanakan di bidang tenaga kerja sepenuhnya mengikuti rencana yang telah ditetapkan.

Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari waktu ke waktu. Pada tahun 2021 dari sebesar 31,90 persen, meningkat menjadi 55,44 persen pada tahun 2022, dan mencapai 80,26 persen pada tahun 2023. Selanjutnya pada tahun 2024 mencapai sebesar 89,50 persen.

Hal ini menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja melalui sertifikasi.

Tingkat produktivitas tenaga kerja menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan substansial. Pada tahun 2020, produktivitas tercatat 69,28 juta rupiah/tenaga kerja. Angka ini meningkat menjadi 69,24 juta rupiah/tenaga kerja pada tahun 2021, 70,39 juta rupiah/tenaga kerja pada tahun 2022, dan melonjak tajam menjadi 86,76 juta rupiah/tenaga kerja pada tahun 2023. Selanjutnya pada tahun 2024 menjadi sebesar 89,22 juta rupiah/tenaga kerja. Hal ini menunjukkan peningkatan efisiensi dan nilai tambah dari setiap tenaga kerja.

Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) dari sebesar 91,00 persen pada tahun 2020 menjadi menurun drastis menjadi 1,70 persen pada tahun 2021. Namun, kemudian melonjak kembali menjadi 85,88 persen pada tahun 2022, dan meningkat menjadi 88,17 persen pada tahun 2023. Selanjutnya pada tahun 2024 menunjukkan penurunan kembali menjadi 72,03 persen. Fluktuasi ini perlu menjadi perhatian, terutama penurunan pada tahun 2024, untuk memastikan keberlanjutan penerapan tata kelola kerja yang layak.

Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota dari sebesar 9,56 persen pada tahun 2020, meningkat menjadi 29.,00 persen pada tahun 2021. Namun, terjadi penurunan tajam menjadi 2,46 persen pada tahun 2022, dan berlanjut menurun menjadi 1,71 persen pada tahun 2023. Selanjutnya pada tahun 2024 menunjukkan lonjakan yang sangat besar menjadi 61,70 persen. Fluktuasi ekstrem ini mungkin mencerminkan tantangan dalam efektivitas layanan penempatan kerja atau perubahan dalam kondisi pasar kerja.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 68
Capaian Kinerja Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
TPAK Perempuan (%)	51,26	50,36	48,61	53,21	49,47
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Kasus)	11	52	48	57	29
Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten (%)	100	100	100	100	100
Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Terlaporkan Terselesaikan (Kasus)	11	52	48	57	29
Hasil Penilaian Kabupaten Layak Anak (Level)	Madya	Madya	Madya	Madya	Nindya
Persentase ARG pada belanja langsung APBD (%)	10,92	11,24	9,66	4,44	12,67
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten (%)	100	100	100	100	100
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) (%)	0,06	3,23	1,14	5,94	3,86

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan mengalami penurunan dari 51,26 persen pada tahun 2020 menjadi 49,47 persen pada tahun 2024. Rasio KDRT mengalami peningkatan dari 57 kasus pada tahun 2023 menjadi 29 kasus pada tahun 2024. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten selalu mencapai 100 persen selama tahun 2020 hingga tahun 2024. Hasil evaluasi Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Deli Serdang masih berada pada level Madya. Kabupaten Layak Anak merupakan sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Capaian pada Level Madya menunjukkan bahwa saat ini Kabupaten Deli Serdang masih berada pada level 2 dari 5 untuk Kabupaten Layak Anak.

Alokasi Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD menurun menjadi 4,44 persen pada tahun 2023, namun naik menjadi 12,67 persen pada tahun 2024. Penanganan anak korban kekerasan sangat konsisten dan optimal, selalu

mencapai 100 persen dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Rasio kekerasan terhadap perempuan (per 100.000 penduduk perempuan) menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, dengan lonjakan dari 0,06 persen pada tahun 2020 menjadi 5,94 persen pada tahun 2023. Selanjutnya pada tahun 2024 menurun menjadi 3,86 persen. Peningkatan rasio ini memerlukan perhatian serius dalam upaya pencegahan dan penanganan.

Pangan

Pangan merupakan sumber energi utama bagi manusia untuk bertahan hidup. Capaian kinerja Urusan Pangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 69
Capaian Kinerja Bidang Urusan Pangan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Poin)	59,77	64,10	68,50	68,50	68,50
Ketersediaan Pangan Utama (Ton)	238.309,33	263.386,12	342.444,54	351.009,00	316.658,36
Kebutuhan Konsumsi Beras (Ton)	221.555,60	222.695,01	224.141,73	234,168,00	198.474,67
Swasembada Beras (Ton)	16.753,73	40.691,11	118.302,81	105.942,26	118.183,69
Konsumsi Beras (Kg/Kapita/Tahun)	73,50	75,80	83,8	*83,8	*83,8
Konsumsi Daging (Kg/Kapita/Tahun)	6,30	19,70	14,90	*14,90	*14,90
Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	29,00	27,40	35,80	*35,80	*35,80
Konsumsi Susu (Liter/Kapita/Tahun)	5,10	4,60	10,90	*10,90	*10,90
Rasio Penyuluhan Pertanian Satu Desa Satu Penyuluh	163: 394	155: 394	159: 394	151: 394	137:394
Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras)(%)	107,56	129,59	104,07	117,57	159,55

*Keterangan: * : Pada tahun 2023 dan 2024 tidak dilaksanakan survei PPH mandiri*
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) mengalami peningkatan dari 59,77 poin pada tahun 2020 menjadi 68,50 poin pada tahun 2024. Skor Pola Pangan Harapan merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat keberlanjutan pola pangan di suatu wilayah. Peningkatan Skor PPH menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dari ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Persentase Ketersediaan Pangan Utama (beras, daging, ikan, susu) pada tahun 2023 sebesar 351.009,00 ton dan pada tahun 2024 menurun menjadi 316.658,36 ton. Konsumsi beras per kapita/tahun cenderung stabil tinggi, sementara konsumsi daging, ikan, dan susu menunjukkan kenaikan signifikan di tahun-tahun tertentu dan kemudian stabil. Rasio Penyuluhan Pertanian Satu Desa Satu Penyuluh menunjukkan tren penurunan rasio penyuluh terhadap desa. Pentingnya, persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras) secara konsisten di atas 100 persen, dan melonjak menjadi 159,55 persen pada 2024. Hal ini mengindikasikan surplus ketersediaan. Swasembada beras menunjukkan peningkatan signifikan dari 16.753,73 ton pada tahun 2020 menjadi 118.183,69 ton pada tahun 2024.

Pertanahan

Dalam hal pertanahan, indikator difokuskan pada persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum. Capaian indikator terebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 70
Capaian Kinerja Bidang Urusan Pertanahan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum (%)	n/a	n/a	100	100	100

Sumber: Dinas Perkimtan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum dari tahun 2022 hingga tahun 2024 mencapai 100 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa lahan yang sesuai dan diperlukan untuk pembangunan fasilitasi umum tersedia dan mudah diakses.

Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup merupakan ruang yang termasuk dalam lingkup kehidupan. Capaian indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 71
Capaian Kinerja Bidang Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penanganan Sampah (%)	35	40	45	39,76	40,65
Jumlah Desa yang Dibina terkait Pengelolaan Sampah Konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) (desa)	20	25	30	30	35
Penataan Pelaksanaan B3 dan Limbah B3 (laporan)	55	50	52	55	55
Ketersediaan Sarana dan Prasarana Persampahan (unit)	15	20	25	25	30
Persetujuan Teknis Air Limbah (laporan)	8	10	12	10	10
Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	20	25	30	30	30
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota (poin)	61,90	59,00	57,37	61,18	63,45
Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota (%)	54,00	54,85	62,72	60,33	61,38
Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota (pelaku usaha)	30	42	25	31	16

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Persentase Penanganan Sampah di Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan dari 35,00 persen tahun 2020 menjadi sebesar 40,65 persen di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyaknya sampah yang belum ditangani oleh pemerintah sehingga dibutuhkan pengoptimalan penanganan sampah agar lebih merata. Jumlah desa yang dibina terkait pengelolaan sampah konsep 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) di Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan dari sebanyak 20 desa pada tahun 2020 menjadi sebanyak 35 desa pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sudah mulai peningkatan pemerataan pengolahan sampah melalui pembinaan, namun demikian masih banyak desa yang belum dibina. Penataan pelaksanaan B3 dan Limbah B3 di Kabupaten Deli Serdang tetap dari 55 laporan pada tahun 2023 dan 55 laporan pada tahun 2024. Ketersediaan sarana dan prasarana persampahan di Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan dari 15 unit pada tahun 2020

menjadi 30 unit pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meratanya penanganan sampah melalui sarana dan prasarana namun masih harus dimaksimalkan kembali. Persetujuan teknis air limbah mengalami peningkatan dari sebanyak 8 laporan pada tahun 2020, menjadi 10 laporan pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sudah terdapat laporan penataan dan pelaksanaan serta pengolahan limbah di Kabupaten Deli Serdang. Persentase penurunan emisi GRK di Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan dari sebesar 20 persen pada tahun 2020 menjadi sebesar 30 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sudah mulai teratasinya emisi gas rumah kaca yang ada di Kabupaten Deli Serdang.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota menurun dari 61,90 poin pada tahun 2020 menjadi 57,37 poin pada tahun 2022, lalu membaik menjadi 61,18 poin pada tahun 2023 dan mencapai 63,45 poin pada tahun 2024. Persentase terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota menunjukkan tren positif, yaitu meningkat dari 54,00 persen pada tahun 2020 menjadi 62,72 persen pada tahun 2022. Meskipun sedikit menurun pada tahun 2023 menjadi sebesar 60,33 persen, namun meningkat kembali menjadi 61,38 persen pada tahun 2024. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota menunjukkan penurunan signifikan dari 30 pelaku usaha pada tahun 2020 menjadi 16 pelaku usaha pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan penurunan tingkat ketaatan terhadap regulasi lingkungan.

Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data Kependudukan, sedangkan catatan sipil merupakan upaya pengadaan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan. Capaian kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 72
Capaian Kinerja Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Keluarga yang Memiliki KK (%)	100	100	100	100	100
Rasio Penduduk ber-KTP (%)	70	70	72	98	99
Rasio Kepemilikan KTP (%)	99	99	99	99	99
Rasio Penduduk yang Merekam e-KTP per Satuan WKTP Pemula (%)	99	99	99	99	99
Rasio Bayi Berakte Kelahiran (%)	100	100	100	100	100
Rasio Anak Memiliki Akte Kelahiran (%)	72	77	82	88	89
Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (%)	6	13	22	27	28
Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (OPD)	5	5	5	6	6

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (KK) di Kabupaten Deli Serdang selalu mencapai 100 persen setiap tahunnya. Penduduk ber-KTP, kepemilikan KTP, perekaman e-KTP sudah mencapai 99 persen pada tahun 2024. Bayi berakte kelahiran pun selalu 100 persen setiap tahunnya. Namun, anak yang memiliki akte kelahiran mencapai 89 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk mengurus administrasi kependudukan, terkhusus untuk anak.

Persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki KIA (Kartu Identitas Anak) menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari sebesar 6 persen pada tahun 2020 menjadi 27 persen pada tahun 2023, dan mencapai 28 persen pada tahun 2024. Ini mengindikasikan upaya progresif dalam cakupan kepemilikan KIA. Jumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama menunjukkan kestabilan, dengan 5 OPD dari tahun 2020-2022, meningkat menjadi 6 OPD pada tahun 2023, dan tetap 6 OPD pada tahun 2024. Hal ini menandakan kolaborasi yang cukup stabil dalam pemanfaatan data kependudukan antar OPD.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, terutama pada desa-desa tertinggal. Tujuan pemberdayaan adalah untuk menciptakan desa-desa yang tangguh dan mampu dalam mengelola sumber daya serta potensi desa yang ada. Capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 73
Capaian Kinerja Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Desa Membangun	0,6572	0,6606	0,6804	0,6889	0,6993
Persentase Pengentasan desa Tertinggal (%)	12,63	10,26	6,84	-	100
Jumlah Desa Mandiri (desa)	2	4	10	17	27
Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	0,52	0,52	1,57	1,84	2,63

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Indeks Desa Membangun Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan dari 0,6572 pada tahun 2020 menjadi 0,6993 pada tahun 2024 atau secara kategori berada pada status Desa Berkembang selama tahun tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum desa di Kabupaten Deli Serdang berada pada kategori berkembang. Desa-desa di Kabupaten Deli Serdang masih berupaya untuk memanfaatkan potensi-potensi desa yang ada. Persentase pengentasan desa tertinggal mengalami peningkatan dari 12,63 persen pada tahun 2020 menjadi 100 persen pada tahun 2024. Selanjutnya, jumlah desa mandiri mengalami peningkatan dari 2 desa pada tahun 2020 menjadi 27 desa pada tahun 2024. Persentase peningkatan status desa mandiri mengalami peningkatan dari 0,52 persen pada tahun 2020 menjadi 2,63 persen pada tahun 2024.

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat melalui pengaturan

kelahiran dan penyediaan layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif. Capaian kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 74
Capaian Kinerja Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Taun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Total Fertility Rate (Rata-Rata Anak Per Wanita) (Angka)	2.39	2.49	2.35	2,22	2,30
Klinik Keluarga Berencana (KKB) (Unit)	73	77	77	80	48
Rasio Akseptor KB (%)	54,06	56,77	57,06	61,77	67,76
Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (%)	67,50	66,22	53,20	61,74	69,31
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	7,56	8,01	36,49	15,04	8,05

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) meningkat dari 73 unit pada tahun 2020 menjadi 80 unit pada tahun 2023. Namun pada tahun 2024 menurun menjadi 48 unit pada tahun 2024. Kesadaran masyarakat untuk mengikuti program KB masih kurang yang ditunjukkan dari masih banyaknya Pasangan Usia Subur yang tidak berpartisipasi dalam program KB. Berdasarkan data pada tabel tersebut, sebanyak 67,76 persen yang mengikuti program tersebut pada 2024. Selain itu, angka kelahiran yang diukur oleh *Total Fertility Rate* (TFR) dari 2,39 anak per wanita pada 2020 menjadi 2,30 anak per wanita pada 2024.

Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) menurun dari 67,50 persen pada tahun 2020 menjadi 53,20 persen pada tahun 2022, kemudian sedikit pulih menjadi 61,74 persen pada tahun 2023 dan meningkat lagi menjadi 69,31 persen pada tahun 2024. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) menunjukkan lonjakan signifikan dari sekitar 7,58 pada tahun 2020 menjadi 36.49 persen pada tahun 2022, lalu menurun menjadi 15,04 persen pada tahun 2023 dan menurun menjadi 8,05 persen pada tahun 2024. Fluktuasi pada kedua indikator ini menunjukkan adanya tantangan dalam konsistensi capaian program KB.

Selanjutnya aspek pelayanan umum lainnya adalah bidang perhubungan. Kinerja pelayanan bidang perhubungan di Kabupaten Deli Serdang antara lain peningkatan pengawasan jalan dan fasilitas sarana dan prasarana perhubungan. Untuk lebih detailnya dapat dilihat tabel berikut ini.

Tabel 2. 75
Capaian Kinerja Bidang Urusan Perhubungan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Konektivitas (%)	0	0	0	0	50
Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum (%)	99,29	98,20	96,30	28,80	29,50
Pemasangan Rambu-Rambu (unit)	25	0	0	20	30
Kinerja lalu lintas kabupaten/kota (angka)	0,19	0,37	0,41	0,42	0,33

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Rasio konektivitas pada tahun 2024 mencapai 50 persen. Persentase Kepemilikan KIR angkutan umum mengalami penurunan dari 99,29 persen pada tahun 2020 menjadi 28,80 persen pada tahun 2023 dan meningkat pada tahun 2024 menjadi sebesar 29,50 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya keterlibatan angkutan umum untuk menguji kelayakan kendaraannya. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas mengalami penurunan dari 25 unit pada tahun 2020 menjadi 20 unit pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 30 unit pada tahun 2024. Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyaknya area yang seharusnya dipasang rambu-rambu lalu lintas belum terpasang. Kinerja lalu lintas kabupaten/kota menunjukkan tren peningkatan yang stabil dari 0,19 pada tahun 2020 menjadi 0,42 pada tahun 2023. Hal ini menandakan perbaikan kinerja lalu lintas selama periode tersebut. Namun, pada tahun 2024 menunjukkan sedikit penurunan menjadi 0,33.

Komunikasi dan Informatika

Bidang komunikasi dan informatika berperan penting untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Capaian kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 76
Capaian Kinerja Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi (%)	-	61,11	100	100	36,36
Persentase Wi-fi yang Tersedia di Tempat Publik (lokasi)	2	2	2	2	2
Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%);	n/a	100	100	100	100
Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	n/a	100	2,00	2,47	82,57

Sumber: Diskominfostan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 100 persen menjadi 36,36 persen pada tahun 2024. Untuk Persentase Wi-fi yang tersedia di Tempat Publik dari tahun 2020 hingga tahun 2023 ada di 2 lokasi. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas Kominfo menunjukkan konsistensi sempurna, mencapai 100 persen dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Hal ini mengindikasikan konektivitas yang optimal. Untuk persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik dan mengetahui kebijakan/program prioritas mencapai 100 persen pada tahun 2021, menurun menjadi 2 persen pada tahun 2022 dan menjadi 2,47 persen pada tahun 2023. Selanjutnya meningkat menjadi 82,57 persen pada tahun 2024.

Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (UKM bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan sektor-sektor ini. Capaian kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 77
Capaian Kinerja Bidang Urusan Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah
Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Kontribusi Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,157	0,158	0,23	0,231	0,232
Persentase Koperasi Aktif (%)	76,50	77,10	77,50	80,90	83,97
Koperasi yang Berkualitas (%)	20,00	16,93	15,77	13,91	2,41
Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	0,63	5,28	1,35	0,81	0,85
Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha (%)	0,63	0,37	0,98	0,21	2,52
UMKM Naik Kelas (Unit)	-	99	169	445	783

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Kontribusi volume usaha koperasi terhadap PDRB mengalami peningakatan dari 0,157 persen pada tahun 2020 menjadi 0,231 persen pada tahun 2023. Persentase Koperasi Aktif mengalami peningkatan dari 76,50 persen pada tahun 2020 menjadi 88,90,60 persen pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya jumlah koperasi yang dikelola. Koperasi yang berkualitas mengalami penurunan dari 20,00 persen pada tahun 2020 menjadi 2,41 persen pada tahun 2024. Persentase usaha mikro dan kecil mengalami peningkatan dari 0,63 persen pada tahun 2020 menjadi 80,59 persen pada tahun 2023. Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha mengalami peningkatan dari 0,63 persen pada tahun 202 menjadi 2,52 persen pada tahun 2024. Selanjutnya UMKM naik kelas mengalami peningkatan dari 99 unit pada tahun 2021 menjadi 445 unit pada tahun 2023.

Penanaman Modal

Penanaman modal adalah investasi yang ditanamkan oleh investor pada suatu wilayah dengan harapan memberikan keuntungan di masa mendatang. Penanaman modal pada suatu daerah memiliki dampak pada aspek sosial dan ekonomi suatu wilayah. Pembangunan Kabupaten Deli Serdang berpengaruh terhadap kondisi iklim investasi. Arah kebijakan pembangunan Deli Serdang bertumpu pada 3 pilar pembangunan, yaitu peran pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Dukungan dari para stakeholder baik dari dalam negeri maupun luar negeri diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan daerah. Dalam mengambil

kebijakan strategis untuk meningkatkan investasi, maka Kabupaten Deli Serdang harus memperhatikan hal-hal yang berdampak pada minat investor, seperti iklim usaha, prosedur perizinan dan kemudahan berinvestasi, serta ketersediaan tenaga kerja yang mampu memenuhi kebutuhan industri. Capaian kinerja Urusan Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 78
Capaian Kinerja Bidang Urusan Penanaman Modal Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Kontribusi PMTB terhadap PDRB (%)	33,62	34,20	34,10	33,83	34,09
Investor Berskala Nasional untuk PMA (Unit/Perusahaan)	10	7	14	19	16
Investor Berskala Nasional untuk PMDN (Unit/Perusahaan)	7.718	1.502	9.218	19.971	41.177
PMDN (Rp Triliun)	1,73	2,70	2,72	2,64	4,66
PMA (US$ Juta)	111,29	61,49	83,09	120,07	148,37
Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)	19,97	7,04	9,19	12,86	56,07

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menurun dari Rp 2,72 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp 2,64 triliun pada tahun 2023 dan meningkat pada tahun 2024 menjadi 4,66 triliun. Sebaliknya, investor asing menaikkan nominal investasinya kepada Kabupaten Deli Serdang. Hal ini ditunjukkan dari meningkatnya Penanaman Modal Asing (PMA) dari US$ 83,09 juta pada tahun 2022 menjadi US$ 148,37 juta pada tahun 2024. Selain itu, peran investor bagi perekonomian daerah juga semakin meningkat, di mana hal ini ditunjukkan dari semakin meningkatnya jumlah Investor Berskala Nasional untuk PMA yaitu menjadi 19 perusahaan pada tahun 2023, namun menurun pada tahun 2024 menjadi 16 perusahaan. Selanjutnya Investor Berskala Nasional untuk PMDN meningkat dari 1.502 pada tahun 2021 menjadi 41.177 perusahaan pada tahun 2024. Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota mencapai 19,97 persen pada tahun 2020. Persentase peningkatan investasi menurun menjadi 7,04 persen pada tahun 2021. Kemudian, terjadi pemulihan bertahap menjadi 9,19 persen pada tahun 2022 dan 12,86 persen pada tahun 2023. Selanjutnya pada tahun 2024 menunjukkan lonjakan signifikan menjadi 56,07 persen.

Kepemudaan dan Olahraga memiliki peran penting bagi pembangunan suatu wilayah. Pemuda berperan dalam pembangunan dan memberdayakan masyarakat, sementara olahraga menjadi suatu daya tarik pariwisata dan meningkatkan kehidupan sosial. Capaian kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 79
Capaian Kinerja Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Atlet Berprestasi di Tingkat Regional, Nasional, dan/atau Internasional (Orang)	73	-	195	338	61
Jumlah Organisasi Olahraga (Organisasi)	39	39	42	42	42
Jumlah Atlet Pelajar Berprestasi (Orang)	13	-	103	38	124
Jumlah Cabang Olahraga Unggulan (Cabang)	16	16	16	16	16
Jumlah Pemuda yang Berprestasi (Orang)	-	45	45	48	0
Rasio Wirausaha Pemuda (%)	-	20	20	20	2,28
Peningkatan prestasi olahraga (Medali)	0	90	85	99	61

Sumber: Disbudporapar Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Jumlah Atlet Berprestasi di Tingkat Regional, Nasional, dan/atau Internasional di Kabupaten Deli Serdang mengalami penurunan dari tahun 2020 sebanyak 73 orang menjadi sebanyak 61 orang pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan perlunya dukungan pemerintah daerah kepada para atlet-atlet. Jumlah Organisasi Olahraga di Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebanyak 39 organisasi menjadi sebanyak 42 organisasi pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan perhatian kepada para atlet dengan cara semakin bertambahnya organisasi ataupun komite yang bergerak dibidang olahraga. Jumlah atlet pelajar berprestasi cenderung mengalami peningkatan 13 orang pada tahun 2020 menjadi 124 orang pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa atlet-atlet yang dalam status pelajar mengalami peningkatan prestasi sehingga dibutuhkan perhatian khusus untuk para atlet-atlet pelajar.

Jumlah Cabang Olahraga Unggulan di Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2020 sampai 2024 relatif stabil sebanyak 16 cabang olahraga. Hal ini menunjukkan bahwa masih samanya cabang olahraga yang diminati para atlet-atlet di Kabupaten Deli Serdang. Jumlah Pemuda yang Berprestasi di Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebanyak 45 orang meningkat sebanyak 48 orang pada tahun 2023. Namun pada tahun 2024 tidak ada pemuda yang berprestasi. Rasio wirausaha pemuda di Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2021 hingga tahun 2023 relatif stabil sebesar 20 persen, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 2,28 persen. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada perkembangan yang terjadi kepada para para wirausaha, sehingga dibutuhkan dorongan dukungan untuk meningkatkan pengembangan para wirausaha pemuda di Kabupaten Deli Serdang. Peningkatan prestasi olahraga pada tahun 2021 mendapatkan sebanyak 90 medali dan meningkat menjadi 99 medali pada tahun 2023. Selanjutnya pada tahun 2024 mendapatkan 61 medali. Penurunan capaian tersebut perlu menjadi perhatian untuk peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Deli Serdang.

Statistik

Statistik sektoral adalah data statistik yang dikumpulkan dan diolah oleh instansi pemerintah, baik kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, untuk memenuhi kebutuhan internal mereka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Statistik sektoral ini digunakan untuk perencanaan, pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di masing-masing sektor. Capain kinerja urusan statistil dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 80
Capaian Kinerja Bidang Urusan Statistik Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	n/a	n/a	100	100	61,11

Sumber: Diskominfostan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah pada

tahun 2022 sebesar 100 persen dan pada tahun 2023 capaiannya sebesar 100 persen. Sedangkan pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi sebesar 61,11 persen.

Persandian

Persandian merupakan proses atau aktivitas yang berkaitan dengan pemberian sandi atau kode dalam menjaga keamanan data serta komunikasi agar tidak bocor kepada pihak luar/pihak yang tidak berhak. Tingkat keamanan informasi pemerintah belum optimal pada semua OPD. Indikator ini merupakan ukuran penting dalam menilai tingkat keamanan informasi dan komunikasi di kalangan perangkat daerah.

Kebudayaan

Pemerintah harus hadir dalam upaya-upaya pembangunan di bidang kebudayaan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pelestarian dan pengembangan warisan budaya. Capaian kinerja Urusan Kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 81
Capaian Kinerja Bidang Urusan Kebudayaan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Objek Tradisi yang Dilestarikan (Objek)	Covid-19	Covid-19	8	10	10
Jumlah Objek Seni Budaya yang Dilestarikan (Objek)	136	142	150	192	197
Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan (Objek)	1	10	5	5	21
Terlestarikannya Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak benda (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	23

Sumber: Disbudporapar Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Jumlah objek tradisi yang dilestarikan di Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebanyak 8 objek meningkat menjadi 10 objek pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya objek-objek yang telah dilestarikan sehingga meningkatkan nilai budaya tradisi di Kabupaten Deli Serdang. Jumlah objek seni budaya yang dilestarikan di Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun

2020 sebesar sebanyak 136 objek menjadi 197 objek pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pelestarian objek seni budaya juga akan meningkatkan ketertarikan wisatawan dengan seni budaya di Kabupaten Deli Serdang. Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kabupaten Deli Serdang mengalami fluktuasi dari tahun 2020 sebanyak 1 objek meningkat menjadi 10 objek pada tahun 2021 dan kembali menurun di tahun 2023 sebanyak 5 objek. Namun pada tahun 2024 meningkat menjadi 21 objek. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya perhatian pada pelestarian cagar budaya. Terlestarikannya Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak benda pada tahun 2024 sebesar 23 persen. Hal ini perlu diperhatikan untuk menjaga identitas dan jati diri daerah.

Perpustakaan

Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Kehadiran perpustakaan menjadi sebuah sarana bagi masyarakat untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuannya. Perpustakaan menjadi suatu akses informasi bagi masyarakat. Capaian kinerja Urusan Perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 82
Capaian Kinerja Bidang Urusan Perpustakaan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Perpustakaan (Unit)	148	618	1,978	1.637	1.763
Jumlah Pengunjung Perpustakaan (Orang)	2.285	2.906	5.152	13.194	729.053
Jumlah Pojok Baca (Unit)	1	1	2	2	2
Jumlah Buku Digital (Buku)	-	-	134	788	1.462
Indeks Minat Baca (Poin)	-	-	34,75	67,01	65,69
Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (nilai)	n/a	19,09	63,45	67,01	65,59
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (nilai)	n/a	7,94	34,50	51,57	60,30

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Jumlah perpustakaan di Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan dari 1.637 unit pada tahun 2023 menjadi 1.763 unit pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kebijakan pemerintah dalam meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh informasi dan pengetahuan. Pada tahun 2020 jumlah pengunjung perpustakaan sebesar 2.285 orang mengalami

peningkatan pada tahun 2024 menjadi 729.053 orang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya minat baca masyarakat dibandingkan pada tahun 2020 lalu. Pada tahun 2024, buku digital yang terdapat di Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1.462 buku. Selanjutnya, dalam pengukuran minat baca masyarakat menggunakan Indeks Minat Baca. Capaian Indeks Minat Baca masyarakat Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2024 mencapai 65,69 poin, dimana meningkat dari tahun 2022 yaitu 34,75 poin pada tahun 2022. Hal ini menandakan bahwa secara umum minat baca masyarakat Deli Serdang semakin meningkat.

Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat menunjukkan peningkatan dari 19,09 pada tahun 2021 menjadi 67,01 pada tahun 2023. Namun menurun menjadi 65,59 pada tahun 2024. Indeks Pembangunan Literasi juga menunjukkan tren kenaikan dari 7,94 pada tahun 2021 menjadi 51,57 pada tahun 2023, dan terus meningkat menjadi 60,30 pada tahun 2024. Secara keseluruhan, data menunjukkan peningkatan positif dalam budaya literasi masyarakat.

Kearsipan

Arsip adalah rekaman kegiatan dalam bentuk fisik dan non fisik yang dibuat dan diterima oleh lembaga pemerintahan. Tujuan kearsipan adalah untuk menyimpan sumber informasi dan sebagai alat pengawasan dalam perencanaan, pengembangan, perumusan kebijakan, dan berbagai hal. Capaian Indikator Urusan Kearsipan sebagai berikut:

Tabel 2. 83
Capaian Kinerja Bidang Urusan Kearsipan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pengelolaan Arsip Secara Baku (OPD)	10	10	13	20	24
Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan (Orang)	184	581	74	40	764
Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009) (nilai)	-	82.11	-	74.99	93.41
Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan	-	24.94	-	108.66	2.90

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
publik dan kesejahteraan rakyat (nilai)					

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Berdasarkan data tersebut, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melakukan arsip secara baku pada tahun 2024 sebanyak 24 OPD dari 31 OPD yang berada di bawah lingkup Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Secara persentase, berarti hingga saat ini terdapat sebesar 77,41 persen dari seluruh OPD yang melakukan arsip secara baku. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada OPD yang belum menerapkan arsip dengan baik. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti sah, dan pertanggungjawaban nasional dari 82,11 pada tahun 2021 menurun menjadi 74,99 pada tahun 2023, namun meningkat menjadi 93,41 pada tahun 2024. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara menunjukkan peningkatan dari 24,94 pada tahun 2021 menjadi 108.66 pada tahun 2023. Namun menurun menjadi 2,90 pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan serius dalam manajemen kearsipan.

2.4.6. Urusan Pilihan

Kelautan dan Perikanan

Sektor lain di Kabupaten Deli Serdang yang memiliki potensi dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah adalah sektor produksi perikanan. Produksi perikanan di Kabupaten Deli Serdang diperoleh dari perikanan air laut dan budidaya air tawar, dimana pada tahun 2022 dari perikanan Budidaya Air Tawar memiliki nilai produksi terbesar yaitu 48.210,87 ton. Produksi perikanan terbesar kedua adalah penangkapan ikan di laut sebesar 25.697,77, secara lebih lengkap dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 84
Potensi dan Perkembangan Perikanan di Kabupaten Deli Serdang

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi Perikanan					
	Panjang garis pantai (km)	65	65	65	65	65
	Penangkapan di Laut (ton)	25.727,39	36.562,21	32.294,00	25.694,77	34.086,73
	Penangkapan di Perairan Umum (ton)	343,45	7.335,49	8.204,00	6.731,79	5.321,73
	Budidaya Laut (ton)	42	-	-	-	-
	Budidaya Air Payau (ton)	6.648,01	6.193,53	5.055,00	5.354,64	4.748,30
	Budidaya Air Tawar (ton)	55.551,08	50.874,91	53.691,00	48.210,87	40.055,61
2	Luas Budidaya Perikanan					
	Budidaya air payau/tambak (ha)	1.295,20	1.616,93	1.605,98	1.460,99	1.460,99
	Kolam ikan (ha)	1.291,18	1.313,60	1.308,96	1.092,33	1.092,88
	Keramba Jaring Apung (ha)	0,1	0,38	0,1	0,1	0,1
	Keramba Jaring Tancap (ha)	0,02	0,45	0,45	0,45	0,40
3	Perahu/Kapal Penangkap Ikan					
	Perahu tanpa motor (unit)					
	Jukung	510	510	-	-	-
	Kecil	576	576	39	27	27
	Sedang	-	-	-	-	-
	Perahu motor tempel	-	-	-	-	-
	Perahu motor (unit)					
	* <5 GT	3.280	3.303	3.325	3.298	3.298
	* 510 GT	1	1	1	-	-
	* >10GT	-	-	-	-	-
4	Nelayan dan Pembudidaya Ikan					
	Nelayan laut (org)					
	Waktu penuh	12.514	12.563	11.754	9.748	8.951
	Sambilan	640	614	23	23	-
	Nelayan perairan umum (org)	2.541	2.541	1.239	1.123	1.123

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	Pembudidaya ikan (org)	4.240	4.406	4.495	4.487	4.197
5	Konsumsi					
	Konsumsi per kapita (kg)	40,51	45,01	40,65	34,63	33,58

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Dinas Perikanan juga telah melakukan terobosan guna mengoptimalkan potensi perikanan, di antaranya melalui meningkatkan peran serta fungsi UPT Balai Benih Ikan Air Tawar (BBIAT) Lengau Seprang yang berlokasi di Kecamatan Tanjung Morawa untuk menghasilkan benih ikan unggul dan tempat pelatihan bagi pelaku usaha budidaya perikanan. Selain itu, Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang juga telah memberdayakan kaum perempuan (Kelompok Stunting dan PKH/Program Keluarga Harapan) melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan di kolam terpal beserta pelatihannya sehingga kaum perempuan tersebut dapat memenuhi kebutuhan gizi/konsumsi ikan dan menambah penghasilan keluarga.

Tabel 2. 85
Capaian Kinerja Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	26.070,83	43.897,70	40.498,00	32.426,56	39.408,46
Jumlah Produksi Ikan Perairan Umum dan Budidaya (ton)	62.241,09	57.068,44	58.746,00	53.565,51	44.803,91
Produksi Benih Ikan (ekor)	245.755.020	263.004.340	66.581.000	66.237.000	84.084.000
Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/ kota (sumber data: one data KKP)	91.785,26	104.431,14	102.388,00	88.770,92	86.734,46

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
(ton)					

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun 2021 hingga tahun 2023 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2021 sebanyak 43.387,70 ton dan pada tahun 2023 menjadi 32.426,56 ton. Tahun 2024, meningkat lagi menjadi 39.408,46 ton. Untuk jumlah produksi ikan perairan umum dan budidaya pada tahun 2022 hingga tahun 2024 mengalami penurunan, dari 58.746 ton pada tahun 2022 menjadi 44.803,91 ton pada tahun 2024. Demikian juga dengan jumlah produksi benih ikan pada tahun 2021 hingga tahun 2023 mengalami penurunan dari 263.004.020 ekor pada tahun 2021 menjadi 66.237.000 ton pada tahun 2023. Tahun 2024, naik lagi menjadi 84.084.000 ton. Selanjutnya, jumlah Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP) pada tahun 2020 sebesar 91.785,26 ton dan menurun menjadi 86.734,46 pada tahun 2024. Hal ini disebabkan berkurangnya jumlah trip nelayan melaut akibat penurunan permintaan dan ketidakstabilan harga ikan di pasar, menurunnya jumlah nelayan karena alih profesi, anomali cuaca dan tingginya harga pakan menyebabkan sebagian besar pembudidaya ikan mengurangi padat tebar benih ikan yang dibudidayakan.

Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu Sektor Perekonomian yang berdampak bagi perekonomian suatu wilayah. Capaian indikator Urusan Pariwisata sebagai berikut.

Tabel 2. 86
Capaian Kinerja Bidang Urusan Pariwisata Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Wisatawan (orang)	2.203.784	995.737	1.270.065	2.093.143	2.840.737
Jumlah Organisasi Kelompok Wisata (organisasi)	35	38	42	42	42
Jumlah Destinasi Wisata (lokasi)	80	84	128	128	134
Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif (unit)	25.402	26.818	27.816	183	164
Persentase	n/a	n/a	n/a	n/a	33,00

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (persen)					
Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota (persen)	n/a	n/a	n/a	n/a	3,50
Tingkat hunian akomodasi (persen)	n/a	n/a	n/a	n/a	0,22
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku (persen)	n/a	n/a	n/a	n/a	2,43
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (persen)					7,61

Sumber: Disbudporapar Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Deli Serdang mengalami peningkatan dari 995.737 orang pada tahun 2021 menjadi 2.840.737 orang pada tahun 2024. Jumlah destinasi wisata Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan dari 80 pada tahun 2020 lokasi menjadi 134 lokasi pada tahun 2024. Jumlah pelaku ekonomi kreatif mengalami penurunan dari 25.402 unit pada tahun 2020 menjadi 164 unit pada tahun 2024.

Pada tahun 2024, persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan sebesar 33,00 persen, persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota sebesar 3,50 persen, tingkat hunian akomodasi sebesar 0,22 persen, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku sebesar 2,43 persen dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD sebesar 7,61 persen. Indikator-indikator tersebut menjadi perhatian dalam meningkatkan kinerja urusan pariwisata di Kabupaten Deli Serdang.

Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Deli Serdang adalah daerah yang banyak memiliki destinasi wisata, antara lain: objek wisata alam, wisata kuliner dan wisata laut. Daerah tujuan wisata merupakan salah satu program pembangunan yang perlu mendapat perhatian untuk bisa berkembang sehingga pada akhirnya dapat menjadi sumber pemasukan bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi

masyarakat pada umumnya dan bagi daerah secara khususnya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisata yang berkunjung yang berasal dari wisata lokal, luar daerah hingga mancanegara.

Peningkatan kualitas wisata, relevansi dan daya saing di bidang pariwisata menjadi salah satu keberhasilan program pariwisata di Kabupaten Deli Serdang. Kemajuan ini dapat dilihat dari beberapa capaian target kinerja dari kunjungan para wisatawan ke objek wisata yang ada di Kabupaten Deli Serdang.

Tabel 2. 87
Data Kunjungan Wisata Tahun 2020-2024 di Kabupaten Deli Serdang

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Bangun Purba	46.325	27.130	23.320	39.490	61.500
Biru-Biru	154.245	83.830	70.395	112.245	178.065
Patumbak	154.479	36.002	42.576	69.652	70.661
Hamparan Perak	1.670	16.185	14.845	17.245	22.040
Kutalimbaru	141.080	58.350	97.055	176.995	278.975
Lubuk Pakam	213.910	23.570	73.270	100.350	156.510
Namorambe	118.170	62.745	90.085	112.566	221.141
Pancur Batu	96.695	85.450	110.515	138.500	203.820
Pantai Labu	331.170	134.920	112.490	184.820	209.700
Percut Sei Tuan	139.905	19.850	23.890	55.185	64.030
Sibolangit	763.755	260.805	380.001	615.144	841.415
STM Hulu	19.685	26.870	45.745	60.695	108.345
Sunggal	5.365	3.580	5.230	96.401	98.551
Tanjung Morawa	17.330	45.785	60.475	118.075	113.795
Labuhan Deli	0	31.875	20.525	2.460	3.010
STM Hilir	0	28.350	15.350	23.900	20.950
Deli Tua	0	0	7.365	39.050	41.908
Galang	0	0	0	20.800	21.333
Beringin	0	0	0	5.550	18.200
Batang Kuis	0	31.105	32.300	38.820	50.300
Gunung Meriah	0	19.335	33.233	47.770	50.951
Pagar Merbau	0	0	11.400	17.430	5.537
Total	**2.203.784**	**995.737**	**1.270.065**	**2.093.143**	**2.840.737**

Sumber: Disbudporapar Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Dari data kunjungan para wisatawan pada tahun 2024 ke beberapa objek wisata yang terdapat di wilayah Kabupaten Deli Serdang, mencapai 2.840.737 wisatawan. Angka kunjungan wisatawan ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 yaitu sebesar 995.735 wisatawan.

Melihat tren yang meningkat terhadap hasil kunjungan wisatawan ke lokasi-lokasi objek wisata yang terdapat di Kabupaten Deli Serdang seiring dengan dicabutnya status darurat kesehatan global oleh WHO, sudah selayaknya bidang kepariwisataan terus

ditingkatkan, baik dari segi pengembangan objek wisata baru maupun dari mempersiapkan kalender event kepariwisataan yang menyuguhkan inovatif dan kreativitas agenda acara yang menarik dan berkelanjutan pada tahun 2024. Beberapa daerah yang berpotensi, telah dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui berbagai inovasi guna meningkatkan wisata, di antaranya seperti: wisata sawah di Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli dan wisata sawah/agrowisata Paloh Naga di Kecamatan Pantai Labu yang menawarkan hamparan sawah hijau dengan kesegaran udaranya.

Selain itu, untuk memajukan serta mengembangkan sektor kepariwisataan di Kabupaten Deli Serdang, faktor keselamatan dan kenyamanan pengunjung juga harus diperhatikan dan mengembangkan daya tarik melalui inovasi, di antaranya seperti: a) KEKER PAKAR (Kelompok Kerja Percepatan Penataan Pariwisata) yang bertujuan untuk menyelaraskan pembangunan pariwisata antar Perangkat Daerah yang hasilnya berupa Pembangunan Destinasi Wisata Bunga Mardisan-Tanjung Morawa dan Percut Sei Tuan; b) KENANGLEMU (Kenali Deli Serdang Lewat Museum) yang bertujuan untuk penguatan identitas jati diri masyarakat Deli serdang, pusat ilmu pengetahuan dan pengembangan diri di zaman milenial. C) DAPORANIYATA (Data Pemuda, Olahraga, Seni, Budaya dan Wisata) yang bertujuan untuk menghimpun data untuk dijadikan basis 1 (satu) data yang valid dan mudah diakses.

Pengembangan kepariwisataan yang handal harus didukung dengan ketersediaan akomodasi yang memadai juga. Usaha penginapan di Kabupaten Deli Serdang penting dalam mewujudkan Kabupaten Deli Serdang sebagai destinasi wisata. Jumlah hotel di wilayah Kabupaten Deli Serdang mengalami kenaikan jumlahnya dari 125 usaha pada tahun 2020 menjadi 142 usaha penginapan pada tahun 2024. Sarana akomodasi lainnya yang menunjang pariwisata adalah restoran/rumah makan. Restoran/rumah makan sebagai sarana akomodasi penunjang berperan menarik minat wisatawan untuk menikmati kuliner. Perkembangan jumlah restoran/rumah makan juga dapat menggambarkan perkembangan kepariwisataan dan perekonomian di Kabupaten Deli Serdang. Jumlah restoran/rumah makan yang semula sebanyak 286 usaha pada tahun

2020, menjadi sebanyak 339 usaha pada tahun 2024. Perkembangan data usaha kepariwisataan di Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada tabel di bawah berikut.

Tabel 2. 88
Data Usaha Kepariwisataan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2024

No	Nama Usaha Kepariwisataan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rumah Makan, Bar, dan Restoran	286	331	338	339	339
2	Hotel Melati, Pondok Wisata, dan Perkemahan	125	132	133	142	142
3	Bola Sodok	15	15	15	15	15
4	Panti, Pijat, Spa Dan Oukup	45	72	72	68	68
5	Agen Biro Perjalanan Wisata	63	64	65	72	72
6	Kolam Pancing	14	14	25	12	25
7	Gelanggang Renang	31	35	36	35	35
8	Permainan Ketengkasan/ Mesin Keterampilan/ Warnet	63	71	71	70	70
9	Karaoke	31	38	38	16	16
10	Taman Rekreasi	36	42	42	45	45
11	Pemandian Alam	89	93	92	90	90
12	Wisata Bahari	15	17	17	14	14
13	Salon/ Barber Shop	38	40	41	34	34
14	Lapangan Golf	8	8	8	3	2

Sumber: Disbudporapar Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Pertanian

Kondisi pertanian Kabupaten Deli Serdang patut untuk terus ditingkatkan khususnya produksi padi di Kabupaten Deli Serdang (Kabupaten Deli Serdang merupakan sentra produksi padi di Provinsi Sumatera Utara) dimana selama periode tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami fluktuasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Capaian kinerja Urusan Pertanian diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 89
Capaian Kinerja Bidang Urusan Pertanian Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan terhadap PDRB (%)	10,46	9,37	9,51	9,51	11,13
Produksi Padi Sawah (ton)	431.532	431.105	434.366	533.088	499.619

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Produktivitas Padi Sawah (ton/ha)	6,26	5,99	5,85	6,25	6,25
Produksi Padi Ladang (ton)	9.416,32	-	1.543	-	-
Produktivitas Padi Ladang (ton/ha)	19,32	-	3,88	-	-
Produksi Kelapa Sawit (ton)	38.732,83	52.061,13	57.413,21	51.489,70	51.666,29
Produksi Coklat (ton)	3.814,17	3.801,41	2.072,43	2.072,43	2.072,43
Produksi Karet (ton)	3.565,12	3.565,12	3.320,16	4.564,00	4.564,00
Produksi Kelapa (ton)	3.052,64	3.052,64	2.971,61	3.247,00	3.247,00
Produktivitas pertanian per hektar per tahun (%)	587,68	625,00	626,75	722,85	695,51
Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	-95,49	-89,72	-45,90	-28,57	-20,00

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan terhadap PDRB mengalami fluktuatif selama tahun 2020 sampai tahun 2024. Pada tahun 2020 sektor tersebut berkontribusi kepada perekonomian Deli Serdang sebesar 10,46 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 9,51 persen. Namun pada tahun 2024 meningkat menjadi 11,13 persen. Terkait dengan kebutuhan beras, perlu dilakukan diversifikasi pangan karena bermanfaat untuk memperoleh nutrisi dari sumber gizi yang lebih beragam dan seimbang. Diversifikasi pangan yang dilakukan masyarakat Kawasan ASEAN umumnya dan Indonesia khususnya yaitu berupa nasi, karena mayoritas wilayah Asia Tenggara merupakan wilayah penghasil beras. Indonesia juga menegaskan komitmennya dalam melaksanakan program tersebut dengan menjelaskan definisi pangan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan demi mewujudkan swasembada beras dengan meminimalkan konsumsi beras agar tidak melebihi produksinya. Tujuan dari diversifikasi konsumsi pangan lebih ditekankan sebagai usaha untuk menurunkan tingkat konsumsi beras, dan diversifikasi konsumsi pangan hanya diartikan pada penganekaragaman pangan pokok, tidak pada keanekaragaman pangan secara keseluruhan. Sehingga

banyak bermunculan berbagai pameran dan demo masak memasak yang menggunakan bahan baku non beras seperti sagu, jagung ubi kayu atau ubi jalan dengan masyarakat akan beralih pada pangan non beras.

Kabupaten Deli Serdang adalah merupakan salah satu sentra penghasil komoditi perkebunan untuk Provinsi Sumatera Utara. Komoditi penting yang dihasilkan perkebunan di Kabupaten Deli Serdang antara lain karet, kelapa sawit, coklat dan kelapa. Pada Sektor Perkebunan secara umum produksi komoditas perkebunan fluktuatif. Palawija merupakan salah satu kunci dalam menggalakkan pangan di Indonesia demi mempertahankan ketahanan pangan. Lahan tidur yang tidak tergarap, misal lahan bekas kehutanan, bisa ditanam palawija karena penanaman palawija tidak membutuhkan banyak air. Jika terwujud, hal ini dapat meningkatkan produksi pangan. Dalam sistem yang menekankan pertanian berkelanjutan, palawija merupakan salah satu komponen untuk melakukan rotasi tanaman. Palawija juga mampu menjadi sumber penghidupan di dataran tinggi dimana padi tidak dapat tumbuh.

Tabel 2. 90
Luas Panen dan Hasil Panen Palawija Kabupaten Deli Serdang

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Ubi Kayu					
Luas Panen (ha)	2.998,00	53,06	2.493,00	3.840,00	2.586,00
Hasil Panen (ton)	102.814,00	1.244,77	85.712,00	132.015,00	88.904
Kacang Tanah					
Luas Panen (ha)	66	8,12	2	64	111
Hasil Panen (ton)	78	9,48	2	75	130
Kacang Kedelai					
Luas Panen (ha)	128	20	0	0	512
Hasil Panen (ton)	166	27,21	0	0	1.188
Jagung					
Luas Panen (ha)	27.912,00	15.740,30	16.379,00	18.273,00	15.752
Hasil Panen (ton)	172.132,00	97.073,43	101.241,00	112.945,00	97.363
Kacang Hijau					
Luas Panen (ha)	93	162,94	15	382	43
Hasil Panen (ton)	113	204,66	18	471	53

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Pada tahun 2024 jenis komoditi palawija yang ada di Kabupaten Deli Serdang yaitu ubi kayu dengan luas panen 2.586 Ha dan hasil

panen 88.904 ton; kacang tanah dengan luas panen 111 Ha dan hasil panen 130 ton; Jagung dengan luas panen 15.752 Ha dan hasil panen 97.363 ton; kacang hijau dengan luas panen 43 ton dan hasil panen 53 ton.

Tabel 2. 91
Jumlah Populasi Ternak (ekor) di Kabupaten Deli Serdang

Jenis Ternak	2020	2021	2022	2023	2024
Sapi Perah (ekor)	1.142	1.082	1.062	474	91
Sapi Potong (ekor)	106.096	101.606	102.985	93.901	88.897
Kerbau (ekor)	2.283	1.240	1.380	1.020	783
Kambing (ekor)	129.322	121.388	122.613	109.765	86.904
Domba (ekor)	143.969	144.974	160.585	140.985	150.405
Babi (ekor)	28.652	3.470	3.484	2.950	7.170
Ayam Buras (ekor)	1.035.002	998.593	1.046.705	1.056.882	1.057.939
Ayam Ras Petelur (ekor)	6.836.394	7.360.499	8.984.156	8.997.220	10.770.000
Ayam Ras Pedaging (ekor)	12.108.346	12.000.799	13.400.344	13.413.718	12.875.430
Itik (ekor)	393.747	394.687	411.238	418.224	420.320

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Pada sektor peternakan, selama lima tahun terakhir untuk jumlah populasi ternak mengalami fluktuasi. Pada tahun 2024, jenis ternak ayam ras pedaging merupakan populasi tertinggi yaitu sebanyak 12.875.430 ekor dan untuk jenis ternak dengan jumlah populasi terendah yaitu ternak sapi perah dengan jumlah 91 ekor.

Perdagangan

Sektor Perdagangan merupakan salah satu sektor perekonomian yang berkontribusi besar bagi perekonomian Kabupaten Deli Serdang. Peran sektor perdagangan sangat penting dalam ekonomi secara keseluruhan dengan memfasilitasi pertukaran barang dan jasa antara produsen dan konsumen, baik di dalam maupun di luar negeri. Capaian Urusan Perdagangan sebagai berikut:

Tabel 2. 92
Capaian Kinerja Bidang Urusan Perdagangan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Kontribusi Sektor Perdagangan;	17,53	17,78	17,74	17,60	17,79

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB (%)					
Persentase Alat UTTP Tertera (%)	95	95	95	95	95
Nilai Ekspor (Rp juta)	3.129.446,37	4.600.600,37	3.897.838,08	2.194.704,77	5.115.421,64
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	60
Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	99,20	99,30	98,50	48,80	75,80
Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB mengalami peningkatan setiap tahun dalam kurun waktu 2020-2024. Sektor tersebut berkontribusi sebesar 17,53 persen pada tahun 2020 mengalami peningkatan pada tahun 2024 mencapai 17,79 persen. Selanjutnya, nilai ekspor Kabupaten Deli Serdang juga mengalami peningkatan dari Rp3.129.446,37 juta pada tahun 2020 menjadi Rp5.115.421,64 juta pada tahun 2024. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) pada tahun 2024 sebesar 60 persen. Persentase kinerja realisasi pupuk pada tahun 2020 sebesar 99,20 persen, menurun menjadi 97,30 persen pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 menjadi 98,50 persen. Pada taun 2023 menjadi 48,80 persen, namun meningkat menjadi 75,80 persen pada tahun 2024. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku menunjukkan konsistensi mencapai 95,00 persen dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Hal ini mengindikasikan kepatuhan dan

pengawasan yang stabil pada alat ukur.

Perindustrian

Industri merupakan bidang perekonomian yang terlibat dalam produksi barang menggunakan teknologi dan tenaga kerja. Sektor industri merupakan pilar penting dalam perekonomian dan memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Sektor tersebut merupakan sektor yang berkontribusi paling besar terhadap perekonomian Kabupaten Deli Serdang. Capaian Urusan Perindustrian sebagai berikut:

Tabel 2. 93
Capaian Kinerja Bidang Urusan Perindustrian Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil dan Menengah (%)	15,49	42,22	14,73	74,78	554,60
Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota (IKM)	162	510	253	1.474	19.106
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	30	30	30	30	56
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	30	30	30	30	56
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota (%)	30	30	30	30	56
Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (%)	70	70	70	70	70

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah pada tahun 2020 mencapai 15,49 persen dan meningkat menjadi 554,60 persen pada tahun 2024. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah

(IKM) di kab/kota mengalami peningkatan dari 162 IKM pada tahun 2020 menjadi 510 IKM pada tahun 2021, kemudian turun menjadi ke 253 IKM pada tahun 2022. Namun kembali meningkat menjadi 1.474 IKM pada tahun 2023 dan juga meningkat menjadi 19.106 pada tahun 2024. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait dan persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait serta persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota secara konsisten mencapai 30 persen dari tahun 2020 hingga tahun 2023 dan meningkat menjadi 56 persen pada tahun 2024. Selanjutnya, tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini konsisten mencapai 70 persen dari tahun 2020 hingga tahun 2024.

Sektor industri merupakan salah satu indikator dalam menentukan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Deli Serdang, sekaligus juga dapat mendukung peningkatan PDRB ke arah yang lebih positif jika dikelola dengan baik. Dilihat dari keberadaan wilayah Kabupaten Deli Serdang yang mengelilingi Kota Medan yang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara, dengan akses infrastruktur yang terhubung dengan baik seperti darat, laut dan udara memberikan peluang bagi Kabupaten Deli Serdang untuk dapat lebih mengembangkan sektor industri. Perusahaan industri pengolahan dibagi dalam 4 golongan yaitu:

- Industri Besar (banyaknya tenaga kerja 100 orang atau lebih)
- Industri Sedang (banyaknya tenaga kerja 20-99 orang)
- Industri Kecil (banyaknya tenaga kerja 5-19 orang)
- Industri Rumah Tangga (banyaknya tenaga kerja 1-4 orang)

Penggolongan perusahaan industri pengolahan ini semata-mata hanya didasarkan kepada banyaknya tenaga kerja yang bekerja, tanpa memperhatikan apakah perusahaan itu menggunakan mesin tenaga atau tidak, serta tanpa memperhatikan besarnya modal perusahaan itu.

2.4.7. Penunjang Urusan Pemerintahan

Perencanaan Pembangunan

Dalam mencapai tujuan pembangunan suatu wilayah tentu diperlukan perencanaan pembangunan wilayah. Perencanaan pembangunan akan menghasilkan kebijakan dan program yang efektif dan efisien dalam meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Capaian indikator Urusan Perencanaan Pembangunan sebagai berikut.

Tabel 2. 94
Capaian Kinerja Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Capaian Indikator Sasaran RPJMD (%)	73	75	76	77	79
Total Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja (poin)	64,39 (B)	67,10 (B)	70,18 (BB)	71,21 (BB)	71,79 (BB)
Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Persentase capaian indikator sasaran RPJMD pada tahun 2020 sebesar 73 persen dan meningkat menjadi 79 persen pada tahun 2024. Total Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja pada tahun 2020 yaitu 64,39 poin atau kategori B dan pada tahun 2024 menjadi 71,79 poin atau kategori BB. Selanjutnya persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dari tahun 2020 hingga tahun 2024 mencapai 100 persen.

Keuangan

Keuangan merupakan hal penting menyangkut kemampuan fiskal suatu daerah dalam mengembangkan wilayahnya. Pengelolaan keuangan berperan penting bagi efektivitas dan efisiensi dalam menunjang pembangunan daerah. Capaian indikator Urusan Keuangan sebagai berikut.

Tabel 2. 95
Capaian Kinerja Bidang Urusan Keuangan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah (%)	-8,62	12,77	14,16	3,92	10,99
Persentase Pajak terhadap PDRB (%)	0,54	0,58	0,60	0,57	0,58
Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Level)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (%)	24,32	26,22	27,92	27,24	27,01
Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan (%)	16,57	21,01	19,64	10,60	18,83
Rasio PAD (%)	24,28	26,17	27,92	27,24	27,01
Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) (%)	67,01	68,61	66,27	65,52	63,07

Sumber: Bapenda dan BKAD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah tahun 2024 sebesar 10,99 persen, meningkat dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar 3,92 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan pajak daerah mulai meningkat dalam menghasilkan pendapatan bagi Kabupaten Deli Serdang. Persentase pajak terhadap PDRB pada tahun 2020 sebesar 0,54 persen dan meningkat menjadi 0,58 persen pada tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang juga mampu mempertahankan akuntabilitas kinerja keuangannya yang dilihat dari konsistennya nilai Opini BPK sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 berada pada kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Jika dinilai dari tingkat kemandirian daerah Kabupaten Deli Serdang semakin meningkat dari 24,32 persen pada tahun 2020 mencapai 27,92 persen pada tahun 2022, namun terjadi penurunan menjadi sebesar 27,01 persen pada tahun 2024. Hal ini menjadi perhatian Kabupaten Deli Serdang dalam meningkatkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan pada tahun 2020 sebesar 16,57 persen dan meningkat menjadi 18,83 persen pada tahun 2024. Rasio PAD pada tahun 2020 sebesar 24,28 persen pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 27,01 pada tahun 2024. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) pada tahun 2020 sebesar

67,01 persen dan menurun menjadi 63,07 persen pada tahun 2024.

Kepegawaian, serta Pendidikan dan Pelatihan

Kepegawaian merupakan aspek penting bagi penyelenggaraan pemerintah. Dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menanggungjawabi tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan. Capaian indikator Urusan Kepegawaian, serta Pendidikan dan Pelatihan sebagai berikut.

Tabel 2. 96
Kinerja Bidang Urusan Kepegawaian, serta Pendidikan dan Pelatihan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Profesionalisme ASN (poin)	-	56,28	57,11	57,27	72,11
Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Fungsional (orang)	400	480	840	600	160
Persentase pegawai fungsional terhadap seluruh pegawai Pemerintah Daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (%)	0,60	0,80	0,97	20,90	10,65
Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (%)	0,65	0,70	0,77	53,90	13,65
Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan (Orang)	130	1.812	-	553	1.988
Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	74,10	75,69	77,05	79,74	90,14
Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	8,28	8,99	10,34	11,27	10,65
Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	11,02	11,77	12,18	12,71	13,65

Sumber: BKPSDM Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa Indeks Profesionalitas ASN mengalami peningkatan dari 56,28 poin pada tahun 2021 menjadi 72,11 poin pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kualitas ASN dalam menanggungjawabi pekerjaannya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Fungsional menurun dari 400 orang pada tahun 2020 menjadi 160 orang pada tahun 2024. Persentase pegawai fungsional terhadap seluruh pegawai Pemerintah Daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) meningkat

dari 0,60 persen pada tahun 2020 menjadi 10,65 persen pada tahun 2024. Selanjutnya, Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi belum optimal. Data tersebut mencatat bahwa hingga tahun 2024 terdapat sebesar 13,65 persen pegawai jabatan fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pegawai jabatan fungsional yang belum memiliki keahlian yang mumpuni pada bidangnya. Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan tahun 2020 sebanyak 130 orang dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 1.988 orang.

Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) pada tahun 2020 sebesar 74,10 persen dan meningkat menjadi 90,14 persen pada tahun 2024. Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) pada tahun 2020 sebesar 8,28 persen dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 10,65 persen. Selanjutnya Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) pada tahun 2020 sebesar 11,02 persen dan meningkat menjadi 13,65 persen pada tahun 2024.

Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan digunakan untuk mengukur dan menilai efektivitas, kinerja dalam mengelola PAD, tata kelola aset dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Capaian kinerja urusan manajemen keuangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 97
Capaian Kinerja Bidang Urusan Manajemen Keuangan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (%)	17,71	13,73	11,37	11,30	11,22
Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (%)	31,21	35,14	29,59	31,79	30,13
Manajemen Aset (poin)	4	4	4	4	4
Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (%)	2,31	4,28	5,54	3,76	4,65

Sumber: BKAD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD pada tahun 2020 sebesar 17,71 persen dan menurun menjadi 11,22 persen pada tahun 2024. Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran

PAD dalam APBD pada tahun 2020 sebesar 31,21 persen dan pada tahun 2024 menurun menjadi 31,13 persen. Manajemen aset dari tahun 2020 hingga tahun 2024 stabil dengan capaian 4 poin. Selanjutnya rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya pada tahun 2020 sebesar 2,31 persen dan meningkat menjadi 4,65 persen pada tahun 2024.

Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan memainkan peran penting dalam memajukan suatu negara atau wilayah, dengan menciptakan inovasi, meningkatkan daya saing, dan menemukan solusi atas tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Capaian indikator Urusan Penelitian dan Pengembangan sebagai berikut.

Tabel 2. 98
Kinerja Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Hasil Kajian yang Dimanfaatkan untuk Perumusan Kebijakan (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Hasil Kajian yang Dimanfaatkan untuk Perumusan Kebijakan merupakan indikator yang menggambarkan seberapa banyak implementasi dari kajian-kajian yang telah dilakukan oleh pemerintah. Implementasi dari kajian tersebut dituangkan dalam kebijakan pemerintah.

Pengawasan

Pengawasan merupakan proses penting dalam memastikan bahwa kegiatan, program, atau kebijakan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan yang baik akan memastikan tercapainya tujuan pembangunan, perlindungan kepentingan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Melalui pengawasan yang efektif, diharapkan tercipta tata kelola yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Capaian indikator Urusan Pengawasan sebagai berikut.

Tabel 2. 99
Kinerja Bidang Urusan Pengawasan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase OPD yang Memiliki Nilai Evaluasi AKIP Minimal B (%)	86,27	50,94	72,72	72,72	56,36
Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti (%)	76,50	76,83	78,73	76,00	79,71
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (level)	2,650	3,018	3,052	3,178	3,012
Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (level)	2+	2	3	3	3,27

Sumber: Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP minimal B di Kabupaten Deli Serdang cenderung mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 86,27 persen menjadi sebesar 56,36 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP minimal B dalam kategori Sangat Baik, namun kondisi di Kabupaten Deli Serdang mengalami penurunan menggambarkan bahwa dibutuhkan pengoptimalan untuk menunjang peningkatan evaluasi AKIP dan mewujudkan *Good Governance* di seluruh unit kerja.

Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti di Kabupaten Deli Serdang cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 76,50 persen menjadi sebesar 79,71 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kolaborasi dengan inspektorat, namun masih ada temuan-temuan yang tidak ditindaklanjuti. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 2,650 poin menjadi sebesar 3,012 poin pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa SPIP pada tahun 2024 berada pada level 3 membuktikan pengendalian satuan kerja telah terdokumentasikan dengan baik. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan dari tahun 2020 dengan level 2+ menjadi level 3,27 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa APIP sudah sesuai dengan standar dan praktik profesional dalam langkah awal memperbaiki peran dan layanan.

Sekretariat Daerah merupakan unit kerja di lingkungan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kepala daerah serta unsur pimpinan lainnya. Capaian indikator Urusan Sekretariat Daerah sebagai berikut.

Tabel 2. 100
Kinerja Bidang Urusan Sekretariat Daerah

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Kepatuhan Terhadap Pelayanan Publik (poin)	n/a	98,90	91,99	86,72	87,35
Nilai LPPD (poin)	2,469	2,442	3,068	-	-
Nilai SAKIP (poin)	64,39 (B)	67,08 (B)	70,18 (BB)	71,21 (BB)	71,79 (BB)
Indeks Kepuasan Masyarakat (poin)	81,68 (B)	82,75 (B)	83,58 (B)	84,97 (B)	90,25 (A)
Indeks Tatakelola Pengadaan (poin)	-	32,04	60,70	62,41	66,04

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Nilai Kepatuhan Terhadap Pelayanan Publik dari nilai 91,99 pada tahun 2022 menjadi nilai 87,35 pada tahun 2024. Nilai LPPD meningkat dari 2,442 poin pada tahun 2021 menjadi 3,068 poin pada tahun 2022. Untuk kinerja yang meningkat yaitu Nilai SAKIP dari nilai 71,21 pada tahun 2023 menjadi nilai 71,79 pada tahun 2024, Indeks Kepuasan Masyarakat dari nilai 84,97 pada tahun 2023 menjadi nilai 90,25 pada tahun 2024 dan Indeks Tata Kelola Pengadaan dari nilai 62,41 pada tahun 2023 menjadi nilai 66,04 pada tahun 2024.

2.5. Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2024

Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang disebut juga dengan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD) atau Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKU PD/IKK merupakan indikator kinerja sasaran RPJMD yang juga merupakan IKU pemerintah daerah, serta indikator kinerja sasaran seluruh Renstra Perangkat Daerah yang juga merupakan IKU perangkat daerah. Selain itu dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Capaian indikator kinerja daerah terdiri dari beberapa aspek yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah dan Aspek Pelayanan Umum (Terkait Pelayanan Dasar, Tidak Terkait Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Fungsi Penunjang Urusan). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 101
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2024

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2019)	Target					Realisasi					Persentase Realisasi	Predikat Kinerja	Perangkat Daerah
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT																
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	74,92	75,85	76,32	76,80	76,81	76,82	75,44	75,53	76,19	77,16	77,56	100,96	Sangat tinggi	Indikator Makro
2	Persentase Kemiskinan	%	4,13	4,10	4,09	4,01	4,01	4	3,88	4,01	3,62	3,44	3,44	86,00	Tinggi	Indikator Makro
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	n/a	63	63	64	64	64	61,9	59	57,37	61,18	63,45	99,14	Sangat tinggi	IKU Kabupaten
4	Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	n/a	75	80	85	90	95	93,5	80,13	84,50	89	90,5	95,26	Sangat tinggi	IKU Kabupaten
5	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	n/a	A	A	CC	CC	B	CC	CC	CC	B	BB	100,00	Sangat tinggi	
6	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,92	9,96	9,98	10,00	10,12	10,13	10,09	10,1	10,27	10,28	10,29	101,58	Sangat tinggi	IKU Kabupaten
7	Umur harapan hidup	Tahun	71,31	71,52	71,62	71,7	71,87	71,97	71,61	71,77	72,07	72,31	73,81	102,56	Sangat tinggi	IKU Kabupaten
8	Jalan dalam kondisi baik	%	70,11	72	73	74	75	76	72,14	73,19	74,24	75,31	76,34	100,45	Sangat tinggi	IKU Kabupaten

No.	Aspek/Focus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2019)	Target					Realisasi					Persentase Realisasi	Predikat Kinerja	Perangkat Daerah
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
9	Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	76,19	75	76	78	79	80	75,8	76,65	78,04	79,02	80,04	100,05	Sangat tinggi	IKU Kabupaten
10	Cakupan Pelayanan Air Minum	%	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	80	75,12	76,17	76,83	76,83	78,2	97,75	Sangat tinggi	IKU Kabupaten
11	Persentase Areal Kawasan Kumuh	%	0,167	0,16	0,15	0,14	0,13	0,12	0,162	0,14	0,158	0,14	0,13	87,51	Tinggi	IKU Kabupaten
12	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	84,5	85,5	86,5	87,5	88,5	90	84,73	85,6	85,80	85,8	78	86,67	Tinggi	IKU Kabupaten
13	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	Sangat tinggi	IKU Kabupaten
14	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	56,27	61,34	70	70,01	71	72	64,39	67,08	70,18	71,21	71,79	99,71	Sangat tinggi	IKU Kabupaten
15	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	56,6	64,15	67,92	71,69	75,47	77,35	82,71	67,22	83,57	84,97	90,25	116,68	Sangat tinggi	IKU Kabupaten
16	Rata-rata harapan lama sekolah	Tahun	13,34	n/a	n/a	P-RPJMD	13,37	13,38	n/a	n/a	13,38	13,39	13,4	100,15	Sangat tinggi	IKU Kabupaten
17	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	n/a	n/a	n/a	P-RPJMD	78,4	78,7	n/a	n/a	n/a	75,27	80,04	101,70	Sangat tinggi	IKU Kabupaten

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2019)	Target					Realisasi					Persentase Realisasi	Predikat Kinerja	Perangkat Daerah
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
18	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Poin	n/a	n/a	n/a	3,175	3,2	3,24	2,432	3,139	3,28	3,52	3,74	115,43	Sangat tinggi	
19	Rasio Gini / Ketimpangan Pendapatan	Poin	0,2732	n/a	n/a	0,263	0,262	0,261	0,312	0,263	0,270	0,295	0,262	100,38	Sangat tinggi	Indikator Makro
20	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	94,26	n/a	n/a	68	69	70	n/a	n/a	66,84	67,62	67,57	96,53	Sangat tinggi	IKU Kabupaten
ASPEK DAYA SAING DAERAH																
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,15	5,17	5,2	5,13	5,16	5,2	-1,78	2,23	4,70	5,34	5,36	103,08	Sangat tinggi	Indikator Makro
2	PDRB	ADHB /Triliun	109,33	122,02	133,49	146,04	159,77	173,5	110,15	59,39	127,55	139,10	151,45	87,29	Tinggi	IKU Kabupaten
3	Inflasi	%	3,12	2,93	2,81	5,95	3±1	3±1	1,76	1,7	6,10	2,19	1,8	90,00	Tinggi	Indikator Makro
4	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN dan PMA)	PMDN /Rp. Juta	1.518.288,50	1.548.654,20	1.548.654,20	1.563.837,20	2.772.893,58	2.772.893,58	1.726.633,30	2.704.206,50	2.718.192,00	2.636.565	4.662.951,54	168,16	Sangat tinggi	IKU Kabupaten
		PMA/ US $	179.608,50	183.200,60	184.996,80	184.996,80	104.529,62	104.529,62	111.287,90	61.492,70	83.092,40	120.071	148.372,66	141,94	Sangat tinggi	IKU Kabupaten
5	Tingkat Penganggura n Terbuka (TPT)	%	7,06	5,74	5,57	7,9	7,5	6,9	9,5	9,13	8,79	8,62	8,02	116,23	Sangat tinggi	Indikator Makro
ASPEK PELAYANAN UMUM																
Urusan Wajib																

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2019)	Target					Realisasi					Persentase Realisasi	Predikat Kinerja	Perangkat Daerah
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
A	**Terkait Pelayanan Dasar**															
1	**Pendidikan**															
	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	84,29	86,35	87,13	86,04	86,24	86,34	85,57	85,85	86,08	86,15	86,43	100,10	Sangat tinggi	Dinas Pendidikan
	APM SD/MI	%	99,64	99,71	99,75	99,75	99,77	99,79	99,72	99,76	99,77	99,78	99,8	100,01	Sangat tinggi	
	APM SMP/MTs	%	97,78	97,81	98,16	98,41	98,61	98,81	98,02	98,25	98,48	98,63	98,17	99,35	Sangat tinggi	
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan 7 - 15 Tahun	Poin	n/a	n/a	n/a	99,47	99,53	99,6	n/a	n/a	97,48	98,13	98,01	98,40	Sangat tinggi	
	Persentase Satuan Pendidikan Implementasi Kurikulum	%	n/a	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	74	74	87	87,00	Tinggi	
	Rasio Guru per siswa	%	n/a	n/a	n/a	1 : 17	1 : 16	1 : 16	n/a	n/a	1 : 14	1 : 14	1 : 14	114,29	Sangat tinggi	
2	**Kesehatan**															
	Cakupan pelayanan kesehatan balita	%	94,22	100	100	100	100	100	93,83	89,55	89,30	92,32	98,46	98,46	Sangat tinggi	Dinas Kesehatan, RSUD Deli Serdang
	Persentase stunting pada balita	%	25,68	23,44	22,32	21,2	16	14	22,11	12,50	13,90	33,80	0,15	198,93	Sangat tinggi	
	Cakupan pelayanan	%	100	100	100	100	100	100	84,43	92,06	96,07	97,00	97,00	97,00	Sangat tinggi	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2019)	Target					Realisasi					Persentase Realisasi	Predikat Kinerja	Perangkat Daerah
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	kesehatan pada usia pendidikan dasar															
	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	%	94,48	100	100	100	100	100	95,86	97,11	97,55	97,76	99,65	99,65	Sangat tinggi	
	Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi	%	59,32	100	100	100	100	100	86,69	88,34	90,97	87,66	91,65	91,65	Sangat tinggi	
	Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita diabetes melitus	%	70,07	100	100	100	100	100	92,43	87,64	92,65	92,30	86,69	86,69	Tinggi	
	Persentase pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	%	84,06	100	100	100	100	100	77,62	77,12	77,64	96,86	75,24	75,24	Sedang	
	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	%	46,4	72	80	85	90	98	56,24	55,28	79,01	84,15	86,63	88,40	Tinggi	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2019)	Target					Realisasi					Persentase Realisasi	Predikat Kinerja	Perangkat Daerah
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	%	94,12	100	100	94,44	95	97,05	97,06	97,06	97,06	97,06	100	103,04	Sangat tinggi	
	Persentase Rumah Sakit sesuai standar	%	100	33,3	33,3	33,3	100	90	90,00	90,00	90,91	87,50	100	111,11	Sangat tinggi	
	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Poin	0,26	n/a	0,4	0,5	0,6	0,7	0,26	0,33	0,41	0,44	0,47	67,14	Sedang	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	84,01	n/a	82	82,2	82,5	82,7	84,01	83,12	83,03	84,50	88,64	107,18	Sangat tinggi	
	Nilai AKIP	Poin	76,06	n/a	72	74	76	78	76,06	79,94	79,94	82,34	82,53	105,81	Sangat tinggi	
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	94,31	100	100	100	100	100	90,92	94,31	97,35	98,18	95,76	95,76	Sangat tinggi	
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	92,75	100	100	100	100	100	93,41	92,75	97,39	98,53	94,03	94,03	Sangat tinggi	
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	95,56	100	100	100	100	100	95,00	95,56	94,77	93,17	96,62	96,62	Sangat tinggi	
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%	86,65	100	100	100	100	100	83,36	86,98	86,25	88,24	87,31	87,31	Tinggi	
	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	%	65,02	100	100	100	100	100	64,67	66,32	126,19	111,36	103,40	103,40	Sangat tinggi	

No.	Aspek/Focus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2019)	Target					Realisasi					Persentase Realisasi	Predikat Kinerja	Perangkat Daerah
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	%	36,31	100	100	100	100	100	38,81	36,31	49,13	85,16	107,86	107,86	Sangat tinggi	
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**															
	Persentase bangunan air dalam kondisi baik	%	n/a	n/a	n/a	80	81	82	n/a	n/a	68,04	68,32	82,04	100,05	Sangat tinggi	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
	Jumlah badan usaha yang tertib	Badan Usaha	n/a	n/a	n/a	15	15	15	n/a	n/a	20	15	15	100,00	Sangat tinggi	
	Jumlah dokumen sistem informasi jasa konstruksi	Dokumen	n/a	n/a	n/a	3	3	3	n/a	n/a	3	2	3	100,00	Sangat tinggi	
	Jumlah SDM Jasa Konstruksi yang	Orang	n/a	n/a	n/a	50	50	50	n/a	n/a	28	62	116	232,00	Sangat tinggi	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2019)	Target					Realisasi					Persentase Realisasi	Predikat Kinerja	Perangkat Daerah
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	bersertifikat terampil															
	Panjang jaringan drainase yang dikelola dan dikembangkan	m	n/a	n/a	n/a	17.850	n/a	n/a	n/a	n/a	14.809,80	n/a	n/a	-	Sangat Rendah	
	Persentase Instansi Pemerintah yang mendapat pendampingan pembangunan dan Pengelolaan Gedung Kantor	%	n/a	n/a	n/a	80	90	100	n/a	n/a	80	90	100	100,00	Sangat tinggi	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	Persentase Kapasitas yang dapat Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum	%	n/a	n/a	n/a	85,5	95	100	n/a	n/a	85,5	77,25	71	71,00	Sedang	
	Terbangunnya Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	%	n/a	n/a	n/a	41	50	60	n/a	n/a	41	50	54,37	90,62	Tinggi	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2019)	Target					Realisasi					Persentase Realisasi	Predikat Kinerja	Perangkat Daerah
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	Terlaksananya Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	%	n/a	n/a	n/a	58	64	70	n/a	n/a	58	64	64,3	91,86	Sangat tinggi	
	Luas Permukiman Pengembangan System Drainase Kabupaten yang Terlayani	%	n/a	n/a	n/a	85	95	100	n/a	n/a	85	95	100	100,00	Sangat tinggi	
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**															
	Persentase Penyediaan/ Perbaikan Rumah akibat Bencana Alam/Sosial /Relokasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	Sangat tinggi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
	Tingkat kontribusi penanganan kawasan	%	n/a	n/a	n/a	80	85	90	n/a	n/a	63	n/a	n/a	-	Sangat Rendah	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2019)	Target					Realisasi					Persentase Realisasi	Predikat Kinerja	Perangkat Daerah
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	permukiman kumuh															
	Persentase Rumah Layak Huni	%	n/a	n/a	n/a	99,53	99,63	99,73	n/a	n/a	96,98	97,88	97,94	98,21	Sangat tinggi	
5	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**															
	Persentase terlaksanany a peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	Sangat tinggi	Sekretariat Daerah -Kesra
	Persentase penyelesaian gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat	%	100	n/a	n/a	100	100	100	74	71	70	80	80	80,00	Tinggi	Satpol PP
6	**Sosial**															
	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapat	%	100	n/a	n/a	100	100	100	100	100	80	43	22	22,00	Sangat Rendah	Dinas Sosial

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2019)	Target					Realisasi					Persentase Realisasi	Predikat Kinerja	Perangkat Daerah
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	Rehabilitasi Sosial															
	Persentase Masyarakat yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	80	n/a	n/a	50	60	70	66	90	71,83	53	88	125,71	Sangat tinggi	
	Persentase Korban bencana yang mendapatkan penanganan	%	100	n/a	n/a	100	100	100	100	100	99	98	100	100,00	Sangat tinggi	
	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Diberdayakan	%	75	n/a	n/a	76	79	85	100	80	100	92	61	71,76	Sedang	
	Persentase Areal Pemakaman yang dikelola	%	n/a	n/a	n/a	80	85	85	100	100	100	100	85	100,00	Sangat tinggi	
B	**Tidak Terkait Pelayanan Dasar**															
1	**Tenaga Kerja**															
	Persentase kasus perselisihan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	Sangat tinggi	Dinas Ketenag

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2019)	Target					Realisasi					Persentase Realisasi	Predikat Kinerja	Perangkat Daerah
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	hubungan industrial yang diselesaikan															akerjaan
	Persentase penempatan tenaga kerja terdaftar	%	70	71	72	73	74	75	61	53,6	75,52	67,5	61,69	82,25	Tinggi	
	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	n/a	n/a	n/a	65	70	72	n/a	31,97	55,44	80,2	n/a	-	Sangat Rendah	
2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**															
	Persentase keadilan dan kesetaraan gender	%	100	n/a	n/a	30,76	30,91	31,15	29,52	41,95	30,76	30,75	30,75	98,72	Sangat tinggi	Dinas P3AP2KB
	Persentase perempuan bekerja	%	100	n/a	n/a	40,56	40,99	41,43	36,28	37,7	37,57	34,94	35,45	85,57	Tinggi	
	Penyelesaian Pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	%	100	n/a	n/a	86,39	86,52	86,78	85,91	96,35	99	100	100	115,23	Sangat tinggi	
3	**Pangan**															
	Skor Pola Pangan		58	n/a	n/a	64	66	68	59,77	64,1	68,5	68,5	68,5	100,74	Sangat tinggi	Dinas Ketaha

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2019)	Target					Realisasi					Persentase Realisasi	Predikat Kinerja	Perangkat Daerah
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	Harapan (PPH)															nan Pangan
4	**Pertanahan**															
	Persentase ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	%	n/a	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100	100	42,5	42,50	Sangat Rendah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
5	**Lingkungan Hidup**															
	Persentase Ketersediaan Instrumen Pencegahan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	%	n/a	25	35	45	55	55	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	Dinas Lingkungan Hidup
	Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	Ha	5	8	12	18	25	35	6	6	-	10	-	-	Sangat Rendah	
	Persentase kualitas badan air yang memenuhi baku mutu lingkungan	%	n/a	80	80	80	80	80	80	80	60	70	77	96,25	Sangat tinggi	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2019)	Target					Realisasi					Persentase Realisasi	Predikat Kinerja	Perangkat Daerah
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	Persentase kualitas udara yang memenuhi baku mutu lingkungan	%	n/a	82	82	82	84	84	82	82	80	80	80	95,24	Sangat tinggi	
	Persentase Pelaku Usaha Taat Izin PPLH	%	10	15	20	25	30	35	10	10	25	25	9	25,71	Sangat Rendah	
	Anugerah Adiwiyata Mandiri	Unit Sekolah	21	24	27	30	33	36	0	0	1	1	-	-	Sangat Rendah	
	Persentase Pengurangan Sampah	%	12	14	16	22	28	30	13,73	14	15	22	20,73	69,10	Sedang	
	Persentase Penanganan Sampah / Pengelolaan Sampah	%	28	35	56	45	55	65	3,08	60,75	40	41	40,65	62,54	Rendah	
	Persentase Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luasan wilayah kota/kawasan perkotaan	%	14,5	n/a	n/a	16,6	17,5	18,3	n/a	n/a	16,6	17,5	15,6	85,25	Tinggi	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**															

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2019)	Target					Realisasi					Persentase Realisasi	Predikat Kinerja	Perangkat Daerah
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	Persentase Terlaksananya Penataan Administrasi Kependudukan	%	68	100	100	100	100	100	75	75	80	80	97,75	97,75	Sangat tinggi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dukcapil	%	78	81	83	85	87	90	80	83	84	84	86,25	95,83	Sangat tinggi	
7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**															
	Persentase desa cepat berkembang	%	13,16	n/a	n/a	26,32	32,89	39,47	10	20	21,31	31,57	52,1	132,00	Sangat tinggi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase desa mandiri	%	n/a	n/a	n/a	1,85	3,16	3,95	0,52	1,05	2,63	4,47	7,1	179,75	Sangat tinggi	
	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari pelanggaran hukum	%	100	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100	100	99,47	99,47	Sangat tinggi	
8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**															

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2019)	Target					Realisasi					Persentase Realisasi	Predikat Kinerja	Perangkat Daerah
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	Persentase pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif	%	100	n/a	n/a	73	73	74	67,56	66,22	66,22	67,17	58,08	78,49	Tinggi	Dinas P3AP2KB
	Persentase Partisipasi PUS dalam ber-KB	%	100	n/a	n/a	65	67	70	67,56	66,22	66,22	67,17	58,08	82,97	Tinggi	
	Persentase Tingkat Pengetahuan Tenaga Pendamping Kelompok Catur Bina	%	100	n/a	n/a	62	67	72	49	52	54	59	63	87,50	Tinggi	
9	**Perhubungan**															
	Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Perhubungan yang memadai	%	39	54	59	56	65	72	24,77	39,34	56,5	68	71,66	99,53	Sangat tinggi	Dinas Perhubungan
	Peningkatan Pengawasan Jalan	%	60	60	65	66	68	70	56,25	59,38	66,67	70	70	100,00	Sangat tinggi	
10	**Komunikasi dan Informatika**															
	Persentase Pengelolaan layanan Informasi	%	n/a	n/a	73,73	81,82	90,91	100	66,67	54,54	72,72	90,91	100	100,00	Sangat tinggi	Dinas Komunikasi, Informa

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2019)	Target					Realisasi					Persentase Realisasi	Predikat Kinerja	Perangkat Daerah
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	dan Komunikasi Publik yang berkualitas															tika, Statistik dan Persandian
	Persentase Peningkatan Pengelolaan layanan aplikasi terintegrasi	%	n/a	n/a	42,57	74,16	90,71	100	70	42,57	71,56	90,71	100	100,00	Sangat tinggi	
11	**Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**															
	Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	Usaha Mikro	n/a	n/a	63,05	63,35	64,24	65,04	n/a	62,62	63,06	62,41	52,34	80,47	Tinggi	Dinas Koperasi dan UKM
	Persentase Koperasi Aktif	Koperasi	n/a	n/a	79,41	80,32	81,24	83,07	76,47	77,11	77,5	80,9	80,95	97,45	Sangat tinggi	
12	**Penanaman Modal**															
	Persentase realisasi investasi	%	n/a	n/a	n/a	90	90	90	n/a	n/a	n/a	102,17	159,46	177,18	Sangat tinggi	Dinas PMPTSP
	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	%	69,03	n/a	n/a	100	100	100	67,63	56,58	63,89	62,91	66,82	66,82	Sedang	Bapenda
13	**Statistik**															

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2019)	Target					Realisasi					Persentase Realisasi	Predikat Kinerja	Perangkat Daerah
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	Persentase pengguna data statistik sektoral sebagai dasar perencanaan dan evauasi pembangunan	%	n/a	n/a	32,26	86,45	72,58	83,87	n/a	17,74	40,32	72,58	100	119,23	Sangat tinggi	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
14	**Persandian**															
	Persentase penyelenggaraan Persandian perangkat daerah untuk Pengamanan Informasi	%	n/a	n/a	28,47	46,95	69,66	100	n/a	8,47	33,9	69,66	100	100,00	Sangat tinggi	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
15	**Perpustakaan**															
	Persentase pengunjung perpustakaan	%	10	12	12	12	13	13	10	8	10	20,4	38,6	296,92	Sangat tinggi	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	Jumlah perpustakaan aktif	Jumlah	923	958	969	980	991	1002	618	618	618	618	1.763	175,95	Sangat tinggi	
16	**Kearsipan**															
	Nilai audit kearsipan internal	Nilai (kategori)	40 (Buruk)	45 (buruk)	50 (kurang)	55 (kurang)	61 (cukup)	76 (baik)	n/a	89,47	95	70,12	63,77	83,91	Tinggi	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	Nilai audit kearsipan eksternal	Nilai (kategori)	Baik	76 (baik)	78 (baik)	80 (baik)	82 (baik)	83 (baik)	n/a	89,09	91,67	74,59	79,53	95,82	Sangat tinggi	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2019)	Target					Realisasi					Persentase Realisasi	Predikat Kinerja	Perangkat Daerah
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
C.	**Urusan Pilihan**															
1	**Perikanan**															
	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	28.096,87	27.886,70	28.166	28.447	57.067	60.100	26.070,83	43.897,70	40.498	32.426,56	39.408,46	65,57	Rendah	Dinas Perikanan
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	78.669,29	65.776,56	66.697	67.765	78.777	80.100	62.241,09	57.068,44	58.746	53.565,51	44.803,9	55,93	Rendah	
	Persentase stakeholder perikanan yang berwawasan dan sadar hukum	%	n/a	100	100	100	100	100	-	100	-	-	-	-	Sangat Rendah	
	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	Ton	3.580,76	3.496,40	3.535	3.574	3.617	3.671	3.473,34	3.465	3.144	2.778,85	2.522,1	68,70	Sedang	
	Jumlah pemasaran hasil perikanan	Ton	103.630,07	100.880,19	102.880	104.880	106.880	108.880	97.292,37	110.958,09	102.278	87.921,22	87.313,71	80,19	Tinggi	
2	**Pertanian**															
	Peningkatan Jumlah Produksi Padi	Ton	491.108	427.952	436.494	445.035	453.578	462.120	407.954	450.378	468.336	533.088	499.619,5	108,11	Sangat tinggi	Dinas Pertanian
	Peningkatan Jumlah Produksi Ubi Kayu	Ton	97.097	88.547	91.274	93.147	96.147	99.147	102.815	101.915	85.712	132.015	88.904,26	89,67	Tinggi	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2019)	Target					Realisasi					Persentase Realisasi	Predikat Kinerja	Perangkat Daerah
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	Peningkatan Jumlah Produksi Cabai Merah	Ton	3.362	5.222	5.278	5.488	5.796	5.992	2.245	2.859	2.416	4.128,5	5.140,7	85,79	Tinggi	
	Peningkatan Jumlah Produksi Bawang Merah	Ton	279,1	510	585	585	630	630	657	1.066	485	481,25	437	69,37	Sedang	
	Peningkatan Jumlah Produksi Pisang Barangan	Ton	14.847,3	4.163	4.248	4.408	4.680	4.728	8.232	7.094	10.087	18.320,2	10.446	220,94	Sangat tinggi	
	Peningkatan Jumlah Produksi Salak	Ton	5.191,3	1.680	1.780	1.880	2.010	2.140	7.385	6.967	9.438	3.277,9	17.700	827,10	Sangat tinggi	
	Peningkatan Jumlah Produksi Kakao	Ton	3.814	3.831	3.858	3.885	3.912	3.939	3.821	3.801	838	2.072,43	8.288	210,41	Sangat tinggi	
	Peningkatan Jumlah Populasi Sapi	Ekor	96.462	111.476	119.285	127.658	136.598	146.131	104.582	103.928	104.946	94.375	94.332	64,55	Rendah	
	Peningkatan Jumlah Populasi domba	Ekor	134.267	143.969	152.049	163.292	171.457	181.744	143.969	266.362	278.026	250.750	174.388	95,95	Sangat tinggi	
3	**Kehutanan**															
4	**Energi dan Sumber Daya Mineral**															
5	**Perdagangan**															

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2019)	Target					Realisasi					Persentase Realisasi	Predikat Kinerja	Perangkat Daerah
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	%	30,99	16	16,5	16,90	17	18	17,53	17,78	17,74	17,60	17,79	98,83	Sangat tinggi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6	**Perindustrian**															
	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri	%	16,70	30	30,50	30,90	31	32	31,05	31,41	30,59	29,03	28,95	90,47	Tinggi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7	**Transmigrasi**															
D	**Fungsi Penunjang Urusan**															
1	**Pembinaan dan Pengawasan**															
	Persentase (%) Realisasi Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan dibanding target tahun berkenaan	%	n/a	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100	100	100	100,00	Sangat tinggi	Sekretariat Daerah - Administrasi Pembangunan
	Persentase (%) Realisasi Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi	%	n/a	n/a	n/a	100	100	100	n/a	n/a	100	100	100	100,00	Sangat tinggi	

No.	Aspek/Focus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2019)	Target					Realisasi					Persentase Realisasi	Predikat Kinerja	Perangkat Daerah
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	Pembangunan dibanding target tahun berkenaan															
	Persentase Data dan Informasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	n/a	n/a	n/a	100	100	100	n/a	89,6	92,57	76,14	71,55	71,55	Sedang	Sekretariat Daerah - Hukum
	Level Maturitas SPIP	Level	2,65	n/a	3	3,1	3,2	3,2	2,65	3,018	3,052	3,178	3,012	94,13	Sangat tinggi	Inspektorat
	Level Kapabilitas APIP	Level	2+	n/a	3	3	3	3	2+	2	3	3	3,27	109,00	Sangat tinggi	
	Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	Level	n/a	n/a	2,9	3	3	3	n/a	2,87	2,87	2,61	2,516	83,87	Tinggi	
2	**Perencanaan**															
	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai	n/a	n/a	n/a	72	75	77	n/a	78,77	79	81,04	77,28	100,36	Sangat tinggi	Bappedalitbang
3	**Penelitian dan Pengembangan**															
	Persentase Pemanfaatan Hasil Kajian yang	%	n/a	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	Sangat tinggi	Bappedalitbang

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2019)	Target					Realisasi					Persentase Realisasi	Predikat Kinerja	Perangkat Daerah
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	digunakan dalam rancangan/rumusan kebijakan															
	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	n/a	n/a	n/a	44	46	48	n/a	59,62	50,17	59,1	60,65	126,35	Sangat tinggi	
4	**Keuangan**															
	Peningkatan efisiensi penghematan anggaran dari pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan	%	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6,7	7,1	5,5	5,55	3,5	63,64	Rendah	Sekretariat Daerah - Pengadaan Barang dan Jasa
	Persentase Penyusunan APBD dan Laporan Keuangan Daerah sesuai SAP yang tepat waktu	%	100	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	Sangat tinggi	Badan Keuangan Aset dan Daerah
	Persentase aset yang terinventarisasi	%	100	n/a	n/a	100	100	100	n/a	100	100	100	100	100,00	Sangat tinggi	
5	**Kepegawaian serta Pendidikan**															

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2019)	Target					Realisasi					Persentase Realisasi	Predikat Kinerja	Perangkat Daerah
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	dan Pelatihan															
	Indeks profesionalitas ASN	Poin	n/a	n/a	n/a	69	71	73	45,92	46,71	49,81	57,27	72,11	98,78	Sangat tinggi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Persentase pelaksanaan diklat berdasarkan AKD	%	n/a	n/a	n/a	60	80	100	20	40	60	80	23,76	23,76	Sangat Rendah	
6	**Pendukung KDH dan WKDH**															
	Persentase terlaksanany a koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah	%	100	100	100	100	100	100	85	75	100	100	100	100,00	Sangat tinggi	Sekretariat Daerah - Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	Persentase tercapainya Iuran APKASI dan Iuran FORSESDASI	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	75	75,00	Sedang	Sekretariat Daerah - Tata Pemerintahan
	Jumlah Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Kegiatan	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100,00	Sangat tinggi	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2019)	Target					Realisasi					Persentase Realisasi	Predikat Kinerja	Perangkat Daerah
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	Persentase kecamatan berkinerja baik	%	n/a	n/a	n/a	100	100	100	-	-	100	-	-	-	Sangat Rendah	
	Persentase realisasi penataan daerah otonomi baru	%	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	
	Realisasi laporan perencanaan pembangunan daerah	Laporan	100	n/a	n/a	3	3	3	3	3	3	3	3	100,00	Sangat tinggi	
	Persentase kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	%	n/a	70	75	80	90	100	68	72	80	100	100	100,00	Sangat tinggi	Sekretariat Daerah - Organisasi
	Nilai Komponen pengungkit reformasi birokrasi	Nilai (kategori)	n/a	24,30	24,50	25,01	30,50	30,75	19,47	23,24	26,42	n/a	n/a	-	Sangat Rendah	
	Persentase Nilai SKM OPD baik pada Skala Minimal 77,05	%	n/a	40	50	55	60	65	77,35	81,13	100	100	100	153,85	Sangat tinggi	
	Peningkatan kapasitas dan kualitas organisasi layanan	Kategori	Inisiasi	Esensi	Proaktif	Proaktif	Proaktif	Proaktif	Inisiasi	Esensi	Proaktif	Proaktif	Proaktif	100,00	Sangat tinggi	Sekretariat Daerah - Pengad

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2019)	Target					Realisasi					Persentase Realisasi	Predikat Kinerja	Perangkat Daerah
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	pengadaan barang/jasa															aan Barang dan Jasa
	Persentase Tercapainya pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	Sangat tinggi	
7	**Pendukung DPRD**															
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	%	100	100	100	85	90	95	78	78,44	87,23	89,01	91,05	95,84	Sangat tinggi	Sekretariat DPRD
8	**Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik**															
	Persentase Terlaksananya Pengembangan Wawasan Kebangsaan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	Sangat tinggi	Sekretariat Daerah - Kesejahteraan Rakyat
	Terlaksananya Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	Sangat tinggi	

2.6. Gambaran Umum Keuangan Daerah

Dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satu sumber daya yang perlu diperhatikan adalah keuangan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat diwujudkan tanpa adanya dukungan finansial yang memadai. Keuangan daerah merupakan sumber daya strategis yang sifatnya tidak tak terbatas. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan pengelolaan keuangan daerah dalam upaya memanfaatkan sumber daya keuangan yang tersedia secara efektif dan efisien dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan keleluasaan kepada setiap daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki serta menentukan kebijakan-kebijakan daerah untuk memaksimalkan potensi daerah. Kabupaten Deli Serdang memandang hal ini sebagai peluang sekaligus tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah agar dapat memastikan penganggaran keuangan daerah dapat diselenggarakan secara optimal dan transparan. Pemerintah Daerah merancang anggaran yang lebih responsif terhadap prioiritas kebutuhan pembangunan Kabupaten Deli Serdang serta dapat mengambil kebijakan yang lebih baik dalam mengelola pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah secara lebih bijaksana. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan secara akuntabel dengan memberikan keterbukaan kepada masyarakat terkait pengelolaan keuangan dan penggunaan dana publik untuk pembangunan daerah.

Otonomi daerah memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan menentukan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Keuangan daerah yang akan dibahas lebih lanjut pada bab ini merupakan segala bentuk hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dalam bentuk uang yang dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Manajemen keuangan daerah menjadi aspek yang sangat penting dalam rangka memastikan penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik. Prinsip pengelolaan keuangan daerah

dilakukan dengan mengedepankan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Deli Serdang memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan mulai dari kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan keuangan daerah. Tujuan dari pengelolaan keuangan daerah adalah agar kekayaan yang dimiliki daerah dapat digunakan dengan efektif dan efisien, serta untuk mendistribusikan sumber daya yang dimiliki daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gambaran ringkas keuangan daerah memberikan analisis terhadap kondisi keuangan daerah guna menilai kapasitas kemampuan daerah dalam merencanakan, menganggarkan dan melaksanakan program pembangunan. Analisis ini dimulai dengan mengevaluasi kinerja anggaran dan pendapatan daerah di masa lalu, termasuk pola serta efektivitas belanja daerah. Selain itu, analisis juga mencakup pola pembiayaan daerah yang digunakan untuk mengelola defisit atau surplus anggaran. Hasil analisis ini memberikan gambaran yang jelas tentang kemampuan keuangan daerah, yang sangat penting dalam menyusun perencanaan pembangunan yang efektif, efisien dan produktif.

Gambaran ringkas keuangan daerah berpusat kepada analisis penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deli Serdang pada masa lalu serta menetapkan proyeksi tahun 2025-2030. Perencanaan dilakukan sebagai pedoman dalam mengevaluasi kapasitas daerah yang akan dipergunakan untuk melakukan perencanaan aktivitas belanja program-program pemerintah untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan berbasis kepada *output* dan *outcome* dalam mencapai pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Deli Serdang.

Sebagai landasan dalam merencanakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Tahun 2025 – 2030 maka perlu dievaluasi terlebih dahulu kinerja keuangan APBD Kabupaten Deli Serdang di masa lalu. Periode evaluasi yang dilakukan adalah pengelolaan APBD selama lima tahun terakhir, yaitu penyelenggaraan pemerintahan

periode 2020– 2024. Kondisi kinerja keuangan daerah pada periode 2020 - 2024 disajikan secara ringkas agar pemerintah dan masyarakat dapat mengetahui, mengevaluasi dan memperoleh gambaran pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk transparansi penyelenggaraan APBD. Prinsip transparan dalam penyelenggaraan APBD dilakukan sebagai salah satu sarana untuk memperoleh evaluasi dan masukan yang konstruktif dari masyarakat sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Analisis dan gambaran keuangan yang di masa lalu akan membantu Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam mengambil keputusan yang tepat, mengalokasikan sumber daya yang tersedia sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan pemerintah atasan serta sejalan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Sistematika pada bab ini akan dimulai dengan memberikan gambaran kinerja keuangan daerah secara ringkas yang meliputi pendapatan, belanja serta pembiayaan daerah. Gambaran ringkas tersebut menjadi salah satu dasar dalam membangun proyeksi tahun 2025 - 2030. Sistematika dalam analisis gambaran keuangan Kabupaten Daerah Kabupaten Deli Serdang dimulai dengan mengevaluasi kinerja keuangan masa lalu, menguraikan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, serta kerangka pendanaan yang menggambarkan proyeksi pendapatan dan belanja daerah yang akan digunakan sebagai dasar pendanaan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2025 - 2029.

Gambaran kondisi keuangan masa lalu akan membahas kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang selama periode 2020 sampai dengan 2024. Evaluasi yang dilakukan akan memberikan gambaran dan kondisi keuangan daerah Kabupaten Deli Serdang sehingga dapat diperoleh gambaran rata-rata pertumbuhan serta penyerapan APBD dalam penyelenggaraan pemerintahan pada periode 2020 - 2024. Gambaran kinerja keuangan masa lalu akan menjadi salah satu fundamental yang digunakan pemerintah dalam menyusun proyeksi serta kemampuan keuangan daerah pada RPJMD 2025-2029. Analisis kinerja keuangan masa lalu meliputi evaluasi terhadap

kinerja pelaksanaan APBD yang meliputi pendapatan, belanja serta pembiayaan daerah.

2.6.1. Kinerja APBD Kabupaten Deli Serdang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya disusun bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia agar tepat sasaran sesuai kebijakan pemerintah. Realisasi anggaran mencerminkan salah satu indikator kinerja pengelolaan keuangan yang baik, realisasi sektor pendapatan mutlak sangat strategis mengingat realisasi pendapatan inilah yang akan membiayai belanja daerah. Tidak terealisasinya pendapatan daerah akan mengakibatkan pemerintah daerah tidak dapat membiayai belanja daerah yang telah direncanakan.

Pada sektor belanja, serapan anggaran mencerminkan terlaksananya pembangunan dan manfaatnya oleh masyarakat serta akan mendorong *multiplier effect* terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan realisasi pembiayaan menunjukkan bagaimana defisit anggaran dapat ditutupi atau tidak dalam tahun anggaran. Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Deli Serdang diuraikan mengenai perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2024. Tabel berikut memberikan rincian pencapaian kinerja APBD Kabupaten Deli Serdang selama periode 2020 – 2024.

Tabel 2. 102
Realisasi APBD Kabupaten Deli Serdang 2020-2024

Uraian	Realisasi (Rp)					Rerata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	r	g
PENDAPATAN	**3.335.349.826.580,82**	**3.539.280.627.629,33**	**3.731.018.449.348,21**	**3.852.849.249.223,33**	**4.330.097.392.110,57**	**6,80**	**6,74**
Pendapatan Asli Daerah	809.719.829.264,82	926.137.759.153,33	1.041.732.670.188,21	1.049.321.671.723,33	1.169.363.269.636,57	9,76	9,62
Pendapatan Transfer	2.049.562.028.316,00	2.451.655.133.476,00	2.687.662.779.160,00	2.803.527.577.500,00	3.160.734.122.474,00	11,57	11,44
Lain - lain Pendapatan daerah yang Sah	476.067.969.000,00	161.487.735.000,00	1.623.000.000,00	0,00	0,00	-82,54	-94,16
BELANJA	**3.274.161.220.722,19**	**3.473.760.778.916,05**	**3.748.625.178.210,85**	**3.864.684.573.712,09**	**4.265.025.228.239,19**	**6,87**	**6,83**
Belanja Operasi	2.223.407.524.744,00	2.424.674.840.910,00	2.641.356.377.407,08	2.761.423.726.370,09	2.981.070.639.968,27	7,62	7,61
Belanja Modal	480.305.325.651,90	520.913.969.424,05	563.480.586.115,77	518.703.185.644,00	666.604.042.966,92	9,30	8,54
Belanja Tidak Terduga	66.697.144.313,29	11.330.338.835,00	6.727.247.505,00	2.205.249.833,00	2.255.312.334,00	-47,15	-57,12
Belanja Transfer	503.751.226.013,00	516.841.629.747,00	537.060.967.183,00	582.352.411.865,00	615.095.232.970,00	5,14	5,12
Surplus (Defisit)	**61.188.605.858,63**	**65.519.848.713,28**	**-17.606.728.862,64**	**-11.835.324.488,76**	**65.072.163.871,38**	**-**	**-**
PEMBIAYAAN	**79.028.990.701,79**	**126.859.764.508,42**	**192.513.862.275,70**	**174.933.313.575,82**	**158.097.989.087,06**	**23,38**	**7,61**
Penerimaan Pembiayaan	83.358.990.701,79	140.275.798.560,42	192.513.862.275,70	174.933.313.575,82	163.097.989.087,06	22,41	18,27
Pengeluaran Pembiayaan	4.330.000.000,00	13.416.034.052,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	73,55	3,66
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	**140.217.596.560,42**	**192.379.613.221,70**	**174.907.133.413,06**	**163.097.989.087,06**	**223.170.152.958,44**	**14,55**	**12,32**

Tabel tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Deli Serdang selama periode 2020 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan pendapatan per tahun dengan pertumbuhan sebesar 6,80 persen yang meningkat dari Rp 3,33 triiliun pada tahun 2020 menjadi Rp 4,33 triliun pada tahun 2024. Apabila dilakukan analisis pertumbuhan dari tahun ke tahun, maka rata-rata pertumbuhan pendapatan melaju dengan pertumbuhan 6,74 persen per tahun. Realisasi pendapatan daerah dari tahun 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan konsistensi peningkatan dari tahun ke tahun.

Gambaran ringkas kinerja APBD dari sisi belanja daerah Kabupaten Deli Serdang periode 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan pertumbuhan sebesar 6,87 per tahun dengan realisasi Rp 3,27 triliun pada tahun 2020 tumbuh menjadi Rp 4,26 triliun pada tahun 2024. Evaluasi pertumbuhan belanja secara tahunan menunjukkan pertumbuhan dengan laju sebesar 6,83 persen per tahun selama periode tersebut. Pertumbuhan realisasi pendapatan setiap tahunnya seiring dengan peningkatan target anggaran pendapatan setiap tahun. Begitu juga dengan belanja daerah yang konsisten meningkat setiap tahunnya dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Dinamika pergerakan realisasi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2020 sampai dengan 2024 mengakibatkan dinamika terhadap surplus dan defisit anggaran pada setiap tahunnya. Setelah mengalami defisit pada tahun 2022 dan tahun 2023, namun APBD Kabupaten Deli Serdang mengalami surplus kembali sebesar Rp 65,07 Miliar pada tahun 2024.

Pendapatan Daerah

Evaluasi terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimulai dengan evaluasi pendapatan daerah. Pendapatan daerah merupakan komponen utama dari APBD yang menentukan kapasitas keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melaksanakan program pembangunan dengan tujuan mewujudkan pembangunan daerah sekaligus memberikan pelayanan prima kepada seluruh lapisan masyarakat dengan dasar pendapatan daerah. Analisis pendapatan daerah

memberikan gambaran mengenai kemampuan daerah dalam menghasilkan sumber-sumber keuangan yang diperlukan untuk mendanai program pemerintahan. Pemerintah mengevaluasi pendapatan daerah guna mengidentifikasi permasalahan serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah tanpa memberikan beban besar kepada masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa pendapatan daerah merupakan semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Struktur dari pendapatan daerah sesuai dengan peraturan pemerintah sekurang-kurangnya dari terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Analisis APBD melalui pendapatan daerah dilakukan dengan mengevaluasi perkembangan target dan realisasi pendapatan daerah selama periode 2020 sampai dengan 2024. Selain itu evaluasi kinerja berdasarkan pendapatan daerah juga dilakukan dengan mengevaluasi struktur pendapatan daerah sehingga diperoleh gambaran tentang perkembangan pendapatan daerah, meliputi kemandirian daerah dalam menghasilkan pendapatan dan mendanai program-programnya serta ketergantungan daerah pada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya. Hasil evaluasi terhadap kinerja pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang periode 2020-2024 dalam hal target dan realisasi serta pertumbuhan pendapatan daerah dirangkum dalam Tabel berikut.

Tabel 2. 103
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Tahun	Target (Rp Milyar)	Pertumbuhan Target (%)	Realisasi (Rp Milyar)	Pertumbuhan Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
2020	3,620.16	-	3.335,35	-	92,13
2021	4,104.38	13,38	3.539,28	6,11	86,23
2022	4,179.15	1,82	3.731,08	5,42	89,28
2023	4,401.02	5,31	3.852,85	3,27	87,54
2024	4,843.68	10,06	4.330,09	12,39	89,40

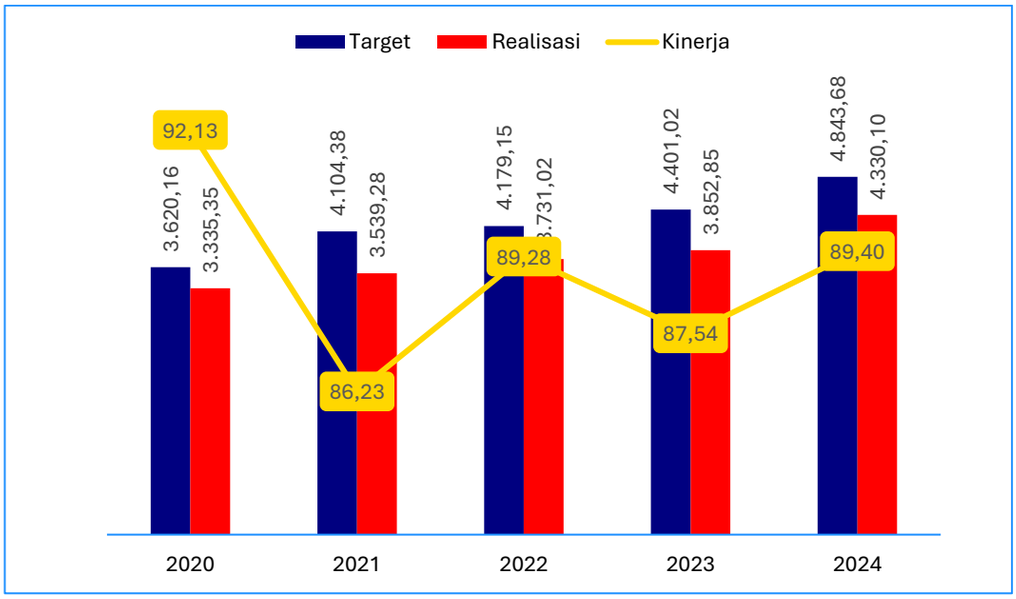
Sumber: LRA Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2024 (diolah, 2025)

Kinerja pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang selama periode 2020-2024 menunjukkan realisasi pendapatan daerah yang tergolong dalam kategori yang baik dengan pencapaian di atas 80 persen setiap tahunnya. Secara rata-rata pencapaian kinerja pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang mencapai 88,92 persen dalam kategori skala pencapaian kinerja yang baik. Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2020 yang sempat mencapai kinerja 92,13 persen dari target pendapatan daerah. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang optimis bahwa kemampuan realisasi pendapatan daerah selama lima tahun ke depan akan menjadi semakin baik dengan mempertimbangkan realisasi yang terus meningkat dari tahun 2021 sampai dengan 2024.

Pada tahun 2020, target pendapatan adalah Rp 3.620,16 miliar dengan realisasi Rp 3.335,35 miliar dan mencapai kinerja pendapatan daerah sebesar 92,13 sekaligus pencapaian tertinggi selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2025. Tahun 2021, target pendapatan meningkat menjadi Rp 4.104,38 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 13,38 persen dengan realisasi Rp 3.539,28 miliar dengan pertumbuhan hanya sebesar 6,11 persen. Kondisi ini menunjukkan peningkatan realisasi yang diperoleh tidak sebanding dengan peningkatan target sehingga capaian kinerja sedikit menurun menjadi 86,23 persen. Tahun 2022 Kabupaten Deli Serdang sedikit meningkatkan target APBD sebesar 1,82 persen menjadi Rp 4.179,15 miliar dengan realisasi Rp 3.731,08 miliar. Pada tahun berjalan terjadi peningkatan capaian kinerja menjadi 87,43 persen. Pada tahun 2023

terjadi peningkatan target sebesar 5,31 persen menjadi Rp 4.401,02 miliar dengan realisasi Rp 3.852,85 miliar. Kinerja pendapatan daerah tahun 2023 mencapai 87,54 persen. Tahun 2024 terjadi peningkatan target yang cukup signifikan sebesar 10,06 persen menjadi sebesar Rp 4.843,68 miliar dengan realisasi yang diperoleh mencapai sebesar Rp 4.330,10 Miliar atau meningkat sebesar 12,39 persen dengan capaian kinerja meningkat dari sebelumnya menjadi sebesar 89,40 persen. Secara keseluruhan, terdapat fluktuasi dalam pencapaian target pendapatan, dengan capaian kinerja yang relatif stabil meskipun belum mencapai target yang ditetapkan namun peningkatan target yang signifikan dan pendapatan realisasi yang tinggi sudah lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Gambar 2. 46
Pergerakan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang



Sumber: LRA Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 – 2024 (data diolah, 2025)

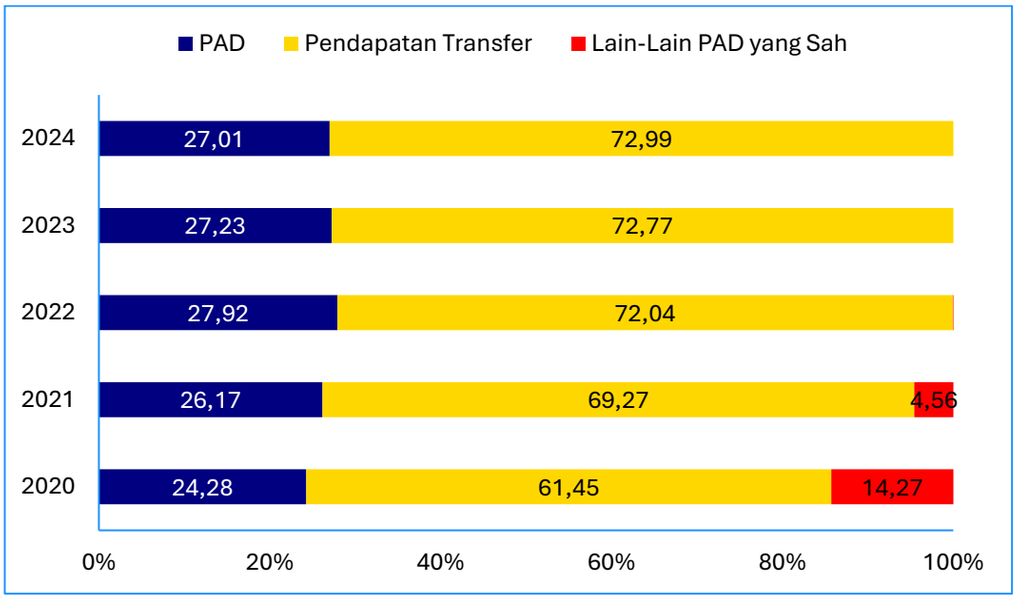
Gambar tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah Kabupaten Deli Serdang secara umum berada pada tingkat kinerja yang baik dengan realisasi kinerja mencapai rata-rata 88,92 persen selama periode 2020 sampai dengan 2024. Meskipun demikian terlihat bahwa masih terdapat selisih antara target pendapatan daerah yang ditetapkan dengan realisasi. Kondisi ini mengindikasikan penetapan pertumbuhan target pendapatan yang cenderung lebih tinggi daripada kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah tersebut. Kondisi ini menjadi catatan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam upaya mengoptimalkan

pendapatan daerah dalam upaya membiayai seluruh kegiatan pemerintah daerah ke depannya.

Evaluasi target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang periode 2020-2024 menunjukkan bahwa strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah sudah cukup baik dengan peningkatan realisasi yang signifikan dari tahun ke tahun dan menghasilkan capaian kinerja 89,40 persen di tahun 2024. Dalam upaya mendorong peningkatan dan pertumbuhan target serta realisasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, diperlukan inovasi yang lebih baik lagi dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang terutama untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah dan kemandirian daerah. Dalam upaya mendorong percepatan pembangunan daerah, maka pemerintah daerah ke depannya. RPJMD periode 2025-2029 perlu memprioritaskan inovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan aset daerah secara optimal.

Dalam upaya memperoleh gambaran kinerja keuangan daerah yang lebih baik, analisis keuangan daerah selama periode 2020 sampai dengan 2024 juga dilakukan dengan mengevaluasi struktur pendapatan daerah. Evaluasi struktur pendapatan daerah memungkinkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam mengetahui dan menganalisis sumber-sumber pendapatan yang perlu dioptimalkan dalam menciptakan kemandirian daerah dan peningkatan realisasi pendapatan daerah. Pemerintah dapat mengevaluasi dan menyusun perencanaan dalam mengoptimalkan pendapatan daerah. Realisasi pendapatan yang semakin tinggi diharapkan akan mendorong percepatan pembangunan dalam rangka penyelenggaraan program pembangunan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa struktur pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Gambar 2. 47
Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang



Sumber: LRA Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 – 2024 (data diolah, 2025)

Kabupaten Deli Serdang selama periode 2020 sampai dengan 2024 memiliki proporsi pendapatan utama yang bersumber pendapatan transfer. Pendapatan transfer merupakan sumber pendapatan yang berasal dari dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat, baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) ataupun Dana Alokasi Khusus (DAK) serta pendapatan transfer dari pemerintah daerah lainnya. Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer dari pemerintah pusat sebagai dana perimbangan. Dana perimbangan diberikan dalam bentuk Dana Desa, Dana Insentif Daerah serta Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi.

Pendapatan transfer dalam struktur pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang mencapai rata-rata sebesar 69,70 persen dengan kisaran antara 61,45 persen sampai dengan 72,99 persen. Dari sisi nominal pendapatan, pendapatan transfer berkisar antara Rp 2,05 triliun sampai dengan Rp 3,16 triliun dengan rata-rata Rp 2,63 triliun. Kabupaten Deli Serdang memiliki proporsi terbesar ketergantungan terhadap pendapatan transfer pada tahun 2024 yang mencapai struktur 72,99 persen dari seluruh pendapatan daerah. Kondisi ini menggambarkan bahwa Kabupaten Deli Serdang masih memiliki ketergantungan terhadap pendapatan yang bersumber dari luar kemampuan Kabupaten Deli Serdang. Program-program strategis nasional dan provinsi di Kabupaten Deli Serdang saat ini masih

mendukung peningkatan pendapatan transfer, namun Kabupaten Deli Serdang terus berupaya untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan transfer ke depannya.

Struktur pendapatan selanjutnya adalah pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan komponen pendapatan yang sumber utamanya berasal dari kemampuan Kabupaten Deli Serdang dalam menghasilkan pendapatan atas hasil wewenang dan kegiatan operasional yang dimilikinya. Hasil analisis selama lima tahun menunjukkan adanya fluktuasi cenderung meningkat struktur PAD dari tahun ke tahun. Secara struktur PAD meningkat dari 24,28 persen pada tahun 2020 menjadi 27,01 persen pada tahun 2024. Struktur PAD terbesar berada pada tahun 2022 yang mencapai tingkat 27,92 persen dari total keseluruhan pendapatan daerah. Dari sisi nominal, pada tahun 2020 Kabupaten Deli Serdang menghasilkan PAD sebesar Rp 0,81 triliun yang meningkat menjadi Rp 1,17 triliun pada tahun 2024. Secara rata-rata terdapat kecenderungan peningkatan nominal PAD sebesar 9,76 persen per tahun. Gambaran realisasi dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan PAD terjadi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

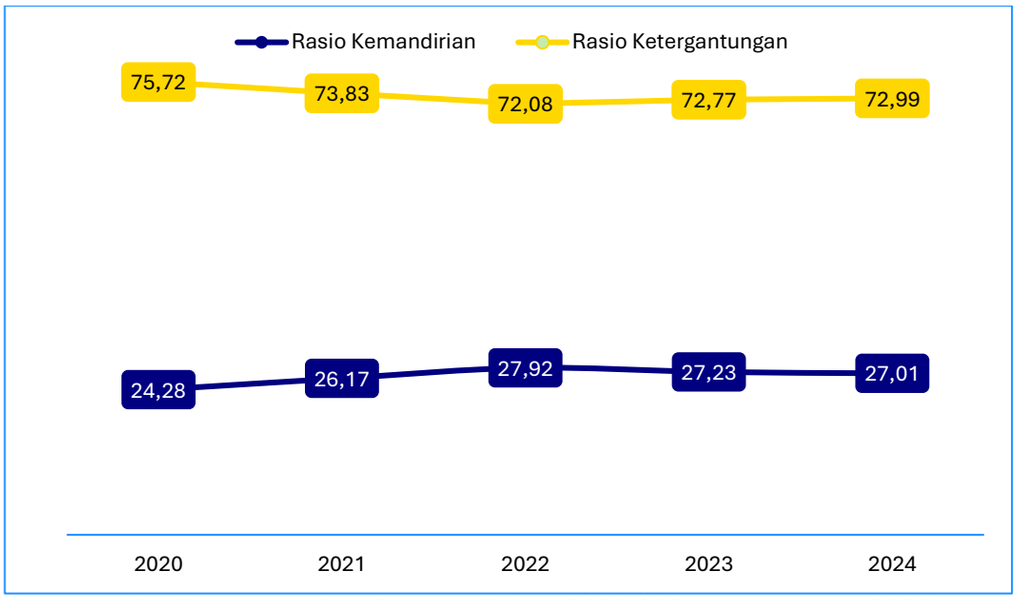
Struktur pendapatan daerah yang terakhir adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tidak melakukan prioritas terhadap pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan lain-lain. Terdapat kecenderungan bahwa pendapatan dengan sumber lain-lain pendapatan yang sah semakin menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 struktur pendapatan yang berasal dari lain-lain pendapatan yang sah berada pada tingkat 14,27 persen dan menurun pada tahun 2021 menjadi 4,56 persen dan kembali menurun pada tahun 2021 menjadi 0,04 persen hingga pada tahun berikutnya sampai dengan tahun 2024 menjadi 0 persen atau tidak terdapat lain-lain PAD yang sah pada tahun 2023 dan tahun 2024. Dari sisi nominal, pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah mencapai Rp 476,07 Milyar pada tahun 2020 menurun setiap

tahunnya hingga pada tahun 2023 tidak terdapat lain-lain PAD yang sah atau 0 persen. Secara umum sudah terdapat konsistensi perolehan pendapatan dari lain-lain pendapatan yang sah di 2 tahun terakhir sesuai dengan target.

Analisis struktur pendapatan daerah juga memberikan gambaran terhadap evaluasi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Kabupaten Deli Serdang mengevaluasi derajat kemandirian dan rasio ketergantungan daerah dalam mengevaluasi kemandirian keuangan pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan berbasis otonomi daerah. Kabupaten Deli Serdang mengukur kemampuan daerah dalam membiayai program kegiatan daerah secara mandiri sebagai fokus utama penilaian kemandirian daerah. Pemerintah menganalisis tingkat ketergantungan daerah terhadap pendanaan dari eksternal, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya. Analisis derajat kemandirian daerah ditunjukkan oleh proporsi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan. Sedangkan untuk rasio ketergantungan daerah ditunjukkan dari proporsi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap total pendapatan.

Derajat kemandirian daerah dan rasio ketergantungan daerah merupakan ukuran yang sifatnya saling melengkapi atau komplementif dari struktur pendapatan daerah. Derajat kemandirian daerah atau disebut juga derajat kemandirian fiskal berlandaskan kepada kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD dari total pendapatan daerah. Sebaliknya, rasio ketergantungan daerah berdasarkan kepada nilai pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan terhadap total pendapatan yang mampu dihasilkan oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu satu tahun. Semakin besar angka pada derajat kemandirian daerah akan mengindikasikan tingkat kemandirian daerah yang semakin baik. Sebaliknya, semakin besar angka proporsi pendapatan transfer maka semakin besar tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Dengan demikian, daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang rendah adalah daerah yang memiliki proporsi PAD yang tinggi sekaligus proporsi pendapatan transfer yang rendah.

Gambar 2. 48
Derajat Kemandirian dan Rasio Ketergantungan Daerah Kabupaten Deli Serdang



Sumber: LRA Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2024 (data diolah, 2025)

Klasifikasi terhadap derajat kemandirian daerah atau kemandirian fiskal daerah dibagi ke dalam empat kelompok utama, yaitu klasifikasi belum mandiri dengan nilai 0,00 sampai dengan 0,25; klasifikasi menuju kemandirian dengan nilai 0,25 sampai dengan 0,50; klasifikasi mandiri dengan nilai 0,50 sampai dengan 0,75; dan klasifikasi sangat mandiri dengan nilai 0,75 sampai dengan 100,00. Rasio kemandirian daerah Kabupaten Deli Serdang memiliki kecenderungan kenaikan selama periode 2020 sampai dengan 2024 yang bergerak dari 24,28 persen pada tahun 2020 menjadi 27,01 persen pada tahun 2024. Kondisi ini masih berada pada klasifikasi menuju mandiri. Dalam upaya mengoptimalkan kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan daerah menjadi prioritas daerah untuk mengupayakan peningkatan potensi dan realisasi pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kabupaten Deli Serdang berharap ke depannya tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Deli Serdang dapat mengalami peningkatan menjadi lebih baik lagi.

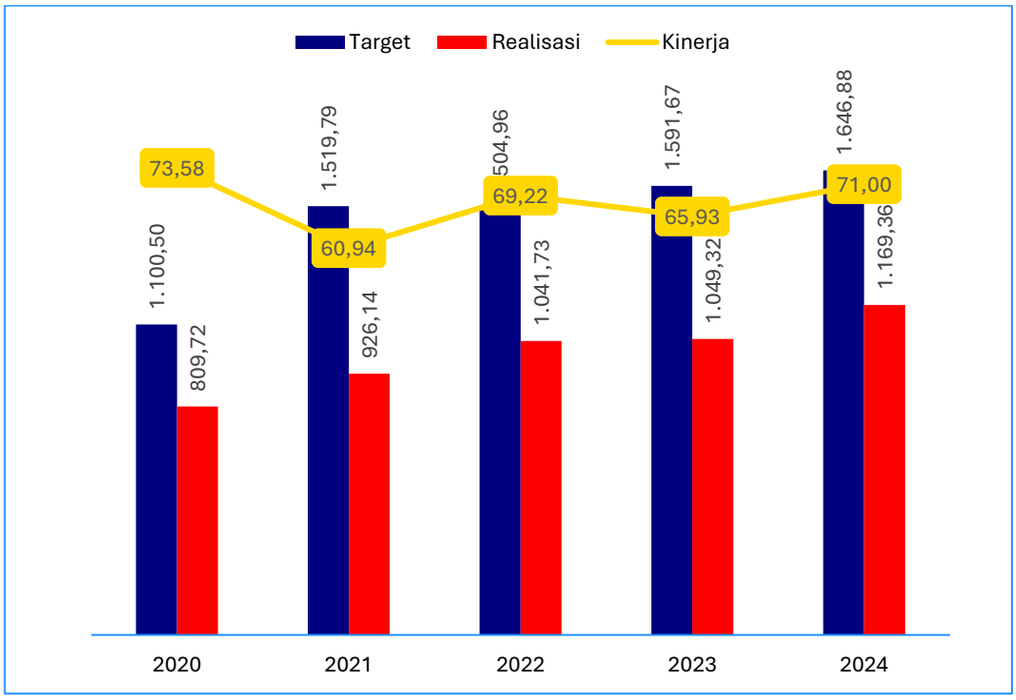
Analisis yang berlawanan dari kemandirian daerah merujuk kepada rasio ketergantungan daerah. Rasio ketergantungan daerah menunjukkan ketergantungan Kabupaten Deli Serdang dalam menyelenggarakan pemerintahan terhadap pendapatan yang

bersumber dari eksternal. Pada tahun 2020 rasio ketergantungan daerah mencapai tingkat 75,72 persen. Angka ini terus mengalami penurunan sampai dengan Tahun 2024 yang mencapai 72,99 persen. Hal ini menunjukkan masih terdapat ketergantungan Kabupaten Deli Serdang terhadap pembiayaan eksternal pada tahun-tahun ke depan. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memprioritaskan strategi ke depan untuk mengurangi ketergantungan dari pendanaan eksternal dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Pendapatan Asli Daerah

Gambaran pendapatan daerah perlu dievaluasi lebih lanjut untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam terkait dengan realisasi pada setiap struktur pendapatan daerah. Evaluasi dilakukan dengan memperoleh pola terhadap pergerakan dan pertumbuhan realisasi masing-masing struktur pendapatan daerah. Analisis dilanjutkan secara spesifik yang membahas kinerja pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Gambar 2. 49
Pergerakan Kinerja Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang



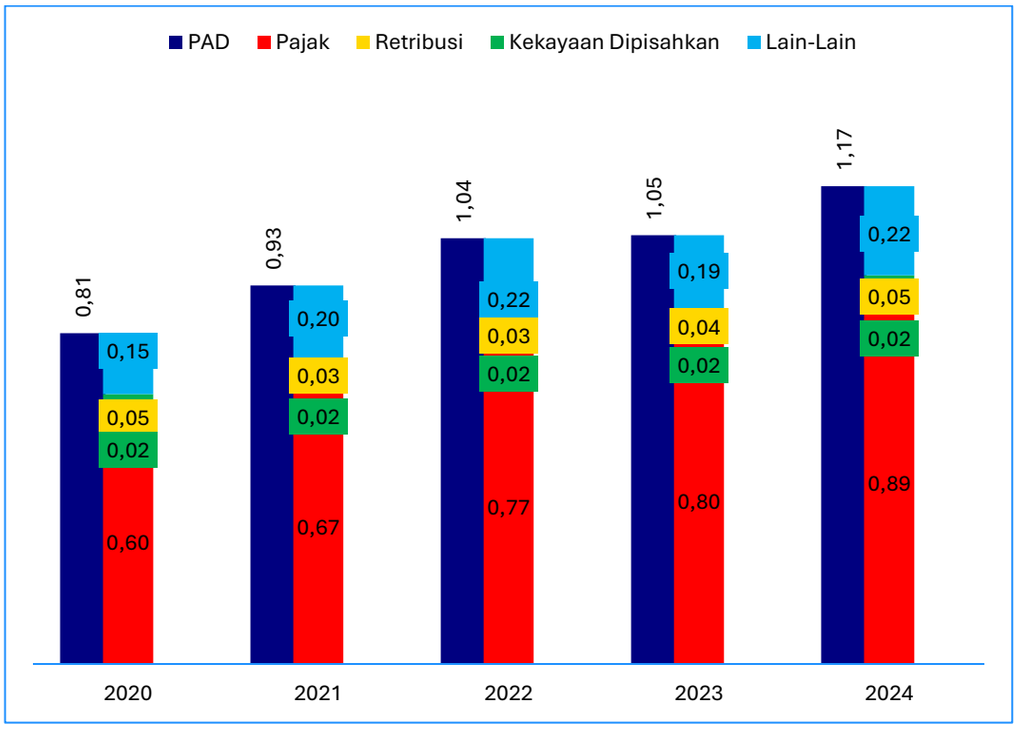
Sumber: LRA Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 – 2024 (data diolah, 2025)

Kabupaten Deli Serdang merencanakan target PAD didasarkan kepada potensi-potensi yang dimiliki daerah dan dapat direalisasikan oleh pemerintah melalui retribusi, pajak, pengelolaan perusahaan

milik daerah serta perolehan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pada tahun 2020 dan tahun 2024 pencapaian kinerja PAD melalui realisasi yang dicapai mencapai angka 73,58 persen, dan 71,00 persen. Realisasi kinerja PAD pada tahun 2020 dan tahun 2024 merupakan realisasi terbesar Kabupaten Deli Serdang periode 2020 sampai dengan 2024. Pada Gambar 3.4 terjadi penurunan kinerja pada tahun 2021 yang menurun sampai dengan 60,94 persen. Penurunan ini dipicu dengan adanya peningkatan target secara signifikan pada tahun 2021, dari sebelumnya Rp 1,10 triliun menjadi Rp 1,52 triliun dengan mempertimbangkan berbagai potensi pendapatan asli daerah serta spill-over pertumbuhan dari wilayah di sekitar, seperti Kota Medan. Sayangnya, peningkatan target yang signifikan tidak disertai dengan pertumbuhan PAD yang besar, meskipun PAD secara nominal meningkat dari tahun 2020 ke tahun 2021. Realisasi PAD terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Dari sisi kinerja, terdapat kecenderungan kinerja saat ini di rentan 60,94% sampai dengan 73,58 persen dari target PAD yang telah ditetapkan dengan rata-rata pencapaian kinerja sebesar 68,13 persen. Kondisi ini menggambarkan bahwa banyak potensi PAD Kabupaten Deli Serdang yang belum dapat dikelola secara optimal untuk menghasilkan PAD. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang akan lebih fokus dalam mengoptimalkan PAD dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan selama periode 2025 sampai dengan 2029 mendatang.

Dalam upaya memperoleh gambaran lebih dalam terkait dengan realisasi capaian pendapatan asli daerah (PAD), perlu dievaluasi sumber-sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Deli Serdang periode 2020-2024. Komponen PAD berdasarkan amanat peraturan daerah bersumber dari (a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan (d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Evaluasi struktur pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang di masa lalu dirangkum dalam gambar berikut.

Gambar 2. 50
Struktur PAD Kabupaten Deli Serdang



Sumber: LRA Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2024 (data diolah, 2025)

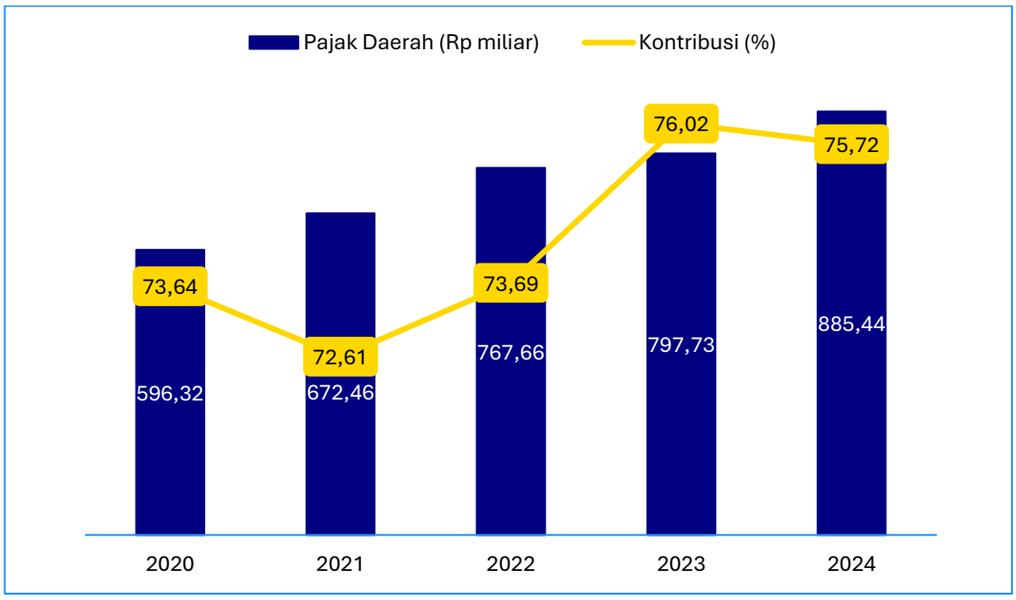
Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 memiliki sumber utama dari pajak daerah dengan proporsi rata-rata sebesar 74,34 persen dari seluruh PAD. Sebaran proporsi dari pajak daerah berkisar antara 72,61 persen sampai dengan 76,02 persen. Terdapat kecenderungan peningkatan proporsi pajak daerah sebagai sumber PAD di Kabupaten Deli Serdang. Pada tahun 2023, proporsi pajak daerah sebagai sumber PAD mencapai 76,02 persen dengan nominal mencapai Rp 797,73 milyar sekaligus menjadi pencapaian proporsi tertinggi selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, namun demikian di tahun terakhir proporsi pajak daerah terhadap PAD menjadi 75,72 persen dengan nominal sebesar Rp 885,44 Miliar di tahun 2024.

Retribusi daerah pada Kabupaten Deli Serdang memiliki proporsi rata-rata sebesar 4,03 persen selama periode 2020 sampai dengan 2024. Realisasi retribusi daerah terbesar berada pada tahun 2020 yang mencapai Rp 47,64 milyar atau 5,88 persen dari PAD tahun tersebut. Secara umum tidak terjadi pergerakan yang signifikan dari realisasi pendapatan yang bersumber dari retribusi daerah dengan

nilai berkisar antara Rp 29,22 milyar sampai dengan Rp 47,64 milyar. Gambaran ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Deli Serdang secara umum belum mengoptimalkan pendapatan retribusi daerah. Kabupaten Deli Serdang dapat menggali potensi retribusi daerah dengan mencari sumber-sumber retribusi, seperti retribusi parkir tepi jalan, retribusi penginapan dan berbagai sumber retribusi lainnya.

Secara umum tidak terjadi perbedaan dalam struktur PAD Kabupaten Deli Serdang selama tahun 2020 sampai dengan 2024. Kontribusi terbesar dari PAD adalah pajak daerah, diikuti dengan lain-lain PAD yang sah, Retribusi Daerah dan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Gambar 2. 51
Realisasi dan Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang



Sumber: LRA Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2024 (data diolah, 2025)

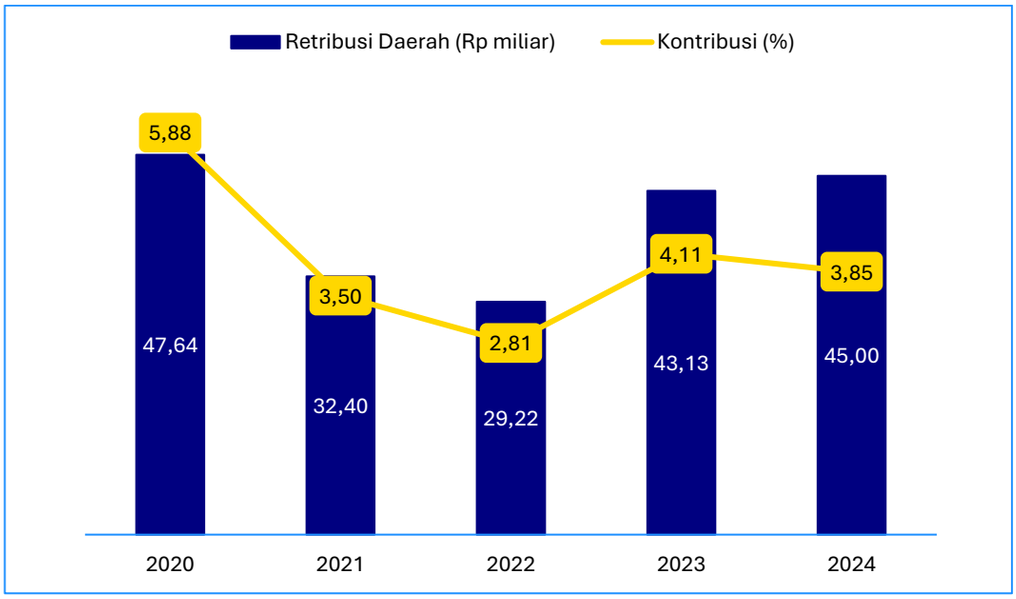
Realisasi pajak daerah Kabupaten Deli Serdang bergerak dengan tren pertumbuhan yang positif selama periode 2020 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2020, realisasi pajak daerah mencapai Rp 596,32 milyar yang tumbuh menjadi Rp 885,44 milyar pada tahun 2024. Pertumbuhan pendapatan yang berasal dari pajak daerah mencapai 5,15 persen per tahun dengan asumsi pertumbuhan yang merata di setiap tahunnya. Dalam praktiknya, terdapat peningkatan pendapatan pajak daerah yang cukup pesat pada tahun 2022 dan 2024 namun sedikit melambat pada tahun 2023.

Dari sisi kontribusi terhadap PAD, pajak daerah memiliki kontribusi yang relatif stabil yang bergerak dari 73,64 persen pada

tahun 2020 menjadi 75,72 persen pada tahun 2024. Secara umum tidak terjadi pergeseran kontribusi pajak daerah yang berarti. Hal ini mengindikasikan bahwa komponen utama dari PAD masih berpusat kepada pendapatan yang bersumber dari pajak daerah.

Gambaran dari sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Deli Serdang selanjutnya berasal dari retribusi daerah. Retribusi daerah mengacu kepada pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Perkembangan retribusi dan pertumbuhan retribusi daerah Kabupaten Deli Serdang dirangkum sebagai berikut.

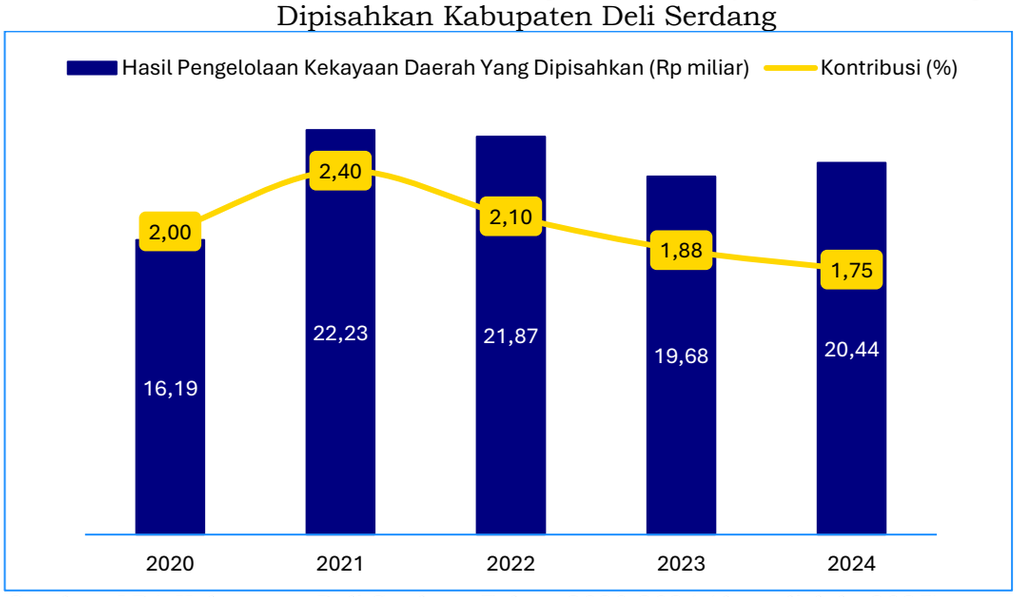
Gambar 2. 52
Realisasi dan Kontribusi Retribusi Daerah Kabupaten Deli Serdang



Sumber: LRA Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2024 (data diolah, 2025)

Secara rata-rata tingkat retribusi pajak daerah berada pada kontribusi sebesar 4,09 persen dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Gambar 2. 53
Realisasi dan Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kabupaten Deli Serdang

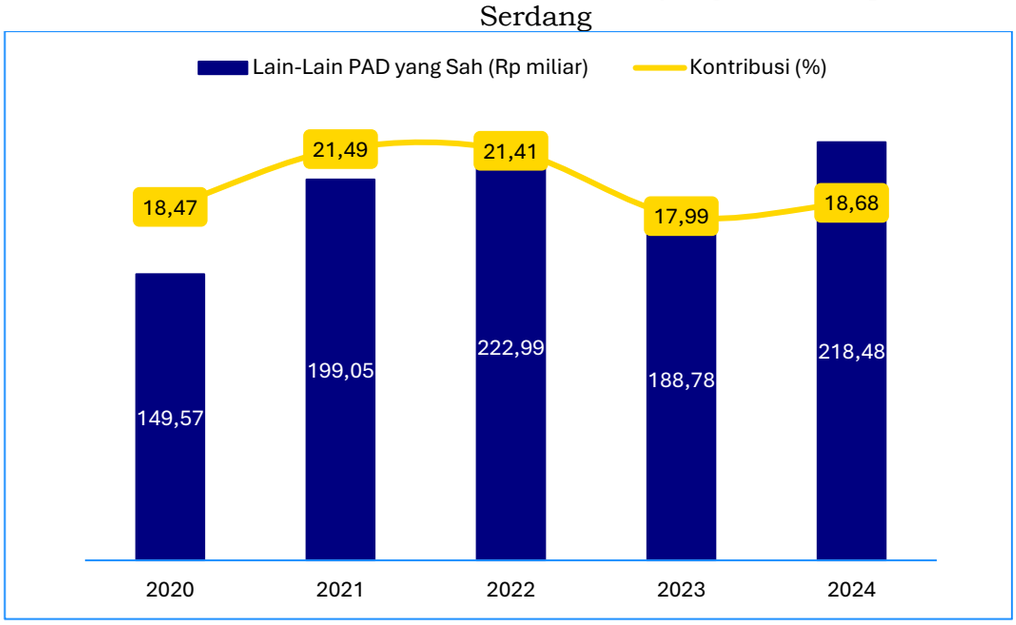


Sumber: LRA Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2024 (data diolah, 2025)

Pergerakan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang pisahkan di Kabupaten Deli Serdang menunjukkan fluktuasi kecenderungan pergerakan yang sedikit meningkat selama periode 2020 sampai dengan 2024. Pada tahun 2020 realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang pisahkan mencapai Rp 16,19 miliar meningkat menjadi Rp 20,44 miliar Dari sisi kontribusi, tidak terdapat pergerakan yang signifikan dengan rata-rata proporsi sebesar 2,02 persen. Pada tahun 2024 terjadi penurunan kontribusi dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang pisahkan menjadi 1,75 persen.

Sumber PAD terakhir yang memberikan kontribusi terbesar kedua pada pengelolaan pendapatan asli daerah Kabupaten Deli Serdang adalah penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah dengan kontribusi rata-rata sebesar 12,87 persen per tahun selama periode 2024-2024. Hasil evaluasi terhadap Hasil Pengelolaan Lain-Lain PAD yang Sah dirangkum sebagai berikut.

Gambar 2. 54
Realisasi dan Pertumbuhan Lain-Lain PAD yang Sah Kabupaten Deli Serdang



Sumber: LRA Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2024 (data diolah, 2025)

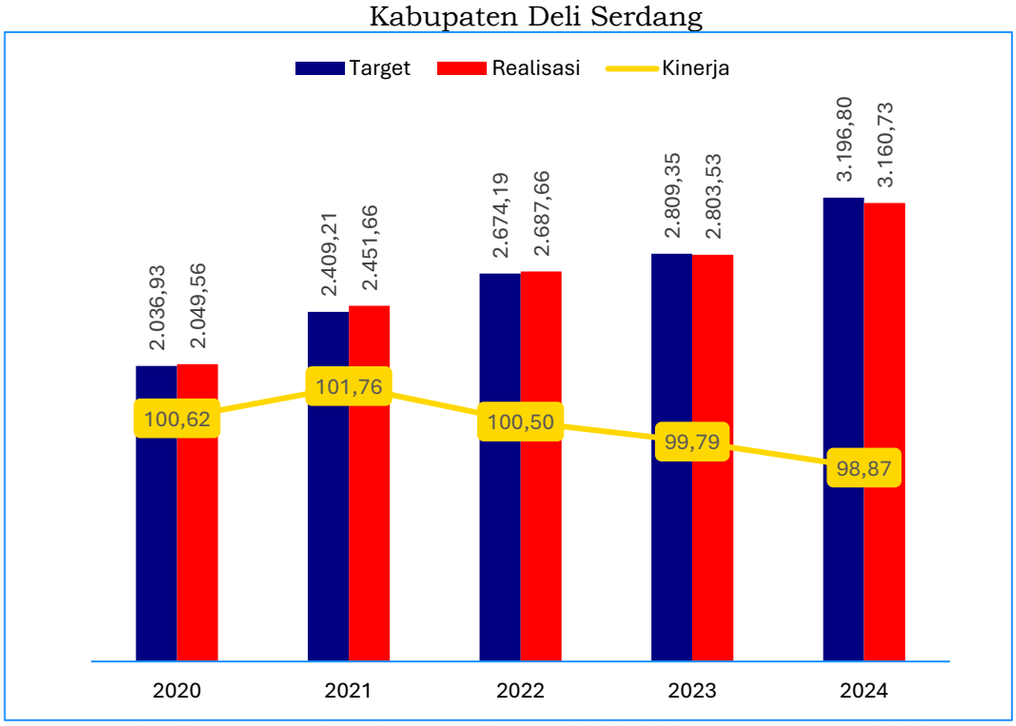
Pergerakan realisasi pendapatan lain-lain PAD yang sah mengalami pergerakan signifikan dengan kecenderungan peningkatan selama periode 2020 sampai dengan tahun 2024. Realisasi pendapatan lain-lain PAD yang sah pada tahun 2020 mencapai Rp 149,57 miliar cenderung mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2022 menjadi Rp 222,99 miliar. Namun realisasi lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi Rp 189,78 miliar atau turun sebesar 15,13 persen dari tahun 2022. Dari sisi struktur, tidak terjadi pergerakan yang signifikan. Proporsi lain-lain PAD yang sah bergerak dari 18,47 persen pada tahun 2020 menjadi 18,68 persen pada tahun 2024 dengan titik tertinggi sebesar 21,49 persen yang sempat terjadi pada tahun 2021. Kondisi ini menunjukkan konsistensi atau stagnasi dari struktur PAD di Kabupaten Deli Serdang selama periode 2020 sampai dengan 2024. Pemerintah daerah perlu menggali potensi daerah dalam menggali pendapatan lain-lain PAD yang sah sebagai sumber PAD Kabupaten Deli Serdang selain pajak.

Pendapatan Transfer

Struktur utama pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang masih mengutamakan pendapatan transfer selama periode 2020 sampai dengan 2024 dengan rata-rata kontribusi sebesar 69,70

persen per tahun. Kabupaten Deli Serdang masih memiliki ketergantungan yang cukup besar dari pendapatan transfer untuk membiayai program daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pendapatan transfer terdiri dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Pemerintah pusat memberikan pendapatan transfer dalam bentuk dana perimbangan (dana transfer umum dan dana transfer khusus), dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Sedangkan pendapatan transfer antar daerah bersumber dari pendapatan bagi hasil kerja sama dengan daerah lain dan bantuan keuangan yang diberikan oleh daerah lain. Evaluasi terhadap pencapaian pendapatan transfer di Kabupaten Deli Serdang dirangkum sebagai berikut.

Gambar 2. 55
Pergerakan Target, Realisasi dan Kinerja Pendapatan Transfer
Kabupaten Deli Serdang



Sumber: LRA Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2024 (data diolah, 2025)

Kabupaten Deli Serdang menyusun rencana anggaran pendapatan daerah yang menekankan kepada sumber pendapatan transfer, dimana pendapatan transfer merupakan proporsi terbesar dari sumber pendapatan daerah. Perencanaan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas daerah dan perolehan transfer yang diterima oleh daerah dari tahun-tahun sebelumnya. Penyusunan

target daerah terhadap pendapatan transfer tidak terlepas dari realisasi periode sebelumnya yang mengindikasikan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Kabupaten Deli Serdang masih bersumber dari bantuan pendapatan transfer, terutama pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat dan Kabupaten Deli Serdang masih melihat pentingnya pemberian bantuan pendapatan transfer untuk menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Deli Serdang. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berupaya mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan dukungan pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

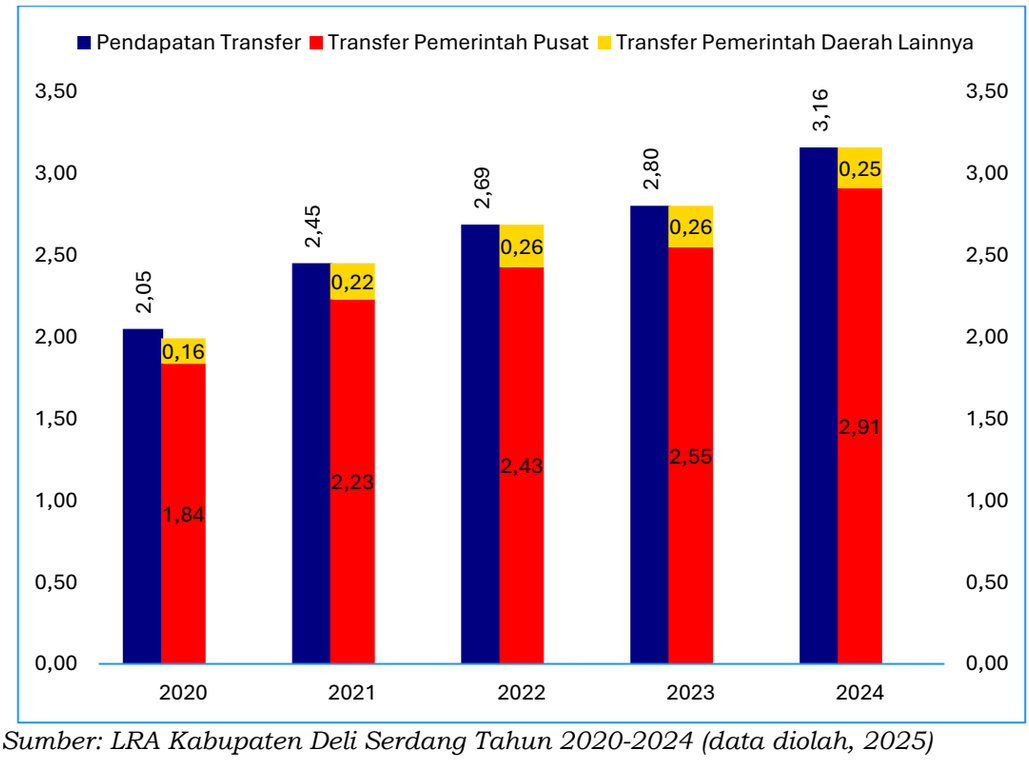
Penetapan target pendapatan daerah dari pendapatan transfer mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2020, pemerintah telah menetapkan target pendapatan transfer sebesar Rp 2,03 triliun pada tahun 2020. Selanjutnya terjadi peningkatan target pendapatan transfer sampai dengan Rp 3,19 triliun pada tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menetapkan target pendapatan daerah dari pendapatan transfer yang cenderung meningkat, namun komitmen daerah untuk menggali potensi daerah dalam bentuk PAD tetap dioptimalkan. Pemerintah berupaya mempercepat pembangunan daerah dengan mengoptimalkan pendapatan dari berbagai sumber pendapatan daerah.

Realisasi pada pendapatan transfer yang diterima oleh Kabupaten Deli Serdang secara umum berada pada tingkat di atas target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja penerimaan pendapatan transfer daerah selama periode 2020 sampai dengan 2024 berkisar antara 98,9 persen sampai dengan 101,7 persen yang mengindikasikan bahwa secara umum terdapat penyerapan yang sangat baik dari realisasi pendapatan transfer daerah. Selama periode 2020 – 2024 realisasi pendapatan transfer di Kabupaten Deli Serdang cenderung mengalami peningkatan dari Rp 2,04 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 3,16 triliun pada tahun 2024. Peningkatan realisasi ini juga sejalan dengan peningkatan target yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam memperoleh pendapatan transfer. Pemerintah masih memerlukan dukungan pendapatan

transfer untuk mengoptimalkan pelaksanaan program-program strategis dan prioritas pembangunan daerah. Dengan realisasi pendapatan yang mencapai 98,9 persen pada tahun 2024, pemerintah Kabupaten Deli Serdang berupaya semaksimalnya untuk mengelola pendapatan dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan pembangunan di Kabupaten Deli Serdang.

Struktur pendapatan transfer Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada periode 2020 sampai dengan tahun 2024 bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat berupa dana perimbangan, dan transfer pemerintah pusat lainnya dan transfer pemerintah daerah lainnya. Gambaran struktur pendapatan transfer di Kabupaten Deli Serdang dirangkum sebagai berikut.

Gambar 2. 56
Realisasi dan Struktur Pendapatan Transfer Kabupaten Deli Serdang



Sumber: LRA Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2024 (data diolah, 2025)

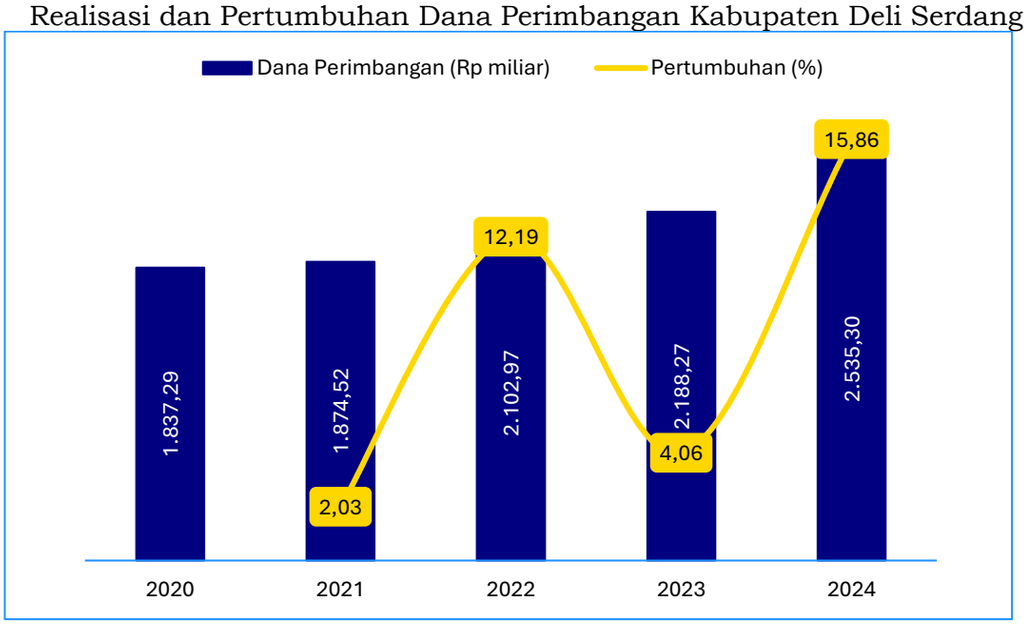
Gambar di atas mengindikasikan terdapat kecenderungan peningkatan realisasi pendapatan transfer yang sempat menurun pada tahun 2020. Setelah tahun 2020, pendapatan transfer cenderung mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2024. Realisasi pendapatan transfer sejak tahun 2020 meningkat dari Rp 2,36 triliun menjadi Rp 3,16 triliun. Kondisi ini menunjukkan kecenderungan peningkatan realisasi pendapatan transfer selama beberapa tahun ke depan. Meskipun demikian, intervensi pemerintah

Kabupaten Deli Serdang untuk mendorong realisasi pendapatan transfer sangat terbatas sehingga perlu disusun strategi untuk menurunkan pendapatan transfer dan lebih banyak mendorong PAD ke depannya. Hal ini juga tercermin dari kinerja pendapatan transfer yang cenderung melebihi target yang telah ditetapkan di awal. Konsistensi bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya dalam membangun Kabupaten Deli Serdang sangat tinggi.

Evaluasi struktur pendapatan transfer mengarah kepada penilaian tiga komponen pendapatan transfer, yaitu dana perimbangan, transfer pemerintah pusat lainnya dan transfer pemerintah daerah lainnya. Struktur utama dari pendapatan transfer selama periode 2020 – 2024 bersumber dari transfer pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan dengan rata-rata sebesar 77,61 persen per tahun. Struktur lainnya adalah transfer pemerintah pusat lainnya dengan rata-rata sebesar 13,35 persen dan transfer pemerintah daerah lainnya dengan rata-rata sebesar 9,04 persen.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terbagi atas dua komponen utama yang meliputi Dana Transfer Umum, dan Dana Transfer Khusus. Untuk Dana Transfer Umum terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Sedangkan Dana Transfer Khusus terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Evaluasi karakteristik dari pendapatan transfer dana perimbangan di Kabupaten Deli Serdang selama periode pengelolaan 2020 – 2024 dirangkum sebagai berikut.

Gambar 2. 57
Realisasi dan Pertumbuhan Dana Perimbangan Kabupaten Deli Serdang



Sumber: LRA Kabupaten Deli Serdang 2020-2024 (data diolah, 2025)

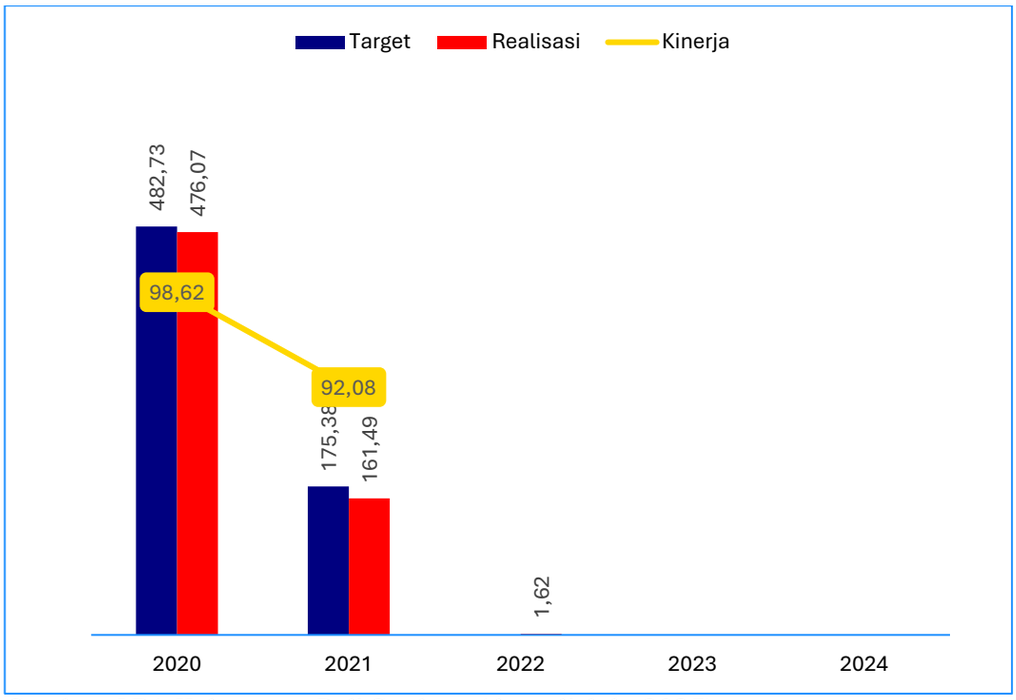
Sumber pendapatan utama dari Kabupaten Deli Serdang adalah pendapatan transfer dalam bentuk dana perimbangan. Pada tahun 2020 realisasi dana perimbangan sebesar Rp 1,84 triliun. *Refocusing* anggaran yang diambil oleh pemerintah pusat mengakibatkan penyesuaian kebijakan transfer berdampak terhadap penurunan realisasi transfer dana perimbangan ke daerah-daerah, meskipun dari sisi kinerja, realisasi pendapatan transfer justru mencapai lebih dari 100 persen. Realisasi pendapatan transfer dalam bentuk dana perimbangan dari pemerintah pusat mulai mengalami peningkatan kembali sejak tahun 2021 dengan realisasi peningkatan sebesar 2,03 persen, 12,19 persen pada tahun 2022 dan 4,06 persen pada tahun 2023. Realisasi pendapatan transfer pada tahun 2024 mencapai Rp 2,55 triliun. Pemerintah pusat melalui dana perimbangan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berupaya mempercepat pembangunan di Kabupaten Deli Serdang.

Pendapatan Lain-Lain yang Sah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menjelaskan bahwa pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi dapat berupa dana hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai perundang-undangan. Sumber pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang yang berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari pendapatan hibah.

Realisasi dan pertumbuhan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dalam hal ini diwakilkan oleh pendapatan hibah di Kabupaten Deli Serdang dirangkum sebagai berikut.

Gambar 2. 58
Pergerakan Target, Realisasi dan Kinerja Pendapatan Lain-Lain yang Sah Kabupaten Deli Serdang



Sumber: LRA Kabupaten Deli Serdang (data diolah, 2025)

Struktur pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah di Kabupaten Deli Serdang adalah pendapatan hibah dan pendapatan lainnya. Karakteristik utama dari kedua sumber pendapatan dalam lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah realisasinya yang tidak dapat diprediksi dalam proses perencanaan pendapatan daerah. Realisasi Kabupaten Deli Serdang atas pendapatan hibah selama periode 2020-2024 mengalami fluktuasi yang sangat besar. Pada tahun 2020 dan 2021 pemerintah menargetkan perolehan lain-lain pendapatan yang sah yang mencapai Rp 482,7 milyar dan Rp 175,38 miliar. Dari sisi realisasi pendapatan ini hanya mencapai Rp 476,07 miliar pada tahun 2020 dan Rp 161,49 miliar pada tahun 2021. Kinerja pada tahun 2020 mencapai 98,52 persen dan pada tahun 2021 mencapai 92,08 persen. Pada tahun 2023 dan 2024 tidak terjadi realisasi pendapatan lain-lain yang sah di Kabupaten Deli Serdang.

Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu penerimaan pendapatan hibah tidak dapat diprediksi secara spesifik selama periode penyelenggaraan pemerintahan. Di sisi lain pemerintah Kabupaten Deli Serdang memperoleh pendapatan lainnya untuk kategori pendapatan lain-lain tersebut.

Pendapatan daerah digunakan untuk membiayai belanja daerah Kabupaten Deli Serdang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah administrasi Kabupaten Deli Serdang. Belanja daerah merupakan aktivitas pembiayaan yang melaksanakan agenda pemerintahan dengan menyelaraskan belanja dengan program pembangunan daerah untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029. Penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta efisiensi yang berbasis pada kinerja program daerah. Kebijakan pengelolaan belanja daerah berorientasi pada pencapaian hasil kerja.

Belanja Daerah

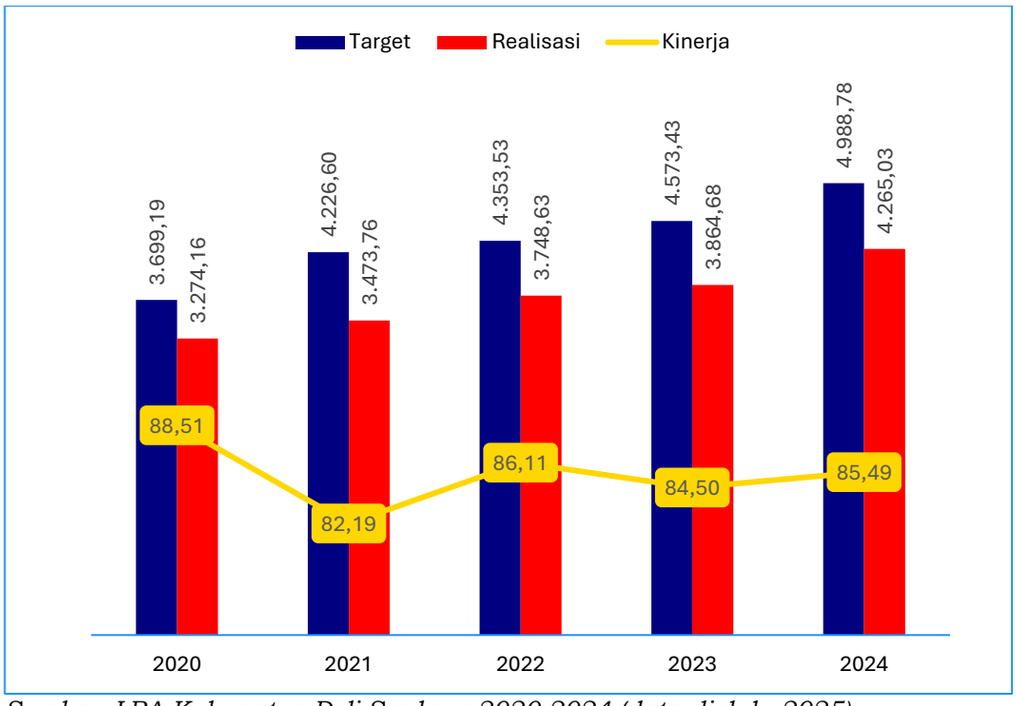
Pedoman penyusunan APBD Kabupaten Deli Serdang, khususnya dalam penyelenggaraan belanja daerah, didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjelaskan bahwa belanja daerah diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek, terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode

akuntansi.

Pemerintah juga mempersiapkan anggaran belanja tidak terduga untuk keperluan darurat, termasuk kebutuhan mendesak yang tidak dapat diprediksi dalam perencanaan pembangunan sebelumnya. Selain itu, belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau pemerintah desa, yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kinerja keuangan daerah pada masa lalu, analisis belanja daerah dilakukan untuk mengidentifikasi realisasi kebijakan pembelanjaan selama periode 2019-2023. Hasil analisis ini akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana Belanja Daerah dalam RPJMD 2025-2029, dengan tujuan utama mengetahui kapasitas pendanaan guna mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Analisis belanja daerah bertujuan memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan selama periode 2019-2023, yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana Belanja Daerah dalam RPJMD 2025-2029, dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Target dan realisasi belanja daerah di Kabupaten Deli Serdang periode 2019-2023 dirangkum sebagai berikut.

Gambar 2. 59
Pergerakan Target, Realisasi dan Kinerja Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang



Sumber: LRA Kabupaten Deli Serdang 2020-2024 (data diolah, 2025)

Evaluasi anggaran dan realisasi belanja Kabupaten Deli Serdang tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan variasi yang signifikan dalam pencapaian target keuangan serta pertumbuhan realisasi dan kinerja capaian. Pada tahun 2020 target belanja daerah sebesar Rp 3,70 triliun, sementara realisasi lebih rendah, yaitu sebesar Rp 3,27 triliun sehingga kinerja Belanja Daerah pada tahun 2020 sebesar 88,51 persen.

Perencanaan dan realisasi belanja Kabupaten Deli Serdang tahun 2021 mencatat perbaikan signifikan dengan target yang sedikit meningkat sebesar 14,26 persen menjadi Rp 4,23 triliun. Realisasi penyerapan anggaran belanja pada tahun 2021 mencapai 82,19 persen dengan nilai belanja Rp 3,47 triliun. Realisasi penyerapan anggaran belanja ini juga menjadi penyerapan yang paling rendah dalam periode yang dianalisis. Tren peningkatan target dan realisasi berlanjut di tahun 2022, meskipun dengan laju pertumbuhan yang lebih moderat. Target belanja daerah meningkat 0,07 persen dengan realisasi yang meningkat sebesar 7,91 persen menjadi Rp 3,75 triliun dengan capaian kinerja yang tetap stabil pada 88,63 persen.

Hasil evaluasi gambaran belanja daerah pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan kembali pada target dan realisasi

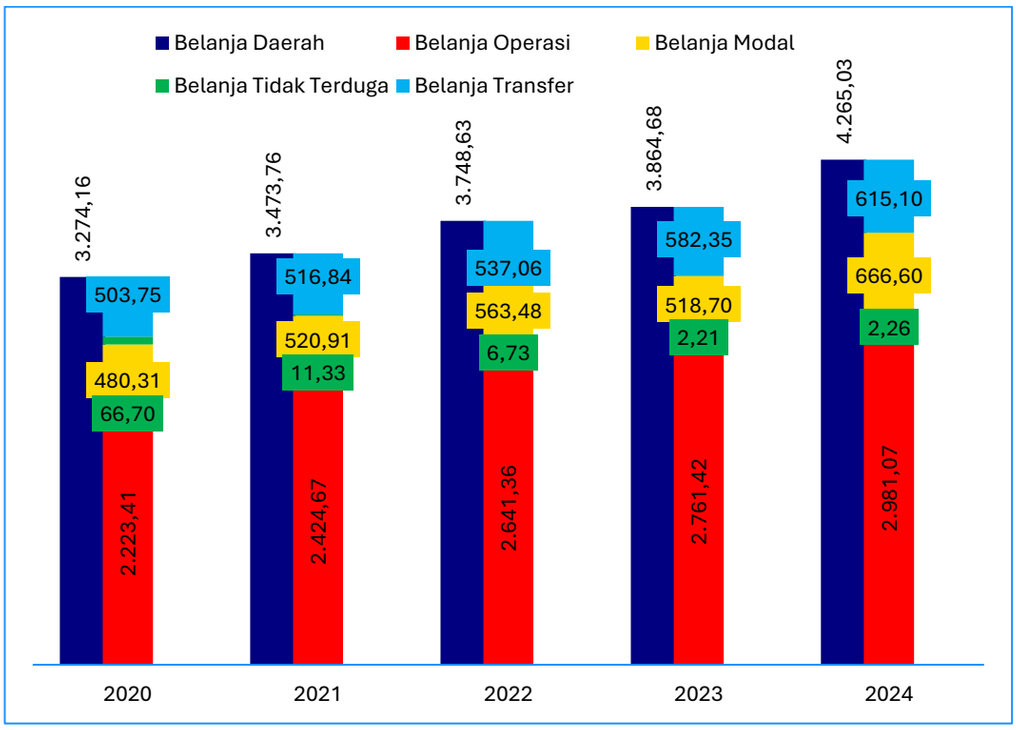
penyerapan belanja daerah. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan target sebesar 8,13 persen menjadi Rp 4,57 triliun. Di sisi lain, realisasi penyerapan anggaran kembali mengalami peningkatan dengan pertumbuhan realisasi mencapai 3,09 persen menjadi Rp 3,86 triliun. Kondisi ini menjadi peningkatan capaian penyerapan anggaran yang lebih tinggi daripada periode sebelumnya. Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berhasil mencapai realisasi penyerapan anggaran yang sebesar 84,50 persen. Pada tahun 2024, target belanja daerah kembali meningkat menjadi sebesar Rp 4,99 triliun, sementara realisasi belanja daerah sebesar Rp 4,27 triliun sehingga kinerja belanja daerah pada tahun 2024 sebesar 85,49 persen.

Secara keseluruhan, meskipun ada peningkatan target dari tahun ke tahun, realisasi dan capaian kinerja menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Tahun 2020 menjadi tahun dengan kinerja terbaik, sedangkan tahun 2021 menjadi tahun dengan tantangan terbesar dalam pencapaian target keuangan. Secara rata-rata, kinerja penyerapan anggaran belanja mencapai 85,36 persen. Belum optimalnya penyerapan anggaran menunjukkan bahwa program-program penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak didukung dengan belanja yang memadai sehingga dapat mengakibatkan kekhawatiran target pembangunan daerah tidak dapat dicapai sebagaimana mestinya.

Komponen belanja daerah Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, mencakup empat kategori utama: belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan bagian terbesar dari anggaran daerah, digunakan untuk mendanai kegiatan operasional sehari-hari pemerintah daerah. Kategori ini mencakup pengeluaran untuk gaji pegawai, perawatan aset, serta pengadaan barang dan jasa yang diperlukan untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Belanja modal diarahkan untuk investasi dalam aset tetap, seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Sementara itu, belanja tidak terduga disiapkan untuk mengatasi kejadian atau keadaan darurat yang tidak dapat diprediksi, seperti bencana alam atau keadaan darurat lainnya. Belanja transfer

meliputi alokasi dana yang ditransfer ke pemerintah desa atau entitas lain dalam bentuk bantuan keuangan. Dengan komposisi ini, belanja daerah dirancang untuk memastikan bahwa semua aspek kebutuhan operasional, investasi jangka panjang, tanggap darurat, dan bantuan keuangan terpenuhi secara efektif dan efisien. Gambaran struktur belanja daerah di Kabupaten Deli Serdang dirangkum sebagai berikut.

Gambar 2. 60
Struktur Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang



Sumber: LRA Kabupaten Deli Serdang 2020-2024 (data diolah, 2025)

Gambaran umum realisasi belanja dan struktur belanja pemerintah Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan pola pengeluaran pemerintah serta peningkatan belanja pemerintah dari waktu ke waktu. Belanja Operasi secara konsisten menjadi komponen terbesar, menunjukkan fokus yang kuat pada operasional penyelenggaraan pemerintahan dan kebutuhan berkelanjutan untuk mendukung fungsi pemerintahan. Secara umum terjadi penyesuaian struktur belanja dari tahun 2019. Pada tahun 2020 struktur belanja terdiri dari 68,91 persen belanja operasi dan 14,67 persen belanja modal. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sejak tahun 2020 melakukan penyesuaian struktur belanja dengan lebih moderat dalam penggunaan belanja operasi.

Belanja operasi bergerak dari Rp 2,22 triliun pada tahun 2020 mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2024 dengan laju

pertumbuhan sebesar 7,61 persen per tahun. Pada tahun 2024 pengeluaran belanja pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk belanja operasi mencapai Rp 2,98 triliun. Dari sisi struktur, belanja operasi memiliki struktur dominan yang bergerak antara 67,91 persen sampai dengan 71,45 persen dengan rata-rata sebesar 69,90 persen dari total belanja daerah. Kondisi ini mencerminkan prioritas pada keberlanjutan belanja operasional dalam penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Deli Serdang.

Evaluasi terhadap struktur belanja modal menunjukkan pola yang relatif sama dengan pergerakan pada belanja operasi. Pada tahun 2021 dan 2022 terjadi peningkatan belanja modal sampai dengan Rp 563,48 miliar. Pada tahun 2023 kembali terjadi penurunan realisasi belanja operasi yang mencapai Rp 518,70 miliar dan pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi sebesar Rp 666,60 miliar. Dari sisi proporsi struktur belanja, terdapat kecenderungan penurunan proporsi belanja modal dari sebelumnya 19,53 persen pada tahun 2019 turun menjadi 13,42 persen pada tahun 2023. Pergerakan realisasi belanja modal mengindikasikan penyesuaian strategi investasi sesuai dengan kebutuhan infrastruktur dan kondisi ekonomi. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menggunakan belanja modal untuk melakukan investasi pada pembangunan infrastruktur dalam melakukan percepatan pembangunan.

Struktur Belanja Tidak Terduga memiliki kontribusi yang sangat kecil dengan proposi antara 0,05 persen sampai dengan 2,04 persen. Pengeluaran ini dilakukan sebagai respons terhadap keadaan darurat *pandemic* COVID-19. Di luar tahun 2020, belanja tidak terduga tetap terjadi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang sebelumnya tidak dianggarkan atau ada kondisi tertentu yang memerlukan belanja darurat. Secara umum rendahnya realisasi belanja tidak terduga menunjukkan pengelolaan risiko di Kabupaten Deli Serdang yang semakin baik sehingga tidak banyak pengeluaran di luar perencanaan yang harus dilakukan. Secara praktis, tidak dapat dievaluasi kecenderungan pergerakan dari belanja tidak terduga karena sifatnya yang di luar perencanaan. Kondisi ini mencerminkan rendahnya pengeluaran atas kejadian tidak terduga di Kabupaten Deli Serdang.

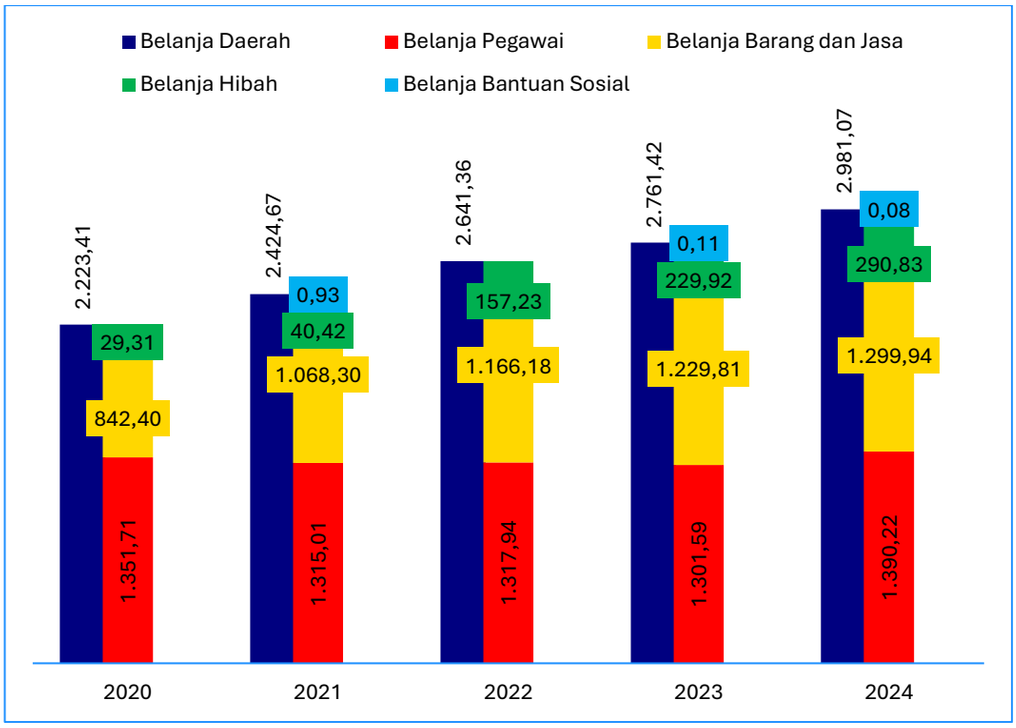
Struktur belanja dalam bentuk belanja transfer mulai mengalami pertumbuhan sejak tahun 2020. Pandemi COVID-19 yang terdeteksi pada tahun 2020 mengalihkan berbagai aktivitas belanja transfer sehingga terjadi peningkatan yang signifikan. Secara umum realisasi belanja transfer bergerak secara melambat dengan laju pertumbuhan 4,95 persen per tahun selama periode 2020 sampai dengan 2024. Dari sisi struktur, belanja transfer berada pada rata-rata sebesar 14,82 persen selama periode 2020 sampai dengan 2024. Apabila kondisi ini memperhatikan bahwa tidak ada realisasi belanja transfer pada tahun 2020 dengan laju pertumbuhan rata-rata dari belanja transfer mencapai 5,12 persen per tahun.

Pola pergerakan belanja Kabupaten Deli Serdang menunjukkan manajemen anggaran yang adaptif dan fokus yang kuat pada pemulihan dan stabilitas ekonomi. Analisis gambaran realisasi belanja dan struktur belanja Kabupaten Deli Serdang menggambarkan prioritas yang jelas dan adaptasi anggaran yang efektif dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan operasional.

Struktur belanja operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan. Realisasi belanja Kabupaten Deli Serdang selama periode 2020-2024 difokuskan kepada empat jenis belanja, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Pergerakan realisasi belanja pada komponen belanja tersebut dirangkum sebagai berikut.

Gambar 2. 61

Pergerakan Struktur Belanja Operasi Kabupaten Deli Serdang



Sumber: LRA Kabupaten Deli Serdang (2020-2024 (data diolah, 2025)

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran belanja untuk mendukung kegiatan rutin Pemerintah Daerah yang memberi manfaat dalam satu periode akuntansi. Struktur dari belanja operasi di Kabupaten Deli Serdang dikelompokkan ke dalam empat kategori belanja, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Secara umum terlihat bahwa Belanja Pegawai menjadi struktur utama dari belanja operasi. Pada tahun 2020 realisasi belanja pegawai sebesar Rp 1,35 triliun dengan adanya penyesuaian anggaran pada awal pandemi COVID-19. Pada tahun 2021 sampai dengan 2024 secara nominal jumlah pengeluaran belanja pegawai relatif sama dengan nilai berkisar pada Rp 1,30 triliun sampai dengan Rp 1,39 triliun. Dari sisi proporsi, terdapat kecenderungan penurunan tren belanja pegawai, dari sebelumnya mencapai 60,79 persen pada tahun 2020 secara perlahan turun menjadi 46,63% pada tahun 2024. Konsistensi ini memberikan gambaran bahwa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berupaya untuk mengoptimalkan pengelolaan APBD bukan hanya untuk fokus kepada pengelolaan belanja pegawai saja namun dialihkan kepada belanja yang sifatnya produktif untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Deli Serdang.

Realisasi belanja barang dan jasa menunjukkan pertumbuhan yang positif dari waktu ke waktu. Pencapaian realisasi belanja barang dan jasa mencapai Rp 842,40 miliar pada tahun 2020. Pandemi COVID-19 mengakibatkan pengurangan kepada belanja barang dan jasa dan dialihkan kepada penanganan COVID-19. Meskipun demikian, terjadi peningkatan realisasi belanja sejak tahun 2021 sampai dengan 2024. Pada tahun 2021 realisasi belanja barang dan jasa meningkat menjadi Rp 1,07 triliun. Peningkatan ini berlanjut hingga mencapai Rp 1,29 triliun pada tahun 2024. Kondisi ini menggambarkan adanya peningkatan investasi dalam pengadaan barang dan jasa untuk mendukung operasional dan berbagai kegiatan strategis pemerintah dalam mempercepat pemulihan setelah pandemi COVID-19 dan mendorong percepatan pertumbuhan di Kabupaten Deli Serdang. Fluktuasi ini mungkin mencerminkan respons terhadap kebutuhan mendesak selama pandemi dan penyesuaian untuk memastikan kelangsungan operasional yang efisien. Secara struktur, terdapat kecenderungan peningkatan kontribusi belanja barang dan jasa yang konsisten meningkat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Dari sisi struktur belanja operasi, kontribusi belanja barang dan jasa mengalami peningkatan dari sebelumnya 37,89% pada tahun 2020 menjadi 43,61 persen pada tahun 2024.

Struktur belanja hibah mengalami perubahan besar dalam kurun Waktu pelaksanaan APBD 2020 sampai dengan 2024. Pada tahun 2020, realisasi belanja hibah adalah Rp 29,31 miliar mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi Rp 40,42 miliar. Terdapat lonjakan pengeluaran dana hibah pada tahun 2022-2024. Belanja hibah meningkat menjadi Rp 157,23 Milyar atau meningkat sampai dengan 2,89 kali lipat dari belanja hibah tahun 2021. Pada tahun 2023 kembali terjadi peningkatan sebesar 45,74 persen hingga mencapai realisasi Rp 229,14 miliar dan pada tahun 2024 kembali meningkat sebesar 26,49 persen sehingga menjadi sebesar Rp 290,83 miliar. Perubahan besar ini mencerminkan penyesuaian dalam program hibah sesuai dengan prioritas tahunan yang juga menyesuaikan dengan situasi ekonomi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Deli Serdang setiap tahun. Secara struktural belanja hibah pada 2020 sampai dengan 2021 berada pada kontribusi 1,32 persen

sampai dengan 1,67 persen. Proporsi ini mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2022 dan 2023 yang membuat kontribusi belanja hibah pada tahun 2024 mencapai 9,76 persen.

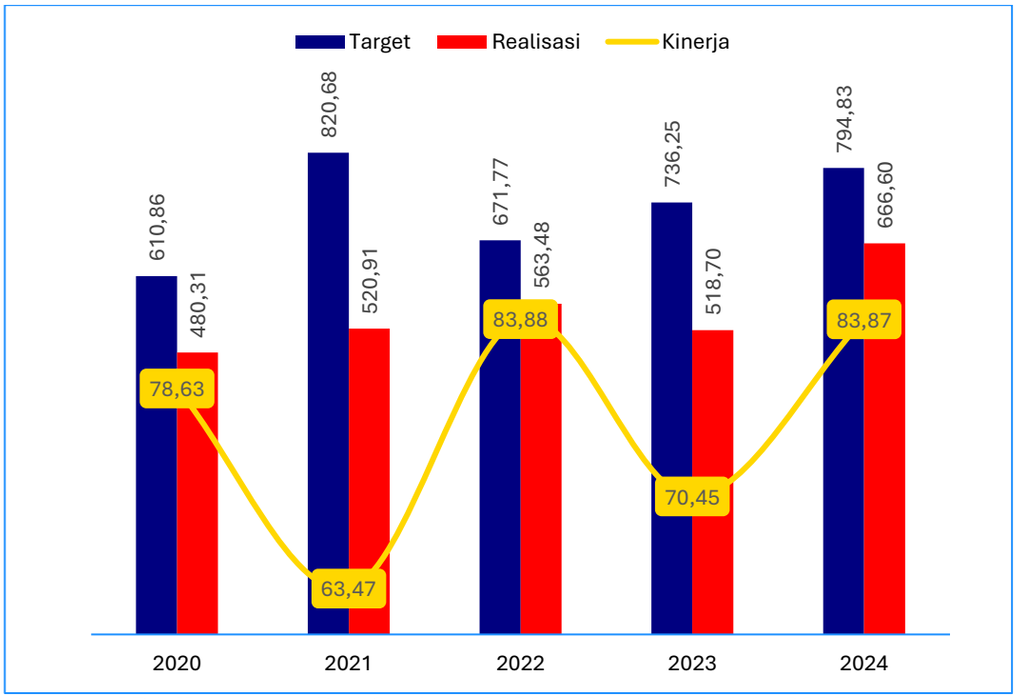
Gambaran realisasi Belanja Bantuan Sosial memiliki alokasi yang cukup kecil selama periode 2020 sampai dengan 2024, dengan realisasi belanja sosial terjadi pada 2021, 2023, dan 2024. Prioritas yang sangat rendah pada kategori belanja ini mencerminkan kebijakan yang lebih fokus pada program-program dengan dampak lebih besar dalam skala operasional atau perencanaan yang lebih strategis.

Gambaran umum realisasi dan struktur belanja operasi menunjukkan bahwa pemerintah memiliki strategi pengelolaan anggaran yang adaptif, menyesuaikan alokasi sesuai dengan situasi dan kebutuhan yang berubah. Fluktuasi dalam berbagai kategori belanja mencerminkan respon terhadap kondisi eksternal seperti pandemi, serta penyesuaian kebijakan untuk mendukung operasional dan program-program strategis. Konsistensi dalam Belanja Pegawai dan peningkatan dalam Belanja Barang dan Jasa mengindikasikan fokus yang kuat pada keberlanjutan operasional dan investasi dalam pengadaan barang dan jasa yang esensial untuk mendukung berbagai aktivitas pemerintahan. Fluktuasi dalam Belanja Hibah menunjukkan fleksibilitas dalam mendukung program-program tertentu sesuai dengan prioritas tahunan, sementara alokasi minimal untuk Belanja Bantuan Sosial mencerminkan strategi yang lebih terfokus pada program dengan dampak lebih besar dan luas. Hasil evaluasi kinerja belanja operasi tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 menegaskan bahwa Kabupaten Deli Serdang tetap mampu mempertahankan dan bahkan meningkatkan penyerapan belanja operasional serta menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kelangsungan dan efisiensi fungsi-fungsi pemerintahan meskipun menghadapi ketidakpastian dan permasalahan ekonomi.

Struktur belanja daerah selanjutnya adalah belanja modal. Belanja modal, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang ditujukan untuk pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja modal mencakup lima kategori utama: belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja tanah melibatkan pengeluaran untuk pembelian atau pengadaan lahan yang dapat dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan. Belanja peralatan dan mesin mencakup pengeluaran untuk perolehan alat dan mesin yang diperlukan untuk mendukung operasional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Belanja bangunan dan gedung mencakup pengeluaran untuk pembangunan atau perolehan bangunan dan gedung. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan mencakup pengeluaran untuk pembangunan dan perbaikan jalan, sistem irigasi, dan jaringan infrastruktur lainnya. Belanja modal aset tetap lainnya mencakup pengeluaran untuk perolehan aset tetap lainnya yang tidak termasuk dalam kategori sebelumnya. Pergerakan penggunaan belanja untuk kegiatan belanja modal dirangkum sebagai berikut.

Gambar 2. 62
Pergerakan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Deli Serdang



Sumber: LRA Kabupaten Deli Serdang 2020-2024 (data diolah, 2025)

Belanja modal menjadi salah satu indikator penting dalam memahami alokasi dan penggunaan dana oleh pemerintah untuk keperluan pembangunan dan infrastruktur. Selama periode 2020 hingga 2024, terjadi fluktuasi signifikan dalam realisasi total belanja

modal di Kabupaten Deli Serdang. Kondisi ini menggambarkan dinamika kebijakan fiskal, prioritas pembangunan, dan tantangan ekonomi yang dihadapi. Secara umum belanja modal mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022, lalu kembali menurun pada tahun 2023 dan meningkat pada tahun 2024. Belanja modal Kabupaten Deli Serdang mengalami penyesuaian signifikan akibat pandemi COVID-19, diikuti dengan pemulihan bertahap dan peningkatan yang cenderung agresif pada tahun 2021 sampai dengan 2024. Pola pergerakan ini mencerminkan prioritas pemerintah dalam menyeimbangkan antara penanganan krisis dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi infrastruktur. Perubahan dalam alokasi anggaran untuk berbagai sektor juga menunjukkan adaptasi terhadap kebutuhan mendesak dan strategi jangka panjang pemerintah.

Gambaran umum belanja daerah terkait belanja modal pada tahun 2020 sampai 2024 Kabupaten Deli Serdang menunjukkan pengeluaran untuk belanja tanah sangat rendah sepanjang periode tersebut. Tidak ada pengeluaran signifikan yang terjadi sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan Rp 4,10 Milyar untuk modal tanah dengan realisasi yang semakin menurun sampai dengan tahun 2023 mencapai Rp 0,39 Milyar dan tidak ada pengeluaran untuk modal tanah pada tahun 2024. Pergerakan ini menunjukkan bahwa belanja untuk pengadaan lahan bukan merupakan prioritas utama pemerintahan selama periode 2020 sampai dengan tahun 2024. Pengadaan lahan dilakukan dengan jumlah yang sangat terbatas. Secara struktur, belanja tanah memiliki proporsi sebesar 0,85 persen pada tahun 2020 dan terus mengalami penurunan hingga 0,00 persen pada tahun 2024.

Dari sisi belanja peralatan dan mesin, tidak terjadi perubahan alokasi yang signifikan dari realisasi belanja yang terjadi. Pada tahun 2020, realisasi belanja ini mencapai Rp 113,18 miliar. Pada tahun 2021 terjadi penurunan belanja menjadi Rp 96,50 miliar. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan belanja mencapai Rp 119,31 miliar dan turun ke tingkat Rp 107,15 miliar pada tahun 2023 dan menurun pada tahun 2024 menjadi Rp 140,10 miliar. Secara umum nilai

realisasi dari belanja peralatan dan mesin bergerak antara Rp 96,50 Milyar sampai dengan Rp 119,31 Milyar dengan rata-rata sebesar 108,50 miliar. Meskipun secara nominal tidak terjadi pergerakan yang berarti, secara proporsi terjadi fluktuasi yang bergerak dari 23,56 persen pada tahun 2020, menurun menjadi 18,53 persen pada tahun 2021. Dinamika proporsi belanja peralatan dan mesin terus terjadi dan pada tahun 2024 proporsi belanja peralatan dan mesin mencapai 15,62 persen. Pola pergerakan realisasi belanja ini menunjukkan perubahan kebutuhan dan prioritas dalam pengadaan peralatan dan mesin.

Dari sisi realisasi belanja gedung dan bangunan, terjadi penurunan signifikan dari Rp 79,70 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 105,84 miliar pada tahun 2021. Angka ini mengalami penurunan menjadi 103,08 miliar pada tahun 2022. Belanja untuk keperluan Gedung dan Bangunan tahun 2023 kembali menurun menjadi Rp 74,86 miliar dan pada tahun 2024 meningkat menjadi Rp 94,58 miliar Pola pergerakan ini menunjukkan prioritas pembangunan gedung dan bangunan di Kabupaten Deli Serdang. Secara struktur, belanja gedung dan bangunan memiliki rata-rata sebesar 16,76 persen selama periode 2020 sampai dengan 2024 dengan puncak mencapai 20,32 persen mencapai proporsi terendah pada tingkat 14,19 persen pada tahun 2024.

Struktur Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan secara konsisten merupakan realisasi belanja modal terbesar dengan rata-rata 58,77 persen per tahun. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang secara konsisten mengoptimalkan pembangunan jalan, irigasi dan jaringan di Kabupaten Deli Serdang untuk mengupayakan penyelenggaraan pemerintahan optimal kepada masyarakat. Stabilitas pengeluaran yang besar pada kategori belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan menunjukkan fokus yang kuat pada pengembangan infrastruktur. Secara nominal terdapat penurunan pada tahun 2020 dan bergerak perlahan meningkat pada tahun-tahun setelahnya. Dari sisi proporsi pengeluaran belanja, belanja jalan, irigasi dan jaringan tetap menjadi fokus utama belanja modal dengan rentang antara 54,51 persen sampai dengan 67,27 persen yang terjadi pada tahun 2024.

Peninjauan dari isi belanja aset tetap lainnya menunjukkan

pengeluaran yang relatif stabil dengan nominal pengeluaran rata-rata sebesar Rp 18,47 miliar per tahun. Pengeluaran terbesar terjadi pada tahun 2020 yang mencapai Rp 21,53 miliar dan mengalami penurunan sampai dengan Rp 14,16 miliar pada tahun 2022. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan kembali sampai dengan tingkatan Rp 20,50 miliar dan pada tahun 2024 menurun menjadi Rp 18,66 miliar. Dari sisi proporsi, pengeluaran pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk belanja aset tetap lainnya berkisar pada tingkatan 3,42 persen per tahun dengan pencapaian sebesar 2,80 persen pada tahun 2024.

Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan komponen penting dalam transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Analisis pembiayaan daerah ini mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan yang timbul akibat ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja. Pembiayaan daerah mencakup dua kategori utama

1. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan bersumber dari beberapa elemen, termasuk Selisih Lebih Perhitungan (SiLPA) Anggaran Tahun Sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya
2. Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk berbagai tujuan seperti Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan Lainnya.

Dalam upaya memperoleh gambaran kinerja keuangan pemerintah daerah dari aspek pembiayaan, langkah awal yang harus dilakukan adalah menilai komponen pembiayaan Kabupaten Deli Serdang sehingga tergambarkan pola riil realisasi APBD dan pembiayaan. Evaluasi ini melibatkan perbandingan pergerakan pembiayaan daerah selama periode 2019 hingga 2023. Gambaran

kinerja keuangan yang dilakukan tidak hanya memberikan gambaran tentang bagaimana pemerintah daerah mengelola sumber-sumber pembiayaan yang tersedia, tetapi juga mencerminkan seberapa efektif strategi pembiayaan diterapkan dalam memenuhi kebutuhan anggaran. Melalui evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berupaya mengidentifikasi pola penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, serta menilai kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keuangan dan mendukung pertumbuhan pembangunan daerah. Evaluasi yang komprehensif dan mendalam ini adalah kunci untuk memastikan bahwa strategi pembiayaan yang diterapkan mampu menutupi defisit anggaran dengan efektif dan efisien. Hasil kinerja penerimaan pembiayaan tersebut dirangkum sebagai berikut:

Tabel 2. 104
Surplus (Defisit) Riil Realisasi APBD dan SiLPA Kabupaten Deli Serdang (Rp miliar)

	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi Pendapatan Daerah	3.335,35	3.539,28	3.731,02	3.853,33	4.330,10
Pendapatan Pembiayaan Daerah	0,00	0,06	0,13	0,03	0,00
Dikurangi dengan					
Realisasi Belanja daerah	3.274,16	3.473,76	3.748,63	3.864,37	4.265,03
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4,33	13,42	-	-	5,00
Surplus (Defisit) Riil	**56,86**	**52,16**	**-17,48**	**-11,01**	**60,07**
SiLPA Sebelumnya	83,36	140,22	192,38	174,91	163,10
Penyesuaian APBD	-	-	-	-	-
SiLPA Perhitungan Sebelumnya	83,36	140,22	192,38	174,91	
SiLPA	**140,22**	**192,38**	**174,91**	**163,10**	**223,17**

Sumber: BKAD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Gambaran umum surplus dan defisit riil APBD Kabupaten Deli Serdang menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran selama tahun berjalan. Suplus dan defisit menggambarkan kemampuan Kabupaten Deli Serdang dalam menghasilkan pendapatan daerah kemudian melakukan belanja daerah sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan pendanaan dari sumber -sumber pendapatan secara efektif dan efisien. Pembiayaan, berupa pendapatan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Deli Serdang menjadi sumber pendapatan dan pengeluaran tambahan sehubungan

dengan penyelenggaraan pemerintahan di luar pendapatan dan belanja daerah yang terjadi selama tahun berjalan. Surplus atau defisit riil diperoleh setelah menambahkan surplus atau defisit tahun berjalan sehubungan dengan pendapatan dan belanja daerah dengan pembiayaan netto dari aktivitas pembiayaan daerah. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) merupakan dana APBD tahun sebelumnya yang dapat digunakan untuk menutupi defisit riil yang terjadi dan dapat bertambah jumlahnya seiring dengan surplus riil yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang.

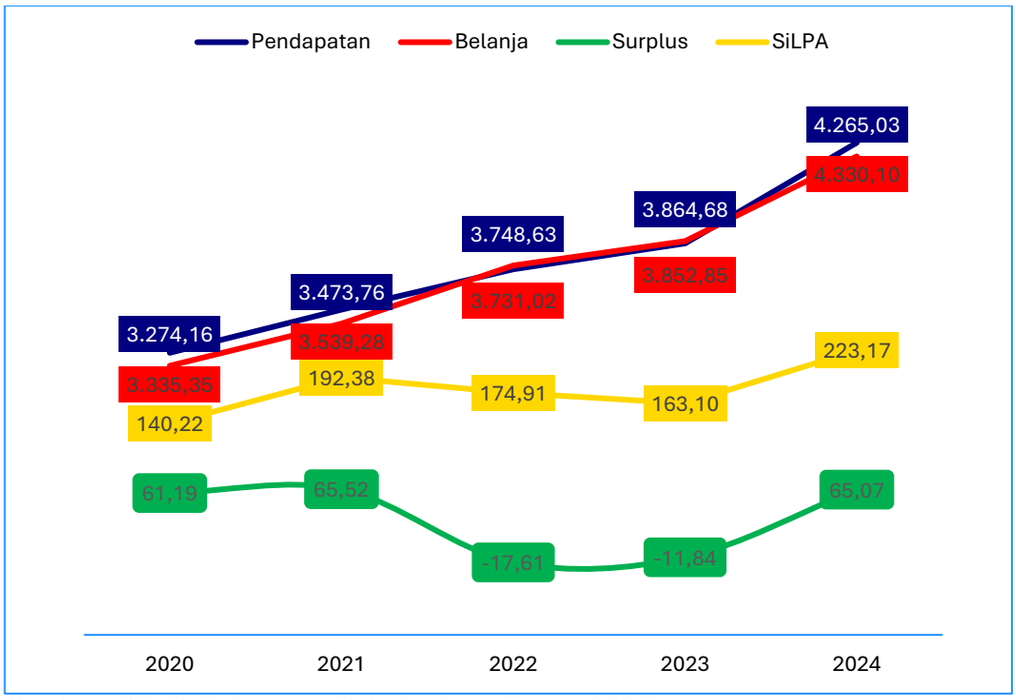
Selama periode 2020 sampai dengan 2024, Kabupaten Deli Serdang cenderung mengalami defisit riil yang mencapai Rp -17,48 miliar dan Rp -11,01 miliar pada tahun 2022 dan 2023. Kondisi ini menunjukkan pergerakan agresif dari penyelenggaraan APBD Kabupaten Deli Serdang. Kabupaten Deli Serdang masih memiliki SiLPA dari penyelenggaraan APBD tahun-tahun sebelumnya sehingga dapat mengambil langkah agresif dalam penyelenggaraan APBD. Keberadaan SiLPA dapat menutupi defisit riil yang terjadi sehingga aktivitas belanja sehubungan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan secara agresif.

SiLPA Kabupaten Deli Serdang menunjukkan kesempatan bagi Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan perencanaan APBD secara agresif, dimana pengeluaran untuk belanja daerah dapat disusun sasmpai dengan posisi SiLPA yang tersedia. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang juga perlu mempertimbangkan penggunaan SiLPA untuk meningkatkan efisiensi penganggaran ke depannya. Eksistensi SiLPA menjadi catatan penggunaan pendapatan yang belum optimal untuk mendorong pembangunan di Kabupaten Deli Serdang. Posisi SiLPA dalam efisiensi perencanaan pembangunan diharapkan mencapai posisi nol ke depannya.

Sisa Lebih Penggunaan Anggaran Kabupaten Deli Serdang dari tahun sebelumnya pada tahun 2020 berada pada tingkat rata-rata Rp 178,75 miliar. Penyelenggaraan pemerintahan melalui APBD berupaya untuk meningkatkan efisiensi pendapatan dan belanja sehingga SiLPA pada tahun berjalan diharapkan dapat mendekati nol. Dalam praktiknya, SiLPA Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan sampai dengan Rp 223,17 miliar pada tahun 2024. Pergerakan SiLPA

dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. 63
Pergerakan Realisasi SiLPA Kabupaten Deli Serdang



Sumber: BKAD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

Gambar di atas menunjukkan bahwa pergerakan realisasi pendapatan dan belanja Kabupaten Deli Serdang cenderung bergerak secara fluktuatif. Pelaksanaan APBD khususnya belanja daerah dilakukan dengan memperhatikan kemampuan daerah dari sisi pendapatan dan SiLPA yang dimiliki. Pada tahun 2022 dan 2023 Kabupaten Deli Serdang cukup agresif dalam penyelenggaraan APBD-nya dengan memperhatikan SiLPA yang tersedia. Sampai dengan tahun 2021, SiLPA Kabupaten Deli Serdang cenderung mengalami peningkatan dan mulai menurun pada tahun 2022 dan 2023. Posisi SiLPA pada tahun 2024 mencapai Rp 223,17 miliar yang perlu dioptimalkan untuk kemajuan Kabupaten Deli Serdang.

Kebijakan Keuangan Periode 2020 – 2024

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam penyelenggaraan APBD secara umum tecermin melalui kebijakan pendapatan, pembelanjaan, serta pembiayaan daerah. Dalam menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik, diperlukan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah, serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Setiap langkah dalam

pengelolaan ini harus dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus APBD, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan, hingga pertanggungjawaban yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Dasar Pelaksanaan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan paradigma pengelolaan Otonomi Daerah tidak terpisahkan terhadap perubahan pengelolaan keuangan daerah. Perubahan ini menjadikan pengelolaan keuangan daerah dapat dijalankan secara tertib, transparan, akuntabilitas, konsistensi, komparabilitas, akurat, efisien dan efektif. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD memiliki 6 fungsi:

1. Fungsi otorisasi yang berarti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
2. Fungsi perencanaan yang berarti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
3. Fungsi pengawasan yang berarti anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. Fungsi alokasi yang berarti anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
5. Fungsi distribusi yang berarti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
6. Fungsi stabilisasi yang berarti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, Pemerintah Daerah telah menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK). Selanjutnya, pada bagian ini akan dijelaskan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait dengan kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah.

Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah berasal dari berbagai sumber. Pemerintah perlu melakukan optimalisasi pendapatan daerah dengan strategi yang efektif, baik dalam hal peningkatan basis pajak maupun dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah daerah harus proaktif dalam menggali potensi pendapatan, melalui pendekatan yang inovatif dan berkelanjutan. Misalnya, dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak dan retribusi, serta memperbaiki sistem pelaporan yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam upaya mengevaluasi kebijakan pendapatan daerah yang telah dilaksanakan, maka perlu diulas pendekatan yang telah dilaksanakan selama periode 2019 sampai dengan tahun 2023.

Kebijakan pendapatan daerah tahun 2019-2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Selama periode tahun anggaran 2019-2023, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah; (2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM pengelola pendapatan daerah; dan (3) peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Untuk itu kebijakan yang akan dilaksanakan terkait optimalisasi pendapatan daerah pada tahun 2025-2029, antara lain:

1. meningkatkan pendapatan daerah dengan menerapkan sistem pembayaran pajak secara on-line dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan;
2. meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan

anggaran daerah;

3. meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
4. meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
5. meningkatkan peran dan fungsi Lembaga Teknis dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
6. meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah;
7. mengoptimalkan sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
8. mengembangkan alternatif – alternatif pembiayaan pembangunan lainnya.
9. melakukan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan DPRD Kabupaten Deli Serdang, DPRD Provinsi Sumatera Utara, dan DPR RI
10. Penyusunan Roadmap Optimalisasi PAD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029.

Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara efektif, efisien, adil dan merata sehingga dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam penyediaan pelayanan umum. Oleh karena itu, belanja daerah difokuskan pada upaya peningkatan pelayanan dasar seperti pelayanan kependudukan, pendidikan, kesehatan, prasarana dan sarana (infrastruktur), termasuk infrastruktur lingkungan pasar-pasar tradisional dan fasilitas sosial/fasilitas umum lainnya guna mempercepat proses pembangunan di wilayah administratif Kabupaten Deli Serdang.

Kebijakan belanja daerah selama periode sebelumnya diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Efisiensi dan efektivitas belanja daerah dicapai dengan menyusun prioritas belanja yang tepat sasaran, serta memastikan bahwa setiap pengeluaran daerah memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Pengawasan yang ketat dan transparansi dalam

pelaksanaan anggaran merupakan kunci dalam mencegah terjadinya pemborosan dan penyalahgunaan anggaran. Pemerintah daerah juga melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan belanja daerah, guna memastikan bahwa setiap kebijakan belanja mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Penentuan besaran belanja yang dianggarkan mengacu pada prioritas utama pembangunan serta prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Adapun kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2019-2023 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan, antara lain:

1. Peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
2. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat serta pengendalian inflasi daerah melalui kebijakan ketahanan pangan dan ketersediaan pasokan pangan;
3. Anggaran belanja akan diarahkan sektor pemberdayaan KUKM, perdagangan dan perindustrian yang menopang laju pertumbuhan ekonomi dengan didukung pembangunan infrastruktur;
4. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, Pemerintah Daerah mengarahkan anggaran pada kegiatan - kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam;
5. Kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*) dan pemenuhan program/kegiatan yang berorientasi kepada standar pelayanan minimal (SPM);
6. Pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Deli Serdang yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
7. Kebijakan untuk operasi daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:
   a. mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta pemberian insentif kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi dan jasa yang dihasilkan dijangkau oleh masyarakat luas;
c. mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
d. mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah Daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya; dan
e. mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan aspek penting lainnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan pembiayaan daerah yang telah dilaksanakan mencakup pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan yang tersedia, seperti pinjaman daerah, obligasi daerah, serta kerja sama dengan pihak swasta. Ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan ini sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan daerah dan mendukung program-program pembangunan yang membutuhkan dana besar. Pemerintah daerah melakukan analisis risiko yang mendalam sebelum memutuskan untuk mengambil pembiayaan, serta memastikan bahwa setiap bentuk pembiayaan dilakukan dengan transparan dan bertanggung jawab.

Kebijakan umum pembiayaan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang adalah meningkatkan manajemen pembiayaan daerah dalam

rangka akurasi, efisiensi, efektivitas dan profitabilitas sumber-sumber pembiayaan. Apabila APBD dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan kas daerah dalam bentuk penyertaan modal atau pemberian pinjaman daerah yang dialokasikan kepada pemberian dana bergulir kepada UMKM. Apabila APBD dalam keadaan defisit maka kebijakan yang dilaksanakan adalah memanfaatkan penerimaan pembiayaan secara optimal seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dan penerimaan piutang daerah.

Neraca Daerah

Neraca Daerah adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah pada suatu periode tertentu yang bagian integral dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), neraca daerah memiliki peran penting dalam menyajikan informasi mengenai kekayaan dan kewajiban daerah. Aset yang tercantum dalam neraca daerah meliputi aset lancar seperti kas dan piutang, serta aset tidak lancar seperti tanah, gedung, dan infrastruktur. Sementara itu, kewajiban mencakup berbagai bentuk utang jangka pendek maupun jangka panjang yang menjadi tanggungan pemerintah daerah. Neraca daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pemerintah daerah. Dengan menganalisis neraca daerah, pemerintah dapat menilai kemampuan keuangan daerah dalam mendanai program pembangunan maupun memenuhi kewajibannya. Selain itu, neraca daerah juga membantu dalam mengevaluasi efektivitas pengelolaan aset daerah dari waktu ke waktu.

Neraca daerah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini menjamin keseragaman dan kualitas laporan keuangan daerah di seluruh Indonesia. Selain itu, neraca daerah harus diaudit oleh BPK sebelum disahkan untuk memastikan kewajarannya.

Ekuitas dana dalam neraca daerah mencerminkan kekayaan bersih pemerintah daerah setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban. Komponen ini terdiri dari berbagai pos seperti dana cadangan, dana yang harus disisihkan, dan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA). Ekuitas dana menjadi indikator penting untuk menilai kesehatan fiskal dan kemandirian keuangan suatu daerah. Neraca daerah juga memiliki keterkaitan yang erat dengan laporan keuangan daerah lainnya, seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), dan Laporan Arus Kas (LAK). Keterkaitan ini menciptakan suatu sistem pelaporan keuangan yang komprehensif, di mana neraca daerah memberikan informasi posisi keuangan, sementara laporan lainnya menunjukkan kinerja dan arus kas pemerintah daerah.

Dalam perencanaan keuangan daerah, neraca daerah menjadi dasar untuk menyusun kebijakan fiskal yang berkelanjutan. Pemerintah daerah dapat menggunakan informasi dari neraca daerah untuk merencanakan pembiayaan pembangunan, mengelola utang, atau mengoptimalkan pemanfaatan aset. Tanpa neraca daerah yang akurat, perencanaan keuangan daerah akan kehilangan dasar yang kuat. Neraca daerah merupakan instrumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan akuntabel. Keberadaannya tidak hanya memenuhi kewajiban pelaporan, tetapi juga mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel 2. 105
Neraca Daerah Tahun 2020-2024

No	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	**ASET**					
	A. Aset Lancar	572.793.386.739,07	661.273.998.748,47	695.234.471.461,10	769.051.305.253,28	980.267.669.003,57
	B. Investasi Jangka Panjang	122.402.948.331,40	129.595.353.900,45	125.078.202.587,87	206.542.772.884,17	207.750.553.600,18
	C. Aset Tetap	6.952.865.953.148,65	7.142.926.528.536,24	7.566.411.008.909,60	7.694.007.258.754,32	7.769.344.458.021,13
	D. Aset Lainnya	28.307.015.594,31	28.693.289.582,31	37.212.527.838,59	23.112.821.550,49	9.092.589.176,74
	JUMLAH ASET	**7.676.369.303.813,43**	**7.962.489.170.767,47**	**8.423.936.210.797,16**	**8.692.714.158.442,26**	**8.966.455.269.801,62**
2	**KEWAJIBAN**					
	A. Kewajiban Jangka Pendek	125.232.384.267,98	306.125.242.125,40	80.375.840.311,00	228.020.020.295,03	44.533.024.310,50
	B. Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	
	JUMLAH KEWAJIBAN	**125.232.384.267,98**	**306.125.242.125,40**	**80.375.840.311,00**	**228.020.020.295,03**	**44.533.024.310,50**
3	**EKUITAS**					
	Ekuitas	7.551.136.919.545,45	7.656.363.928.642,07	8.343.560.370.486,16	8.464.694.138.147,23	8.921.922.245.491,12
	JUMLAH EKUITAS	**7.551.136.919.545,45**	**7.656.363.928.642,07**	**8.343.560.370.486,16**	**8.464.694.138.147,23**	**8.921.922.245.491,12**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**7.676.369.303.813,43**	**7.962.489.170.767,47**	**8.423.936.210.797,16**	**8.692.714.158.442,26**	**8.966.455.269.801,62**

Neraca daerah menunjukkan perkembangan posisi keuangan yang stabil selama lima tahun terakhir. Total aset mengalami peningkatan konsisten dari Rp 7,68 triliun pada 2020 menjadi Rp 8,97 triliun di 2024, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,96 persen per tahun. Peningkatan ini terutama didorong oleh pertumbuhan aset lancar yang signifikan dari Rp 572 miliar menjadi Rp 980 miliar, serta aset tetap yang tetap dominan dengan nilai di atas Rp7 triliun setiap tahunnya. Struktur aset didominasi oleh aset tetap dengan rata-rata 89,05 persen dari total aset menunjukkan investasi besar dalam infrastruktur dan properti daerah. Aset lancar menunjukkan tren meningkat yang tajam di tahun 2024 karena akumulasi kas atau piutang yang lebih besar. Investasi jangka panjang relatif stabil di kisaran Rp 120-207 miliar, sementara aset lainnya justru menurun drastis di tahun 2024.

Kewajiban jangka pendek menunjukkan fluktuasi yang cukup besar, dengan puncak di tahun 2021 sebesar Rp 306 miliar dan terendah di tahun 2024 sebesar Rp44 miliar. Tidak adanya kewajiban jangka panjang dalam periode ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki utang berbunga jangka panjang atau obligasi daerah. Ekuitas daerah menunjukkan tren positif yang stabil yang meningkat dari Rp 7,56 triliun menjadi Rp 8,92 triliun selama lima tahun. Pertumbuhan ekuitas yang lebih tinggi dibandingkan kewajiban menunjukkan kemampuan daerah dalam mempertahankan kesehatan fiskal dan akumulasi kekayaan bersih.

Dari analisis rasio keuangan, rasio likuiditas (aset lancar/kewajiban jangka pendek) sangat baik terutama di tahun 2024 mencapai 22 kali, menunjukkan kemampuan yang sangat kuat untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Struktur pendanaan juga sangat sehat dengan 99 persen lebih berasal dari ekuitas. Secara keseluruhan, neraca ini menggambarkan kondisi keuangan daerah yang sangat kuat dengan dominasi aset tetap, pertumbuhan ekuitas yang stabil, dan kewajiban yang minimal. Namun, perlu dicermati penurunan tajam aset lainnya di tahun 2024 dan fluktuasi kewajiban jangka pendek.

2.6.2. Proyeksi Keuangan Daerah

Evaluasi kinerja keuangan daerah Kabupaten Deli Serdang selama periode 2020-2024 menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih sangat tinggi. Dengan rata-rata pendapatan transfer sebesar 69,70 persen dan mencapai 72,99 persen pada tahun 2024, hal ini menandakan perlunya strategi untuk meningkatkan derajat kemandirian fiskal daerah. Ketergantungan ini terutama disebabkan oleh kebijakan terkait gaji Pegawai Negeri Sipil dan program pembangunan di daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang perlu menyusun strategi yang efektif dalam perencanaan periode RPJMD 2025-2029. Salah satu fokus utama adalah meningkatkan fungsi kabupaten sehingga mampu mendukung peningkatan belanja, baik belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, maupun belanja transfer. Dengan demikian, pengelolaan APBD dapat lebih diarahkan pada pembiayaan urusan wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, dan urusan penunjang yang menstimulus kegiatan ekonomi serta sosial budaya masyarakat. Pada periode 2025-2029, belanja daerah akan difokuskan pada program-program penguatan dasar infrastruktur untuk mempersiapkan landasan transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola yang lebih baik. Belanja ini diarahkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, termasuk jalan, irigasi, jaringan, serta aset tetap lainnya yang akan mendukung percepatan pembangunan daerah.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, Kabupaten Deli Serdang berupaya untuk menjadikan prioritas utama ke depan adalah peningkatan kemandirian fiskal daerah dalam mendukung pembiayaan belanja operasi dan belanja modal. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang perlu berupaya mengurangi ketergantungan pada pendapatan transfer dengan menggali potensi sumber pendapatan lokal. Salah satu caranya adalah dengan memperbaiki sistem pengelolaan pajak dan retribusi daerah, serta mengoptimalkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pemerintah akan mengupayakan pengkajian ulang terhadap potensi-potensi retribusi daerah, termasuk potensi retribusi daerah dari pemanfaatan parkir di tepi jalan dan pengelolaan aset daerah lainnya yang dapat

dimanfaatkan untuk pelayanan masyarakat.

Dari sisi belanja, selama periode RPJMD 2025-2029, belanja daerah diprioritaskan kepada peningkatan infrastruktur sebagai modal dasar transformasi sekaligus memberikan stimulus kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Penggunaan belanja operasi lebih diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, subsidi, hibah, serta bantuan sosial. Sementara itu, belanja modal diarahkan untuk percepatan pembangunan infrastruktur yang dapat memperkuat transformasi sosial dan ekonomi daerah.

Prinsip penyelenggaraan APBD didasarkan kepada prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Dengan berpedoman pada klasifikasi belanja sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang akan menyesuaikan perencanaan APBD dengan ketentuan yang berlaku.

Belanja operasi diproyeksikan akan mengalami peningkatan, terutama dalam hal belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, dan bantuan sosial. Untuk menekan pertumbuhan belanja pegawai, diperlukan rasionalisasi jumlah pegawai dan efisiensi organisasi sesuai dengan kebijakan formasi dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penggunaan belanja lainnya akan diarahkan untuk menstimulus aktivitas pemberdayaan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat secara efisien.

Arah kebijakan belanja daerah juga akan difokuskan pada penanganan isu-isu kesehatan masyarakat, seperti stunting, tuberculosis, dan kematian ibu yang masih tinggi. Prioritas ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program-program kesehatan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Dengan strategi yang matang dan kebijakan yang terarah, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang optimis dapat mengurangi ketergantungan pada pendapatan transfer dan meningkatkan

kemandirian finansial daerah. Melalui pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien, Kabupaten Deli Serdang berkomitmen untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dan merata. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah. Bersama-sama, kita dapat membangun Kabupaten Deli Serdang yang lebih mandiri, maju, dan berkelanjutan, serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengelolaan keuangan yang baik dan amanah.

Proyeksi Pendapatan Daerah

Dalam upaya memeroleh proyeksi pendapatan yang realistis, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah melakukan analisis terhadap data realisasi pendapatan daerah sebelumnya. Data historis selama periode 2020 sampai dengan 2024 memberikan gambaran yang jelas tentang pergerakan dan pola pendapatan daerah. Pola ini dapat dijadikan salah satu dasar untuk perencanaan masa depan. Melalui analisis ini, kita dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang paling produktif dan berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah, serta sektor-sektor yang memerlukan perhatian lebih. Selain itu, proyeksi pendapatan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan indikator makroekonomi. Hal ini menjadi langkah strategis yang harus dilakukan dalam proyeksi pendapatan daerah. Indikator makroekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, dan indikator lainnya, memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi yang lebih luas. Dengan memahami bagaimana faktor-faktor ini memengaruhi pendapatan daerah, Pemerintah Daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan responsif. Adapun asumsi-asumsi yang digunakan untuk memproyeksi pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang tahun anggaran 2025-2029, antara lain:

1. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu.

   Laju pertumbuhan pendapatan Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2024 mencapai pertumbuhan sebesar 12,39 persen. Pendapatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2020 berada pada realisasi Rp 3.335 miliar. Pendapatan daerah cenderung

mengalami peningkatan hingga pada tahun 2024 mencapai Rp 4.330 miliar. Laju pendapatan ini didukung kemampuan Kabupaten Deli Serdang dalam mendorong pertumbuhan PAD yang mencapai rata-rata 9,77 persen (*flat rate*) setiap tahunnya. Asumsi ini telah memperhitungkan penurunan realisasi pendapatan yang terjadi pada tahun 2020. Keberhasilan peningkatan PAD ini juga didukung dengan pengoptimalan pendapatan melalui pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah. Sementara itu, retribusi daerah selama lima tahun terakhir masih belum optimal. Dengan mempertimbangkan penggalian potensi pendapatan asli daerah yang lebih optimal, asumsi pendapatan daerah diproyeksikan akan meningkat.

2. Asumsi indikator makro ekonomi

   Dalam upaya memperoleh gambaran yang lebih baik dalam melakukan proyeksi pendapatan daerah, Kabupaten Deli Serdang juga melakukan evaluasi terhadap pencapaian indikator makro. Indikator makro yang digunakan meliputi seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat pengangguran terbuka dan angka kemiskinan yang terjadi selama lima tahun sebelumnya.

   Kabupaten Deli Serdang merupakan kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi tinggi. Pada tahun 2020 Kabupaten Deli Serdang terdampak Pandemi COVID-19 dan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi sampai terjadi kontraksi sebesar 1,78 persen. Perlahan sebagai usaha pemulihan ekonomi, LPE Kabupaten Deli Serdang setiap tahunnya mengalami peningkatan dan percepatan, yaitu 2,23 persen pada tahun 2021, 4,70 persen pada tahun 2022, 5,34 persen pada tahun 2023, dan 5,36 persen pada tahun 2024 Pergerakan indikator makro ini menunjukkan resiliensi perekonomian yang baik dan peluang pertumbuhan yang signifikan di Kabupaten Deli Serdang. Kondisi ini memungkinkan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang.

   Tingkat inflasi di Kabupaten Deli Serdang mengacu kepada inflasi yang terjadi di Kota Medan. Inflasi selama periode 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan angka yang cukup terkendali yang

bergerak pada 1,76 persen pada tahun 2020 menjadi 2,12 persen pada tahun 2024. Meskipun demikian terjadi catatan peningkatan inflasi yang terjadi pada tahun 2022 dimana inflasi sempat mencapai 6,30 persen.

Hasil evaluasi dari tingkat pengangguran masih menunjukkan angka Tingkat Pengangguran Terbuka mencapai 8,02 persen pada tahun 2024. Kondisi ini menurun dari sebelumnya tahun 2020 yang mencapai 9,50 persen. Sejak saat itu Kabupaten Deli Serdang berupaya menurunkan TPT yang pada tahun 2024 mencapai 8,02 persen. Kabupaten Deli Serdang memperoleh surplus tenaga kerja baru yang membuat tingkat pengangguran menjadi semakin tinggi. Peninjauan dari sisi positif, hal ini memberikan peluang bagi Kabupaten Deli Serdang untuk mengoptimalkan perekonomian dengan memanfaatkan angkatan kerja yang belum bekerja sehingga dapat mendorong potensi perekonomian dan pendapatan daerah secara signifikan.

Dari sisi kemiskinan, angka kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang mencapai 3,44 persen pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan pola penurunan selama periode 2020 sampai dengan 2024. Indikator makro ini memberikan arah bahwa pemerintah dapat mendorong potensi pendapatan daerah lebih tinggi selama lima tahun ke depan.

3. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

   Kabupaten Deli Serdang berupaya untuk melakukan ekstensifikasi pendapatan daerah melalui peningkatan jumlah wajib pajak dan sumber-sumber penerimaan pajak serta retribusi daerah. Salah satu kebijakan yang diambil adalah dengan mengoptimalkan titik parkir sebagai sumber penerimaan retribusi parkir di daerah. Ekstensifikasi juga dioptimalkan dengan melakukan pendataan serta pengoptimalan pendataan wajib pajak yang selama ini belum terdata oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Dalam hal intensifikasi pendapatan daerah, pemerintah berupaya mengkaji kembali potensi retribusi dan pajak daerah sehingga dapat memperoleh gambaran nilai optimal atau tarif optimal yang dapat mendukung penerimaan pendapatan daerah sekaligus mengoptimalkan fungsi-fungsi penerimaan pendapatan

retribusi daerah.

4. Kebijakan di bidang keuangan negara dan daerah.
   Pertimbangan ini didasarkan pada kebijakan keuangan pendapatan transfer baik dalam bentuk penerimaan maupun pengeluaran berdasarkan kebijakan keuangan negara maupun daerah.

Dalam upaya untuk menyusun perencanaan anggaran yang lebih baik, diperlukan upaya proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang selama satu periode ke depan. Berikut ini adalah proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang untuk tahun anggaran 2025-2029.

Tabel 2. 106
Proyeksi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang 2025 – 2030 (Rp)

NO	URAIAN	Baseline	APBD	PROYEKSI TAHUN				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**PENDAPATAN**							
	A. Pendapatan Asli Daerah	1.169.363.269.637	1.590.489.582.469	1.286.299.596.600	1.350.614.576.430	1.418.145.305.252	1.489.052.570.514	1.563.505.199.040
	B. Pendapatan Transfer	3.160.734.122.474	3.213.882.782.809	3.278.882.782.809	3.343.882.782.809	3.408.882.782.809	3.473.882.782.809	3.538.882.782.809
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	**4.330.097.392.111**	**4.804.372.365.278**	**4.565.182.379.409**	**4.694.497.359.239**	**4.827.028.088.061**	**4.962.935.353.323**	**5.102.387.981.849**

Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang dilakukan dengan menggunakan acuan pertumbuhan tetap dengan menggunakan potensi pertumbuhan. Potensi pertumbuhan didasarkan pada realisasi pertumbuhan rata-rata selama periode 2020-2024 serta faktor-faktor indikator makro ekonomi dan sosial yang berkembang di Kabupaten Deli Serdang selama periode 2020 sampai dengan 2024. Dengan optimisme dan perencanaan yang baik, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang untuk tahun 2025-2029 direncanakan bersumber dari empat pilar utama, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang sah. Pendapatan transfer diproyeksikan berdasarkan pertumbuhan dan perlambatan kecenderungan dan ketergantungan dari transfer pemerintah pusat dan daerah yang meliputi pendapatan transfer pemerintah pusat berupa dana perimbangan, pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya serta pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya. Selain itu pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang juga melakukan proyeksi terhadap lain-lain pendapatan yang sah. Dengan menerapkan strategi yang inovatif dan efisien, pendapatan Kabupaten Deli Serdang ditargetkan akan mengalami kenaikan setiap tahunnya, dengan persentase potensi pertumbuhan yang signifikan. Peningkatan pendapatan ini tidak hanya mencerminkan kinerja ekonomi yang kuat, tetapi juga komitmen Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun masa depan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.

1. Pendapatan Asli Daerah

   Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) didasarkan kepada proyeksi pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Baseline dalam perhitungan proyeksi didasarkan pada realisasi pendapatan pada masing-masing sumber pendapatan asli daerah. Potensi pertumbuhan pendapatan pajak daerah mencapai 11,00 persen per tahun. Pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi daerah diproyeksikan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan 2,00 persen per tahun. Hal ini diproyeksikan dengan mempertimbangkan

optimisasi dan pengkajian ulang atas sumber-sumber retribusi daerah di Kabupaten Deli Serdang yang selama ini dirasakan belum optimal. Dari sisi hasil pengelolaan keuangan daerah yang sah terjadi pertumbuhan sebesar 6,00 persen per tahun. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami pertumbuhan yang signifikan pada periode 2020 sampai dengan 2024. Ke depan diproyeksikan lain-lain PAD yang sah terus tumbuh dengan sedikit penyesuaian potensi pertumbuhan sehingga diperkirakan akan tumbuh pada tingkat 8,00 persen per tahun.

Peninjauan dari proporsi sumber PAD, Pajak Daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menjadi penggerak utama dalam menghasilkan pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang selama periode 2025-2029. Masih rendahnya sumber PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan disebabkan karena investasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang serta pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada masih belum optimal. Seiring dengan rencana peningkatan *Return on Asset* dari BUMD, maka diharapkan pendapatan dari sumber ini dapat meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, diperlukan adanya intensifikasi dan ekstensifikasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang mampu meningkatkan PAD. Pendapatan Asli Daerah sampai dengan 2029 diproyeksikan meningkat menjadi Rp 1,89 triliun dengan peningkatan tingkat kemandirian daerah mencapai 32,02 persen.

2. Pendapatan Transfer

   Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pendapatan transfer merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Untuk transfer Pemerintah Pusat terdiri dari dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Sedangkan untuk transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Nilai pendapatan transfer Kabupaten Deli Serdang dari pemerintah pusat diproyeksikan masih mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2029 mendatang dengan proyeksi sebesar Rp 3,37 triliun dan total Pendapatan Transfer sebesar Rp 3,69 triliun.

Ketergantungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mulai berkurang pada pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya. Namun posisi strategis dan rencana pengembangan sektor industri serta wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Medan dan pusat pertumbuhan yang ada di Provinsi Sumatera Utara mendorong potensi pertumbuhan pendapatan transfer secara umum.

3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

   Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber utama lain-lain pendapatan yang sah di Kabupaten Deli Serdang adalah Pendapatan Lainnya. Pendapatan lainnya mengacu kepada lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan yang ada dari lain-lain pendapatan yang sah meliputi hibah, dana darurat dan pendapatan lainnya. Kabupaten Deli Serdang tidak menganggarkan potensi pendapatan dari sumber yang sulit untuk diprediksi.

Kebijakan Pendapatan Daerah

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang bersumber dari pusat (Dana Perimbangan), serta pendapatan lain-lain. Saat ini sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan dana perimbangan. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya.

Upaya pengelolaan dan peningkatan PAD di antaranya melalui:

1. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan

peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.

2. Peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah melalui sosialisasi regulasi pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat.
3. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
4. Mengkaji ulang pendapatan retribusi daerah terkait dengan potensi retribusi serta upaya dalam mengoptimalkan pendapatan melalui retribusi daerah.
5. Menaikkan pajak melalui peningkatan/penyesuaian tarif dan perluasan subyek dan obyek pajak dengan meninjau ulang beberapa ketetapan Perda tentang pajak dan retribusi daerah.
6. Pemantapan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah.
7. Peningkatan kualitas dan optimalisasi pengelolaan aset untuk peningkatan pendapatan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
8. Memberikan insentif/bonus dan penghargaan kepada perangkat daerah yang berhasil mencapai atau melampaui target dan menjatuhkan sanksi kepada perangkat daerah yang tidak berhasil mencapai target penerimaan pendapatan daerah secara optimal dalam satu tahun anggaran.
9. Penerapan dan penegakan ketentuan hukum bagi wajib pajak/retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya dan pemberian penghargaan kepada wajib pajak/ retribusi yang telah memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan.
10. Peningkatan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi serta perangkat daerah penghasil.
11. Revitalisasi dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah.
12. Tidak melaksanakan pemungutan terhadap peraturan daerah yang terkait dengan pajak dan retribusi daerah yang telah

dibatalkan oleh pemerintah.

13. Bagian laba yang diperoleh dari PDAM diupayakan untuk direinvestasikan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan untuk menunjang Program Penambahan Sambungan Rumah Air Minum.
14. Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Daerah dicantumkan dalam APBD sebagai jenis pendapatan Lain-lain PAD yang Sah.

Dalam upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah, kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerimaan pajak pusat yang dapat di sharing dengan daerah guna meningkatkan bagian dari bagi hasil pajak.
2. Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Meningkatkan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah.
4. Meningkatkan upaya penggalangan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN/PHLN dan APBD Provinsi.
5. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam pelaksanaan pendapatan transfer.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa sumber pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang Sah meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai perundang-undangan. Kebijakan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah diarahkan untuk dapat meningkatkan penerimaan pendapatan dari dana hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan dari pemerintah melalui peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat

Proyeksi Belanja Daerah

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas

perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam memproyeksikan belanja daerah harus memperhatikan asumsi indikator makro ekonomi, tingkat pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama kebijakan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terkait belanja dan kebijakan pembiayaan.

Proyeksi belanja daerah yang dilakukan pada periode 2025 sampai dengan 2029 memiliki kecenderungan laju pertumbuhan yang lebih tinggi daripada laju pertumbuhan yang berbeda secara komponen daripada pendapatan belanja. Oleh karena itu, surplus anggaran pendapatan dimungkinkan pada awal perencanaan APBD yang bergerak secara proporsional. Adapun analisis proyeksi belanja daerah diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel 2. 107
Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang 2025 – 2030 (Rp)

NO	URAIAN	Baseline	APBD	PROYEKSI TAHUN				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	**BELANJA**							
	A. Belanja Operasi	2.981.070.639.96	3.329.033.954.355	2.566.309.593.017	2.152.269.439.34	2.197.756.427.82	2.243.567.765.73	2.289.719.670.539
	B. Belanja Modal	666.604.042.96	804.266.398.854	1.377.654.713.823	1.888.598.943.69	1.941.611.235.22	1.995.974.141.32	2.051.755.192.740
	C. Belanja Tak Terduga	2.255.312.33	45.000.000.000	2.368.077.951	2.486.481.84	2.610.805.94	2.741.346.23	2.878.413.550
	D. Belanja Transfer	615.095.232.97	653.072.012.069	645.849.994.619	678.142.494.34	712.049.619.06	747.652.100.02	785.034.705.021
	JUMLAH BELANJA	**4.265.025.228.23**	**4.831.372.365.278**	**4.592.182.379.409**	**4.721.497.359.23**	**4.854.028.088.061**	**4.989.935.353.323**	**5.129.387.981.849**
	SURPLUS/DEFISIT	**65.072.163.87**	**-27.000.000.000**	**-27.000.000.000**	**-27.000.000.00**	**-27.000.000.00**	**-27.000.000.00**	**-27.000.000.000**

Belanja daerah diproyeksikan meningkat, hal ini sejalan dengan upaya pendanaan terhadap program pembangunan yang sesuai dengan visi, misi dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta Asta Cita Presiden dan proyeksi pendapatan yang meningkat. Belanja daerah diproyeksikan dari semula di tahun 2024 sebesar Rp4,26 triliun menjadi sebesar Rp5,12 triliun pada tahun 2030. Belanja operasi, khususnya pada belanja pegawai diproyeksi tidak terlalu tinggi kenaikannya untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 yang mengatur belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Transfer ke Daerah (TKD) paling tinggi 30 persen dari total belanja. Selanjutnya, belanja modal diproyeksikan meningkat paling signifikan pada tahun 2027 sebesar Rp1,99 triliun dan 2029 sebesar Rp2,05 triliun, hal tersebut untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 yang mengatur belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40 persen dari total belanja daerah (tidak termasuk belanja bagi hasil dan transfer ke daerah atau desa) yang penerapannya paling lambat tahun 2027.

Proyeksi Pembiayaan Daerah

Analisis atas proyeksi pembiayaan daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran (SILPA). Proyeksi pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Berikut ini adalah besarnya proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Deli Serdang selama kurun waktu tahun 2025-2029.

Tabel 2. 108
Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2025-2029

NO	URAIAN	Baseline	APBD	PROYEKSI TAHUN				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	PEMBIAYAAN							
	A. Penerimaan Pembiayaan	163.097.989.087	45.000.000.000	45.000.000.000	45.000.000.000	45.000.000.000	45.000.000.000	45.000.000.000
	B. Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000	18.000.000.000	18.000.000.000	18.000.000.000	18.000.000.000	18.000.000.000	18.000.000.000
	PEMBIAYAAN NETO	**158.097.989.087**	**27.000.000.000**	**27.000.000.000**	**27.000.000.000**	**27.000.000.000**	**27.000.000.000**	**27.000.000.000**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**223.170.152.958**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Penerimaan pembiayaan dari tahun 2026 sampai 2030 diproyeksi tetap sebesar Rp45 miliar, dan pengeluaran pembiayaan dari tahun 2026 sampai 2030 diproyeksi tetap sebesar Rp18 miliar. Meskipun demikian, akan terus diupayakan peningkatan terhadap penerimaan pembiayaan sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kebijakan Pembiayaan Daerah

Adapun kebijakan pembiayaan daerah untuk mengelola surplus dan menutup defisit anggaran diarahkan pada:

1. Surplus anggaran terjadi dengan maksud pengelolaan pendapatan daerah yang akan dikelola untuk kegiatan jangka panjang yang akan dimulai pada tahun 2028 dan 2029. Pengelolaan pendapatan daerah berkelanjutan sangat penting untuk memastikan adanya cadangan keuangan yang memadai untuk masa depan. Surplus anggaran dialokasikan dalam bentuk dana cadangan untuk proyek-proyek strategis di masa depan.
2. Dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya.
3. Pinjaman daerah (jika diperlukan) harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian, profesional, dan tepat guna untuk menghindari dampak negatif bagi keuangan daerah.
4. Pada tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu menutup defisit anggaran.
5. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu

instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.

6. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
7. Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang mencakup antara lain: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah.

Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan ke depan diarahkan pada:

1. Penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD.
2. Pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD dan Dana Bergulir (Kredit Program).

2.7. Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan atau kondisi di mana harapan tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Permasalahan perlu diidentifikasi terlebih dahulu mulai dari masalah pokok, masalah, dan akar masalah. Masalah pokok merupakan perumusan masalah yang

bersifat makro atau umum yang terdiri dari beberapa masalah spesifik yang menjadi penyebabnya. Akar masalah diidentifikasi dengan melihat secara terperinci sumber-sumber masalah pokok tersebut. Permasalahan diturunkan dari analisis kondisi daerah selama beberapa tahun terakhir dan permasalahan yang belum terselesaikan. Rumusan masalah pembangunan Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut:

Tabel 2. 109
Rumusan Masalah Pokok, Permasalahan, dan Akar Masalah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas dan daya saing SDM	Belum optimalnya mutu dan aksesibilitas pendidikan	Kapasitas/kualitas fasilitas dan sarana prasarana pendidikan belum optimal.
			Fasilitas pendidikan belum merata.
			Masyarakat tidak mampu membayar biaya sekolah.
			Jumlah dan kualitas guru tidak merata.
			Rendahnya literasi membaca.
			Ekonomi dan latar belakang pendidikan orang tua rendah.
			Lingkungan permukiman buruk menyebabkan siswa putus sekolah.
			Kurangnya minat dan motivasi belajar siswa.
			Menurunnya partisipasi pendidikan; kurangnya minat menempuh pendidikan tinggi.
		Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya angka kematian ibu dan bayi (deteksi dini belum optimal).
			Tingginya prevalensi stunting.
			Belum optimalnya penemuan kasus tuberkulosis.
			Penyebaran tenaga kesehatan tidak merata.
			Belum semua masyarakat memiliki jaminan kesehatan.
			Pelayanan kesehatan belum optimal.
			Sarana/prasarana kesehatan belum memadai.
			Kurangnya kesadaran PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat).
2	Tingginya angka pengangguran	Kurangnya kesempatan kerja dan berusaha	Kompetensi tenaga kerja rendah (tidak sesuai pasar).
			Kerjasama kemitraan dengan instansi pemerintah/swasta belum maksimal.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Ketidakseimbangan pencari kerja vs lapangan kerja.
			Keterbatasan akses modal dan keterampilan wirausaha.
3	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan	Belum optimalnya kualitas ASN	Integritas ASN rendah.
			Keterbatasan diklat peningkatan kapasitas.
			Pemberian penghargaan/sanksi untuk ASN belum optimal.
			Kinerja inovasi daerah rendah.
			Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) belum optimal.
4	Belum tuntasnya pengentasan kemiskinan	Belum optimalnya penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	Pendataan dan database PMKS belum optimal.
			Bantuan sosial tidak tepat sasaran.
			Kuantitas dan kualitas penyuluh/pekerja sosial belum memadai.
5	Belum optimalnya infrastruktur daerah	Belum optimalnya pengelolaan infrastruktur	Infrastruktur jalan, irigasi, mitigasi bencana, penanggulangan banjir, dan digital belum memadai.
			Banyak rumah tidak layak huni.
			Akses air minum dan sanitasi terbatas.
			Partisipasi masyarakat dalam menjaga infrastruktur rendah.
6	Kerawanan pangan	Tingginya prevalensi ketidakcukupan pangan	Produksi bahan pangan belum optimal.
			Akses bahan pangan utama terbatas.
			Sarana/prasarana pendukung pangan kurang.
			Diversifikasi dan pengolahan pangan belum optimal.
			Perubahan iklim dan alih fungsi lahan.
7	Degradasi kualitas lingkungan hidup	Menurunnya indeks kualitas lingkungan	Pengelolaan sampah dan lingkungan belum optimal.
			Ruang Terbuka Hijau (RTH) kurang.
			Penataan kawasan kumuh belum optimal.
			Tidak ada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
8	Belum optimalnya kemandirian fiskal daerah	Belum optimalnya pengelolaan PAD (Pendapatan Asli Daerah)	Potensi sumber PAD belum tergali.
			Penggalian dan pengelolaan piutang belum optimal.

Permasalahan dan isu strategis KLHS RPJMD Kabupaten Deli

Serdang Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia, mencakup: pendidikan, kesehatan dan pangan, kesenjangan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan;
2. Ekonomi Regional, Inklusif dan Berkelanjutan, mencakup: nilai tambah ekonomi industri, pertanian, pariwisata, kesempatan kerja bagi semua keahlian, pertumbuhan dan akses pembiayaan bagi UMKM dan industri kecil, dukungan infrastruktur transportasi dan konektivitas digital, mitigasi dan ketangguhan terhadap perubahan iklim dan bencana alam;
3. Kerusakan dan Pencemaran Sumber Daya Air dan Pencemaran Udara, mencakup akses air minum dan sanitasi, jaminan kapasitas sumber air baku, penanganan limbah dan persampahan;
4. Konversi tutupan lahan hutan dan lahan pertanian, serta hilangnya keanekaragaman hayati, mencakup: pemulihan hutan dan lahan kritis, perlindungan dan pemanfaatan lestari ekosistem darat dan laut;
5. Kualitas dan ketangguhan permukiman perkotaan dan perdesaan, mencakup: kualitas layanan perkotaan, akses dan keterjangkauan hunian yang layak dan aman, serta berketahanan;
6. Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam, kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan penanganan bencana alam;
7. Kapasitas dan Kapabilitas penyelenggaraan kepemerintahan, mencakup: tata kelola hutan, lahan/tata ruang, tambang, air dan hutan bakau; kemampuan penanganan masalah hukum, kapasitas penggalian pendapatan dan penganggaran daerah; kapasitas bekerjasama; kualitas pemanfaatan IT dalam berbagai aspek; kualitas layanan publik; peran gender;

Selanjutnya, permasalahan pembangunan Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut:

1. Kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih perlu ditingkatkan

   Kualitas dan daya saing SDM merupakan faktor penting dalam mendukung kemajuan Kabupaten Deli Serdang. Kualitas dan daya saing SDM yang ditunjukkan oleh IPM yang mengalami peningkatan dari 76,11 poin pada tahun 2020 menjadi 77,56 poin

pada tahun 2024. Meskipun demikian, masih terdapat komponen IPM yang perlu ditingkatkan, yaitu Umur Harapan Hidup tahun 2024 selama 73,81 tahun dan Harapan Lama Sekolah sebesar 13,40 tahun. Selain itu, stunting juga mempengaruhi kualitas dan daya saing SDM. Prevalensi stunting di Kabupaten Deli Serdang tahun 2020 sebesar 3,07 persen dan menurun menjadi 0,16 persen pada tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dari aspek kesehatan dan pendidikan.

2. Daya saing ekonomi yang masih belum optimal. Meskipun Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Deli Serdang mencapai 5,36 persen tahun 2024, namun ekonomi yang berkualitas dan inklusif belum optimal, serta penanganan UMKM yang belum optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, Kontribusi PMTB terhadap PDRB Kabupaten Deli Serdang berfluktuasi dari 34,22 persen pada tahun 2020 menjadi 34,09 persen pada tahun 2024. Hal ini berarti peran investasi dalam mendukung perekonomian Kabupaten Deli Serdang relatif menurun. Serta belum optimalnya hilirisasi terhadap produk unggulan daerah.
3. Belum tuntasnya pengentasan kemiskinan
   Penduduk miskin di Kabupaten Deli Serdang mengalami tren menurun dari 3,88 persen pada tahun 2020 menjadi 3,44 persen pada tahun 2024, namun jika persentase tersebut dikonversi jumlahnya sekitar 84.240 orang. Hal tersebut, menunjukkan bahwa perlunya penanganan dan pengentasan kemiskinan.
4. Tingginya angka pengangguran dan bonus demografi
   Angka pengangguran Kabupaten Deli Serdang menunjukkan tren meningkat dari 9,50 persen pada tahun 2020 menjadi 8,02 persen 2024 persen. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak angkatan kerja yang tidak berpartisipasi sebagai tenaga kerja untuk meningkatkan kemajuan daerah. Kurang terampilnya tenaga kerja serta peningkatan migrasi penduduk ke Deli Serdang menyebabkan masyarakat Deli Serdang bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah.
5. Belum optimalnya pengelolaan infrastruktur daerah
   Infrastruktur Kabupaten Deli Serdang masih mengalami

permasalahan, seperti jalan dan saluran irigasi yang perlu dijaga fungsinya melalui pemeliharaan. Jalan dalam kondisi baik pada tahun 2024 sebesar 76,34 persen, artinya masih terdapat sebesar 23,66 persen jalan dalam kondisi tidak baik, sementara saluran irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2024 sebesar 80,04 persen, di mana hal ini menunjukkan bahwa sebesar 19,96 persen saluran irigasi dalam kondisi tidak baik.

6. Kerawanan Pangan

   Indeks Ketahanan Pangan mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir dari 83,30 poin pada tahun 2020 menjadi 86,20 poin pada tahun 2024. Namun jika dilihat berdasarkan aspek penyusunnya, aspek ketersediaan dan keterjangkauan mengalami penurunan. Hal ini menandakan bahwa terdapat permasalahan produktivitas bahan pangan dan akses terhadap pangan masyarakat secara umum. Ketersediaan pangan pada tahun 2023 mengalami penurunan, sementara kebutuhan terhadap pangan utama, dalam hal ini beras mengalami peningkatan setiap tahunnya akibat pertumbuhan jumlah penduduk. Ketidaksesuaian antara ketersediaan dan kebutuhan menjadi permasalahan dalam pemenuhan pangan masyarakat Kabupaten Deli Serdang. Selain itu, adanya alih fungsi lahan dan perubahan iklim yang ekstrem berdampak pada produktivitas pangan. Selain itu, kerawanan pangan dapat diatasi melalui diversifikasi pangan yang dihitung melalui Skor Pola Pangan Harapan mengalami peningkatan dari 59,77 persen pada tahun 2020 menjadi 68,50 persen pada tahun 2024. Pola konsumsi masyarakat Kabupaten Deli Serdang masih memprioritaskan konsumsi karbohidrat lebih banyak dibandingkan asupan gizi yang lain. Hal ini ditunjukkan dari lebih rendahnya kebutuhan konsumsi daging, ikan, dan susu dibandingkan konsumsi beras.

7. Degradasi kualitas lingkungan hidup

   Lingkungan hidup penting dalam memberikan kualitas hidup yang baik bagi masyarakat. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Deli Serdang menurun dari 63,00 poin pada tahun 2020 menjadi 57,37 poin pada tahun 2022 dan kembali meningkat menjadi 63,45 pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa

masih lambatnya peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Deli Serdang. Pengelolaan sampah juga masih menjadi masalah di Kabupaten Deli Serdang. Pada tahun 2024 timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah masih sebesar 61,38 persen, di mana masih terdapat 38,62 persen sampah yang belum terolah di fasilitas pengolahan sampah. Serta perlunya peningkatan kapasitas mitigasi terhadap perubahan iklim dan bencana alam.

8. Belum optimalnya kemandirian fiskal daerah

   Masih tingginya tingkat ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Kabupaten Deli Serdang memiliki proporsi terbesar ketergantungan terhadap pendapatan transfer pada tahun 2024 yang mencapai struktur 72,99 persen dari seluruh pendapatan daerah. Kondisi ini menggambarkan bahwa Kabupaten Deli Serdang masih memiliki ketergantungan terhadap pendapatan yang bersumber dari luar kemampuan Kabupaten Deli Serdang. Oleh karena itu, perlu menggali potensi pendapatan daerah, di antaranya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)khususnya terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.

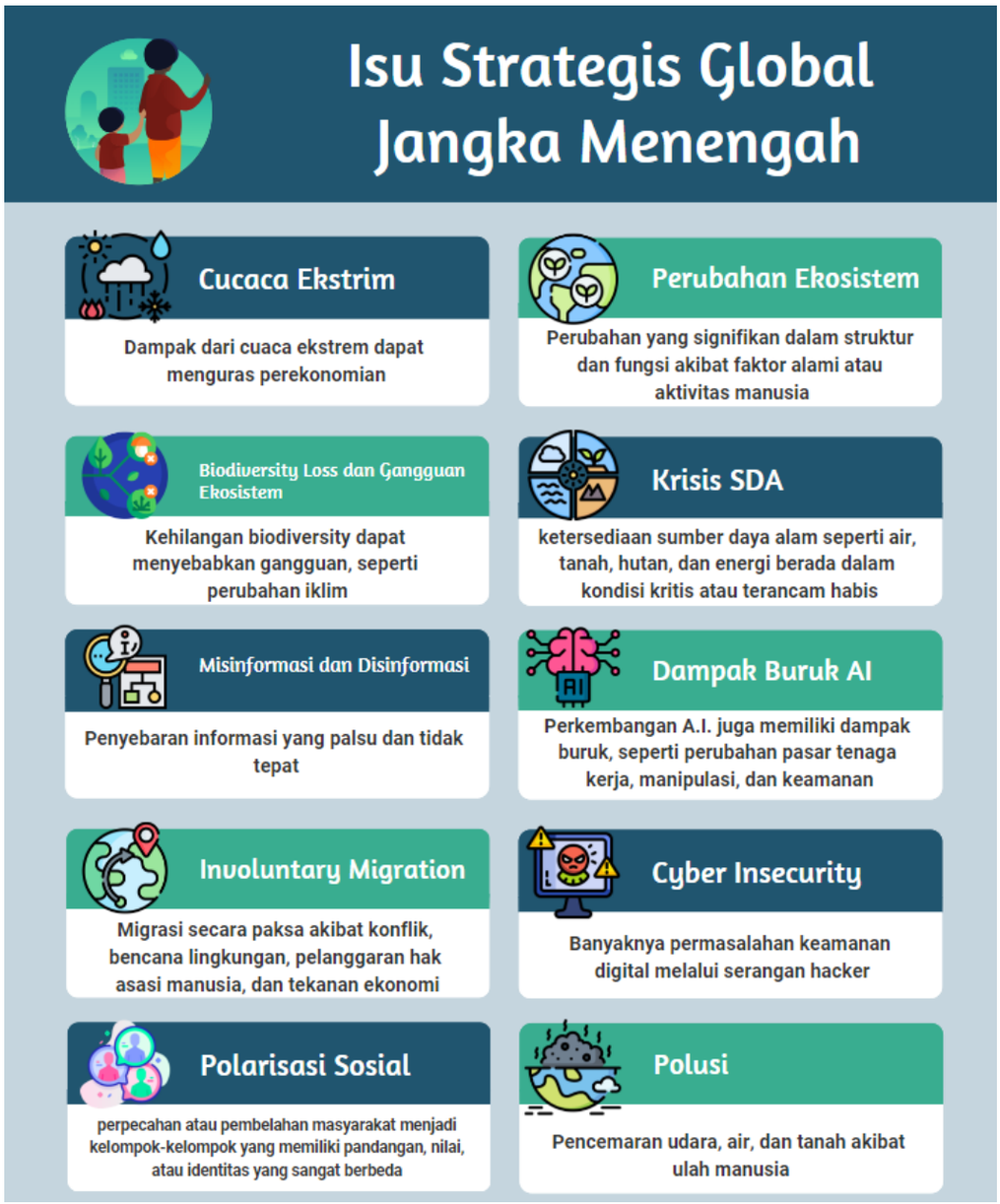
9. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan

   Peran pemerintah penting dalam mengelola dan mengembangkan daerahnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah. Mengingat hal tersebut, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan terhadap tata kelola pemerintahan, di antaranya terlihat dari capaian Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2024 adalah 76,36 (kategori BB). Meskipun mengalami kenaikan dari Tahun 2022 sebesar 58,52 dengan kategori CC, namun mengingat tingginya tuntutan masyarakat akan layanan serta untuk memberikan landasan yang kuat bagi fondasi transformasi maka dibutuhkan tata kelola yang berkualitas.

2.7.1. Isu Strategis Global

Isu strategis global dijelaskan pada gambar berikut:

Gambar 2. 64
Isu Strategis Global Jangka Menengah



Sumber: World Economic Forum, Risk Global Report 2024

a. Cuaca ekstrim

Cuaca ekstrim yang terjadi berdampak bagi stabilitas pangan di dunia. Kejadian cuaca ekstrim menyebabkan kerusakan lingkungan di berbagai wilayah di mana akan berdampak bagi ketersediaan pangan, kelestarian lingkungan, serta keseimbangan ekosistem dunia.

b. Perubahan ekosistem

Perubahan ekosistem dunia akibat aktivitas manusia, seperti deforestasi, urbanisasi, pertanian, dan penangkapan ikan yang

berlebihan merusak dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Eksploitasi terhadap sumber daya alam, seperti Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, seperti penebangan hutan menyebabkan degradasi ekosistem dan hilangnya keanekaragaman hayati.

c. *Biodiversity loss* dan gangguan ekosistem

Peningkatan aktivitas manusia yang semakin intens berdampak pada kerusakan lingkungan di mana akan menyebabkan perubahan ekosistem dunia. Penebangan hutan secara paksa dan pembakaran hutan menyebabkan fauna yang terdapat di wilayah tersebut terancam punah dan kehilangan habitatnya, serta bermigrasi ke tempat lain. Pencemaran air akibat limbah pabrik akan merusak ekosistem perairan karena menyebabkan spesies yang hidup di dalam air keracunan. Ekosistem yang rusak juga berdampak bagi kualitas hidup manusia, seperti kurangnya kualitas udara, sumber air bersih, atau sumber daya pangan.

d. Krisis Sumber Daya Alam

Ketersediaan sumber daya alam semakin berkurang seiring dengan pertumbuhan penduduk yang menyebabkan peningkatan permintaan terhadap sumber daya alam. Permintaan yang semakin meningkat ini tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan

e. Misinformasi dan disinformasi

Penyebaran informasi di berbagai media, terutama pada media online akan memunculkan berbagai pandangan. Namun, dengan kebebasan tersebut, informasi yang diberikan dapat berupa informasi yang tidak akurat atau informasi yang menipu.

f. Dampak buruk A.I.

Kehadiran A.I. tidak hanya mempermudah aktivitas manusia atau proses bisnis, namun juga berdampak buruk bagi manusia. Otomasi pekerjaan dan kesenjangan keterampilan muncul akibat perkembangan A.I. yang sangat cepat ini. Permintaan terhadap tenaga kerja berubah akibat kebutuhan terhadap keterampilan digital. Perkembangan A.I. juga berpotensi memberikan informasi palsu, seperti teknologi *deepfake* yang dapat digunakan untuk membuat konten yang menyesatkan atau menggiring opini.

g. *Involuntary migration*

Konflik yang terjadi seperti perang Ukraina-Rusia, Palestina-Israel, Invasi Iraq atau kemiskinan ekstrim di suatu negara memaksa orang untuk meninggalkan tempat tinggalnya untuk menghindari konflik yang terjadi pada negaranya dan mencari kehidupan yang lebih baik di negara lain.

h. *Cyber insecurity*

Cyber insecurity adalah kondisi di mana sistem komputer, jaringan, atau data rentan terhadap ancaman atau serangan. Fenomena ini dapat mengakibatkan kerugian yang fatal baik bagi masyarakat secara luas. Masyarakat menjadi merasa terancam akibat pencurian data pribadi mereka.

i. Polarisasi sosial

Polarisasi sosial merupakan perpecahan atau pemisahan masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang memiliki pandangan, nilai, atau identitas yang sangat berbeda secara politik, sosial, atau budaya. Fenomena ini dapat terjadi di banyak negara dan dapat mempengaruhi stabilitas sosial serta proses demokrasi. Meningkatnya ketegangan antar kelompok sosial dapat memicu konflik atau kekerasan. Hal ini juga dapat menghambat kemampuan masyarakat untuk mencapai konsensus politik dan mengakibatkan pemerintahan yang kurang stabil.

j. Polusi

Polusi bisa berasal dari berbagai sumber dan memiliki dampak yang luas terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Emisi yang dihasilkan transportasi, industri, dan pembakaran bahan bakar fosil menyebabkan penurunan kualitas udara, meningkatnya penyakit pernapasan, dan kontribusi terhadap perubahan iklim. Pembuangan limbah industri, pertanian ke perairan menyebabkan kerusakan bagi ekosistem laut dan pencemaran air minum. Pembuangan limbah ke tanah juga menyebabkan keracunan tanah, pencemaran air tanah, dan degradasi kualitas tanah untuk pertanian.

2.7.2. Isu Strategis Nasional

Perumusan isu strategis nasional berdasarkan RPJMN sebagai berikut:

a. Bonus Demografi

Indonesia telah mengalami bonus demografi sejak tahun 2015 dengan periode puncaknya diperkirakan terjadi pada periode 2020-2035, dimana tingkat kelahiran mengalami penurunan sehingga mengakibatkan persentase penduduk usia 0-14 tahun dan rasio ketergantungan menurun. Bonus demografi dapat menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan karena meningkatnya jumlah angkatan kerja dan potensi tabungan serta investasi. Bonus demografi akan berdampak positif jika angkatan kerja memiliki kualitas yang baik, yaitu berpendidikan, memiliki keterampilan, dan sehat.

b. Daya Dukung Sumber Daya Alam dan Daya Tampung

Daya dukung sumber daya alam di Indonesia diperkirakan akan mengalami penurunan. Daya dukung lahan hutan diperkirakan akan menurun seiring dengan proyeksi hilangnya luas hutan sebesar 10 juta hektar dari tahun 2025 hingga 2026. Daya dukung ketersediaan air juga diperkirakan mengalami tren menuju kelangkaan di sejumlah wilayah di Indonesia. Daya dukung lahan dan air dalam menopang ketahanan pangan diperkirakan juga akan semakin menurun dengan meningkatnya alih fungsi lahan dan penurunan kualitas lahan dan air. Daya dukung keanekaragaman hayati diproyeksikan akan menurun seiring dengan hilangnya habitat, peningkatan pencemaran perubahan iklim, dan persebaran jenis asing invasif (JAI). Di sisi lain daya dukung dari ketersediaan energi dan sumber daya mineral di Indonesia cukup besar namun belum sepenuhnya teroptimalkan.

c. Pembangunan IKN

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dilakukan untuk mengurangi ketimpangan antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Dengan ditetapkannya Undang-

Undang IKN Nomor 3 Tahun 2022 pembangunan fisik Ibu Kota Nusantara telah dimulai. Pemindahan ibu kota negara ini tidak hanya memindahkan aktivitas pemerintahan, tetapi juga membangun pusat pertumbuhan ekonomi (superhub) ekonomi. Pembangunan IKN diharapkan menjadi sumber pertumbuhan yang berkelanjutan dan menciptakan kehidupan yang layak dan modern.

d. Kapasitas Ilmu Pengetahuan, teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)
   Peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi secara nasional masih dihadapkan pada lemahnya komitmen pemerintah, terutama dari segi anggaran yang hanya mencapai 0,28 % dari PDB. Padahal ke depannya kapasitas IPTEKIN menjadi sangat penting untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui peningkatan efisiensi dan penciptaan produk-produk berkualitas dan berteknologi tinggi.

e. Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah
   Kontribusi industri pengolahan terhadap PDB semakin menurun akibat terjadinya pelemahan sektor manufaktur, rendahnya produktivitas faktor- faktor produksi, terbatasnya kemampuan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil industri di luar Jawa, dan terjadinya ekonomi biaya tinggi akibat biaya logistik dan suku bunga. Produktivitas sektor pertanian juga terus melambat dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 yang disebabkan banyak faktor, misalnya regenerasi petani dan nelayan, kurangnya keterampilan, terbatasnya adopsi teknologi dan akses keuangan, kelembagaan ekonomi petani dan nelayan, serta berkurangnya daya dukung lahan pertanian.

f. Pemanfaatan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
   Pemanfaatan potensi pariwisata sebagai destinasi unggulan dunia yang berkelanjutan terus mengukuhkan ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi baru, menjadikannya barometer terdepan dalam arena ekonomi kreatif global.

g. Optimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi laut

Indonesia memiliki potensi ekonomi laut yang tinggi, namun belum dimanfaatkan secara optimal untuk penciptaan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan.

h. Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja Indonesia dalam kurun waktu tahun 2010-2022 masih relatif tertinggal, dengan nilai US$7.274,9 per pekerja dan berada di bawah rata-rata pekerja di kawasan ASEAN. Peningkatan produktivitas tenaga kerja juga dihadapkan dengan rendahnya kualitas SDM, yang masih didominasi oleh tingkat pendidikan SMP ke bawah. Tantangan lainnya ialah ketidaksesuaian keahlian (mismatch) antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, informasi pasar tenaga kerja yang belum baik, dan pasar kerja Indonesia yang belum mampu merespons perubahan cepat jenis lapangan kerja, kebutuhan keahlian, struktur penduduk, serta pola budaya kerja. Peningkatan produktivitas tenaga kerja sangat penting untuk memaksimalkan manfaat bonus demografi.

2.7.3. Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara

Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

1. Pembangunan sarana dan prasarana yang merata dan berkeadilan

Pembangunan sarana dan prasarana yang belum memadai masih menjadi persoalan pembangunan yang perlu direspon ke depan. Luasan permukiman kumuh, rumah tangga dengan akses air minum layak, rumah tangga dengan akses sanitasi layak infrastruktur SDA dalam kondisi baik, penanganan banjir merupakan isu-isu penyediaan infrastruktur yang perlu direspon dalam jangka panjang ke depan. Cakupan rumah tangga yang menempati hunian layak yang terpadu dengan akses air minum, sanitasi dan penanganan persampahan juga masih cukup rendah. Selain itu, kondisi kawasan perkotaan di Provinsi Sumatera Utara menghadapi perkotaan arah perkembangan yang tidak terstruktur (*urban sprawl*). Kelayakan dan keandalan perumahan yang dibangun secara swadaya juga perlu menjadi perhatian mengingat tingginya risiko bencana di Provinsi Sumatera Utara.

Layanan ketenagalistrikan Provinsi Sumatera Utara masih kekurangan pasokan daya atau beberapa sistem, atau cadangan di pembangkit eksisting yang tidak efisien serta kekurangan pasokan daya untuk daerah perbatasan serta pulau terluar. Penyediaan tenaga listrik di Wilayah Sumatra masih belum menjangkau seluruh penduduk secara berkualitas. Fleksibilitas operasi masih belum optimum terutama saat kondisi di luar waktu beban puncak sebagai akibat dari minimum operasi PLTG. Infrastruktur ketenagalistrikan terdiri dari Sistem Interkoneksi Sumatra dan sistem-sistem yang terisolasi. Sistem transmisi ekstra tinggi belum tersambung untuk mengevakuasi daya energi yang tersebar di seluruh wilayah. Konsumen tenaga listrik masih didominasi oleh rumah tangga. Jangkauan jaringan seluler di Provinsi Sumatera Utara belum diimbangi dengan pemanfaatannya untuk mendukung kegiatan produktif (masih terbatas untuk penggunaan telekomunikasi). Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan komunikasi di Provinsi Sumatera Utara sudah cukup merata dan hampir menjangkau seluruh area wilayah pemukiman dan pusat-pusat pertumbuhan. Provinsi Sumatera Utara juga memiliki tantangan dalam penyediaan pelayanan dasar, yaitu belum terpenuhi dan meratanya penyediaan sarana dan prasarana dasar di seluruh daerah, khususnya di daerah afirmasi 3T. Permasalahan yang dihadapi di antaranya penyediaan air bersih, irigasi, banjir, dan abrasi. Jumlah kejadian bencana banjir masih tinggi terutama di Metropolitan Medan, pulau-pulau kecil di Provinsi Sumatera Utara juga terdampak risiko abrasi akibat perubahan iklim tersebut.

2. Pembangunan antar daerah serta desa-kota

   Keterkaitan antar daerah serta desa-kota di Provinsi Sumatera Utara belum mencerminkan keterkaitan tidak bisa mengabaikan rantai pasok, sehingga wilayah kota dan kawasan-kawasan perlu memiliki rantai nilai dengan wilayah-wilayah lain untuk mendorong perekonomian yang merata. Pembangunan wilayah Metropolitan Medan (Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Karo) masih menghadapi permukiman kumuh seperti air bersih dan sanitasi, penurunan kualitas

lingkungan hidup, dan infrastruktur transportasi massal yang belum mendukung mobilitas penduduk. Permasalahan ini muncul sebagai akibat dari urbanisasi yang tidak terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang berpusat di inti bisnis dan perdagangan. wilayah pertumbuhan ekonomi yang pesat menjadi *pull factor* manusia bermigrasi ke wilayah dengan ekonomi yang relatif baik.

3. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Berkelanjutan

   Dalam upaya pengelolaan SDA berkelanjutan menjadi perhatian terhadap pengelolaan investasi berbasis lahan yang belum seluruhnya mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik terutama kelestarian lingkungan dan menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. Pengoptimalan pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup berkelanjutan juga berkaitan dengan: adaptasi perubahan iklim; pengawasan terhadap deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan dan harmonisasi antara manusia dengan satwa liar; akses dan partisipasi masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok marginal; dukungan dalam mewujudkan kelestarian dan kesejahteraan yang rendah; belum maksimalnya akses seluruh masyarakat terhadap energi, dan peningkatan pemanfaatan sumber energi terbarukan.

4. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing

   Transisi Demografi dihadapkan pada pembangunan kesehatan dengan meningkatnya mobilitas penduduk dan urbanisasi serta perilaku hidup tidak sehat, sehingga meningkatkan beban penyakit menular dan tidak menular termasuk permasalahan kesehatan penduduk lanjut usia dan kesehatan jiwa. Pola konsumsi tidak sehat menyebabkan kekurangan gizi mikro dan makro serta kelebihan gizi, serta adanya ketimpangan akses terhadap lingkungan sehat, fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan serta perlu peningkatan dan inovasi pembiayaan kesehatan. selain itu Kualitas pendidikan juga masih rendah yang disebabkan oleh sarana-prasarana pendidikan dan fasilitas pembelajaran yang belum memadai, kualitas, kuantitas dan

distribusi guru masih terbatas dengan sedikitnya guru yang memiliki sertifikat pendidik pada semua jenjang pendidikan serta pendidikan non formal yang berkualitas yang belum memadai, kualifikasi pendidikan yang masih rendah berdampak pada keterserapan tenaga kerja.

Selanjutnya masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial yang tecermin dari kepesertaan jaminan sosial dan tingkat kepatuhan pembayaran iuran jaminan sosial masih rendah, sementara itu bantuan sosial belum sepenuhnya terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi hal ini antara lain disebabkan pengguna data masih terfragmentasi dan belum termutakhirkan secara sistematis sehingga kesalahan sasaran masih cukup tinggi, daya ungkit bantuan sosial juga masih rendah dan lingkungan yang belum inklusif terhadap kelompok rentan, termasuk terhadap penyandang disabilitas dan Lanjut Usia (Lansia).

5. Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur

   Infrastruktur yang berkaitan dengan konektivitas dan sistem logistik berpotensi menekan aktivitas ekonomi berupa mahalnya biaya logistik dari wilayah penghasil komoditas menuju lokasi pengolahan dan pemasaran. Hal tersebut perlu diupayakan dengan upaya meningkatkan kelancaran arus barang, jasa, dan informasi, menurunkan biaya logistik, mengurangi ekonomi biaya tinggi, mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah, dan mewujudkan sinergi antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Aksesibilitas daerah juga dapat ditinjau dari ketersediaan fasilitas perhubungan yang meliputi darat, laut dan udara. Perhubungan darat di dibagi atas beberapa bagian jaringan transportasi seperti jaringan angkutan jalan raya, jaringan jalur kereta api, jaringan angkutan sungai dan danau, dan jaringan angkutan penyeberangan.

6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel

   Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi persoalan pelayanan publik yang belum optimal kepada masyarakat. Ke depannya masih perlu dilakukan reformasi birokrasi dan peningkatan SDM yang profesional dengan memanfaatkan teknologi informasi yang

tersedia, untuk perlu mendapatkan perhatian untuk dioptimalkan. Isu-isu berkaitan dengan tata kelola pemerintahan lainnya ialah berkaitan dengan optimalisasi ketersediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ke seluruh wilayah dan ke semua lapisan masyarakat; transparansi dan akuntabilitas guna mewujudkan pelayanan publik yang inklusif; perlunya optimalisasi manajemen kepegawaian, terutama setelah terjadinya restrukturisasi kelembagaan dan juga rekrutmen yang efektif dan efisien sehingga menjadi birokrasi yang ramping miskin struktur akan tetapi kaya fungsi berlandaskan merit system; dan optimalisasi implementasi reformasi birokrasi melalui penguatan pengawasan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

2.7.4. Isu Strategis Kabupaten Deli Serdang

Isu strategis Kabupaten Deli Serdang dirumuskan dari permasalahan daerah yang telah ditetapkan dan diselaraskan dengan isu strategis global hingga regional dan hasil Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS) RPJMD.

Tabel 2. 110
Penyimpulan Isu Strategis Daerah

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN		ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS KAB DELI SERDANG
	Kabupaten	Provinsi		GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
Memiliki penduduk meliputi keragaman suku bangsa dan agama	Belum optimalnya kualitas dan daya saing SDM	Permasalahan Kondisi Demografi, masih cukup tingginya angka pertumbuhan penduduk dan adanya kecenderungan peningkatan pertumbuhan selama periode 2025-2045, Ketimpangan distribusi penduduk yang mengakibatkan kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, budaya, ekonomi, infrastruktur dan birokrasi yang cenderung lebih berkembang di daerah yang padat/perkotaan	Kualitas sumber daya manusia, mencakup : pendidikan, kesehatan dan pangan, kesenjangan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan	Kehadiran A.I. tidak hanya mempermudah aktivitas manusia atau proses bisnis, namun juga berdampak buruk bagi manusia	Bonus Demografi, Indonesia telah mengalami bonus demografi sejak tahun 2015 dengan periode puncaknya diperkirakan terjadi pada periode 2020-2035, dimana tingkat kelahiran mengalami penurunan sehingga mengakibatkan persentase penduduk usia 0-14 tahun dan rasio ketergantungan menurun. Hal ini dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan bonus demografi untuk meningkatkan	Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing, Transisi Demografi dihadapkan pada pembangunan kesehatan dengan meningkatnya mobilitas penduduk dan urbanisasi serta perilaku hidup tidak sehat, sehingga meningkatkan beban penyakit menular dan tidak menular termasuk permasalahan kesehatan penduduk lanjut usia dan kesehatan jiwa	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN		ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS KAB DELI SERDANG
	Kabupaten	Provinsi		GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
					pencapaian tujuan-tujuan pembangunan		

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN		ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS KAB DELI SERDANG
	Kabupaten	Provinsi		GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
-Memiliki posisi strategis yang mengelilingi dua kota utama di Sumatera Utara, dengan sumber daya alam dan tenaga kerja yang dimiliki, Kabupaten Deli Serdang dapat menjadi daya saing dalam menarik investor -Memiliki sektor Industri dan UMKM yang potensial atau dikembangkan di Kabupaten Deli Serdang adalah Agroindustri, dimana jenis industri yang diolah yaitu hasil – hasil pertanian menjadi barang jadi	Tingginya angka pengangguran	Permasalahan Kesejahteraan Ekonomi, Tingkat pengangguran Provinsi Sumatera Utara menunjukkan penurunan dalam kurun waktu 2 dekade terakhir yang dapat dilihat dari persentase tingkat pengangguran terbuka Tahun 2005 sebesar 10,98% dan menurun menjadi 5,89% pada Tahun 2023, namun kondisi ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan nasional yang tercatat sebesar 5,32%	Kerusakan dan Pencemaran Sumber Daya Air dan Pencemaran Udara, mencakup akses air minum dan sanitasi, jaminan kapasitas sumber air baku, penanganan limbah dan persampahan	Peningkatan aktivitas manusia yang semakin intens berdampak pada kerusakan lingkungan di mana akan menyebabkan perubahan ekosistem dunia	Kapasitas Ilmu Pengetahuan, teknologi dan Inovasi (IPTEKIN), Peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi secara nasional masih dihadapkan pada lemahnya komitmen pemerintah, terutama dari segi anggaran yang hanya mencapai 0,28 % dari PDB. Padahal ke depannya kapasitas IPTEKIN menjadi sangat penting untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui peningkatan efisiensi dan penciptaan produk-produk berkualitas dan berteknologi tinggi	Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Berkelanjutan, Dalam upaya pengelolaan SDA berkelanjutan menjadi perhatian terhadap pengelolaan investasi berbasis lahan yang belum seluruhnya mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik terutama kelestarian lingkungan dan menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat dalam jangka panjang	Daya saing ekonomi daerah perlu ditingkatkan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan penanganan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN		ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS KAB DELI SERDANG
	Kabupaten	Provinsi		GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
-Keberagaman etnis, agama, dan budaya di Deli Serdang dapat menjadi modal untuk partisipasi yang inklusif dalam pemerintahan-Lokasi strategis sehingga memudahkan adopsi praktik-praktik tata kelola pemerintahan yang baik yang telah diterapkan di tingkat yang lebih tinggi	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan	Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Tata kelola pemerintahan Sumatera Utara belum optimal dilihat dari birokrasi yang ada belum kolaboratif, transformasi digital yang masihbelum optimal, penyederhanaan struktur dan mekanisme kerja baruyang belum tuntas, integritas penyelenggaraan negara yang masihmenghadapi kendala serta budaya birokrasi belum terimplementasidengan baik, kualitas akuntabilitas kinerja dan profesionalisme ASNmasih perlu ditingkatkan	Kapasitas dan Kapabilitas penyelenggaraan kepemerintahan, mencakup : tata kelola hutan, lahan/tata ruang, tambang, air dan hutan bakau; kemampuan penanganan masalah hukum, kapasitas penggalian pendapatan dan penganggaran daerah; kapasitas berkerjasama; kualitas pemanfaatan IT dalam berbagai aspek; kualitas layanan publik; peran gender	Cyber insecurity adalah kondisi di mana sistem komputer, jaringan, atau data rentan terhadap ancaman atau serangan Polarisasi sosial merupakan perpecahan atau pemisahan masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang memiliki pandangan, nilai, atau identitas yang sangat berbeda secara politik, sosial, atau budayaPolusi bisa berasal dari berbagai sumber dan memiliki dampak yang luas terhadap lingkungan dan kesehatan manusi	Produktivitas Tenaga Kerja, Produktivitas tenaga kerja Indonesia dalam kurun waktu tahun 2010-2022 masih relatif tertinggal, dengan nilai US$7.274,9 per pekerja dan berada di bawah rata-rata pekerja di kawasan ASEAN. Peningkatan produktivitas tenaga kerja juga dihadapkan dengan rendahnya kualitas SDM, yangmasih didominasi oleh tingkat pendidikan SMP ke bawah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel, Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi persoalan pelayanan publik yang belum optimal kepada masyarakat. Ke depannya masih perlu dilakukan reformasi birokrasi dan peningkatan SDM yang profesional dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia, untuk perlu mendapatkan perhatian untuk dioptimalkan. Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi persoalan pelayanan publik yang belum optimal kepada masyarakat. Ke depannya masih perlu dilakukan reformasi birokrasi dan peningkatan SDM yang profesional dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia, untuk perlu mendapatkan perhatian untuk dioptimalkan	Tata kelola pemerintahan menjadi isu penting dalam memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN		ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS KAB DELI SERDANG
	Kabupaten	Provinsi		GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
Memiliki potensi alam yang melimpah, seperti pertanian, perkebunan, industri, dan pariwisata dapat dapat meningkatkan pendapatan masyarakat	Belum tuntasnya pengentasan kemiskinan	Permasalahan Kesejahteraan Sosial dan Budaya, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat belum inklusif, Belum maksimalnya penguatan pembangunan keluarga, pengarusutamaan gender (PUG) dan inklusi sosial dalam pembangunan, Degradasi karakter dan jati diri serta belum optimalnya implementasi kearifan lokal dan nilai budaya sebagai modal dasar pembangunan masyarakat	Ekonomi Regional, Inklusif dan Berkelanjutan, mencakup : nilai tambah ekonomi industri, pertanian, pariwisata, kesempatan kerja bagi semua keahlian, pertumbuhan dan akses pembiayaan bagi UMKM dan industri kecil, dukungan infrastruktur transportasi dan konektivitas digital, mitigasi dan ketangguhan terhadap perubahan iklim dan bencana alam	Perubahan ekosistem dunia akibat aktivitas manusia, seperti deforestasi, urbanisasi, pertanian, dan penangkapan ikan yang berlebihan merusak dan mengganggu keseimbangan ekosistem	Daya Dukung Sumber Daya Alam dan Daya Tampung, Daya dukung sumber daya alam di Indonesia diperkirakan akan mengalami penurunan. Daya dukung lahan hutan diperkirakan akan menurun seiring dengan proyeksi hilangnya luas hutan sebesar 10 juta hektar dari tahun 2025 hingga 2026. Daya dukung ketersediaan air juga diperkirakan mengalami tren menuju kelangkaan di sejumlah wilayah di Indonesia dan di tahun 2029 di sebagian wilayah Sumatera diperkirakan berada pada	Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur, Infrastruktur yang berkaitan dengan konektivitas dan sistem logistik berpotensi menekan aktivitas ekonomi berupa mahalnya biaya logistik dari wilayah penghasil komoditas menuju lokasi pengolahan dan pemasaran. Hal tersebut perlu diupayakan dengan upaya meningkatkan kelancaran arus barang, jasa, dan informasi, menurunkan biaya logistik, mengurangi ekonomi biaya tinggi, mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah, dan mewujudkan sinergi antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	Kemiskinan hingga saat ini masih menjadi isu penting pembangunan daerah. Data menunjukkan masih terdapat penduduk miskin sebesar 3,44 persen dari populasi masyarakat Kabupaten Deli Serdang. Pembangunan yang telah dilaksanakan hingga saat ini masih belum mampu mengatasi kemiskinan seluruhnya

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN		ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS KAB DELI SERDANG
	Kabupaten	Provinsi		GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
					tingkat langka atau kritis		

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN		ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS KAB DELI SERDANG
	Kabupaten	Provinsi		GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
-Deli Serdang memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur yang lebih ramah lingkungan-Memiliki area RTH yang dapat diintegrasikan dalam desain infrastruktur. Sungai, lahan pertanian, dan kawasan hutan kecil dapat menjadi bagian dari solusi berbasis alam	-Belum optimalnya infrastruktur daerah-Degradasi kualitas lingkungan hidup	Permasalahan Infrastruktur dan lingkungan, Pembangunan wilayah dan pembangunan sarana dan prasarana yang belum merata, Belum optimalnya pengelolaan SDA dan lingkungan hidup	Kualitas dan ketangguhan permukiman perkotaan dan perdesaan, mencakup : kualitas layanan perkotaan, akses dan keterjangkaun hunian yang layak dan aman, serta berketahanan	Ketersediaan sumber daya alam semakin berkurang seiring dengan pertumbuhan penduduk yang menyebabkan peningkatan permintaan terhadap sumber daya alam	Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah, Kontribusi industri pengolahan terhadap PDB semakin menurun akibat terjadinya pelemahan sektor manufaktur, rendahnya produktivitas faktorfaktor produksi, terbatasnya kemampuan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil industri di luar Jawa, dan terjadinya ekonomi biayatinggi akibat biaya logistik dan suku bungaKontribusi industri pengolahan terhadap PDB semakin menurun	Pembangunan sarana dan prasarana yang merata dan berkeadilan, Pembangunan sarana dan prasarana yang belum memadai masih menjadi persoalan pembangunan yang perlu direspon ke depan. Luasan permukiman kumuh, rumah tangga dengan akses air minum layak, rumah tangga dengan akses sanitasi layak infrastruktur SDA dalam kondisi baik, penanganan banjir merupakan isu-isu penyediaan infrastruktur yang perlu direspon dalam jangka panjang ke depan	Pembangunan infrastruktur di Deli Serdang, seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan populasi, perlu bertransformasi menuju pendekatan yang lebih berkelanjutan dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN		ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS KAB DELI SERDANG
	Kabupaten	Provinsi		GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
					akibatterjadinya pelemahan sektor manufaktur, rendahnya produktivitas faktorfaktor produksi, terbatasnya kemampuan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil industri di luar Jawa, dan terjadinya ekonomi biayatinggi akibat biaya logistik dan suku bunga		

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN		ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS KAB DELI SERDANG
	Kabupaten	Provinsi		GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
-Lahan petanian yang luas -Potensi pengembangan sektor peternakan dan perikanan	Alih fungsi lahan pertanian	Permasalahan Kondisi Geografi: Kondisi topografi wilayah Sumatera Utara khususnya di kawasan Pantai Barat dan Kepulauan Nias sangat berbukit dan bergelombang dengan kondisi struktur tanah yang tidak stabil mengakibatkan tingginya biaya pembangunan infrastruktur, Sebagian besar wilayah termasuk ke dalam kawasan rawan bencana alam (banjir, tsunami, abrasi, longsor, kebakaran hutan, angin puting beliung, letusan gunung berapi, gempa tektonik dan vulkanik dan lain-lain), sehingga menimbulkan limitasi pengembangan wilayah dan mitigasi bencana, Adanya konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang antara fungsi lindung dan budidaya (pertambangan, energi, infrastruktur, dan lainlain) yang berpotensi menimbulkan terjadinya konflik sosial, ekonomi, lingkungan hidup, pertanahan dan pemerintahan	-Tekanan terhadap lahan pertanian produktif akibat alih fungsi lahan -Degradasi kualitas lingkungan hidup yang mengancam produktivitas pertanian	-Perubahan iklim -Konflik dan ketidakstabilan politik '-Keterbatasan sumber daya alam	-Alih fungsi lahan pertanian -Degradasi lahan dan kesuburan tanah -Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan ketersediaan air sungai -Dampak perubahan iklim	Pembangunan antar daerah serta desa-kota, Keterkaitan antar daerah serta desa-kota di Provinsi Sumatera Utara belum mencerminkan keterkaitan tidak bisa mengabaikan rantai pasok, sehingga wilayah kota dan kawasan-kawasan perlu memiliki rantai nilai dengan wilayah-wilayah lain untuk mendorong perekonomian yang merata. Pembangunan wilayah Metropolitan Medan (Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Karo) masih menghadapi permukiman kumuh seperti air bersih dan sanitasi, penurunan kualitas lingkungan hidup, dan infrastruktur transportasi massal yang belum mendukung mobilitas penduduk.	Ketahanan Pangan Kabupaten Deli Serdang selama 5 tahun mengalami peningkatan. Walaupun produksi beras yang mengalami peningkatan, tapi tantangan terhadap alih fungsi lahan masih sering terjadi karena Deli Serdang merupakan wilayah yang bertumbuh dan berkembang

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN		ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS KAB DELI SERDANG
	Kabupaten	Provinsi		GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
-Sektor Perdagangan dan Jasa yang Berkembang-Pertumbuhan Sektor Industri-Meningkatnya aktivitas ekonomi dan pembangunan juga meningkatkan potensi pajak	Belum optimalnya kemandirian fiskal daerah	-Potensi PAD belum tergali optimal-Kesenjangan kemandirian Fiskal antar Kabupaten/Kota	Potensi pengurangan PAD akibat bencana alam dan perubahan iklim	-Globalisasi dan mobilitas global'Kompetisi pajak internasional-Ketergantungan pada komoditas global	Pemanfaatan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan potensi pariwisata sebagai destinasi unggulan dunia yang berkelanjutan terus mengukuhkan ekonomi kreatif sebagai salah satu pilarpertumbuhan ekonomi baru, menjadikannya barometer terdepan dalamarena ekonomi kreatif global.	Ketergantungan Ekonomi pada Sumber Daya Alam dan Dampak Lingkungan	*Kemandirian fiskal daerah, untuk keberlanjutan pembangunan, daerah dituntut untuk mengurangi ketergantungan sumber pendapatan dari pemerintah pusat dan provinsi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD*)

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN		ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS KAB DELI SERDANG
	Kabupaten	Provinsi		GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
-Tradisi saling menghormati dan toleransi -Keberadaan FKUB dan berbagai organisasi kemasyarakatan yang memiliki komitmen terhadap kerukunan dan ketertiban	Masih sering terjadi pelanggaran Perda terkait ketertiban umum	Kurangnya rasa aman dan masih adanya ancaman narkoba	Konversi tutupan lahan hutan dan lahan pertanian, serta hilangnya keanekaragaman hayati, mencakup : pemulihan hutan dan lahan kritis, perlindungan dan pemanfaatan lestari ekosistem darat dan laut	Konflik yang terjadi seperti perang Ukraina-Rusia, Palestina-Israel, Invasi Iraq atau kemiskinan ekstrim di suatu negara memaksa orang untuk meninggalkan tempat tinggalnya untuk menghindari konflik yang terjadi pada negaranya dan mencari kehidupan yang lebih baik di negara lain	Optimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi laut, Indonesia memiliki potensi ekonomi laut yang tinggi, namun belum dimanfaatkan secara optimal untuk penciptaan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan. Rendahnya pemanfaatan sumber daya laut serta belum berkembangnya pemanfaatan Sea Lines of Communication (SloC) dan ALKI menyebabkan kontribusi PDB kemaritiman masih berada di kisaran 7,60%	Adanya konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang antara fungsi lindung dan budidaya	Kerukunan, Ketertiban dan Rasa Aman, pembangunan dapat berjalan dengan baik dan dapat dinikmati masyarakatnya apabila terwujud kerukunan, ketertiban dan rasa aman bagi masyarakat

Uraian mengenai isu strategis Kabupaten Deli Serdang pada pembangunan jangka menengah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM

   Kualitas Sumber Daya Manusia harus ditingkatkan untuk mendukung kemajuan daerah. Sumber Daya Manusia sebagai motor utama pembangunan daerah harus dibekali dengan ilmu pengetahuan dan wawasan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Deli Serdang per tahun 2024 masih berada pada tingkat kelas 1 SMA. Hal ini perlu diperhatikan mengingat kebutuhan industri semakin meningkat menyesuaikan dengan perkembangan dunia. Kualitas SDM juga ditentukan oleh faktor kesehatan karena berkaitan dengan produktivitas dan kapasitas berpikir dan kemampuan tenaga kerja. Maka dari itu, isu kesehatan perlu diperhatikan mengingat usia harapan hidup Kabupaten Deli Serdang hingga tahun 2024 masih berada di bawah Provinsi Sumatera Utara dan nasional.

2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah

   Peningkatan daya saing ekonomi daerah perlu diupayakan melalui peningkatan sektor ekonomi. Peningkatan kualitas produk unggulan dan peningkatan ekspor dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Maka dari itu, Kabupaten Deli Serdang ke depannya perlu melakukan riset dan inovasi untuk menghasilkan perekonomian yang berdaya saing. Riset dan inovasi menjadi hal yang penting untuk meningkatkan pertumbuhan daerah. Peningkatan kolaborasi dengan pihak akademis melalui penelitian dan pengembangan dapat mendukung pertumbuhan daerah. Budaya riset dan inovasi perlu ditanamkan sejak dini, terutama pada dunia pendidikan. Ekosistem digital perlu diterapkan dalam dunia pendidikan agar masyarakat semakin inklusi pada digitalisasi. Hal ini perlu diterapkan agar masyarakat bukan hanya menggunakan teknologi sebagai alat konsumtif, namun juga menjadi sarana produktif sehingga mampu meningkatkan kemajuan daerah

3. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

   Tata kelola pemerintahan menjadi isu penting dalam memberikan

pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Berdasarkan penilaian integritas yang dinilai dari Indeks Integritas Nasional menunjukkan terjadi penurunan nilai di mana hal ini menandakan bahwa persepsi masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih berkurang. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang perlu melakukan reformasi birokrasi dan menyederhanakan regulasi yang berbelit agar masyarakat merasakan kemudahan ketika berurusan dengan instansi pemerintahan. Di samping itu sistem pemerintahan juga harus beradaptasi dengan IPTEK. Pelayanan berbasis IPTEK akan memberikan kemudahan bagi masyarakat di mana masyarakat secara luas dapat menerima layanan pemerintah. Selain itu, dengan adanya penerapan IPTEK dalam pemerintahan akan meningkatkan transparansi bagi masyarakat. Namun, pemerintah juga perlu memperhatikan dan merawat, serta meng-upgrade aplikasi yang telah dikembangkan. Beberapa aplikasi dan situs pemerintah ditemukan tidak berfungsi atau diakses oleh masyarakat. Di samping itu, pemerintah juga harus berfokus pada tingkat keamanan siber situs pemerintah untuk mencegah serangan siber dan menjaga keamanan data masyarakat.

4. Pengentasan Kemiskinan

   Kemiskinan hingga saat ini masih menjadi isu penting pembangunan daerah. Data menunjukkan masih terdapat penduduk miskin sebesar 3,44 persen dari populasi masyarakat Kabupaten Deli Serdang. Pembangunan yang telah dilaksanakan hingga saat ini masih belum mampu mengatasi kemiskinan seluruhnya. Isu terkait kemiskinan masih menjadi prioritas pembangunan. Pada jangka menengah, pemerintah perlu mengidentifikasi seluruh penduduk miskin agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.

5. Peningkatan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan

   Kondisi infrastruktur harus diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Data menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen jalan yang terdapat di Kabupaten Deli Serdang dalam status tidak baik. Hal ini menjadi sebuah hambatan bagi pertumbuhan daerah karena rusaknya infrastruktur menghambat

arus distribusi barang dan jasa, serta mobilitas masyarakat. Selain itu, kondisi saluran irigasi juga masih banyak yang rusak sebesar lebih dari 20 persen. Hal ini akan berdampak bagi penyaluran air bagi masyarakat dan juga sektor pertanian dan domestik lainnya. Hal ini perlu diperhatikan karena infrastruktur merupakan pendukung utama pembangunan ekonomi daerah. Ketersediaan infrastruktur yang baik dapat mendukung kelancaran aktivitas perekonomian Kabupaten Deli Serdang. Pemerintah harus terus memperhatikan dan merawat infrastruktur yang dimilikinya

Isu lingkungan menjadi perhatian bagi seluruh wilayah. Kerusakan-kerusakan yang timbul perlu ditanggapi secara serius karena berkaitan dengan keberlangsungan hidup manusia. Pembangunan yang terjadi di Deli Serdang juga berdampak bagi kualitas lingkungan hidup daerah. Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang menunjukkan tren yang menurun dari 63,00 poin pada tahun 2020 menjadi 61,18 poin pada tahun 2023. Pemerintah perlu menanggapi hal ini mengingat kualitas hidup yang semakin menurun sehingga perlu melaksanakan pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup serta menurunkan penggunaan sarana dan prasarana yang menghasilkan banyak emisi CO_2.

6. Ketahanan Pangan

   Ketahanan Pangan Kabupaten Deli Serdang selama 5 tahun mengalami peningkatan, namun produksi dan akses masyarakat terhadap pangan mengalami penurunan pada tahun 2023. Produksi beras yang dihasilkan tidak sebanding dengan kebutuhan konsumsi masyarakat. Selain itu, Skor Pola Pangan Harapan yang menurun menandakan bahwa diversifikasi pangan masyarakat semakin berkurang. Penurunan ketahanan pangan masyarakat juga dapat disebabkan oleh kondisi alam, seperti cuaca ekstrim dan bencana alam lainnya. Selain itu, ketersediaan lahan untuk pertanian juga semakin berkurang sehingga menyebabkan penurunan produktivitas bahan pangan masyarakat. Pemerintah perlu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat melalui pembangunan pada sektor agroindustri.

7. Peningkatan Kemandirian Fiskal Daerah

   Sejalan dengan otonomi daerah, maka di daerah dituntut untuk mandiri secara fiscal. Kemandirian fiscal daerah merupakan kemampuan suatu daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publiknya sendiri tanpa bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Kemandirian daerah yang tinggi menunjukkan bahwa daerah memiliki kapasitas fiskal yang kuat, yaitu kemampuan untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Rasio PAD/PDRB adalah salah satu indikator kunci untuk mengukur kemandirian daerah dari sisi fiskal.

   Pemerintah harus meningkatkan PAD-nya melalui pengelolaan dan penggalian potensi PAD. Sektor Pariwisata dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi sekaligus sumber pendapatan asli daerah. Sektor ini tidak hanya berdampak bagi pendapatan destinasi wisata, namun juga memberikan efek bagi UMKM sekitar destinasi wisata. Maka dari itu, pemerintah perlu mengembangkan destinasi wisata dan memanfaatkan potensi wisata yang ada sehingga menjadi sebuah daya tarik bagi wisatawan domestik dan internasional. Dalam hal ini, pembangunan destinasi wisata tidak hanya berfokus pada peningkatan akomodasi saja, namun juga meningkatkan kualitas SDM pariwisata. Selain itu, peningkatan sektor pariwisata juga akan bermanfaat bagi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah.

8. Kerukunan, Ketertiban, dan Rasa Aman

   Tingkat keamanan Deli Serdang menjadi isu yang perlu ditanggapi agar Masyarakat dapat merasa aman bertempat tinggal dan Beraktivitas di Deli Serdang. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang perlu berupaya untuk meningkatkan kerukunan, ketertiban, dan rasa aman masyarakat melalui peningkatan sinergi dengan aparat penegak hukum dan menegakkan hukum yang berkeadilan. Keamanan juga berkaitan dengan potensi bencana di wilayah administratif Deli Serdang. Pemerintah berupaya memitigasi risiko bencana dengan membangun infrastruktur yang Tangguh terhadap bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana, serta meningkatkan sistem peringatan dini.

BAB III
VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah lima tahun ke depan yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029 pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan secara nyata komitmen dan program-program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih kepada masyarakat Kabupaten Deli Serdang.

Berbagai kemajuan dan prestasi daerah yang telah dicapai oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode sebelumnya tetap dipelihara dan dipertahankan bahkan harus ditingkatkan sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah di berbagai bidang. Oleh karena itu perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan tidak bisa terlepas dari tujuan, sasaran dan arah kebijakan jangka panjang daerah sebagaimana termuat dalam RPJPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025- 2045 serta arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional.

Visi adalah gambaran atau impian tentang masa depan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau entitas. Misi adalah pernyataan tentang langkah-langkah atau tindakan konkret yang akan diambil untuk mencapai visi. Visi memberikan gambaran besar tentang "apa yang ingin dicapai" di masa depan, sementara Misi menjelaskan "bagaimana cara mencapainya" melalui langkah-langkah konkret.

Pernyataan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029 adalah:

Terwujudnya Deli Serdang Sehat, Cerdas, Sejahtera, Religius dan Berkelanjutan

Definisi dari visi RPJMD Deli Serdang adalah:

1. **Sehat**: Kabupaten Deli Serdang memiliki akses layanan kesehatan yang modern dan merata di seluruh wilayah. Seluruh masyarakat dapat merasakan pelayanan kesehatan tanpa terkecuali sehingga masyarakat Deli Serdang menjadi produktif;
2. **Cerdas**: Masyarakat Deli Serdang yang cerdas mampu berpikir kritis dan inovatif sehingga menghasilkan SDM yang berkualitas dan mampu bersaing secara global;
3. **Sejahtera**: Masyarakat Deli Serdang yang memiliki standar hidup yang layak, di mana mereka mampu semakin makmur dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, tidak hanya sejahtera secara ekonomi tapi juga sejahtera secara sosial;
4. **Religius**: Masyarakat Deli Serdang yang taat kepada Tuhan yang Maha Esa sehingga menciptakan lingkungan yang rukun, aman, nyaman dan harmonis;
5. **Berkelanjutan:** Kabupaten Deli Serdang menjadi daerah yang memiliki lingkungan yang asri dan lestari, di mana bebas dari polusi, serta pembangunan yang menjaga kelestarian lingkungan hidup sehingga Kabupaten Deli Serdang menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi masyarakat untuk bertempat tinggal.

Pencapaian visi tersebut didukung dengan 4 misi pembangunan jangka menengah yang dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3. 1
Gambar Misi RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029



Sehat Pelayanan Publiknya

Terwujudnya pemerintahan yang profesional, sigap, dan pengayom, serta anti korupsi



Sehat Masyarakatnya

Meningkatnya derajat kehidupan masyarakat karena semakin terjangkauanya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pembinaan karakter yang berkualitas



Sehat Ekonominya

Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat



Sehat Lingkungannya

Meningkatnya kualitas lingkungan untuk hidup secara ideal di Kabupaten Deli Serdang

Penjelasan mengenai masing-masing misi, serta tujuan dan sasarannya diuraikan sebagai berikut:

1. **Sehat Pelayanan Publiknya**

   Pemerintah Kabupaten Deli Serdang akan mereformasi tata kelola pemerintahannya menjadi lebih transparan dan akuntabel. Masyarakat akan mudah mengakses pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui penerapan sistem berbasis teknologi digital pada setiap aspek pelayanan yang cepat, transparan dan mudah. Digitalisasi pemerintahan juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi pemerintah kepada masyarakat sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Pemerintah juga akan meningkatkan kualitas SDM ASN melalui pendidikan dan pengembangan sehingga memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat.

Adapun tujuan dari misi ini, yaitu "Terwujudnya pemerintahan yang profesional, sigap, dan pengayom serta anti korupsi", di mana Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memiliki ASN yang profesional dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai pelayan publik melalui reformasi pada tata kelola pemerintahan sehingga memberikan pelayanan publik yang prima. Terdapat 3 sasaran untuk tujuan ini, yaitu:

a. Meningkatnya SDM ASN yang profesional dan berintegritas;
b. Meningkatnya pelayanan publik yang cepat, transparan dan mudah;
c. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;dan
d. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa.

2. Sehat Masyarakatnya

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berupaya untuk menciptakan masyarakat yang sehat secara fisik, mental, dan sosial melalui peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan merata. Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan mempromosikan gaya hidup sehat, berupaya untuk mencegah penyakit, serta menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai di seluruh wilayah, terutama wilayah-wilayah yang terpencil. Selain itu, misi ini juga menekankan pentingnya edukasi kesehatan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pola hidup bersih dan sehat, serta pencegahan stunting dan gizi buruk pada anak. Selain sehat, pemerintah Kabupaten Deli Serdang juga berupaya peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Upaya ini diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang produktif, tangguh, berkarakter dan berkualitas sehingga mampu berkontribusi secara optimal terhadap pembangunan daerah. Misi Sehat Masyarakat merupakan dukungan terhadap terwujudnya Deli Serdang yang sehat dan cerdas.

Tujuan untuk misi ini, yaitu "Meningkatnya derajat kehidupan masyarakat karena semakin terjangkaunya akses masyarakat terhadap kesehatan, pendidikan, dan pembinaan karakter yang berkualitas". Hal ini berarti seluruh masyarakat dapat merasakan

dampak positif dari hasil pembangunan. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah mencakup seluruh lapisan masyarakat agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara inklusif. Pada misi ini terdapat 4 sasaran yang ingin dicapai, antara lain:

a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
b. Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan;
c. Meningkatnya kualitas pembinaan karakter masyarakat; dan
d. Meningkatnya jaminan sosial bagi masyarakat.

3. Sehat Ekonominya

Misi ini menekankan pada peningkatan perekonomian daerah, di mana hal ini akan dicapai melalui pemanfaatan sektor-sektor unggulan daerah. Kabupaten Deli Serdang akan meningkatkan hilirisasi produk-produk unggulan daerah sekaligus meningkatkan ekspor produk daerah dan bersaing di pasar domestik dan global. Selain itu, pemerintah juga akan memanfaatkan potensi ekonomi baru, yaitu pariwisata dan ekonomi kreatif. Pemerintah akan meningkatkan daya tarik destinasi wisatanya melalui peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan sehingga tidak hanya menarik wisatawan domestik, namun juga wisatawan nasional. Dukungan terhadap sektor-sektor tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif yang dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, dalam meningkatkan investasi, peran pemerintah agar dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan penyerapan tenaga kerja di daerah. Misi Sehat Ekonominya merupakan dukungan terhadap terwujudnya Deli Serdang yang sejahtera.

Tujuan untuk mendukung misi tersebut, yaitu “Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat”, di mana Kabupaten Deli Serdang akan meningkatkan perekonomian daerahnya melalui peningkatan investasi, terkhusus pada sektor unggulan daerah, serta meningkatkan jumlah wirausaha daerah yang akan berpengaruh bagi peningkatan lapangan pekerjaan daerah dan pendapatan masyarakat. Terdapat 10 sasaran untuk mendukung tujuan tersebut, yaitu:

a. Penurunan angka kemiskinan;
b. Terjaganya stabilitas harga barang kebutuhan pokok;
c. Meningkatnya nilai tambah perdagangan;
d. Meningkatnya daya saing industri pengolahan;
e. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan;
f. Meningkatnya kewirausahaan dan koperasi;
g. Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif;
h. Meningkatnya tingkat kemandirian daerah;
i. Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja;dan
j. Meningkatnya ketahanan pangan.

4. Sehat Lingkungannya

Pembangunan yang dilaksanakan pada Kabupaten Deli Serdang juga memperhatikan isu lingkungan saat ini. Pembangunan akan difokuskan pada pembangunan yang ramah lingkungan atau tidak merusak lingkungan sehingga menjaga kelestarian sumber daya alam. Infrastruktur yang dibangun juga memenuhi kualitas yang unggul, ikonik dan tahan terhadap risiko bencana serta perubahan iklim sehingga memitigasi dampaknya terhadap masyarakat. Sehat Lingkungannya juga berarti bahwa Deli Serdang menjadi tempat tinggal yang aman dan nyaman bagi masyarakat, di mana masyarakat dapat hidup dengan aman, nyaman, damai dan bebas dari tindak kriminalitas. Masyarakat memiliki jiwa sosial yang tinggi, rukun, damai dan rasa kebhinekaan. Misi Sehat Lingkungannya merupakan dukungan terhadap terwujudnya Deli Serdang yang religius dan berkelanjutan.

Tujuan dari misi ini, yaitu “Meningkatnya kualitas lingkungan untuk hidup secara ideal di Kabupaten Deli Serdang” yang berarti masyarakat dapat bertempat tinggal secara aman, nyaman, dan harmonis, serta memiliki kualitas lingkungan hidup yang layak pada setiap wilayahnya. Tujuan ini memiliki 3 sasaran, yaitu:

a. Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas;
b. Meningkatnya daerah yang aman dan kondusif;
c. Meningkatnya pembangunan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana; dan

Visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator capaian, serta target selama tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2030

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator		Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terwujudnya Deli Serdang Sehat, Cerdas, Sejahtera, Religius dan Berkelanjutan														
1	**Sehat Pelayanan Publiknya**	**1.1**	**Terwujudnya pemerintahan yang profesional, sigap, dan pengayom serta anti korupsi**	**1**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**poin**	**76,78**	**77,86**	**78,40**	**78,93**	**79,47**	**80,01**	**80,55**	
		1.1.1	Meningkatnya SDM ASN yang profesional dan berintegritas	2	Indeks Profesionalitas ASN	poin	72,11	73,00	74,00	75,00	76,00	77,00	78,00	
		1.1.2	Meningkatnya pelayanan publik yang cepat, transparan dan mudah	3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	poin	90,25	90,45	90,50	90,70	91,00	91,20	91,25	
				4	Indeks SPBE/Indeks Pemerintah Digital	poin	3,57/n/a	4,08/1,60	4,13/1,60	4,17/1,80	4,22/1,80	4,26/2,00	4,31/2,00	
				5	Indeks Pelayanan Publik	angka	4,53	4,55	4,57	4,60	4,62	4,64	4,66	
		1.1.3	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja	6	Akuntabilitas Kinerja Instansi	nilai	71,79	72,00	73,00	74,00	75,00	76,00	77,00	

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator		Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			penyelenggaraan pemerintahan daerah		Pemerintah (AKIP)									
				7	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP	level	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	
				8	Opini BPK	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
		1.1.4	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	9	Persentase Desa Mandiri	persen	7,10	23,15	26,31	29,47	32,63	35,79	38,95	
2	**Sehat Masyarakatnya**	**2.1**	**Meningkatnya derajat kehidupan masyarakat karena semakin terjangkaunya akses masyarakat terhadap kesehatan, pendidikan, dan pembinaan**	**10**	**Indeks Pembangunan Manusia**	**poin**	**77,56**	**78,40-78,80**	**79,30-79,80**	**80,20-80,70**	**81,80-82,30**	**83,00-83,30**	**83,50-84,00**	

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator		Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			karakter yang berkualitas											
		2.1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	11	Umur Harapan Hidup	tahun	73,81	73,81 - 73,91	73,86 - 73,96	73,91 - 74,01	73,96 - 74,06	74,01 - 74,11	74,06 - 74,16	
				12	Prevalensi stunting	persen	19,60	18,00	17,00	16,00	15,00	14,00	13,00	
		2.1.2	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan	13	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	tahun	10,29	10,58 - 10,93	10,70 - 11,07	10,83 - 11,22	10,96 - 11,36	11,09 - 11,51	11,21 - 11,65	
				14	Harapan lama sekolah	tahun	13,40	13,49 - 13,69	13,55 - 13,76	13,62 - 13,84	13,69 - 13,92	13,76 - 14,00	13,82 - 14,07	
		2.1.3	Meningkatnya kualitas pembinaan karakter masyarakat	15	Indeks Pembangunan Keluarga	poin	62,41	62,41 - 65,41	63,91 - 66,91	65,41 - 68,41	66,91 - 69,91	68,41 - 71,41	69,91 - 72,91	
				16	Indeks Ketimpangan Gender	poin	0,294	0,294-0,266	0,280-0,260	0,270-0,250	0,260-0,240	0,250-0,230	0,240-0,220	
		2.1.4	Meningkatnya jaminan sosial bagi masyarakat	17	Cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan	persen	85,55	98,60	98,70	98,80	98,90	99,00	99,00	

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator		Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				18	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten	persen	29,04	30,00	31,50	33,50	36,00	39,00	42,50	
3	**Sehat Ekonominya**	**3.1**	**Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat**	**19**	**PDRB Per Kapita**	**Rp. Juta**	**73,93**	**76,44**	**85,14**	**93,84**	**102,53**	**111,23**	**119,93**	
				20	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**persen**	**5,36**	**5,40-5,80**	**5,48-5,88**	**5,56-5,96**	**5,64-6,04**	**5,72 - 6,12**	**5,80-6,20**	
				21	**Gini Ratio**	**angka**	**0,262**	**,262 - 0,260**	**0,259 - 0,257**	**0,257 - 0,255**	**0,255 - 0,253**	**,254 - 0,252**	**0,251 - 0,249**	
				22	**Tingkat Pengangguran Terbuka**	**persen**	**8,02**	**7,98-7,65**	**7,50-7,20**	**7,30-7,00**	**7,10-6,80**	**7,59-7,12**	**6,80-6,50**	
		3.1.1	Penurunan angka kemiskinan	23	Tingkat Kemiskinan	persen	3,44	3,44-3,25	3,40-3,20	3,36 - 3,15	3,32 - 3,10	3,28 - 3,05	3,24 - 3,00	
		3.1.2	Terjaganya stabilitas harga barang kebutuhan pokok	24	Tingkat Inflasi	persen	1,80	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	
		3.1.3	Meningkatnya nilai tambah perdagangan	25	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	persen	17,79	17,89	17,94	18,09	18,24	18,39	18,54	

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator		Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		3.1.4	Meningkatnya daya saing industri pengolahan	26	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	persen	28,95	29,31	29,67	30,03	30,39	30,75	31,11	
		3.1.5	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan	27	Rasio PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	persen	11,00	11,17	11,35	11,52	11,69	11,86	12,04	
		3.1.6	Meningkatnya kewirausahaan dan koperasi	28	Rasio Kewirausahaan	persen	2,52	2,61	2,71	2,81	2,91	3,01	3,11	
				29	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	persen	n/a	0,233	0,234	0,235	0,236	0,237	0,238	
		3.1.7	Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif	30	Realisasi Investasi	Rupiah	6.888.541.470.000	7.033.188.313.200	7.187.918.456.090	7.353.240.580.580	7.529.718.354.514	7.717.961.313.377	7.918.628.307.525	
		3.1.8	Meningkatnya tingkat kemandirian daerah	31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	persen	0,585	0,580 - 0,612	0,587 - 0,627	0,594 - 0,642	0,601 - 0,657	0,608 - 0,672	0,615 - 0,086	

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator		Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		3.1.9	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	32	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	persen (juta rupiah / tenaga kerja)	89,22	91,72	94,32	97,07	99,87	102,82	105,92	
		3.1.10	Meningkatnya ketahanan pangan	33	Indeks Ketahanan Pangan	angka	86,20	87,30	87,55	87,80	88,05	88,30	88,56	
4	**Sehat Lingkungannya**	**4.1**	**Meningkatnya kualitas lingkungan untuk hidup secara ideal**	**34**	**Indeks Rasa Aman**	**angka**	**83,15**	**83,47**	**83,78**	**84,10**	**84,42**	**84,73**	**85,05**	
				35	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**poin**	**63,45**	**72,50**	**72,67**	**72,84**	**73,02**	**73,19**	**73,36**	
		4.1.1	Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas	36	Indeks Infrastruktur	poin	n/a	75,00	78,00	80,00	82,00	84,00	86,00	
		4.1.2	Meningkatnya daerah yang aman dan kondusif	37	Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	poin	n/a	61,00	62,00	63,00	64,00	65,00	66,00	
				38	Indeks Kerukunan Umat Beragama	skor	80,04	80,99	81,94	82,89	83,84	84,79	85,74	
				39	Indeks Perlindungan Anak	angka	n/a	61,20	61,25	61,50	61,75	62,00	62,25	

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator		Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		4.1.3	Meningkatnya pembangunan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	40	Indeks Risiko Bencana	poin	107,20	106,68	106,12	105,56	105,00	104,44	103,88	
				41	Persentase sampah terkelola	persen	61,38	61,50	62,00	64,00	66,00	68,00	70,00	

3.1.1. Penyelarasan RPJMD dengan RPJPN, RPJPD Provinsi dan RPJPD Kabupaten Deli Serdang

a. Arah Kebijakan RPJPN Tahun 2025–2045 Tahap I

Fokus Arah Kebijakan RPJPN Tahun 2025–2045 Tahap I (Periode 2025–2029) memaparkan strategi awal yang berpusat pada "**Penguatan Transformasi**" untuk meletakkan fondasi pembangunan. Tahap pertama ini menitikberatkan pada perbaikan mendasar di berbagai sektor, yang bertujuan untuk mempersiapkan Indonesia menghadapi tantangan masa depan dan mencapai visi jangka panjang. Penguatan ini mencakup transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang esensial untuk menciptakan negara yang lebih maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Dengan dasar yang kuat, Indonesia akan lebih siap untuk melangkah ke tahap-tahap pembangunan selanjutnya.

Pada sektor **Transformasi Sosial** dan **Transformasi Ekonomi**, kebijakan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing ekonomi. Transformasi sosial berfokus pada penuntasan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial guna membentuk manusia yang produktif. Sementara itu, transformasi ekonomi berupaya melanjutkan hilirisasi sumber daya alam, menerapkan ekonomi hijau, dan meningkatkan akses digital. Langkah-langkah ini penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan merata, terutama melalui pembangunan pusat-pusat pertumbuhan di luar Jawa.

Aspek **Transformasi Tata Kelola** dan **Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia** menjadi pilar penting untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan stabil. Transformasi tata kelola ditujukan untuk perbaikan kelembagaan, penyempurnaan birokrasi, dan peningkatan kualitas ASN. Kebijakan ini didukung oleh supremasi hukum, yang mencakup pembaharuan substansi hukum dan transformasi kelembagaan. Bersamaan dengan itu, penguatan stabilitas harga, keamanan nasional, serta diplomasi yang kuat, juga menjadi prioritas untuk menjaga iklim investasi dan kepercayaan publik.

Selanjutnya, **Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi** menjadi fokus utama untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Kebijakan ini menekankan pada optimalisasi nilai-nilai budaya, penguatan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana, dan peningkatan riset serta inovasi di bidang ekologi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya dukung lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam, dan akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam.

Fokus juga diarahkan pada **Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana** serta **Kesinambungan Pembangunan**. Pembangunan wilayah dan infrastruktur berupaya meningkatkan konektivitas antarpulau dan antarwilayah melalui pembangunan jalan tol, konektivitas laut, dan pengembangan kawasan metropolitan. Pada saat yang sama, kesinambungan pembangunan dijamin melalui reformasi tata kelola fiskal dan mobilisasi pembiayaan non-pemerintah. Langkah-langkah ini memastikan bahwa proyek-proyek strategis dapat berjalan lancar dan berkesinambungan, menciptakan fondasi kuat untuk masa depan Indonesia

b. Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahap I Periode 2025-2029

Pada periode pertama dari pembangunan jangka panjang Provinsi Sumatera Utara, fokus utama diarahkan pada "**Penguatan Transformasi**" sebagai langkah awal untuk mewujudkan visi Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan. Tahap pertama ini bertujuan untuk menguatkan fondasi dalam transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan penguatan keamanan daerah, demokrasi substansial, stabilitas ekonomi makro, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penguatan fondasi ini sangat penting untuk mempersiapkan Sumatera Utara dalam menjalankan fungsinya sebagai pusat pengembangan bioindustri dan pariwisata bertaraf global. Arah kebijakan pada tahap ini memastikan bahwa Sumatera Utara memiliki dasar yang kuat untuk memulai transformasi menuju pusat pengembangan bioindustri dan pariwisata

global. **Penekanan tahap ini memprioritaskan** pembangunan layanan dasar, penguatan industri regional, serta penciptaan struktur tata kelola yang responsif dan dinamis. Dengan fokus pada hilirisasi sumber daya alam dan peningkatan kapasitas riset, Sumatera Utara dipersiapkan untuk memasuki tahap transformasi lebih lanjut.

Mewujudkan transformasi sosial diarahkan pada pemenuhan pelayanan dasar kesehatan yang merata untuk seluruh masyarakat, peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang unggul, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pusat pelatihan dan pendidikan yang berfokus pada keterampilan yang relevan dengan kebutuhan bioindustri dan pariwisata. Ini semua dilakukan untuk membentuk masyarakat yang produktif, berkualitas, dan sejahtera sebagai fondasi untuk Sumatera Utara yang unggul.

Mewujudkan transformasi ekonomi difokuskan pada hilirisasi sumber daya alam unggulan seperti agrikultur atau hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, bahan tambang dan mineral, penguatan industri regional (dan bioindustri) serta pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Hilirisasi ini termasuk mengamankan ketersediaan bahan baku sumber daya alam unggulan untuk bioindustri. Ketersediaan bahan baku bioindustri dari agrikultur atau hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan salah satunya didukung dengan pengamanan pupuk baik organik maupun anorganik yang memudahkan dan menguntungkan petani, khususnya petani kecil. Penguatan industri dengan investasi berskala besar, seperti KEK Sei Mangkei, dan Kawasan Industri Kuala Tanjung, didukung dengan pengembangan industri lokal untuk menjadi penyedia bahan baku industri manufaktur, penerapan teknologi hijau dan praktik berkelanjutan dalam bioindustri dan penguatan ekonomi kreatif dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penguatan ekosistem ekonomi syariah dan industri halal untuk menjadikan Sumatera Utara sebagai pusat industri halal dunia. Transformasi ekonomi juga diarahkan melalui optimalisasi ekonomi biru (*blue economy*) dengan meningkatkan kapasitas dan teknologi untuk perikanan tangkap dan budidaya. Pengembangan kawasan perikanan di Pantai Barat Sumatera Utara yang kaya akan sumber

daya laut. Selain itu, implementasi pengembangan ekonomi hijau (*green economy*) di Sumatera Utara melalui pengembangan kawasan strategis agrikultur dengan menerapkan teknologi dan energi ramah lingkungan, dan efisiensi rantai distribusi melalui pengembangan jaringan transportasi darat dan laut untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Pembangunan jalan tol, rel kereta api, dan pelabuhan untuk mendukung rantai distribusi yang efisien dan menurunkan biaya logistik. Pengembangan pariwisata dengan penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan pada destinasi wisata, desa wisata dan usaha wisata serta peningkatan pengembangan wisata kota (*urban tourism*). Transformasi ekonomi juga dilakukan dengan melakukan penguatan kapasitas riset dan inovasi, pemenuhan akses digital salah satunya pembuatan *marketing digital* produk wisata pada destinasi, peningkatan standar kualitas produk bioindustri untuk pasar ekspor, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Mewujudkan transformasi tata kelola difokuskan pada kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN), regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik. Transformasi tata kelola mencakup semua urusan pemerintahan, terlebih pada pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan, termasuk dengan pembentukan kelompok kerja (POKJA) Pariwisata Provinsi dan kelompok kerja (POKJA) Pariwisata Kabupaten/Kota, serta menjalin kerjasama internasional dengan negara-negara lain untuk mendapatkan investasi, teknologi, dan pengetahuan yang diperlukan dalam pengembangan bioindustri dan pariwisata.

Kelembagaan tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran yang menjamin perangkat daerah lebih dinamis dan responsif dalam menyelenggarakan pelayanan. Penguatan kelembagaan tepat fungsi akan membantu menghasilkan perangkat daerah yang kolaboratif.

Peningkatan kualitas ASN dalam tahap ini memfokuskan pada penyiapan peta arah sistem merit, penataan kembali fungsi meritokrasi, manajemen ASN yang lebih terarah dan objektif, dan penguatan fungsi pengawasan pelaksanaan sistem merit, peningkatan ASN berkualitas menjadi pendukung terwujudnya ASN unggul dan profesional.

Digitalisasi pelayanan publik lebih diarahkan pada penguatan ketersediaan sistem informasi publik di semua sektor, pengintegrasian sistem informasi, penyediaan *dashboard* pelayanan publik dan penyiapan regulasi pembangunan basis satu data pelayanan publik Sumatera Utara. Selain itu, tata kelola yang baik dalam pariwisata dapat membantu penguatan fondasi transformasi tata kelola seperti pembentukan kelompok sadar wisata (POKDARWIS) pada destinasi pariwisata prioritas Provinsi Sumatera Utara. Sehingga membantu pemerintah daerah memasuki periode perencanaan lima tahunan kedua untuk memperbaiki indeks pelayanan publik.

Mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah difokuskan pada peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat, lembaga demokrasi yang kuat dan akuntabilitas berbasis digital. Stabilitas ekonomi ditekankan dengan menguatkan fondasi untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta menjaga stabilitas harga untuk tetap menjaga daya beli masyarakat. Selain itu juga dilaksanakan pendalaman sektor keuangan dengan diversifikasi produk dan instrumen keuangan dan penguatan sektor keuangan syariah dan integrasinya dalam ekosistem ekonomi syariah. Stabilitas ekonomi makro difokuskan kepada optimalisasi perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko, penerapan aturan fiskal adaptif, reformasi sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBD, dan pengelolaan fiskal yang adaptif serta penerapan prinsip ekonomi berkelanjutan dalam menjaga stabilitas ekonomi makro daerah.

Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi difokuskan pada optimalisasi kerukunan umat beragama dan budaya serta penguatan pembangunan keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif untuk meningkatkan pembangunan kebudayaan dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat serta mensosialisasikan prinsip pariwisata berkelanjutan pada destinasi pariwisata prioritas Provinsi Sumatera Utara.

Ketahanan masyarakat juga dibangun untuk meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana. Penciptaan iklim riset dan inovasi dilakukan untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang disertai dengan

pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungan, termasuk untuk menguatkan pemanfaatan energi terbarukan dan menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK).

Pembangunan kewilayahan serta sarana dan prasarana pada tahap ini difokuskan untuk penuntasan pemenuhan pelayanan dasar (pendidikan kesehatan, infrastruktur dasar, listrik) yang diprioritaskan di daerah afirmasi serta pemerataannya di seluruh wilayah Sumatera Utara. Pembangunan konektivitas difokuskan untuk menghubungkan pusat-pusat kegiatan, pusat pertumbuhan ekonomi (kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus), pusat komoditas sumber daya alam, perwilayahan industri serta kawasan pariwisata agar menjadi destinasi wisata unggulan yang berkelanjutan. Pengembangan infrastruktur transportasi fokus pada moda transportasi massal dengan transisi energi di kota metropolitan disertai dengan peningkatan layanan air bersih melalui konservasi air, sanitasi dan pengolahan persampahan terpadu. Memperkuat infrastruktur dasar untuk mendukung pengembangan bioindustri dan pariwisata juga ditekankan dalam tahap pertama ini. **Pembiayaan pembangunan** dioptimalkan dengan membuka proyek-proyek perintis dengan pembiayaan alternatif (KPBU) dan menguatkan instrumen dan sistem informasi untuk melakukan reformasi tata kelola fiskal daerah. Selain itu juga dilaksanakan pengembangan inovasi skema pembiayaan syariah untuk sektor publik, inovasi produk pembiayaan berbasis prinsip sewa-menyewa, jual beli, dan bagi hasil, dan lainnya.

c. Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029

Visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029 telah diselaraskan dengan arah kebijakan pentahapan pada periode I RPJPN, RPJPD Provinsi Sumatera Utara dan RPJPD Kabupaten Deli Serdang. Arah kebijakan Kabupaten Deli Serdang pada RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu pembangunan akan difokuskan pada penguatan fundamental sebagai akar dari transformasi yang akan dilaksanakan. Pada tahap ini, pembangunan akan diarahkan pada bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan

sosial. Dalam upaya mewujudkan transformasi, pemerintah akan melibatkan masyarakat serta para pemangku kepentingan untuk turut serta dalam program pemerintah untuk meningkatkan fundamental pembangunan. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan beserta pemenuhan kebutuhan dan keterampilan dari tenaga kesehatan dan pendidikan. Demikian pula dengan perlindungan sosial, pemerintah akan memperkuat regulasi dan peran serta masyarakat. Pembangunan pada tahap ini akan memerlukan biaya yang besar sehingga pada pelaksanaannya pemerintah akan menggunakan anggaran secara efektif dan efisien. Sebagai awal penerapan transformasi, pemerintah juga akan membenahi regulasi yang mendukung tumbuhnya perekonomian dan peningkatan produktivitas serta membenahi regulasi penyelenggaraan pemerintahannya untuk memperkuat manajemen ASN guna membangun karakter pemerintahan yang profesional serta infrastruktur sistem pelayanan kepada publik dengan harapan akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang adaptif, bersih, transparan, dan akuntabel.

3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Selanjutnya, visi tersebut dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran yang hendak diwujudkan dalam jangka waktu tahunan atau lima tahunan. Oleh karena itu berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi pembangunan daerah.

Dalam upaya mencapai visi dan misi-misi yang telah ditetapkan serta mempersiapkan keberlanjutan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menyusun fokus pembangunan berdasarkan identifikasi permasalahan dan isu strategis. Fokus pembangunan ditetapkan setiap tahun sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat lebih terstruktur dan dapat mempercepat penyelesaian permasalahan di Kabupaten Deli Serdang. Tema pembangunan disusun sebagai fokus pembangunan daerah, namun tidak

menunjukkan bahwa pemerintah tidak melaksanakan arah pembangunan lainnya. Tema pembangunan menunjukkan proporsi prioritas tahunan yang diberikan dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan. Arah kebijakan tahunan dipersiapkan secara bertahap mulai dari tahun 2026 sampai dengan 2030. Tahun 2030 menjadi masa transisi yang mengedepankan keberlanjutan pembangunan pada periode perencanaan jangka menengah selanjutnya.

Tabel 3. 2
Tema Pembangunan Tahunan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029

Uraian	Visi: Terwujudnya Deli Serdang Sehat, Cerdas, Sejahtera, Religius dan Berkelanjutan				
	Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tema Pembangunan	Implementasi awal dan konsolidasi	Peningkatan akselerasi pembangunan	Optimalisasi dan penyesuaian	Penyelesaian program unggulan dan peningkatan kualitas	Pencapaian visi "Terwujudnya Deli Serdang Sehat, Cerdas, Sejahtera, Religius dan Berkelanjutan".
Penjelasan	1. Penyesuaian program prioritas dengan visi-misi kepala daerah 2. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 3. Penguatan kelembagaan dan regulasi pendukung • pelaksanaan program unggulan 4. Sinkronisasi RPJMD dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	1. Pelaksanaan program unggulan secara lebih masif 2. Evaluasi awal terhadap efektivitas kebijakan dan program 3. Penyesuaian kebijakan dengan dinamika nasional & global 4. Penguatan kerja sama dengan pihak swasta dan masyarakat	1. Evaluasi capaian RPJMD di pertengahan periode 2. Penyempurnaan program berdasarkan evaluasi kinerja 3. Akselerasi proyek infrastruktur dan layanan publik	1. Penyelesaian program unggulan yang belum rampung 2. Optimalisasi anggaran dan sumber daya daerah 3. Evaluasi dampak kebijakan pembangunan terhadap masyarakat 4. Penyusunan rekomendasi untuk RPJMD periode berikutnya	Tahun terakhir dalam siklus pembangunan sebagai tahun transisi diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh program yang telah dijalankan memiliki keberlanjutan dan memberikan dampak jangka panjang. Pemerintah daerah akan memperkuat kelembagaan, mendorong kolaborasi antara sektor publik dan swasta, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga hasil pembangunan yang telah dicapai.

Dengan berpedoman kepada tema pembangunan yang menjadi fokus penyelenggaraan pemerintah setiap tahunnya, Kabupaten Deli Serdang juga mempersiapkan arah kebijakan transformasional yang memberikan keselarasan antara dokumen perencanaan yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Deli Serdang tahun 2025-2045. Arah kebijakan tahap I pada periode pelaksanaan RPJMD 2025-2029 diarahkan untuk penguatan fundamental transformasi yaitu:

1. Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial.
2. Penguatan pemanfaatan IPTEK, Riset dan Inovasi serta produktivitas tenaga kerja.
3. Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, penguatan kualitas SDM ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, dan peningkatan partisipasi masyarakat .
4. Memperkuat penegakan hukum serta peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mendukung stabilitas wilayah dan ekonomi.
5. Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.
6. Penguatan pembangunan yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah berdasarkan kebutuhan dan karakteristik wilayah.
7. Penguatan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.
8. Penguatan sinkronisasi perencanaan pembangunan yang berkelanjutan melalui pembiayaan yang inovatif.

Arah kebijakan RPJMD periode pertama diarahkan pada bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial. Dalam upaya mewujudkan transformasi, pemerintah akan melibatkan masyarakat serta para pemangku kepentingan untuk turut serta dalam program pemerintah untuk memperkuat dan meningkatkan fundamental pembangunan. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan beserta pemenuhan kebutuhan dan keterampilan dari tenaga kesehatan dan pendidikan. Demikian pula dengan perlindungan sosial, pemerintah akan memperkuat regulasi dan peran serta masyarakat. Pembangunan pada tahap ini akan memerlukan biaya yang besar sehingga pada

pelaksanaannya pemerintah akan menggunakan anggaran secara efisien, efektif dan produktif. Sebagai awal penerapan transformasi, pemerintah juga akan membenahi regulasi yang mendukung tumbuhnya perekonomian dan peningkatan produktivitas serta membenahi regulasi penyelenggaraan pemerintahannya untuk memperkuat manajemen ASN guna membangun karakter pemerintahan yang profesional serta infrastruktur sistem pelayanan kepada publik dengan harapan akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang adaptif, bersih, transparan, dan akuntabel.

Strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3. 3
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029

NO	MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Sehat Pelayanan Publiknya	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Melanjutkan Reformasi Birokrasi
			Menerapkan Transparansi dan Akuntabilitas
			Peningkatan Kompetensi ASN
			Meningkatkan Motivasi dan Kinerja ASN serta kesejahteraannya
			Melaksanakan Sistem Promosi Jabatan dengan baik dan tepat
			Pengembangan Digitalisasi Layanan Publik
			Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Publik
			Penerapan Standar Pelayanan Publik
			Implementasi One-Stop Service
			Penguatan tata kelola pemerintahan desa
2	Sehat Masyarakatnya	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
			Peningkatan kualitas dan distribusi pendidik dan tenaga pendidik serta kesejahteraannya
			Peningkatan kualitas kurikulum pendidikan yang adaptif dan berdaya saing
			Peningkatan efektivitas bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi
			Memastikan masyarakat mendapatkan akses pendidikan yang merata dan berkualitas.
			Peningkatan Kesejahteraan Guru, dan Tenaga Kependidikan
			Kompetisi olahraga antar sekolah
			Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat

NO	MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan	Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak
			Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan
			Peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan serta kesejahteraannya
			Penguatan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat
			Penurunan Gizi Buruk dan Prevalensi Stunting
			Pengendalian Penyakit dan Menular dan Tidak Menular
			Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan
			Percepatan implementasi transformasi kesehatan (transformasi pelayanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan dan transformasi teknologi kesehatan)
		Peningkatan perlindungan sosial	Peningkatan Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Universal (UHC)
			Peningkatan Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
			Penguatan regulasi dan peran serta masyarakat dalam perlindungan sosial
			Penguatan Program Bantuan Sosial
			Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial yang Adaptif
			Penguatan Perlindungan Sosial bagi Kelompok Rentan
			Peningkatan Kapasitas Pelayanan Sosial
			Penguatan Data dan Informasi Perlindungan Sosial
3	Sehat Ekonominya	Peningkatan lapangan kerja dan usaha	Peningkatan Realisasi Investasi Domestik dan Asing
			Peningkatan Industri Padat Karya Terampil
			Penyediaan Fasilitas pendukung Ekonomi Kreatif
			Fasilitasi perluasan Pasar Ekspor

NO	MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Penyediaan Dukungan Infrastruktur
			Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja
			Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
			Penguatan Kapasitas dan Kualitas SDM Industri Kecil dan Menengah (IKM)
			Pengembangan Kewirausahaan bagi Pemuda dan Perempuan
			Mengoptimalkan Peranan BUMD dalam Perekonomian
		Pengembangan Hilirisasi dan Industrialisasi	Hilirisasi Industri Berbasis Sumber Daya Alam (SDA)
			Peningkatan keterkaitan Industri dan Pertanian
			Pengembangan Kawasan Industri
			Pemberian Insentif untuk Industri Hilir
			Peningkatan Kapasitas Riset dan Inovasi
		Ketahanan Pangan	Peningkatan Produktivitas Pertanian
			Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Teknologi Pertanian
4	Sehat Lingkungannya	Pengembangan dan Penataan Infrastruktur Berkualitas	Peningkatan Pengembangan Infrastruktur Jalan dan Jembatan
			Revitalisasi dan Peningkatan Kualitas Permukiman
			Pengembangan Jaringan Transportasi Antar Wilayah
			Peningkatan Bantuan Rumah Layak Huni
		Peningkatan daerah yang aman dan kondusif	Penegakan peraturan daerah untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat
			Peningkatan infrastruktur penerangan jalan
			Pengintegrasian pendidikan multikultural dan toleransi antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat
			Peningkatan peran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan
			Pendidikan dan kesadaran Bencana

NO	MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Peningkatan Ketahanan Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Pengembangan Sistem Peringatan Dini
			Pembangunan Infrastruktur Tangguh Bencana

Program Prioritas adalah rangkaian kegiatan atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai fokus utama dalam pembangunan selama periode tertentu, dengan alokasi sumber daya yang lebih besar untuk mencapai target spesifik yang berdampak signifikan bagi masyarakat. Program prioritas merupakan instrumen penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang dirancang untuk menjawab kebutuhan mendesak dan masalah strategis di wilayah tersebut. Program ini dipilih berdasarkan analisis mendalam terhadap kondisi sosial-ekonomi, potensi daerah, serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat.

Dalam penyusunannya, program prioritas harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Visi-Misi Kepala Daerah. Implementasi program prioritas diawasi secara ketat melalui indikator kinerja yang jelas. Program prioritas menjadi tolok ukur keberhasilan kepemimpinan kepala daerah. Masyarakat akan menilai kinerja pemerintah berdasarkan pencapaian program-program ini, seperti tersedianya fasilitas kesehatan atau peningkatan kualitas jalan. Keberhasilan program prioritas bergantung pada sinergi antar-OPD (Organisasi Perangkat Daerah), partisipasi masyarakat, serta evaluasi berkala untuk menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan di lapangan.

Tabel 3. 4
Program Prioritas RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran		Outcome		Indikator		Program Prioritas
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)
Terwujudnya Deli Serdang Sehat, Cerdas, Sejahtera, Religius dan Berkelanjutan								
1	**Sehat Pelayanan Publiknya**	**1.1**	**Terwujudnya pemerintahan yang profesional, sigap, dan pengayom serta anti korupsi**	**Meningkatnya tata kelola pemerintahan**		**Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)**		
		1.1.1	Meningkatnya SDM ASN yang profesional dan berintegritas	1.1.1.1	Meningkatnya profesionalitas ASN	1	Indeks Profesionalitas ASN (Poin)	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
								PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
								PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
		1.1.2	Meningkatnya pelayanan publik yang cepat, transparan dan mudah	1.1.2.1	Meningkatnya kepuasan masyarakat	2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (poin)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
								PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
								PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
				1.1.2.2	Meningkatnya nilai SPBE	3	Indeks SPBE//Indeks Pemerintah Digital (Poin)	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
								PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
								PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
								PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
				1.1.2.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	4	Indeks Pelayanan Publik (Angka)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
								PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
								PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
								PROGRAM PENCATATAN SIPIL
								PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran			Outcome		Indikator		Program Prioritas
(1)	(2)	(3)			(4)		(5)		(6)
									PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
									PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
									PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
									PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
									PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
									PROGRAM PENANGANAN BENCANA
									PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
									PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
									PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
									PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
									PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
									PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
									PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
									PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
									PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
									PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
			1.1.3	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja	1.1.3.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan berfokus pada hasil	5	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
									PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran			Outcome		Indikator		Program Prioritas
(1)	(2)	(3)			(4)		(5)		(6)
				penyelenggaraan pemerintahan daerah					PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
									PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
									PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
									PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
									PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
									PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
									PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
					1.1.3.2	Meningkatnya kualitas tata kelola dan akuntabilitas intern pemerintah	6	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (level)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
									PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
					1.1.3.3	Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola keuangan	7	Opini BPK	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
									PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
			1.1.4	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	1.1.4.1	Meningkatnya kemandirian masyarakat desa	8	Persentase Desa Mandiri (%)	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
									PROGRAM PENATAAN DESA
									PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
									PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
2	**Sehat Masyarakatnya**	**2.1**	**Meningkatnya derajat kehidupan masyarakat karena semakin terjangkaunya akses masyarakat terhadap kesehatan, pendidikan, dan pembinaan karakter yang berkualitas**		**Meningkatnya kualitas hidup masyarakat**		**Indeks Pembangunan Manusia (Poin)**		

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran			Outcome		Indikator		Program Prioritas
(1)	(2)	(3)			(4)		(5)		(6)
			2.1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2.1.1.1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	9	Umur Harapan Hidup (tahun)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
									PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
									PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
									PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
					2.1.1.2	Meningkatnya kualitas kesehatan dan gizi anak di masyarakat	10	Prevalensi stunting (%)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
									PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
									PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
			2.1.2	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan	2.1.2.1	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan	11	Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun (tahun)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
									PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
									PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
									PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
									PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
									PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
									PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
									PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
							12	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
									PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
									PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
									PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
									PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran			Outcome		Indikator		Program Prioritas
(1)	(2)	(3)			(4)		(5)		(6)
			2.1.3	Meningkatnya kualitas pembinaan karakter masyarakat	2.1.3.1	Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup keluarga	13	Indeks Pembangunan Keluarga (Poin)	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
									PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
									PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
									PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
									PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
									PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
									PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
									PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
					2.1.3.2	Menurunnya tingkat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan	14	Indeks Ketimpangan Gender (Poin)	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
									PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
			2.1.4	Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat	2.1.4.1	Meningkatnya jumlah masyarakat yang terlindungi oleh program jaminan kesehatan	15	Cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan (%)	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
					2.1.4.2	Meningkatnya jumlah pekerja yang terlindungi oleh program jaminan sosial ketenagakerjaan	16	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
3	**Sehat Ekonominya**	**3.1**	**Meningkatnya pendapatan masyarakat akibat (dengan) tersedianya lapangan pekerjaan dan tumbuhnya wirausahawan baru**		**Meningkatnya nilai PDRB Per Kapita**		**PDRB Per Kapita (Rp. Juta)**		
					Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi		**Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)**		
					Berkurangnya ketimpangan		**Gini Ratio (Angka)**		
					Menurunnya angka pengangguran		**Tingkat Pengangguran Terbuka (%)**		
			3.1.1	Penurunan angka kemiskinan	3.1.1.1		17	Tingkat Kemiskinan (%)	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran			Outcome		Indikator		Program Prioritas
(1)	(2)	(3)			(4)		(5)		(6)
						Meningkatnya kesejahteraan masyarakat			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
									PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
									PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
									PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
									PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
									PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
									PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
									PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
									PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
									PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
									PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
									PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
									PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
									PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
									PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
			3.1.2	Terjaganya stabilitas harga barang kebutuhan pokok	3.1.2.1	Meningkatnya stabilitas harga barang dan jasa di masyarakat	18	Tingkat Inflasi (%)	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
									PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
									PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
									PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
									PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran			Outcome		Indikator		Program Prioritas
(1)	(2)	(3)			(4)		(5)		(6)
									PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
									PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
									PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
									PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
									PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
									PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
									PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
			3.1.3	Meningkatnya nilai tambah perdagangan	3.1.3.1	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	19	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
									PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
									PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
									PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
									PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
									PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
									PROGRAM STABILISASI BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING LAINNYA
			3.1.4		3.1.4.1	Meningkatnya kontribusi sektro	20	Kontribusi Sektor Industri	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
									PROGRAM PENGENDALIAN IZIN INDUSTRI

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran			Outcome		Indikator		Program Prioritas
(1)	(2)	(3)			(4)		(5)		(6)
						industri pengolahan terhadap PDRB		Pengolahan terhadap PDRB	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONA
				Meningkatnya daya saing industri pengolahan					PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTR
									PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM
									PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
									PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
			3.1.5	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan	3.1.5.1	Meningkatnya rasio PDRB sektor pertanian, dan perikanan	21	Rasio PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan (%)	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
									PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
									PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
									PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
			3.1.6	Meningkatnya kewirausahaan dan koperasi	3.1.6.1	Meningkatnya wirausahawan pada usaha mikro	22	Rasio Kewirausahaan (%)	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
									PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
									PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
									PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
									PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
									PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
									PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran			Outcome		Indikator		Program Prioritas
(1)	(2)	(3)			(4)		(5)		(6)
									PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP
									PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN
									PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
									PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI
									PROGRAM LAYANAN USAHA SIMPAN PINJAM
							23	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
									PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
									PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP
									PROGRAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI
									PROGRAM PEMBERDAYAAN KOPERASI
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
			3.1.7	Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif	3.1.7.1	Peningkatan daya saing	24	Realisasi Investasi (Rp)	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
									PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
									PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
									PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
									PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
									PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
									PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
									PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
									PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
			3.1.8	Meningkatnya tingkat kemandirian daerah	3.1.8.1	Meningkatnya rasio pajak daerah terhadap PDRB	25	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
									PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM
									PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran			Outcome		Indikator		Program Prioritas
(1)	(2)	(3)			(4)		(5)		(6)
									PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
									PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
			3.1.9	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	3.1.9.1	Peningkatan Kesempatan dan Produktifitas Tenaga Kerja	26	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA
									PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
									PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
									PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
									PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN INDUSTRI
			3.1.10	Meningkatnya ketahanan pangan	3.1.10.1	Meningkatnya ketahanan pangan	27	Indeks Ketahanan Pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
									PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
									PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
									PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
									PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
									PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
4	**Sehat Lingkungannya**	**4.1**	**Meningkatnya kualitas lingkungan untuk hidup secara ideal di Kabupaten Deli Serdang**		**Meningkatnya rasa aman di masyarakat**		**Indeks Rasa Aman (Angka)**		
					Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)**		

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran			Outcome		Indikator		Program Prioritas
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)
			4.1.1	Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas	4.1.1.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur yang tersedia	28	Indeks Infrastruktur	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
									PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
									PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
									PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
									PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
									PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
									PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
									PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
									PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
									PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
									PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
									PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
									PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
			4.1.2	Meningkatnya daerah yang aman dan kondusif	4.1.2.1	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	29	Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Poin)	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
									PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
									PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
									PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
									PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
									PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran			Outcome		Indikator		Program Prioritas
(1)	(2)	(3)			(4)		(5)		(6)
									PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
					4.1.2.2	Meningkatnya toleransi dan harmoni antarumat beragama	30	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Skor)	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
									PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
					4.1.2.3	Meningkatnya kesejahteraan anak	31	Indeks Perlindungan Anak	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
									PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
									PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
			4.1.3	Meningkatnya pembangunan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana	4.1.3.1	Menurunnya potensi kerugian akibat bencana	32	Indeks Risiko Bencana (Poin)	PROGRAM PENANGANAN BENCANA
									PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
									PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
					4.1.3.2	Meningkatnya timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	33	Persentase sampah terkelola (%)	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
									PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

Untuk mendukung tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029, ada beberapa program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang yang menjadi janji politik kepala daerah guna mendukung implementasi seluruh program prioritas daerah, yaitu sebagai berikut:

Untuk Misi 1: Sehat Pelayanan Publiknya, program unggulannya:

a. Program Berjemur (Bupati kerja bertemu rakyat); yang dilakukan setiap 2 minggu sekali Bupati dan Perangkat Daerah melakukan kunjungan kerja di setiap desa, untuk memastikan pembangunan dapat dirasakan oleh semua warga desa di Deli Serdang.
b. Program CTM (Cepat, Transparan, Mudah). Memberikan pelayanan publik oleh setiap Perangkat Daerah dengan Cepat, Transparan dan Mudah (CTM) serta memperhatikan kesejahteraan ASN dan Aparatur Desa.
c. Program Paten Kali (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Lengkap dan Elektronik) untuk mendekatkan akses pelayanan masyarakat di setiap kantor kecamatan.

Untuk misi 2: Sehat Masyarakatnya, program unggulannya:

a. Program Deli Serdang Sehat. Program ini untuk memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan mulai dari pencegahan sampai perawatan dan membantu pembiayaan dalam merawat pasien, meliputi:
    - Program BPJS gratis bagi warga miskin, tidak mampu dan kriteria lain;
    - Program PAS PULA (Program Layanan Kesehatan Pasien Unregister dan lainnya) merupakan program layanan kesehatan bagi pasien unregister dan lain-lain di Kabupaten Deli Serdang yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan yang berlaku. Sasaran penerima PAS PULA, yaitu:
        - ✓ Masyarakat (khususnya masyarakat miskin) yang memerlukan layanan kesehatan yang tidak terjamin oleh BPJS Kesehatan antara lain korban begal, korban percobaan bunuh diri.
        - ✓ Masyarakat miskin yang belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional yang memerlukan layanan kesehatan darurat disaat Kabupaten Deli Serdang belum

berstatus Universal Health Coverage (UHC), antara lain: ibu hamil dengan penyulit kehamilan beserta dengan bayi baru lahir dari ibu tersebut yang membutuhkan perawatan intensif, anak berkebutuhan khusus (ABK) dan anak dengan kondisi stunting.

- ✓ Mr/Mrs.X, yaitu orang tidak diketahui identitasnya.
- ✓ ODGJ (Orang dengan gangguan jiwa).

- ➢ Program faskes paripurna/rumah sakit lengkap;
- ➢ Program pembiayaan gotong royong.

b. Program Evoria (even olah raga, seni budaya dan keagamaan). Menyelenggarakan Event Olahraga, Seni Budaya dan Keagamaan untuk mengukir prestasi dan mengapresiasi atlet, pelaku seni budaya, tokoh agama serta generasi muda setiap tahun;

c. Program Pemula (pendidikan murah dan berkualitas). SD dan SMP unggulan, kuota mahasiswa daerah, bantuan perlengkapan sekolah dari UMKM lokal, insentif pembangunan sekolah atau gedung baru bagi sekolah negeri atau swasta;

d. Program Guru Senyum (guru sejahtera, nyaman mengajar, berkualitas dan membanggakan). Kepedulian kepada guru formal dan non formal (guru mengaji, guru sekolah minggu dan guru ABK) demi mewujudkan Kesejahteraan Guru, Kenyamanan Mengajar, Meningkatnya Kualitas dan Membanggakan;

e. Program Dukungan bagi Masyarakat Rentan Sosial Ekonomi. Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan bagi kelompok masyarakat yang rentan secara sosial dan ekonomi, meliputi masyarakat miskin, penyandang disabilitas, lansia terlantar, anak terlantar, perempuan kepala keluarga, serta kelompok marginal lainnya yang mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial;

f. Program Dukungan bagi Anak Berkebutuhan Khusus. Program dukungan bagi Anak Berkebutuhan Khusus bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana setiap anak, terlepas dari keterbatasannya, memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan berkembang.

Untuk misi 3: Sehat Ekonominya, program unggulannya :

a. Program Pekerjaan untuk Penyandang Disabilitas. Program pekerjaan untuk penyandang disabilitas merupakan langkah strategis untuk menciptakan ekosistem kerja yang inklusif dan memberdayakan, melalui penyusunan regulasi, pelatihan, serta dukungan bagi perusahaan dan tenaga kerja disabilitas, diharapkan kesenjangan dalam akses kerja dapat dikurangi.;
b. Program Percepatan Pencetakan Wirausaha Baru dan Pendampingannya. Menciptakan dan mengembangkan wirausaha baru secara cepat dan sistematis. Pendekatan berbasis pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan bagi calon pengusaha.;
c. Program Pendampingan Kerja Luar Negeri. Mempersiapkan, melindungi, dan mendukung tenaga kerja Indonesia (TKI) atau pekerja migran agar dapat bekerja secara aman, legal, dan profesional di luar negeri dan bekerja sama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI);
d. Program Kemudahan Perizinan Investasi. Menyederhanakan, mempercepat, dan meningkatkan transparansi dalam proses perizinan usaha, bangunan, tenaga kerja, dan sektor lainnya, untuk mendukung kemudahan berusaha, investasi, dan pertumbuhan ekonomi.;
e. Program Kemudahan Berusaha UMKM/IKM. Memfasilitasi wirausaha baru dan pendampingan naik kelas UKM/IKM untuk meningkatkan ekspor komoditi unggulan Deli Serdang, melalui penyederhanaan regulasi, digitalisasi, akses permodalan, serta pendampingan bisnis.;
f. Program Mudah Kerja (warga miskin mendapat kuota khusus melamar pekerjaan). Program tenaga kerja Afirmasi untuk memfasilitasi masyarakat prasejahtera mendapat kuota khusus melamar pekerjaan, melalui peningkatan akses masyarakat terhadap peluang kerja yang lebih luas, mempercepat proses rekrutmen tenaga kerja, serta meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri, untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif.;

g. Program Mudah Berpartisipasi. Memperluas akses masyarakat dalam berpartisipasi dalam program pembangunan pemerintah maupun swasta antara lain melalui program padat karya, akses berjualan di pasar tradisional maupun pameran/event, dan lain-lain.;
h. Program Peningkatan Keahlian Buruh Harian Lepas. Meningkatkan keterampilan dan daya saing buruh harian lepas untuk mendapatkan akses peluang kerja yang lebih baik, mendapatkan penghasilan lebih stabil, dan bertransisi menuju pekerjaan yang lebih layak atau wirausaha mandiri (pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, dan pendampingan usaha bagi para pekerja di sektor informal).;
i. Program Mudah Kreasi, Pengembangan di Bidang Ekonomi Kreatif melalui Penyediaan Workspace Gratis, Sertifikat Pelatihan, Kerjasama/Mitra Pemerintah;
j. Program Pembangunan Pertanian Menuju Swasembada Pangan.

Untuk misi 4: Sehat Lingkungannya, program unggulannya:

a. Program Rumah Sehat (tersedia jaringan air minum, sanitasi dan drainase). Membangun kawasan tempat tinggal yang memiliki ketersediaan Jaringan Air Minum, Sanitasi dan Drainase;
b. Program Patroli Lingkungan. Program ini melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, aparat keamanan, serta pihak terkait lainnya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, sekaligus mencegah terjadinya tindak kriminal, kerusakan lingkungan, atau gangguan ketertiban lainnya;
c. Program Bina Mental Remaja dan Akhlak Masyarakat. Memperkuat karakter, disiplin, dan kemampuan menghadapi masalah, serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental pada usia remaja. Dengan pendekatan yang berbasis pada pembinaan, pendidikan karakter, dan keterampilan hidup, program ini diharapkan dapat membentuk remaja menjadi individu yang tangguh, berpikiran positif, dan produktif;
d. Program Dua Pasti Jadi (2 usulan di musrenbang kecamatan pasti dikerjakan);

e. Program Jumpa Dia (jalan utama pasti mantap di deli serdang). Memastikan kondisi ruas jalan utama di Kabupaten Deli Serdang senantiasa dalam kondisi baik sepanjang tahun;
f. Program ATK (Alun-Alun Tiap Kecamatan);
g. Program Sakolah (Sampah Kita Olah).
h. Program Rusunawa Dalam Kota. Penyediaan tempat tinggal yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), terutama di area perkotaan yang padat penduduk serta penyediaan hunian yang lebih efisien dan mendukung keberlanjutan kota dan terorganisir.

Selanjutnya, untuk mewujudkan visi dan misi, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang juga telah menyusun Kegiatan Strategis Daerah, sebagai berikut:

A. Mendukung Misi 1, Sehat Pelayanan Publiknya

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil-Komunikasi Dan Informatika

1. Penyelenggaraan semua jenis layanan Program PATEN KALI di seluruh kecamatan.
2. Penguatan layanan publik berbasis digital sampai ke seluruh desa/kelurahan.
3. Implementasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di semua lingkup Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Urusan Keuangan

1. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel dengan Hasil Opini BPK atas Laporan Keuangan berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2025 hingga 2029 melalui penerapan teknologi digital dalam berbagai kegiatan keuangan.
2. Tingkat Kemandirian Daerah berdasarkan Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB sebesar 0,608 - 0,672 persen pada tahun 2029.
3. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah 30% pada Tahun 2029 yang dilakukan dengan berbagai upaya

ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan diantaranya pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pemungut pajak dan retribusi daerah, peningkatan layanan pembayaran dan penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban pajak dengan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

B. Mendukung Misi 2, Sehat Masyarakatnya

Urusan Kesehatan

1. Pemenuhan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (*Universal Health Coverage*) bagi seluruh Masyarakat.
2. Implementasi Program Layanan Kesehatan Pasien Unregister dan Lain-Lain (PAS PULA).
3. Upaya penurunan Angka Kematian Ibu menjadi 8/KH.
4. Upaya penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi 1,42 per 1.000 Kelahiran Hidup.
5. Upaya penurunan Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita menjadi 14 persen.
6. Upaya penurunan Insidensi Tuberkulosis menjadi 84.6 per 100.000 penduduk.
7. Peningkatan kapasitas seluruh Puskesmas menjadi ILP.
8. Peningkatan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan di Fasyankes di atas 80 persen.
9. Peningkatan kapasitas RSUD dan Puskesmas:
   - RS Drs. H. Amri Tambunan menjadi kelas A.
   - RS Pancur Batu menjadi kelas B.
   - RS Bangun Purba menjadi kelas C.
   - Pembangunan baru RS di Kec. Hamparan Perak.
   - Puskesmas direncanakan akan bertambah 1 unit di Kec. Percut Sei Tuan.
   - 34 Puskesmas direakreditasi dengan target paripurna.

Urusan Pendidikan

1. Pembangunan unit sekolah baru SMP Negeri sebanyak 3 unit.
2. Pembangunan ruang kelas SD sebanyak 247 unit.
3. Pembangunan ruang kelas SMP sebanyak 10 unit.
4. Pemberian bantuan perlengkapan sekolah kepada 100-500 siswa per tahun.
5. Pemberian beasiswa kepada 1000 siswa per tahun.
6. Peningkatan sekolah terakreditasi minimal B sesuai SNP (PAUD: 63,63%; SD: 87,54%; SMP: 95,39%).
7. Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4 mencapai 64 persen.
8. Pembangunan/rehab toilet sekolah negeri.
9. Pelayanan pendidikan kepada ABK di Deli Serdang.
10. Dukungan penyelenggaraan sekolah unggulan dan Sekolah Rakyat.
11. Peningkatan kolaborasi pentahelix dalam penyelenggaraan pendidikan berkualitas.

Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga-Bidang Kebudayaan

1. Peningkatan prestasi di bidang olahraga dan capaian target medali sebanyak 362 medali tahun 2029 melalui event olahraga PON, PEPARNAS, PORPROV Sumatera Utara, POSPEDA, POPDA Sumatera Utara, ASEAN Para Games, Asian Para Games, POSPENAS dan POPNAS.
2. Dukungan terhadap penyelenggaraan event budaya, pariwisata dan keagamaan.
3. Peningkatan pelestarian budaya dan cagar budaya.

C. Mendukung Misi 3, Sehat Ekonominya

Urusan Penanaman Modal

1. Target investasi sampai dengan tahun 2029 sebesar Rp7.717.961.313.377,27.
2. Penyelenggaraan pelayanan melalui Mal Pelayanan Publik.

Urusan Perindustrian dan Perdagangan

1. Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Target Tahun 2025 29,97-30,43 persen dan di 2029 sebesar 32,32-32,96 persen.
2. Stabilitas harga dan kebutuhan pokok lainnya serta dukungan bagi masyarakat rentan ekonomi.
3. Revitalisasi pasar pada 5 lokasi.

Urusan Ketenagakerjaan

1. Persentase angka pengangguran 7,59-7,12 persen.
2. Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan sebesar 73,00 persen.
3. Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana Balai Latihan Kerja (BLK).

Urusan Pertanian

1. Produksi padi sawah sebanyak 446.425 ton pada tahun 2029 dengan sentra produksi di Kecamatan Hamparan Perak, Percut Sei Tuan, Labuhan Deli, Pantai Labu dan Tanjung Morawa.
2. Produksi cabai merah sebanyak 6.298 ton pada tahun 2029 dengan sentra produksi di Kecamatan Beringin, Pagar Merbau dan STM Hulu.
3. Produksi pisang barangan sebanyak 5.220 ton pada tahun 2029 dengan sentra produksi di Kecamatan STM Hilir, STM Hulu, pengembangan di Kecamatan Kutalimbaru.
4. Produksi salak sebanyak 3.446 ton pada tahun 2029 dengan sentra produksi di Kecamatan STM Hulu, pengembangan di Kecamatan Kutalimbaru.
5. Produksi kelapa sawit sebanyak 248.219 ton pada tahun 2029 dengan sentra produksi di Kecamatan Bangun Purba, STM Hilir, STM Hulu, Kutalimbaru, Hamparan Perak, Pagar Merbau dan Galang.
6. Produksi karet dengan produksi angka sementara 2023 4,564 ton sentra di Kecamatan Bangun Purba, Biru-

Biru,Galang,Gunung Meriah,Kutalimbaru,STM Hulu,STM Hilir.

7. Jumlah populasi sapi sebanyak 93.848 ekor pada tahun 2029 dengan sentra sapi di Kecamatan Hamparan Perak, daerah pengembangan di Kecamatan STM Hulu, Sibolangit, Kutalimbaru, Pancur Batu, Namorambe, Biru-Biru, STM Hilir, Bangun Purba, Galang, Labuhan Deli, Percut Sei Tuan, Batang Kuis, Pantai Labu dan Pagar Merbau.
8. Jumlah populasi unggas sebanyak 25.746.670 ekor tahun 2029 dengan sentra produksi di Kecamatan Pantai Labu.

Urusan Perikanan

1. Peningkatan produksi perikanan tangkap dengan target pada tahun 2029 menjadi 55.272 ton.
2. Peningkatan produksi perikanan air tawar dengan target pada tahun 2029 menjadi 63.648 ton.
3. Peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan dengan target sampai dengan tahun 2029 sebesar 3.637 ton.

Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

1. Penguatan kelembagaan 16 desa wisata melalui dukungan berbagai pihak serta penguatan daya tarik dan destinasi wisata.
2. Pengembangan wisata budaya di kawasan situs bersejarah Rantau Panjang dan Kota Rantang.

D. Mendukung Misi 4, Sehat Lingkungannya

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang-Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Persentase sampah terkelola sebesar 68 persen. Salah satu upaya untuk menanggulangi hal tersebut akan dibangun TPS3R.
2. Penanganan jalan dalam kondisi baik mencapai 81 persen. Upaya untuk mencapainya dilakukan dalam program unggulan, yaitu JUMPA DIA.

3. Pemenuhan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan sebesar 50,95 persen.
4. Pemenuhan rumah tangga dengan akses air minum layak sebesar 81,50%.
5. Pemenuhan rumah tangga dengan akses sanitasi sebesar 87,97 persen.
6. Pembangunan Alun-Alun di setiap Kecamatan.

Urusan Trantibumlinmas

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) trantibumlinmas melalui sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, pemadam kebakaran dan bencana.
2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan trantibumlinmas melalui patroli lingkungan yang melibatkan lintas sektor.

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

Program perangkat daerah Kabupaten Deli Serdang merupakan pelaksanaan dari urusan wajib pelayanan dasar, wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang serta unsur penunjang dan unsur kewilayahan. Program Perangkat daerah merupakan program yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program Perangkat Daerah RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2026-2030 sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Program Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2026-2030

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	86,43	%	86,61	21.147.931.982	86,619	21.244.270.023	86,709	21.886.604.046	86,799	21.458.398.237	86,889	23.569.002.423	Dinas Pendidikan
		Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan Minimal Akreditasi B	41.10	%	41,57	6.501.118.182	41,93	6.530.733.607	42,36	6.728.194.494	42,85	6.596.559.090	43,37	7.245.383.157	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD	99,80	%	99,86	218.940.456.740	99,89	219.937.825.877	99,92	226.587.785.994	99,95	222.154.653.932	99,98	244.005.331.567	
		Skor Kemampuan Literasi SD	58,36	%	63,36	9.180.347.703	65,86	9.222.168.186	68,36	9.501.006.309	70,86	9.315.121.551	73,36	9.744.131.300	
		Skor Kemampuan Numerasi SD	52,53	%	58,33	8.984.448.187	61,23	9.025.376.262	64,13	9.298.264.256	67,03	9.116.346.095	69,93	9.536.201.201	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	98,17	%	98,49	109.808.642.695	98,62	110.308.868.889	98,72	113.644.127.731	98,82	111.420.709.447	98,92	122.379.822.664	
		Skor Kemampuan Literasi SMP	66,21	%	68,41	8.045.178.629	69,51	8.081.827.921	70,61	8.326.187.131	71,71	8.163.287.410	72,81	8.539.249.212	
		Skor Kemampuan Numerasi SMP	59,87	%	62,87	7.932.792.461	64,37	7.968.929.785	65,87	8.209.875.448	67,37	8.049.251.336	68,87	8.419.961.184	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Non Formal	65,60	%	68,23	22.685.451.252	69,28	22.788.793.363	70,31	23.477.827.031	71,34	23.018.489.352	72,37	25.282.540.910	
		Proporsi PTK Bersertifikat Pendidik	34,32	%	40,26	32.331.760.039	43,28	32.479.045.287	46.65	33.461.069.889	50,23	32.806.412.617	51.36	36.033.184.300	

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	82	%	95	298.394.792	100	299.754.110	100	308.817.367	100	317.914.205	100	332.555.807	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIKAN	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Distribusi Guru	0,66	%	1,18	678.492.920	1,44	681.583.751	1,7	702.191.869	1,96	722.876.348	2,2	756.168.560	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usul Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/Diperbarui	0	%	86	557.714.076	87	560.254.706	88	577.194.364	89	594.196.789	90	621.562.638	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Persentase tingkat Laporan Administrasi Urusan Penunjang	100	%	100	912.057.081.431	100	916.211.898.672	100	943.914.148.436	100	971.719.045.095	100,0	1.016.471.756.187	Dinas Pendidikan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Jumlah Kematian Ibu	20,00	per Kelahiran Hidup	12	61.677.486.552,05	10	120.626.211.613	9	59.414.236.894	8	57.311.929.680	7	58.371.692.865	Dinas Kesehatan
		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat pendek) pada Balita	0,15	%	0,10	277.685.193.389,07	0,08	337.562.710.914	0,06	378.410.593.090	0,04	372.767.716.611	0,03	393.761.881.439	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	42,00	%	62,00	4.065.543.106,01	70,00	3.726.027.013	80,00	4.216.390.734	90,00	4.358.541.250	100,00	4.349.603.928	Dinas Kesehatan
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	98,00	%	100,00	549.457.953,56	100,00	594.888.022	100,00	643.553.753	100,00	693.977.332	100,00	759.554.402	Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	makanan minuman														
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	72,00	%	74,00	838.402.388,07	75,00	882.327.470	76,00	952.291.164	77,00	1.027.025.816	78,00	1.125.484.057	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82,53	Nilai	82,72	263.807.953.204,49	82,75	258.689.418.844	82,77	260.416.544.222	82,79	261.701.021.239	82,80	267.345.333.309	Dinas Kesehatan
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,64	Poin	86,55	66.763.036.303,54	86,57	67.269.743.704	86,60	69.141.258.736	86,63	71.983.589.974	86,65	73.668.603.094	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	86	Poin	81	122.082.705.487,69	82	128.478.790.401	83	138.666.448.782	84	149.548.822.707	86	163.885.671.767	RSUD Drs.H.AMRI TAMBUNAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	Nilai	86	13.673.090.030,47	87	14.389.442.478	88	15.530.445.781	89	16.749.256.241	90	18.354.963.021	RSUD Drs.H.AMRI TAMBUNAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Elemen Penilaian Standar Akreditasi Rumah Sakit Kementerian Kesehatan. Cakupan Keterpenuhan Standarisasi Rumah Sakit Pendidikan	94	%	91	6.527.640,87	92	6.869.633	93	7.414.357	94	7.996.227	94	8.762.804	RSUD Drs.H.AMRI TAMBUNAN

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
DINAS SDA BMBK						**465.746.213.704**		**469.350.046.083**		**474.506.284.705**		**484.346.239.817**		**494.877.335.769**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	70,77	Nilai	76	14.047.207.179,70	76	14.111.198.326	76	14.537.859.387	76	14.966.101.382	76	15.655.368.115	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konsturksi
		Indeks Kepuasan Masyarakat	82,00	Nilai	84	10.014.331.368,45	84,70	10.059.951.009	85,50	10.364.120.030	86	10.669.416.106	86,60	11.160.798.157	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Bangunan Air Dalam Kondisi Baik	82,04	Persen	82	13.094.458.085,94	83	13.154.109.046	84	13.551.831.903	85	13.951.028.468	86	14.593.545.818	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konsturksi
		Persentase Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik	80,04	Persen	82	26.415.204.848,09	83	26.535.537.611	84	27.337.856.476	85	28.143.148.223	86	29.439.286.431	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	76,34	Persen	78	391.088.071.918,40	79	394.397.358.300	80	397.589.711.076	81	405.458.503.432	82	412.816.961.182	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konsturksi
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Jumlah SDM Jasa Konstruksi yang Bersertifikat Terampil	116	Orang	140	882.212.345,20	141	886.231.207	142	913.026.971	143	939.922.024	144	983.210.317	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konsturksi

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Jumlah Dokumen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	3	Dokumen	3	204.727.958,15	3	205.660.583	3	211.878.862	3	218.120.181	3	228.165.749	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik		Persen		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00		10.000.000.000,00	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konsturks
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	- Indeks Kepuasan Masyarakat	87	Poin	83,61	5.193.197.111,03	83,71	5.465.276.023	83,81	5.898.642.222	83,91	6.361.560.476	84,01	6.971.426.409	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
		- Nilai LHE AKIP	52,14	Nilai	74	6.676.815.102,83	75	7.026.622.851	76	7.583.795.230	77	8.178.962.238	78	8.963.057.659	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	78,24	Persen	80	58.526.989.183,54	80,5	61.593.300.591	81	66.477.309.096	81,5	71.694.367.306	82	78.567.516.181	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	60	Persen	62	14.780.470.317,22	64	15.554.839.978	66	16.788.252.865	68	18.105.774.493	70	19.841.527.080	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	83,82	Persen	85,38	26.136.007.874,43	86,24	27.505.310.144	87,11	29.686.329.303	87,97	32.016.076.252	88,75	35.085.372.582	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	100	Persen	100	56.810.920.579,91	100	59.787.324.736	100	64.528.129.332	100	69.592.218.289	100	76.263.839.712	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi	n/a	Persen	82	3.273.693.313,79	85	3.445.206.718	87	3.718.392.580	90	4.010.207.498	90	4.394.655.457	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	65,72	Nilai	76	6.581.736.556,49	76	6.485.751.137	76	6.554.574.411	76	6.619.146.348	76	6.792.145.945	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		Indeks Kepuasan Masyarakat	87,29	Poin	87	3.597.522.211,88	87	3.545.051.162	88	3.582.694.943	88	3.617.955.560	88	3.712.498.023	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase penyediaan rumah korban bencana/relokasi program Kabupaten	100,00	Persen	100	2.451.366.501,63	100	2.628.371.146	100	2.656.259.516	100	2.682.428.183	100	2.752.555.944	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
		Persentase peningkatan jumlah rumah layak huni terjangkau	1,60	Persen	2,39	3.198.330.369,51	2,39	12.620.174.823	2,41	12.044.244.102	2,42	9.163.934.473	2,43	8.426.303.005	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase luas kawasan kumuh yang ditangani	313,61	Ha	48,816	13.826.466.199,75	48,816	13.889.456.754	48,816	14.309.438.327	48,816	14.730.919.025	48,816	15.409.395.101	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Menurunnya kawasaan permukiman kumuh	Persentase peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	24,11	Persen	28,75	13.865.855.378,00	30,98	14.194.308.723	33,22	15.041.299.805	35,46	15.336.894.909	37,69	16.043.222.325	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU	74,5	Persen	76,5	35.554.183.514,86	77,5	34.357.020.858	78,5	35.395.868.928	79,5	36.091.528.083	80,5	37.394.177.660	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Nilai LHE-AKIP	79	Poin	81	5.328.668.848,13	82	5.607.845.315	83	6.052.516.472	84	6.527.510.589	85	7.153.285.720	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana serta penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Pencegahan dan Penyelamatan Penanggulangan Bencana	100	Persen	100	3.272.996.601,38	100	3.444.473.504	100	3.717.601.226	100	4.009.354.040	100	4.393.720.180	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Managemen Kebakaran	51,35	Persen	100,00	6.918.177.144,57	100,00	7.280.630.191	100,00	7.857.943.948	100,00	8.474.625.813	100,00	9.287.065.717	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Cakupan Wilayah Bencana Kebakaran Kabupaten/ Kota	29,81	Persen	100,00	135.080.125,28	100,00	142.157.163	100,00	153.429.441	100,00	165.470.396	100,00	181.333.604	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	66,34	Nilai	82,00	7.432.652.877,93	84,00	7.822.060.032	86,00	8.442.306.184	88,00	9.104.848.085	90,00	9.977.705.727	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Indeks Kepuasan Masyarakat	93	Poin	82,00	385.890.024,19	84,00	406.107.346	86,00	438.309.415	88,00	472.707.404	90,00	518.024.587	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	81	Poin	91,25	11.549.947.252,57	91,65	12.150.392.222	91,75	12.515.891.349	92,00	12.882.937.514	92,25	14.119.211.974	Satuan Polisi Pamong Praja
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	78	Nilai	79	39.963.588,22	79.55	46.730.374	79.65	50.019.010	79.75	53.127.101	80,00	56.998.851	
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	83	Persen	84	13.859.775.284,83	85	14.670.872.753	86	15.156.138.434	87	15.643.460.087	88	17.218.905.473	Satuan Polisi Pamong Praja
	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	80	Persen	71,5	821.473.757,93	73	864.511.925	74,5	933.062.946	76	960.548.198	77	1.004.786.434	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarat	90,5	Poin	91	8.230.022.236,17	92	7.873.822.449	93	7.725.611.887	94	7.574.462.267	95	7.546.005.344	Dinas Sosial
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	73,6	Nilai	82	255.267.556,54	84	244.219.439	85	239.622.447	85	234.934.295	86	234.051.658	Dinas Sosial
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	43	%	100	1.015.708.042,45	100	971.747.652	100	953.456.249	100	934.802.121	100	931.290.110	Dinas Sosial
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial	Cakupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapat Rehabilitasi Sosial	34	%	100	477.949.009,28	100	480.126.275	100	494.643.199	100	509.213.913	100	532.665.859	Dinas Sosial

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	Cakupan masyarakat yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	29	%	100	2.847.873.705,59	100	2.724.616.201	100	2.673.330.195	100	2.621.027.174	100	2.611.180.090	Dinas Sosial
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban bencana yang mendapatkan penanganan	46	%	100	521.991.538,86	100	499.399.464	100	489.999.167	100	480.412.458	100	478.607.570	Dinas Sosial
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Meningkatnya kualitas layanan taman makam pahlawan	Persentase Areal Taman Makam Pahlawan yang dikelola	39	%	100	81.971.367,27	100	80.122.031	100	80.030.416	100	78.464.641	100	78.821.268	Dinas Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,57	Poin	83,61	6.406.713.862,43	83,62	6.335.443.691	83,70	6.526.999.862	83,82	6.719.265.819	83,90	7.028.722.923	Dinas Ketenagakerjaan
		Nilai LHE AKIP	70,46	Poin	74		75		76		77		78		
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Terkelolanya informasi tenaga kerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Makro	0	Dokumen			1	42.482.158							Dinas Ketenagakerjaan
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	88	Persen	88	1.910.022.921,22	89	1.416.446.190	90	1.459.273.342	91	1.502.259.184	92	1.571.446.025	Dinas Ketenagakerjaan
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase penempatan tenaga kerja terdaftar	75,36	Persen	77	378.358.131,12	78	380.081.717	79	391.573.730	80	403.108.324	81	421.673.557	Dinas Ketenagakerjaan
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatanya pekerja Indonesia yang terlindungi	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	100	Persen	100	5.348.071.522,07	100	5.372.434.317	100	5.534.873.287	100	5.697.914.153	100	5.960.332.706	Dinas Ketenagakerjaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,47	Nilai	90,26	2.109.889.820,27	90,27	2.220.429.920	90,28	2.396.497.747	90,29	2.584.571.971	90,30	2.832.348.032	Dinas P3AP2KB
		LHE AKIP	70,12	Poin	78,05	8.788.869.593,04	78,1	9.249.330.852	78,15	9.982.751.696	78,2	10.766.185.885	78,25	11.798.311.576	
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Yang Responsif Gender atau ARG pada APBD Kabupaten	100	Persen	100	882.134.145,69	100	928.350.396	100	1.001.963.455	100	1.080.596.326	100	1.184.190.230	Dinas P3AP2KB
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan	100	Persen	100	152.874.801,02	100	160.884.127	100	173.641.350	100	187.268.511	100	205.221.447	Dinas P3AP2KB
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Persentase Data Gender dan Anak yang Diperbaharui	100	Persen	100	85.828.491,17	100	90.325.167	100	97.487.454	100	105.138.150	100	115.217.466	Dinas P3AP2KB
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Persentase Kluster Hak Anak Terimplementasi	100	Persen	100	851.923.959,80	100	896.557.456	100	967.649.510	100	1.043.589.464	100	1.143.635.619	Dinas P3AP2KB
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan,	Persentase Penyelesaian Pengaduan perlindungan anak dari tindak kekerasan	100	Persen	100	559.558.808,21	100	588.874.882	100	635.569.408	100	685.448.120	100	751.160.214	Dinas P3AP2KB
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN															

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	100	%	100	6.784.040.572,93	100	6.321.857.688	100	6.207.391.230	100	6.266.560.066	100	6.248.372.109	Dinas Ketahanan Pangan
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	68	Skor	72	1.045.443.330,36	74	1.125.789.839	76	1.145.699.060	78	1.167.609.438	78	1.211.797.852	Dinas Ketahanan Pangan
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Ketersediaan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	100	%	100	39.963.588,22	100	38.233.943	100	37.514.257	100	36.780.301	100	36.642.119	Dinas Ketahanan Pangan
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase produk PSAT bersertifikat	20	%	20	218.467.615,62	20	209.012.220	20	205.077.940	20	201.065.643	20	200.310.248	Dinas Ketahanan Pangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN															
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Persentase tanah kosong yang dikelola	4	Ha	5,00	19.537.754.242,60	5,00	7.646.788.528	5,00	4.168.250.818	5,00	4.086.700.057	5,00	1.628.538.601	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	LHE AKIP	67,42	Nilai	73	7.824.690.813,28	74	7.860.335.688	74	8.097.997.939	76	8.336.540.815	77	8.720.481.837	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kepuasan Masyarakat	83,26	Poin	90,50		90,70		91,00	-	91,20		91,25		
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Cakupan Informasi Mengenai Lingkungan Hidup yang Dapat Diakses oleh Publik	0	Persen	100	466.241.862,61	100	468.365.797	100	482.527.135	100	496.740.946	100	519.618.448	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase Layanan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan Terakreditasi	74,62	Persen	100	2.657.904.986,17	100	2.670.012.901	100	2.750.742.440	100	2.831.771.111	100	2.962.188.885	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase Usaha yang Memiliki Dokumen Lingkungan	0	Persen	100	139.872.558,78	100	140.509.739	100	144.758.141	100	149.022.284	100	155.885.534	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	0	Persen	100	172.873.344,31	100	173.660.858	100	178.911.604	100	184.181.807	100	192.664.336	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	64,63	Persen	100	531.054.097,30	100	533.473.280	100	549.603.184	100	565.792.855	100	591.850.556	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0	Persen	100	326.369.303,83	100	327.856.058	100	337.768.995	100	347.718.662	100	363.732.913	Dinas Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan	69,15	Persen	62,00	5.871.306.634,00	64,00	6.164.871.965	66,00	6.473.115.563	68,00	6.796.771.342	70,00	7.136.609.909	Dinas Lingkungan Hidup
PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	15,6	Persentase	18,3	31.660.219.039,56	18,3	33.318.942.513	18,3	35.960.950.606	18,3	38.783.122.188	18,3	42.501.157.268	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89	Poin	92	12.825.112.462,04	94	12.499.167.224	95	12.706.923.021	96	13.139.483.225	97	13.625.840.511	Dinas Dukcapil
		LHE-AKIP	75	Nilai	78		80		81		82		83		
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Tertib Administrasi Kependudukan	87	Skor	90	3.832.496.952,36	91	4.024.790.435	92	4.335.597.582	93	4.667.676.597	94	5.107.011.682	Dinas Dukcapil
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Tertib Administrasi Pencatatan Sipil	87	%	90	1.072.213.675,26	91	1.128.388.460	92	1.217.863.432	93	1.313.439.870	94	1.439.355.867	Dinas Dukcapil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase meningkatnya kualitas informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	100	%	100	15.190.603,92	100	15.986.461	100	17.254.099	100	18.608.180	100	20.392.097	Dinas Dukcapil
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Persentase profil kependudukan yang diterbitkan	100	%	100	23.285.095,51	100	24.505.034	100	26.448.148	100	28.523.767	100	31.258.265	Dinas Dukcapil
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	1. Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	61,67	Nilai	80	232.695.700,08	83	233.755.730	86	240.823.484	89	247.917.425	92	259.335.311	Dinas PMD
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat	90	Poin	92	8.195.722.989,83	93	8.233.058.078	94	8.481.989.827	95	8.731.843.960	96	9.133.990.745	Dinas PMD
PROGRAM PENATAAN DESA	Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	-	%	70	129.206.721,13	100	135.976.043	-		-		-		Dinas PMD
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	100	%	100	64.605.842,21	100	74.171.600	100	87.330.543	100	102.746.332	100	122.832.383	Dinas PMD
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1. Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	%	100	655.580.462,81	-		100	646.170.578	-		100	662.705.692	Dinas PMD
		2. Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	100	%	100	11.551.136.684,54	100	11.603.757.143	100	11.954.604.124	100	12.306.751.120	100	12.873.540.956	Dinas PMD
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	100	%	100	1.307.074.757,61	100	1.313.029.052	100	1.352.729.321	100	1.392.576.694	100	1.456.712.087	Dinas PMD
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	erkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Persentase PUS yang menggunakan Alat Kontrasepsi untuk Menurunkan Angka Unmeetneed	100	Persen	100	592.099.667,01	100	623.120.603	100	672.530.624	100	725.310.008	100	794.843.555	Dinas P3AP2KB
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Partisipasi Masyarakat (PUS) dalam ber-KB	100	Persen	100	10.148.945.411,59	100	10.680.662.958	100	11.527.580.532	100	12.432.251.005	100	13.624.097.941	Dinas P3AP2KB
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Kader Catur Bina yang sudah dilatih	100	Persen	100	6.646.090.820,45	100	6.994.288.881	100	7.548.897.353	100	8.141.325.619	100	8.921.812.917	Dinas P3AP2KB
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,75	Poin	90,5	7.891.715.827,19	91	8.077.917.121	91,5	7.711.291.627	92	9.726.544.851	92,5	7.772.569.441	DISHUB
		Nilai LHE AKIP	65,57	Nilai	72	47.068.226,13	74	46.730.374	76	47.518.059	78	48.223.061	80	49.670.427	DISHUB
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase titik rawan kemacetan yang tertangani	70	Persen	72	2.493.727.905,15	73	2.400.241.955	74	2.368.400.115	75	2.579.933.746	76	2.500.621.023	DISHUB
		Persentase Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Perhubungan	71	Persen	73	1.868.550.940,98	74	1.707.782.771	75	1.769.505.837	76	1.849.313.510	77	2.453.067.695	DISHUB

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Persentase kendaraan yang berkeselamatan	80	Persen	82	2.735.157.710,48	83	2.879.270.774	84	2.566.642.123	85	2.038.282.520	86	1.884.056.308	DISHUB
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,25	Poin	92	9.198.878.084,41	93	9.240.782.981	94,00	9.520.183.934	95	9.800.620.170	96,00	10.251.989.653	Dinas Kominfostan
		Nilai LHE AKIP	63,69	Poin	72		73		74		75		76		
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	93,00	Nilai	95	1.183.802.090,40	96	1.189.194.825	97	1.225.150.887	98	1.261.240.179	99	1.319.326.843	Dinas Kominfostan
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE)	3,57	Poin	3,62	4.303.140.078,64	3,64	4.322.742.756	3,66	4.453.443.634	3,68	4.584.628.806	3,7	4.795.774.784	Dinas Kominfostan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK															
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (Indeks IPS)	2,69	Nilai	2,75	310.636.436,55	2,80	312.051.521	2,85	321.486.597	2,90	330.956.634	3,00	346.198.906	Dinas Kominfostan

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN															
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Indeks KAMI)	50	Skor	55	279.772.241,65	60	281.046.726	65	289.544.353	70	298.073.466	75	311.801.298	Dinas Kominfostan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,5	Poin	88,7	7.504.746.420,01	88,8	7.897.930.657	88,9	8.524.192.931	89	9.193.161.204	89,1	10.074.485.191	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	68,19	Nilai	81		82		83		84		85		
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Koperasi yang Diawasi dan Diperiksa	7,95	%	9,59	64.128.244,12	10,96	64.420.376	12,33	66.368.167	13,7	68.323.176	15,07	71.469.813	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/ USP KOPERASI	Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Sehat	37,93	%	42,86	41.678.273,93	45	41.868.137	46,67	43.134.046	48	44.404.647	50,91	46.449.711	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	4,11	%	6,19	403.359.252,45	7,19	463.081.977	8,18	499.801.819	9,16	539.025.657	10,10	590.700.617	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	1,59	%	4,55	180.613.911,97	5,80	207.356.214	6,85	244.143.727	7,69	287.240.540	8,33	343.393.668	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	2,13	%	2,23	111.009.967,29	2,28	127.446.475	2,33	150.057.029	2,38	176.545.442	2,43	211.058.603	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOERASI	Meningkatnya legalitas koperasi	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	25,32	%	36,49	119.890.764,67	42,51	137.642.194	48,47	162.061.592	54,38	190.669.078	60	227.943.291	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Mikro Baru	1,15	%	1,85	1.309.094.985,73	2,2	1.377.680.316	2,55	1.486.922.755	2,9	1.603.614.641	3,25	1.757.348.924	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Naik Kelas	2,8	%	3,8	492.294.103,57	4,3	588.734.188	4,8	722.065.405	5,3	884.922.975	5,8	1.101.997.948	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	159,49	%	100	310.625.426,22	100	312.040.460	100	321.475.202	100	330.944.903	100	346.186.636	DPMPTSP
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	106,07	%	100	274.400.653,70	100	275.650.668	100	283.985.142	100	292.350.497	100	305.814.757	DPMPTSP
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	65,59	%	100	3.168.297.086,29	100	890.716.782	100	917.648.171	100	944.679.350	100	988.186.743	DPMPTSP
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100	%	100	154.796.561,17	100	155.501.727	100	160.203.421	100	164.922.536	100	172.518.075	DPMPTSP
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100	%	100	241.982.204,25	100	243.084.539	100	250.434.354	100	257.811.404	100	269.684.958	DPMPTSP

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	100	%	100	10.230.613.941,00	100	10.277.218.843	100	10.587.957.095	100	10.899.846.744	100	11.401.841.322	DPMPTSP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	90.56	Point	92	8.636.728.873,32	93	9.089.219.265	94	9.809.944.145	95	10.579.816.608	96	11.594.075.570	Disbudporapar
		LHE - AKIP	62.79	Nilai	71	233.779.140,48	73	234.844.106	74	241.944.767	75	249.071.739	76	260.542.786	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase Pemuda yang Bekerja atau Berwirausaha setelah Mengikuti Pelatihan	0,35	Persen	42	606.114.421,39	44	608.875.537	46	627.285.276	48	645.763.230	50	675.503.982	Disbudporapar
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Atlet Berprestasi	n/a	Persen	52	11.645.074.686,19	54	12.255.176.553	56	13.226.944.358	58	14.264.978.833	60	15.632.524.526	Disbudporapar
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi dalam kegiatan Kepramukaan	20,49	Persen	35	570.680.039,83	40	573.279.736	45	590.613.214	50	608.010.918	53	636.012.980	Disbudporapar
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	45	Persentase	52	3.055.062.366,09	54	3.215.121.387	56	3.470.062.753	58	3.742.389.049	60	4.101.161.964	Disbudporapar
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	60	Persentase	64	932.483.725,21	66	936.731.595	68	965.054.271	70	993.481.892	72	1.039.236.845	Disbudporapar

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	26	Persentase	30	932.483.725,21	32	936.731.595	34	965.054.271	36	993.481.892	38	1.039.236.845	Disbudporapar
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	23	Persentase	27	522.190.886,12	29	524.569.693	32	540.430.392	34	556.349.860	36	581.972.661	Disbudporapar
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Pengelolaan Museum Daerah	94.48	Persentase	100	1.659.398.215,23	100	1.746.336.425	100	1.884.811.257	100	2.032.728.948	100	2.227.601.282	Disbudporapar
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip	93,25	Nilai	100	7.633.655.851,33	100	7.303.267.122	100	7.165.796.239	100	7.025.599.269	100	6.999.204.400	Dinas Perpustakaan dan Arsip
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	38.6	Nilai	66.19	1.157.004.072,27	66.49	1.106.928.314	66.79	1.086.092.377	67.09	1.064.843.258	67.39	1.060.842.688	Dinas Perpustakaan dan Arsip
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Jumlah Naskah Kuno yang Terdokumentasi	0	Eksemplar	5	58.801.016,99	5	56.256.077	5	55.197.158	5	54.117.240	5	53.913.923	Dinas Perpustakaan dan Arsip
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN															
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip	93.41	Persen	93.60	277.656.066,28	93.70	265.638.962	93.80	260.638.786	93.90	255.539.455	94	254.579.405	Dinas Perpustakaan dan Arsip

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	19.57	Persen	55	14.369.209,20	60	13.747.302	65	13.488.534	70	13.224.634	75	13.174.950	Dinas Perpustakaan dan Arsip
URUSAN PILIHAN	-														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	3,5	Persentase	3,9	1.663.135.954,67	4	1.750.269.990	4,2	1.889.056.732	4,4	2.037.307.602	4,6	2.232.618.880	Disbudporapar
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	74,47	Persentase	78	1.442.239.050,47	80	1.517.799.986	82	1.638.153.141	84	1.766.713.403	86	1.936.083.532	Disbudporapar
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya kapsitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	20	Persentase	28	497.324.653,45	30	499.590.184	32	514.695.611	34	529.857.009	36	580.652.996	Disbudporapar
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Kekayaan Hak Intelektual	0	Persentase	22	932.483.725,21	24	936.731.595	26	965.054.271	28	993.481.892	30	1.039.236.845	Disbudporapar
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN															
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Jumlah Produksi Pertanian	603.168,46	Ton	904.676,63	10.194.335.574,64	923.483,44	10.240.775.213	942.359,36	10.550.411.568	962.210,61	10.861.195.238	981.935,73	11.361.409.714	Dinas Pertanian
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Jumlah Produksi Pertanian	603.168,46	Ton	904.676,63	1.509.426.711,17	923.483,44	1.516.302.807	942.359,36	1.562.149.187	962.210,61	1.608.165.445	981.935,73	1.682.229.820	Dinas Pertanian

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Jumlah Populasi Ternak	326.257,00	Ekor	25.575.772,00	1.640.203.306,20	25.739.809,00	643.119.711	25.893.575,00	662.564.845	26.126.620,00	682.082.030		713.495.451	Dinas Pertanian
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Jumlah Produksi Pertanian	603.168,46	Ton	904.676,63	537.474.555,47	923.483,44	539.922.986	942.359,36	556.247.901	962.210,61	572.633.306	981.935,73	599.006.045	Dinas Pertanian
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Jumlah Produksi Pertanian	603.168,46	Ton	904.676,63	1.596.720.573,88	923.483,44	1.603.994.332	942.359,36	1.652.492.121	962.210,61	1.682.246.147	981.935,73	1.759.722.323	Dinas Pertanian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	LHE AKIP	64,68	Poin	82,00	26.480.897.119,41	84,00	26.601.529.139	86,00	27.405.843.300	88,00	28.213.137.737	90,00	29.512.499.325	Dinas Pertanian
		Indeks Kepuasan Masyarakat	94,25	Poin	94,26		94,27		94,28		94,29		94,30		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN															
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	PERSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI DENGAN KETENTUAN	100	%	100	3.734.153,28	100	3.929.791	100	4.241.402	100	4.574.262	100	5.012.784	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	PERSENTASE PENYEDIAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	100	%	100	12.768.672.630,50	100	13.437.641.376	100	14.503.172.110	100	15.641.363.384	100	17.140.859.414	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	PERSENTASE STABILISASI HARGA BARANG KETENTUAN POKOK DAN BARANG PENTING	100	%	100	237.481.402,82	100	249.923.388	100	269.740.932	100	290.909.872	100	318.798.630	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	PERSENTASE PENINGKATAN EKSPOR	100	%	100	1.201.357.810,75	100	1.264.298.639	100	1.364.550.537	100	1.471.638.800	100	1.612.720.910	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	PERSENTASE ALAT UKUR, TAKAR TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) YANG BERTANDA TERA SAH DAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU	100	%	100	650.694.427,34	100	684.785.225	100	739.084.911	100	797.087.394	100	873.502.049	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	PERSENTASE PRODUK DALAM NEGERI YANG DIPASARKAN MELALUI PENGADAAN SOUVENIR	100	%	100	2.611.942.185,48	100	2.748.785.516	100	2.966.749.023	100	3.199.575.872	100	3.506.310.726	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	TINGKAT PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN TERSEDIANYA SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100	%	100	16.776.396.998,51	100	17.655.336.069	100	19.055.306.694	100	20.550.743.943	100	22.520.889.269	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN															

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya realisasi pembangunan industr	PERSENTASE PERTUMBUHAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN	100	%	100	322.169.312,76	100	339.048.217	100	365.932.868	100	394.650.833	100	432.484.962	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN / KOTA	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	PERSENTASE IZIN USAHA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH YANG DIKELUARKAN OLEH INSTANSI YANG TERKAIT	100	%	100	14.946.413,26	100	15.729.477	100	16.976.738	100	18.309.051	100	20.064.291	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	PERSENTASE KEPATUHAN INDUSTRI	100	%	100	119.460.469,93	100	125.719.172	100	135.688.008	100	146.336.638	100	160.365.543	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	39.408,46	Ton	45.118,69	1.806.043.359,79	48.277,00	1.897.327.967	51.656,39	2.027.568.914	55.272,34	1.660.413.973	59.141,40	1.775.758.491	Dinas Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	44.803,90	Ton	52.693,00	3.453.742.102,25	54.121,00	3.531.250.408	56.180,00	3.694.597.471	57.407,00	3.855.333.985	59.874,00	4.122.850.666	Dinas Perikanan
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya wawasan dan kesadaran hukum pelaku usaha perikanan dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan	Rasio kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan dalam kegiatan usaha perikanan	-	%	100,00	88.807.973,83	100,00	517.432.690	100,00	98.370.719	100,00	103.802.181	100,00	558.588.740	Dinas Perikanan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	33,58	Kg/ Kapita/ Tahun	39,00	1.144.734.782,67	42,00	1.181.853.649	45,00	1.248.807.945	48,00	1.311.830.718	51,00	1.394.029.043	Dinas Perikanan

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,75	Poin	82,50	8.164.561.074,06	83,00	7.546.955.456	83,50	8.964.657.033	84,00	8.485.215.328	84,50	10.026.912.169	Dinas Perikanan
		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	76,17	Nilai	77,50		78,00		78,50		79,00		79,50		
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Tingkat Kepuasan Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	79 Nilai	Persen	100	5.595.072.579,92	100	5.620.560.572	100	5.790.501.798	100	5.961.072.717	100	6.235.611.090	Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Tingkat Kepuasan Bagian terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100	Persen	100	22.945.411.539,63	100	23.049.937.883	100	23.746.867.422	100	24.446.379.338	100	25.572.262.130	Bagian Umum
		1. Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah Kinerja SAKIP 2. Persentase peningkatan Nilai Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	33,75 Nilai	Nilai Persen	11,5 Nilai 5,5 Persen	879.442.968,31	12 Nilai 6 Persen	883.449.214	13 Nilai 7 Persen	910.160.863	14 Nilai 8 Persen	936.971.489	15 Nilai 9 Persen	980.123.894	Bagian Organisasi
		Persentase Fasilitasi Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	100	Persen	100	1.356.896.641,30	100	1.363.077.896	100	1.404.291.424	100	1.445.657.663	100	1.512.237.710	Sekretariat Daerah
		Tingkat Kepuasan Bagian terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100	Persen	100	27.712.698.211,40	100	27.838.941.622	100	28.680.669.736	100	29.525.516.759	100	30.885.320.221	Sekretariat Daerah

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase Implementasi Kebijakan Pemerintahan	3.00 Nilai	Persen	100	1.034.717.758,95	100	1.039.431.349	100	1.070.859.217	100	1.102.403.537	100	1.153.174.948	Sekretariat Daerah
		Persentase Implementasi Kebijakan Kesra	100	Persen	100	20.385.436.263,77	100	20.478.300.805	100	21.097.475.260	100	21.718.943.982	100	22.719.214.204	Sekretariat Daerah
		Persentase implementasi kebijakan hukum	100	Persen	100	1.159.477.447,70	100	1.164.759.372	100	1.199.976.613	100	1.235.324.347	100	1.292.217.452	Sekretariat Daerah
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Persentase Kualitas Koordinasi Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan Lainnya di Bidang Perekonomian	100	Persen	100	1.327.963.117,59	100	1.334.012.568	100	1.374.347.287	100	1.414.831.460	100	1.479.991.801	Sekretariat Daerah
		Persentase Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kegiatan Fisik Prioritas Perangkat Daerah	100	Persen	100	743.066.218,28	100	746.451.209	100	769.020.636	100	791.673.691	100	828.134.378	Sekretariat Daerah
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	62	Nilai	72	1.313.790.050,35	73	1.319.774.936	74	1.359.679.171	75	1.399.731.266	76	1.464.196.164	Sekretariat Daerah
														-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Nilai LHE AKIP	51.326.955.725	Poin	80	74.862.868.486,35	81	78.606.011.911	82	82.536.312.506	83	86.663.128.132	84	90.996.284.538	Sekretariat DPRD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundangundangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	108.089.536.032	Poin	82	63.310.394.593,95	83	66.475.914.324	84	69.799.710.040	85	73.289.695.542	86	76.954.180.319	Sekretariat DPRD

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
PERENCANAAN															
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Perencanaan Pembangunan Partisipatif	100	Persen	100	2..252.081.441	100	2.150.201.386	100	2.146.704.018	100	2.041.196.954	100	2.033.879.430	Bappedalitbang
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan SDA dani Infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah	100	Persen	100	2.290.706.715	100	2.269.308.695	100	2.271.059.569	100	2.245.110.277	100	2.237.136.529	Bappedalitbang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	82	Nilai	84	8.478.161.180		8.399.669.375		8.405.444.897		8.309.403.672		8.279.891.941	Bappedalitbang
		Manajemen Risiko Indeks	-	Indeks	3,3										
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	87	Poin	94										Bappedalitbang
KEUANGAN															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Meningkatnya kualitas pelayanan	Indek Kepuasan Masyarakat	90,75	Poin	90,77	155.260.521.285,65	90,78	151.511.577.708	90,79	151.632.837.337	90,8	151.639.503.262	90,81	154.091.196.299	BKAD

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
DAERAH KABUPATEN/KOTA	dan kinerja perangkat daerah	Nilai LHE AKIP	72,3	Nilai	74		75		76		77		78		
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan dan APBD yang tepat waktu	100	Persen	100	637.866.299.326,02	100	622.464.285.045	100	622.962.463.397	100	622.989.849.424	100	633.062.289.938	BKAD
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Aset yang terinventarisir	100	Persen	100	2.428.254.398,82	100	2.369.621.408	100	2.371.517.893	100	2.371.622.147	100	2.409.966.308	BKAD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,50	Poin	90,50	3.873.434.469,93	90,70	3.816.963.848	91,00	3.857.469.852	91,20	3.895.459.424	91,39	3.997.249.084	Badan Pendapatan Daerah
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	64,83	Poin	73,00	39.883.405.143,39	74,00	40.050.056.321	75,00	41.245.800.600	76,00	42.445.434.617	77,00	44.384.522.177	Badan Pendapatan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	27,11	Persen	28,18	30.986.563.071,91	28,77	30.534.811.403	29,38	30.858.849.887	30,00	31.162.757.516	30,64	31.977.050.813	Badan Pendapatan Daerah
KEPEGAWAIAN															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	95,75	Poin	96,25	10.546.122.174,52	96,50	10.594.164.354	96,75	10.914.485.655	97,00	11.235.993.862	97,25	11.753.469.762	BKPSDM
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	70,03	Nilai	72,00	182.713.255,74	73,00	183.545.594	74,00	189.095.212	75,00	194.665.393	76,00	203.630.746	BKPSDM
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Indeks Profesioanalitas ASN	72,11	Poin	73,50	2.948.025.527,50	74,00	2.961.455.068	74,50	3.050.996.546	75,00	3.140.869.808	75,50	3.285.523.183	BKPSDM
PEDIDIKAN DAN PELATIHAN															

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase Pelaksanaan Diklat berdasarkan AKPK	23,76	Persentase	84	3.236.501.307,42	88	3.251.244.980	92	3.349.548.441	96	3.448.216.152	100	3.607.024.423	BKPSDM
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Pemanfaatan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	100	Persen	100	879.578.565	100	850.954.521	100	831.665.134	100	803.701.212	100	800.846.781	Bappedalitbang
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah	100	Persen	100	879.578.565	100	850.999.451	100	831.665.134	100	803.701.212	100	800.846.781	Bappedalitbang
	Indeks Inovasi Daerah	Meningkatnya inovasi daerah	60,65	Nilai	63		64		65		66		67		
UNSUR PENGAWASAN	-														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Nilai LHE AKIP Inspektorat	75,52	Nilai	78	17.581.008.779,21	79	17.661.097.931	80	18.195.092.466	81	18.731.065.643	82	19.593.728.543	Inspektorat
		Indeks Kepuasan Masyarakat	90	Nilai	90,7		90,9		91		91,2		91,4		
		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3,27	Level	3,4		3,5		3,6		3,7		3,8		

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Pesersentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	85,14	%	86,5	6.121.010.181,92	87	6.148.894.049	87	6.334.809.773	87	6.521.414.383	87	6.821.759.401	Inspektorat
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,012	Level	3,3		3,4		3,5		3,6		3,7		
		Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	2,516	Level	3,05		3,1		3,15		3,2		3,25		
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,012	Level	3,3	1.221.800.814,33	3,4	1.227.366.649	3,5	1.264.476.861	3,6	1.301.724.579	3,7	1.361.675.760	Inspektorat
		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3,27	Level	3,4		3,5		3,6		3,7		3,8		
		Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	2,516	Level	3,05		3,1		3,15		3,2		3,25		
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM															
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	70	Nilai	74	8.458.544.742,32	76	8.335.228.010	78	8.423.682.287	80	8.506.641.351	80	8.728.922.740	Badan Kesbangpol
		Indeks Kepuasan Masyarakat	85	Poin	87	102.900.107,38	88	101.399.931	89	102.475.998	90	103.485.213	90	106.189.317	Badan Kesbangpol

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase Peningkatan Pemahaman Aktualisasi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	60	%	70	1.308.026.048,66	70	1.288.956.397	70	1.302.634.932	70	1.315.463.689	70	1.349.837.196	Badan Kesbangpol
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	100	%	100	6.207.889.976,85	100	6.117.385.436	100	48.034.779.336	100	96.158.914.339	100	6.038.576.333	Badan Kesbangpol
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan terdaftar yang dibina dan terverifikasi	78	%	82	336.095.671,11	84	331.195.748	86	334.710.430	90	338.006.764	90	346.838.994	Badan Kesbangpol
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	67	%	70	1.211.389.204,11	70	1.193.728.417	70	1.206.396.383	70	1.218.277.353	70	1.250.111.348	Badan Kesbangpol
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Penanganan Informasi Potensi Konflik	94	%	100	2.229.105.776,68	100	2.196.607.747	100	2.219.918.369	100	2.241.780.821	100	2.300.359.305	Badan Kesbangpol
UNSUR KEWILAYAHAN															
KECAMATAN															
															Kecamatam Hamapran Perak

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	80%	Persen	80%	762.304.759,06	81%	765.777.389	81%	788.931.156	82%	812.170.716	82%	849.575.397	Kecamatam Hamapran Perak
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Nilai LHE AKIP	80	Point	80	3.766.707.656,73	81	3.783.866.651	81	3.898.274.267	81	4.013.105.804	81	4.197.930.179	Kecamatam Hamapran Perak
		Indeks Kepuasan Masayarakat	76	Nilai	76		77		77		77		77		Kecamatam Hamapran Perak
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELUARAHAN	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak	Peningkatan Perlindungan dan Kelembagaan Perempuan dan Anak	85	Persen	85	20.336.097,43	86	20.428.737	86	21.046.413	87	21.666.378	87	22.664.227	Kecamatam Hamapran Perak
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Meningkatnya kondisi ketertiban dan ketentraman	Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman	100	Persen	100	72.407.361,26	100	72.737.208	100	74.936.464	100	77.143.869	100	80.696.745	Kecamatam Hamapran Perak
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	70	Persen	79	828.120.971,00	81	831.893.423	83	857.046.250	85	882.292.277	87	922.926.421	Kecamatan Labuhan Deli
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Nilai LHE AKIP	74	Point	76	3.789.798.865,91	78	3.807.063.050	80	3.922.172.024	82	4.037.707.519	84	4.223.664.930	Kecamatan Labuhan Deli
		Indeks Kepuasan Masayarakat	84,00	Nilai	86		87		88		89		90		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan keberdayaan perempuan dan anak	Peningkatan Perlindungan dan Kelembagaan Perempuan dan Anak	75	Persen	79	12.828.602,89	81	12.887.043	83	13.276.691	85	13.667.782	87	14.297.255	Kecamatan Labuhan Deli
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Meningkatnya kondisi ketertiban dan ketentraman	Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman	75	Persen	79	115.520.429,25	81	116.046.675	83	119.555.420	85	123.077.166	87	128.745.509	Kecamatan Labuhan Deli
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	51	Persen	53	4.905.971.495,26	53	4.928.320.332	55	5.077.331.233	55	5.226.894.274	57	5.467.619.914	Kecamatan Percut Sei Tuan

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Nilai LHE AKIP	70	Point	72	6.908.108.653,77	72	6.939.578.097	74	7.149.400.657	74	7.360.000.685	74	7.698.966.960	Kecamatan Percut Sei Tuan
		Indeks Kepuasan Masayarakat	83	Nilai	83		85		85		85		87		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan keberdayaan perempuan dan anak	Peningkatan Perlindungan dan Kelembagaan Perempuan dan Anak	100	Persen	100	16.655.035,87	100	16.730.907	100	17.236.776	100	17.744.520	100	18.561.748	Kecamatan Percut Sei Tuan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Meningkatnya kondisi ketertiban dan ketentraman	Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman	100	Persen	100	97.910.791,15	100	98.356.817	100	101.330.698	100	104.315.599	100	109.119.874	Kecamatan Percut Sei Tuan
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan	66	%	66,00	2.912.798.039,84	66,00	2.926.067.104	66,00	3.014.538.604	66,00	3.103.337.924	66,00	3.246.262.761	Kecamatan Sunggal
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat/	78	Poin	85	5.474.124.035,02	86	5.499.061.054	87	5.665.328.664	88	5.832.212.356	89	6.100.816.040	Kecamatan Sunggal
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	79	Nilai	79		79		79		79		70		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan keberdayaan perempuan dan anak	Peningkatan Perlindungan dan Kelembagaan Perempuan dan Anak	100	%	100	25.437.499,56	100	25.553.378	100	26.326.001	100	27.101.487	100	28.349.651	Kecamatan Sunggal
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kondisi ketertiban dan ketentraman	Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	100	%	100	71.801.246,84	100	72.128.333	100	74.309.179	100	76.498.106	100	80.021.241	Kecamatan Sunggal
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan	1.200.567.104			1.158.811.520,04		1.164.090.411		1.199.287.426		1.234.614.858		1.291.475.287	Kecamatan Batang Kuis
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	3.015.658.705			2.844.177.771,93		2.857.134.240		2.943.521.512		3.030.228.880		3.169.786.665	Kecamatan Batang Kuis
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)													

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan keberdayaan perempuan dan anak	Peningkatan Perlindungan dan Kelembagaan Perempuan dan Anak	10.460.700			12.424.543,70		12.481.143		12.858.518		13.237.292		13.846.938	Kecamatan Batang Kuis
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kondisi ketertiban dan ketentraman	Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman	53.667.000			67.232.076,59		67.538.348		69.580.413		71.630.044		74.928.980	Kecamatan Batang Kuis
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	97,18	Persen	82	3.235.674.834,04	83	3.250.414.742	84	3.348.693.100	85	3.447.335.615	86	3.606.103.333	Kecamatan Tanjung Morawa
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Nilai LHE AKIP	76,19	Point	77	4.754.781.029,02	78	4.776.441.127	79	4.920.859.864	80	5.065.813.725	81	5.299.120.769	Kecamatan Tanjung Morawa
		Indeks Kepuasan Masayarakat	100	Nilai	84		85		86		87		88		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELUARAHAN	Peningkatan keberdayaan perempuan dan anak	Peningkatan Perlindungan dan Kelembagaan Perempuan dan Anak	85	Persen	87	48.869.047,58	88	49.091.667	90	50.575.985	92	52.065.803	95	54.463.704	Kecamatan Tanjung Morawa
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Meningkatnya kondisi ketertiban dan ketentraman	Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman	85,63	Persen	87	87.512.012,39	88	87.910.668	90	90.568.703	92	93.236.587	95	97.530.616	Kecamatan Tanjung Morawa
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase Penanganan Sampah	80	Persen	82	7.466.289.691,07	84	7.500.301.892	86	7.727.078.293	88	7.954.694.982	90	8.321.050.019	Kecamatan Lubuk Pakam
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Nilai LHE AKIP	80	Point	82	9.845.760.797,77	84	9.890.612.526	86	10.189.661.490	88	10.489.818.538	90	10.972.929.187	Kecamatan Lubuk Pakam
		Indeks Kepuasan Masayarakat	81	Nilai	83		85		87		89		91		Kecamatan Lubuk Pakam
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan keberdayaan perempuan dan anak	Persentase Lembaga Masyarakat Desa yang Aktif	100	Persen	100	37.237.305,27	100	37.406.937	100	38.537.960	100	39.673.173	100	41.500.329	Kecamatan Lubuk Pakam

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Meningkatnya kondisi ketertiban dan ketentraman	Persentase Penanganan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Konflik	100	Persen	100	146.340.265,90	100	147.006.910	100	151.451.757	100	155.913.074	100	163.093.681	Kecamatan Lubuk Pakam
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan	75	Persen	79	731.589.073,38	80	734.921.780	81	757.142.608	82	779.445.772	83	815.343.300	Kecamatan Beringin
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	79	Poin	82	2.779.392.678,10	83	2.792.054.022	84	2.876.473.552	85	2.961.205.887	86	3.097.584.805	Kecamatan Beringin
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	76	Nilai	79		80		81		82		83		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan keberdayaan perempuan dan anak	Peningkatan Perlindungan dan Kelembagaan Perempuan dan Anak	100	Persen	100	25.011.078,48	100	25.125.015	100	25.884.686	100	26.647.171	100	27.874.412	Kecamatan Beringin
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kondisi ketertiban dan ketentraman	Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman	100	Persen	100	104.484.801,41	100	104.960.775	100	108.134.331	100	111.319.646	100	116.446.494	Kecamatan Beringin
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah	70	Persen	79	439.377.491,38	81	441.379.047	83	454.724.424	85%	468.119.249	87%	489.678.573	Kecamtan Pantai Labu
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan keberdayaan perempuan dan anak	Peningkatan Perlindungan dan Kelembagaan Perempuan dan Anak	75	Persen	79	8.695.895,63	81	8.735.509	83	8.999.633	85%	9.264.735	87%	9.691.424	Kecamtan Pantai Labu
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Nilai LHE AKIP	74	Point	76	3.357.828.239,16	78	3.373.124.609	80	3.475.113.178	82	3.577.479.652	84	3.742.241.178	Kecamtan Pantai Labu
		Indeks Kepuasan Masyarakat	80.5	Nilai	86		87		88		89		90		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Meningkatnya kondisi ketertiban dan ketentraman	Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	75	Persen	79	76.286.493,56	81	76.634.012	83	78.951.090	85%	81.276.754	87%	85.019.970	Kecamtan Pantai Labu

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	36	Persen	81	962.618.579,03	82	967.003.726	83	996.241.699	84	1.025.588.009	85	1.072.821.666	Kecamatan Patumbak
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Nilai LHE AKIP	79	Point	80	3.423.665.209,13	81	3.439.261.495	81	3.543.249.755	82	3.647.623.329	82	3.815.615.337	Kecamatan Patumbak
		Indeks Kepuasan Masayarakat	77	Nilai	78		79		80		81		82		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Meningkatnya kondisi ketertiban dan ketentraman	Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman	100	Persen	100	21.681.138,69	100	21.779.906	100	22.438.435	100	23.099.404	100	24.163.252	Kecamatan Patumbak
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan keberdayaan perempuan dan anak	Peningkatan Perlindungan dan Kelembagaan Perempuan dan Anak	100	Persen	100	31.906.726,44	100	32.052.075	100	33.021.190	100	33.993.896	100	35.559.492	Kecamatan Patumbak
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	75	Persen	79	414.755.698,21	81	416.645.091	83	429.242.621	85	441.886.828	87	462.238.013	Kecamatan Biru-Biru
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Nilai LHE AKIP	74	Point	76	2.949.154.329,51	78	2.962.589.012	80	3.052.164.776	82	3.142.072.451	84	3.286.781.213	Kecamatan Biru-Biru
		Indeks Kepuasan Masayarakat	80.5	Nilai	86		87		88		89		90		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan keberdayaan perempuan dan anak	Peningkatan Perlindungan dan Kelembagaan Perempuan dan Anak	75	Persen	79	17.679.891,43	81	17.760.431	83	18.297.429	85	18.836.417	87	19.703.932	Kecamatan Biru-Biru
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Meningkatnya kondisi ketertiban dan ketentraman	Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman	75	Persen	79	57.840.100,51	81	58.103.587	83	59.860.386	85	61.623.695	87	64.461.786	Kecamatan Biru-Biru
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	80	Persen	100	863.183.580,89	100	867.115.758	100	893.333.555	100	919.648.498	100	962.003.090	Kecamatan Namorambe

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Nilai LHE AKIP	76	Point	90	3.017.423.829,77	90	3.031.169.510	90	3.122.818.848	90	3.214.807.781	90	3.362.866.384	Kecamatan Namorambe
		Indeks Kepuasan Masayarakat	78	Nilai	85		85		85		85		85		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELUARAHAN	Peningkatan keberdayaan perempuan dan anak	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	Persen	100	28.933.637,87	100	29.065.443	100	29.944.255	100	30.826.324	100	32.246.036	Kecamatan Namorambe
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Meningkatnya kondisi ketertiban dan ketentraman	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100	Persen	100	74.605.378,15	100	74.945.238	100	77.211.255	100	79.485.668	100	83.146.397	Kecamatan Namorambe
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	100	Persen	82	411.388.453,39	83	413.262.507	84	425.757.762	85	438.299.316	85	458.485.277	Kecamatan Kutalimbaru
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Nilai LHE AKIP	76	Point	76	2.780.649.181,27	77	2.793.316.249	77	2.877.773.944	78	2.962.544.584	78	3.098.985.156	Kecamatan Kutalimbaru
		Indeks Kepuasan Masayarakat	78	Nilai	82	377.774.151,38	83	379.495.077	84	390.969.352	85	402.486.144	85	421.022.722	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELUARAHAN	Peningkatan keberdayaan perempuan dan anak	Peningkatan Perlindungan dan Kelembagaan Perempuan dan Anak	100	Persen	100	20.813.036,75	100	20.907.849	100	21.540.011	100	22.174.516	100	23.195.768	Kecamatan Kutalimbaru
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Meningkatnya kondisi ketertiban dan ketentraman	Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman	100	Persen	100	136.562.241,56	100	137.184.342	100	141.332.198	100	145.495.423	100	152.196.243	Kecamatan Kutalimbaru
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	80	Persen	82	1.502.448.892,83	83	1.509.293.202	84	1.554.927.642	85	1.600.731.175	85	1.674.453.163	Kecamatan Pancur Batu

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Nilai LHE AKIP	76	Point	76	4.708.186.468,70	77	4.729.634.309	77	4.872.637.812	78	5.016.171.194	78	5.247.191.942	Kecamatan Pancur Batu
		Indeks Kepuasan Masayarakat	82	Nilai	83		84		84		85		85		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELUARAHAN	Peningkatan keberdayaan perempuan dan anak	Peningkatan Perlindungan dan Kelembagaan Perempuan dan Anak	85	Persen	87	26.296.041,05	88	26.415.831	90	27.214.530	92	28.016.189	95	29.306.480	Kecamatan Pancur Batu
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Meningkatnya kondisi ketertiban dan ketentraman	Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman	85	Persen	87	78.841.498,97	88	79.200.656	90	81.595.339	92	83.998.894	95	87.867.480	Kecamatan Pancur Batu
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan	45	Persen	55	1.295.026.817,97	60	1.300.926.229	65	1.340.260.562	70	1.379.740.642	75	1.443.284.868	Kecamatan Deli Tua
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	70	Nilai	73	5.372.377.043,01	74	5.294.053.407	75	5.350.234.433	76	5.402.925.219	77	5.544.105.466	Kecamatan Deli Tua
		Indeks Kepuasan Masyarakat/	70	Poin	73	301.673.544,72	74	303.047.799	75	312.210.642	76	321.407.437	77	336.209.919	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELUARAHAN	Peningkatan keberdayaan perempuan dan anak	Peningkatan Perlindungan dan Kelembagaan Perempuan dan Anak	100	Persen	100	4.220.154,92	100	4.441.255	100	4.793.422	100	5.169.604	100	5.665.200	Kecamatan Deli Tua
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Meningkatnya kondisi ketertiban dan ketentraman	Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	100	Persen	100	129.773.760,04	100	130.364.936	100	134.306.603	100	138.262.875	100	144.630.599	Kecamatan Deli Tua
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan	588.372.904			559.722.833,87		562.272.615		579.273.285		596.336.949		623.801.365	Kecamatan Sibolangit

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	15.170.488			14.099.825,31		14.164.056		14.592.315		15.022.162		15.714.010	Kecamatan Sibolangit
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	4.596.425.341			4.123.145.705,80		4.141.928.430		4.267.162.272		4.392.860.151		4.595.174.186	Kecamatan Sibolangit
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)													
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELUARAHAN	Peningkatan keberdayaan perempuan dan anak	Peningkatan Perlindungan dan Kelembagaan Perempuan dan Anak	8.037.000			7.494.371,70		7.528.512		7.756.141		7.984.614		8.352.347	Kecamatan Sibolangit
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Meningkatnya kondisi ketertiban dan ketentraman	Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman	39.602.528			40.055.246,84		40.237.716		41.454.329		42.675.450		44.640.876	Kecamatan Sibolangit
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	70	Persen	79	353.379.090,30	81	354.988.886	83	365.722.201	85	376.495.287	87	393.834.851	Kecamatan STM Hilir
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Nilai LHE AKIP	74	Point	76	3.449.523.015,47	78	3.465.237.095	80	3.570.010.744	82	3.675.172.617	84	3.844.433.412	Kecamatan STM Hilir
		Indeks Kepuasan Masayarakat	80.5	Nilai	86		87		88		89		90		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELUARAHAN	Peningkatan keberdayaan perempuan dan anak	Peningkatan Perlindungan dan Kelembagaan Perempuan dan Anak	75	Persen	79	37.387.375,47	81	37.557.691	83	38.693.272	85	39.833.060	87	41.667.580	Kecamatan STM Hilir
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Meningkatnya kondisi ketertiban dan ketentraman	Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman	75	Persen	79	102.576.100,47	81	103.043.379	83	106.158.961	85	109.286.088	87	114.319.280	Kecamatan STM Hilir

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								-							
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan	468.173.680			587.077.355,85		589.751.749		607.583.268		625.480.860		654.287.504	Kecamatan STM Hulu
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	2.942.795.014			2.391.502.382,85		2.402.396.718		2.475.034.711		2.547.941.855		2.665.287.816	Kecamatan STM Hulu
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)						-							
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELUARAHAN	Peningkatan keberdayaan perempuan dan anak	Peningkatan Perlindungan dan Kelembagaan Perempuan dan Anak	26.865.900			21.484.425,03		21.582.296		22.234.850		22.889.823		23.944.018	Kecamatan STM Hulu
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Meningkatnya kondisi ketertiban dan ketentraman	Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman	64.000.000			69.109.539,32		69.424.363		71.523.453		73.630.321		77.021.380	Kecamatan STM Hulu
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	45	Persen	50	384.130.038,42	55	385.879.918	60	397.547.243	65	409.257.799	70	428.106.248	Kecamatan Pagar Merbau
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Nilai LHE AKIP	77	Poin	78	2.554.112.235,10	79	2.565.747.329	80	2.643.324.332	81	2.721.188.786	82	2.846.513.669	Kecamatan Pagar Merbau
		Indeks Kepuasan Masyarakat	85	Nilai	86		87		88		89		90		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELUARAHAN	Peningkatan keberdayaan perempuan dan anak	Peningkatan Perlindungan dan Kelembagaan Perempuan dan Anak	100	Persen	100	33.297.697,23	100	33.449.383	100	34.460.746	100	35.475.857	100	37.109.705	Kecamatan Pagar Merbau
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Meningkatnya kondisi ketertiban dan ketentraman	Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman	100	Persen	100	66.406.695,28	100	66.709.207	100	68.726.202	100	70.750.671	100	74.009.107	Kecamatan Pagar Merbau
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Meningkatnya kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	Poin	81	4.529.206.665,33	81	4.418.144.483	81	4.334.980.850	81	4.250.168.059	81	4.234.200.364	Kecamatan Galang

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
DAERAH KABUPATEN/KOTA	dan kinerja perangkat daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	76	Nilai	77		77		77		77		77		
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan	75	Persentase	76	1.332.119.607,45	76	1.359.429.072	76	1.333.840.262	76	1.307.744.018	76	1.302.830.881	Kecamatan Galang
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan keberdayaan perempuan dan anak	Peningkatan Perlindungan dan Kelembagaan Perempuan dan Anak	100	Persentase	100	20.425.833,98	100	25.489.295	100	25.009.505	100	24.520.200	100	24.428.079	Kecamatan Galang
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kondisi ketertiban dan ketentraman	Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	100	Persentase	100	62.165.581,68	100	67.971.454	100	66.692.013	100	65.387.201	100	65.141.544	Kecamatan Galang
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan	325.940.552			310.230.390,24		311.643.625		321.066.368		330.524.026		345.746.375	Kecamatan Bangun Purba
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	3.019.229.589			2.625.118.267,19		2.637.076.824		2.716.810.520		2.796.839.658		2.925.648.657	Kecamatan Bangun Purba
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)													
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan keberdayaan perempuan dan anak	Peningkatan Perlindungan dan Kelembagaan Perempuan dan Anak	21.895.648			15.879.591,73		15.951.930		16.434.247		16.918.351		17.697.529	Kecamatan Bangun Purba
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kondisi ketertiban dan ketentraman	Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman	70.417.000			65.784.861,85		66.084.541		68.082.649		70.088.161		73.316.085	Kecamatan Bangun Purba
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase Penanganan Sampah	100	Persen	100	194.687.234,49	100	195.574.120	100	201.487.428	100	207.422.647	100	216.975.537	Kecamatan Gunung Meriah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Meningkatnya kualitas pelayanan	Nilai LHE AKIP	80	Poin	83	2.306.448.373,32	84	2.316.955.250	85	2.387.009.867	86	2.457.324.061	87	2.570.496.602	Kecamatan Gunung Meriah

BIDANG URUSAN/PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
DAERAH KABUPATEN/KOTA	dan kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masayarakat	82	Nilai	85		86		87		88		89		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELUARAHAN	Peningkatan keberdayaan perempuan dan anak	Persentase Desa Yang Aktif	100	Persen	100	17.061.029,96	100	17.138.750	100	17.656.951	100	18.177.073	100	19.014.221	Kecamatan Gunung Meriah
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Meningkatnya kondisi ketertiban dan ketentraman	Persentase Penanganan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	Persen	100	42.966.985,09	100	43.162.718	100	44.467.771	100	45.777.659	100	47.885.958	Kecamatan Gunung Meriah

4.2. Program Prioritas dan Dukungan Program Daerah terhadap Program Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Utara

Pembangunan di Kabupaten Deli Serdang tidak dapat dipisahkan dari kerangka pembangunan yang lebih besar, yakni pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Utara. Setiap kemajuan di Deli Serdang akan melengkapi gambaran utuh kemajuan bangsa Indonesia dan Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, dukungan dari program-program daerah diperlukan dalam mencapai prioritas nasional dan prioritas provinsi.

4.2.1. Program Prioritas Nasional

Melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Visi Presiden yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045” untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 akan dicapai melalui delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan (Asta Cita) Misi meliputi:

Misi 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia HAM)

Misi 2 Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Misi 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

Misi 4 Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

Misi 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Misi 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Misi 7 Memperkuat reformasi politik, hukum. dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Misi 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Asta Cita tersebut memuat 17 Program Prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional. Berikut 17 Program Prioritas Presiden:

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air;
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara;
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi;
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
5. Pemberantasan kemiskinan;
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat
8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi;
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani;
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau

bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/ perkotaan dan rakyat yang membutuhkan;

14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif karakteristik- mandiri lainnya;
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah;
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

4.2.2. Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara

RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025 – 2029 merupakan tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2029 yaitu tahap ”Penetapan Pondasi Transformasi” menuju pencapaian visi RPJPD “Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan”. Visi Pembangunan jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara, pernyataan visi ini menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang, berbagai kebijakan pembangunan hingga tahun 2029 difokuskan untuk mewujudkan visi dengan mempertimbangkan kondisi, permasalahan, potensi kekuatan dan peluang, hambatan dan tantangan yang terjadi di Sumatera Utara. Adapun visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 yaitu **“Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan”**.

Dalam rangka pencapaian visi pembangunan maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan yang akan dilaksanakan dalam tahapan pembangunan tahun 2025-2029 yakni sebagai berikut:

Misi 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Misi 2 Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah

Misi 3 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Misi 4 Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan

Misi 5 Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh

Pencapaian visi misi melalui pelaksanaan 17 (tujuh belas) Program Prioritas daerah. Program Perangkat Daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di Provinsi Sumatera Utara. 17 (tujuh belas) Program Prioritas Daerah yaitu:

1. Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal;
2. Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas Dalam Berkarya dan Berprestasi;
3. Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu;
4. Penguatan Stabilitas Makro Ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah;
5. Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru;
6. Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal;
7. Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal);
8. Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi;
9. Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran;
10. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan;
11. Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik

dan Perekonomian Masyarakat;

12. Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal;
13. Pengembangan Sistem Logistik dan Transportasi yang Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Daya Saing;
14. Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana;
15. Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa;
16. Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun;
17. Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib.

4.2.3. Dukungan Program Daerah terhadap Program Prioritas Nasional

Dukungan Program Daerah terhadap Arah Pembangunan Kewilayah RPJMN 2025-2029

Berdasarkan Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029, Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah yang termasuk dalam *highlight* indikasi intervensi. Berikut beberapa dukungan Kabupaten Deli Serdang pada kegiatan tersebut.

01. Kawasan Pertumbuhan
    - Wilayah Metropolitan Medan
    - Kawasan Pengembangan Industri Medan-Binjai-Deli Serdang

    Dukungan Kabupaten Deli Serdang, sebagai berikut:
    - Dukungan RTRW Kawasan Industri (Kecamatan Percut Sei Tuan, Labuhan Deli, Tanjung Morawa, Hamparan Perak, Pantai Labu, Patumbak dan Sunggal).
    - Percepatan proses penyediaan lahan industri.
    - Pengembangan infrastruktur jalan, dan jembatan.
    - Peningkatan SDM dengan keterampilan dan keahlian kebutuhan industri.
    - Kemudahan investasi.
    - Kerjasama antar daerah.

02. Kawasan Swasembada Pangan

Sumatera Timur (Kab. Langkat. Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Batubara, Asahan, Labuhan Batu).

Dukungan Kabupatan Deli Serdang, sebagai berikut:

- Dukungan RTRW Kawasan Pertanian (Kecamatan Pancur Batu, Namorambe, Kutalimbaru, Patumbak, Sibiru iru, STM Hilir, STM Hulu, Sibolangit, Galang, Gunung Meriah, Bangun Purba, Lubuk Pakam, Sunggal, Tanjung Morawa, Hamparan Perak, Labuhan Deli, Deli Tua, Batang Kuis, Beringin, Pantai Labu, Pagar Merbau dan Percut Sei Tuan)
- Pendampingan terhadap petani
- Peningkatan kelembagaan petani
- Bantuan sarana produksi
- Pengembangan infrastruktur pendukung pertanian
- Peningkatan produksi pertanian
- Diversifikasi tanaman pangan

Selanjutnya pada kegiatan *highlight* indikasi intervensi regional, beberapa kegiatan dan dukungan Kabupaten Deli Serdang, yaitu.

- Pengembangan TPST skala regional Medan-Deli Serdang
- Pembangunan SPAM Regional Medan-Binjai-Deli Serdang
- Pengembangan koridor industri Medan-Binjai Deli Serdang
- Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 275 kV Galang-Medan Timur
- Pengembangan pusat inkubasi kewirausahaan dan UMKM di Kawasan Deli Sport City
- Pengembangan SUTET 500 kV Galang-Rantauprapat-Perawang

Dukungan Kabupaten Deli Serdang, sebagai berikut :

<u>TPST:</u>

- Percepatan proses Penyediaan lahan TPST.
- Penyediaan infrastruktur jalan, jembatan dan aksesibilitas untuk mendukung operasional TPST.
- Penerapan teknologi pengolahan sampah modern.
- Peningkatan kesadaran masyarakat.
- Pengelolaan sampah yang efisien.
- Membangun TPS3R.

SPAM Regional:

- Pembangunan infrastruktur pendukung SPAM, seperti jalan akses dan pendukung lainnya.
- Kerjasama antar daerah.
- Pengadaan jaringan perpipaan.
- Pemasangan SR.

UMKM di Kawasan Deli Sport City

Memberikan pelatihan/workshop peningkatan keterampilan kewirausahaan dan UMKM.

Dukungan Program Daerah terhadap Kegiatan Prioritas Utama RPJMN 2025-2029

Sebagai agregat Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat, Kabupaten Deli Serdang mendukung capaian RPJMN Tahun 2025-2029 melalui Program Prioritas RPJMD Tahun 2025-2029. Dukungan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 2
Dukungan Program Daerah terhadap Program Prioritas Nasional

No.	RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten deli Serdang Tahun 2025-2029
	Kegiatan Prioritas Utama (KPU per Provinsi)	**Program Daerah**
(1)	(2)	(3)
1	Pencegahan dan pemberantasan korupsi	Program CTM (Cepat, Transparan, Mudah)
	Reformasi politik, hukum, dan birokrasi	
2	Reformasi politik, hukum, dan birokrasi	Program Paten Kali (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Lengkap dan Elektronik)
3	Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat	Program Deli Serdang Sehat
4	Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga	Program Evoria (even olah raga, seni budaya dan keagamaan)
5	Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif karakteristik- mandiri lainnya;	Program Mudah Kreasi, Pengembangan di Bidang Ekonomi Kreatif melalui Penyediaan Workspace Gratis, Sertifikat Pelatihan, Kerjasama/Mitra Pemerintah
6		Program Kemudahan Berusaha UMKM/IKM
7	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi	Program Kemudahan Perizinan Investasi
8	Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi;	Program Pemula (pendidikan murah dan berkualitas). SD dan SMP unggulan, kuota mahasiswa daerah, bantuan perlengkapan sekolah, insentif pembangunan sekolah atau gedung baru

No.	RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten deli Serdang Tahun 2025-2029
	Kegiatan Prioritas Utama (KPU per Provinsi)	**Program Daerah**
(1)	(2)	(3)
9		Program Guru Senyum (Guru Sejahtera, Nyaman Mengajar, Berkualitas dan Membanggakan)
10	Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas	Program Dukungan bagi Anak Berkebutuhan Khusus
11		Program Pekerjaan untuk Penyandang Disabilitas
12	Pemberantasan kemiskinan	Program Peningkatan Keahlian Buruh Harian Lepas
13		Program Percepatan Pencetakan Wirausaha Baru dan Pendampingannya
14		Program Pendampingan Kerja Luar Negeri
15		Program Dukungan bagi Masyarakat Rentan Sosial Ekonomi
16		Program Mudah Kerja (warga miskin mendapat kuota khusus melamar pekerjaan)
17	Mencapai swasembada pangan, energi, dan air	Program Pembangunan Pertanian Menuju Swasembada Pangan
18	Pencegahan dan pemberantasan narkoba	Program Bina Mental Remaja dan Akhlak Masyarakat
	Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah	
19	Menjamin pelestarian lingkungan hidup	Program Sakolah (Sampah Kita Olah)
20	Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/ perkotaan dan rakyat yang membutuhkan	Program Rumah Sehat (tersedia jaringan air minum, sanitasi dan drainase)
21		Program Rusunawa dalam Kota

Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Berikut, dukungan pemerintah Kabupaten Deli Serdang terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN), sebagai berikut.

Tabel 4. 3
Dukungan Program Daerah terhadap Proyek Strategis Nasional

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH
1	Perumahan dan Pemukiman			
	- Pembangunan 3 Juta Rumah			**TARGETING / PENERIMA MANFAAT**
				- Utilisasi data makro (Susenas) dan data mikro (Regsosek) untuk mengembangkan housing queue atau antrian perumahan
				PROGRAMMING
				- Memastikan keterpaduan program perumahan dengan penyediaan infrastruktur dasar permukiman yaitu air minum, air limbah, persampahan, jalan dan drainase lingkungan, listrik, dan sistem transportasi publik
				- Pemanfaatan lahan yang belum dioptimalisasi
				STANDAR KEANDALAN BANGUNAN
				- Mempersiapkan regulasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk penerbitan PBG dan SLF
				KESESUAIAN DENGAN TATA RUANG
				- Memanfaatkan tools tata ruang untuk pengembangan perumahan ke depan dan pengendalian pembangunan
2	Makan Bergizi Gratis (MBG)			
	- Program Makan Bergizi			**Kesehatan**
				- Pengukuran antropometri (tinggi badan, lingkar lengan atas)
				- Sertifikasi hygiene dan sanitasi satuan pelayanan
				- Inspeksi Kesehatan lingkungan di tingkat satuan pelayanan
				- Pemeriksaan kualitas sumber air bersih

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH
				Pendidikan
				- Penyediaan Infrastruktur sanitasi, air bersih, fasilitas transit, penyaluran makanan
				- Penyelarasan waktu pemberian makanan pada siswa dan santri
				- Renovasi dapur (satuan pendidikan yang menjadi SP)
				- Pelatihan tenaga pendidik untuk penyelenggaraan MBG
				- Pelibatan orang siswa dalam perilaku hidup sehat dan pemberian makan bergizi
				- Penguatan peran kantin sehat
				Pangan dan Pertanian
				- Penjaminan ketersediaan stok dan keragaman bahan pangan local yang memenuhi standar mutu giz
				- Penjaminan keamanan bahan pangan segar
				- Pengawasan keamananmakanan(uji keamananpangan)
				Infrastruktur Dasar
				-Konektivitas
				- Telekomunikas
				- Listrik dan bahan bakar
				- Pengelolaan limbah
				Satuan Pelayanan
				- Penyediaan/pembangunan SP
				- Penyediaan infrastruktur sanitasi dan air bersih untuk SP
				Pemberdayaan Masyarakat, Petani, dan Peternak Lokal

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH
				- Pemberdayaan dan korporatisasi petani, peternak, dan nelayan
				- Pembinaan dan peningkatan kapasitas BUMDES, UMKM, dan koperasi
				terkait pembiayaan, kemampuan manajemen, pengolahan logistik bahan pangan, pengadaan barang/jasa
				sebagai penyedia komoditas dan pengelola program
				'- Sumber data penerima MBG (sekolah, madrasah, pesantren, Posyandu)
3	Pembangunan Manusia dan Kebudayaan			
	- Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas			Update data kondisi satuan pendidikan sesuai dengan kondisi riil di lapangan
	- Pembangunan dan Penyelenggaraan sekolah Unggul			Dukungan penyediaan lahan bagi sekolah unggul (pada daerah yang sesuai dengan kriteria lokasi prioritas)
	- Pembangunan Rumah sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten / Kota			**Pembangunan RS Lengkap Berkualitas dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses**
				- Menyiapkan ketersediaan infrastruktur dan SDM Kesehatan
				- Menyiapkan anggaran untuk operasional layanan kesehatan
				Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis
				- Menyusun dan menetapkan kebijakan untuk mendorong pelaksanaan dan tata kelola Pemeriksaan Kesehatan Gratis pada wilayah kerja
				- Membina fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas dan Labkesmas) untuk pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di wilayahnya, termasuk

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH
				Penyediaan BMHP
				Penyediaan SPApendukung
				Penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM Kesehatan
				- Mengoordinasikan pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis pada wilayah kerja
				- Menyusun rekomendasi tindak lanjut terhadap temuan dalam pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis pada wilayah kerja
	- Program Penuntasan TBC			**Penuntasan Kasus TBC**
				- Menyediakan dan meningkatkan kemampuan SDM untuk mencapai target penuntasanTBC
				- Melakukan penemuan kasus TBC secara aktif dan cepat dengan melibatkan masyarakat;
				- Memastikan semua orang yang terdiagnosis TBC tercatat dan terlaporkan dalam sistem informasi TBC;
				- Memberikan pengobatan pencegahan TBC kepada populasi rentan
				- Mitigasi dampak psikososial dan ekonomi yang dihadapi pasien TBC dan keluarganya;
				- Menyusun dan menetapkankebijakan kepala daerah untuk mendorong pasien TBC menjalankan pengobatan sampai selesai
				- Mengoordinasikan pelaksanaan penanggulangan TBC di daerah;
				- Menyediakan pendanaan penanggulangan TBC dari beberapa sumber
4	Swasembada Pangan			

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH
	- Ketahanan Pangan melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat			
	- Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional			- Memastikan status lahan (kepemilikan lahan) yang akan diintervensi
				- Memberikan dukungan atas pembangunan/rehabilitasi daerah irigasi di kewenangan provinsi/kab/kota
				- Memastikan ketersediaan petani dan pemberdayaan penyuluh pertanian
	- Peningkatan Produksi Daging, Sapi, dan Susu Sapi			Memberikan bantuan sarana dan prasarana peternakan
5	Hilirisasi, Industrialisasi dan Transformasi Digital			
	- Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu			
	- Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5000) Seluruh Wilayah Indonesia			
	- Program Pengembangan Industri Dirgantara: Pengembangan N219 Amfibi			
6	Pengembanagan Industri			
	- Hilirisasi dan Industrialisasi,			
7	Bioethanol (Berbasis Tebu)			
8	Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa dan Rumput Laut			Memberikan dukungan terhadap penerbitan STDB,Pembinaan dan Pendampingan untuk Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH
	- Hilirisasi, Industrialisasi, Transformasi Digital			

4.2.4. Dukungan Daerah terhadap Provinsi Sumatera Utara

Dukungan Program Daerah terhadap 17 Program Prioritas RPJMD Provinsi Sumatera Utara

Sebagai agregat Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025 – 2029 melalui Program Prioritas RPJMD Tahun 2025-2029. Dukungan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 4
Dukungan Program Daerah terhadap Provinsi Sumatera Utara

No.	RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029
	Program Daerah	**Program Daerah**
(1)	(2)	(3)
1	Program CTM (Cepat, Transparan, Mudah)	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
2	Program Paten Kali (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Lengkap dan Elektronik)	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat
3	Program Deli Serdang Sehat	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu
4	Program Evoria (even olah raga, seni budaya dan keagamaan)	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)
5	Program Mudah Kreasi, Pengembangan di Bidang Ekonomi Kreatif melalui Penyediaan Workspace Gratis, Sertifikat Pelatihan, Kerjasama/Mitra Pemerintah	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal
6	Program Dukungan bagi Anak Berkebutuhan Khusus	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas Dalam Berkarya dan Berprestasi
7	Program Pekerjaan untuk Penyandang Disabilitas	
8	Program Peningkatan Keahlian Buruh Harian Lepas	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran
9	Program Percepatan Pencetakan Wirausaha Baru dan Pendampingannya	
10	Program Pendampingan Kerja Luar Negeri	
11	Program Dukungan bagi Masyarakat Rentan Sosial Ekonomi	

No.	RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029
	Program Daerah	**Program Daerah**
(1)	(2)	(3)
12	Program Mudah Kerja (warga miskin mendapat kuota khusus melamar pekerjaan)	
13	Program Pembangunan Pertanian Menuju Swasembada Pangan	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru
		Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal
14	Program Jumpa Dia (Jalan Utama Pasti Mantap di Deli Serdang)	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal
15	Program Patroli Lingkungan	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib
16	Program Bina Mental Remaja dan Akhlak Masyarakat	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun
17	Program Sakolah (Sampah Kita Olah)	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana

Dukungan Daerah terhadap Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Program Prioritas/Proyek Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara

Untuk mempercepat dampak pembangunan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merumuskan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) sebagai quick wins Pembangunan yang merupakan program-program strategis yang secara langsung menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan sekaligus merepresentasikan implementasi dari kelima misi pembangunan. Setiap program prioritas didesain untuk memberikan dampak jangka pendek dan menengah yang terukur, sebagai fondasi menuju transformasi jangka panjang. Dengan kata lain, PHTC menjadi pengungkit awal yang mendekatkan Sumatera Utara pada kondisi ideal sebagaimana dicita-citakan dalam visi dan misi RPJMD.

Berikut adalah 6 (enam) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC/*quick wins*):

1. Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG);
2. Program Berobat Gratis (PROBIS);
3. Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan (JASKOP);
4. Digitalisasi Pelayanan Publik “Cepat, Responsif, Handal, dan Solutif” (CERDAS);
5. Infrastruktur Strategis Terintegrasi (INSTANSI)
6. Perlindungan Rakyat Melalui Restorative Justice (PRESTICE)

Dukungan pemerintah Kabupaten Deli Serdang terhadap PHTC Provinsi Sumatera Utara sebagai *quick wins* Pembangunan yang merupakan program-program strategis yang secara langsung menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan Program Prioritas/Proyek Strategis Daerah (PSD), sebagai berikut.

Tabel 4. 5
Dukungan Program Daerah terhadap Proyek Hasil Tercepat Baik (PHTC)

PHTC	TAHUN	Rencana Aksi dan Lokasi Pelaksanaan	DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
1. Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) (Kepulauan Nias – 2026, + Pantai Barat - 2027, + Dataran Tinggi – 2028, + Pantai Timur – 2029) **33 Kabupaten/Kota**	**2025**	Menyusun Kajian Akademis/Konsultan Pendidikan Tentang Bersekolah Gratis • 33 Kabupaten/Kota	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pendidikan Provsu, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: - basis data penerima - mengelola operasional sekolah - mengawasi implementasi agar tepat sasaran
	2026	Pelaksanaan Kegiatan PUBG • Zona Kepulauan Nias	
	2027	Pelaksanaan Kegiatan PUBG •Zona Kepulauan Nias dan **Pantai Barat**	
	2028	Pelaksanaan Kegiatan PUBG •Kepulauan Nias, **Pantai Barat,** dan dataran tinggi	
	2029	Pelaksanaan Kegiatan PUBG •Kepulauan Nias, **Pantai Barat**, Dataran tinggi, dan Pantai Timur	
	2030	Pelaksanaan Kegiatan PUBG •Kepulauan Nias, **Pantai Barat,** Dataran tinggi, dan Pantai Timur	
2. Program Berobat Gratis (Probis) melalui Program Universal Health Coverage (UHC) (mulai Oktober tahun 2025, UHC+ tahun 2026 - 2030).	**2025**	Melakukan Launching UHC Penyusunan regulasi MoU 33 Kabupaten/Kota dimulai Oktober 2025 • 33 Kabupaten/Kota	Dukungan anggaran Kabupaten/Kota pada Tahun 2025 80% dan setiap tahun akan berkurang sebesar 2,5% Verifikasi dan Validasi Data Peserta :

PHTC	TAHUN	Rencana Aksi dan Lokasi Pelaksanaan	DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
	2026	- Melakukan peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara - Integrasi dengan Sumut e-Health (verifikasi online dan data pasien otomatis) • 33 Kabupaten/Kota	- Memastikan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) akurat untuk sasaran PBI JKN Pusat dan PBI JKN Daerah. - Melakukan pemutakhiran data PBI JKN Pusat dan PBI JKN Daerah. secara berkala melalui Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. - Menghapus data ganda atau peserta yang tidak memenuhi kriteria. - Menyinkronkan basis data peserta PBI JKN Pusat dan PBI JKN Daerah. dengan provinsi dan BPJS Kesehatan
	2027	- Melakukan peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara - Integrasi dengan Sumut e-Health (verifikasi online dan data pasien otomatis) • 33 Kabupaten/Kota	
	2028	- Melakukan peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara - Integrasi dengan Sumut e-Health (verifikasi online dan data pasien otomatis) • 33 Kabupaten/Kota	
	2029	- Melakukan peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara - Integrasi dengan Sumut e-Health (verifikasi online dan data pasien otomatis) • 33 Kabupaten/Kota	
	2030	- Melakukan peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara - Integrasi dengan Sumut e-Health (verifikasi online dan data pasien otomatis) • 33 Kabupaten/Kota	

PHTC	TAHUN	Rencana Aksi dan Lokasi Pelaksanaan	DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
3. Program Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan (JASKOP)	**2025**	Identifikasi lokasi sentra cabai; sosialisasi teknologi Solar Dry Dome (SDD) pelatihan awal pengolahan cabai kering Pembangunan SDD 10 unit •**Deli serdang** •Batubara •Karo •Serdang Bedagai •Langkat dan •Simalungun	- Memperkuat sistem informasi harga dan produksi di tingkat petani - Verifikasi lapangan bersama kelompok tani - Melakukan dukungan terhadap sosialisasi SDD
	2026	- Melakukan uji coba produksi cabai kering & bubuk - pendampingan koperasi/UMKM - Pembangunan unit Solar Dry Dome 15 unit •Tapanuli Utara • Humbang Hasundutan	- Dukungan terhadapa Uji Coba Produksi cabe kering dan bubuk - Verifikasi lapangan bersama kelompok tani - Melakukan dukungan terhadap sosialisasi SDD
	2027	- Implementasi Skala Produksi & Digitalisasi - Pembangunan SDD 17 unit •Dairi •Mandailing Natal	- Verifikasi lapangan bersama kelompok tani - Melakukan dukungan terhadap sosialisasi SDD
	2028	- Perluasan Kabupaten & Skema Pembiayaan UMKM - Pembangunan SDD 20 Unit •Toba •Nias Selatan	- Verifikasi lapangan bersama kelompok tani - Melakukan dukungan terhadap sosialisasi SDD
	2029	- Ekspansi Ekspor & Sertifikasi Global - Pembangunan SDD 25 Unit • Tapanuli Selatan •Samosir	- Verifikasi lapangan bersama kelompok tani - Melakukan dukungan terhadap sosialisasi SDD
	2030	Evaluasi Final & Perumusan Kebijakan Keberlanjutan di Tahun 2030	

PHTC	TAHUN	Rencana Aksi dan Lokasi Pelaksanaan	DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
4. Digitalisasi Pelayanan Publik "Cepat, Responsif, Handal, dan Solutif" (CERDAS)	**2025**	Pemetaan layanan publik yang akan didigitalisasi, Audit kesiapan infrastruktur dan SDM, Penyusunan roadmap & kebijakan pendukung • 33 Kabupaten/Kota	Kesiapan Infrastruktur Internet di Kabupaten/Kota
	2026	Pengembangan dan pengujian platform digital layanan, Integrasi dengan data kependudukan & sistem informasi lainnya, dan Pelatihan SDMinternal • 33 Kabupaten/Kota	Kesiapan Infrastruktur Internet, Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota
	2027	Peluncuran resmi layanan digital tahap pertama, Integrasi lintas instansi, Peningkatan kapasitas jaringan & infrastruktur • 33 Kabupaten/Kota	Kesiapan Infrastruktur Internet di Kabupaten/Kota
	2028	Peluncuran resmi layanan digital tahap pertama, Integrasi lintas instansi, Peningkatan kapasitas jaringan & infrastruktur • 33 Kabupaten/Kota	Kesiapan Infrastruktur Internet di Kabupaten/Kota
	2029	Optimalisasi user experience, Penyempurnaan kebijakan, regulasi, dan SOP, Pelaksanaan audit mutu dan keamanan sistem • 33 Kabupaten/Kota	Kesiapan Infrastruktur Internet, Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota
	2030	Optimalisasi user experience, Penyempurnaan kebijakan, regulasi, dan SOP, Pelaksanaan audit mutu dan keamanan sistem • 33 Kabupaten/Kota	Kesiapan Infrastruktur Internet, Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota

PHTC	TAHUN	Rencana Aksi dan Lokasi Pelaksanaan	DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
5 a. Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi (INSTANSI)	**2025**	Progress pelaksanaan lelang dan Melakukan Uji mutu struktur, kualitas material, dan uji kelayakan fungsi jalan/jembatan •Kawasan Pertumbuhan : Kota Padangsidimpuan Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Labuhanbatu Utara, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Asahan Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kab. Simalungun, Kab. Karo, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Tapanuli Utara Kab. Serdang Bedagai, Kab. Toba, Kab. Dairi Kawasan Afirmasi : Kab. Nias Utara, Kab. Nias, Kab. Nias Barat, Kota Gunungsitoli Target pembangunan tahun ini mencakup 103,23 km jalan dan 245,5 meter jembatan	Kabupaten/kota yang menjadi lokasi proyek akan terlibat aktif dalam koordinasi lapangan, penyediaan data lokal, dan dukungan administratif. Dalam rangka penyiapan dukungan RC.

PHTC	TAHUN	Rencana Aksi dan Lokasi Pelaksanaan	DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
	2026	Progress pelaksanaan lelang dan Melakukan Uji mutu struktur, kualitas material, dan uji kelayakan fungsi jalan/jembatan • Kawasan Pertumbuhan : Kota Medan, Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Padang Lawas, Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kab. Deli Serdang, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Batu Bara, Kab. Simalungun, Kab. Dairi, Kab. Tapanuli Tengah, Kota Padangsidimpuan, Kota Sibolga, Kab. Karo, Kab. Asahan, Kab. Labuhanbatu, Kab. Labuhanbatu Utara, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Langkat, Kab. Toba, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Humbang Hasundutan Kawasan Afirmasi : Kab. Nias Selatan, kab. Nias Barat, Kab. Nias Utara, target: jalan 187,95 km jembatan 231,10 m.	

PHTC	TAHUN	Rencana Aksi dan Lokasi Pelaksanaan	DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
	2027	Progress pelaksanaan lelang dan Melakukan Uji mutu struktur, kualitas material, dan uji kelayakan fungsi jalan/jembatan • Kawasan Pertumbuhan : Kota Padangsidimpuan Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Asahan, Kab. Labuhanbatu, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Padang Lawas, Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kab. Toba, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Simalungun, Kab. Langkat, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Mandailing Natal, Kab. Pakpak Bharat serta target: jalan 120,10 km & jembatan 666,65 m	
	2028	Progress pelaksanaan lelang dan Melakukan Uji mutu struktur, kualitas material, dan uji kelayakan fungsi jalan/jembatan • Kawasan Pertumbuhan : Kota Padangsidimpuan, Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Asahan, Kab. Labuhanbatu, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Nias Utara Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Toba, serta target: jalan 105,60 km & jembatan 367,30 m	

PHTC	TAHUN	Rencana Aksi dan Lokasi Pelaksanaan	DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
	2029	Progress pelaksanaan lelang dan Melakukan Uji mutu struktur, kualitas material, dan uji kelayakan fungsi jalan/jembatan • Kawasan Komoditas Unggulan:Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Nias Utara, Kab. Asahan serta target: jalan 50,60 km & jembatan 122,30 m	
	2030	Progress pelaksanaan lelang dan Melakukan Uji mutu struktur, kualitas material, dan uji kelayakan fungsi jalan/jembatan Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : •Kab.Asahan serta target: jalan 43 km & jembatan 98,50 m	
b. Penguatan Infrastruktur Irigasi dan Sumber Air Pertanian untuk Mendukung Swasembada Pangan Berkelanjutan	**2025**	Rehabilitasi dan optimalisasi jaringan irigasi Pelaksanaan awal di 4 DI prioritas (Serdang Bedagai dan Asahan) dengan target 1.857 Ha.	- Dukungan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan jaringan irigasi tersier - sinergi antara pemerintah daerah, kelompok tani, dan BUMDes untuk pemeliharaan jaringan irigasi - Pembangunan embung, sumur bor, dan pompanisasi untuk sumber air cadangan. - Digitalisasi sistem irigasi (smart irrigation) berbasis sensor dan aplikasi. - Pemberdayaan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) untuk pengelolaan irigasi. - Integrasi dengan program ketahanan pangan daerah.
	2026	Rehabilitasi dan optimalisasi jaringan irigasi target 6.776 Ha. •Batubara, Padang Lawas Utara, P.Siantar, Simalungun	
	2027	Rehabilitasi dan optimalisasi jaringan irigasi dengan target 3.175 Ha •Padang Lawas, langkat, Madina, Serdang Bedagai	
	2028	Rehabilitasi dan optimalisasi jaringan irigasi •Toba, Madina, Dairi, **Deli Serdang**	
	2029	Rehabilitasi dan optimalisasi jaringan irigasi •Simalungun, **Deli Serdang**, Padang Lawas	

PHTC	TAHUN	Rencana Aksi dan Lokasi Pelaksanaan	DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
	2030	-	
c. Peningkatan Kualitas Permukiman Layak, Terjangkau, dan Inklusif melalui Penyediaan Hunian Murah serta dukungan terhadap pelaksanaan program 3 juta rumah	**2025**	- Menbentuk Tim Pelaksana, Anggaran Biaya - Survey Lokasi di setiap Kab/Kota - Membuat Nota Kesepahaman/Nota kerjasama dengan mitra terkait (REI dan Bank Sumut, dll) - Penyediaan data dan/atau informasi statistika MBR dan ASN Pemerintah Daerah - Pembangunan Fisik setiap Tahun - Mengevaluasi dampak program dan penataan lingkungan •Kab. Simalungun, Kab. Batubara, Kab. Labuhan batu Utara, Kab. Samosir, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Mandailing Natal, Kab. Nias Utara, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Tapanuli Tengah, Kota Pematang Siantar dan Kota Padang Sidimpuan	Bupati/Walikota: 1. Pendataan dan Validasi Calon Penerima (BNBA = by name by addres) 2. SK Kumuh yang dikeluarkan Bupati atau Wali Kota terkait wewenang Provinsi untuk luasan 10 – 15 Ha 3. SK Pokja Penanganan Kawasan Kumuh pada kabupaten/Kota Dinas yang Membidangi Perumahan Rakyat (di Kab/Kota): Pelaksana teknis utama di lapangan. Bertanggung jawab atas pendataan, verifikasi, penyaluran bantuan, pendampingan, monitoring, dan pelaporan langsung dari lokasi perbaikan.

PHTC	TAHUN	Rencana Aksi dan Lokasi Pelaksanaan	DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
	2026	- Menbentuk Tim Pelaksana, Anggaran Biaya - Survey Lokasi di setiap Kab/Kota - Membuat Nota Kesepahaman/Nota kerjasama dengan mitra terkait (REI dan Bank Sumut, dll) - Penyediaan data dan/atau informasi statistika MBR dan ASN Pemerintah Daerah - Pembangunan Fisik setiap Tahun - Mengevaluasi dampak program dan penataan lingkungan •Kab. Labuhanbatu Selatan, Kab. Toba, Kab. Langkat, Kab. Nias Selatan, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Padang Lawas dan Kab. Padang Lawas Utara	Dinas PUPR Kabupaten/Kota: Memberikan bantuan teknis konstruksi, menyusun RAB, dan memberikan supervisi teknis kepada pelaksana di lapangan. Dinas Sosial Kabupaten/Kota: Membantu dalam pembaruan dan verifikasi data kemiskinan di tingkat lokal. Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan: Ujung tombak identifikasi awal calon penerima, sosialisasi langsung kepada masyarakat, memfasilitasi gotong royong, dan membantu monitoring di lapangan.
	2027	- Menbentuk Tim Pelaksana, Anggaran Biaya - Survey Lokasi di setiap Kab/Kota - Membuat Nota Kesepahaman/Nota kerjasama dengan mitra terkait (REI dan Bank Sumut, dll) - Penyediaan data dan/atau informasi statistika MBR dan ASN Pemerintah Daerah - Pembangunan Fisik setiap Tahun - Mengevaluasi dampak program dan penataan lingkungan •Kab. Mandailing Natal, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Labuhanbatu, Kab. Simalungun, Kab. Dairi, Kab. Samosir, Nias dan Nias Selatan	

PHTC	TAHUN	Rencana Aksi dan Lokasi Pelaksanaan	DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
	2028	•Kab. - Menbentuk Tim Pelaksana, Anggaran Biaya - Survey Lokasi di setiap Kab/Kota - Membuat Nota Kesepahaman/Nota kerjasama dengan mitra terkait (REI dan Bank Sumut, dll) - Penyediaan data dan/atau informasi statistika MBR dan ASN Pemerintah Daerah - Pembangunan Fisik setiap Tahun - Mengevaluasi dampak program dan penataan lingkungan •Nias, Kab. Karo, Kab. Langkat, Kab. Nias Utara, Kota Tanjung Balai, Kota Pematang Siantar, Kab. Serdang Bedagai, Kota Medan, Labuhanbatu dan Labuhanbatu Utara	
	2029	- Menbentuk Tim Pelaksana, Anggaran Biaya - Survey Lokasi di setiap Kab/Kota - Membuat Nota Kesepahaman/Nota kerjasama dengan mitra terkait (REI dan Bank Sumut, dll) - Penyediaan data dan/atau informasi statistika MBR dan ASN Pemerintah Daerah - Pembangunan Fisik setiap Tahun - Mengevaluasi dampak program dan penataan lingkungan •Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Nias Utara, Kab. Nias Barat, Kota Binjai, Kota Padangsidimpuan, Kab. Batu Bara, Kab. Simalungun, Kota Tebing Tinggi, Humbang Hasundutan dan Kab. Toba	

PHTC	TAHUN	Rencana Aksi dan Lokasi Pelaksanaan	DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
	2030	- Menbentuk Tim Pelaksana, Anggaran Biaya - Survey Lokasi di setiap Kab/Kota - Membuat Nota Kesepahaman/Nota kerjasama dengan mitra terkait (REI dan Bank Sumut, dll) - Penyediaan data dan/atau informasi statistika MBR dan ASN Pemerintah Daerah - Pembangunan Fisik setiap Tahun - Mengevaluasi dampak program dan penataan lingkungan •Kab. Asahan, Kota Tanjung Balai, Kab. Nias Selatan, Kab. Nias, Kota Gunungsitoli, Serdang Bedagai dan Tebing Tinggi	
6. Bantuan Hukum dan perlindungan rakyat melalui Restorative Justice (PRESTICE).	**2025**	Penandatanganan Nota Kesepahaman, penetapan SK Tim, penyusunan panduan teknis pelaksanaan dan Sosialisasi program PRESTICE di 8 kab/kota	1. Penyediaan fasilitator, pembiayaan dan penyusunan data pendukung, serta integrasi dengan program perlindungan sosial lainnya di daerah. 2. Pelaksanaan pelatihan mediator dilakukan sembari pemberian bantuan bantuan hukum 3. Replikasi Satgas Kabupaten/Kota 4. Pembanguan Posko Pengaduan
	2026	Pelaksanaan awal PRESTICE di 15 kabupaten/kota, Pelatihan mediator tingkat kabupaten/kota dan pemutakhiran strategi tahun berikutnya, monev pelaksanaan kegiatan •15 Kabupaten/Kota (Padang Lawas Utara, Kab. Dairi, Kab. Simalungun, Kab. Asahan, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Labuhan Batu Utara, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Samosir, Kab. Toba, Kab. Labuhan Batu, Kab. Tapanuli Utara, Kota Tanjung Balai, Kota Sibolga, Kab. Labuhanbatu Selatan, Kab. Tapanuli Tengah)	

PHTC	TAHUN	Rencana Aksi dan Lokasi Pelaksanaan	DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
	2027	Ekspansi pelaksanaan ke 20 kabupaten/kota, Pelatihan mediator gelombang kedua, monev pelaksanaan kegiatan •20 Kab/Kota (Kab. Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Kab. Nias Utara, Kab. Nias Barat, Kab. Nias, Kab. Nias Selatan, Kota Gunungsitoli, Kab. Mandailing Natal, Kab. Padang Lawas, Kota Medan, **Kab. Deli Serdang**, Kab. Langkat, Kab. Karo, Kab. Serdang Bedagai, Kota Tebing Tinggi, Kab. Batu Bara, Kota Pematang Siantar, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Dairi, Kab. Simalungun)	
	2028	Perluasan wilayah ke 25 kabupaten/kota, Sosialisasi publik dan pelatihan mediator gelombang III, monev pelaksanaan kegiatan •25 Kabupaten/Kota (Kab. Asahan, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Labuhan Batu Utara, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Samosir, Kab. Toba, Kab. Labuhan Batu, Kab. Tapanuli Utara, Kota Tanjung Balai, Kota Sibolga, Kab. Labuhanbatu Selatan, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Kab. Nias Utara, Kab. Nias Barat, Kab. Nias, Kab. Nias Selatan, Kota Gunungsitoli, Kab. Mandailing Natal, Kab. Padang Lawas, Kota Medan, **Kab. Deli Serdang**, Kab. Langkat, Kab. Karo)	
	2029	33 Kabupaten Kota	
	2030	33 Kabupaten Kota	

Tabel 4. 6
Dukungan Program Daerah terhadap Program Prioritas/Proyek Strategis Daerah (PSD)

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
PP1. PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM SEKOLAH UNGGULAN BERBASIS PENINGKATAN SKILL YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEBUTUHAN INDUSTRI DAN POTENSI WILAYAH DI TINGKAT LOKAL					
1. Rehabilitasi Ruang Kelas SMA/SMK/SLB sebanyak 490 Sekolah	2025	Pendataan valid rehab ruang kelas tahun 2026-2029	Dinas Pendidikan	PUPR (Appraisal/Penilaian Kerusakan, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi)	Pembangunan infrastruktur akses jalan yang baik dari dan menuju sekolah yang akan dilakukan kegiatan rehabilitasi ruangan kelas rusak
		· Provinsi Sumatera Utara (Dokumen Aprasial)		Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)	
	2028	Pelaksanaan Fisik Tahap III – 190 Ruang Kelas (2028) di 28 Kab/Kota			
		- Medan, Binjai, Langkat, Karo, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Dairi, Tebing Tinggi, Batu Bara, Asahan, Tanjung Balai, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Simalungun, Pematang Siantar, Samosir, Toba, Humbahas, Taput, Tapsel, Tapteng, Sibolga, Padangsidimpuan, Madina, Tapanuli Selatan, Padangsidimpuan, Padang Lawas			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
	2029	Monitoring, Evaluasi & Pemutakhiran Data (2029)			
2. Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Unit Sekolah Baru	2025	Pendataan Kebutuhan RKB (mendesak), Pembangunan RKB Tahap I sebanyak 57 RKB di 15 Kab/Kota	Dinas Pendidikan	PUPR (Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi)	· Penyediaan atau hibah Lahan dari kabupaten/kota untuk lokasi Pembangunan RKB sesuai kebutuhan.
		· Deli Serdang, Langkat, Dairi, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Mandailing Natal, Simalungun, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Nias, Nias Selatan, Nias Barat, Asahan		Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)	· Pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan akses jalan yang baik dari dan menuju sekolah
	2027	Pembangunan RKB sebanyak 30 RKB di 14 Kab/Kota			
		Medan, Langkat, Deli Serdang, Simalungun, Asahan, Tapanuli Utara, Padangsidimpuan, Tapanuli Tengah, Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Nias, Nias Selatan, Gunung Sitoli			
PP2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMUDA, DAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM BERKARYA DAN BERPRESTASI					

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
1. Liga Olahraga Pelajar Sumut Piala Gubernur Sumatera Utara Cabang Olahraga Sepak Bola dan Voli tahun 2026-2030	2025	1. Inisiasi dan konsolidasi melalui rapat rapat koordinasi tahun 2025	Dispora	Dinas Pendidikan/Cabang Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan (pembinaan, edukasi dan sosialisasi kepada pelajar untuk dapat menjadi atlet pelajar)	- Melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan liga olahraga pelajar sumut untuk cabor sepak bola dan voli
		2. Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2025		Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)	- Melaksanakan *side event* pada saat pelaksanaan liga olahraga (pameran UMKM) dan sejenisnya
		· Provinsi Sumatera Utara			
	2026-2029	1. Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2026			
		2. Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2026			
		• Provinsi Sumatera Utara			
	2030	1. Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2030			
		2. Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2030			
		3. Penguatan *Legacy* & Keberlanjutan Tahun 2030			
		• Provinsi Sumatera Utara			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
2. Pekan Olahraga Paralimpik Pelajar Sumatera Utara pada Cabang Olahraga Atletik Tahun 2026-2030	2025	Inisiasi konsolidasi melalui pertemuan koordinasi tahun 2025	Dispora	Dinas pendidikan / Cabang Dinas Pendidikan (Edukasi dan Sosialisasi bagi Pelajar Difabel untuk dapat mendata dan membina atlet sesuai potensi dan minat siswa)	- NPC Kab/Kota dan Dispora Kab/Kota memperkuat perekrutan dan pembinaan para atlet disabilitas pelajar di Kab/Kota
		• Kota Medan dan Kab. Deli Serdang		Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)	
	2026-2030	1. Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2026-2030			
		2. Perluasan Partisipasi & Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2026-2027			
		• Kota Medan dan Kab. Deli Serdang			
PP 3 KESEHATAN YANG TERINTEGRASI DI BEBERAPA TITIK KAWASAN YANG MENJADI SENTRA LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT TERPADU					
1. Digitalisasi sistem kesehatan terintegrasi (Sumut *e-Health* Integration system)	2025	Penyusunan Kajian dan Bisnis Proses Platform -Health Integration System Tahun 2025	Dinas Kesehatan	Dinas Kominfo (Penyediaan Web, Server dan Publikasi Kegiatan)	- Penyediaan data kepesertaan JKN Kab/Kota
		Pembangunan Aplikasi Tahun 2025			- Sosialisasi dan edukasi platform kepada faskes tingkat Kab/Kota

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
		Launching Aplikasi Sumut *e-Health* Integration System Tahun 2025			
		33 Kabupaten/Kota			
	2026-2029	Edukasi penggunaan Aplikasi ke Masyarakat Tahun 2026			
		Pengembangan Aplikasi Sumut *e-Health* Integration System Tahun 2026-2029			
		33 Kabupaten/Kota			
2. Beasiswa Ikatan Dinas bagi Dokter Spesialis dan dokter spesialis residen di Wilayah Kurang Terlayani (2025–2030)	2026	1. Pemenuhan Dokter Spesialis melalui pemberian beasiswa bekerjasama dengan Perguruan Tinggi yakni USU dan UGM	Dinas Kesehatan	Badan Kepegawaian (Pelaksanaan *assesment* kompetensi dokter spesialis sesuai kebutuhan, Pembinaan Monitoring kepada Badan Kepegawaian Kab/Kota agar Dokter Spesialis yang sudah dididik tidak berpindah tempat kerja)	- Menyediakan data dokter umum yang memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh beasiswa dokter spesialis dan Mengidentifikasi jenis dan jumlah spesialis yang dibutuhkan di RSUD atau faskes daerah
		- Distribusi Dokter Spesialis sebagai upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Primer dan Rujukan melalui dokter residen (Layanan MedisMerata) Tahun 2025-2029		Biro Pemotda (Fasilitasi Penyusunan Dokumen Kerjasama dengan USU dan UGM)	- Menyiapkan surat komitmen bersama dengan para Bupati/Wali Kota yang menyatakan bahwa peserta Dokter spesialis akan kembali ke daerah asal dan RSUD setempat
				Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
		•Sisa Pemenuhan 4 Dokter Spesialis Dasar + 3 Penunjang (4 RSUD di 4 Kabupaten) DTPK Kepulauan Nias RSUD Pratama Lologolu Soguna Bazato (3 Orang) Nias Barat, Pemenuhan 4 Dokter Spesialis Dasar + 3 Penunjang (4 RSUD di 4 Kabupaten), RSUD Lausimomo UPT Dinkes Kab. Madina, RSUD Sibuhuan Kab. Palas, RSUD Pintu Padang kab. Tapsel, RSUD Bangun Purba Kab. Deli Serdang, RSUD Padangsidimpuan Kota Padangsidimpuan. Lanjutan Sasaran 2025: 21 Peserta			
PP4 PEMBERANTASAN KEMISKINAN MELALUI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RENTAN SECARA MENYELURUH DAN TEPAT SASARAN		2.			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
1. Bantuan Sosial Produktif melalui Program Masyarakat Produktif (MAPRO).	2028	Penyaluran bantuan modal usaha dan Pelatihan keterampilan/pengembangan usaha Program Masyarakat Produktif Tahun 2026-2029	Dinas Sosial	Disperindag dan Dinas Koperasi UMKM (Dukungan Pelatihan dan Pendampingan bagi sasaran kegiatan Mapro yaitu KUBE dan UEP, fasilitasi keikutsertaan Kelompok Usaha Bersama/Usaha Ekonomi Produktif Mapro dalam pameran/expo yang dilaksanakan oleh Dinas)	Dukungan penjajakan calon penerima bantuan agar tepat sasaran.
		- Pendampingan dan monitoring serta Evaluasi lapangan Tahun 2026-2029		Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	Dukungan koordinasi penyiapan kegiatan pelatihan bagi calon penerima bantuan di kab/kota.
		•Sebanyak 600 KK (120 KUBE) di 5 Kab/Kota: Tapsel, Karo, Nias, Serdang Bedagai, Medan serta 600 KK (UEP) di 5 Kab/Kota: Deli Serdang, Tebing Tinggi, Batu Bara, Labuhanbatu, Pakpak Bharat			Replikasi kegiatan serupa di kab/kota masing-masing.
		1.			
	2029	1. Penyaluran bantuan modal usaha dan Pelatihan keterampilan/pengembangan usaha Program Masyarakat Produktif Tahun 2026-2029			
		2. Pendampingan dan monitoring serta Evaluasi lapangan Tahun 2026-2029			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
		- Sebanyak 650 KK (130KUBE) di 5 Kab/Kota: Padangsidimpuan, Simalungun, Langkat, Tapteng, Serdang Bedagai serta 700 KK (UEP) di 5 Kab/Kota: Toba, Deli Serdang, Dairi, Labuhanbatu Utara, Madina			
2. Pelaksanaan Program Pasar Murah Bergerak (PMB)	2025	Identifikasi kebutuhan dan lokasi sasaran (IHK, P3KE, desa rentan pangan, dan wilayah 3T); Penentuan komoditas & harga jual; Penyusunan Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) Pasar Murah Bergerak (PMB); Koordinasi dan Kemitraan dengan TPID, BULOG, CSR, Distributor, Pengusaha daerah/koperasi/bumdes, Pemerintah kab/kota;Penentuan jadwal & titik lokasi; Pelaksanaan Pasar Murah Bergerak (PMB)	DISPERINDAG ESDM	· Dinas TPH: Data pangan strategis dan penyediaan stok	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan (Tahun 2025-2030):
		Lokasi: Medan (kontributor inflasi), Pematangsiantar (kota IHK), Padangsidimpuan (akses terbatas), Gunungsitoli (kemiskinan ekstrem), Simalungun (penyangga distribusi), Labuhanbatu Selatan (wilayah miskin), Tapanuli Selatan (wilayah rawan harga), Langkat (rawan lonjakan harga dan distribusi), Tapanuli Utara (akses geografis sulit), Deli Serdang (wilayah IHK), Humbang Hasundutan (terpencil), Binjai (urban miskin), Toba (hinterland), Serdang Bedagai (penyangga pangan), Asahan (daerah padat penduduk)		· Dinas Perhubungan: Transportasi logistik	- Pendataan kecamatan dan jumlah penduduk miskin dan rawan miskin;

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
				· Dinas Sosial: Data P3KE *by name by address* (untuk menentukan titik titik PMB dilakukan)	- Pendataan jumlah KUMKM penyedia Bahan Kebutuhan Pokok;
				· Dinas Koperasi & UMKM: Pelibatan UMKM dan Koperasi dalam penyediaan stok	- Pengawasan distribusi dan harga bahan kebutuhan pokok;
				· Biro Perekonomian: pelibatan TPID untuk menghitung dampak terhadap pengendalian inflasi	- Kerjasama antar kabupaten dalam penyediaan Bahan Kebutuhan Pokok
				· Dinas Kominfo: Publikasi Pelaksanaan	- Penyediaan lokasi untuk pelaksanaan;
				· Bappelitbang: Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	- Monitoring dan evaluasi
				· Inspektorat: Pengawasan Pelaksanaan	
	2027	Pelaksanaan Pasar Murah Bergerak (PMB) • 15 Kabupaten/Kota			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
		Lokasi; Karo (rawan inflasi sayur), Deli Serdang (kontributor IHK), Mandailing Natal (kemiskinan ekstrem), Humbahas (akses distribusi sulit), Tapanuli Tengah (harga fluktuatif), Toba (wilayah pegunungan), Nias Barat (daerah pulau terluar), Padang Lawas (akses distribusi), Nias Utara (rawan kemiskinan), Nias Selatan (akses logistik laut), Langkat (wilayah *Pantai Timur*), Samosir (pulau tengah danau), Serdang Bedagai (penyangga distribusi), Tapanuli Selatan (akses transportasi terbatas), Simalungun (wilayah padat penduduk)			
	2028	Pelaksanaan Pasar Murah Bergerak (PMB) • 15 Kabupaten/Kota			
		Medan (kota IHK utama), Pematangsiantar (wilayah urban), Padangsidimpuan (wilayah tertutup distribusi), Deli Serdang (wilayah distribusi padat), Toba (akses perbatasan dan pariwisata), Humbahas (wilayah pertanian dan pengunungan), Nias Selatan (terpencil), Karo (akses dan cuaca ekstrem), Langkat (wilayah perbatasan), Simalungun (pusat distribusi regional), Tapanuli Selatan (wilayah pegunungan), Mandailing Natal (akses rendah), Dairi (hinterland), Nias Barat (wilayah			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
		terpencil), Tapanuli Tengah (rawan distribusi)			
	2029	Pelaksanaan Pasar Murah Bergerak (PMB) - 15 Kabupaten/Kota Tebing Tinggi (kota IHK baru), Binjai (urban miskin), Toba (wilayah distribusi luas), Langkat (wilayah perbatasan), Samosir (akses logistik air), Pakpak Bharat (akses sangat terbatas), Humbahas (wilayah dataran tinggi), Tapanuli Tengah (harga fluktuatif), Mandailing Natal (kemiskinan struktural), Padang Lawas (akses distribusi sulit), Deli Serdang (wilayah IHK), Karo (rawan inflasi hortikultura), Nias Selatan (logistik laut), Simalungun (distribusi lintas kabupaten), Asahan (wilayah urban pertanian)			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
3. Perlindungan Sosial bagi Tenaga Kerja Rentan (Subsidi BPJS Ketenagakerjaan)	2025	1. Pendataan dan verifikasi	DISNAKER	· Dinas Sosial	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Ketenagakerjaan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan:
		2. Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan (Pekerja rentan yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja dibawah standart) sebanyak 21.000 (APBD dan DBH Sawit)		· Dinas Sosial berperan dalam memberikan data dukung DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) untuk memastikan penerima termasuk dalam kategori penerima bantuan.	1. Mendukung pelaksanaan agar bisa mencapai target Universal Coverage Jamsostek (UCJ) sebesar 60% sesuai RPJMD 2025-2029
		3. Penguatan peran dan komitmen kabupaten/kota dalam pembiayaan dan regulasi (MoU Pemprovsu dengan Kabupaten dan Kota)		· Pendataan dan Validasi Calon Penerima, Mengelola dan memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar penetapan penerima bantuan iuran BPJS.	2. Memberikan sosialisasi untuk masyarakat, khususnya untuk tenaga kerja rentan dan masyarakat yang berada di garis kemiskinan
		· 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2)		· Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	3. Pengalokasian dbh sawit dan apbd dengan persentase pembagian 80 persen kab/kota dan 20 persen provinsi untuk perlindungan pekerja rentan miskin ekstrem desil 1 dan 2
				· Penyediaan dan Verifikasi Data Identitas	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
				· Menyediakan data kependudukan yang valid (NIK, KK, KTP) sebagai prasyarat utama pendaftaran peserta BPJS Ketenagakerjaan.	
				· Melakukan verifikasi dan sinkronisasi data dengan sistem BPJS, DTKS (Dinas Sosial), dan lembaga lain untuk memastikan data pekerja rentan terverifikasi secara administratif.	
				· Dukungan Pemutakhiran Data DTKS, Bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk memastikan kesesuaian dan kelengkapan data identitas dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), yang digunakan untuk menetapkan penerima bantuan iuran BPJS.	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
				· Membantu mempercepat proses registrasi atau koreksi data calon penerima manfaat yang belum memiliki dokumen kependudukan lengkap.	
				· BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan perlindungan sosial bagi pekerja melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): Perlindungan atas risiko kecelakaan selama bekerja.	
				· Jaminan Kematian (JKm): Santunan kepada ahli waris pekerja yang meninggal.	
				· Jaminan Hari Tua (JHT): Tabungan jangka panjang bagi pekerja saat pensiun.	
				· Jaminan Pensiun (JP): Penghasilan berkala untuk pekerja setelah pensiun.	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
				· Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP): Bantuan uang tunai, akses informasi kerja, dan pelatihan bagi pekerja yang terkena PHK.	
				· Kominfo: Publikasi Kegiatan	
	2026	Perluasan kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.645 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% Kab/Kota · 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2			
	2027-2029	Pembayaran kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.646 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% Kab/Kota · 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2			
	2030	1. Pembayaran kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.648 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% Kab/Kota 2. Evaluasi menyeluruh dan pencapaian target cakupan 60% UCJ			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
		· 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara			
4. Revitalisasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Panti Sosial Provinsi	2025	Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti		PUPR (Dokumen appraisal, pendampingan, monitoring dan evaluasi untuk revitalisasi panti sosial)	- Kab/Kota mendukung pelaksanaan pelatihan bimbingan mental, dan pendidikan paket A/B/C bagi penerima manfaat yang dirujuk dari panti sosial provinsi khususnya panti anak dan remaja
		Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi		Disperindag, Dinas Koperasi UMKM, Disnaker (Dukungan Pelatihan dan Keterampilan Kerja bagi sasaran Penghuni Panti)	- Kabupaten/Kota bersama Provinsi melakukan pemantauan, evaluasi atas keberlanjutan penerima manfaat.
				Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	
	2026	Penyusunan dokumen appraisal/penilaian kerusakan bekerjasama dengan Dinas PUPR			
		Penyusunan dokumen perencanaan (jasa konsultan perencanaan) untuk 13 panti sosial			
		Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti			
		Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi			
	2027	Revitalisasi fisik gedung Panti Sosial (4 unit)			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
		Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti			
		Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi			
	2028	Revitalisasi fisik gedung Panti Sosial (4 unit)			
		Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti			
		Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi			
	2029	Revitalisasi fisik gedung Panti Sosial (5 unit)			
		Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti			
		Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi			
	2030	Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti			
		Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi			
PP 5 PENGUATAN STABILITAS MAKRO EKONOMI DAN KESINAMBUNGAN FISKAL DAERAH					

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
1. Penguatan Hilirisasi Komoditas Unggulan di Kawasan Industri Sumatera Utara	2025	Penguatan Hilirisasi Produk Unggulan Sumatera Utara Identifikasi rantai pasok dan IKM Komoditas Unggulan	DISPERINDAG ESDM	- Dinas TPH: Peningkatan Produksi Cabe melalui Sarprodi; Pemberian Bibit Cabai varietas tahan hama & cocok untuk pengeringan, *capacity building* bagi petani	Dukungan Kab/Kota:
		- Lokasi Kelapa: Kabupaten Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Asahan, Batu Bara, dan Labuhanbatu Utara		- Dinas Perkebunan dan Peternakan: Peningkatan Produksi Kelapa, Aren dan Kopi melalui Sarprodi; Pemberian Bibit Kelapa genjah, Kopi Unggu, Aren, *capacity building* bagi petani	· Menyediakan Data IKM sektor Kopi, Kelapa, Aren, Cabe (jenis produk, data produksi, nilai omset produksi)
		Kopi: Kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, dan Simalungun		- Dinas PUPR: Penguatan Inftratruktur Jalan dan Jembatan	
		Aren: Kabupaten Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal Cabai: Karo, Batu Bara, Serdang Bedagai, Deli Serdang		- Dinas Kominfo: Dukungan Publikasi Kegiatan	
	2027	Hilirisasi Produk Unggulan Sumatera Utara Peningkatan Kapasitas Produksi Hilir dan peningkatan kemitraan IKM dengan industri hilir; Diversifikasi Produk & Inovasi			Penguatan kemitraan hilirisasi antar kab/kota. Pemasaran, dukungan promosi, *capacity* buliding diversivikasi produk

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
		· Kelapa: Kabupaten Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Asahan, Batu Bara, dan Labuhanbatu Utara			hilirisasi, Penyediaan Rumah kemasan oleh kab/kota
		· Kopi: Kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, dan Simalungun			
		· Aren:Kabupaten Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal			
		· Cabe: Karo, Batu Bara, Serdang Bedagai, Deli Serdang			
	2028	Hilirisasi Produk Unggulan Sumatera Utara Peningkatan SDM, Peningkatan Kapasitas Produksi dan peningkatan kemitraan IKM dengan industri hilir; Penguatan Pasar & Branding*;* MoU dengan Industri Besar untuk menampung produk hilirisasi dari IKM Binaan			menentukan IKMyang akan dilakukan *capacity building*, menyusun regulasi pengembangan hilirisasi, penguatan kemitraan hilirisasi antar kab/kota, peningkatan akses pembiayaan melalui KUR atau Koperasi, fasilitasi *capacity building* standarisasi ekspor bagi pelaku IKM.
		· Kelapa: Kabupaten Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Asahan, Batu Bara, dan Labuhanbatu Utara			
		· Kopi: Kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, dan Simalungun			
		· Aren:Kabupaten Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal			
		· Cabe: Karo, Batu Bara, Serdang Bedagai, Deli Serdang			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
	2029	Hilirisasi Produk Unggulan Sumatera Utara Integrasi Ekosistem Industri (dari hulu ke hilir mulai dari bahan baku, sampai ke pasok industri besar) dan Bisnis *Matching* dengan Industri Besar dalam dan luar negeri · Kelapa: Kabupaten Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Asahan, Batu Bara, dan Labuhanbatu Utara · Kopi: Kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, dan Simalungun · Aren:Kabupaten Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal · Cabe: Karo, Batu Bara, Serdang Bedagai, Deli Serdang			Dukungan pembiayaan KUR, identifikasi IKM berpotensi untuk dilakukan *business matching*,
	2030	Hilirisasi Produk Unggulan Sumatera Utara Evaluasi, Ekspansi dan Keberlanjutan Produk Hilirisasi Industri di pasar global · Kelapa: Kabupaten Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Asahan, Batu Bara, dan Labuhanbatu Utara · Kopi: Kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, dan Simalungun · Aren: Kabupaten Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal · Cabe: Kabupaten Karo, Batu Bara, Serdang Bedagai, Deli Serdang			*Branding Ekspor*

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
2. Pemanfaatan Aset barang milik daerah melalui kerja sama ekonomi	2025	· Inventarisasi Barang Milik Daerah yang belum optimal, serta potensi pemanfaatan	BKAD	Bapenda Provsu: Dukungan dalam proses bisnis pendapatan melalui pemafaatan aset BMD dengan kerjasama ekonomi	Dukungan Pemerintah Kab/Kota pada pelaksanaan pengamanan BMD dalam penerbitan SKT lahan (Surat Keterangan Kepemilikan Lahan) dari Pemerintah Setempat (Kelurahan atau Kepala Desa)
		· Penyusunan skema/proses bisnis pemanfaatan aset BMD		Bappelitbang Provsu: Dukungan dalam penyusunan konsep dan perencanaan	
		· Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi		Diskominfo: Dukungan dalam penyediaan web aplikasi dan promosi	
		· Proses digitalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah		OPD Pengguna BMD: Dukungan dalam inventarisir dan pengamanan aset serta pemeliharaan BMD	
	2026	· Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 BMD yang termanfaatkan)			
		· Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi			
		· Penyusunan Regulasi penggunaan web aplikasi pemanfaatan Barang Milik Daerah			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
		· Peningkatan kapasitas dan kuantitas SDM penilai barang			
	2027	· Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 BMD yang termanfaatkan)			
		· Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi			
		· Pengembangan skema peman faatan Barang Milik Daerah			
		· Pengembangan sistem informasi atau promosi			
	2028	· Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 BMD yang termanfaatkan)			
		· Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi			
		· Penguatan kemitraan dalam perluasan pemanfaatan Barang Milik Daerah termasuk kerjasama dengan platform lain			
	2029	· Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 BMD yang termanfaatkan)			
		· Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
		· Penguatan kemitraan dalam perluasan pemanfaatan Barang Milik Daerah termasuk kerjasama dengan platform lain (kerjasama dengan 1 Platform)			
		· Evaluasi dan Monitoring secara berkala terhadap Pemanfaatan Barang Milik Daerah produktif berkelanjutan			
	2030	· Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 BMD yang termanfaatkan)			
		· Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi			
		· Evaluasi dan Monitoring secara berkala terhadap Pemanfaatan Barang Milik Daerah melalui kerjasama ekonomi berkelanjutan			
PP.6 PENGEMBANGAN EKONOMI HIJAU DAN BIRU					
1. Pengembangan Kawasan Unggulan Perikanan Tangkap dan Budidaya	2025	Kajian kampung nelayan dan budidaya	DISKANLA	· Dinas Perindustrian dan Perdagangan – Pengolahan, pemasaran, dan ekspor produk perikanan.	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan:

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
				· Dinas Koperasi dan UKM – Penguatan kelembagaan usaha nelayan/ pembudidaya.	- Pendataan kelompok nelayan dan pembudidaya Kab/Kota
				· Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang – Pembangunan infrastruktur pendukung (jalan dan pelabuhan).	- Klasterisasi
				· Dinas Kominfo: Publikasi, sosialisasi, dan edukasi masyarakat	- Sosialisasi dan Edukasi
					- Replikasi di daerah yang sama
	2026	1. Pembuatan master plan			
		2. Pembangunan sarana prasana produksi			
		a. Perikanan tangkap: sampan, jalan dan dermaga			
		b. Perikanan budidaya: revitalisasi kolam, benih, pakan, kincir, saluran air, automatic feeder			
		c. Perikanan tangkap: kawasan Tapteng-Sibolga, kawasan Asahan-Tanjung Balai, Nias Utara;			
		d. Perikanan budidaya: Simalungun, Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai.			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
	2027	1. Pengembangan unit pengolahan ikan dalam bentuk coolbox dan gudang ikan			
		2. Kemitraan usaha dengan:			
		· Dinas Perindustrian dan Perdagangan – Pengolahan, pemasaran, dan ekspor produk perikanan.			
		· Dinas Koperasi dan UKM – Penguatan kelembagaan usaha nelayan/pembudidaya.			
		· Perikanan tangkap: kawasan Tapteng-Sibolga, kawasan Asahan-Tanjung Balai, Nias Utara;			
		· Perikanan budidaya: Simalungun, Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai.			
	2028	1. Sertifikasi mutu			
		2. Digitalisasi pemasaran dan sistem logistik hasil perikanan			
		3. Pembukaan akses pasar ekspor			
		Kawasan perikanan tangkap: Tapteng-Sibolga (Ikan Asin), kawasan Asahan-Tanjung Balai (Ikan Teri), Nias Utara (Udang Beku),			
		Kawasan perikanan budidaya: Simalungun (Ikan Dori), Deli Serdang (Ikan Mas), Langkat (Udang), Serdang Bedagai (Ikan Gurami).			
	2029	1. Pembangunan sarana prasana produksi			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
		a. Perikanan tangkap: sampan, jala dan dermaga			
		b. Perikanan budidaya: revitalisasi kolam, benih, pakan, kincir, saluran air, *automatic feeder*			
		c. Perikanan tangkap: Batu Bara, Langkat, Kota Medan dan Deli Serdang;			
		d. Perikanan budidaya: Paluta, Tapsel, Batu Bara			
	2030	1. Pengembangan unit pengolahan ikan dalam bentuk *coolbox* dan gudang ikan			
		2. Kemitraan usaha dengan:			
		· Dinas Perindustrian dan Perdagangan – Pengolahan, pemasaran, dan ekspor produk perikanan.			
		· Dinas Koperasi dan UKM – Penguatan kelembagaan usaha nelayan/pembudidaya.			
		· Perikanan tangkap: Batu Bara, Langkat, Kota Medan dan Deli Serdang;			
		· Perikanan budidaya: Paluta, Tapsel, Batu Bara			
	2030	1. Pengembangan unit pengolahan ikan dalam bentuk *coolbox* dan gudang ikan			
		2. Kemitraan usaha dengan:			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
		· Dinas Perindustrian dan Perdagangan – Pengolahan, pemasaran, dan ekspor produk perikanan.			
		· Dinas Koperasi dan UKM – Penguatan kelembagaan usaha nelayan/pembudidaya.			
		· Perikanan tangkap: Batu Bara, Langkat, Kota Medan dan Deli Serdang;			
		· Perikanan budidaya: Paluta, Tapsel, Batu Bara			
2. Pengawasan Konservasi Laut SEMESTA (Pemberdayaan Nelayan Sebagai Pasukan Penjaga Laut)	2025	Pokja Pengawas Laut, Peta digital kawasan rawan pelanggaran, draf rencana aksi	DISKANLA	• BAPPELITBANG: Integrasi program SEMESTA dalam perencanaan daerah	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan:
				• Dinas Lingkungan Hidup Provsu: Kebijakan dan pemantauan kualitas lingkungan laut.	- Pendataan Nelayan Kab/Kota
				• Dinas Perhubungan Provsu: Dukungan transportasi laut dan keselamatan pelayaran patroli.	- Klasterisasi
				• Satpol PP Provsu: Penegakan perda terkait konservasi laut.	- Sosialisasi dan Edukasi

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
				• Dinas Pariwisata Provsu: Sinergi dengan wisata bahari berkelanjutan.	
				• Dinas Kominfo Provsu: Publikasi, sosialisasi, dan edukasi masyarakat.	
				• Dinas Koperasi & UKM Provsu: Penguatan kelembagaan nelayan pengawas.	
				• Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provsu: Kesiapsiagaan dan tanggap darurat di laut.	
				• Inspektorat: Pengawasan dan pendampingan jalannya program	
	2026	Laporan Patroli dan Peralatan + Aplikasi e-Mawas · Kabupaten/kota dan perairan Pantai Timur dan barat Sumatera Utara.			
	2027	Laporan Patroli dan Peralatan + Aplikasi e-Mawas · Kabupaten/kota dan perairan Pantai Timur dan barat Sumatera Utara.			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
	2028	Modul Hukum & Klinik Konsultasi. · Kabupaten/kota dan perairan Pantai Timur dan barat Sumatera Utara.			
	2029	Laporan Evaluasi dan strategi pengawas baru · Kabupaten/kota dan perairan Pantai Timur dan barat Sumatera Utara.			
	2030	Buku capaian dan film dokumenter · Kabupaten/kota dan perairan Pantai Timur dan barat Sumatera Utara.			
3. Pengembangan Energi Baru Terbarukan (PLTS Pompa Air Untuk Irigasi Pertanian/PLTA Mikrohidro dan lainnya)	2026-2030	Evaluasi lokasi baru berdasarkan hasil proyek sebelumnya, perencanaan dan perizinan, desain teknis dan RAB, pengadaan peralatan dan pekerjaan sipil, instalasi dan uji coba sistem, pelatihan petani, monitoring awal, serta evaluasi dan serah terima akhir proyek - Kawasan pertanian yang memiliki keterbatasan irigasi di Sumatera Utara	DISPERINDAG ESDM	TPH: Pembinaan Kelompok Petani dalam penggunaan PLTS . • Bappelitbang: Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan · Inspektorat: Pengawasan Pelaksanaan	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan untuk Tahun 2025-2030: 1. Data Kelompok Tani (CPCL) 2. Data penentual lokasi 3. Pengadaan lahan

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
				· Dinas Kominfo: Dukungan Publikasi Kegiatan	4. Data produksi pertanian; kondisi air
					5. Data readiness criteria
PP 7 KETAHANAN PANGAN MELALUI PENGUATAN NILAI BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL AGAR DIVERSIFIKASI HASIL PERTANIAN MENJADI LEBIH PRODUKTIF DAN BERDAMPAK PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL					
1. Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Peternakan unggulan	2025	Penyusunan regulasi teknis, Tim Pelaksana, Kajian awal pada semester II	DISBUNAK	1. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Provinsi Sumatera Utara: memberikan pelatihan pengemasan izin edar hasil produk, pelatihan pengemasan produk dan sertifikasi halal serta pemberian alat untuk mengolah hasil produksi	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan:
				2. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara: Koordinasi pembentukan dan	1. Dukungan data CPCL di lokasi intervensi

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
				pelatihan UMKM bagi kelompok peternak	
				3. Dinas PMD Dukcapil: untuk pembentukan dan pemberdayaan BUMDes di lokasi intervensi pengembangan kawasan peternakan	2. Melakukan Pembinaan dan pelatihan peningkatan produksi atau peningkatan pasca produksi di lokasi intervensi pengembangan kawasan peternakan
				4. Diskominfo: untuk publikasi media	3. Pemberian izin usaha untuk koperasi, UMKM, BUMDes yang mengolah hasil produksi berada di kawasan peternakan
					4. Replikasi di daerah yang sama
	2028	· Verifikasi CPCL dan sosialisasi awal kepada kelompok peternak di lokasi intervensi pengembangan kawasan yang dilaksanakan mulai bulan april			
		· Pembinaan dan pengawasan serta pennguatan kelembagaan peternak yang dilakukan mulai bulan Juli untuk melihat perkembangan kawasan perkebunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2027			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
		· Pemberian bibit 30 ekor sapi perah beserta pembangunan kandang dan alat pengolah susu kepada 3 kelompok tani/ peternak di Kab. Deli Serdang, 200 ekor kambing kepada 10 kelompok tani/ peternak di Kab. Serdang Bedagai, 200 ekor babi kepada 10 kelompok tani/ peternak di Kab. Nias Selatan, dan 4000 ekor ayam kepada 4 kelompok tani/ peternak di Kab. Langkat dilaksanakan pada bulan September			
	2029	· Verifikasi CPCL dan sosialisasi awal kepada kelompok peternak di lokasi intervensi pengembangan kawasan yang dilaksanakan mulai bulan april			
		· Pembinaan dan pengawasan serta pennguatan kelembagaan peternak yang dilakukan mulai bulan Juli untuk melihat perkembangan kawasan perkebunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2028			
		· Pemberian bibit 100 ekor sapi potong kepada 10 kelompok tani/ peternak di Kab. Langkat, 30 ekor kerbau kepada 3 kelompok tani/ peternak di Kab. Humbahas, 200 ekor domba kepada 10 kelompok tani/ peternak di Kab. Asahan, dan 200 ekor babi kepada 10 kelompok tani/ peternak di Kab. Tapanuli Utara dilaksanakan pada bulan September			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
2. Program pengembangan bibit unggul pertanian	2026	Tahap Uji Multilokasi, MT (Musim Tanam): Penanaman di 5 kabupaten	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH Provinsi berperan sebagai inisiator utama program. Mereka bertanggung jawab atas perumusan kebijakan, penyediaan alokasi anggaran, serta koordinasi lintas sektor di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dalam implementasinya, mereka juga menetapkan lokasi uji multilokasi dan mendukung pelepasan varietas secara resmi	PT. Dirga Surya: memasarkan produksi bibit unggul padi	Dinas Pertanian Kabupaten mempromosikan dan menggunakan bibit unggul padi varietas baru.
		• Deli Serdang, Langkat, Simalungun, Serdang Bedagai, Asahan dan Balai Besar Perakitan Dan Balai Besar Modernisasi Pertanian Tanaman Padi - Subang Provinsi Jawa Barat			
	2027	Produksi benih sumber (*Breeder Seed* & *Foundation Seed*) varietas baru dan Distribusi benih sumber ke Penangkar/Pembudidaya untuk produksi benih sebar (*Certified Seed*)			
		· Deli Serdang, Langkat, Simalungun, Serdang Bedagai, Asahan			
	2028	Peningkatan kapasitas penangkar & perluasan lahan produksi benih			
		- Monitoring dan Evaluasi			
		- Promosi varietas baru (ekspo, lomba hasil panen)			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
		- Integrasi pemasaran gabah & beras varietas unggul			
		Pendistribusian benih unggul ke daerah lainnya (Deli Serdang, Langkat, Simalungun, Serdang Bedagai, Asahan, Paluta, Palas, Taput dan Mandailing Natal)			
	2029	Pengembangan produksi benih unggul dan pemasaran di kab/kota sentra produksi padi			
	2030	Pengembangan produksi benih unggul dan pemasaran di kab/kota sentra provinsi Sumatera Utara dan di kepulauan Sumatera			
3. Fasilitasi Akses Permodalan Terhadap Kelompok Tani	2025	Fokus pada persiapan program, pembentukan Tim Pokja FPPS di provinsi dan kabupaten/kota, rekrutmen dan pelatihan Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS), pemutakhiran data kelompok tani, koordinasi dengan lembaga keuangan, dan sosialisasi program.	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH bertindak sebagai penghubung antara kelompok tani dengan lembaga keuangan formal seperti bank, koperasi, serta lembaga penjaminan kredit. Melalui penyediaan data kelompok tani, pelatihan manajemen usaha tani, serta pembentukan kelembagaan petani yang kuat, dinas membantu petani memenuhi persyaratan	· Dinas Koperasi dan UKM memiliki peran sentral dalam penguatan kelembagaan kelompok tani melalui pembinaan koperasi tani dan UMKM berbasis pertanian. Dinas ini dapat memfasilitasi akses permodalan bagi kelompok tani melalui penguatan koperasi simpan pinjam, pelatihan manajemen usaha tani, hingga menjembatani kerja sama antara koperasi dan lembaga keuangan.	Memetakan kelompok tani yang layak dan potensial untuk memperoleh akses permodalan, berdasarkan data luas lahan, komoditas yang diusahakan, serta rekam jejak kelembagaan kelompok

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
		• 33 Kabupaten/Kota	administratif dan teknis agar layak mengakses program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan skema pembiayaan pertanian lainnya.	· Disperindag ESDM berkontribusi dalam mendorong hilirisasi produk pertanian dan menjaga stabilitas harga hasil tani. Melalui penguatan rantai nilai dan pasar hasil tani, dinas ini dapat membuka peluang tambahan pendapatan bagi petani yang dapat digunakan sebagai modal atau premi asuransi.	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
				· Dinas Kominfo memainkan peran dalam penyebarluasan informasi terkait program bantuan iuran premi asuransi dan akses permodalan. Melalui berbagai saluran komunikasi digital dan non-digital, Kominfo dapat menjamin transparansi program, meningkatkan literasi digital kelompok tani, dan mendorong penggunaan teknologi informasi dalam pengajuan permodalan dan asuransi pertanian.	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
				· Dinas Pemdesdukcapil memiliki peran strategis dalam verifikasi dan validasi data kependudukan serta kelembagaan desa sebagai basis penyaluran bantuan. Melalui data kependudukan dan basis kelompok tani di desa, Pemdesdukcapil memastikan agar bantuan permodalan maupun iuran premi asuransi diberikan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil kelompok tani.	
				· Diskominfo (Publikasi)	
	2026	Mulai pelaksanaan Temu Pembiayaan tahap I dan II, pendampingan realisasi kredit, pelatihan manajemen keuangan bagi kelompok tani penerima pembiayaan, serta monitoring awal terhadap usaha penerima kredit.			
		• 33 Kabupaten/Kota			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
	2027	Memperluas cakupan penerima pembiayaan, memperkuat kemitraan dengan BUMN, BUMD, dan swasta, serta memberikan pelatihan lanjutan kepada FPPS terkait negosiasi bisnis dan pemasaran. • 33 Kabupaten/Kota			
	2028	Mengintegrasikan pemasaran digital dan *E-commerce*, mengembangkan sistem informasi pembiayaan pertanian berbasis aplikasi, serta melatih FPPS dan kelompok tani dalam penggunaannya • 33 Kabupaten/Kota			
	2029	Melakukan diversifikasi sumber pembiayaan melalui koperasi, CSR, dan investor. Mengembangkan usaha hilir di bidang pascapanen dan olahan, memberikan pelatihan manajemen usaha hilir, serta mendorong pemasaran produk hilir. • 33 Kabupaten/Kota			
	2030	Melaksanakan kajian dampak ekonomi program, menyusun model pendampingan berkelanjutan, dan melatih FPPS menjadi konsultan atau koperasi tani. • 33 Kabupaten/Kota			
PP 9 EKONOMI KREATIF DAN INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI					

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
1. Sentra industri kreatif di Kawasan Sport Center Sumatera Utara	2025	Inventarisasi dan Pemetaan Sub Sektor Ekonomi Kreatif dan Industri Kretaif Potensial serta Pemetaan UMKM	DISBUDPAREKRAF	1. Dinas PUPR: Pembangunan Sentra Industri Kreatif	1. Pendataan Pelaku Industri Kreatif & Data UMKM Potensial;
		• Lokus di Kawasan Sport Center,		2. Biro Perekonomian: Menyusun Kajian pembentukan BLUD; Pembentukan BLUD pengelola Sentra Industri Kreatif.	2. Kurasi Pelaku Ekonomi Kreatif;
		Deli Serdang		3. Dinas PerindagESDM: Pendataan, Pelatihan & Pembinaan IKM Kreatif.	3. Fasiitasi HAKI bagi Pelaku Ekonomi Kreatif;
				4. Dinas Koperasi UMK: Pendataan, Pelatihan & Pembinaan UMKM	4. Pelaksanaan Event Ekonomi Kreatif secara rutin di Sentra Industri Kreatif;
				5. Dinas Kominfo: Penyediaan Fasilitas Digital (Internet, dll) di Kawasan Sentra Industri Kreatif; Publikasi Kegiatan	5. Promosi terkait Sentra Industri Kreatif melalui media digital dan cetak;
	2026	Penyusunan Masterplan Skema untuk menjadikan BLUD dan Pembinaan, Pelatihan & Pendampingan Pelaku Ekonomi Kreatif;			
		• Lokus di Kawasan Sport Center,			
		Deli Serdang			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
	2027	Pembangunan Sentra Industri Kreatif; Pembentukan BLUD • Lokus di Kawasan Sport Center, Deli Serdang			
	2028	Pembangunan Sentra Industri Kreatif • Lokus di Kawasan Sport Center, Deli Serdang			
	2029	Pembangunan Sentra Industri Kreatif; Penataan dan Penyediaan Fasilitas Industri Kreatif • Lokus di Kawasan Sport Center, Deli Serdang			
	2030	Pembangunan Sentra Industri Kreatif; Penataan dan Penyediaan Fasilitas Industri Kreatif; Promosi melalui pelaksanaan Event Kreatif (Kejuaraan e-sport, music Festival, dll) • Lokus di Kawasan Sport Center, Deli Serdang			
2. Sumut digital market dan galeri virtual produk UMKM kreatif	2025	Evaluasi Platform *E-commerce* yang sudah ada (SIMITRA)	DISKOP UMKM	KOMINFO: Publikasi Media	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Koperasi dan UKM, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: - Pendataan UMKM binaan Kab/Kota - Kurasi Produk UMKM

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
					- Klasterisasi UMKM yang dapat dimasukkan ke dalam Galeri
					- *Capacity Building*
	2026	Desain dan pengembangan platform *E-commerce*; Kurasi awal 100 produk UMKM; Kemitraan dengan platform logistik & payment gateway. Manajemen Operasional platform *E-commerce*; Promosi dan sosialisasi platform *E-commerce*; • PLUT		DISKOP UKM: Pendataan dan Kurasi Produk UMKM; Pelatihan dan Literasi Digital UMKM; Pembangunan dan Pengelolaan Platform; Promosi dan Akses Pasar; Pendampingan dan Skema Dukungan Lanjutan	
	2027	*Onboarding* UMKM; Pelatihan dan fasilitasi branding, dan manajemen toko online. Manajemen Operasional platform *E-commerce*; Promosi dan sosialisasi platform *E-commerce*; • PLUT		KOMINFO: Publikasi Media	
	2028	Pengembangan *E-commerce* menjadi Market Place; Integrasi dengan katalog elektronik, Manajemen Operasional platform *E-commerce*; Promosi dan sosialisasi platform *E-commerce*; • PLUT		DISKOP UKM: Pendataan dan Kurasi Produk UMKM; Pelatihan dan Literasi Digital UMKM; Pembangunan dan Pengelolaan Platform; Promosi dan Akses Pasar; Pendampingan dan Skema Dukungan Lanjutan	

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
	2029	Galeri Virtual 3D; Kampanye digital nasional & regional, Manajemen Operasional platform *E-commerce*; Promosi dan sosialisasi platform *E-commerce*;			
		• PLUT			
	2030	Kurasi produk ekspor; Promosi virtual di event internasional (virtual expo, marketplace ASEAN), Manajemen Operasional platform *E-commerce* dan Promosi dan sosialisasi platform *E-commerce;*			
		• PLUT			
PP 10 REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN					
1. Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	2025	1. Penyusunan SK Tim Forum Pemangku Kepentingan SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2030	Bappelitbang	Seluruh Perangkat Daerah	1. Penyusunan dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs Kab/Kota se-Sumut tahun 2025-2030
		2. Sosialisasi SK Tim forum dan milestone TPB SDGs 2025-2030			2. Dukungan pelaksanaan skema BRS Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs: identifikasi UMKM/IMK serta pelaku usaha
		3. Updating target capaian SDGs tahun 2025 disesuaikan dengan dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029			3. Dukungan pelaksanaan North Sumatera SDGs *Action Awards*
		4. Penyusunan skema Declaration and Registration System			4. Dukungan proses penginputan *E- Monev* Kabupaten/Kota

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
		5. Pembangunan fitur aplikasi pendaftaran *BRS SDGs*			5. Peningkatan Kapasitas untuk implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs
		6. Replikasi, instalasi dan *Capacity Building* Aplikasi E-*Monev SDGs* (Inovasi)			
		7. Menyusun Draf Rancangan Awal RAD TPB/*SDGs* Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2030			
		8. *Launching* dan Pelaksanaan BRS *pilot project* sekaligus penyerahan sertifikat kepada 15 UMKM			
		9. *Workshop* Penyusunan Voluntary Local Review (VLR) Kabupaten/Kota			
		10. Modifikasi Aplikasi *E-Monev SDGs*			
		11. *Workshop E-Monev* dengan Bappeda/Bapperida/Bappelitbang Kabupaten/Kota			
		12. Menyusun draf Monev capaian SDGs tahun 2025			
	2026	1. INOVASI Business Registration System Policy TPB/SDGs			
		2. Diseminasi Skema BRS TPB/SDGs (Kolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM pada acara FYP, BRS SDGs dijadikan kurikulum.			
		3. Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 2025			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
		4. Finalisasi Draf RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026-2030 melalui desk per pilas TPB/SDGs			
		5. Launching Aplikasi e-Monev			
		6. Pelaksanaan skema *Declaration and Registration System BRS* TPB/SDGs			
		7. Diseminasi RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026-2030			
		8. Penyusunan Rancang Bangun aplikasi e-Monev SDGs (INOVASI)			
		9. Workshop Penyusunan *Voluntary Local Review* (VLR) Kabupaten/Kota			
		10. Menyusun draf Monev capaian SDGs tahun 2026			
		11. *Sosialisasi North Sumatra SDGs Action Award 2027* (Indikator RAD TPB/SDGs, VLR dan Laporan Monev)			
	2027	1. Pembangunan aplikasi e-Monev SDGs (INOVASI)			
		2. Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 2026			
		3. *Forum Business Registration System* (BRS)			
		4. *North Sumatra SDGs Action Award* 2027 (Indikator RAD TPB/SDGs, VLR dan Laporan Monev)			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
		5. Desk capaian pelaksanaan program unggulan tematik berbasis lokus prioritas SDGs Tahun 2026			
		6. Workshop Penyusunan *Voluntary Local Review* (VLR) Kabupaten/Kota			
		7. Menyusun draf Monev capaian SDGs tahun 2027			
		8. Sosialisasi penyusunan rancang bangun Integrasi Satu Data SDGs Provinsi Sumatera Utara (INOVASI)			
	2028	1. Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 2027			
		2. Finalisasi aplikasi e-Monev SDGs.			
		3. Penyusunan rancang bangun Integrasi Satu Data SDGs Provinsi Sumatera Utara (INOVASI)			
		4. *North Sumatra SDGs Action Award* 2028			
		5. *Launching* aplikasi e-Monev SDGs			
		6. Diseminasi pemanfaatan aplikasi e-Monev SDGs			
		7. Desk capaian pelaksanaan program unggulan tematik berbasis lokus prioritas SDGs Tahun 2027			
		8. Workshop Penyusunan *Voluntary Local Review* (VLR) Kabupaten/Kota			
		9. Menyusun draf Monev capaian SDGs tahun 2028			
	2029	1. Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 2028			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
		2. Pelaksanaan Skema BRS			
		3. Finalisasi integrasi Satu Data SDGs pada aplikasi SADAINA			
		4. Launching integrasi Satu Data SDGs pada aplikasi SADAINA			
		5. Diseminasi pemanfaatan aplikasi e-Monev SDGs			
		6. Desk capaian pelaksanaan program unggulan tematik berbasis lokus prioritas SDGs Tahun 2028			
		7. Penyusunan rancang bangun Integrasi Satu Data SDGs Provinsi Sumatera Utara (INOVASI)			
		8. *North Sumatra SDGs Action Award* 2029			
		9. Pelaksanaan Skema BRS			
		10. Menyusun draf Monev capaian SDGs tahun 2029			
	2030	1. Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 2029			
		2. Desk capaian pelaksanaan program unggulan tematik berbasis lokus prioritas SDGs tahun 2029			
		3. *North Sumatra SDGs Action Award* 2030			
		4. Menyusun Draf Laporan Monev RAD TPB/SGDs Tahun 2026-2030			
		5. Workshop Penyusunan *Voluntary Local Review* (VLR) Kabupaten/Kota			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
		6. Menyusun laporan akhir kegiatan SDGs			
2. Kerjasama APIP dan APH dalam Pendampingan Proyek Strategis dan Kegiatan Unggulan Daerah melalui pendampingan sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan dan serah terima kegiatan proyek strategis	2025	- Penyusunan MoU antara APIP dengan APH (Kejaksaan Tinggi, Kepolisian)	Inspektorat	Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	Inspektorat Kab/Kota: Koordinasi Pengawasan dengan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara terkait pelaksanaan Proyek Strategis yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota
		- Pendampingan Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah		Perangkat Daerah yang memiliki Proyek Strategis	
	2026-2029	- Review Perencanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara			
		- Pendampingan Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara			
		- Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara			
	2030	Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Proyek Strategis Daerah			
PP 11. TRANSFORMASI DIGITAL DAN INOVASI TEKNOLOGI PADA PELAYANAN PUBLIK DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT					
1. Pemanfaatan Satu Data SUMUT pusat data dan informasi pembangunan	2025	1. Tindak lanjut MoU terkait kerjasama teknis dengan BPS dan Diskominfo dalam pembangunan aplikasi Satu Data (SADAINA Reborn)	Dinas Kominfo	Seluruh OPD menginput data statistik sektoral	Replikasi aplikasi, menyediakan SDM, menyiapkan regulasi terkait

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
		2. Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD			
		3. Launching SADAINA Reborn di Konreg PDRB ISEI (BPS dan Diskominfo)			
		4. Updating SK Tim Pelaksana SADAINA			
		5. Diseminasi aplikasi dan tupoksi tim SADAINA			
	2026-2029	1. Pemanfaatan SADAINA Reborn			
		2. Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD			
		3. Forum Satu Data tingkat Daerah			
		4. Proses integrasi Satu Data dengan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Provsu			
		5. Penyusunan Proses Bisnis integrasi SADAINA dan Data Geospasial			
		6. Penyusunan Proses Bisnis integrasi SADAINA dan Data SDGs			
	2030	1. Menyediakan API (*Application Programming Interface*)			
		2. Pemanfaatan SADAINA Reborn			
		3. Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD			
		4. Forum Satu data tingkat Daerah			
		5. Monitoring dan Evaluasi			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
PP13. PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK DAN TRANSPORTASI YANG MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN DAYA SAING					
1. Dukungan pengembangan sistem angkutan umum masal perkotaan melalui pembangunan BRT dan peningkatan kereta commuter	2025	Perhitungan Nilai Aset Lahan oleh Konsultan Appraisal Pengadaan Lahan Depo BRT Mebidang	Dinas Perhubungan	Dinas Kominfo untuk publikasi Media, Dinas PUPR terkait penyelenggaraan Jalan Provinsi (jika trayek melalui jalan provinsi) Dinas LHk untuk penyediaan dokumen lingkungan dan AMDAL, Biro Organisasi membentuk kelembagaan (BLUD) BRT Mebidang, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Inspektorat melaksanakan pengawasan	Dinas Perhubungan Kab/Kota Pelaksana operasional harian, koordinator lapangan. Kota Binjai: Dukungan penetapan lokasi lahan depo BRT Kab. Deli Serdang: Dukungan penetapan lokasi lahan depo BRT
	2026	Pengadaan lahan di Jl Makalona Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur Kota Binjai seluas 12.000 M2 dan Pengadaan lahan di Desa Tanjung Garbus I Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang seluas 4.970 M2			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
		· Pembentukan BLUD/UPT Pengelola Sistem Angkutan Umum Massal BRT			
		· Penyediaan Bus Koridor Terminal Binjai – Medan Mall sejumlah 16 unit			
		· Penyediaan Biaya Operational dan *Maintenance*, biaya Pengelolaan dan Manajemen serta biaya sistem ticketing			
		untuk koridor Terminal Ikan Paus Binjai – Medan Mall			
		· Pembangunan 61 Halte terdiri dari 44 Bus Pole, 16 Halte kecil dan 1 Halte besar			
		Medan, Deli Serdang dan Binjai			
	2027	· Penyediaan biaya OM untuk Koridor Terminal Ikan Puas Kota Binjai – Medan Mall			
		· Penyediaan Biaya Operational dan *Maintenance*, biaya Pengelolaan dan Manajemen serta biaya sistem ticketing untuk koridor Terminal Ikan Paus Binjai – Medan Mall dan koridor Terminal Lubuk Pakam – Amplas			
		· Kebutuhan Bus Koridor Terminal Lubuk Pakam – Amplas sejumlah 15 unit			
		· Halte bus di luar koridor Terminal Lubuk Pakam 46 Halte, terdiri dari 36 Bus Pole, 9 Halte kecil dan 1 Halte besar			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
		Medan, Deli Serdang dan Binjai			
	2028	· Penyediaan Biaya Operational & *Maintenance*, biaya Pengelolaan dan			
		Manajemen serta biaya sistem ticketing untuk Koridor Terminal Ikan Paus Binjai – Medan Mall dan Koridor Terminal Lubuk Pakam – Amplas			
		Medan, Deli Serdang dan Binjai			
	2029	· Penyediaan Biaya Operational & *Maintenance*, biaya Pengelolaan dan			
		Manajemen serta biaya sistem ticketing untuk Koridor Terminal Ikan Paus Binjai – Medan Mall dan Koridor Terminal Lubuk Pakam – Amplas			
		Medan, Deli Serdang dan Binjai			
	2030	Penyediaan Biaya Operational & *Maintenance*, biaya Pengelolaan dan			
		Manajemen serta biaya sistem ticketing untuk Koridor Terminal Ikan Paus Binjai			
		– Medan Mall dan Koridor Terminal Lubuk Pakam – Amplas			
		Medan, Deli Serdang dan Binjai			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
2. Subsidi Transportasi Bus Perintis untuk daerah-daerah terpencil	2025	Pembentukan tim pelaksana dan koordinasi K/L terkait dan stakeholder terkait, pengadaan/sewa di 3 kab/kota, sosialisasi bus perintis.	Dinas Perhubungan	Dinas Kominfo untuk publikasi Media, Dinas PUPR terkait penyelenggaraan Jalan Provinsi (jika trayek melalui jalan provinsi) Dinas LHk untuk penyediaan dokumen lingkungan dan AMDAL, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Inspektorat melaksanakan pengawasan	· Koordinasi dan Penyediaan Data: Pemerintah kabupaten/kota berperan menyediakan data dan kebutuhan daerah terkait angkutan perintis. serta berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi agar subsidi dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi wilayah terpencil yang membutuhkan akses transportasi.
		Survey teknis rute dan validasi kebutuhan.			· Fasilitasi Pelaksanaan Program: Kabupaten/kota membantu pelaksanaan program subsidi dengan memastikan armada bus perintis dapat beroperasi di wilayahnya, menyediakan dukungan administratif, dan memantau pelaksanaan layanan agar berjalan lancar dan memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu penyediaan fasilitas pendukung untuk kelancaran operasional, berupa lahan untuk titik keberangkatan

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
		Pelaksanaan 28 unit bus perintis di Kab. Deli Serdang (4 bus), Madina (4 bus), Nias Barat (20 bus).			· Penentuan Rute dan Kebijakan Lokal: Pemerintah daerah menetapkan rute bus perintis yang strategis sesuai kebutuhan wilayah dan sinkron dengan program nasional, serta mengeluarkan kebijakan pendukung agar subsidi bisa dimanfaatkan optimal untuk membuka keterisolasian daerah, yaitu pengusulan dan penetapan trayek dan sosialisasi program kepada masyarakat serta Kesiapan infrastruktur jalan di kabupaten dalam kondisi layak dan aman, yang akan dilalui oleh trayek
					· Pengawasan dan Monitoring: Kabupaten/kota melakukan pemantauan operasional bus perintis di lapangan untuk memastikan layanan tetap berjalan dengan baik, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat di daerah terpencil.
	2026	Pengadaan di 2 kab/kota, sosialisasi: Dokumen teknis rute, 8 unit beroperasi			
		di Pakpak Bharat (4 bus) dan Kab. Nias Selatan (4 bus)			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
		Biaya Operasional 28 unit bus perintis di Kab. Deli Serdang (4 bus), Madina (4 bus), Nias Barat (20 bus).			
	2027	Pengadaaan, Pembangunan halte dan fasilitasi dasar, sosialisasi, pengadaan di 2 kab: Halte , 8 unit beroperasi di Kab. Serdang Bedagai dan Kab. Padang Lawas			
		Biaya Operasional 28 unit bus perintis di Kab. Deli Serdang (4 bus), Madina (4 bus), Nias Barat (20 bus).			
		Biaya Operasional 4 unit bus perintis di Pakpak Bharat (4 bus) dan Kab. Nias Selatan (4 bus)			
PP 14. PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN DAN BERKETAHANAN TERHADAP BENCANA					
1. Pembangunan TPST Regional	2025	Identifikasi lokasi potensial pembangunan TPST regional	Dinas PUPR: pelaksana	PUPR:	1. Penyusunan peraturan atau SK terkait pengelolaan sampah terpilah
				· untuk penyiapan dokumen Lingkungan,	2. Penyediaan dan penentuan lokasi
				· dalam pembuatan FS dan DED, dan pembangunan infrastruktur serta pendukungnya,	3. Dukungan pengumpulan sampah terpilah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota
				Dinas LHK:	4. Dukungan pengangkutan sampah terpilah ke tempat pengolahan

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
				· dukungan dalam proses penyusunan dokumen lingkungan hidup	5. Dukungan pemilahan sampah terpilah dan pra pengolahan
				· Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi,	6. Dukungan SDM
				· Dinas Kominfo untuk publikasi media	
	2026	· Penyusunan Studi kelayakan TPST Regional Mebidang dan FGD dengan kabupaten/kota			
		· Pengadaan lahan dan persiapan lokasi (clean and clear)			
		· Dokumen peta jalan pengelolaan persampahan TPST Regional			
	2027	Penyusunan FS DED Lingkungan Hidup (AMDAL) TPST Regional Mebidang			
	2028	Pembangunan infrastruktur			
	2029	Operasional dan Pelatihan SDM Pengelola TPST			
	2030	Monitoring dan Evaluasi serta Pengembangan			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
2. Pembangunan PLTSa	2025	1. Inventarisir potensi kerja sama antara Pemprov dan DUDI potensial untuk menyediakan infrastruktur teknologi	DISPERINDAG ESDM	• PUPR: Pembangunan TPST	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan:
		2. Koordinasi teknis lintas OPD (PUPR dan LHK) dan kabupaten/kota (Medan dan Deli Serdang)		• LHK: Pengelolaan Sampah • Dinas Kominfo: Dukungan Publikasi Kegiatan	Lahan dan wilayah untuk pembangunan PLTSa, Penerapan Sistem Persampahan Terpilah
		3. Kawasan Perkotaan (STM Hilir) atau dekat dengan TPST dari tahun 2025-2030			Perizinan
					1. Penyusunan peraturan atau SK terkait pengelolaan sampah terpilah
					2. Penyediaan dan penentuan lokasi
					3. Dukungan pengumpulan sampah terpilah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota
					4. Dukungan pengangkutan sampah terpilah ke tempat pengolahan
					5. Dukungan pemilahan sampah terpilah dan pra pengolahan
					6. Dukungan SDM
	2026	Kajian Potensi PLTSa			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
		- Kawasan Perkotaan (STM Hilir) atau dekat dengan TPST dari tahun 2025-2030			
	2027	Pra FS Pembangunan PLTSa			
		- Kawasan Perkotaan (STM Hilir) atau dekat dengan TPST dari tahun 2025-2030			
	2028	Penyusunan FS Pembangunan PLTSa			
		- Kawasan Perkotaan (STM Hilir) atau dekat dengan TPST dari tahun 2025-2030			
	2029	Penjajakan pembiayaan (Investor, KPBU, Hibah, dsb) dan MoU dengan PLN terkait pembelian daya listrik			
		- Kawasan Perkotaan (STM Hilir) atau dekat dengan TPST dari tahun 2025-2030			
	2030	Pembangunan PLTSa serta pengelolaan pemanfaatan residu			
		- Kawasan Perkotaan (STM Hilir) atau dekat dengan TPST dari tahun 2025-2030			
3. Pengembangan SPAL Regional	2025	Penguatan DED optimalisasi IPAL/IPLT Regional yang sudah ada	Dinas PUPR	Dinas LHK untuk penyediaan dokumen lingkungan dan AMDAL, PDAM dalam peningkatan layanan, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Dinas	1. Perencanaan tata ruang (PKP Tata Ruang)
		· Wilayah padat penduduk seperti Medan, Deli Serdang, Kab Toba dan Kab Simalungun			2. Membuat regulasi dan menerbitkan perizinan (LHK, DPMPTSP)
					3. Sosialisasi kepada masyarakat (Dinas Kesehatan)
					4. Dukungan penyediaan lahan (PKP Tata Ruang)

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
				kominfo untuk publikasi media	5. Menyediakan alokasi anggaran (BKAD)
					6. Pembentukan kelembagaan untuk mengelola operasional IPLT (Biro Organisasi)
	2026	Optimalisasi IPLT Regional Cemara serta Supervisi Peningkatan Kapasitas IPLT Regional Cemara			
		· Wilayah padat penduduk seperti Medan, Deli Serdang			
	2027	Optimalisasi IPAL/IPLT Regional Ajibata yang sudah ada			
		· Wilayah padat penduduk seperti Kota Medan, Kab. Deli Serdang, Kab. Toba dan Kab. Simalungun			
	2028	Pembinaan operasional IPAL/IPLT Regional			
		· Wilayah padat penduduk seperti Medan, Deli Serdang, Kab Toba dan Kab Simalungun			
	2029	Operasional penuh SPAL Regional, Pemantauan kinerja IPAL dan kualitas air serta evaluasi akhir			
		· Wilayah padat penduduk seperti Medan, Deli Serdang, Kab Toba dan Kab Simalungun			
	2030	Penyusunan rencana ekspansi wilayah replikasi			
		· Wilayah padat penduduk seperti Medan, Deli Serdang, Kab Toba dan Kab Simalungun			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
PP 15. MELANJUNTUKAN PEMBANGUNAN BERBASIS DESA					
1. Peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi pengelola BUMDes.	2025	Pendataan BUMDes/BUMDesma yang akan menerima pemanfaatan kegiatan		Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	- Menugaskan tenaga pendamping desa atau penyuluh ekonomi untuk mendampingi operasional BUMDes.
		· 27 Kabupaten/kota yang memiliki desa		Disperindag, Dinas Koperasi UMKM, (Dukungan Pelatihan dan Keterampilan bagi pengelola Bumdes/Masyarakat Desa).	- Memfasilitasi akses internet dan teknologi informasi untuk mendukung pemasaran digital.
					- Memfasilitasi sertifikasi kompetensi pengelola BUMDes melalui lembaga pelatihan resmi.
	2027-2030	- Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi pengelola BUMDes/BUMDesma			
		- Monitoring dan Evaluasi kegiatan			
		• 27 Kabupaten/kota yang memiliki desa			
PP 16. MENINGKATKAN KETAHANAN SOSIAL DAN BUDAYA YANG MENDUKUNG SUASANA YANG HARMONIS, TOLERAN DAN RUKUN					

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
1. Bantuan Hibah Rumah Ibadah di 33 Kabupaten/Kota	2025	- Penyusunan perubahan Pergub Hibah Rumah Ibadah dengan mekanisme penyaluran hibah yang memuat alokasi terhadap biaya operasional pengelola dan sarpras rumah ibadah Tahun 2025	Biro KESRA	Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	
		- Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030		Inspektorat (pendampingan menyeluruh dan review terhadap tata kelola pemberian bantuan hibah rumah ibadah)	
		- Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030			
		· 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara			
	2026-2030	- Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030			
		- Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030			
		· 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara			

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
2. Edukasi dan Pembekalan Solidaritas, Ketahanan Sosial Dan Wawasan Kebangsaan bagi Organisasi Masyarakat Dan Kelompok Masyarakat	2028	- Pendataan Sasaran Ormas dan Kelompok masyarakat pada daerah rawan konfilk di Sumatera Utara di Tahun 2028		Dinas Pendidikan (Koordinasi rekomendasi satuan pendidikan yang membutuhkan pembekalan terhadap edukasi wawasan kebangsaan)	Replikasi pelaksanaan kegiatan Edukasi dan Pembekalan Solidaritas, Ketahanan Sosial Dan Wawasan Kebangsaan bagi Organisasi Masyarakat Dan Kelompok Masyarakat di Kabupaten/kota
		- Pelaksanaan Kegiatan edukasi wawasan kebangsaan dan Solidaritas bagi Ormas Tahun 2028		Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	
		- Monitoring dan Evaluasi Tahun 2028			
		Kabupaten Medan, Deli Serdang, Tebing Tinggi, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Mandailing Natal, Paluta, Padang Lawas, Binjai			
	2030	- Pendataan Sasaran Ormas dan Kelompok masyarakat pada daerah rawan konfilk di Sumatera Utara di Tahun 2030			
		- Pelaksanaan Kegiatan edukasi wawasan kebangsaan dan Solidaritas bagi Ormas Tahun 2030			
		- Monitoring dan Evaluasi Tahun 2030			
		Kota Medan, Deli Serdang, Tanjungbalai, Binjai, Karo, Langkat, Mandailing Natal, Batu Bara, Serdang Bedagai, P.Sidempuan			
PP 17. TERCIPTANYA KEHIDUPAN YANG LEBIH AMAN DAN TERTIB					

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KAB/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
1. Patroli Gabungan untuk Narkoba di Pintu Masuk Narkoba dan Kawasan-Kawasan Kenakalan Remaja (genk motor).	2025	- Pembentukan SK Gubernur tentang Tim Patroli Gabungan Tahun 2025	Satpol PP	Kesbangpol (Penyediaan data dan peta daerah rawan narkoba)	Melakukan koordinasi dengan Satpol PP Kabupaten/Kota terkait dukungan personel dalam pelaksanaan kegiatan.
		- Pelaksanaan Rapat Teknis terkait Pelaksanaan Patroli gabungan dengan Stakeholder terkait Tahun 2025		Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	Kesbangpol (Penyediaan data dan peta daerah rawan narkoba di kab/kota)
		- Pelaksanaan Patroli Gabungan Gank motor dan Pencegahan Pengedaran Narkoba di Pintu Masuk Narkoba Tahun 2025			
		Medan, Binjai, Deli Serdang, Tanjungbalai , Asahan, dan Langkat			
	2026-2030	- Pelaksanaan Patroli Gabungan Gank motor dan Pencegahan Pengedaran Narkoba di Pintu Masuk Narkoba Tahun 2026			
		- Pembinaan hasil Patroli Gabungan Tahun 2026			
		Medan, Binjai, Deli Serdang, Tanjungbalai , Asahan, dan Langkat			

4.3. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja didefinisikan sebagai keluaran atau hasil dari suatu kegiatan atau program yang telah atau akan dicapai terkait dengan penggunaan anggaran, dengan ukuran kuantitas dan kualitas yang dapat diukur. Indikator merupakan tanda yang berfungsi sebagai alat untuk mengukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, sasaran, atau tujuan, yang dapat berupa keluaran (*output*), hasil (*outcome*), atau dampak (*impact*). Dampak *(impact*) mengacu pada kondisi yang ingin diubah sebagai hasil dari pembangunan atau layanan yang diperoleh melalui pencapaian hasil (*outcome*) dari beberapa program. Sementara itu, hasil (*outcome*) adalah kondisi yang ingin dicapai atau dipertahankan oleh penerima manfaat dalam periode waktu tertentu, yang mencerminkan keberhasilan keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Indikator Makro Sasaran Pembangunan, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029 sebagai berikut.

Tabel 4. 7
Penyelarasan Indikator Makro Sasaran Pembangunan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029

No.	Indikator	Satuan	RPJMN			RPJMD Provinsi Sumatera Utara			RPJMD Kabupaten Deli Serdang			Keterangan
			Baseline 2024	Target 2025	Target 2029	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029	
01.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,05	5,30	8,00	5,03	5,20-5,60	7,60-8,00	5,36	5,40-5,80	5,72 - 6,12	
02.	GNI per Kapita	USD / Rp. Juta	4.870 (2023)	5.410	8.000	73,57	78,40	115,30	73,93	76,44	111,23	PDRB per Kapita
03.	Kontribusi PDB Maritim/ Kontribusi PDRB Provinsi	Persen	7,9 (2022)	8,1	9,1	5,2	5,2	5,3	13,20	13,22	13,21	Kontribusi PDRB Kabupaten
04.	Tingkat Kemiskinan	Persen	9,03	7,0 - 8,0	4,5 - 5,0	7,19	6,96 - 7,46	2,82- 3,82	3,44	3,44-3,25	3,28 - 3,05	
05.	Rasio Gini	Poin	0,379	0,378 - 0,382	0,372 - 0,375	0,306	0,303 - 0,305	0,287-0,291	0,262	0,262 - 0,260	0,254 - 0,252	
06.	Indeks Modal Manusia	Poin	0,54 (2020)	0,56	0,59	N/A	0,54	0,57	77,56	78,40-78,80	83,00-83,30	IPM
07.	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	34,09 (2022)	35,53	45,17	N/A	1	16,88	n/a	186.964,849	306.667,290	ton CO2eq
08.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	72,54 (2023)	76,49	77,20	73,96	77,20	77,87	63,45	72,50	73,35	
09.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,91	4,50-5,00	4,00 - 4,71	5,60	5,27 - 5,56	4,74 - 5,20	8,02	7,98-7,65	7,59-7,12	

Tabel 4. 8
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2030

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	76,78	77,86	78,40	78,93	79,47	80,01	80,55
2	Indeks Profesionalitas ASN	poin	72,11	73,00	74,00	75,00	76,00	77,00	78,00
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	poin	90,25	90,45	90,50	90,70	91,00	91,20	91,25
4	Indeks SPBE/Indeks Pemerintah Digital	poin	3,57/n/a	4,08/1,60	4,13/1,60	4,17/1,80	4,22/1,80	4,26/2,00	4,31/2,00
5	Indeks Pelayanan Publik	angka	4,53	4,55	4,57	4,60	4,62	4,64	4,66
6	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	nilai	71,79	72,00	73,00	74,00	75,00	76,00	77,00
7	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP	level	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00
8	Opini BPK	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	Persentase Desa Mandiri	persen	7,10	23,15	26,31	29,47	32,63	35,79	38,95
10	Indeks Pembangunan Manusia	poin	77,56	78,40-78,80	79,30-79,80	80,20-80,70	81,80-82,30	83,00-83,30	83,50-84,00
11	Umur Harapan Hidup	tahun	73,81	73,81 - 73,91	73,86 - 73,96	73,91 - 74,01	73,96 - 74,06	74,01 - 74,11	74,06 - 74,16
12	Prevalensi stunting	persen	19,60	18,00	17,00	16,00	15,00	14,00	13,00

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
13	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	tahun	10,29	10,58 - 10,93	10,70 - 11,07	10,83 - 11,22	10,96 - 11,36	11,09 - 11,51	11,21 - 11,65
14	Harapan lama sekolah	tahun	13,40	13,49 - 13,69	13,55 - 13,76	13,62 - 13,84	13,69 - 13,92	13,76 - 14,00	13,82 - 14,07
15	Indeks Pembangunan Keluarga	poin	62,41	62,41 - 65,41	63,91 - 66,91	65,41 - 68,41	66,91 - 69,91	68,41 - 71,41	69,91 - 72,91
16	Indeks Ketimpangan Gender	poin	0,294	0,294-0,266	0,280-0,260	0,270-0,250	0,260-0,240	0,250-0,230	0,240-0,220
17	Cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan	persen	85,55	98,60	98,70	98,80	98,90	99,00	99,00
18	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten	persen	29,04	30,00	31,50	33,50	36,00	39,00	42,50
19	PDRB Per Kapita	Rp. Juta	73,93	76,44	85,14	93,84	102,53	111,23	119,93
20	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	5,36	5,40-5,80	5,48-5,88	5,56-5,96	5,64-6,04	5,72 - 6,12	5,80-6,20
21	Gini Ratio	angka	0,262	0,262 - 0,260	0,259 - 0,257	0,257 - 0,255	0,255 - 0,253	0,254 - 0,252	0,251 - 0,249
22	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	8,02	7,98-7,65	7,50-7,20	7,30-7,00	7,10-6,80	7,59-7,12	6,80-6,50
23	Tingkat Kemiskinan	persen	3,44	3,44-3,25	3,40-3,20	3,36 - 3,15	3,32 - 3,10	3,28 - 3,05	3,24 - 3,00
24	Tingkat Inflasi	persen	1,80	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
25	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	persen	17,79	17,89	17,94	18,09	18,24	18,39	18,54
26	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	persen	28,95	29,31	29,67	30,03	30,39	30,75	31,11
27	Rasio PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	persen	11,00	11,17	11,35	11,52	11,69	11,86	12,04
28	Rasio Kewirausahaan	persen	2,52	2,61	2,71	2,81	2,91	3,01	3,11
29	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	persen	n/a	0,233	0,234	0,235	0,236	0,237	0,238
30	Realisasi Investasi	Rupiah	6.888.541.470.000,00	7.033.188.313.200,00	7.187.918.456.090,40	7.353.240.580.580,48	7.529.718.354.514,41	7.717.961.313.377,27	7.918.628.307.525,08
31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	persen	0,585	0,580 - 0,612	0,587 - 0,627	0,594 - 0,642	0,601 - 0,657	0,608 - 0,672	0,615 - 0,086
32	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	persen (juta rupiah / tenaga kerja)	89,22	91,72	94,32	97,07	99,87	102,82	105,92
33	Indeks Ketahanan Pangan	angka	86,20	87,30	87,55	87,80	88,05	88,30	88,56
34	Indeks Rasa Aman	angka	83,15	83,47	83,78	84,10	84,42	84,73	85,05
35	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	63,45	72,50	72,67	72,84	73,02	73,19	73,36

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
36	Indeks Infrastruktur	poin	n/a	75,00	78,00	80,00	82,00	84,00	86,00
37	Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	poin	n/a	61,00	62,00	63,00	64,00	65,00	66,00
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama	skor	80,04	80,99	81,94	82,89	83,84	84,79	85,74
39	Indeks Perlindungan Anak	angka	n/a	61,20	61,25	61,50	61,75	62,00	62,25
40	Indeks Risiko Bencana	poin	107,20	106,68	106,12	105,56	105,00	104,44	103,88
41	Persentase sampah terkelola	persen	61,38	61,50	62,00	64,00	66,00	68,00	70,00

Tabel 4. 9
Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2030

No.	Indikator	Satuan	Base line (2024)	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI										
1	Indeks Ketahanan Pangan	angka	86,20	87,30	87,55	87,80	88,05	88,30	88,56	
2	Prevelensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Udernourishment)	Persen	n/a	9,50 - 9,00	9,15 - 8,65	8,80 - 8,30	8,45 - 7,95	8,10 - 7,60	7,75 - 7,25	
3	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	Persen	n/a	0,18	0,20	0,25	0,50	0,75	1,00	
4	Kapasitas Air Baku	m3/detik	n/a	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	
5	**Indeks Kuallitas Lingkungan Hidup Daerah**	**poin**	**63,45**	**72,50**	**72,67**	**72,84**	**73,02**	**73,19**	**73,36**	
6	Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak	Persen	83,82	84,60	85,38	86,24	87,11	87,97	88,75	
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	61,30	61,50	62,00	64,00	66,00	68,00	70,00	
8	**Penurunan Emisi GRK**	**ton CO2eq**	**n/a**	**186.964,849**	**211.201,730**	**239.378,080**	**272.367,530**	**306.667,290**	**330.904,170**	
9	Indeks Risiko Bencana	poin	107,20	106,68	106,12	105,56	105,00	104,44	103,88	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
1	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**Persen**	**5,36**	**5,40-5,80**	**5,48-5,88**	**5,56-5,96**	**5,64-6,04**	**5,72 - 6,12**	**5,80-6,20**	

No.	Indikator	Satuan	Base line (2024)	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	**Tingkat Kemiskinan**	**Persen**	**3,44**	**3,44-3,25**	**3,40-3,20**	**3,36 - 3,15**	**3,32 - 3,10**	**3,28 - 3,05**	**3,24 - 3,00**	
3	**PDRB Per Kapita**	**Rp Juta**	**73,93**	**76,44**	**85,14**	**93,84**	**102,53**	**111,23**	**119,93**	
4	**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**	**%**	**8,02**	**7,98-7,65**	**7,50-7,20**	**7,30-7,00**	**7,10-6,80**	**7,59-7,12**	**6,80-6,50**	
5	**Indeks Gini**	**angka**	**0,262**	**0,262 - 0,260**	**0,259 - 0,257**	**0,257 - 0,255**	**0,255 - 0,253**	**0,254 - 0,252**	**0,251 - 0,249**	
6	**Indeks Pembangunan Manusia**	**angka**	**77,56**	**78,40-78,80**	**79,30-79,80**	**80,20-80,70**	**81,80-82,30**	**83,00-83,30**	**83,50-84,00**	
7	Umur Harapan Hidup	tahun	73,81	73,81 - 73,91	73,86 - 73,96	73,91 - 74,01	73,96 - 74,06	74,01 - 74,11	74,06 - 74,16	
8	Indeks Pencapian SPM Kesehatan	indeks	93,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
9	Prevalensi Stunting	Persen	19,60	18,00	17,00	16,00	15,00	14,00	13,00	
10	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	10,29	10,58 - 10,93	10,70 - 11,07	10,83 - 11,22	10,96 - 11,36	11,09 - 11,51	11,21 - 11,65	
11	Harapan Lama Sekolah	tahun	13,40	13,49 - 13,69	13,55 - 13,76	13,62 - 13,84	13,69 - 13,92	13,76 - 14,00	13,82 - 14,07	
12	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	60,30	61,23	62,19	63,65	65,66	68,27	69,36	
13	Literasi membaca	Persen	n/a	55,33 - 55,53	56,20 - 56,44	57,08 - 57,36	57,95 - 58,27	58,83 - 59,19	59,70 - 60,10	
14	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten	Persen	29,04	30,00	31,50	33,50	36,00	39,00	42,50	
15	Indeks Kerukunan Umat Beragama	skor	80,04	80,99	81,94	82,89	83,84	84,79	85,74	
16	Indeks Perlindungan Anak	angka	n/a	61,20	61,25	61,50	61,75	62,00	62,25	
17	Indeks Pemenuhan Hak Anak	angka	57,51 (2023	57,85	57,95	58,10	58,20	58,40	58,60	
18	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	0-100	n/a	60,32 - 71,12	60,57 - 71,12	60,82 - 71,12	61,07 - 71,12	61,32 - 71,12	61,57 - 71,12	
19	Indeks Pembangunan Keluarga	poin	62,41	62,41 - 65,41	63,91 - 66,91	65,41 - 68,41	66,91 - 69,91	68,41 - 71,41	69,91 - 72,91	

No.	Indikator	Satuan	Base line (2024)	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
20	Indeks Ketimpangan Gender	poin	0,294	0,294-0,266	0,280-0,260	0,270-0,250	0,260-0,240	0,250-0,230	0,240-0,220	
21	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	Persen	n/a	22,25 - 23,50	23,87 - 25,18	25,49 - 26,87	21,11 - 28,55	28,74 - 30,24	30,36 - 31,92	
22	Kasus kematian ibu	orang	20	15	12	10	9	8	7	
23	Angka kematian bayi (Per 1000 KH)	Per 1000 KH	2,22	1,98	1,84	1,70	1,56	1,42	1,39	
24	Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage)	Persen	n/a	91	91	91	91	91	91	
25	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	n/a	90	90	90	90	90	90	
26	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Persen	85,55	98,60	98,70	98,80	98,90	99,00	99,00	
27	Numerasi	Persen	n/a	44,83 - 46,11	45,62 - 46,90	46,42 - 47,69	47,22 - 48,48	48,02 - 49,28	48,82 - 50,07	
28	Persentasi Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Cagar budaya (Benda dan Tak Benda)	Persen	n/a	50,00 - 65.00	51,75 - 66,25	53,50 - 67,50	55,25 - 68,75	57.00 - 70.00	58,75 - 71,25	
ASPEK DAYA SAING DAERAH										
1	**Rasio PDRB Industri Pengolahan**	Persen	**28,95**	**29,31**	**29,67**	**30,03**	**30,39**	**30,75**	**31,11**	
2	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	Persen	2,67	2,36-2,53	2,49 - 2,67	2,63 - 2,82	2,76 - 2,97	2,90 - 3,12	3,04 - 3,26	
3	Rasio Kewirausahaan	Persen	2,52	2,61	2,71	2,81	2,91	3,01	3,11	

No.	Indikator	Satuan	Base line (2024)	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	67,57	68,00	68,50	69,20	69,70	70,00	70,30	
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	53,21	51,25-53,88	51.99-54.64	52.73-55.39	53.46-56.15	54.20-56.90	54.94-57.66	
6	**Indeks Inovasi Daerah**	**skor**	**60,65**	**67,49 - 67,94**	**68,20 - 69,10**	**68,91 - 70,26**	**69,62 - 71,42**	**70,33 - 72,58**	**71,04 - 73,74**	
7	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	11,13	11,22	11,31	11,40	11,49	11,58	11,67	
8	Rasio PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	Persen	11,00	11,17	11,35	11,52	11,69	11,86	12,04	
9	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka	n/a	58,30	59,60	60,89	62,19	63,48	64,78	
10	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	34,09	32,00 - 31,00	31,77 - 30,77	31,54 - 30,54	31,31 - 30,31	31,09 - 30,09	30,86 - 29,86	
11	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB		5,00 - 7,00	5,65 - 7,65	6,30 - 8,30	6,95 - 8,95	7,60 - 9,60	8,25 - 10,25	
12	Indeks Infrastruktur	poin	n/a	75,00	78,00	80,00	82,00	84,00	86,00	
13	Rumah Tangga dengan akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen		40,95	43,45	45,95	48,45	50,95	53,45	
14	Persentase Desa Mandiri	Persen	7,10	23,15	26,31	29,47	32,63	35,79	38,95	
15	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0,585	0,580 - 0,612	0,587 - 0,627	0,594 - 0,642	0,601 - 0,657	0,608 - 0,672	0,615 - 0,086	
16	Tingkat Inflasi	Persen	1,80	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	
17	Realisasi Investasi	Rupiah	6.888.541.470.000,00	7.033.188.313.200,00	7.187.918.456.090,40	7.353.240.580.580,48	7.529.718.354.514,41	7.717.961.313.377,27	7.918.628.307.525,08	
18	Tingkat penghunian kamar	Persen	n/a	31,00-32,00	1.90-32.90	32.80-33.80	33.70-34.70	34.60-35.60	35.50-36.50	

No.	Indikator	Satuan	Base line (2024)	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
19	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian	Persen	n/a	10	11	12	13	14	15	
20	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	Persen	n/a	0,233	0,234	0,235	0,236	0,237	0,238	
21	Persentase Belanja Riset dan Inovasi	Persen	n/a	1,05	1,21 - 1,24	1,37 - 1,44	1,53 - 1,64	1,69 - 1,84	1,85 - 2,03	
22	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	17,79	17,89	17,94	18,09	18,24	18,39	18,54	
23	Rasio PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	Persen	11,00	11,17	11,35	11,52	11,69	11,86	12,04	
24	Proporsi kontribusi PDRB Kabupaten	Persen	13,20	13,22	13,22	13,22	13,21	13,21	13,21	
25	IKAD		2,79	2,89	2,93	2,98	3,03	3,07	3,10	
ASPEK PELAYANAN UMUM										
1	Indeks SPBE/Indeks Pemerintah Digital	Poin	3,57/n/a	4,08/1,60	4,13/1,60	4,17/1,80	4,22/1,80	4,26/2,00	4,31/2,00	
2	Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,53	4,55	4,57	4,60	4,62	4,64	4,66	
3	Indeks Integritas Nasional	Poin	64,70	66,78	67,46	68,15	68,83	69,51	70,20	
4	Persentase Penegakan Perda	Persen	100	70,00	71,50	73,00	74,50	76,00	77,50	
5	Persentase Capaian Aksi HAM	Persen	92	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	
6	Indeks Demokrasi Indonesia		n/a	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	
7	Indeks Rasa Aman	angka	83,15	83,47	83,78	84,10	84,42	84,73	85,05	

No.	Indikator	Satuan	Base line (2024)	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
8	Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	poin	n/a	61,00	62,00	63,00	64,00	65,00	66,00	
9	Indeks Daya Saing Daerah		3,74	3,80	3,86	3,92	3,98	4,04	4,10	
10	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	76,78	77,86	78,40	78,93	79,47	80,01	80,55	
11	Indeks Profesionalitas ASN	poin	72,11	73,00	74,00	75,00	76,00	77,00	78,00	
12	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	poin	90,25	90,45	90,50	90,70	91,00	91,20	91,25	
13	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP	level	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	
14	Opini BPK	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
15	Indeks Reformasi Hukum	Persen	n/a	60-70	61.50-71.50	63.00-73.00	64.50-74.50	66.00-76.00	67.50-77.50	
16	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Persen	71,79	72,00	73,00	74,00	75,00	76,00	77,00	
17	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	skor	n/a	3,08	3,10	3,12	3,15	3,17	3,19	
18	Jumlah kerja sama provinsi/kabupaten/kota kembar/Bersaudara (Sister Province/ Sister City)	provinsi/kabupaten/ kota	n/a	3-5	4-6	4-7	5-7	5-8	6-9	
19	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	indeks	n/a	67,00	68,00	69,00	70,00	71,00	72,00	
INDIKATOR KINERJA KUNCI										

No.	Indikator	Satuan	Base line (2024)	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
A	**Pendidikan**									
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	68.17	71.38	74.42	77.45	80.49	83.46	86.43	Dinas Pendidikan
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	98,93	99.13	99.33	99.53	99.73	99.80	99.80	Dinas Pendidikan
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	96,95	97.52	98.09	98.65	99.22	99.43	99.43	Dinas Pendidikan
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yangberpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	24,15	29.13	34.11	39.08	44.06	49.04	54.02	Dinas Pendidikan
B.	**Kesehatan**									
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	per 1.000 penduduk	1,5	1,55	1,68	1,82	1,98	2,15	2,37	Dinas Kesehatan
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	96	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	95,76	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

No.	Indikator	Satuan	Base line (2024)	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	94,03	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	96,62	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	98,46	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	97	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	87,31	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	99,65	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	91,65	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	86,69	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

No.	Indikator	Satuan	Base line (2024)	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	75,24	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	103,4	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	107,86	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
C	**Pekerjaan umum dan Penataan Ruang**									
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi;		0,800	1	1	1	1	1	1	Dinas SDA BMBK
2	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	78,24	79	80	80,5	81	81,5	82	Dinas CKTR

No.	Indikator	Satuan	Base line (2024)	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
3	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic;	Persen	83,82	84,60	85,38	86,24	87,11	87,97	88,75	Dinas CKTR
4	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas CKTR
5	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota;	Persen	76,34	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00	82,00	Dinas SDA BMBK
6	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi;		0,019	1	1	1	1	1	1	Dinas SDA BMBK
7	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi		1	1	1	1	1	1	1	Dinas SDA BMBK
D	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**									
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Perkimtan
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Persen	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perkimtan
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di	Persen	2,10	22,17	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	Dinas Perkimtan

No.	Indikator	Satuan	Base line (2024)	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
	kabupaten/kota yang ditangani									
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	2,06	1,97	1,88	1,8	1,71	1,63	1,56	Dinas Perkimtan
5	Persentase peningkatan rumah layak huni dan terjangkau	Persen	1,60	1,20	2,39	2,39	2,41	2,42	2,43	Dinas Perkimtan
6	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	5,06	8,17	7,69	7,27	6,91	6,58	6,29	Dinas Perkimtan
E	**Ketrentaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**									
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan;	Persen	80	83	84	85	86	87	88	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	60	70	71,5	73	74,5	76	77	Satuan Polisi Pamong Praja
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana;	Persen	100	100	100	100	100	100	100	BPBD
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;	Persen	100	100	100	100	100	100	100	BPBD

No.	Indikator	Satuan	Base line (2024)	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;	Persen	100	100	100	100	100	100	100	BPBD
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	10,23	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
8	Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Non Kebakaran	Kegiatan	230	230	230	230	230	230	230	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
9	Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran	Kelompok	9	10	10	10	10	10	10	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
10	Kegiatan Pelaksanaan PAM	Kegiatan	0	30	30	30	30	30	30	
F	**Sosial**									

No.	Indikator	Satuan	Base line (2024)	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota;	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
G	**Tenaga Kerja**									
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	persen	100	100	100	100	100	100	100	Disnaker
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	persen	89,50	87,00	88,00	89,00	90,00	91,00	92,00	Disnaker
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	persen (juta rupiah / tenaga kerja)	89,22	91,72	94,32	97,07	99,87	102,82	105,92	Disnaker

No.	Indikator	Satuan	Base line (2024)	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	persen	72,03	73,00	74,00	75,00	76,00	77,00	78,00	Disnaker
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota;	persen	61,70	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00	Disnaker
H	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**									
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	12,67	12,00	12,00	12,50	12,60	12,61	12,67	Dina P3AP2KB
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dina P3AP2KB
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen	3,86	3,77	3,67	3,57	3,48	3,38	3,28	Dina P3AP2KB
I	**Pangan**									
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras);	Persen	159,55	160,55	161,55	162,55	163,55	164,55	165,55	Dinas Ketapang
J	**Pertanahan**									

No.	Indikator	Satuan	Base line (2024)	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas CKTR
K	**Lingkungan Hidup**									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Poin	63,45	72,50	72,67	72,84	73,02	73,20	73,38	Dinas Lingkungan Hidup
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Persen	61,38	65	66	67	68	69	70	Dinas Lingkungan Hidup
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Pelaku Usaha	16	30	35	40	45	50	55	Dinas Lingkungan Hidup
L	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**									
1	Perekaman KTP elektronik	Persen	99,00	99,40	99,50	99,60	99,70	99,80	99,90	Disdukcapil
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	28	30	35	40	45	50	55	Disdukcapil
3	Kepemilikan akta kelahiran usia 0-17 Tahun	Persen	100	92	94	96	98	99	100	Disdukcapil

No.	Indikator	Satuan	Base line (2024)	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
4	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama;	OPD	6	7	10	15	22	30	49	Disdukcapil
M	**Pemberdayaan Masyarakat dan desa**									
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persen	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PMD
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	2,63	2.30	11,11	20,00	25,00	33,33	35,00	Dinas PMD
N	**Pengendalian penduduk dan keluarga berencana**									
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	2,3	2,27	2,25	2,23	2,2	2,15	2,1	
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	69,31	61,5	61,7	61,8	62	62,1	62,3	DP3AP2KB
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	8,05	8,1	8,16	8,3	8,45	8,65	8,7	DP3AP2KB
O	**Perhubungan**									
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Persen	50	51	52	53	54	55	56	Dinas Perhubungan
2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	Angka	0,33	0,40	0,39	0,38	0,37	0,36	0,35	Dinas Perhubungan

No.	Indikator	Satuan	Base line (2024)	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
P	**Komunikasi dan Informatika**									
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo;	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Diskominfostan
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi;	Persen	36,36	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	Diskominfostan
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota;	Persen	82,57	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00	90,00	Diskominfostan
Q	**Koperasi, usaha kecil dan menengah**									
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas;	Persen	2,41	2,91	3,41	3,91	4,41	4,91	5,41	Diskop UKM
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha;	Persen	2,52	2,61	2,71	2,81	2,91	3,01	3,11	Diskop UKM
R	**Penanaman Modal**									
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota;	Persen	56,07	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	DPMPTSP
S	**Kepemudaan dan Olahraga**									

No.	Indikator	Satuan	Base line (2024)	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri;	Persen		25	28	31	34	37	40	Disbudporapar
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan;	Persen		30	33	36	39	42	45	Disbudporapar
3	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	61	100	105	110	115	120	125	
T	**Statistik**									
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	61,11	62	64	66	68	70	72	Diskominfostan
2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah;	Persen	61,11	63	65	67	69	71	75	Diskominfostan
U	**Persandian**									
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah;	OPD	0	2	5	7	9	10	11	Diskominfostan
V	**Kebudayaan**									
1	Terlestarikannya Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak benda	persen	23	25	27	29	32	34	36	Disbudporapar
W	**Perpustakaan**									
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	65,59	66,9	68,91	71,66	75,25	79,76	85,35	Disperpus Arsip

No.	Indikator	Satuan	Base line (2024)	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	60,30	61,23	62,19	63,65	65,66	68,27	69,36	Disperpus Arsip
X	**Kearsipan**									
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	Nilai	93,41	60,00	60,00	65,00	65,00	70,00	70,00	Disperpus Arsip
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Nilai	2,90	20,00	20,00	25,00	25,00	30,00	30,00	Disperpus Arsip
Y	**Kelautan dan Perikanan**									
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	86.734,46	93.794,00	100.849,00	107.360,00	114.541,00	122.558,00	128.835,00	Dinas Perikanan
Z	**Pariwisata**									
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	persen	33	35	38	40	42	45	48	Disbudporapar dan Bapenda

No.	Indikator	Satuan	Base line (2024)	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota;	persen	3,5	3,7	3,9	4	4,2	4,4	4,6	Disbudporapar dan Bapenda
3	Tingkat hunian akomodasi;	persen	0,22	0,25	0,28	0,3	0,32	0,34	0.36	Disbudporapar dan Bapenda
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	persen	2,43	2,50	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	Disbudporapar dan Bapenda
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	persen	7,61	7,80	8,00	8,20	8,40	8,60	8,80	Disbudporapar dan Bapenda
AA	**Pertanian**									
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Persen	695,51	669,22	674,85	679,97	693,00	697,14	707,41	Dinas Pertanian
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	Dinas Pertanian
AB	**Perdagangan**									
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan);	Persen	60,00	60,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	Disperindag
2	Persentase kinerja realisasi pupuk;	Persen	75,80							Disperindag

No.	Indikator	Satuan	Base line (2024)	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku;	Persen	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	Disperindag
AC	**Perindustrian**									
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota;	IKM	19106	4510	5412	6495	7794	9352	11223	Disperindag
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persen	0	100	100	100	100	100	100	Disperindag
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	56	56	65	70	75	80	85	Disperindag
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait;	Persen	56	56	65	70	75	80	85	Disperindag

No.	Indikator	Satuan	Base line (2024)	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota;	Persen	56	56	65	70	75	80	85	Disperindag
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini;	Persen	70	70	70	70	70	70	70	Disperindag
AD	**Perencanaan dan Keuangan**									
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan;	Persen	18,83	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	BKAD
2	Rasio PAD	Persen	27,01	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	BKAD
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3,012	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	Inspektorat
4	Kapabilitas AparatPengawasan Intern Pemerintah(APIP)	Level	3,27	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	Inspektorat
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	63,07	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	BKAD
6	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BKAD
AE	**Pengadaan**									

No.	Indikator	Satuan	Base line (2024)	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	4,8	4,9	5	5,4	5,2	5,8	5,9	Sekretariat Daerah
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	9,52	15,00	18,00	20,00	21,00	25,00	28,00	Sekretariat Daerah
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Daerah	Persen	-9,4	-7,4	-5,4	-3,4	-1,4	0,6	2,6	Sekretariat Daerah
AF	**Kepegawaian**									
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	90,14	91,14	92,14	93,14	94,14	95,14	96,14	BKPSDM
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	10,65	12,65	14,65	16,65	18,65	20,65	22,65	BKPSDM

No.	Indikator	Satuan	Base line (2024)	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	13,65	16,65	19,65	22,65	25,65	28,65	31,65	BKPSDM
AG	**Manajemen Keuangan**									
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	11,22	10,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	BKAD
2	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	30,13	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	BKAD
3	Manajemen Aset	Poin	4	4	4	4	4	4	4	BKAD
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	4,65	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	BKAD

BAB V
PENUTUP

5.1. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman bagi seluruh proses pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun mendatang yang penyusunannya menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah (top-down), maupun bawah-atas (bottom-up). RPJMD juga merupakan dokumen operasional lima tahunan yang menjabarkan visi dan misi kepala daerah ke dalam sasaran dan program yang terukur yang menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan. Sebagai pedoman, dokumen ini tidak hanya memberikan arahan bagi pemerintah daerah tetapi juga menjadi acuan bersama bagi seluruh masyarakat Deli Serdang untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan sesuai dengan kapasitas dan peran masing-masing. Dokumen ini dirancang dengan memperhatikan prinsip-prinsip pokok pelaksanaan yang mencakup aspek konsistensi antara perencanaan dan pendanaan, kerangka pengendalian yang efektif, sistem insentif yang mendorong partisipasi, serta mekanisme perubahan yang adaptif. Keempat elemen ini berfungsi sebagai instrumen pengaman yang menjamin seluruh proses pembangunan tetap berada pada rel yang tepat untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi panduan operasional yang hidup dan dinamis. Dokumen ini tidak hanya sekadar menjadi acuan formal, tetapi diharapkan dapat menggerakkan seluruh potensi daerah untuk bersama-sama guna “Terwujudnya Deli Serdang Sehat, Cerdas, Sejahtera, Religius dan Berkelanjutan”. Proses pembangunan yang dilaksanakan selama lima tahun ke depan diharapkan dapat berjalan secara terarah, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. RPJMD juga bukan hanya sekadar dokumen administratif, melainkan panduan strategis yang

harus dilaksanakan dengan prinsip pemerintahan yang baik dengan memperhatikan efisiensi, efektivitas, keterpaduan antar-sektor dan antar-wilayah, partisipasi masyarakat, kapasitas fiskal, serta akuntabilitas.

Selanjutnya, sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2045 menjadi pertimbangan dalam menentukan kinerja pembangunan Kabupaten Deli Serdang pada RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 – 2029. Rekomendasi kinerja yang diberikan untuk menjawab keselarasan pembangunan antara RPJPD dan RPJMD Kabupaten Deli Serdang dirumuskan ke dalam sembilan rekomendasi kinerja yang diprioritaskan sebagai fokus pembangunan sampai dengan tahun 2029. Rekomendasi kinerja yang dimaksud merupakan manifestasi dari arah kebijakan yang diambil untuk mencapai sasaran pokok pembangunan.

1. Meningkatnya daya saing SDM

   Rekomendasi kinerja pembangunan daerah yang pertama adalah melalui pencapaian peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Deli Serdang. Pencapaian peningkatan daya saing SDM mencakup sepuluh arah kebijakan pembangunan RPJPD yang meliputi:

   a. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan menyiapkan layanan kesehatan prima
   b. Pemerataan kualitas SDM pada bidang pendidikan dan kesehatan
   c. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak sosial dan perlindungan sosial
   d. Pelatihan berbasis kompetensi pada pencara kerja berkolaborasi dengan stakeholder
   e. Pemerataan akses perempuan pada lapangan kerja
   f. Penyediaan SDM dan infrastruktur untuk regulasi yang berkeadilan
   g. Penyediaan SDM dan infrastruktur pemerintahan yang akuntabel
   h. Penyediaan infrastruktur dan SDM untuk layanan digital serta penataan kelembagaan
   i. Penanaman nilai-nilai budaya dan agama dalam lingkungan masyarakat

j. Penanaman nilai-nilai ketahanan keluarga berbasis pengarusutamaan gender

2. Terwujudnya perlindungan sosial yang merata dan tepat sasaran

Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Deli Serdang perlu mewujudkan perlindungan sosial yang merata dan tepat sasaran. Perlindungan sosial mencakup tiga arah kebijakan RPJPD dalam pembangunan Kabupaten Deli Serdang, meliputi:

a. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan menyiapkan layanan kesehatan prima
b. Pemerataan kualitas SDM pada bidang pendidikan dan kesehatan
c. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak sosial dan perlindungan sosial

3. Meningkatnya peran industri pengolahan, pariwisata, dan ekonomi kreatif

Kabupaten Deli Serdang sebagai salah satu koridor industri di Sumatera Utara memerlukan pencapaian dalam pengembangan pusat-pusat pertumbuhan daerah. Sebagaimana tertuang dalam RPJPD, Kabupaten Deli Serdang memiliki peran dalam pengembangan pusat pertumbuhan melalui industri pengolahan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam upaya mewujudkan pusat pertumbuhan tersebut, maka diperlukan kinerja untuk meningkatkan peran industri pengolahan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Rekomendasi kinerja ini selaras dengan sembilan arah kebijakan pada RPJPD Kabupaten Deli Serdang, meliputi:

a. Pembangunan pelaku industri dan klasterisasi produk industri pengolahan unggulan
b. Pembangunan sarana dan prasarana destinasi wisata
c. Penguatan sumber daya UMKM dan koperasi, serta BUMD yang berkualitas
d. Penguatan kebijakan industri yang ramah lingkungan
e. Pembangunan infrastruktur digital
f. Penguatan standarisasi sektor-sektor ekonomi unggulan yang berdaya saing tinggi
g. Pembangunan sarana prasarana dan penguatan kebijakan pemerintah yang menunjang pengembangan ekonomi inklusif
h. Penguatan komitmen seluruh stakeholder dalam peningkatan PAD

i. Penguatan fungsi dasar dalam mebangun kemandirian fiskal daerah

4. Terwujudnya Transformasi digital yang inklusif

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berupaya untuk mewujudkan Deli Serdang yang Maju, salah satunya melalui adaptasi dan transformasi digital dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini diperlukan kinerja Kabupaten Deli Serdang yang mewujudkan tranformasi digital yang inklusif. Rekomendasi kinerja ini mewujudkan sembilan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut:

a. Penguatan sumber daya UMKM dan koperasi, serta BUMD yang berkualitas
b. Penataan daya dukung organisasi dan kerangka regulasi inovasi
c. Pembangunan infrastruktur digital
d. Penguatan standarisasi sektor-sektor ekonomi unggulan yang berdaya saing tinggi
e. Pembangunan sarana prasarana dan penguatan kebijakan pemerintah yang menunjang pengembangan ekonomi inklusif
f. Membangun infrastruktur dasar, seperti jalan, listrik, dan air bersih untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat desa
g. Penyediaan SDM dan infrastruktur pemerintahan yang akuntabel
h. Penyediaan infrastruktur dan SDM untuk layanan digital serta penataan kelembagaan
i. Pemerataan akses pelayanan publik

5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif

Kabupaten Deli Serdang berupaya untuk mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan. Kabupaten Deli Serdang secara berkala berupaya untuk mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada seluruh lapisan masyarakat. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, perlu disusun rekomendasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif. Rekomendasi kinerja ini diselaraskan terhadap empat arah kebijakan RPJPD, meliputi:

a. Penyediaan SDM dan infrastruktur untuk regulasi yang berkeadilan

b. Penyediaan SDM dan infrastruktur pemerintahan yang akuntabel
c. Penyediaan infrastruktur dan SDM untuk layanan digital serta penataan kelembagaan
d. Pemerataan akses pelayanan publik

6. Terciptanya ketahanan sosial yang berkeadilan dan berbudaya

Kabupaten Deli Serdang dalam penyelenggaraan pembangunan juga berupaya untuk mewujudkan tranformasi ketahanan sosial, budaya dan ekologi. Amanat RPJPN mengarahkan Kabupaten Deli Serdang untuk mendukung penguatan ketahanan pangan daerah dan nasional melalui upaya peningkatan produktivitas padi dan pangan nabati lainnya di Sumatra Utara. Ketahanan sosial mencerminkan ketangguhan dalam perlindungan sosial dan pangan di Kabupaten Deli Serdang. Rekomendasi kebijakan ini mencakup lima arah kebijakan RPJPD, meliputi:

a. Pemerataan akses perempuan pada lapangan kerja
b. Mendukung penegakan hukum yang berkeadilan dan memberdayakan masyarakat melalui program-program kesadaran untuk mengurangi tingkat kejahatan dan mewujudkan trantibumlinmas
c. Penanaman nilai-nilai budaya dan agama dalam lingkungan masyarakat
d. Penanaman nilai-nilai ketahanan keluarga berbasis pengarusutamaan gender
e. Peningkatan produksi akses keterjangkauan pangan serta sarana dan prasarana pendukung pangan

7. Terciptanya infrastruktur yang tangguh dan berwawasan lingkungan

Dalam upaya mewujudkan keselarasan arah kebijakan pembangunan RPJPN dan RPJPD Kabupaten Deli Serdang periode pertama, Kabupaten Deli Serdang perlu mendukung perkuatan fondasi transformasi. Salah satu unsur yang harus diperhatikan adalah infrastruktur yang tangguh dan berwawasan lingkungan. Permasalahan utama di Provinsi Sumatera Utara serta Kabupaten Deli Serdang adalah konektivitas infrastruktur yang belum optimal. Oleh karena itu diperlukan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang memastikan terciptanya pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berwawasan lingkungan. Rekomendasi kinerja ini menyasar

sebelas arah kebijakan RPJPD Kabupaten Deli Serdang, meliputi:

a. Pembangunan sarana dan prasarana destinasi wisata
b. Penguatan kebijakan industri yang ramah lingkungan
c. Pembangunan infrastruktur digital
d. Penguatan standarisasi sektor-sektor ekonomi unggulan yang berdaya saing tinggi
e. Pembangunan sarana prasarana dan penguatan kebijakan pemerintah yang menunjang pengembangan ekonomi inklusif
f. Pengentasan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni
g. Membangun infrasturktur dasar, seperti jalan, listrik, dan air bersih untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat desa
h. Pembangunan sistem pengolahan persampahan dan sanitasi layak
i. Peningkatan produksi akses keterjangkauan pangan serta sarana dan prasarana pendukung pangan
j. Penguatan infrastruktur air yang merata
k. Pembangunan sarana dan prasarana pencegahan bencana

8. Terwujudnya perekonomian yang stabil

Kabupaten Deli Serdang juga berupaya mewujudkan transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi dilakukan dengan megoptimalkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Deli Serdang perlu merumuskan kinerja untuk mewujudkan perekonomian yang stabil. Rekomendasi kinerja ini menargetkan pencapaian empat arah kebijakan RPJPD sebagai berikut:

a. Penguatan standarisasi sektor-sektor ekonomi unggulan yang berdaya saing tinggi
b. Pembangunan sarana prasarana dan penguatan kebijakan pemerintah yang menunjang pengembangan ekonomi inklusif
c. Penguatan komitmen seluruh stakeholder dalam peningkatan PAD
d. Penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi

9. Terwujudnya pemerataan pembangunan wilayah

Kabupaten Deli Serdang berupaya untuk melaksanakan pembangunan yang inklusif, merata kepada seluruh lapisan

masyarakat. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan perlu memastikan konsistensi dalam pembangunan daerah yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Deli Serdang. Perencanaan pembangunan harus tetap berpedoman kepada RTRW dan dilakukan menyeluruh sehingga tidak ada lagi wilayah yang tertinggal karena permasalahan pembangunan. Perlu adanya rekomendasi kinerja yang memastikan terwujudnya pemerataan pembangunan wilayah di Kabupaten Deli Serdang. Rekomendasi kinerja ini mencakup enam arah kebijakan RPJPD Kabupaten Deli Serdang, meliputi:

a. Pengentasan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni
b. Membangun infrasturktur dasar, seperti jalan, listrik, dan air bersih untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat desa
c. Pembangunan sistem pengolahan persampahan dan sanitasi layak
d. Peningkatan produksi akses keterjangkauan pangan serta sarana dan prasarana pendukung pangan
e. Penguatan infrastruktur air yang merata
f. Pembangunan sarana dan prasarana pencegahan bencana

5.1.1. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

Kualitas suatu perencanaan pembangunan sangat ditentukan oleh konsistensi antar dokumen perencanaan dan keselarasannya dengan kebijakan pendanaan. Sinergi ini penting untuk memastikan tiga hal penting: 1) kesesuaian antara pelaksanaan dengan rencana; 2) ketersediaan sumber pendanaan yang memadai; dan 3) pemanfaatan anggaran yang optimal. Perencanaan yang terpadu dan berkualitas tidak hanya menjadi panduan operasional bagi pemerintah daerah, tetapi juga menjadi acuan bagi pelaku non-pemerintah dalam berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang tepat dan berorientasi hasil. Proses ini mencakup penentuan prioritas pembangunan hingga level teknis proyek dan output, serta pengawasan ketat terhadap implementasinya. Kunci keberhasilannya terletak pada pendekatan kolaboratif yang melibatkan partisipasi aktif seluruh pemangku

kepentingan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

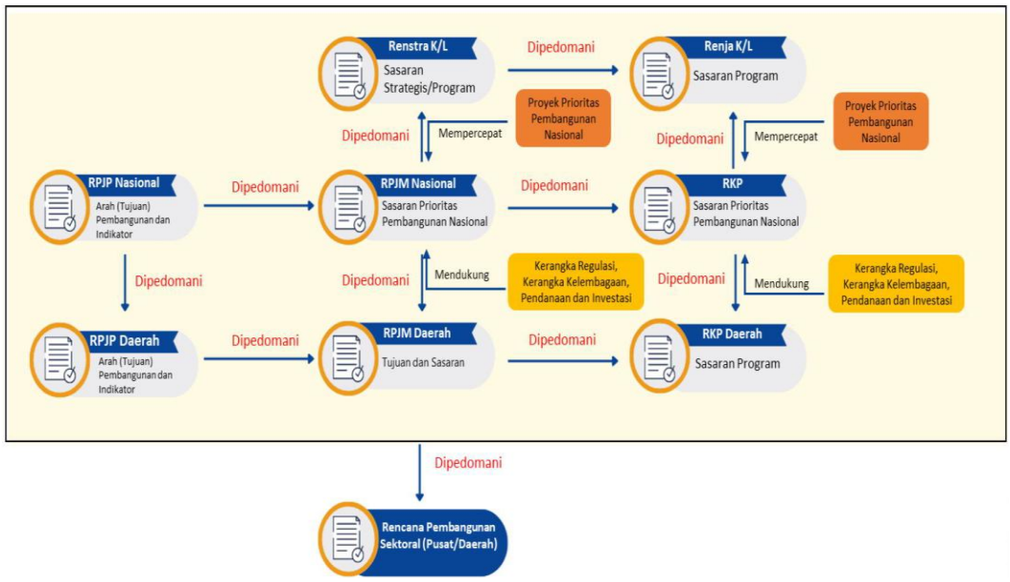
- Penguatan tata kelola perencanaan dilakukan melalui:
- Penyelarasan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD) dengan kebijakan fiskal
- Pengembangan sistem monitoring terintegrasi yang mencakup aspek perencanaan dan keuangan
- Pembentukan forum konsultasi multi-pihak untuk review dokumen perencanaan
- Penerapan prinsip-prinsip evidence-based planning dengan dukungan data yang akurat

Perencanaan tidak hanya konsisten secara internal, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan pembangunan nyata di lapangan. Hasil akhir yang ingin dicapai adalah percepatan pembangunan daerah yang inklusif, efektif, dan berkelanjutan dengan pemanfaatan sumber daya yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Keterkaitan RPJMD Kabupaten Deli Serdang dengan Perencanaan Pembangunan Provinsi dan Pusat

RPJMD memiliki posisi tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah, menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya. Dokumen perencanaan pembangunan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), di tingkat daerah. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman bagi penyusunan anggaran pemerintah di tingkat daerah (APBD). Penekanan substansi RPJMD adalah berupa visi, misi, tujuan, sasaran, arah (tujuan) pembangunan dan indikator capaian tujuan pembangunan daerah dipedomani oleh RKPD untuk menyusun tujuan dan sasaran serta program pembangunan tahunan. Semua rencana pembangunan daerah tersebut memedomani rencana pembangunan di tingkat nasional atau pemerintah pusat yang mana RPJPD memedomani RPJPN, RPJM Daerah memedomani RPJMN, dan RKP Daerah memedomani RKP. Semua rencana sektoral memedomani rencana pembangunan daerah baik jangka panjang, menengah, dan pendek/tahunan. Keterkaitan dokumen-dokumen tersebut dapat diperlihatkan dalam gambar berikut.

Gambar 5. 1
Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan



Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas

Dalam rangka memedomani dokumen perencanaan di tingkat pusat dan provinsi terdapat beberapa hal yang diperhatikan antara lain:

1. RPJMD bersifat jangka menengah sehingga memberikan arah pembangunan jangka menengah dan khusus memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang mendukung visi misi RPJMN dan Visi Indonesia Emas 2045. RPJMD menjadi rencana strategis 5 tahunan daerah.
2. Penyusunan RPJMD seperti penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan indikator pembangunan memedomani arah (tujuan) pembangunan dan indikator yang tercantum dalam RPJMN dan RPJMD provinsi.
3. Tujuan dan sasaran pada RPJMD tingkat kabupaten berpedoman pada sasaran dan indikator prioritas pembangunan pada RPJM di tingkat provinsi dan nasional. Selain itu RPJMD tingkat kabupaten menjadi pedoman sasaran dan indikator prioritas pembangunan daerah pada RKP, serta sasaran dan indikator strategis/program pada rencana strategis organisasi perangkat daerah (OPD) tingkat kabupaten.
4. Sasaran dan indikator strategis/program Rencana Strategis (Renstra) OPD menjadi pedoman dalam menyusun sasaran dan indikator program pada Rencana Kerja (Renja) OPD, sedangkan tujuan dan sasaran pada RPJM Daerah menjadi pedoman bagi

pemerintah daerah dalam menyusun sasaran program RKP Daerah.

5. Sasaran program RKP Daerah berpedoman pada sasaran dan indikator prioritas pembangunan nasional pada RKP. RKP Daerah juga menjadi pedoman dalam menyusun sasaran dan indikator program Renja OPD. Indikator prioritas pembangunan daerah dilaksanakan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD yang pada gilirannya dipergunakan sebagai penilaian akuntabilitas kinerja OPD.

Pencapaian sasaran pembangunan daerah juga harus didukung dengan kebijakan kelembagaan, regulasi, serta pendanaan dan investasi. Sebagai upaya mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah juga ditentukan sasaran program pada RPJM Daerah dan RKP Daerah. Sasaran program daerah tersebut dilengkapi dengan ukuran keberhasilan yang mendukung tercapainya sasaran program pembangunan daerah.

Skema Pendanaan dan Penganggaran

Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam RPJPD, RPJM Daerah, dan RKP Daerah, perlu didukung dengan sinkronisasi perencanaan dan pendanaan pembangunan. Sebagai upaya menjamin pencapaian sasaran pembangunan daerah, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non-pemerintah secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Selain melakukan efisiensi dan peningkatan efektivitas dalam belanja, pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan pendanaan pembangunan yang bersumber dari TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa), Belanja K/L, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pembiayaan Utang Daerah, KPBU dan Non-APBN/APBD untuk penganggaran pencapaian prioritas pembangunan secara berkelanjutan.

5.1.2. Kerangka Pengendalian

Pengendalian bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada RPJMD. Untuk keberhasilan pencapaiannya, diperlukan pengendalian yang kontinu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan dan pengawasan sangat berperan untuk mengoordinir pengendalian, diantaranya melalui Rencana Aksi Tahunan, rapat pengendalian berkala, sistem informasi kinerja, dan laporan kinerja rutin guna memastikan bahwa pelaksanaan program dan capaian indikator dapat dimonitor dan dikoreksi secara berkala.

Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem elektronik terpadu juga diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti (evidence-based planning)..

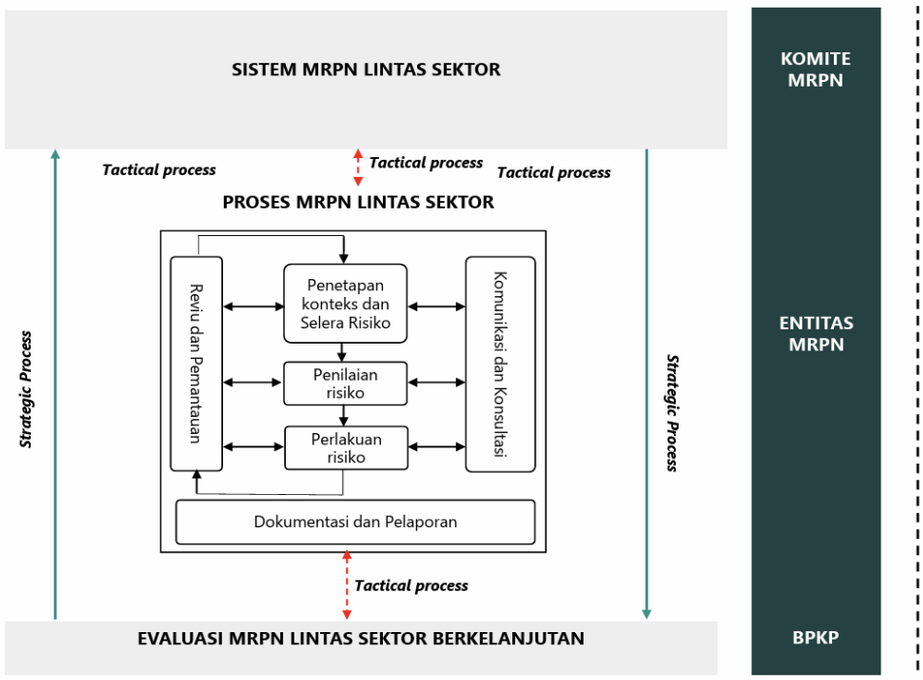
Terkait dengan manajemen risiko, manajemen risiko merujuk kepada Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN). MRPN adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan, mengendalikan dan mengelola risiko pada program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan dan/atau jenis risiko tertentu yang bersifat lintas sektor yang bertujuan untuk meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

MRPN mengolaborasikan eksisting Manajemen Risiko Organisasi ke dalam sebuah Pengendalian Manajemen Risiko Lintas Sektor yang secara lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023. Adapun Kerangka Kerja MRPN dapat dilihat pada gambar di bawah.

Sebagai salah satu entitas MRPN, pemerintah daerah perlu menerapkan MRPN sejak tahap perencanaan pembangunan daerah. Penerapan MRPN di daerah dilakukan dengan pembentukan komite manajemen risiko dan penyusunan kebijakan manajemen risiko. Proses yang dilakukan untuk menerapkan MRPN antara lain perencanaan kinerja prioritas pembangunan, penentuan objek dan

entitas MRPN, dan proses assessment risiko. Proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan dari manajemen risiko sangat diperlukan dalam meningkatkan probabilitas pencapaian tujuan dan mengurangi dampak merugikan pada suatu kejadian bagi entitas MRPN.

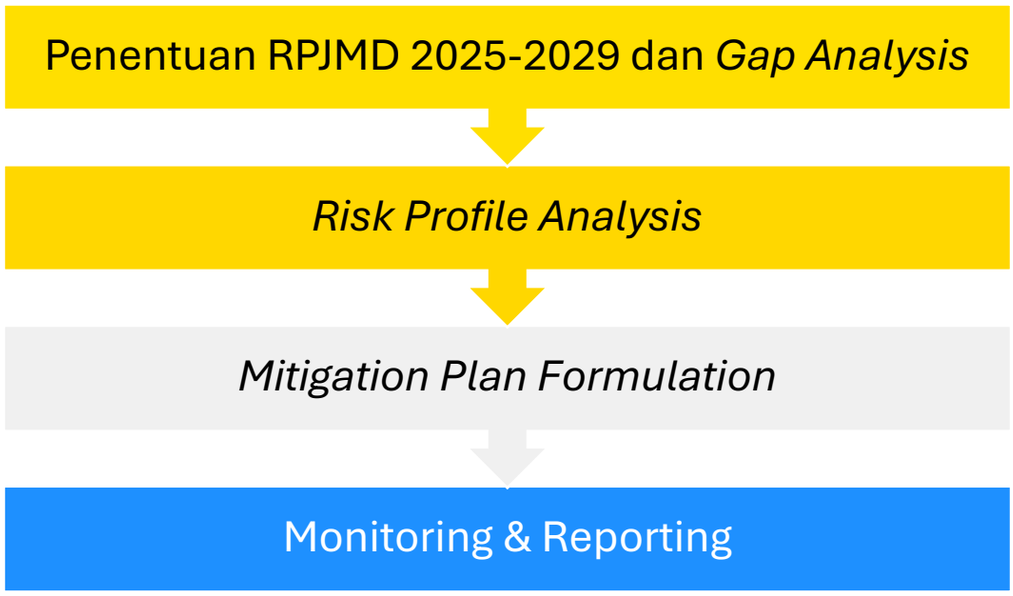
Gambar 5. 2
Kerangka Kerja MRPN



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029 harus berkesinambungan dengan perencanaan pembangunan jangka panjang antar periode, serta menjaga sinkronisasi periodisasi dan substansi yang mengacu pada RPJPD Kabupaten Deli Serdang, RPJMD Provinsi, dan RPJM Nasional. Langkah ini sangat penting dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari visi Indonesia Emas Tahun 2045. Dalam rangka percepatan pembangunan di berbagai sektor sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan, diperlukan tahapan dan integrasi manajemen risiko yang menyeluruh serta pembentukan dasar hukum yang memastikan integrasi tersebut dalam penyelenggaraan manajemen risiko. Tahapan manajemen risiko untuk membantu tercapainya target RPJMD dapat diperlihatkan dalam gambar berikut:

Gambar 5. 3
Tahapan Manajemen Risiko untuk Mencapai Target RPJMD



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas

Rincian penjelasan tahapan-tahapan dalam manajemen risiko di atas adalah berupa:

1. Penentuan RPJMD periode 2025-2029 dengan menetapkan arah kebijakan dan target yang akan dicapai sampai tahun 2029. Hal ini mencakup penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan jangka menengah yang diharapkan dapat membawa Kabupaten Deli Serdang menuju pencapaian visi Sehat, Cerdas, Sejahtera, Religius dan Berkelanjutan. Hal tersebut perlu dilakukan melalui *gap analysis* terhadap target yang telah ditetapkan dalam RPJMD periode sebelumnya. Analisis kesenjangan (*gap analysis*) merupakan metode sistematis untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian antara target pembangunan yang telah ditetapkan dengan realisasi capaian yang berhasil diwujudkan. Dalam penyusunan RPJMD, pendekatan ini berfungsi sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas perencanaan melalui beberapa tahapan kritis. Proses analisis diawali dengan pemetaan komprehensif terhadap berbagai indikator kinerja, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Data historis pencapaian pembangunan sebelumnya dibandingkan secara cermat dengan target yang ingin dicapai, sehingga dapat teridentifikasi area-area yang mengalami ketertinggalan. Analisis ini tidak hanya berfokus pada *outcome*,

tetapi juga mengevaluasi efektivitas proses implementasi, termasuk kendala struktural dan operasional yang dihadapi.

2. *Risk Profile Analysis* dilakukan dengan proses identifikasi dan asesmen risiko. Proses identifikasi risiko mencakup pengenalan dan penilaian terhadap berbagai potensi risiko yang mungkin timbul, baik dari internal maupun eksternal, yang dapat menghambat pencapaian target dalam RPJMD periode 2025-2029. Selanjutnya, dilakukan asesmen risiko untuk mengevaluasi kemungkinan terjadinya risiko (*likelihood*) dan dampak serius (*severity*) dari risiko-risiko yang telah diidentifikasi. Penilaian ini membantu untuk memahami tingkat urgensi dan tingkat risiko yang harus dihadapi, sehingga tindakan pencegahan dan mitigasi yang sesuai dapat diambil dalam penyusunan RPJMD.
3. Penyusunan Rencana Mitigasi (*Mitigation Plan Formulation*) yang dilakukan bersama dengan Kementerian/Lembaga/Daerah terkait dalam proses perumusan rencana mitigasi. Proses ini mencakup identifikasi risiko yang diprioritaskan untuk ditangani dan menetapkan jadwal yang jelas untuk pelaksanaan rencana mitigasi. Dengan demikian, rencana mitigasi dapat disusun secara sistematis dan efektif untuk mengatasi risiko yang dihadapi dalam penyusunan RPJMD periode 2025-2029.
4. Melakukan *monitoring* and *reporting* untuk memastikan bahwa implementasi RPJMD berjalan dengan baik, memungkinkan evaluasi berkala terhadap pencapaian target, serta memastikan partisipasi dan keterlibatan berbagai pihak dalam proses pembangunan daerah. Proses tersebut mencakup pemantauan secara internal terhadap implementasi RPJMD Kabupaten Deli Serdang periode 2025-2029 dan mengikutsertakan pihak eksternal, seperti lembaga pengawas, organisasi masyarakat, atau pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap pembangunan daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan RPJMD, sekaligus mendapatkan masukan yang diperlukan dari berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan implementasi RPJMD.

Adapun identifikasi risiko terhadap misi, tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan RPJMD Kabupaten Deli

Serdang Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Dalam mengidentifikasi manajemen risiko yang berfokus pada pencapaian Misi 1 ”**Sehat Pelayanan Publiknya**” terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus utama untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi, maka perlu dilakukan penyederhaan proses administrasi, mengurangi birokrasi yang berlebihan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Untuk menjamin akuntabilitas dan auditabilitas setiap kebijakan pemerintahan, prinsip transparansi dan akuntabilitas akan diimplementasikan secara konsisten. Peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi akan terus dilakukan guna memperkuat profesionalisme dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, sektor swasta, masyarakat sipil, komunitas dan media massa, akan diperkuat guna mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan. Selain itu, koordinasi antarlembaga pemerintah akan dioptimalkan untuk memastikan keselarasan dalam implementasi kebijakan dan program.

   Kualitas pelayanan publik merupakan indikator dari tata kelola pemerintahan yang efektif. Dalam rangka meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kenyamanan masyarakat, transformasi digital layanan publik akan terus dikembangkan dan diperluas. Standar pelayanan yang tinggi akan diterapkan secara konsisten untuk menjamin kesetaraan dan kualitas layanan bagi seluruh masyarakat. Keberadaan pusat layanan terpadu (one-stop service) juga akan diperkuat guna memfasilitasi akses masyarakat terhadap berbagai layanan pemerintah secara lebih mudah dan terintegrasi. Integritas dan supremasi hukum menjadi pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Penegakan hukum akan dilaksanakan secara adil dan transparan, didukung oleh penguatan program pencegahan korupsi serta pengawasan internal yang lebih efektif. Kebijakan yang responsif dan adaptif akan terus dikembangkan untuk menjawab dinamika kebutuhan masyarakat, sementara penguatan infrastruktur data akan

menjadi fondasi dalam pengambilan keputusan berbasis bukti. Partisipasi aktif masyarakat dan kolaborasi menjadi faktor kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Dalam mengidentifikasi manajemen risiko yang berfokus pada pencapaian Misi 2 ”**Sehat Masyarakatnya**” terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus utama untuk Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan kesetaraan kesempatan bagi seluruh masyarakat guna berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan nasional. Berbagai program dirancang untuk menjamin akses universal terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, serta pelatihan peningkatan kapeterampilan, tanpa diskriminasi berdasarkan gender, disabilitas, maupun status sosial.

   Sebagai agen perubahan masa depan, generasi muda akan memperoleh dukungan komprehensif untuk mengaktualisasikan potensi mereka di berbagai sektor strategis, mencakup pendidikan, kesehatan, dan inovasi teknologi. Pemberdayaan perempuan diwujudkan melalui inisiatif-inisiatif yang memfasilitasi partisipasi penuh dalam ranah ekonomi dan sosial. Prinsip pengarusutamaan gender akan menjadi landasan dalam perumusan seluruh kebijakan dan program pembangunan, dengan memastikan analisis dampak gender dan promosi kesetaraan menjadi pertimbangan utama dalam setiap proses pengambilan keputusan. Selain itu, penyandang disabilitas diberikan jaminan aksesibilitas inklusif untuk terlibat secara aktif dalam seluruh aspek kehidupan, mulai dari pendidikan hingga lapangan pekerjaan.

3. Dalam mengidentifikasi manajemen risiko yang berfokus pada pencapaian Misi 3 ”**Sehat Ekonominya**” terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus utama dalam upaya memperkuat stabilitas ekonomi dan mewujudkan pertumbuhan yang inklusif di Kabupaten Deli Serdang, diperlukan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan berbagai aspek pembangunan. Langkah strategis diawali dengan penguatan sektor produktif melalui pengembangan hilirisasi industri dan percepatan industrialisasi yang bertujuan meningkatkan nilai tambah produk lokal,

meningkatkan kewirausahaan daerah sekaligus menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas. Transformasi ekonomi daerah juga didorong melalui penguatan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi sebagai fondasi peningkatan produktivitas dan daya saing. Secara paralel, komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan diwujudkan melalui transisi energi dengan memanfaatkan potensi Energi Baru Terbarukan, serta penerapan prinsip-prinsip ekonomi hijau dan biru yang berkelanjutan.

Percepatan transformasi digital menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi dan membuka akses pasar yang lebih luas sekaligus memperkuat integrasi ekonomi domestik dengan rantai pasok global. Peningkatan produktivitas ekonomi dapat dicapai melalui strategi pemerataan pembangunan dan penguatan konektivitas antarwilayah. Pembangunan yang inklusif diwujudkan dengan mengembangkan kawasan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan keadilan sosial. Dalam proses ini, partisipasi aktif masyarakat memegang peran krusial, baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan berbagai proyek pembangunan.

Dukungan dari lembaga masyarakat dan riset juga menjadi faktor penting, terutama dalam menyediakan kajian berbasis data, pengembangan teknologi inovatif, serta penyelenggaraan program pelatihan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja. Potensi daerah dapat dikembangkan secara optimal, sekaligus menciptakan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah. Melalui pendekatan kolaboratif ini, diharapkan tercipta sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang tidak hanya produktif, tetapi juga inklusif dan berwawasan lingkungan.

Seluruh strategi ini dirancang untuk menciptakan dampak berantai berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan. Dengan pendekatan yang terintegrasi ini,

Kabupaten Deli Serdang berkomitmen untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya kuat dan stabil, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

4. Dalam mengidentifikasi manajemen risiko yang berfokus pada pencapaian Misi 4 ”**Sehat Lingkungannya**” terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus utama untuk mencapai program kerja melanjutkan kesinambungan pemerintah pusat dan daerah melalui Pembangunan infrastruktur yang berkualitas, estetis, dan ramah lingkungan membutuhkan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah pusat dan daerah memegang peran penting dalam menetapkan kebijakan yang mendukung, menyediakan anggaran yang memadai, serta memastikan koordinasi yang efektif antar jenjang pemerintahan. Sementara itu, keterlibatan sektor swasta melalui investasi dan inovasi teknologi menjadi katalisator untuk mempercepat realisasi proyek-proyek strategis. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, pendekatan holistik diterapkan dengan memadukan aspek ketangguhan fisik dan keharmonisan sosial. Infrastruktur dirancang dengan memperhatikan prinsip-prinsip tahan bencana dan adaptif terhadap perubahan iklim, didukung oleh peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana. Pelestarian lingkungan diwujudkan melalui pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan penerapan teknologi ramah lingkungan.

   Aspek sosial mendapat perhatian khusus melalui penguatan dialog antaragama dan pendidikan multikultural yang menumbuhkan toleransi. Partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi terus ditingkatkan untuk memperkuat tata kelola yang inklusif. Berbagai program pencegahan narkoba dan rehabilitasi terpadu dilaksanakan bersama dengan upaya penegakan hukum yang tegas namun proporsional. Melalui pendekatan terpadu ini, diharapkan tercipta lingkungan binaan yang tidak hanya fungsional dan estetis, tetapi juga tangguh menghadapi berbagai tantangan. Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkeadilan sosial pada akhirnya akan menciptakan ruang hidup yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi seluruh

masyarakat.

Dengan mengidentifikasi dan merancang strategi manajemen risiko yang tepat di setiap pencapaian misi tersebut, rencana pembangunan dalam jangka menengah dapat berjalan lebih efektif serta meminimalkan risiko yang mungkin ditimbulkan. Pengendalian RPJMD dilaksanakan melalui pengendalian jangka pendek (tahunan) yang hasilnya disampaikan kepada Kepala Daerah. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian pembangunan daerah terbagi menjadi dua bagian.

1. Pengendalian perencanaan

   Pengendalian pada tahap perencanaan memegang peran kritis dalam memastikan keselarasan dan konsistensi seluruh proses pembangunan. Fungsi utama mekanisme ini adalah untuk meningkatkan kualitas perencanaan melalui penyempurnaan desain program dan sasaran pembangunan daerah secara berkelanjutan. Selain itu, pengendalian ini juga berfungsi sebagai instrumen verifikasi terhadap ketersediaan dan kecukupan sumber pendanaan, baik yang bersumber dari APBD/APBN maupun dari mitra pembangunan non-pemerintah. Proses pengendalian ini dilaksanakan dengan berpedoman pada temuan-temuan evaluasi menyeluruh terhadap dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) dan jangka pendek (RKPD). Analisis komprehensif terhadap capaian dan tantangan dalam implementasi rencana pembangunan sebelumnya menjadi dasar untuk melakukan penyempurnaan berkelanjutan. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya proses perencanaan yang dinamis, responsif, dan mampu mengakomodasi berbagai perkembangan serta kebutuhan aktual di lapangan.

2. Pengendalian pelaksanaan

   Pengendalian pada tahap pelaksanaan berfungsi sebagai mekanisme penjaminan bahwa seluruh aktivitas pembangunan berjalan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan. Proses ini diimplementasikan melalui sistem pemantauan dan evaluasi (monev) berkelanjutan terhadap capaian kinerja pembangunan jangka pendek (tahunan). Mekanisme ini didukung oleh sistem pelaporan periodik yang memungkinkan pengambilan

keputusan korektif secara tepat waktu. Hasil evaluasi tahunan menjadi bahan pembelajaran untuk menyempurnakan siklus perencanaan berikutnya, sekaligus menjamin akuntabilitas kinerja pembangunan.

Efektivitas pengendalian pembangunan memerlukan landasan regulasi yang kuat dan komprehensif. Kerangka regulasi ini harus mampu menyinergikan berbagai aspek pengelolaan pembangunan, meliputi:

1. Sistem pemantauan dan evaluasi yang terstruktur
2. Mekanisme pengendalian yang responsif
3. Manajemen risiko pembangunan yang proaktif
4. Sistem manajemen kinerja yang terukur

Harmonisasi regulasi ini penting untuk menjamin keselarasan antara proses pengendalian dengan kinerja Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sinergi regulasi menjadi dasar penguatan sistem manajemen kinerja pemerintah yang efektif dan akuntabel.

Di sisi kelembagaan, diperlukan pembentukan struktur pengendalian yang komprehensif dengan ciri-ciri:

1. Fungsi Koordinasi Lintas Sektor yang mampu mengintegrasikan pengendalian vertikal (Pemerintah Pusat-Daerah) dan horizontal (antar-OPD)
2. Mekanisme Kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan
3. Sistem Pelaporan Terpadu berbasis teknologi informasi
4. Kapasitas Kelembagaan yang memadai dalam analisis dan pengambilan keputusan

Pengendalian pembangunan tersebut perlu didukung dengan tatanan regulasi agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Tatanan regulasi tersebut menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen risiko pembangunan, dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi diperlukan untuk konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja Pemerintah Daerah dan OPD terkait yang akan menjadi salah satu dasar pengaturan sistem manajemen kinerja pemerintah. Kerangka kelembagaan pengendalian yang komprehensif juga diperlukan agar pelaksanaannya dapat

berjalan dengan baik. Dalam hal ini, diperlukan kelembagaan pengendalian yang mengkoordinasikan pengendalian lintas dan internal Pemerintah Daerah dan OPD.

Selanjutnya, rincian evaluasi tahunan dan lima tahunan dijabarkan sebagai berikut:

Jadwal Evaluasi	Pelaksana	Metode Evaluasi	Output Evaluasi
Tahunan			
3 bulan sekali	Bappedalitbang (bersama akademisi) untuk seluruh proses evaluasi	1. Laporan dari seluruh OPD 2. Analisis gap antara target dengan Capaian IKU dan IKD 3.Survei Kepuasan Pelayanan Publik berdasarkan kinerja IKU dan atau IKD	Rekomendasi atas hasil evaluasi dan dibahas pada Rapat Koordinasi antar OPD. Hasil Evaluasi ditindaklanjuti pada RKPD tahun berjalan dan RKPD berikutnya.
Setiap tahun dan atau sewaktuwaktu dibutuhkan	Pemerintah Kabupaten dengan DPRD Kabupaten	Dengar Pendapat	Rekomendasi dari DPRD Kabupaten dan tindak lanjut oleh Pemerintah Kabupaten
5 Tahunan			
5 tahun sekali	Bappedalitbang (bersama akademisi) untuk seluruh proses evaluasi	1. Laporan 5 tahunan oleh seluruh OPD. 2. Analisis gap antara target dengan Capaian IKU dan IKD, yang dikaitkan dengan RPJPD Kabupaten 3.Survei Kepuasan Pelayanan Publik Berdasarkan kinerja IKU dan atau IKD	1. Rekomendasi atas hasil evaluasi dan dibahas pada Rapat Koordinasi antar OPD
	Pemerintah Kabupaten dengan DPRD	Dengar Pendapat	2. Sebagai Laporan Pertanggungjawaban Bupati di DPRD

Jadwal Evaluasi	Pelaksana	Metode Evaluasi	Output Evaluasi
	Kabupaten		Kabupaten
	Bappedalitbang dan Seluruh OPD	1. Laporan 5 tahunan oleh seluruh OPD. 2. Analisis gap antara target dengan Capaian IKU dan IKD, yang dikaitkan dengan RPJPD Kabupaten 3.Survei Kepuasan Pelayanan Publik Berdasarkan kinerja IKU dan atau IKD	3. Tindak lanjut untuk penyusunan RPJMD dan Renstra berikutnya

Proses pelaksanaan evaluasi kinerja RPJMD Kabupaten Deli Serdang, baik tahunan maupun di akhir RPJMD, dilakukan secara terpadu dan berkolaborasi dengan pihak akademisi yang ditunjuk serta diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang. Surat Keputusan tersebut memuat tentang pembentukan Tim Pengendali Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029. Dalam mencapai misi dan tujuan pembangunan, beberapa risiko strategis atas pelaksanaan program dan kegiatan telah dipetakan. Risiko yang muncul ke depan dapat bersumber dari anggaran, kualitas SDM, pemanfaatan waktu, dan proses koordinasi serta kolaborasi antar pihak.

5.1.3. Sistem Insentif

Keberhasilan pembangunan daerah secara menyeluruh membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh komponen masyarakat, baik unsur pemerintah maupun non-pemerintah. Kolaborasi yang sinergis antara pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga penelitian, akademisi, dan kelompok masyarakat menjadi kunci utama dalam mempercepat pencapaian sasaran pembangunan. Untuk mendorong partisipasi yang lebih luas dan bermakna, diperlukan sistem insentif yang dirancang secara khusus sesuai dengan karakteristik masing-

masing pelaku pembangunan. Bagi unsur pemerintah, sistem insentif dikembangkan secara terintegrasi dengan mekanisme manajemen kinerja dan penganggaran daerah. Pemberian insentif ini didasarkan pada capaian kinerja konkret yang meliputi berbagai aspek penting pembangunan, mulai dari konsistensi antara perencanaan dengan implementasi, keselarasan antara program dengan pendanaan, pencapaian indikator ekonomi makro, hingga realisasi program-program prioritas daerah. Pendekatan ini diharapkan dapat memacu semangat dan kinerja aparatur pemerintah dalam mewujudkan target pembangunan. Sementara untuk pelaku non-pemerintah, sistem insentif dikembangkan dalam bentuk yang lebih variatif dan aplikatif. Berbagai bentuk dukungan seperti kemudahan perizinan, fasilitas usaha, akses pendanaan, hingga penghargaan disiapkan untuk mendorong keterlibatan aktif sektor swasta dan masyarakat. Insentif ini dirancang untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi kontribusi nyata berbagai pihak dalam proses pembangunan.

Melalui pendekatan insentif yang terarah dan terukur ini diharapkan dapat tercipta sinergi yang kuat antara semua pemangku kepentingan. Sistem ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan partisipasi, tetapi juga menjamin bahwa setiap kontribusi dapat memberikan dampak nyata terhadap percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan daerah benar-benar dapat menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh potensi dan sumber daya yang ada di daerah.

5.1.4. Mekanisme Perubahan

Dalam menghadapi dinamika pembangunan yang kompleks, dokumen perencanaan daerah perlu dirancang dengan sifat adaptif yang memungkinkan penyesuaian terhadap berbagai faktor eksternal yang tidak terduga. Situasi force majeure seperti gejolak geopolitik global, fluktuasi ekonomi internasional, maupun bencana alam dapat berdampak signifikan terhadap pencapaian target pembangunan. Ketika terjadi penyimpangan yang material dari rencana awal sehingga target RPJMD menjadi tidak realistis untuk dicapai, mekanisme pemutakhiran melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah menjadi solusi penting. Proses revisi ini dilaksanakan berdasarkan

evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan pembangunan dan analisis kondisi aktual, memastikan bahwa target yang ditetapkan tetap relevan dan achievable meskipun dalam situasi yang berubah.

Untuk mendukung implementasi yang efektif, pemerintah daerah memanfaatkan transformasi digital melalui pengembangan sistem elektronik terpadu yang mencakup seluruh siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses bisnis, dan meningkatkan akurasi dalam pengambilan keputusan. Di sisi lain, penerapan tata kelola data yang kuat menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan. Dengan menggunakan data referensi yang terstandarisasi dan terintegrasi, pemerintah daerah dapat menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Kombinasi antara fleksibilitas perencanaan dan pemanfaatan teknologi digital ini menciptakan ekosistem pembangunan daerah yang lebih tangguh, responsif, dan berbasis bukti. Pendekatan ini tidak hanya memastikan kelancaran pelaksanaan RPJMD 2025-2029, tetapi juga meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam merespon berbagai tantangan yang mungkin muncul selama periode pembangunan.

5.1.5. Komunikasi Publik

Komunikasi publik yang efektif merupakan tulang punggung pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Dalam konteks RPJMD 2025-2029, pendekatan komunikasi tidak sekadar bersifat informatif, melainkan dirancang untuk membangun dialog konstruktif antara pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat. Prinsip "no one left behind" menjadi landasan utama, dengan memastikan setiap suara dapat didengar dan setiap kelompok mendapatkan akses yang setara terhadap informasi pembangunan. Terdapat tiga pilar utama dalam sistem komunikasi publik ini. Pertama, tata kelola komunikasi yang terstruktur dan profesional, memadukan koordinasi lintas sektor dengan inovasi penyampaian pesan. Kedua, penyediaan informasi yang akurat dan mudah diakses, disajikan dalam format yang menarik serta tepat waktu. Ketiga, pendekatan partisipatif berbasis data yang mempertimbangkan keragaman kebutuhan masyarakat.

Implementasinya dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi yang disesuaikan dengan karakteristik pemangku kepentingan. Forum OPD berfungsi sebagai ruang konsultasi teknis antar-perangkat daerah, sementara musyawarah berjenjang dari tingkat kabupaten hingga provinsi memastikan konsistensi kebijakan. Masyarakat luas, termasuk kelompok swasta, akademisi, media, dan kelompok rentan dilibatkan melalui metode komunikasi yang inklusif dan mudah dipahami. Tujuan dari seluruh pendekatan ini adalah menciptakan pemerintahan yang benar-benar terbuka, di mana setiap kebijakan pembangunan dapat dipahami dengan jelas oleh publik dan setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi. Dengan demikian, komunikasi publik tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga media untuk memperkuat akuntabilitas dan kualitas pembangunan daerah secara keseluruhan.

5.2. Pembiayaan Pembangunan

Pencapaian visi Deli Serdang sebagai wilayah yang sehat, cerdas, sejahtera, religius, dan berkelanjutan membutuhkan penguatan kapasitas pembiayaan melalui pendekatan inovatif dan kolaboratif. Strategi pembiayaan ini dirancang secara komprehensif, mencakup optimalisasi sektor publik maupun non-publik, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Penguatan Pembiayaan Sektor Publik dilaksanakan melalui lima strategi utama. Pertama, penguatan perencanaan pembiayaan meliputi penataan regulasi daerah, pembentukan kelembagaan yang adaptif, serta pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis. Kedua, pengembangan kerja sama bilateral dan multilateral untuk mendapatkan pembiayaan inovatif dengan syarat menguntungkan. Ketiga, optimalisasi kerjasama pemerintah dan badan usaha melalui penyempurnaan aspek regulasi dan tata kelola. Keempat, penerapan skema pembiayaan yang mendukung pemberdayaan industri lokal dan UMKM. Kelima, optimalisasi pemanfaatan aset daerah melalui berbagai mekanisme seperti daur ulang aset dan penangkapan nilai aset. Pengembangan Pembiayaan Sektor Non-Publik dilakukan dengan memanfaatkan berbagai instrumen inovatif. Pendekatan ini mencakup pemanfaatan dana pensiun dan pasar modal, pengembangan produk pembiayaan syariah, inovasi pembiayaan hijau

dan biru, serta penguatan blended financing yang memadukan berbagai sumber dana. Skema pembiayaan berbasis transaksi seperti bursa karbon dan plastik juga dikembangkan untuk merespon isu perubahan iklim.

Untuk memastikan efektivitas pembiayaan, penguatan manajemen investasi menjadi faktor krusial. Langkah-langkah strategis meliputi penyempurnaan proses identifikasi dan penilaian proyek, modernisasi sistem pemantauan, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas. Pelibatan sektor swasta dan masyarakat dalam siklus investasi publik juga menjadi perhatian utama, didukung oleh penyempurnaan kerangka regulasi dan peningkatan kapasitas SDM. Melalui pendekatan terpadu ini, Kabupaten Deli Serdang membangun ekosistem pembiayaan yang kuat dan berkelanjutan, sekaligus menciptakan sinergi optimal antara sektor publik dan non-publik dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.

5.3. Kesimpulan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dokumen RPJMD menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran pokok dan arah kebijakan daerah serta indikator kinerja dan program prioritas selama kurun waktu 5 tahun yang menjawab tantangan permasalahan serta isu-isu strategis daerah sehingga dapat dicapai visi yang telah dirumuskan. Dokumen ini menjadi acuan untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Deli Serdang dengan periodisasi tahunan. RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang berperan penting dalam keberhasilan pembangunan jangka menengah Kabupaten Deli Serdang untuk pencapaian visi dan misi daerah yaitu: “Terwujudnya Deli Serdang Sehat, Cerdas, Sejahtera, Religius dan Berkelanjutan”. Keberhasilan tersebut perlu didukung oleh:

1. komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis;
2. konsistensi kebijakan pemerintah dan daerah;
3. keberpihakan pembangunan kepada masyarakat; dan

4. peran serta aktif segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Deli Serdang; serta
5. dalam rangka menjaga keseimbangan pembangunan dan menjaga kesinambungan rencana.

Keberhasilan dalam mewujudkan visi Deli Serdang Sehat, Cerdas, Sejahtera, Religius, dan Berkelanjutan membutuhkan kolaborasi nyata dari seluruh komponen masyarakat. Dukungan politik, kesungguhan dalam pelaksanaan, rasa tanggung jawab kolektif, serta semangat gotong royong harus menjadi fondasi gerakan pembangunan daerah. Setiap pihak mulai dari pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dunia usaha, akademisi hingga kelompok agama dan pemuda diharapkan dapat berperan aktif dengan komitmen penuh. Sinergi ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi harus diwujudkan dalam aksi nyata, baik melalui program pembangunan, pengawasan partisipatif, maupun inisiatif-inisiatif lokal yang mendorong kemajuan. Terwujudnya visi dan misi pembangunan tersebut diharapkan dapat mendukung perwujudan visi pembangunan Indonesia Emas 2045.